PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



LAPORAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KLHS RPJMD

KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2025 - 2029

TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

KOTA BALIKPAPAN| 2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2025 - 2029

Disusun oleh :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ruhui Rahayu 1 Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Kalimantan Timur 76115 Telp. (0542) 421500

PERINGATAN

Dokumen KLHS untuk RPJMD Kota Balikpapan disusun berdasarkan data dan informasi yang didapatkan pada saat kajian ini disusun Tahun 2023 (data 2022 dan 2023). Meskipun upaya optimal telah dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan data terkini yang tersedia saat ini, perlu dipahami bahwa data dan informasi perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada waktu mendatang (masa depan).

Laporan ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak dan didistribusikan pada beberapa OPD terkait di Kota Balikpapan. Laporan KLHS ini milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, untuk reproduksi atau penggunaan, pemanfaatan oleh pihak lain dipersilahkan menghubungi Kepala Dinas / Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.



KATA PENGANTAR

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 (ayat 1) Undang – Undang RI nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam proses penyusunannya, seluruh konten muatan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Adapun subtansi dari Laporan Akhir KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB 2 : DASAR TEORI

BAB 3 : KONDISI UMUM KOTA BALIKPAPAN

BAB 4 : ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BAB 5 : ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

BAB 6 : ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

BAB 7 : KESIMPULAN

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta didalam Penyusunan Laporan Akhir KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 dari awal hingga akhir, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Aamiin

Tim Penyusun

2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1-2
1.2 DASAR HUKUM 1-9
1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1-10
1.4 RUANG LINGKUP 1-11
1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN KLHS 1-12
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 1-7

BAB 2 DASAR TEORI

2.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) 2-2
2.1.1 Dasar Hukum KLHS 2-2
2.1.2 Pelaksanaan KLHS 2-3
2.1.3 Prinsip Penyelenggaraan KLHS 2-3
2.1.4 Mekanisme Penyelenggaraan KLHS 2-3
2.1.5 Muatan Analisis dalam KLHS RPJMD 2-4
2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2-5
2.2.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah 2-6
2.2.2 Tata Cara Penyusunan RPJMD 2-6
2.3 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) 2-7
2.4 EKOREGION DAN 6 MUATAN KLHS 2-9
2.4.1 Ekoregion 2-9
2.4.2 Dasar Teori 6 Kajian Muatan KLHS 2-11
2.4.3 Metode Analisis 2-16

2.5 SEJARAH KOTA BALIKPAPAN 2-27
2.6 PERKEMBANGAN AKTIVITAS WILAYAH 2-33
2.6.1 Dasar Teori Pengembangan Wilayah 2-33
2.6.2 Arahan Perkembangan Aktivitas Wilayah Menurut Dokumen Pembangunan dan Spasial 2-35
2.6.2.1 RPJP Nasional Tahun 2025-2045 2-35
2.6.2.2 RPJM Nasional Tahun 2025-2029 2-38
2.6.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) 2-38
2.6.2.4 Penetapan Ibukota Nusantara (IKN) 2-39
2.6.2.5 RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2-42
2.6.2.6 RTRW Kota Balikpapan 2-46
2.7 KEBIJAKAN FOLU NET SINK 2030 DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2-51

BAB 3 KONDISI UMUM KOTA BALIKPAPAN

3.1 GEOGRAFIS KOTA BALIKPAPAN 3-2
3.1.1 Administrasi Kota Balikpapan 3-2
3.1.2 Kondisi Fisik Lingkungan Kota Balikpapan 3-5
3.1.2.1 Topografi dan Kemiringan Lereng 3-5
3.1.2.2 Jenis Tanah 3-10
3.1.2.3 Geomorfologi 3-15
3.1.2.4 Geologi 3-15
3.1.2.5 Kondisi Hidrologi dan Sumber Air Baku 3-19
3.1.2.6 Klimatologi 3-28
3.1.2.7 Rawan Bencana 3-34
3.1.2.8 Kondisi Fisik Pantai 3-48
3.1.2.9 Penggunaan Lahan dan Pertanahan 3-50
3.1.3 Kondisi Sosial dan Kependudukan 3-59
3.1.4 Kondisi Ekonomi 3-66
3.2 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP 3-68
3.2.1 Wilayah Fungsional (Batas Ekologis) 3-68
3.2.2 Kondisi Ekoregion di Kota Balikpapan 3-72
3.2.3 Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup 3-77
3.2.4 Kinerja Layanan Jasa Lingkungan 3-87
3.2.5 Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan Hidup 3-97
3.2.6 Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim 3-108
3.2.7 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 3-122

3.2.8 Keanekaragaman Hayati 3-126
3.2.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 3-130
3.3 GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH 3-132
3.3.1 Kinerja Keuangan Kota Balikpapan 3-132
3.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 3-136
3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3-136
3.4.2 Infrastruktur Wilayah 3-139
3.5 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN 3-154

BAB 4 ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1 PENAPISAN INDIKATOR TPB DI KOTA BALIKPAPAN 4-3
4.2 CAPAIAN TARGET INDIKATOR TPB BERDASARKAN PILAR 4-7
4.2.1 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial 4-7
4.2.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi 4-7
4.2.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup 4-8
4.2.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola 4-9
4.3 RUMUSAN ISU STRATEGIS DI KOTA BALIKPAPAN 4-9
4.3.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis 4-9
4.3.1.1 Gap Capaian TPB 4-10
4.3.1.2 Telahaan Dokumen Strategis 4-16
4.3.1.3 Isu Muatan Kondisi Lingkungan Hidup 4-24
4.3.2 Pemeringkatan Isu 4-25
4.3.3 Analisis Gap Terhadap Pencapaian TPB 4-35

BAB 5 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

5.1 CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI 5-2
5.1.1 Sekretariat Daerah 5-7
5.1.2 Dinas Pekerjaan Umum 5-8
5.1.3 Dinas Perumahan Dan Permukiman 5-10
5.1.4 Dinas Lingkungan Hidup 5-11
5.1.5 Dinas Sosial 5-13
5.1.6 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 5-14
5.1.7 Dinas Kesehatan 5-17
5.1.8 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan 5-21
5.1.9 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata 5-22
5.1.10 Dinas Pendidikan 5-23

5.1.11 Dinas Ketenagakerjaan 5-25
5.1.12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 5-27
5.1.13 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 5-29
5.1.14 Dinas Perhubungan 5-30
5.1.15 Dinas Koperasi Umkm Dan Perindustrian 5-31
5.1.16 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan 5-32
5.1.17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5-33
5.1.18 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 5-35
5.1.19 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 5-37
5.1.20 Inspektorat 5-38
5.1.21 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 5-39
5.1.22 Badan Pusat Statistik 5-40
5.1.23 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung 5-41
5.1.24 Perusahaan Listrik Negara 5-42
5.2 PERAN PARA PIHAK KOTA BALIKPAPAN 5-43

BAB 6 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1 ALTERANTIF SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN. 6-3
6.1.1 Skenario Pencapaian Target TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 6-3
6.1.2 Skenario Pencapaian Target TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim 6-9
6.1.3 Skenario Pencapaian Target TPB 1 Tanpa Kemiskinan 6-12
6.1.4 Skenario Pencapaian Target TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan . 6-18
6.1.5 Skenario Pencapaian Target TPB 2 Tanpa Kelaparan 6-24
6.1.6 Skenario Pencapaian Target TPB 14 Ekosistem Laut 6-30
6.1.7 Skenario Pencapaian Target TPB 15 Ekosistem Darat 6-34
6.2 REKOMENDASI BERDASARKAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN 6-41
6.2.1 Rekomendasi TPB Yang Berkaitan Dengan Isu Strategis 6-41
6.2.2 Rekomendasi TPB Yang Tidak Berkaitan Dengan Isu Strategis 6-64

BAB 7 KESIMPULAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

BAB 1

Tabel I.1 Kronolologis Penyusunan KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 1-14

BAB 2

Tabel II.1 Klasifikasi Jasa Lingkungan 2-13
Tabel II.2 Arah dan Transformasi Pembangunan RPJPN Tahun 2025 - 2045 2-36
Tabel II.3 Arahan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2-52

BAB 3

Tabel III.1 Batas Wilayah Kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara 3-2
Tabel III.2 Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan 3-3
Tabel III.3 Ketinggian Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan 3-5
Tabel III.4 Luas Wilayah Berdasarkan Kelerengan Dirinci Per Kelurahan di Kota Balikpapan 3-6
Tabel III.5 Luas Wilayah Berdasarkan Morfologi Per Kelurahan di Kota Balikpapan 3-7
Tabel III.6 Jenis Tanah di Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2021 3-11
Tabel III.7 Klasifikasi Jenis Tanah di Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2021 3-13
Tabel III.8 Luas Wilayah Kota Balikpapan Menurut Jenis Batuan 3-18
Tabel III.9 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Dirinci Per Kelurahan Di Kota Balikpapan 3-18
Tabel III.10 DAS WS Mahakam 3-24
Tabel III.11 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan 3-24
Tabel III.12 Kualitas Air Sungai Berdasarkan Hasil Indeks Pencemaran di 19 Sungai di Kota Balikpapan Tahun 2022 3-25
Tabel III.13 Daerah Irigasi (D.I) di Kota Balikpapan 3-26
Tabel III.14 Waduk dan Embung di Kota Balikpapan Yang Termasuk WS Mahakam 3-28
Tabel III.15 Suhu Udara Kota Balikpapan Tahun 2019-2022 (0C) 3-30
Tabel III.16 Kelembaban Udara Kota Balikpapan Tahun 2019-2022 (%) 3-33
Tabel III.17 Kualitas Udara Berdasarkan Parameter di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022 3-33

Tabel III.18 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Banjirdi Kota Balikpapan 3-36
Tabel III.19 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Tanah Longsor di Kota Balikapan 3-38
Tabel III.20 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kota Balikpapan 3-40
Tabel III.21 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan 3-42
Tabel III.22 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan 3-44
Tabel III.23 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan 3-46
Tabel III.24 Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2020 3-51
Tabel III.25 Tutupan Lahan Berdasarkan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan Tahun 2020 3-53
Tabel III.26 Kawasan Cagar Budaya di Kota Balikpapan 3-55
Tabel III.27 Obyek Vital Nasional di Kota Balikpapan 3-58
Tabel III.28 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2016-2023 Berdasarkan Data Disdukcapil 3-60
Tabel III.29 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-60
Tabel III.30 Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2023 3-62
Tabel III.31 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2023 3-63
Tabel III.32 Skenario Persentase Penduduk IKN yang akan Tinggal di Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2045 3-65
Tabel III.33 Skenario Jumlah Penduduk IKN yang akan Tinggal di Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2045 3-65
Tabel III.34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Balikpapan 3-65
Tabel III.35 Kemiskinan di Kota Balikpapan 3-66
Tabel III.36 Kontribusi Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Kota Balikpapan Tahun 2012-2022 3-66
Tabel III.37 Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada di dalam Wilayah Fungsional KLHS RPJMD Kota Balikpapan 3-69
Tabel III.38 DAS Yang Berada di dalam Wilayah Fungsional KLHS RPJMD Kota Balikpapan 3-69
Tabel III.39 Bentang Alam Kota Balikpapan 3-72
Tabel III.40 Vegetasi Alami Kota Balikpapan 3-74
Tabel III.41 Ekoregion Kota Balikpapan 3-74
Tabel III.42 Luasan DDDLH Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-77
Tabel III.43 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-79
Tabel III.44 Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan dan Status Daya Dukung Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2029 3-79

Tabel III.45 Luasan DDDLH Air Bersih Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-83
Tabel III.46 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-83
Tabel III.47 Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan dan Status Daya Dukung Air Tahun 2029 3-87
Tabel III.48 Luasan Jasa Penyedia Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-89
Tabel III.49 Luasan Jasa Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-91
Tabel III.50 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-93
Tabel III.51 Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-95
Tabel III.52 Timbulan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-97
Tabel III.53 Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-100
Tabel III.54 Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-100
Tabel III.55 Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-103
Tabel III.56 Luasan Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-105
Tabel III.57 Luasan Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-105
Tabel III.58 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-108
Tabel III.59 Luasan SIDIK di Kota Balikpapan 3-110
Tabel III.60 Luasan Bahaya Karhutla di Kota Balikpapan 3-110
Tabel III.61 Luasan Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Balikpapan 3-113
Tabel III.62 Luasan Bahaya Longsor di Kota Balikpapan 3-113
Tabel III.63 Luasan Bahaya Banjir di Kota Balikpapan 3-116
Tabel III.64 Luasan Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan 3-116
Tabel III.65 Luasan Bahaya Kekeringan di Kota Balikpapan 3-119
Tabel III.66 Luasan Bahaya Multi Bencana di Kota Balikpapan 3-119
Tabel III.67 Luasan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pangan, Air dan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan 3-122
Tabel III.68 Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kota Balikpapan 3-130
Tabel III.69 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2019-2022 3-133
Tabel III.70 Prosentase Realiasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 - 2022 3-133
Tabel III.71 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenisnya (ribu rupiah), 2019–2023 3-134
Tabel III.72 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2019–2022 3-135

Tabel III.73 Laju Pertumbuhan PDR Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) di Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2023 3-137
Tabel III.74 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2023 Menurut Lapangan Usaha (Rupiah) 3-137
Tabel III.75 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Balikpapan Tahun 2022 3-139
Tabel III.76 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2022 3-140
Tabel III.77 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan di Kota Balikpapan Tahun 2022 3-141
Tabel III.78 Daftar Pusat Perbelanjaan di Kota Balikpapan, 2022 3-141
Tabel III.79 Daftar Nama Pasar Modern dan Tradisional Menurut Kecamatan, Tahun 2022 . 3-141
Tabel III.80 Terminal Khusus di Kota Balikpapan 3-147
Tabel III.81 Titik Banjir Kota Balikpapan 3-152
Tabel III.82 Jumlah Sampah Yang Masuk ke TPA Manggar Per Bulan di Kota Balikpapan Tahun 2022 3-154
Tabel III.83 Pemangku Kepentingan di Kota Balikpapan 3-155

BAB 4

Tabel IV.1 Capaian TPB di Kota Balikpapan 4-4
Tabel IV.2 Gap Capaian Masing – Masing TPB di Kota Balikpapan Tahun 2023 4-11
Tabel IV.3 Analisis Gap Capaian TPB di Kota Balikpapan 4-16
Tabel IV.4 Longlist Isu Pembangunan Berkelanjutan 4-22
Tabel IV.5 Analisis Crosscutting TPB dengan Isu Menurut Dokumen Strategis di Kota Balikpapan 4-23
Tabel IV.6 Analisis Crosscutting TPB dengan Isu Kondisi Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan 4-24
Tabel IV.7 Analisis Crosscutting Isu dengan 6 Kajian Muatan di Kota Balikpapan 4-25
Tabel IV.8 Identifikasi Isu Strategis PB di Kota Balikpapan 4-36
Tabel IV.9 Analisis Gap Kebijakan dan Strategi Pada RPJMD Terhadap TPB di Kota Balikpapan 4-39

BAB 5

Tabel V.1 Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD dirinci Per Pilar 5-2
Tabel V.2 Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD 5-4
Tabel V.3 Capaian Indikator TPB pada Setiap OPD 5-5
Tabel V.4 Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 5-7
Tabel V.5 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 5-9
Tabel V.6 Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 5-11

Tabel V.7 Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 5-12
Tabel V.8 Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan 5-13
Tabel V.9 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 5-15
Tabel V.10 Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 5-18
Tabel V.11 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan 5-21
Tabel V.12 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 5-23
Tabel V.13 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan 5-24
Tabel V.14 Capaian Indikator TPB pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan 5-26
Tabel V.15 Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan 5-28
Tabel V.16 Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5-29
Tabel V.17 Capaian Indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 5-31
Tabel V.18 Capaian Indikator TPB pada Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan 5-32
Tabel V.19 Capaian Indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5-33
Tabel V.20 Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan 5-34
Tabel V.21 Capaian Indikator TPB pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan 5-36
Tabel V.22 Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan 5-37
Tabel V.23 Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kota Balikpapan 5-38
Tabel V.24 Capaian Indikator TPB pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan 5-39
Tabel V.25 Capaian Indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan 5-40
Tabel V.26 Capaian Indikator TPB pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung 5-42
Tabel V.27 Capaian Indikator TPB pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) 5-43
Tabel V.28 Kinerja Keuangan Daerah Kota Balikpapan dalam Pencapaian Indikator TPB Dirinci Per OPD 5-44

BAB 6

Tabel VI.1 Analisis Gap TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kota Balikpapan 6-5
Tabel VI.2 Proyeksi Skenario TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kota Balikpapan 6-6
Tabel VI.3 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 di Kota Balikpapan 6-8

Tabel VI.4 Interaksi Keterkaitan TPB 6 dengan TPB 11, 1 dan 2 di Kota Balikpapan 6-9
Tabel VI.5 Analisis Gap TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim di Kota Balikpapan 6-11
Tabel VI.6 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 13 di Kota Balikpapan . 6-12
Tabel VI.7 Interaksi Keterkaitan TPB 13 dengan TPB 3 dan TPB 11 di Kota Balikpapan 6-12
Tabel VI.8 Analisis Gap TPB 1 Tanpa Kemiskinan di Kota Balikpapan 6-13
Tabel VI.9 Proyeksi Skenario TPB 1 Tanpa Kemiskinan di Kota Balikpapan 6-14
Tabel VI.10 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 1 di Kota Balikpapan 6-16
Tabel VI.11 Interaksi Keterkaitan TPB 1 dengan TPB 3, 4, 6 dan 11 di Kota Balikpapan 6-17
Tabel VI.12 Analisis Gap TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kota Balikpapan 6-20
Tabel VI.13 Proyeksi Skenario TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kota Balikpapan 6-21
Tabel VI.14 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 11 di Kota Balikpapan . 6-22
Tabel VI.15 Interaksi Keterkaitan TPB 11 dengan TPB 1, TPB 3 dan TPB 6 di Kota Balikpapan 6-24
Tabel VI.16 Analisis Gap TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan 6-25
Tabel VI.17 Proyeksi Skenario TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan 6-26
Tabel VI.18 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 2 di Kota Balikpapan 6-28
Tabel VI.19 Interaksi Keterkaitan TPB 2 dengan TPB 6 dan TPB 3 di Kota Balikpapan 6-30
Tabel VI.20 Analisis Gap TPB 14 Ekosistem Laut di Kota Balikpapan 6-32
Tabel VI.21 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 14 di Kota Balikpapan . 6-33
Tabel VI.22 Interaksi Keterkaitan TPB 14 dengan TPB 11 dan TPB 15 di Kota Balikpapan 6-34
Tabel VI.23 Analisis Gap TPB 15 Ekosistem Darat di Kota Balikpapan 6-38
Tabel VI.24 Proyeksi Skenario TPB 15 Ekosistem Darat di Kota Balikpapan 6-39
Tabel VI.25 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 15 di Kota Balikpapan . 6-40
Tabel VI.26 Interaksi Keterkaitan TPB 15 dengan TPB 11 dan TPB 14 di Kota Balikpapan 6-41
Tabel VI.27 Perumusan Rekomendasi TPB Yang Berkaitan Dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan 6-43
Tabel VI.28 Perumusan Arahan Kebijakan dan Program TPB Yang Berkaitan Dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan 6-48
Tabel VI.29 Perumusan Rekomendasi Dengan atau Tanpa Upaya Tambahan Kategori SB, NA dan BB pada TPB Strategis Terpilih di Kota Balikpapan 6-56
Tabel VI.30 Perumusan Rekomendasi TPB Yang Tidak Berkaitan Dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan 6-65
Tabel VI.31 Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Program TPB Yang Tidak Berkaitan Dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan 6-67



DAFTAR GAMBAR

BAB 1

Gambar 1.1 Risiko Global Jangka Menengah dan Isu Jangka Menengah Menurut Rantek RPJMN Tahun 2025-2029 1-4
Gambar 1.2 Isu Strategis Kota Balikpapan Menurut Rankhir RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 1-5
Gambar 1.3 Visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 1-6
Gambar 1.4 Petahapan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 1-7

BAB 2

Gambar 2.1 Keterkaitan Antara Lingkungan Alam, Jasa Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Manusia 2-12
Gambar 2.2 Tahapan Penyusunan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2-17
Gambar 2.3 Pendekatan Penentuan Status D3TLH Penyedia Pangan dan Air 2-18
Gambar 2.4 Kerangka Penentuan Status Daya Dukung Pangan 2-18
Gambar 2.5 Kerangka Penentuan Status Daya Dukung Penyedia Air 2-19
Gambar 2.6 Alur Proses Analisis Jasa Ekosistem 2-19
Gambar 2.7 Alur Proses Distribusi Ketersediaan Pangan dilihat dari Penduduk 2-21
Gambar 2.8 Alur Proses Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 2-26
Gambar 2.9 Peta Batas Administrasi Eksisting Kawasan IKN 2-40
Gambar 2.10 Peta Delineasi Kawasan Ibu Kota Negara 2-41
Gambar 2.11 Arahan RTRWP Kalimantan Timur Terhadap Kota Balikpapan 2-46

BAB 3

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Balikpapan 3-4
Gambar 3.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Balikpapan 3-9
Gambar 3.3 Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan 3-14
Gambar 3.4 Peta Geologi Kota Balikpapan 3-20
Gambar 3.5 Peta DAS Kota Balikpapan 3-27

Gambar 3.6 Jumlah Hari Hujan di Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2022 (hari) 3-29
Gambar 3.7 Jumlah Curah Hujan di Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2022 (mm) 3-30
Gambar 3.8 Peta Proyeksi Curah Hujan Tahunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2050 Berdasarkan Model CSIRO 3-31
Gambar 3.9 Peta Proyeksi Curah Hujan Tahunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2050 Berdasarkan Model MIROC RCP45 3-32
Gambar 3.10 Kejadian Bencana di Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 3-35
Gambar 3.11 Peta Bahaya Banjir Kota Balikpapan 3-37
Gambar 3.12 Peta Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan 3-39
Gambar 3.13 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Balikpapan 3-41
Gambar 3.14 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi 3-43
Gambar 3.15 Peta Bahaya Tsunami Kota Balikpapan 3-45
Gambar 3.16 Peta Bahaya Gempa Bumi Kota Balikpapan 3-47
Gambar 3.17 Peta Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2020 3-52
Gambar 3.18 Peta Zona Nilai Tanah Kota Balikpapan 3-57
Gambar 3.19 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1971 – 2020 3-59
Gambar 3.20 Piramida Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2023 3-63
Gambar 3.21 Skenario Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2023 – 2045 3-64
Gambar 3.22 Kontribusi Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2020 3-67
Gambar 3.23 Pendapatan Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2022 3-68
Gambar 3.24 Peta Batas Wilayah Ekologis Kota Balikpapan 3-70
Gambar 3.25 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan 3-71
Gambar 3.26 Peta Bentang Alam Kota Balikpapan 3-73
Gambar 3.27 Peta Vegetasi Alami Kota Balikpapan 3-75
Gambar 3.28 Peta Ekoregion Kota Balikpapan 3-76
Gambar 3.29 Peta Status Daya Dukung Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-78
Gambar 3.30 Peta Ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-80
Gambar 3.31 Peta Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-81
Gambar 3.32 Peta Proyeksi Status Daya Dukung Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2029 3-82
Gambar 3.33 Peta Proyeksi Status Daya Dukung Air di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-84
Gambar 3.34 Peta Ketersediaan Air di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-85
Gambar 3.35 Peta Kebutuhan Air di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-86
Gambar 3.36 Peta Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Balikpapan Tahun 2029 3-88
Gambar 3.37 Presentase Luas Jasa Penyedia Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-89
Gambar 3.38 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-90

Gambar 3.39 Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023 . 3-91
Gambar 3.40 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-92
Gambar 3.41 Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-93
Gambar 3.42 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-94
Gambar 3.43 Persentase Luas Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-95
Gambar 3.44 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-96
Gambar 3.45 Peta Timbulan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-98
Gambar 3.46 Peta Timbulan Tinja di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-99
Gambar 3.47 Peta Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-101
Gambar 3.48 Peta Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-102
Gambar 3.49 Peta Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-104
Gambar 3.50 Peta Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan 3-106
Gambar 3.51 Peta Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan 3-107
Gambar 3.52 Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan 3-108
Gambar 3.54 Peta SIDIK di Kota Balikpapan 3-111
Gambar 3.55 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Balikpapan 3-112
Gambar 3.56 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Balikpapan 3-114
Gambar 3.57 Peta Bahaya Longsor di Kota Balikpapan 3-115
Gambar 3.58 Peta Bahaya Banjir di Kota Balikpapan 3-117
Gambar 3.59 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan 3-118
Gambar 3.60 Peta Bahaya Kekeringan di Kota Balikpapan 3-120
Gambar 3.61 Peta Multi Bahaya di Kota Balikpapan 3-121
Gambar 3.62 Peta EF Penyedia Pangan di Kota Balikpapan 3-123
Gambar 3.63 Peta EF Penyedia Air di Kota Balikpapan 3-124
Gambar 3.64 Peta EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan 3-125
Gambar 3.65 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kalimantan Timur (KEE Teluk Balikpapan). 3-127
Gambar 3.66 Beberapa spesies penting di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan 3-129
Gambar 3.67 Peta Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-131
Gambar 3.68 Gambaran Informasi IKLH di Kota Balikpapan Tahun 2023 3-132
Gambar 3.69 Peta Jaringan Transportasi 3-143

BAB 4

Gambar 4.1 Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB 4-2

Gambar 4.2 Indikator TPB sesuai Perpres 59/2017 dan Hasil Penapisan Indikator Yang Relevan di Kota Balikpapan 4-3
Gambar 4.3 Prosentase Pencapaian TPB di Kota Balikpapan Tahun 2023 4-5
Gambar 4.4 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial 4-7
Gambar 4.5 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi 4-8
Gambar 4.6 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup 4-8
Gambar 4.7 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola 4-9
Gambar 4.8 Kerangka Pikir Penentuan Isu PB Strategis Dalam KLHS RPJMD 4-10
Gambar 4.9 Kerangka Analisis dan Pemeringkatan Isu TPB di Kota Balikpapan 4-10
Gambar 4.10 Isu PB Kota Balikpapan dikaitkan dengan Landscape Sustainability 4-26

BAB 5

Gambar 5.1 Grafik Pelaksanaan Indikator TPB Pada Setiap OPD dirinci Per Pilar 5-3
Gambar 5.2 Grafik Capaian Indikator TPB Pada Setiap OPD 5-6
Gambar 5.3 Persentase Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 5-7
Gambar 5.4 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 5-9
Gambar 5.5 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 5-10
Gambar 5.6 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 5-11
Gambar 5.7 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan 5-13
Gambar 5.8 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 5-15
Gambar 5.9 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 5-18
Gambar 5.10 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan 5-21
Gambar 5.11 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 5-22
Gambar 5.12 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Pendidikan Kota Balikpapan 5-24
Gambar 5.13 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan 5-26
Gambar 5.14 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan 5-27
Gambar 5.15 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan 5-29
Gambar 5.16 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 5-30
Gambar 5.17 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan 5-31

Gambar 5.18 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan 5-33
Gambar 5.19 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan 5-34
Gambar 5.20 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan 5-36
Gambar 5.21 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan 5-37
Gambar 5.22 Persentase Capaian Indikator TPB Inspektorat Kota Balikpapan 5-38
Gambar 5.23 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan 5-39
Gambar 5.24 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan 5-40
Gambar 5.25 Persentase Capaian Indikator TPB Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung 5-41
Gambar 5.26 Persentase Capaian Indikator TPB Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Balikpapan 5-42

BAB 6

Gambar 6.1 Alur Penyusunan KLHS RPJMD Kota Balikpapan 6-3
Gambar 6.2 Rumusan Alterantif Skenario 6-3
Gambar 6.3 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 6 di Kota Balikpapan 6-8
Gambar 6.4 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 13 di Kota Balikpapan 6-11
Gambar 6.5 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 1 di Kota Balikpapan 6-16
Gambar 6.6 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 11 di Kota Balikpapan 6-22
Gambar 6.7 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 2 di Kota Balikpapan 6-27
Gambar 6.8 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 14 di Kota Balikpapan 6-33
Gambar 6.9 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 15 di Kota Balikpapan 6-40



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi semakin kompleks mengiringi semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadinya perubahan iklim *(climate change)* yang menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air, serta bencana lainnya serta pemindahan Ibukota Nusantara (IKN).

Pada akhirnya, kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*. Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan ini diimplementasikan salah satunya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan RPJMD diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan /atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pelaksanaan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** Nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan
c. Kebijakan, Rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan.

Analisis KLHS memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunannya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 7 tahun 2018, KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa KLHS RPJMD perlu dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Aspek dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs).* Pencapaian TPB diimplementasikan berupa kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD agar rencana aksi TPB menjadi terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu.

Pada Perpres No. 59 tahun 2017 disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan RPJMD untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dari pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, indikator TPB yang merupakan kewenangan pemerintah kota adalah sejumlah 222 indikator.

Adapun untuk isu strategis kewilayahan Pulau Kalimantan menurut Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu antara lain :

- Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
- Minimnya hilirisasi industri dan diservifikasi produk turunan berbasis SDA
- Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar
- Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal dan terluar
- Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompotensi tenaga pendidik dan kesehatan
- Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan
- Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah

Didalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dijelaskan mengenai isu dan tantangan pembangunan atau risiko global jangka menengah yang mempengaruhi Negara Indonesia seperti resiko kegagalan *climate action*, cuaca ekstrim seiring perubahan iklim, deglobalisasi, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, konfrontasi geoekonomi, *biodiversity loss,* dan lain sebagainya seperti yang terlihat pada **Gambar 1.1** dibawah ini.



Sumber : Dokumen Rantek RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 1.1 Risiko Global Jangka Menengah dan Isu Jangka Menengah Menurut Rantek RPJMN Tahun 2025-2029

Untuk merespon isu dan tantangan pembangunan maka ditetapkan tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 yaitu **Penguatan Fondasi Transformasi** yang isinya antara lain :

1. Transformasi Sosial

   Pemenuhan Pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

   Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan, berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting sebagai penyangga IKN yang baru. Kota Balikpapan tidak hanya menjadi pintu gerbang logistik dan mobilitas antara IKN dan wilayah Indonesia lainnya, tetapi juga berperan sebagai kawasan pendukung yang siap menyambut berbagai dampak pembangunan IKN.

Kota Balikpapan tumbuh menjadi kota yang terbuka, strategis, dan terus berupaya menjadi kota yang nyaman huni. Berbagai capaian makro pembangunan menunjukkan kinerja yang

meningkat dibandingkan dengan awal periode perencanaan. Capaian kinerja pada tahun 2022, yaitu tingkat kemiskinan 2,45%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,13 atau berada pada kategori tinggi, dan pertumbuhan ekonomi berhasil pulih dari masa pandemi sebesar 4,94%.

Meskipun demikian, Kota Balikpapan juga masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Indeks Gini pada tahun 2011, misalnya masih berada pada rasio 0,28. Namun, Indeks Gini itu kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,334. Kenaikan Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Balikpapan juga mengalamai tantangan terkait tingkat pengangguran terbuka di tengah geliat ekonomi dan kemiskinan yang cukup rendah. Tingkat pengangguran terbuka masih sebesar 6,9%. Tantangan pembangunan Kota Balikpapan pada masa depan diprediksi akan semakin besar. Terdapat berbagai peluang yang harus dioptimalkan, tetapi juga terdapat potensi persoalan jika tidak diantisipasi dengan baik. Kota Balikpapan harus membangun kesiapan seiring proses perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, Kota Balikpapan berposisi sebagai pintu gerbang sekaligus mitra IKN. Aktivitas IKN telah menggerakkan perekonomian daerah, tetapi di sisi lain aktivitas perekonomian, arus distribusi barang-jasa, dan potensi perpindahan penduduk memiliki konsekuensi pada kebutuhan pelayanan dasar, tata ruang, hingga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Seiring keterbukaan Kota Balikpapan, tantangan yang tidak bisa dihindari juga muncul dari konteks global. Kota Balikpapan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan memiliki peran strategis dalam upaya mencapai transformasi. Kalimantan di dalam arah pembangunan kewilayahan RPJPN berposisi sebagai **"Superhub Ekonomi Nusantara"**. Posisi tersebut berbasis pada sektor unggulan Kalimantan berupa pertambangan dan penggalian, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta diakselerasi oleh keberadaan IKN. Balikpapan menjadi superhub penting dengan kondisi *existing* sebagai pintu gerbang IKN.

Dari seluruh capaian serta tantangan pembangunan yang ada, isu strategis menurut dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 yaitu antara lain : 1) Pembangunan Ekonomi inklusif berkelanjutan, 2) Penguatan SDM berdaya saing dan perlindungan sosial, 3) Reformasi birokrasi berdampak dan tata kelola kolaboratif, 4) pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, dan ketahanan bencana, 5) Kualitas infrastruktur (yang terpadu) dan penataan utilitas kota, 6) Peningkatan kota cerdas dan nyaman djihuni, dan 7) Kesiapan sebagai Mitra IKN. Jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1.2** dibawah ini.



Sumber : Dokumen Rankhir RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Gambar 1.2 Isu Strategis Kota Balikpapan Menurut Rankhir RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Dari tantangan pembangunan dan isu strategis yang telah dijabarkan diatas serta dengan memperhatikan arahan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur maka visi Kota Balikpapan yaitu **"Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045",** jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1.3** dibawah ini.



Sumber : Dokumen Rankhir RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Gambar 1.3 Visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Untuk mengimplementasikan visi diatas maka disusun misi yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 :

   Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berpandangan global

2. Misi 2 :

   Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun ekonomi kreatif dan inklusif

3. Misi 3 :

   Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun pemerintahan berintegritas, kolaboratif, dan adaptif

4. Misi 4 :

   Mewujudkan kondusivitas kota dan demokrasi substansial

5. Misi 5 :

   Mewujudkan lingkungan berketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan

6. Misi 6 :

   Mewujudkan pembangunan kota yang modern, terintegrasi dan berkeadilan

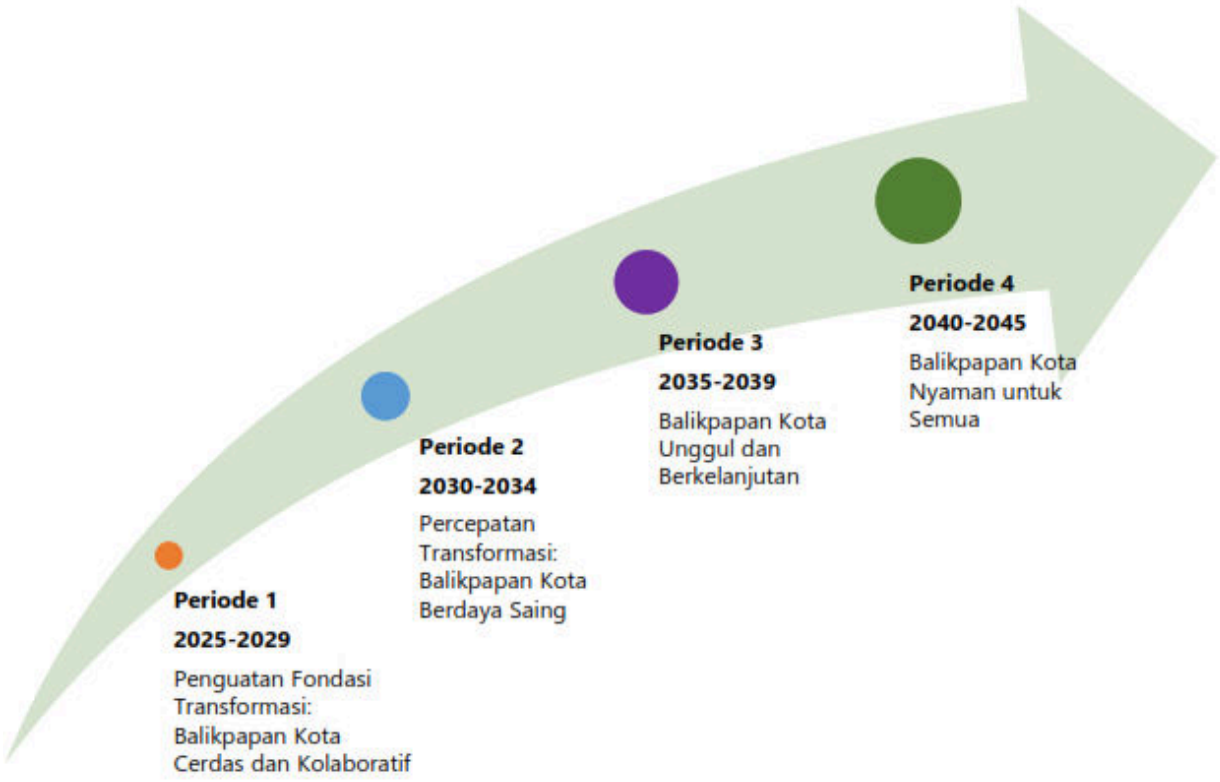
7. Misi 7 :

   Mewujudkan sarana dan prasarana yang terpadu dan ramah lingkungan

8. Misi 8 :

   Mewujudkan keselarasan pembangunan

Untuk mencapai visi dan misi diatas maka ada beberapa tahapan pembangunan Kota Balikpapan sampai dengan Tahun 2045 yaitu :



Sumber : Dokumen Rankhir RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Gambar 1.4 Petahapan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Dari seluruh penjabaran dan penjelasan diatas, maka kaitannya dengan disusunnya KLHS RPJMD Kota Balikpapan yaitu memberikan arahan terhadap tahap pembangunan periode 1 RPJDP Kota Balikpapan yang memiliki tema yaitu penguatan fondasi transformasi : Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif serta sesuai dengan undang – undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (selanjutnya disebut KRP).

Adapun arah kebijakan periode 1 Tahun 2025-2029 RPJPD Kota Balikpapan yaitu antara lain:

1. Penguatan fondasi pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Penguatan ekonomi unggulan daerah
3. Tata kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas
4. Memperkuat fondasi pembangunan berketahanan dan berkelanjutan
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Utilitas Kota Cerdas

Sehingga dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan berisikan substansi rencana pembangunan berbasis analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDDT) serta berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan arah kebijakan periode 1 RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. Sehingga pemetaan berbasis jasa ekosistem atau lingkungan hidup dapat memberikan sokongan guna terciptanya percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkealnjutan yang telah ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan.

Selain itu KLHS RPJMD Kota Balikpapan disusun sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 serta KLHS RPJMD ini memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Pilkada serentak sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih kepala daerah, termasuk WaliKota Balikpapan, membawa dampak langsung terhadap kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam RPJMD. Dalam konteks ini, KLHS menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa RPJMD yang disusun tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup secara holistik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap perencanaan pembangunan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup harus disertai dengan KLHS. Oleh karena itu, RPJMD Kota Balikpapan harus melibatkan KLHS sebagai bagian dari proses perencanaan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari rencana pembangunan daerah tersebut.

Peran KLHS dalam Pilkada Serentak Penyusunan KLHS RPJMD yang baik akan memberikan arah pembangunan yang berkelanjutan, yang bisa dijadikan pedoman bagi calon kepala daerah dalam merancang program-program pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam Pilkada Serentak, para calon kepala daerah, termasuk calon walikota, perlu menyusun visi dan misi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam RPJMD yang telah disusun dengan KLHS.

Lebih lanjut, Pilkada Serentak dapat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun oleh kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, penyusunan KLHS RPJMD tidak hanya terkait dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga menjadi alat untuk mengawal agar kebijakan yang diambil oleh kepala daerah terpilih nantinya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan.

Sehubungan hal diatas dan untuk melanjutkan hirarki kebijakan dibawahnya, diperlukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12) Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14) Keputusan Menteri LHK No. SK MENLHK 146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000

15) SK MENLHK 1272/2021 tentang Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000

16) SK MENLHK 8/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia

17) Surat kepada Gubernur Nomor 660.11.2/8754/Bangda Tahun 2023 Perihal Menyampaikan Petunjuk Teknis Pembuatan KLHS RPJMD dan sistematika laporan KLHS RPJPD/RPJMD dan Memperjelas alur proses validasi dan verifikasi laporan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD serta memuat matriks integrasi dan matriks verifikasi;

18) Surat kepada Bupati/Walikota Nomor 660.11.2/8755/Bangda Tahun 2023 Perihal Menyampaikan Petunjuk Teknis Pembuatan KLHS RPJMD dan sistematika laporan KLHS RPJPD/RPJMD dan Memperjelas alur proses validasi dan verifikasi laporan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD serta memuat matriks integrasi dan matriks verifikasi;

19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);

20) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20).

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029, sebagai pelaksanaan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 yaitu mengintegrasikan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP pembangunan Kota Balikpapan atas dasar prinsip keterkaitan, keseimbangan dan keadilan agar menjadi KRP yang berwasan lingkungan.

Sasaran Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Balikpapan 2025 – 2029 yaitu:

1) Terinventarisasinya data pencapaian indikator dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Balikpapan;
2) Teridentifikasinya isu – isu dan permasalahan pembangunan berkelanjutan serta analisa pengaruhnya terhadap 6 (enam) muatan KLHS untuk menghasilkan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang di prioritaskan;
3) Terumuskannya alternatif-alternatif skenario/proyeksi pencapaian TPB di Kota Balikpapan terhadap target TPN Nasional;
4) Terselaraskannya rekomendasi kebijakan, rencana dan program pembangunan berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya dan kebijakan pengembangan wilayah di Kota Balikpapan sebagai dasar perumusan KRP RPJMD 2025 – 2029;
5) Terintegrasinya data dan informasi yang dianalisis sebagai bahan materi dan rekomendasi KRP RPJMD Kota Balikpapan

1.4 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahapan – tahapan studi yang dilaksanakan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

1. Melakukan identifikasi dan Pengumpulan Data

   (Kondisi umum daerah, kondisi geografis, kondisi demografis, isu – isu strategis daerah, survei data capaian TPB dari OPD terkait)

2. Melakukan Updating analisis kondisi Daya Dukung Daya Tampung Daerah (DDDT) metode pendekatan jasa ekosistem
3. Perumusan isu – isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator – indikator pencapaian TPB serta kajian Pembangunan Wilayah Kota Balikpapan (Konsultasi Publik 1)
4. Pengkajian 6 muatan KLHS terhadap isu – isu pembangunan berkelanjutan.

II. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan alternatif skenario pencapaian TPB dengan/tanpa upaya tambahan (Konsultasi Publik 2)

III. Penyusunan Rekomedasi sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan KRP yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

IV. Penyiapan Dokumen untuk **Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian** hingga proses **Valiasi** oleh Gubernur Cq. DLH Provinsi Kalimantan Timur**.**

1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN KLHS

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan KLHS RPJMD, KLHS ini disusun dan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Pembentukan Tim Pembuat KLHS

   Pembentukan tim ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup, beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD, serta melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Tim Pembuat KLHS yang dibentuk wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa:

   a. Kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji;
   b. Pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.

   Adapun tugas Tim Pembuat KLHS adalah :

   a. Menyusun kerangka acuan kerja;
   b. Melaksanakan konsultasi publik;
   c. Membuat dan melaksanakan KLHS;
   d. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
   e. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
   f. Melaksanakan pendokumentasian KLHS.

2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

   Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

   a. Kondisi umum daerah, paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah;
   b. Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan
   c. Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

3) Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan adalah alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJMD.

4) Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJMD dibuktikan dengan:

a. Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
b. Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
c. Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
d. Laporan KLHS RPJMD.

Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD dilakukan pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaranstrategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah.

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS. Laporan KLHS memuat informasi tentang:

a. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian;
b. Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi;
c. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS;
d. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
e. Hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
f. Ringkasan eksekutif.

Terhadap KLHS yang dibuat dan dilaksanakan, wajib dilakukan validasi oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat dilakukan validasi, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengajukan permohonan kepada:

a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi yang telah dilakukan penjaminan kualitas; atau
b. Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi di bidang Lingkungan Hidup, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Permohonan validasi KLHS dilengkapi dengan:

a. Surat permohonan;
b. Rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program yang dilaksanakan KLHS;
c. Laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
d. Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.

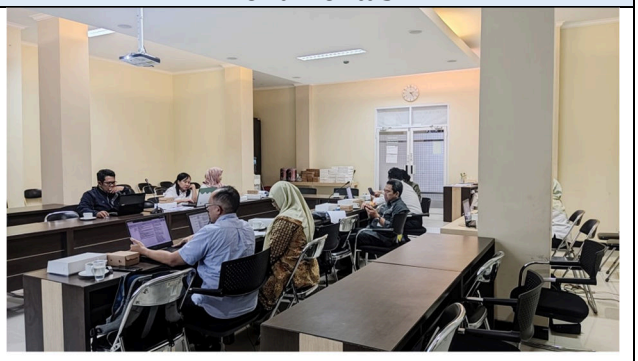
Dibawah ini merupakan alur atau kronologis penyusunan KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel I.1** dibawah ini.

Tabel I.1 Kronolologis Penyusunan KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tahapan	Tanggal	Dokumentasi
1	*Kick Off Meeting*	12 Mei 2023	
2	Pembahasan Laporan Pendahuluan	13 Juni 2023	

No	Tahapan	Tanggal	Dokumentasi
3	Konsultasi Publik 1 Penyepakatan Isu Strategis	18 September 2023	  
4	Pembahasan Laporan Antara	22 September 2023	   

No	Tahapan	Tanggal	Dokumentasi
5	Konsultasi Publik II : Skenario dan Rekomendasi	16 Oktober 2023	  

No	Tahapan	Tanggal	Dokumentasi
6	Pembahasan Laporan Akhir	18 Oktober 2023	  

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penyusunan KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Laporan Pendokumentasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen induk KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan KLHS, dasar hukum maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika pelaporan.

BAB 2 : DASAR TEORI

Bab ini menguraikan tentang dasar teori penyusunan KLHS RPJMD Kota Balikpapan.

BAB 3 : KONDISI UMUM KOTA BALIKPAPAN

Bab ini menguraikan terkait dengan letak geografis, kondisi fisik, kondisi lingkungan hidup, sampai dengan kondisi keuangan daerah Kota Balikpapan.

BAB 4 : ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Bab ini menguraiakan terkait dengan kondisi umum capaian TPB, Capaian target indikator TPB berdasarkan Pilar, sampai dengan Rumusan isu prioritas di Kota Balikpapan.

BAB 5 : ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Bab ini menguraikan capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah di Kota Balikpapan.

BAB 6 : ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan mengenai alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambahadan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari daya dukung dan daya tampung serta ketercapaian terhadap TPB di Kota Balikpapan

BAB 7 : KESIMPULAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan rekomendasi KLHS RPJMD Kota Balikpapan



BAB 2
DASAR TEORI

2.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. KLHS merupakan amanat yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Kunci dalam penyelenggaraan KLHS adalah analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif.

KLHS memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan mempertimbangkan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun KRP. Beberapa kemanfaatan yang diharapkan dari KLHS, antara lain:

1) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
2) Menguatkan implementasi pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3) Membantu proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; serta
4) Membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat KRP, sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan.

Pelaksanaan KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi atau lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh KRP yang sedang disusun. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan meliputi: yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari KRP dan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi KRP.

2.1.1 Dasar Hukum KLHS

Dasar hukum penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia adalah:

1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

2.1.2 Pelaksanaan KLHS

KLHS dapat dilaksanakan sebelum, bersamaan, atau setelah penyusunan draft KRP. KLHS untuk rencana pembangunan (RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD) dilakukan sebelum dokumen tersebut disusun, atau diistilahkan sebagai *ex-ante*.

2.1.3 Prinsip Penyelenggaraan KLHS

KLHS bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam melakukan pembangunan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan *(interdependency),* keseimbangan *(equilibrium),* dan keadilan *(justice)* di antara pilar dan isu.

1) Keterkaitan *(interdependency)*

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Nilai ini juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial-ekonomi.

2) Keseimbangan *(equilibrium)*

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan keseimbangankeseimbangan lainnya. Implikasinya, usaha pemetaan ragam dan bentuk kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

3) Keadilan *(justice)*

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu dalam masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

2.1.4 Mekanisme Penyelenggaraan KLHS

Mekanisme penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS

   Dilakukan oleh penyusun KRP dengan membuat kelompok kerja (Pokja) yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah (biasanya perwakilan organisasi perangkat daerah) dan melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya. Para pihak lainnya dapat berasal dari tokoh masyarakat, organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, atau dunia

usaha yang dianggap kompeten dalam KRP yang sedang disusun. Dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS, kelompok kerja dapat didampingi oleh tenaga ahli dalam penyusunan KLHS.

2) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS

   Dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja), penyusun KRP, dan pimpinan daerah. Penjaminan kualitas terdiri atas proses penilaian mandiri dan integrasi KLHS terhadap KRP. Proses penilaian mandiri adalah proses penilaian terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang telah dilakukan oleh Pokja, apakah proses yang dilakukan sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari KLHS. Proses integrasi KLHS terhadap KRP adalah proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh penyusun KRP terhadap rekomendasi dari KLHS dan mengintegrasikannya dalam KRP, apakah rekomendasi KLHS sudah diakomodasi atau diintegrasikan dalam KRP. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS kemudian akan dijaminkan kualitasnya oleh penyusun KRP dan pimpinan daerah.

3) Validasi KLHS

   Dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tingkat nasional dan Gubernur untuk tingkat daerah. Untuk KLHS pada tingkat nasional dan provinsi, dilakukan validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk KLHS pada tingkat kabupaten dan kota, dilakukan validasi oleh Gubernur. Proses validasi adalah proses untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.5 Muatan Analisis dalam KLHS RPJMD

Analisis dalam KLHS bertujuan untuk merumuskan isu pada wilayah kajian KRP. Analisis dilakukan terhadap kondisi umum dan kondisi khusus dari wilayah tersebut, atau disebut dengan baseline kondisi. Data baseline kondisi yang dimaksud antara lain berupa:

1) Kondisi umum wilayah kajian

   Muatan ini antara lain menjelaskan tentang kondisi geografis dan administratif dari wilayah yang dikaji, kondisi kependudukan, kondisi fisik wilayah, dan sebagainya.

2) Karakteristik ekoregion

   Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion dipahami sebagai konsep unit karakter lahan: berperan sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas *(constraint)* dalam pengelolaan lahan. Karakteristik ekoregion di setiap pulau/kepulauan telah dideskripsikan dalam Buku Deskripsi Ekoregion Pulau/Kepulauan.

3) Enam (6) muatan wajib kondisi lingkungan hidup

   Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

   a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem.

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

4) Muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Kondisi baseline indikator TPB meliputi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

a. Kondisi sosial meliputi berbagai urusan yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Jenis urusan yang dikelompokkan pada tema sosial, antara lain pendidikan; kesehatan; pangan; ketenagakerjaan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; administrasi kependudukan dan catatan sipil; komunikasi dan informatika; serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Kondisi ekonomi mencakup energi dan sumber daya mineral; keuangan; perindustrian; koperasi, usaha kecil dan menengah; pariwisata; penanaman modal; komunikasi dan informatika; statistik; dan sosial (terkait rasio gini).

c. Kondisi lingkungan mencakup jenis urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta kehutanan.

d. Hukum dan tata kelola kelembagaan mencakup jenis urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terutama dalam memberikan keadilan dan penguatan masyarakat yang inklusif; statistik; administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan komunikasi dan informatika.

Pembahasan lebih detail terkait TPB terdapat pada subbab 2.3.

2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Penyusunan RPJMD di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunan RPJMD, diperlukan masukan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan.

2.2.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah memiliki dua orientasi, yaitu orientasi proses dan substansi. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah serta bawah atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2.2.2 Tata Cara Penyusunan RPJMD

Terdapat empat tahap penyusunan RPJMD, yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD, perumusan rancangan RPJMD, dan penetapan RPJMD.

1) Persiapan RPJMD

   Tahap persiapan RPJMD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

2) Penyusunan rancangan awal RPJMD

   Merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Renstra Peragkat Daerah.

3) Perumusan rancangan RPJMD

   Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

4) Penetapan RPJMD.

RPJMD provinsi ditetapkan oleh gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. RPJMD kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

2.3 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Brundtland dari PBB, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Agenda pembangunan berkelanjutan dibuat untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs). SDGs* disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society,* dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly (UNGA)* di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, *New York, Amerika Serikat*. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

TPB 1 : Tanpa Kemiskinan

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;

TPB 2 : Tanpa Kelaparan

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;

TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;

TPB 4 : Pendidikan Berkualitas

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;

TPB 5 : Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;

TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;

TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;

TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim

Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

TPB 14 : Ekosistem Laut

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

TPB 15 : Ekosistem Darat

Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;

TPB 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator. Komitmen pemerintah indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen internasional sehingga harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Tahapan dan proses pencapaian TPB/SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

2.4 EKOREGION DAN 6 MUATAN KLHS

2.4.1 Ekoregion

Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Secara sederhana ekoregion adalah geografis ekosistem, yaitu pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan wilayah geografis.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan ekoregion sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem dalam satu wilayah ekoregion. Suatu ekoregion dapat terletak di dalam beberapa wilayah administrasi, sehingga salah satu tujuan pendekatan ekoregion adalah untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi antar wilayah administrasi yang saling bergantung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mencakup persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, tujuan lainnya dari penetapan ekoregion adalah agar secara fungsional dapat menghasilkan perencanaan perlindungan-pengelolaan lingkungan hidup,

pemantauan, dan evaluasinya secara bersama antar daerah yang saling bergantung, meskipun dalam kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan masing-masing oleh dinas wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penetapan wilayah ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora, fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Penentuan wilayah dan pemetaan ekoregion dimaksudkan untuk dapat digunakan dalam berbagai tujuan, yaitu[1] :

a. Sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
b. Sebagai dasar dalam memberikan arahan untuk penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan untuk perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter wilayah.
c. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun persoalan lingkungan hidup.
d. Sebagai acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem/lingkungan yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam satu ekoregion, sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

[1]*Sumber utama deskripsi ekoregion pada bagian ini adalah buku Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan (KLH, 2013) dan buku Deskripsi Peta Ekoregion Laut Indonesia (KLH, 2013), kecuali terdapat sitasi terseniri*

Penetapan ekoregion dilakukan dengan pendekatan konsep bentang lahan. Menggunakan konsep tersebut, ekoregion dapat dipetakan berdasarkan kesamaan ciri morfologi dan morfogenesa bentuk lahan yang ada pada sistem lahan. Aspek morfologi mencirikan bentuk permukaan lahan yang dicerminkan oleh ketinggian relief lokal dan kelerengan. Sedangkan aspek morfogenesa mencirikan proses asal usul terbentuknya bentuklahan. Klasifikasi lahan dengan konsep sistem lahan dilakukan berdasarkan prinsip ekologi yang mengasumsikan adanya hubungan erat yang saling mempengaruhi antara agroklimat, tipe batuan, bentuk lahan, tanah, kondisi hidrologi, dan organisme. Dengan diintegrasikan dengan peta iklim dan tipe vegetasi, peta ekoregion dengan pendekatan bentang lahan dapat mencerminkan sebaran spasial batas ekosistem yang mendekati definisi ekosistem sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembentukan suatu peta ekoregion dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data, yaitu peta sistem lahan, peta rupa bumi, peta geomorfologi, citra SRTM, peta curah hujan, dan data sumber daya hayati. Berbagai data tersebut kemudian digunakan dalam proses pembuatan peta ekoregion yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan dari pembuatan peta ekoregion yaitu pengkajian data sistem lahan, klasifikasi lahan, kompilasi data, pengisian/pelengkapan data atribut, dan yang terakhir penyajian peta.

Proses pengkajian data sistem lahan dimaksudkan untuk memperoleh klasifikasi lahan berdasarkan aspek morfologi dan morfogenesa dengan menggunakan berbagai data pendukung, yaitu definisi ekoregion berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai acuan utama pendefinisian ekoregion, peta rupa bumi sebagai peta dasar untuk penyajian ekoregion, citra SRTM dan DTM, serta peta geomorfologi yang digunakan sebagai acuan

untuk mengidentifikasi morfogenesa bentuk lahan. Pada tahapan ini, karakteristik sistem lahan yang dicermati adalah geometri batas sistem lahan, tipe bentuk lahan, litologi, jenis tanah, pola drainase, dan morfologi lahan. Karakteristik sistem lahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi morfologi dan morfogenesa bentuklahan yang digunakan sebagai satuan pemetaan ekoregion.

Proses klasifikasi bentuk lahan dilakukan dengan berdasarkan morfologi dan morfogenesa sistem lahan. Morfologi bentuk lahan diidentifikasikan dengan data atribut sistem lahan ketinggian relief lokal dan kelerengan, sedangkan morfogenesa dengan data atribut tipe lahan, litologi (jenis batuan), jenis tanah, dan pola drainase. Hasil identifikasi morfogenesa tersebut kemudian diverifikasi dengan peta geomorfologi. Morfologi bentuklahan diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu 1) dataran, 2) perbukitan, dan 3) pegunungan. Sedangkan morfogenesa bentuk lahan diklasifikasikan menjadi delapan kelas, yaitu 1) marin/pantai, 2) fluvial yaitu bentuklahan yang terbentuk dari proses sedimentasi karena aliran air sungai, 3) fluviovulkanik, 4) karst yaitu bentuk lahan yang terbentuk dari hasil pelarutan batu gamping, 5) organik/koral, 6) struktural yaitu bentuk lahan yang terbentuk dari proses tektonik, 7) vulkanik yaitu bentuklahan yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi, 8) denudasional yaitu bentuklahan yang terbentuk dari proses gradasi dan degradasi yang umumnya pada lahan berbatuan sedimen.

2.4.2 Dasar Teori 6 Kajian Muatan KLHS

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai teori 6 kajian muatan KLHS.

A. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan

Daya dukung merupakan salah satu konsep yang serbaguna dan populer didalam konteks politik lingkungan saat ini. Seperti halnya dengan konsep keberlanjutan, daya dukung dapat diterapkan pada hampir berbagai interaksi antara manusia dan lingkungan, pada berbagai skala dan memilki kemampuan dan kelebihan dalam hal perhitungan dan posisi kuantitatif yang dapat diterima (Sayre, 2007).

Daya dukung sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Secara umum, kerusakan daya dukung alam dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor internal

   Kerusakan yang berasal dari alam itu sendiri misalnya, letusan gunung berapi, gempa bumi dan sebagainya.

2. Faktor eksternal

   Kerusakan yang terjadi karena ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya misalnya kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan industri berupa pencemaran darat, air, laut dan udara.

Berdasarkan UU no 32 tahun 2009 Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem, sedangkan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pengertian tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa

ekosistem mampu menyediakan produktivitas lingkungan hidup, yang artinya mampu menghasilkan sesuatu. Kontribusi atau manfaat yang diberikan oleh ekosistem disebut layanan/jasa lingkungan hidup. *The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)* menyepakati bahwa jasa lingkungan hidup *(ecosystem services)* didefinisikan sebagai kontribusi struktur dan fungsi ekosistem secara langsung dan tidak langsung untuk kesejahteraan manusia (TEEB, 2010, de Groot, Braat dan Costanza, 2017).

Definisi jasa lingkungan hidup tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi ekosistem dan sumberdaya alam yang berfungsi baik yaitu yang mampu menyediakan jasa lingkungan hidup dari alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gambar dibawah ini menunjukkan ketergantungan manusia terhadap sumberdaya alam *(natural capital)* yang dijembatani oleh jasa lingkungan hidup melalui nilai manfaat yang dimilikinya.



Gambar 2.1 Keterkaitan Antara Lingkungan Alam, Jasa Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Manusia

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan. Teknik-teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah diakui secara ilmiah.

Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut.

B. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi *Environmental Risk Assessment*).

C. Kinerja Layanan / Jasa Ekosistem

Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati yang ekosistemnya berupa manfaat baik langsung *(tangible)* dan/atau tidak langsung *(intangible).* Jasa lingkungan dapat merepresentasikan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Hal ini berarti bahwa DDDTLH merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Semakin tinggi atau baik DDDTLH suatu ekoregion, maka ekosistem semakin baik kualitas dan fungsi ekoregion tersebut menyediakan jasa ekosistemnya (Riqqi, et al., 2019). Setiap wilayah ekoregion dapat memiliki lebih dari satu tipe ekosistem penghasil jasa lingkungan.

Menurut MEA, jasa lingkungan terdiri dari empat kelompok, yaitu layanan penyediaan, pengaturan, kultural, dan pendukung *(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).* Layanan penyedia *(provisioning services)* berupa jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll. Layanan pengaturan *(regulating services)* berupa manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll. Layanan kultural *(cultural services)* berupa manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilainilai estetika dan pengetahuan. Layanan pendukung (supporting services) berupa jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll. Penjelasan klasifikasi dari keempat kelompok jasa lingkungan ini ditunjukkan pada Tabel II.1 dibawah ini.

Tabel II.1 Klasifikasi Jasa Lingkungan

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (*Provisioning*)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (*fiber*)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (*fuel*)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (*Regulating*)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (*pollination*)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (*Cultural*)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar "kampung halaman" yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (*Supporting*)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (*nutrient*)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2011

D. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara :

a. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya;

b. Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan

c. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi

E. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Perubahan iklim

Tingkat kerentanan diukur sebagai rasio antara tingkat sensitivitas dan kapasitas adaptasi. Kerentanan berbanding lurus dengan tingkat sensitivitas dan berbanding terbalik dengan kapasitas adaptasi. Kondisi tingkat kerentanan akan semakin buruk bila sensitivitasnya tinggi dan/atau rendahnya kapasitas adaptasi.

Komponen Kerentanan :

'- Keterpaparan (E) : keberadaan manusia, mata pencaharian, spesies/ekosistem, fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau aset ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang dapat mengalami dampak negatif. Keterpaparan menggambarkan kondisi fisik atau keberadaan kelurahan yang berpotensi mengalami dampak negatif dari perubahan iklim. Dalam kerentanan sosial-ekonomi faktor yang berkontribusi terhadap tingkat keterpaparan wilayah adalah kualitas permukiman dan keberadaan bangunan. Indikator ini ditentukan oleh akses listrik dan kondisi sanitasi permukiman yang juga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena masih adanya beberapa pemukiman yang membuang limbah domestik langsung ke sungai. Selanjutnya keberadaan bangunan yang terletak di bantaran sungai dan permukiman kumuh berkontribusi besar terhadap tingkat keterpaparan wilayah kriteria tinggi.

- Sensitivitas (S) : tingkat dimana suatu sistem akan terpengaruh atau responsif terhadap rangsangan iklim, tetapi dapat diubah melalui perubahan sosial ekonomi. Faktor-faktor yang berkontribusi utama pada tingginya sensitivitas adalah indikator kesejahteraan keluarga, penduduk non produktif dan akses air. Kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh sumber penghasilan utama dan kepemilikan surat resmi tanah dan rumah. Penduduk non produktif diambil dari variable penyusun berupa angka pengangguran. Akses air ditentukan berdasarkan sumber air utama untuk minum.

-Kapasitas Adaptasi (AC) : potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi/dicegah. Faktor yang berkontribusi terhadap kapasitas adaptasi antara lain keberadaan fasilitas kesehatan, keberadaan prasarana ekonomi, dan kelembagaan kelurahan.

F. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati bersifat multidimensi. Hal ini digambarkan oleh beragamnya definisi/pengertian yang telah di kemukakan. Kesamaan diantara berbagai pengertian yang telah di kemukakan. Kesamaan di antara berbagai pengertian keanekaragaman hayati adalah tiga komponen prinsip, yaitu ekosistem, jenis, dan gen. Tiga komponen prinsip ini juga diacu di dalam pengertian keanekaragaman hayati menurut konvensi keanekaragaman hayati. Pengertian menurut konvensi ini adalah :

- Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem perairan lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam jenis, antar jenis dan ekosistem.
- Dalam pengertian lain; keanekaragaman hayati merujuk pada keanekaragaman semua jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik (mikroorganisms), serta proses ekosistem dan ekologis dimana mereka menjadi bagiannya. Keanekaragaman genetik (didalam jenis) mencakup keseluruhan informasi genetik sebagai pembawa sifat keturunan dari semua makhluk hidup yang ada. Keanekaragaman

jenis berkaitan dengan keragaman organisme atau jenis yang mempunyai ekspresi genetis tertentu. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem merujuk pada keragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Keanekaragaman hayati lebih dari sekedar jumlah jenis-jenis flora dan fauna.

2.4.3 Metode Analisis

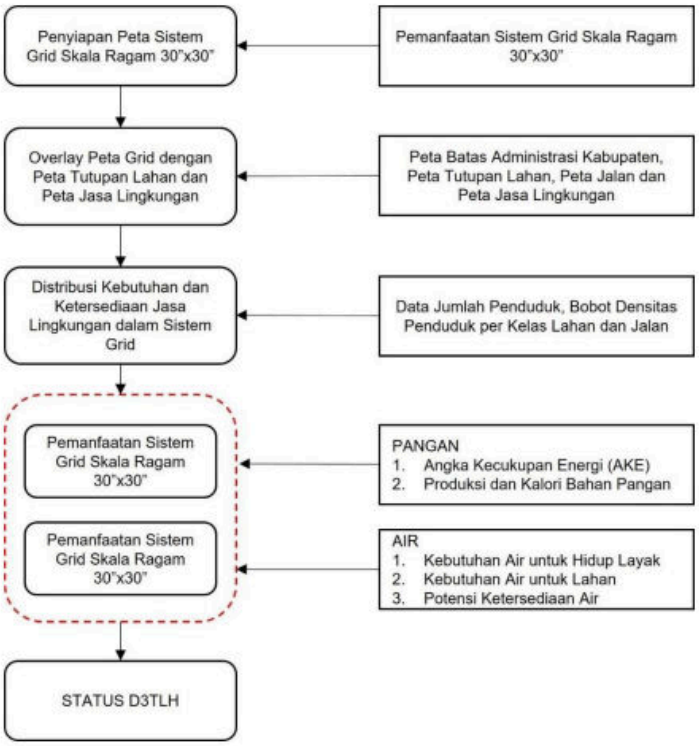
Berikut metode analisis spasial terkait dengan 6 kajian muatan KLHS.

A. Metode Analisis Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Agar tidak mengganggu struktur, proses maupun fungsi ekosistem, maka pemanfaatan lingkungan hidup seharusnya tidak melebihi kemampuan tersebut. Jika aspek ketersediaan *(supply)* diperbandingkan dengan aspek kebutuhan (demand) akan dihasilkan apa yang disebut status daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Status daya dukung daya tampung dikatakan terlampui apabila supply lebih kecil dari demand, demikian pula sebaliknya. Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, pangan dan udara dalam menyerap karbondioksida dan lain sebagainya. Dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Balikpapan, terdapat beberapa penilaian yang diuraikan diantaranya kondisi status daya dukung penyediaan pangan dan air, daya dukung lahan yang dapat digambarkan dari kemampuan lahan serta kondisi daya tampung persampahan.

Status daya dukung hanya dapat diketahui jika supply side dan demand side dari jasa lingkungan dapat dihitung, maka tidak semua jasa lingkungan sejauh ini dapat ditentukan statusnya. Saat ini metode penghitungan masih dalam pengembangan dan belum diperoleh suatu kesepakatan. Di Indonesia, penentuan status daya dukung baru dilakukan untuk status daya dukung daya tampung penyedia air dan penyedia pangan. Sementara untuk jasa lingkungan yang lainnya baru dapat dihitung kinerja (supply side) jasanya. Penyusunan peta Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dilakukan melalui beberapa tahapan seperti disajikan pada **Gambar 2.2** dibawah ini.

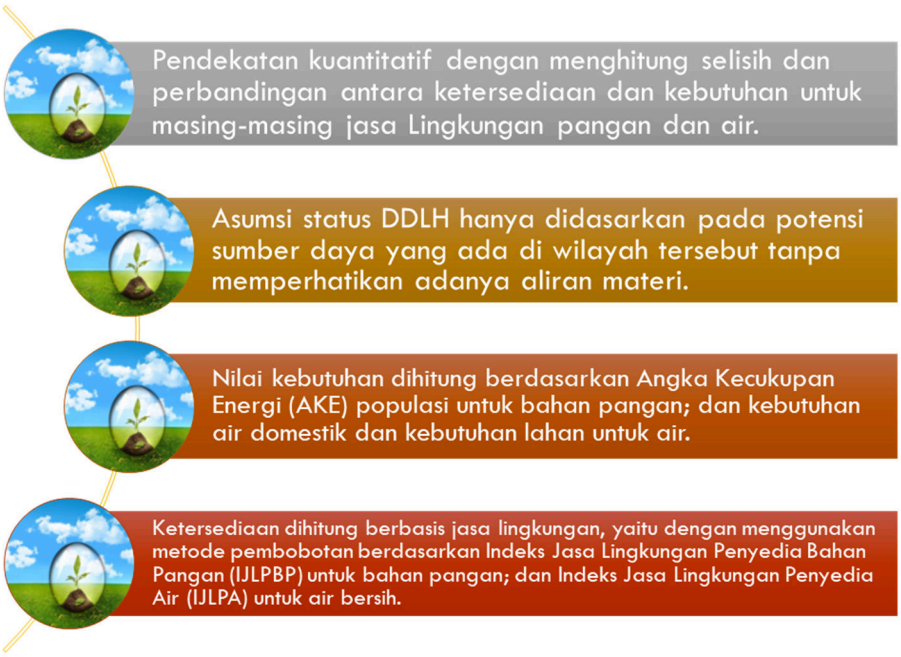


Gambar 2.2 Tahapan Penyusunan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

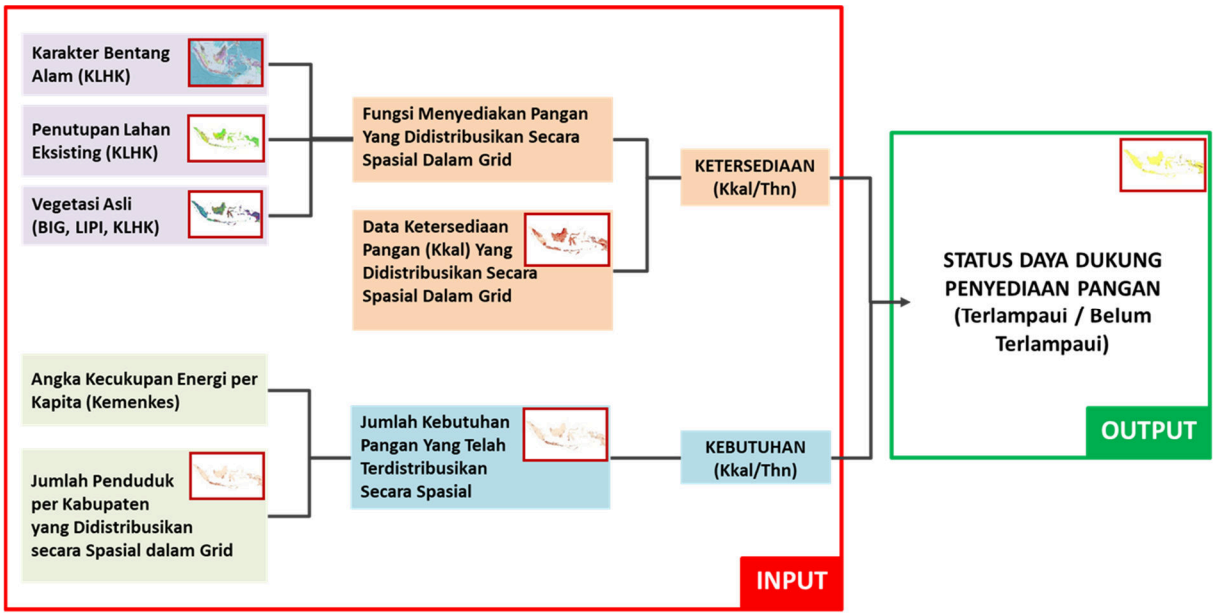
Status daya dukung lingkungan hidup di Kota Balikpapan menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Kota Balikpapan untuk pangan dan air bersih menggunakan pendekatan sistem grid melalui teknik pengolahan data spasial, sehingga untuk membandingkan data ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data potensi baik pangan dan air serta kebutuhan pangan dan air berbasis spasial.

Untuk kebutuhan pangan dan air dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap grid yang digunakan dalam menghitung status daya dukung lingkungan hidup. Kebutuhan penduduk pada setiap grid dihitung berdasarkan distribusi jumlah penduduk pada setiap Grid yang bersumber dari jumlah penduduk yang termuat didalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan. Jumlah penduduk yang terdapat pada setiap kecamatan didistribusikan secara spasial menggunakan model distribusi penduduk (Nengsih, 2015), ke grid yang digunakan sehingga diketahui sebaran jumlah populasi persetiap grid. Model distribusi penduduk dilakukan dengan penggabungan data grid dengan data tutupan lahan dan jalan yang kemudian dilanjutkan pembuatan model matematis distribusi densitas populasi penduduk. Data jumlah penduduk yang tersebar pada setiap grid nantinya akan menggambarkan kebutuhan masyarakat yang dibandingkan dengan ketersediaan yang ada yang tentunya akan menggambarkan daya dukung lingkungan.

Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup menggambarkan kondisi daya dukung lingkungan melampaui atau tidak melampaui. Sehingga analisis peningkatan pertumbuhan penduduk kedepannya juga perlu dipertimbangkan. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan yang ada saat ini akan semakin defisit dalam artian pada proyeksi kedepannya akan semakin luas wilayah yang akan terlampaui.

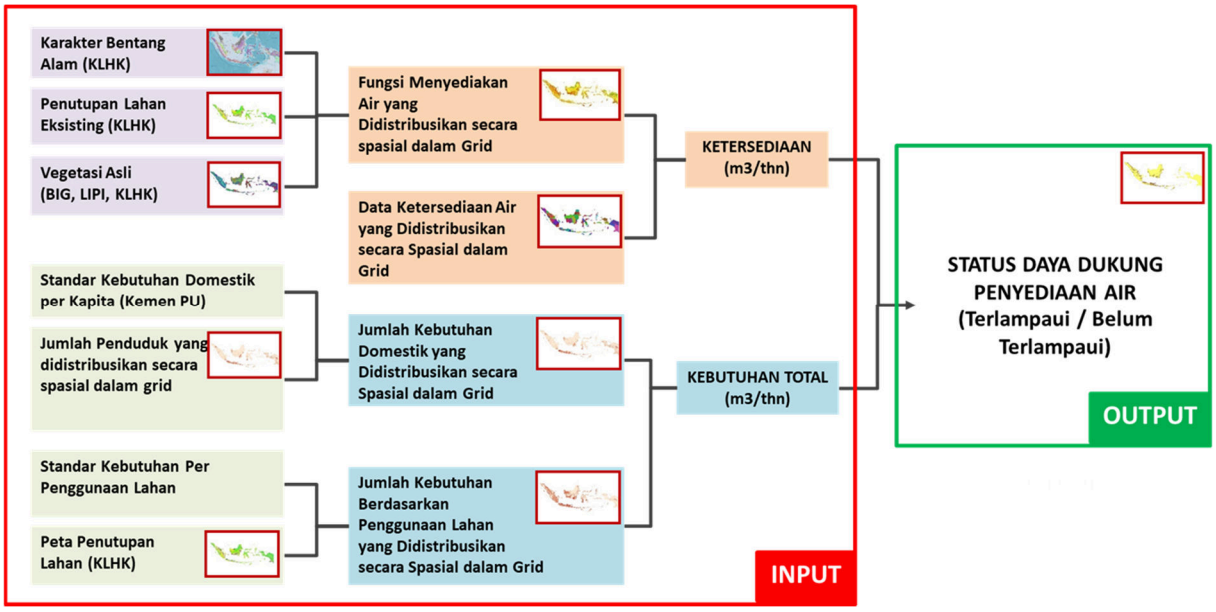


Gambar 2.3 Pendekatan Penentuan Status D3TLH Penyedia Pangan dan Air



Gambar 2.4 Kerangka Penentuan Status Daya Dukung Pangan

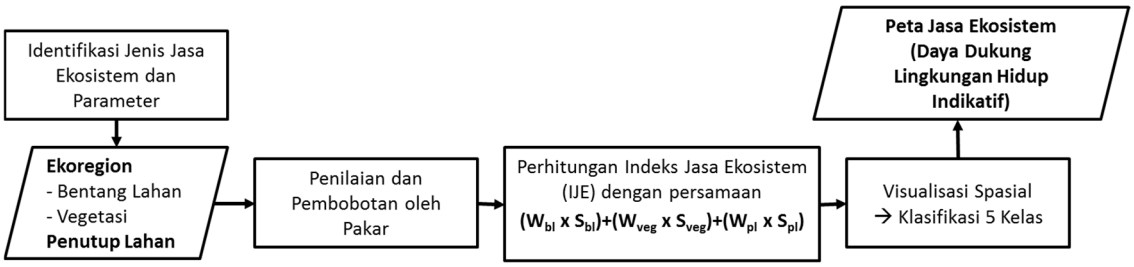
Sedangkan untuk penyedia air menggunakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.



Gambar 2.5 Kerangka Penentuan Status Daya Dukung Penyedia Air

B. Metode Analisis Kinerja Layanan Jasa Ekosistem / Lingkungan

Jasa lingkungan dapat mewakili DDDTLH dengan pemahaman bahwa daya dukung dan daya tampung merupakan kapasitas fungsi dan jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan manusia dan/atau makhluk lainnya di suatu ekoregion. Jasa pengaturan akan mendukung daya tampung, sementara ketiga jasa ekosistem lainnya (penyedia, pendukung, dan budaya) akan mendukung daya dukung (Riqqi A. 2014). Oleh karena itu, peta DDDTLH dapat disusun berupa peta jasa ekosistem untuk masing-masing jenis jasa ekosistem. Penyusunan peta jasa ekosistem meliputi tahapan: (i) identifikasi jenis jasa ekosistem, data, dan parameter, (ii) penilaian dan pembobotan terhadap parameter yang menentukan jasa ekosistem, (iii) analisis spasial dan perhitungan indeks jasa ekosistem (IJE), dan (iv) visualisasi spasial IJE. Secara umum, tahap penyusunan dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 2.6 Alur Proses Analisis Jasa Ekosistem

(i) Identifikasi jenis jasa ekosistem dan parameter

Data dasar yang digunakan dalam pembuatan peta jasa ekosistem, meliputi peta ekoregion dan peta penutup lahan. Peta ekoregion memuat data tentang bentang lahan dan vegetasi.

(ii) Penilaian dan pembobotan

Penilaian (skoring) dan pembobotan setiap parameter karakteristik bentang lahan, vegetasi, dan penutup lahan dilakukan oleh pakar (*expert judgement*) sesuai dengan bidang keahliannya. Penilaian dan pembobotan setiap parameter telah dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga pada penyusunan peta jasa ekosistem ini menggunakan nilai dan bobot tersebut.

(iii) Analisis dan perhitungan IJE

Perhitungan IJE dilakukan menggunakan metode *simple additive weight* (SAW). Berikut ini merupakan persamaan yang digunakan untuk perhitungan IJE:

$$\boldsymbol{IJE} = (\boldsymbol{W_{bl}} \times \boldsymbol{S_{bl}}) + (\boldsymbol{W_{veg}} \times \boldsymbol{S_{veg}}) + (\boldsymbol{W_{pl}} \times \boldsymbol{S_{pl}}) \qquad \text{(Pers. 1)}$$

dengan:

$\boldsymbol{IJE}$	indeks jasa ekosistem,
W	bobot (penilaian ahli),
S	skor (penilaian ahli), dan
bl, veg, pl	karakteristik bentang lahan (bl), vegetasi (vg), dan penutup lahan (pl).

Hasil perhitungan IJE kemudian dituangkan ke dalam informasi spasial berupa peta.

(iv) Visualisasi spasial IJE

Penilaian terhadap peta IJE digunakan untuk menentukan kelas kemampuan atau kinerja jasa lingkungan hidup. Muatan informasi peta jasa ekosistem dibagi ke dalam kelas ordinal, yaitu kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, dengan rentang nilai indeks sebagai berikut:

- Sangat rendah : 1,0 – 1,8
- Rendah : 1,9 – 2,6
- Sedang : 2,7 – 3,4
- Tinggi : 3,5 – 4,2
- Sangat tinggi : 4,3 – 5,0

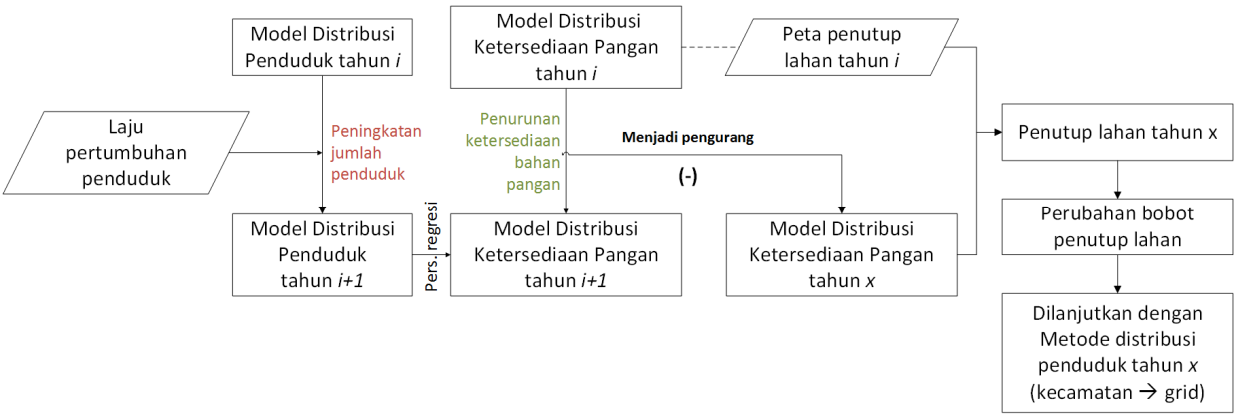
C. Metode Analisis Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Analisis dampak dan risiko lingkungan hidup terdiri dari :

1. Tekanan Penduduk

   Tekanan penduduk merupakan pertumbuhan jumlah penduduk di setiap grid 5"x5" antar periode tahun tertentu. Periode yang digunakan yaitu tahun 2020, 2021, 2023, dan 2029. Model distribusi penduduk setiap grid pada tahun dasar didistribusikan dari jumlah penduduk setiap kecamatan di Kota Balikpapan. Penutup lahan (khususnya lahan terbangun) dan kelas jalan menjadi bobot dalam pendistribusian penduduk ke setiap grid. Untuk model proyeksi penduduk pada tahun yang akan datang dimodelkan dengan metode berikut.

   Model proyeksi penduduk di setiap grid prinsipnya sama dengan model distribusi penduduk, yaitu dengan mendistribusikan jumlah penduduk pada unit administratif kecamatan ke setiap grid, menggunakan jenis penutup lahan dan kelas jalan sebagai bobot pendistribusian. Namun, yang membedakan adalah jumlah penduduk pada setiap kecamatan yang meningkat dan adanya perubahan jenis penutup lahan pada tahun proyeksi yang berpengaruh terhadap bobot pendistribusian. Secara keseluruhan, pemodelan proyeksi penduduk di setiap grid dapat dilihat pada **Gambar 2.7** berupa diagram dibawah ini.



Gambar 2.7 Alur Proses Distribusi Ketersediaan Pangan dilihat dari Penduduk

Pada prinsipnya, terdapat dua variabel yang berubah dalam pemodelan penduduk pada tahun proyeksi, yaitu (i) jumlah penduduk setiap kecamatan di tahun proyeksi dan (ii) jenis penutup lahan pada tahun proyeksi. Kemudian, setelah diketahui dua variabel tersebut pada tahun proyeksi, dilakukan pendistribusian penduduk setiap kecamatan pada tahun proyeksi ke setiap grid.

(i) Perhitungan jumlah penduduk setiap kecamatan di tahun proyeksi

Perhitungan jumlah penduduk di setiap unit administratif kecamatan pada tahun proyeksi menggunakan metode geometrik (BPS, 2013), yaitu:

$$\boldsymbol{P_t = P_0(1 + r)^t} \qquad \text{(Pers. 9)}$$

dengan:

P_t : jumlah penduduk pada tahun proyeksi *t*,

P_0 : jumlah penduduk pada tahun dasar,

r : laju pertumbuhan penduduk, dan

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun *t*.

(ii) Penentuan jenis penutup lahan setiap grid pada tahun proyeksi

Penentuan jenis penutup lahan di tahun proyeksi dilakukan berdasarkan hubungan matematis antara jumlah penduduk dengan ketersediaan energi bahan pangan di suatu wilayah. Dasar pemikiran dari model ini adalah adanya hubungan berbanding terbalik antara jumlah penduduk dan ketersediaan bahan pangan di suatu area (Taradini, 2017), seperti diilustrasikan pada gambar di bawah. Wilayah dengan jumlah penduduk rendah umumnya menghasilkan bahan pangan dalam jumlah yang tinggi karena areanya digunakan untuk produksi bahan pangan, sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi menghasilkan sedikit bahan pangan karena areanya didominasi untuk tempat tinggal (lahan terbangun). Setiap kondisi wilayah tersebut merepresentasikan jenis penutup lahan tertentu.

Hubungan tersebut kemudian direpresentasikan dalam hubungan matematis, yaitu dengan analisis regresi, dengan jumlah penduduk menjadi variabel bebas (*independent variable*) dan ketersediaan energi bahan pangan menjadi variabel terikat (*dependent variable*). Persamaan polinomial hasil regresi untuk setiap wilayah yang dikaji akan berbeda-beda sesuai karakteristik kependudukan dan pangan di wilayah tersebut.

Model ketersediaan energi bahan pangan setiap grid di tahun proyeksi dihitung berdasarkan selisih ketersediaan energi bahan pangan dalam periode satu tahun. Perhitungan selisih ketersediaan energi bahan pangan dalam satu tahun ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$\boldsymbol{\Delta Km = Km_{i+1} - Km_i} \qquad \text{(Pers. 10)}$$

dengan:

ΔKm : selisih ketersediaan energi bahan pangan antara tahun *n+1* dan *n* di grid ke-*i,*

Km_{i+1} : model ketersediaan energi bahan pangan tahun *n+1* di grid ke-*i,*

Km_i : model ketersediaan energi bahan pangan tahun *n* di grid ke-*i,* dan

n : tahun dasar.

Dengan mengetahui selisih/perubahan ketersediaan energi bahan pangan dalam satu tahun, maka model ketersediaan energi bahan pangan setiap grid di tahun proyeksi dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\boldsymbol{Kmt = Km_i + (\Delta Km \times \Delta t)} \qquad \text{(Pers. 11)}$$

dengan:

Kmt	:	model ketersediaan energi bahan pangan grid ke-*i* pada tahun proyeksi,
Km_i	:	model ketersediaan energi bahan pangan tahun *n* di grid ke-*i*,
ΔKm	:	selisih ketersediaan energi bahan pangan antara tahun *n+1* dan *n* di grid ke-*i,*
Δt	:	selisih tahun pada tahun proyeksi dengan tahun *n*.

Model ketersediaan energi bahan pangan di setiap grid pada tahun proyeksi digunakan untuk menentukan jenis penutup lahan pada tahun proyeksi. Penentuannya didasarkan pada rentang nilai ketersediaan energi bahan pangan di setiap jenis penutup lahan pada tahun dasar sebagai acuan. Dengan begitu, adanya perubahan ketersediaan energi bahan pangan pada tahun proyeksi menyebabkan perubahan jenis penutup lahan. Perubahan jenis penutup lahan di setiap grid akan mengubah bobot pendistribusian penduduk di setiap grid yang bersangkutan.

(iii) <u>Pendistribusian penduduk pada tahun proyeksi ke setiap grid</u>

Setelah dilakukan perhitungan jumlah penduduk setiap kecamatan dan jenis penutup lahan setiap grid pada tahun proyeksi, maka selanjutnya dilakukan pemodelan distribusi penduduk pada tahun proyeksi tersebut. Tahapan pemodelan sama dengan metode pendistribusian penduduk pada tahun dasar, namun jumlah penduduk dan bobot pendistribusian penduduk berdasarkan jenis penutup lahan menggunakan angka hasil perhitungan di tahun proyeksi.

2. Timbulan Sampah dan Lumpur Tinja

Potensi timbulan sampah dan lumpur tinja memiliki hubungan sebanding dengan jumlah penduduk di setiap grid. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula timbulan sampah dan lumpur tinja yang berpotensi ada di wilayah tersebut. Sampah dan lumpur tinja dihitung berdasarkan kajian jumlah sampah dan lumpur tinja yang dihasilkan per kapita di Kota Balikpapan, dengan persamaan berikut:

$$\boldsymbol{T_i = P_i \times n}$$ Pers. 12)

dengan:

$\boldsymbol{T_i}$	:	timbulan sampah atau lumpur tinja pada grid ke-*i*,
P_i	:	jumlah penduduk pada grid ke-*i,* dan
n	:	timbulan sampah atau lumpur tinja per kapita.

3. Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Potensi beban pencemar air sungai yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS dengan mempertimbangkan potensi beban pencemar domestik, pertanian, dan lahan. Dalam perhitungannya, potensi beban pencemar mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jarak lokasi terhadap sungai, kondisi lingkungan seperti daerah perkotaan atau pinggiran kota, dan jenis tutupan lahan.

Potensi beban pencemar total merupakan hasil dari akumulasi beban pencemar domestik, beban pencemar pertanian, dan beban pencemar penggunaan lahan di suatu wilayah. Persamaan berikut menunjukkan perhitungan potensi beban pencemar total.

$$\boldsymbol{PBP_{total} = PBP_{dom} + PBP_{tani} + PBP_{lahan}}$$ **(Pers. 13)**

Dengan PBP_{total} adalah nilai potensi beban pencemar total, PBP_{dom} adalah nilai potensi beban pencemar domestik; PBP_{tani} adalah nilai potensi beban pencemar pertanian; dan PBP_{lahan} adalah nilai potensi beban pencemar penggunaan lahan.

- <u>Potensi Beban Pencemar Domestik</u>

  Pada perhitungan potensi beban pencemar domestik, jumlah dari populasi di suatu kawasan sangat berpengaruh. Nilai potensi tersebut dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

  $$\boldsymbol{PBP_{dom} = P_i \, x \, F_e \, x \, R_e \, x \, \alpha}$$ **(Pers. 14)**

  Dengan, PBP_{dom} adalah besar beban pencemar domestik pada grid i; P_i adalah jumlah populasi pada grid i; F_e adalah faktor emisi penduduk terhadap jenis beban pencemar; R_e adalah rasio ekivalen suatu wilayah; dan α adalah koefisien transfer beban yang nilainya bergantung pada jarak terhadap sungai. Nilai koefisien dari Fe, Re, dan α untuk domestik tercantum pada tabel berikut.

Faktor Emisi		Rasio Ekivalen Wilayah		Jarak terhadap Sungai	
Zat pencemar	**Fe (kg/org/hr)**	**Jenis**	**Re**	**Jarak (m)**	**α**
BOD	0.04	Kota	1	0 – 100	1
COD	0.055	Pinggiran Kota	0.8125	100 – 500	0.85
TSS	0.038	Pedalaman	0.625	> 500	0.3

Sumber: Ananda (2017)

- Potensi Beban Pencemar Pertanian

  Potensi beban pencemar untuk pertanian hanya mempertimbangkan beberapa jenis tutupan lahan yang terkait dengan pertanian. Tutupan lahan ini dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sawah, palawija, dan kebun/ tegalan/ kebun campuran. Persamaan berikut digunakan untuk melakukan perhitungan beban pencemar pertanian.

  $$\boldsymbol{PBP_{tani} = (L_i \, x \, f_e \, x \, M) \, / \, d_m} \qquad \textbf{(Pers. 15)}$$

  Dengan, PBP_{tani} adalah potensi beban pencemar pertanian; L_i adalah luas tutupan lahan pada grid i; f_e adalah faktor emisi beban pencemar; M adalah jumlah musim tanam; dan d_m adalah jumlah hari musim tanam. Nilai koefisien dari fe untuk pertanian tercantum pada tabel berikut.

Parameter Zat Pencemar	Tutupan Lahan Pertanian		
	Sawah (kg/ha/msm tanam)	Palawija (kg/ha/msm tanam)	Kebun/ Tegalan (kg/ha/msm tanam)
BOD	225	125	32.5
COD	(BOD * 1.5)	(BOD * 1.5)	(BOD * 1.5)
TSS	0.46	2.4	1.6

Sumber: Ananda (2017)

- Potensi Beban Pencemar Penggunaan Lahan

  Potensi beban pencemar penggunaan lahan dihitung untuk daerah dengan tutupan lahan berupa hutan dan lahan terbangun. Persamaan berikut digunakan untuk melakukan perhitungan beban pencemar penggunaan lahan.

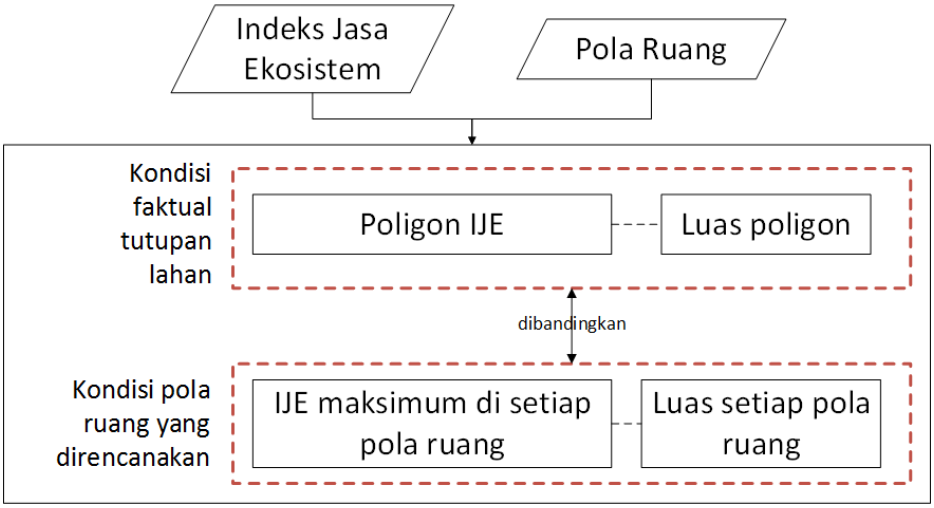
  $$\boldsymbol{PBP_{lahan} = (L_i \, x \, f_e) / \; 365 \; hari} \qquad \textbf{(Pers. 16)}$$

  Dengan, PBP_{lahan} adalah potensi beban pencemar penggunaan lahan, L_i adalah luas tutupan lahan pada grid i; dan f_e adalah faktor emisi beban pencemar. Nilai koefisien dari f_e untuk penggunaan lahan tercantum pada tabel berikut.

Parameter Zat Pencemar	Tutupan Lahan	
	Hutan (kg/ha)	Lahan Terbangun (kg/ha)
BOD	9.32	15.34
COD	(BOD * 1.5)	(BOD * 1.5)
Sumber: Ananda (2017)		

D. Metode Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk menjelaskan seberapa optimal potensi sumber daya alam telah dimanfaatkan. Dalam hal ini, potensi sumber daya alam diwakilkan oleh jasa lingkungan/jasa ekosistem. Salah satu cara untuk menilai efisiensi adalah dengan membandingkan kondisi pola ruang yang direncanakan dengan kondisi faktual dari tutupan lahan, dapat dilihat pada **Gambar 2.8** yang diilustrasikan pada diagram berikut.



Gambar 2.8 Alur Proses Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi dinilai berdasarkan luasan tutupan lahan faktual dan nilai indeks jasa ekosistem (IJE) di setiap pola ruang di Kota Balikpapan. Jasa lingkungan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah jasa lingkungan penyedia pangan, jasa penyedia air bersih, serta jasa pengaturan tata air dan banjir. Persamaan yang digunakan untuk menghitung efisiensi pada setiap pola ruang adalah:

$$\boldsymbol{Efisiensi} = \frac{\boldsymbol{L_x} \times \boldsymbol{IJE_x}}{\boldsymbol{Luas\ pola\ ruang} \times \boldsymbol{IJE_{max}}} \qquad \text{(Pers. 17)}$$

dengan:

L_x : luas area yang dihitung,

IJE_x : nilai IJE pada area yang dihitung, dan

$\boldsymbol{IJE_{max}}$: IJE maksimum di setiap jenis pola ruang.

Kemudian, efisiensi penyedia pangan, penyedia air bersih, serta pengaturan tata air dan banjir dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan jenis pola ruang dengan melihat proporsi penutup lahan faktual pada masing-masing pola ruang. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa sesuai penutup lahan faktual terhadap jenis pola ruang yang direncanakan.

E. Metode Analisis Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

Pada penyusunan DDDTLH di Kota Balikpapan, potensi keanekaragaman hayati disampaikan secara deskriptif dan analitis. Potensi keanekaragaman hayati secara deskriptif mengacu pada kajian keanekaragaman hayati terkait flora dan fauna, serta potensi habitatnya di lingkungan Kota Balikpapan. Secara analitis, potensi keanekaragaman hayati direpresentasikan pula dengan IJE Keanekaragaman Hayati yang dihitung dengan metode dibawah ini. Wilayah dengan IJE keanekaragaman hayati yang tinggi memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi pula.

Seiring dengan perkembangan wilayah, potensi keanekaragaman hayati yang tinggi ini dapat memiliki ancaman dari berbagai macam aktivitas. Untuk mengetahui ketahanan keanekaragaman hayati terhadap ancaman, salah satunya dapat dinilai berdasarkan bentuk geometris wilayahnya, yaitu nilai shape index yang dihitung dengan persamaan berikut:

$$\boldsymbol{Shape\ Index} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{Keliling}} \times \sqrt{\boldsymbol{4\pi \times Luas}} \qquad \text{(Pers. 18)}$$

Wilayah dengan bentuk yang compact, akan memiliki shape index yang tinggi dan artinya memiliki ketahanan yang tinggi karena tidak mudah terganggu akan adanya ancaman. Sebaliknya, wilayah dengan bentuk yang memanjang atau menjari, akan memiliki shape index yang rendah dan artinya memiliki ketahanan yang rendah karena akan mudah terganggu terhadap adanya ancaman.

Shape index akan bernilai 0 hingga 1 dan divisualisasi ke dalam lima kelas seperti berikut:

- ✓ 0,0 – 0,2 : Sangat rendah
- ✓ 0.2 – 0,4 : Rendah
- ✓ 0,4 – 0,6 : Sedang
- ✓ 0,6 – 0,8 : Tinggi
- ✓ 0,8 – 1,0 : Sangat tinggi

2.5 SEJARAH KOTA BALIKPAPAN

Kota Balikpapan terletak di tepi Teluk Balikpapan merupakan sebuah kota tepi air yang memiliki perkembangan paling pesat dari sektor ekonomi dan daya dukung kawasan terhadap pertumbuhannya (Pemerintah Kota Balikpapan, 2012). Kota Balikpapan dinilai memiliki jejak sejarah yang jelas yang dimulai dari perkampungan nelayan Bugis, kemudian ditemukannya ladang minyak bumi yang berlimbah yang membuat kota ini tumbung menopang sektor pertambangan minyak bumi besar besaran.

Bentuk perkembangan perkotaan Balikpapan ini wajib dan memiliki urgensi untuk diamati dan ditinjau sebagai bagian dari kontrol pada bentuk kota itu dan dampak-dampak yang akan timbul berdasarkan teori-teori perkotaan yang telah ada. Analisa perkembangan kota dilakukan pada lokasi di kota Balikpapan provinsi Kalimantan Timur.

Lokasi yang dipilih dipertimbangkan dengan adanya banyak kemungkinan kota Balikpapan dengan luas 50.330 ha akan bisa tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan Saat ini Kota Balikpapan tumbuh dan mendapatkan amanat baru sebagai kota penyokong Ibu Kota Negara Baru yang berada di tepi Teluk Balikpapan dan direncanakan menjadi kota yang mendapatkan jumlah limpahan populasi yang tinggi dari 750 ribu penduduk menjadi berlipat dimasa depan (Presiden Republik Indonesia, 2022)., tentunya dalam pembahasan mengenai analisa kota Balikpapan terhadap morfologi.

Citra kota umumnya dipengaruhi oleh aspek fisik kota. Menurut *Lynch* (1960) dalam bukunya*: Image of the city*, menyebutkan ada 5 (lima) elemen pembentuk citra kota secara fisik yaitu *path* (jalur), *edge* (tepian/pembatas), *district* (kawasan), *nodes* (simpul) dan

landmark (penanda/tetenger). dengan daerah pusat kegiatan sebagai intinya. Secara berurutan, tata ruang kota yang ada pada suatu kota yang mengikuti suatu pola konsentris ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah Pusat atau Kawasan Pusat Bisnis (KPB)

   Daerah pusat kegiatan ini sering disebut sebagai pusat kota. Dalam kawasan Balikpapan ini terdapat bangunan-bangunan utama untuk melakukan kegiatan baik sosial, ekonomi, poitik dan budaya.

2. Daerah Peralihan

   Daerah ini kebanyakan di huni oleh golongan penduduk kurang mampu dalam kehidupan sosial-ekonominya. Penduduk ini sebagian besar terdiri dari pendatang-pendatang yang tidak stabil (musiman), terutama ditinjau dari tempat tinggalnya



Sumber: Kawasan Kota Balikpapan 1908. GoDiscover.2016

   Lebar jalan raya di sekitar Klandasan sebelum kemerdekaan sekitar 3 meter. Pola jalan ini memanjang seperti Jl Jenderal Sudirman, Yos Sudarso (Jalan Minyak), dan Jl Ahmad Yani.

3. Daerah Pabrik

   Daerah ini di huni oleh pekerja-pekerja pabrik yang ada di daerah ini. Kondisi perumahannya disebabkan karena kebanyakan pekerja-pekerja yang tinggal di sini adalah dari golongan pekerja.



Sumber: Kilang minyak BPM. GoDiscover.1930

Antara 1945-1946, menjadi masa berbenah bagi Balikpapan. Salah satunya merehabilitasi Kilang Minyak yang masih berstatus milik BPM. Banyak para pekerja dari Jawa dilibatkan. Dari mereka berita proklamasi tersampaikan di Balikpapan. Ditindaklanjuti dengan sebuah rapat raksasa di Lapangan Foni, di Balikpapan Barat, tentang dukungan rakyat Balikpapan atas kemerdekaan Republik Indonesia



Sumber: Kilang minyak pertamina. Doc Humas Pertamina.2023

4. Daerah Perumahan yang Lebih Baik Kondisinya.

   Daerah ini dihuni oleh penduduk yang lebih stabil keadaannya dibanding dengan penduduk yang menghuni daerah yang disebut sebelumnya, baik ditinjau dari pemukimannya maupun dari perekonomiannya.



cawahcuw8aaltyk-gunung-dubbs-63c6317138207a16894a3ed2.jpg

Sumber: Rumah pejabat BPM di Gunung Dubbs 1950. GoDiscover.2013

bagian dari Komplek Pertamina adalah daerah pertama di Balikpapan yang mendapat pengaruh barat. Daerah ini dulunya adalah pemukiman pegawai BPM bangsa Eropa.



S umber:Rumah Dahor Balikpapan 1950. Mela hapsari.2019

5. Daerah Penglaju

   Daerah ini mempunyai tipe kehidupan yang dipengaruhi oleh pola hidup daerah disekitarnya. Sebagian menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan dan sebagian yang lain menunjukkan ciri-ciri kehidupan pedesaan, Kebanyakan penduduknya mempunyai lapangan pekerjaan nonagraris dan merupakan pekerja-pekerja penglaju yang bekerja di dalam kota, sebagian penduduk yang lain adalah penduduk yang bekerja di yang sesuai dengan ciri khas daerahnya.



Sumber: Jalan depan Benua Patra 1977. GoDiscover.2013

Menurut Spiro Kostof (1991), Kota adalah Leburan Dari bangunan dan penduduk, sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu. Bentuk kota ada dua macam yaitu geometri dan organik. Terdapat dikotomi bentuk perkotaan yang didasarkan pada bentuk geometri kota yaitu *Planned* dan *Unplanned.*

Lapangan merdeka menjadi ruang komunal dan ruang publik yang tidak teratur tetapi menunjukkan adanya kontak sosial dan saling menyesuaikan diri antara penduduk asli dan pendatang, antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Perubahan demi perubahan fisik dan non fisik (sosial) terjadi secara sepontan. Apabila salah satu elemnya terganggu maka seluruh lingkungan akan terganggu juga, sehingga akan mencari keseimbangan baru. Demikian ini terjadi secara berulang-ulang.

Menurut Kevin Lynch (1981), definisi model organik atau kota biologis adalah kota yang terlihat sebagai tempat tinggal yang hidup, memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakannya dari sekedar mesin, mengatur diri sendiri dan dibatasi oleh ukuran dan batas yang optimal, struktur internal dan perilaku yang khas.

1. Tata Guna Lahan

   Hasil analisis berbasis digitasi peta, secara teori bentuk morfologi Kota Balikpapan berorientasi pada tepi air. Pada periode awal Kota Balikpapan Bentuk kota dapat didefinisikan sebagai pola atau wujud dari tatanan bangunan dalam sebuah kawasan atau kota. Ekspresi sebuah morfologi kota secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu bentuk kompak dan bentuk tidak kompak.

   Pada hasil digitasi, kawasan tepi air Kota Balikpapan menjadi daya Tarik permukiman dan pusat ekonomi. Kemudian pada kawasan perluasan terdapat pertumbuhan yang sporadis atau *urban sprawl* dikarenakan tidak ada pusat perekonomian terpusat atau terkonsentrasi pada satu titik. Pada kawasan tepi air dari masa ke masa dimonopoli oleh bangunan pada sektor ekonomi pada sepanjang jalan jenderal Sudirman, kemudian pada kawasan yang memiliki jarak lebih dari 3 kilometer dari tepi air, terdapat permukiman warga Kota Balikpapan. Permukiman tidak terbentuk secara berkelanjutan tercermin dari jenis permukiman non formal dan swadaya masyarakat.

2. Bentuk dan Masa Bangunan

   Borneo Bay city merupakan bangunan tertinggi yang ada diBalikpapan berdasarkan standar *Council on Tall Buildings and Urban Habitat* (CTBUH) dan *Emporis*. ditentukan dari penampilan Bentuk maupun konfgurasi masa bangunan



Sumber: Borneo Bay City. Ekonomi.2019

3. Sirkulasi dan Parkir

   Sirkulasi parkir dikawasan Kota Balikpapan terkait prasarana jalan yang tersedia, bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan umum.

4. Ruang Terbuka (Open Space)

   Taman 3 generasi yang terletak Jl. Jamrud I, Sepinggan merupakan area ruang terbuka yang menyangkut lansekap yang terdiri dari elemen keras dan elemen lunak. fasilitas yang lengkap terikat dengan perabotan yang ada.

5. Area Pedestrian

   Pedestrian merupakan area yang ditunjukan untuk pejalan kaki yang bebas hambatan dalam melakukan pergerakan baik statis maupun dinamis.

6. Fungsi Penggerak Kegiatan

   Penggerak kegiatan perdagangan selain itu juga terdapat kegiatan perdagangan yang membantu meningkatkan kualitas udara di kawasan ini

7. Pendukung Kegiatan (Activity Support)

   Pendukung kegiatan pada kawasan Kota Balikpapan, yaitu Lapangan merdeka yange terletak di JL. Jendral Sudirman yang memiliki ciri khusus yang berpengaruh terhadap fungsi penggunahan lahan yang berkesinambungan

8. Konservasi

   Konservasi pada kawasan Kota Balikpapan terhadap bangunan bersejarah seperti Dahor Heritage Balikpapan. bangunan ini merupakan sebuah rumah peninggalan kolonial Belanda. yang menjadi lokasi cagar budaya di Balikpapan sejak tahun 1997. dikawasan tersebut terdapat sekitar 9 rumah Dahor yang bangunannya masih terawat dengan baik. Rumah-rumah bergaya unik tersebut pun kini digunakan untuk sejumlah keperluan seperti perpustakaan, taman baca, hingga informasi sejarah mengenai eksplorasi migas dari zaman Belanda hingga saat ini.

2.6 PERKEMBANGAN AKTIVITAS WILAYAH

2.6.1 Dasar Teori Pengembangan Wilayah

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah *growth theory, rural development theory, agro first theory, basic needs theory,* dan lain sebagainya. Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepasa landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari "transisi orisinil". Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Syamsul, 2005). Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) yang dikembangkan oleh Hirscham dan Myrdal.

Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai leading sektor.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan, satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri, 2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu:

1. Keunggulan komparatif *(imperfect mobility of factor).* Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.

2. Aglomerasi *(imperfect divisibility)*. Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.
3. Biaya transport *(imperfect mobility of good and service)*. Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah antara lain dipengaruhi oleh aspek-aspek keputusan lokasional, terbentuknya sistem perkotaan, dan mekanisme aglomerasi. Istilah pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah sesungguhnya tidak bermakna sama.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan suatu proses kontiniu hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.

Perkembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya perubahan struktural. Wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor *(sektor theory)* dan teori tahapan perkembangan *(development stages theory).* Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional, dihubungan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), serta sektor tertier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ini ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya, yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tertier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder.

Sedangkan teori tahapan perkembangan dikemukakan oleh para pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Thompson dan lain-lain. Teori ini dianggap lebih mengadopsi unsur spasial dan sekaligus menjembatani kelemahanan teori sektor. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan melalui lima tahapan.

1. Wilayah dicirikan oleh adanya industri yang dominan. Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produk yang dihasilkan oleh industri tersebut, antara lain minyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk- produk primer lainnya. Industri demikian dimiliki oleh banyak negara dalam awal pertumbuhannya.
2. Tahapan ekspor kompleks. Tahapan ini menggambarkan bahwa wilayah telah mampu mengekpsor selain komoditas dominan juga komoditas kaitannya. Misalnya, komoditas dominan yang diekspor sebelumnya adalah minyak bumi mentah, maka dalam tahapan kedua wilayah juga mengekspor industri (metode) teknologi penambangan (kaitan ke belakang) dan produk-produk turunan dari minyak bumi (kaitan ke depan) misalnya premium, solar dan bahan baku plastik.
3. Tahapan kematangan ekonomi. Tahapan ketiga ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telah terdiversifikasi dengan munculnya industri substitusi impor, yakni industri yang memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dari luar wilayah. Tahapan ketiga ini juga memberikan tanda kemandirian wilayah dibandingkan wilayah lainnya.

4. Tahapan pembentukan metropolis *(regional metropolis).* Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi dan melayani kebutuhan barang dan jasa wilayah pinggiran. Dalam tahapan ini pengertian wilayah fungsional dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomi wilayah lokal berfungsi sebagai pengikat dan pengendali kota-kota lain. Selain itu, volume aktivitas ekonomi ekspor sangat besar yang diiringi dengan kenaikan impor yang sangat signifikan.
5. Tahapan kemajuan teknis dan profesional *(technical professional virtuosity).* Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah memberikan peran yang sangat nyata terhadap perekonomian nasional. Dalam wilayah berkembang produk dan proses-proses produksi yang relatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi. Aktivitas ekonomi telah mengandalkan inovasi, modifikasi, dan imitasi yang mengarah kepada pemenuhan kepuasan individual dibanding kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi wilayah menjadi kompleks (economic reciproating system), mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas ekonomi lainnya (Nugroho dan Dahuri, 2004).

2.6.2 Arahan Perkembangan Aktivitas Wilayah Menurut Dokumen Pembangunan dan Spasial

2.6.2.1 RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesan di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata Kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya, dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Adaptasi terhadap perubahan dan tantangan tersebut saat ini telah menjadi kebijakan dalam Membangun Indonesia Emas 2045 yang memiliki visi abadi yakni Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi tersebut kemudian dicerminkan ke dalam lima sasaran utama yang memberikan unsur imperative pencapaian pembangunan yakni:

1. Perdapatan per kapita setara negara maju
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju emisi nol bersih.

Pentahapan pembangunan dalam jangka Panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mencapai hal tersebut dilakukanlah Langkah transformasi yang berisi arah pembangunan dan indicator capaian transformasi sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.1 dibawah ini.

Tabel II.2 Arah dan Transformasi Pembangunan RPJPN Tahun 2025 - 2045

Transformasi	Arah Pembangunan	No	Indikator
Transformasi Sosial	Kesehatan untuk semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		2	Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 2. Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
		3	Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran 3. Rata-rata Nilai PISA (Membaca, Matematika dan Sains); 4. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 5. Harapan lama sekolah
		6	Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi (%)
		7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
	Perlindungan sosial yang adaptif	8	Tingkat kemiskinan (%)
		9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial nasional (%)
		10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)
Transformasi Ekonomi	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	11	Rasio PDB industri pengolahan (%)
		12	Pengembangan pariwisata 6. Rasio PDB Pariwisata (%) 7. Devisa Pariwisata (miliar USD)
		13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN 8. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%); 9. Rasio kewirausahaan (%); 10. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%) 11. Return on Asset (ROA) BUMN (%)
		15	Tingkat pengangguran terbuka (%)
		16	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
		17	Tingkat penguasaan IPTEK 12. Pengeluaran iptek dan inovasi (persen PDB) 13. Peringkat indeks inovasi global (peringkat)
	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat penerapan ekonomi hijau 14. Indeks ekonomi hijau 15. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
	Transprmasi Digital	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Biaya Logistik (% PDB)
		21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan 16. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%); 17. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)
Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola yang	24	Indeks materi hukum
		25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik
		26	Indeks pelayanan publik

Transformasi	Arah Pembangunan	No	Indikator
	Berintegritas dan Adaptif	27	Anti Korupsi 18. Indeks integritas nasional 19. Indeks persepsi korupsi
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan, Nasinal Tangguh dan Demokrasi Substansional	28	Indeks Pembangunan Hukum
		29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
		30	Indeks Demokrasi Indonesia
	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)
		32	Tingkat Inflasi (%)
		33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan 20. Aset Perbankan/PDB (%); 21. Aset Dana Pensiun/PDB (%); 22. Aset Asuransi/PDB (%); 23. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 24. Total Kredit/PDB (%)
		34	Inklusi Keuangan (%)
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)
		36	Asia Power Index (Military Capability)
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragaman (IKUB)
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyrakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		42	Kualitas Lingkungan Hidup 25. Kualitas Lingkungan Hidup; 26. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%) 27. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan energi, air dan pangan 28. Ketahanan energi – Indeks Ketahanan Energi 29. Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%); 30. Ketahanan Air a. Kapasitas Tampungan air (m3/kapita) b. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)
		45	Persentase penurunan emisi GRK (%) - Komulatif - Tahunan

Sumber : Agenda Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025 - 2029

2.6.2.2 RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Berdasarkan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 – 2029 disebutkan bahwa isu staregis kewilayahan dalam Evaluasi Pembangunan Daerah di Wilayah Kalimantan memiliki isu strategis yang diantaranya :

1. Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
2. Minimnya hilirisasi industri dan diservifikasi produk turunan berbasis SDA
3. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar
4. Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal dan terluar
5. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompotensi tenaga pendidik dan kesehatan
6. Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan
7. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah

2.6.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW)

Penetapan muatan RTRWN yang terkait dengan Kota Balikpapan antara lain adalah:

1) Penetapan Kota Balikpapan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dalam sistem perkotaan nasional di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang. Fokus pengembangan pada Revitalisasi dan Percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional dengan penekanan pada pengembangan/peningkatan fungsi.
2) Rencana pembangunan jalan tol Antarkota, meliputi:
   a. Simpang Penajam – Balikpapan (II/6); dan
   b. Balikpapan – Samarinda (II/6);
3) Penetapan Pelabuhan sebagai simpul transportasi laut nasional, sebagai berikut:
   a. Pelabuhan Balikpapan sebagai Pelabuhan Utama dengan program pemantapan pelabuhan;
   b. Pelabuhan Kariangau sebagai Pelabuhan Angkutan Penyeberangan dengan program pemantapan pelabuhan
4) Penetapan Bandar Udara sebagai simpul transportasi udara nasional, sebagai berikut:
   a. Bandara Sepinggan/Sultan Aji Muhammad Sulaiman sebagai Bandar Udara Pengumpul Primer dengan program pemantapan bandar udara.
5) Penetapan Jaringan Infrasatruktur Pembangkitan Tenaga Listrik, berupa pengembangan pembangkitan tenaga listrik di Kota Balikpapan.

6) Kota Balikpapan berada dalam areal Wilayah Sungai (WS) Mahalam yang merupakan WS Lintas Provinsi dengan program utama konservasi sumber daya air, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

7) Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN), yaitu Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan sebagai KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan program utama pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan.

2.6.2.4 Penetapan Ibukota Nusantara (IKN)

Penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Secara umum peraturan perundang-undangan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara, selain selama ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus terkait Ibu Kota Negara. Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara sendiri didasarkan pada terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, yang dimaksud dengan Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Negara ditetapkan bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai **Ibu Kota Nusantara**. Ibu Kota Nusantara sendiri merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-undang.

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia dengan tujuan sebagai berikut:

a. kota Berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamana, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;

b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta

c. menjadi simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmoniasan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Peraturan perundang-undangan ini mengatur pula cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara yang sebagian berada di wilayah yang saat ini (eksisting) merupakan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang ini, posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada:

a. Bagian Utara pada 117" O' 3L.292" Bujur Timur dan O' 38'44.912" Lintang Selatan;

b. Bagian Selatan pada 1L7" lL' 51.903" Bujur Timur dan 1" 15'25.260" Lintang Selatan;

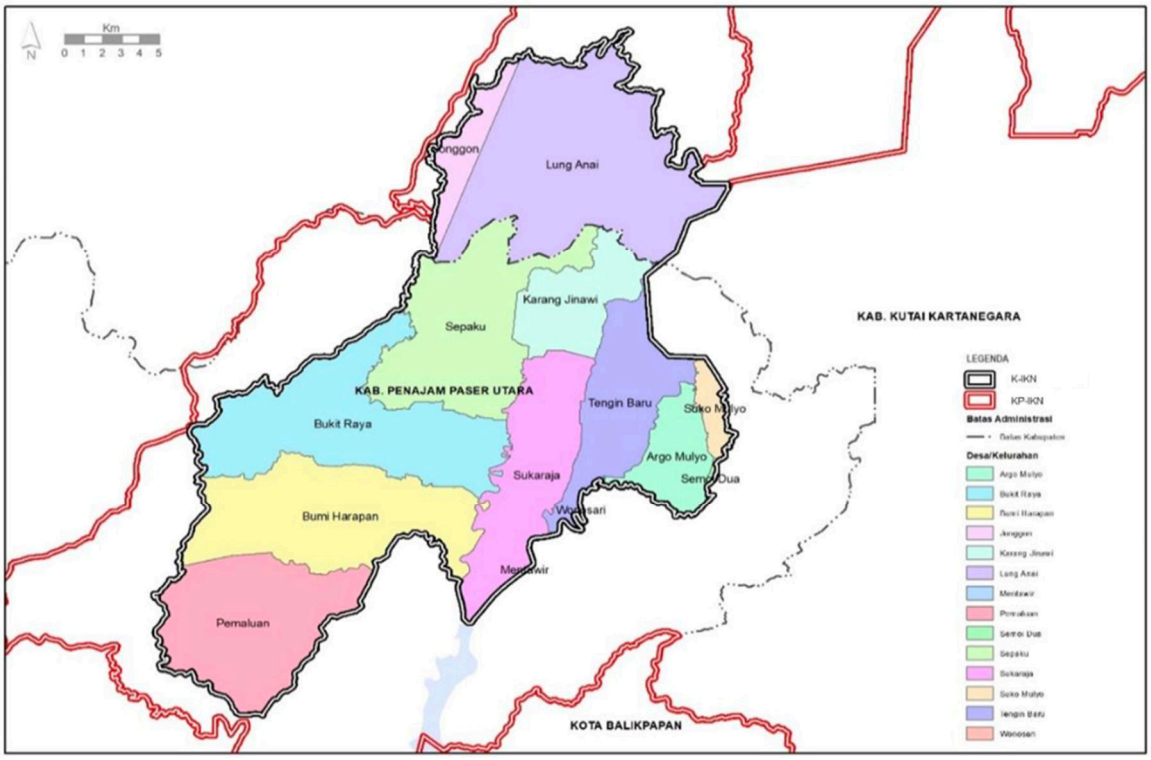
c. Bagian Barat pada 116' 31' 37.728" Bujur Timur dan O' 59'22.51O" Lintang Selatan; dan

d. Bagian Timur pada ll7" L8'2aO84" Bujur Timur dan l' 6' 42.398' Lintang Selatan.

Secara administratif, saat ini wilayah IKN terletak di dua kabupaten, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan sebagian Kabupaten

Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja), dengan perincian sebagai berikut:

a. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara: 15 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku dan 1 desa/kelurahan di Kecamatan. Penajam;
b. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara: 21 desa/kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, serta 7 desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa.



Sumber: UU No. 3/2022, Lampiran II

Gambar 2.9 Peta Batas Administrasi Eksisting Kawasan IKN

Batas wilayah IKN adalah:

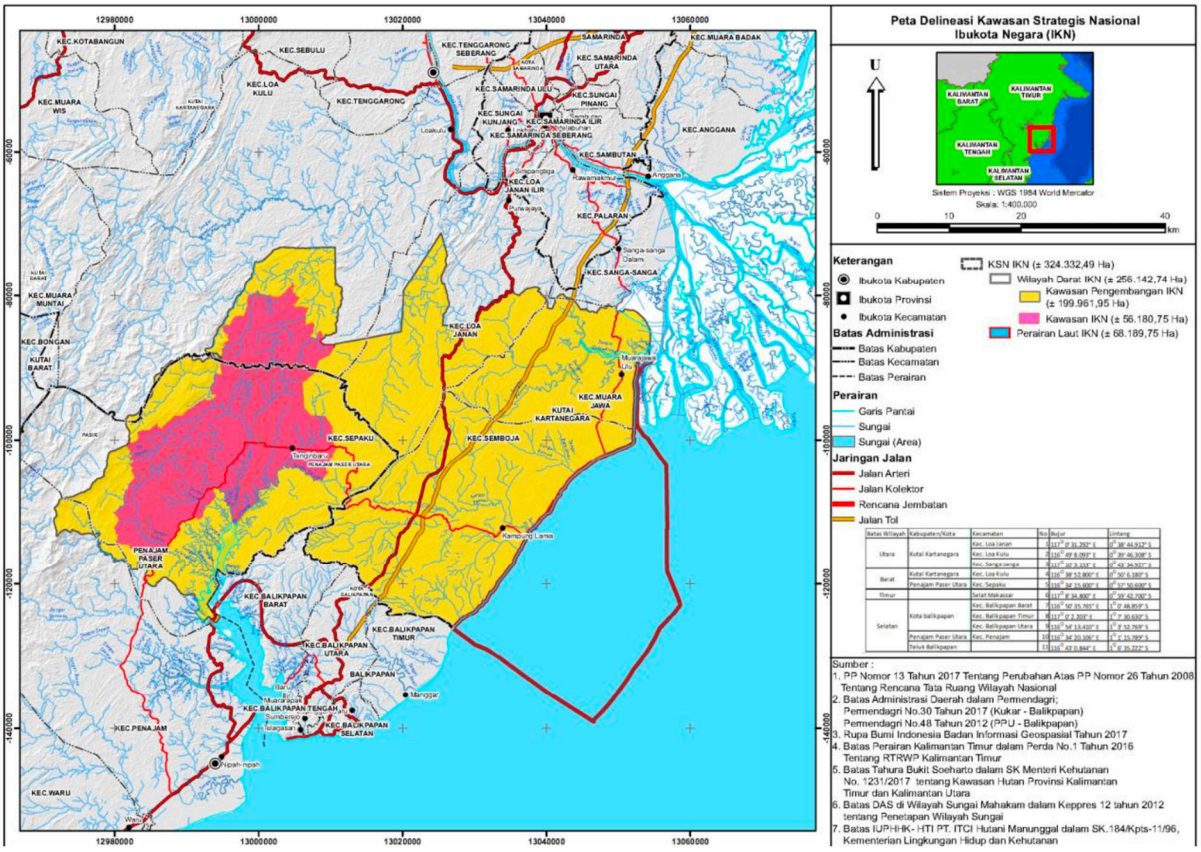
a. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
c. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga- Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas lebih kurang 256.142 (dua ratus lima puluh enam ribu serratus empat puluh dua hectare) dan wilayah perairan laut seluas lebih kurang 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh Sembilan hectare).

Wilayah daratan IKN dibagi menjadi 2 (dua) wilayah, sebagai berikut:

a. Kawasan IKN (KIKN), dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 ha; dan
b. Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) seluas lebih kurang 199.962 ha.

Di dalam wilayah KIKN terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas lebih kurang 6.671 ha.



Sumber: UU No. 3/2022, Lampiran I

Gambar 2.10 Peta Delineasi Kawasan Ibu Kota Negara

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang tertera pada Lampiran II. Di dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diuraikan hal-hal terkait:

- Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara, yang terdiri dari Kawasan IKN (KIKN) dan Kawsan Pengembangan IKN (KPIKN);
- Visi, Tujuan dan Prinsip Dasar IKN; serta
- Rencana Pentahapan Pembangunan dan Skema Pendahaan IKN

Rencana pengembangan IKN yang berbatasan wilayahnya dengan Kota Balikpapan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan ruang Kota Balikpapan, terutama kaitannya dengan peran dan fungsi Kota Balikpapan dalam mendukung pengembangan IKN.

Rencana Induk IKN menetapkan IKN sebagai *superhub* ekonomi yang diintegrasikan dalam visi *Reimagined Indonesia: Locally Integrated, Globally Connected, Universally Inspired*. Dalam kerangka visi *Locally Integrated* atau terintegrasi secara domestic dimaknai bahwa IKN superhub ekonomi akan mengubah wajah perekonomian Indonesia agar menjadi lebih inklusif melalui strategi tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) serta kerja sama dengan kabupaten/kota. Dalam hal ini Kota Balikpapan memiliki peran penting dalam pengembangan IKN sebagai *superhub* ekonomi bersama dengan Samarinda.

Kota Balikpapan juga berperan penting sebagai pintu gerbang utama menuju IKN, dimana Bandar Udara Sepinggan menjadi pintu gerbang penting yang akan memberikan dampak besar terhadap pengembangan IKN. Interkoneksi antara Bandara Sepinggan dengan IKN utamanya melalui pengembangan jalan tol serta jaringan kereta api. Konektivitas sistem transit menghubungkan Pelabuhan, bandara, Kota Balikpapan, KIPP, KIKN, dan KPIKN akan dikembangkan untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan di tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda).

Dalam mewujudkan **konsep Tiga Kota** yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. **IKN** akan menjadi **'saraf'** dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk *Smart City* dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan. **Samarinda** akan menjadi **'jantung'** dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur. **Balikpapan** akan menjadi **'otot'** pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

2.6.2.5 RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2023 - 2042. Perda ini menggantikan Perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.

Revisi terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dilatarbelakangi terutama adanya perubahan peraturan perundang-undangan baru, terutama Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan pengintegrasian RTRW Provinsi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Selain itu adanya penetapan Ibu Kota Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rencana tata ruang Provinsi Kalimant Timur.

Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur menjadi arahan dan panduan baru bagi penataan ruang di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kota Balikpapan. Muatan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 di Kota Balikpapan meliputi:

1) Kota Balikpapan bersama dengan Kota Samarinda, kota Tenggarong, dan Kota Bontang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
2) Jalan Arteri Primer:
   - Jalan Sudirman;
   - Jalan Iswahyudi;
   - Jalan Jl. Syarifuddin Yoes (Jl. ke Airport);
   - Jl. MT Haryono/Ring Road
   - Jl. Soekarno-Hatta
   - Jl. Akses TPK Kariangau
3) Jalan Kolektor Primer:
   - Jl. Patimura (akses Terminal Batu Ampar);
   - Jl. Akses Pelabuhan penyeberangan Kariangau;
   - Jl. Mulawarman;
   - Jl. Ahmad Yani (akses Pelabuhan Handil II);
4) Jalan Tol:
   - Balikpapan-Samarinda;
   - Bandar Udara Sepinggan – Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN;
   - Tol Teluk Balikpapan – Penajam;
5) Terminal
   - Terminal Penumpang Tipe A di Batu Ampar;
   - Terminal Barang Semayang dan Terminal Barang Kariangau Km 5,5
6) Jembatan Timbang
   - Jembatan Timbang Kariangau Km. 17;
7) Jembatan;
   - Jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan;
8) Jaringan Jalur Kereta Api
   - Trans Kalimantan Tanjung – Penajam Paser Utara – Batas Balikpapan;
   - Trasn Kalimantan Balikpapan – Samarinda;
9) Stasiun Kereta Api
   - Stasiun Kereta Api Karang Joang;
10) Lintas Penyeberangan Antar Provinsi:

- Kariangau Kota Balikpapan dengan Taipa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dan Kariangau Kota Balikpapan dengan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk tengah; dan
- Kariangau Kota Balikpapan dengan Lamongan di Pulau Jawa yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

11) Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi:

- Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kariangau Balikpapan dengan Handil II;

12) Pelabuhan Penyeberangan:

- Pelabuhan Kariangau

13) Pelabuhan Umum

- Pelabuhan Balikpapan/Semayang sebagai Pelabuhan Utama;
- Pelabuhan Kampung Baru sebagai Pelabuhan Pengumpan;
- Terminal Umum Kariangau sebagai bagian dari Pelabuhan Balikpapan

14) Pelabuhan Perikanan

- Pangkalan Pendaratan Ikan Manggar Baru;

15) Bandar Udara

- Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sebagai Bandar Udara Pengumpul;

16) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi:

- tangki timbun (1 unit), kilang Liquefied Petroleum Gas dan refinery unit-V (Refinery Development Master Plan) di Kota Balikpapan

17) Jaringan Minyak dan Gas Bumi:

- Jaringan minyak dan gas bumi Balikpapan;
- Pipa bawah laut Sepinggan – pesisir Sepinggan;
- Pipa bawah laut Sepinggan/Balikpapan – offshore;

18) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik:

- PLTU di Balikpapan;
- PLTD di Balikpapan;

19) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

- Margasari-Industri;
- Margasari-Karangjoang;
- Senipah-Margasari;
- New Balikpapan-Kariangau;
- Palaran-Senipah;

20)Gardu Listrik

- GI Gunung Malang/Industri,
- GI Batakan/Manggar Sari,
- GI Karang Joang/Giri Rejo,
- GI Kariangau, dan
- GI New Balikpapan

21)Bangunan Pengendali Banjir:

- Bendali I,
- Bendali II,
- Bendali III,
- Bendali IV,
- Bendali V,
- Bendali Hulu Sungai Ampal
- Bendali Sungai Wain (pusat)/Bendungan Pertamina

22)Bangunan Sumber Daya Air:

- Embung Aji Raden,
- Bendungan Manggar,
- Bendungan Teritip,
- Embung Sungai Wain, dan
- Bendungan Sungai Wain

23)SPAM Regional:

- SPAM Regional Balikpapan Sistem Sepaku Semoi;
- SPAM Regional Balikpapan Sistem Mahakam dan Rencana Waduk Batu Lepek;

24)SPAL

- SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan;

25)Sistem Pengolahan Limbah B3 di Kariangau

26)Jaringan Persampahan

- TPA Regional Manggar

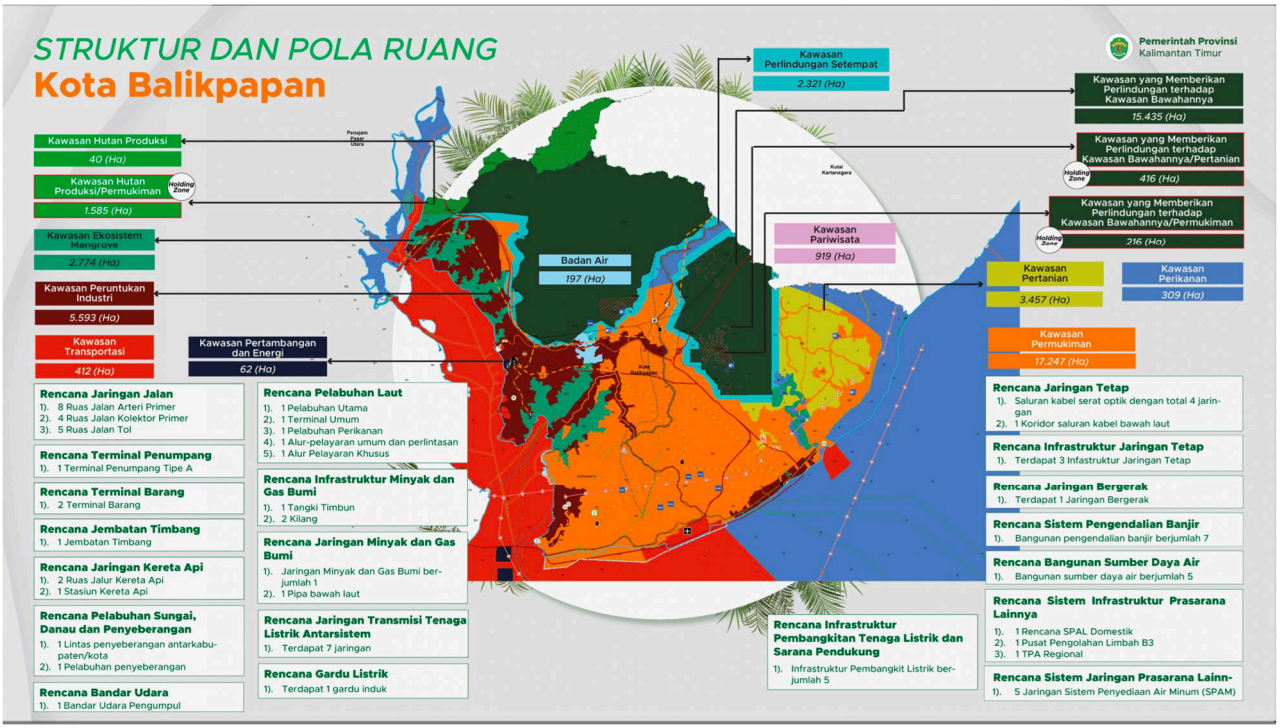
27)Pola Ruang

- Hutan Lindung;
- Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya sebagai zona tunda (holding zone);
- Kawasan perlindungan setempat;

- Kawasan ekosistem mangrove;
- Kawasan hutan produksi;
- Kawasan perikanan budidaya;
- Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- Kawasan peruntukan industry;
- Kawasan permukiman
- Dll

28) Kawasan Strategis Provinsi

- Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung sebagai KSP pertumbuhan ekonomi;
- Kawasan Teluk Balikpapan sebagai KSP lingkungan hidup



Gambar 2.11 Arahan RTRWP Kalimantan Timur Terhadap Kota Balikpapan

2.6.2.6 RTRW Kota Balikpapan

Adapun kebijakan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang saat ini sedang dalam tahap lintas sektor di Kementerian ATR dengan muatan sebagai berikut:

Kota Balikpapan dalam hal ini diarahkan sebagai salah satu pusat pengembangan industry hijau serta menjadi bagian dari pengembangan IKN, khususnya terkait strategi tiga Kota dalam mewujudkan superhub ekonomi IKN. Penetapan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan juga dilakukan dengan mempertimbangkan konsep penataan ruang yang dikembangkan. Secara umum terdapat 4 (empat) konsep penataan ruang yang

dikembangkan di Kota Balikpapan, yaitu: (a) konsep kota hijau *(green city);* (b) konsep kota kompak *(compact city);* (c) konsep kota tepi air *(waterfront city);* dan (d) konsep kota pintar *(smart city).*

Berdasarkan pertimbangan dan kriteria di atas, maka ditetapkan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan, yaitu:

Mewujudkan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras, berwawasan lingkungan, dan berketahanan bencana guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional dan bagian Superhub Ekonomi IKN

Tujuan menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota jasa didasarkan pada peran sector jasa (sector tersier) yang saat ini yang menjadi sector unggulan dan berpotensi untuk terus berkembang terutama dalam melayani skala provinsi, regional dan nasional. Hal ini juga didasarkan pada peran Kota Balikpapan dalam mendukung pengembangan IKN.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Kota Balikpapan merupakan kebijakan dan strategi (Langkah-langkah) yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan struktur ruang yang mendukung perwujudan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan.

Kebijakan #1 : penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan

Kebijakan ini ditetapkan dengan pengembangan dan penguatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi masing-masing sesuai hirarki dan skala pelayanannya. Pusat-pusat pelayanan ini dikembangkan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan berkelanjutan serta pendukung Kota Balikpapan sebagai pusat pertumbuhan nasional dan bagian dari superhub ekonomi IKN.

Strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan kebijakan penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan tersebut adalah:

1) memperkuat peranan pusat pelayanan kota (PPK) sebagai kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik;
2) mengembangkan sub pusat pelayanan kota (SPPK) di kawasan yang belum berkembang; dan
3) mengembangkan pusat pelayanan lingkungan (PPL) secara merata di kawasan pinggiran

Kebijakan #2 : peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarkawasan

Kebijakan ini ditetapkan dalam upaya mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa yang dinamis, selaras dan berkelanjutan. Sebagai kota jasa, Kota Balikpapan perlu didukung oleh aksesbilitas dan konektivitas yang baik antarkawasan, termasuk dengan wilayah lain di sekitarnya, terutama keterkaitan dengan IKN dan Kota Samarinda dalam rangka

membangun strategi tiga Kota dalam kerangka pengembangan superhub ekonomi IKN.

Strategi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarakawasan tersebut dilakukan dengan:

1) mendukung pengembangan jaringan jalan strategis nasional dan jalan non strategis nasional;
2) mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara kota;
3) meningkatkan ruas-ruas jalan utama;
4) mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di wilayah kota;
5) mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan permukiman;
6) menghubungkan jalan antar kawasan permukiman;
7) meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;
8) mengembangkan terminal angkutan barang;
9) mengembangkan jembatan antar pulau; dan
10) meningkatkan pelayanan kebandarudaraan

Kebijakan #3 : peningkatan pelayanan sistem prasarana yang merata dan ramah lingkungan (zero waste)

Kebijakan ini dikembangkan terutama untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana melalui peningkatan pelayanan sistem prasarana wilayah yang merata dan ramah lingkungan.

Strategi peningkatan pelayanan sistem prasarana yang merata dan ramah lingkungan *(zero waste)* dilakuikan dengan:

1) mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;
2) mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata;
3) meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem jaringan sumber daya air;
4) mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota; dan
5) mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kota Balikpapan merupakan kebijakan dan strategi (Langkah-langkah) yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan pola ruang yang mendukung perwujudan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan, terutama sebagai kota jasa yang dinamis, selaras, berwawasan lingkungan, dan berketahanan bencana.

Kebijakan pola ruang Kota Balikpapan juga diarahkan untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai pusat pertumbuhan Nasional sekaligus bagian dari superhub ekonomi IKN. Artinya pengembangan ekonomi yang diarahkan dalam kerangka peran Kota Balikpapan dalam strategi tiga kota perlu diwujudkan dalam kebijakan pola ruang Kota Balikpapan.

Kebijakan #1 : perwujudan kelestarian kawasan lindung

Kebijakan ini terutama ditetapkan dalam upaya mewujudkan pengembangan Kota Balikpapan yang berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana. Strategi perwujudan kelestarian kawasan lindung dilakukan melalui:

1) menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
2) menjaga keberlanjutan hutan lindung;
3) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
4) merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
5) mengintegrasikan fungsi kawasan lindung dengan fungsi wisata

Kebijakan #2 : peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota

Kebijakan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pengembangan Kota Balikpapan yang selaras dan berwawasan lindkungan. Strategi perwujudan peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Kota dilakukan melalui:

1) menyediakan RTH 30% dari luas wilayah Kota;
2) mengembangkan RTH di kawasan sempadan;
3) mengembangkan RTH di kawasan penyangga hutan lindung.

Kebijakan #3 : pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan

Kebijakan ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan secara keseluruhan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras, berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana; sekaligus mewujudkan Kota Balikpapan sebagai pusat pertumbuhan Nasional dan bagian dari superhub ekonomi IKN. Strategi perwujudan pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan dilakukan melalui:

1) mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;
2) mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki; dan
3) mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan kawasan sekitarnya.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Balikpapan merupakan kebijakan dan strategi (Langkah-langkah) yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan kawasan strategis yang mendukung perwujudan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan, terutama sebagai kota jasa yang dinamis, selaras, berwawasan lingkungan, dan berketahanan bencana. Secara umum kawasan strategis kota yang dikembangkan di Kota Balikpapan meliputi kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya, dan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan. Ketiganya dimaksudkan untuk mendukung tujuan penataan ruang Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras, berwawasan lingkungan, dan berketahanan iklim serta mendukung pusat pertumbuhan Nasional dan bagian dari *superhub* ekonomi IKN.

Kebijakan #1 : pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kebijakan ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan sebagai kota Jasa, pusat pertumbuhan Nasional, sekaligus bagian dari *superhub* ekonomi IKN.

Adapun strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah:

1) memprioritaskan pengembangan sistem prasarana di kawasan strategis;
2) pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu yang berwawasan lingkungan;
3) pengembangan kawasan ekonomi pada sepanjang pantai dalam mendukung konsep *compct city/green city bulding* melalui reklamasi atas *Coastal Road* Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota;
4) pengembangan kawasan kota baru di wilayah timur Balikpapan; dan
5) memberikan insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis ekonomi.

Kebijakan #2 : pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya

Kebijakan ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan sebagai kota yang dinamis dan selaras. Adapun strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:

1) mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan

2) mengembangkan kawasan permukiman nelayan secara terpadu rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan #3 : pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup

Kebijakan ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan sebagai kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana. Adapun strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup adalah:

1) mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
2) melestarikan kawasan pesisir, sumber daya air dan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati; dan
3) mengembangkan kawasan konservasi dalam menjaga kelestarian alam, ketersediaan sumber daya air dan perlindungan keanekaragaman hayati.

2.7 KEBIJAKAN FOLU NET SINK 2030 DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dalam rangka pemantapan kebijakan dan langkah serta implementasi dan evaluasi bidang-bidang sektor kehutanan dimaksud, maka Pemerintah RI telah menetapkan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi Gas Rumah Kaca untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional *"Indonesia's FOLU Net Sink 2030"* sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Sebagai negara yang rentan terhadap dampak negatif dari perubahan iklim dan memberi kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca global, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengurangi emisi GRK nasional. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28H yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya, dan menjadi dasar komitmen Indonesia untuk pengendalian perubahan iklim. Untuk mencapai target, dibutuhkan perubahan yang mendasar baik dalam sistem energi, maupun pada sistem penggunaan pangan dan lahan dengan meminimumkan *trade off* dari target ketahanan energi, ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan deforestasi, penggunaan air, serta persaingan penggunaan lahan.

Maka pemerintah Indonesia menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Emisi yang berketahanan Iklim yang berperan penting dalam; (i) menyelaraskan tujuan dan target iklim dengan tujuan nasional, sub-nasional dan internasional termasuk SDGs; (ii) melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah *(Non Party Stakeholders,* NPS), (iii) meningkatkan peluang untuk inovasi, dan (iv) memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat.

Upaya signifikan mengurangi emisi sektor FOLU dan mengubahnya menjadi net sink pada tahun 2030 (dalam skenario Strategi Jangka Panjang Rendah Emisi yang berketahanan Iklim) akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya sebagai berikut:

1. pengurangan emisi dari deforestasi;
2. pengurangan emisi dari lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut);

3. peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon melalui pengurangan degradasi hutan;
4. peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon melalui peningkatan regenerasi alami;
5. penerapan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari;
6. restorasi dan perbaikan tata air gambut;
7. restorasi dan rehabilitasi hutan (penanaman pengayaan untuk meningkatkan serapan karbon);
8. optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hutan dan pertanian serta perkebunan;
9. peningkatan produktivitas lahan dan indeks penanaman;
10. pencegahan konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Jawa;
11. pengurangan kehilangan hasil pertanian dan limbah makanan (food loss and food waste).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menterjemahkan komitmen dan kebijakan tersebut ke dalam rencana kawasan hutan melalui Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan rencana pembangunan melalui Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. RKTN memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2011-2030.

Salah satu arah kebijakan umum dalam RKTN adalah peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam mendukung kebijakan umum tersebut telah ditetapkan dalam kebijakan dan strategi yang menjadi arahan pemanfaatan ruang di kawasan hutan untuk menjamin upaya pencapaian target *Nationally Determined Contribution (NDC)* yaitu kawasan konservasi, kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, kawasan prioritas rehabilitasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, dan kawasan untuk non kehutanan sebagaimana yang disajikan pada dibawah ini.

Tabel II.3 Arahan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN

Arahan pemanfaatan pada 2030	Fungsi Kawasan (juta ha)				Jumlah
	HK	HL	HP Terbatas	HP Tetap	
Kawasan untuk konservasi	26,42				26,42
Kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut	-	24,30	5,83	4,02	34,15
Kawasan prioritas rehabilitasi	1,00	1,82	0,39	0,38	3,59
Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis koorporasi	-	0,47	15,86	19,62	35,95
Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	-	2,59	4,45	5,7	12,74
Kawasan untuk non kehutanan	-	-	-	-	13,07
Jumlah	**27,42**	**20,18**	**26,53**	**29,72**	
Luas efektif kawasan hutan 2030	**112,85**				

Sumber: Dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030

Untuk meningkatkan komitmen sektor FOLU menuju net sink memerlukan transformasi kebijakan yang dapat mendorong perubahan yang sistemik dalam pemanfaatan lahan ke depan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang transformatif untuk mendukung pencapaian target NDC melalui peningkatan pelaksanaan aksi mitigasi sektor FOLU menuju net sink. Beberapa kebijakan kunci sektor lahan dan kehutanan yang dapat mendorong perubahan yang sistemik dalam pemanfaatan lahan ke depan di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya, diantaranya:

a) Kegiatan prakondisi kawasan hutan menjadi pondasi penting dalam meletakkan dasar pengelolaan hutan menuju hutan yang lestari dan berkeadilan. Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin *(enabling condition)* yang utama bagi segala aktivitas berusaha maupun non berusaha di kawasan hutan. Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan ini adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, memiliki kejelasan status, letak, batas, luasan, serta keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat serta bebas dari hak-hak pihak ketiga. Percepatan penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan prioritas sebagaimana dimandatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya mandat tersebut, Pemerintah Indonesia dalam hal ini KLHK memiliki tugas untuk menyelesaikan penetapan kawasan hutan paling lama sampai tahun 2023. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang perlu kerjasama dari berbagai elemen. Berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sampai dengan Januari 2022, total luasan kawasan hutan yang telah berhasil ditetapkan oleh KLHK seluas 90.526.807 ha (71,96 %) dari total luas kawasan hutan di Indonesia +125.795.306 ha dengan panjang batas kawasan hutan +438.380 km. Terdapat potensi penetapan kawasan hutan seluas ±11.600.403 ha hasil dari penataan batas kawasan hutan Tahun 2021. Rencana penyelesaian penetapaan kawasan hutan yang ditargetkan selesai pada tahun 2022 dan 2023 yaitu seluas +23.668.096 ha dengan panjang batas ±61.299 km.

b) Mempertahankan hutan alam yang masih tersisa melalui pemanfaatan hutan alam yang diarahkan untuk jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan mengembangkan kebijakan tata ruang rendah karbon. KLHK sudah mengeluarkan kebijakan multi usaha yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi hutan alam di dalam wilayah konsesi. Pemanfaatan hutan alam untuk kegiatan bisnis yang non ekstraktif dapat diarahkan untuk mendukung aksi mitigasi penurunan deforestasi. Kewajiban untuk mengembangkan perencanaan tata ruang rendah karbon akan mendukung upaya pelestarian hutan alam.

c) Mendorong terjadinya regenerasi hutan alam terdegradasi. Dalam skenario LTS-LCCP, perlindungan hutan sekunder untuk mengoptimalkan proses regenerasi memegang bagian penting untuk menuju net sink. Kebijakan mengenai sertifikasi PHL dan adopsi teknologi RIL-C dan Silvikultur Intensif (SILIN) dapat menjadi dasar legal instrument dalam meningkatkan regenerasi hutan alam sekunder.

d) Efisiensi penggunaan lahan dan optimasi lahan tidak produktif. Penurunan angka deforestasi sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi penggunaan lahan. Peningkatan produksi melalui program ekstensifikasi tidak hanya berlawanan dengan komitmen mitigasi, tapi juga tidak layak untuk bersaing di pasar internasional yang menerapkan prinsip sustainability dari suatu produk/komoditas. Melalui skema perhutanan sosial dan multi usaha pada perizinan berusaha pengusahaan hutan, lahan tidak produktif

di dalam kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ketahanan pangan dan keterlibatan masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA).

e) Akselerasi kegiatan penyerapan karbon dalam kawasan hutan untuk menjamin keberlangsungan layanan jasa ekosistem. Kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan alam tidak hanya berkontribusi pada penyerapan cadangan karbon, tapi juga menjaga dan meningkatkan jasa lingkungan dari suatu ekosistem untuk mendukung kegiatan ekonomi pada sektor lain. Melalui PerMenLHK No. 8/2021, penanaman HHBK dan tanaman pangan di lahan produktif dalam wilayah konsesi menjadi dimungkinkan. Selain itu, juga diatur jangka benah terhadap kegiatan budidaya yang telah terbangun di dalam kawasan hutan, lahan budidaya tersebut diarahkan ke sistem agroforestry yang dapat meningkatkan kualitas tutupan lahan dan cadangan karbon vegetasi.

f) Pengembangan kebijakan fiskal untuk sektor FOLU. Perluasan aksi mitigasi sektor FOLU dalam waktu cepat hanya mungkin terjadi apabila kebijakan fiskal berbasis ekosistem sudah dipersiapkan secara bersamaan. Skema pendanaan juga akan meningkatkan partisipasi aksi mitigasi oleh pihak non pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, diharapkan akan mendorong partisipasi semua pihak dalam melaksanakan sistem pembangunan rendah karbon.

g) Kegiatan penegakan hukum atau law enforcement. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan yang konsisten dan intensif untuk mencegah deforestasi, degradasi kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan, perusakan mangrove dan perusakan lahan gambut baik untuk kegiatan yang berizin melalui pengawasan maupun yang ilegal melalui operasi pengamanan. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan maka diterapkan tiga instrumen penegakan hukum, yaitu sanksi administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata. Terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran juga dikenai pemberatan sanksi baik berupa pidana tambahan maupun pengenaan denda administratif sebagaimana yang tercantum dalam UUCK. Masyarakat juga diberi ruang untuk dapat berperan aktif dalam penyampaian pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan.

h) Kegiatan penguatan basis data sektor FOLU. Beragam aksi mitigasi yang dilakukan harus terukur dan perlu didokumentasikan dalam suatu basis data yang tertata dan berkualitas, serta memenuhi kaidah kebutuhan *Measuring, Reporting and Verification* (MRV) sektor FOLU.



BAB 3
KONDISI UMUM KOTA BALIKPAPAN

3.1 GEOGRAFIS KOTA BALIKPAPAN

3.1.1 Administrasi Kota Balikpapan

Letak geografis Kota Balikpapan berada pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Balikpapan.

Sebelum ditetapkannya Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, wilayah Utara Kota Balikpapan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan penetapan sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Thn 2012 tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

Seiring dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia, saat ini wilayah Utara Kota Balikpapan berbatasan dengan wilayah IKN. Batas administrasi IKN yang berbatasan dengan wilayah Kota Balikpapan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terutama di bagian Lampiran I, jelasnya daoat dilihat pada **Tabel III.1** sebagai berikut:

Tabel III.1 Batas Wilayah Kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara

KECAMATAN	BUJUR	LINTANG
Kec. Balikpapan Barat	116^0 50’ 35.765” E	1^0 0’ 48.859” S
Kec. Ballikpapan Timur	117^0 0’ 2.203” E	1^0 7’ 30.630” S
Kec. Balikpapan Utara	116^0 54’ 13.410” E	1^0 3’ 52.769” S

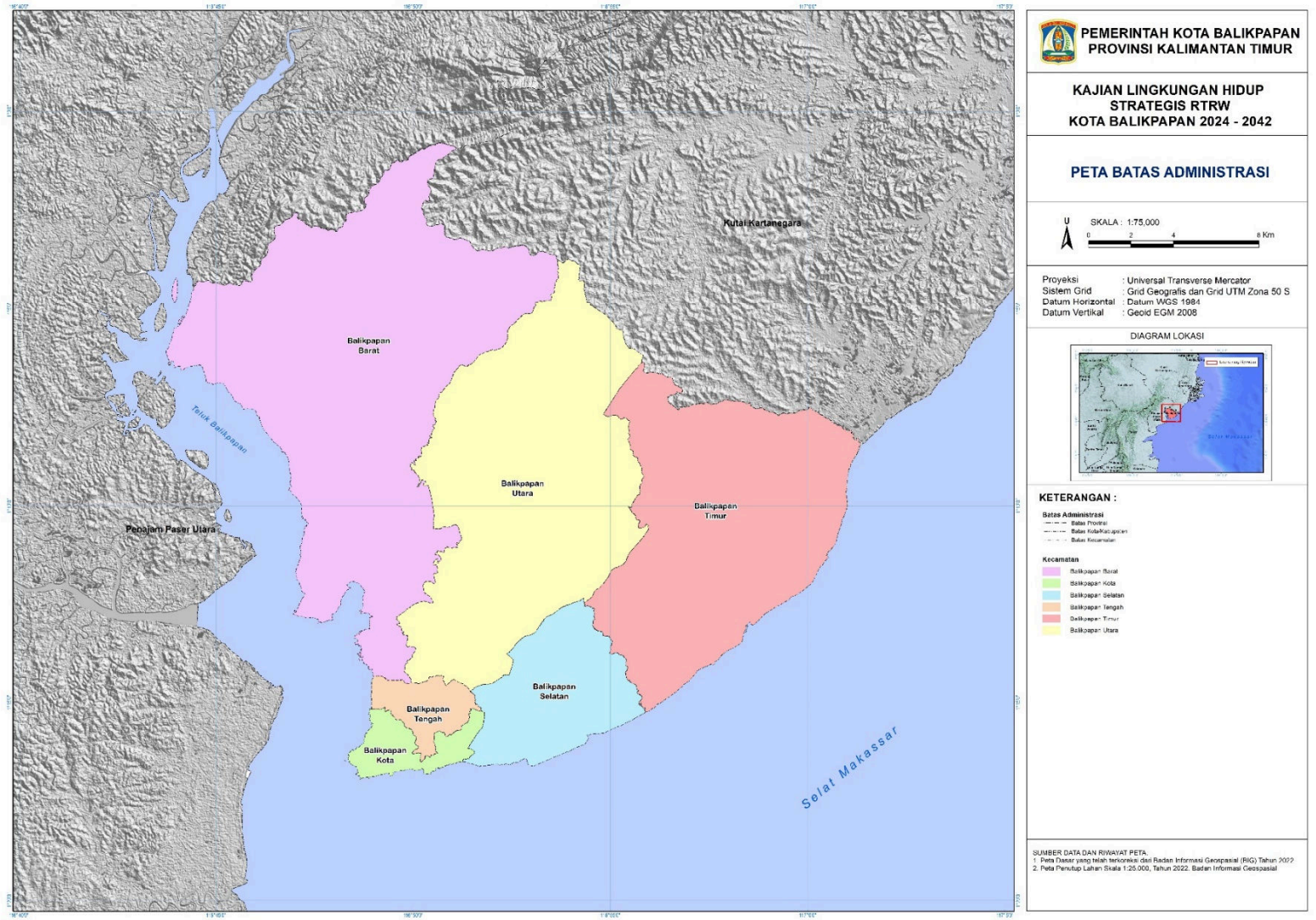
Sumber: UU No. 3/2022, Lampiran I

Secara administratif Kota Balikpapan meliputi 6 (enam) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan sebagaimana tertera pada **Tabel III. 2 dan Gambar 3.1** berikut:

Tabel III.2 Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		**3.880,97**
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		**1.109,82**
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		**11.915,52**
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		**1.082,58**
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		**19.288,02**
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		**13.824,34**
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		**51.101,24**

Sumber: RTRW Kota Balikpapan, 2021



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Balikpapan

3.1.2 Kondisi Fisik Lingkungan Kota Balikpapan

3.1.2.1 Topografi dan Kemiringan Lereng

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0-100(mdpl) meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 30-50 Mdpl atau 47,14% dari luas total wilayah, berikutnya secara berurut 0-10 Mdpl dengan luas 9.704,21 Ha atau 18,99% dari luas total wilayah kota; 100-140 Mdpl 9.251,38 Ha atau 18,10% dari total luas wilayah kota. Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara mempunyai wilayah terbesar dengan ketinggian 30-50 Mdpl, sedangkan wilayah kecamatan terluas yang mempunyai ketinggian 0-10 Mdpl berada di Kecamatan Balikpapan Timur. Luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian). Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.3** dibawah ini.

Tabel III.3 Ketinggian Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LUAS BERDASARKAN KETINGGIAN (Ha)				
		-4,16 – 10 mdpl	10 - 30 mdpl	30 - 50 mdpl	50 - 100 mdpl	100 - 140,36 mdpl
I	**Balikpapan Barat**	**3.438,39**	**1.850,41**	**6.673,80**	**7.046,51**	**278,90**
1	Baru Ilir	19,87	24,73	26,71		
2	Baru Tengah	48,68	15,06	27,51		
3	Baru Ulu	69,82	19,57	31,82		
4	Kariangau	3.150,52	1.756,70	6.518,11	7.046,02	278,90
5	Marga Sari	56,94				
6	Margomulyo	92,57	34,36	69,66	0,49	
II	**Balikpapan Kota**	**258,25**	**229,03**	**402,40**	**220,14**	
1	Damai	58,57	80,85	82,90		
2	Klandasan Ilir	33,49	51,25	76,93		
3	Klandasan Ulu	40,83	37,17	28,97		
4	Prapatan	118,96	48,35	144,11	131,05	
5	Telaga Sari	6,39	11,42	69,49	89,09	
III	**Balikpapan Selatan**	**515,17**	**940,42**	**2.087,76**	**337,61**	
1	Damai Bahagia	135,96	126,46	113,21		
2	Damai Baru	14,11	122,00	79,42		
3	Gunung Bahagia		40,91	308,65	24,29	
4	Sepinggan	64,90	195,76	543,61	65,46	
5	Sepinggan Baru	15,20	173,82	633,41	241,26	
6	Sepinggan Raya	279,20	167,95	208,85	6,59	
7	Sungai Nangka	5,81	113,52	200,62		
IV	**Balikpapan Tengah**	**218,71**	**188,53**	**576,72**	**98,62**	
1	Gunung Sari Ilir		46,55	61,95		
2	Gunung Sari Ulu		15,87	148,53	41,21	
3	Karang Jati	205,43	40,81	103,27	8,58	
4	Karang Rejo		15,20	98,98	7,73	
5	Mekar Sari		10,26	50,76	11,35	
6	Sumber Rejo	13,28	59,85	113,23	29,74	
V	**Balikpapan Timur**	**4.169,61**	**2.368,36**	**5.206,85**	**170,71**	
1	Lamaru	978,14	641,35	1.937,72	49,82	
2	Manggar	1.198,22	808,05	1.297,16	0,29	
3	Manggar Baru	440,10	56,96	24,29		
4	Teritip	1.553,15	862,00	1.947,67	120,60	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LUAS BERDASARKAN KETINGGIAN (Ha)				
		-4,16 – 10 mdpl	10 - 30 mdpl	30 - 50 mdpl	50 - 100 mdpl	100 - 140,36 mdpl
VI	**Balikpapan Utara**	**1.104,07**	**2.203,00**	**9.139,46**	**1.377,81**	
1	Batu Ampar	188,89	162,79	377,30	51,06	
2	Graha Indah	179,94	201,79	1.236,36	306,51	
3	Gunung Samarinda	13,56	106,73	132,68	13,44	
4	Gunung Samarinda Baru	21,41	158,55	124,24		
5	Karang Joang	646,85	1.522,85	7.076,02	986,66	
6	Muara Rapak	53,42	50,29	192,86	20,15	
Grand Total		**9.704,21**	**7.779,76**	**24.087,00**	**9.251,38**	**278,90**
Prosentase (%)		**18,99**	**15,22**	**47,14**	**18,10**	**0,55**

Sumber : Faknal RTRW Kota Balikpapan Tahun 2023

Dilihat berdasarkan kelerengan wilayah Kota Balikpapan secara umum kurang lebih mencapai 39.306,80 Ha atau 76,92% dari luas total wilayah mempunyai kelerengan antara 5-15%. Sedangkan luas dengan kelerengan 15-40% mencapai luas 9.272,97 Ha atau 18,14% dari total luas wilayah. Prosentasi kelerengan > 40% cukup kecil hanya mencapai 0,01% dari total luas wilayah dengan luas 5,49 Ha. Hampir semua wilayah kecamatan didominasi dengan kelerengan antara 5-15% dan 15-40%, dengan demikian hampir sebagian besar daerah di Kota Balikpapan adalah berupa bukit dan lembah. Kondisi kelerengan Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Tabel II.4** dibawah ini.

Tabel III.4 Luas Wilayah Berdasarkan Kelerengan Dirinci Per Kelurahan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Persen Lereng					Total
		0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	
I	**Balikpapan Barat**	**108,24**	**261,62**	**13.732,44**	**5.185,72**		**19.288,02**
1	Baru Ilir			48,53	22,78		71,31
2	Baru Tengah	1,00		70,99	19,26		91,25
3	Baru Ulu	3,67		75,89	41,65		121,21
4	Kariangau	97,95	261,62	13.358,56	5.032,11		18.750,25
5	Marga Sari	5,07		51,86			56,94
6	Margomulyo	0,54		126,60	69,93		197,07
II	**Balikpapan Kota**	**7,15**		**731,45**	**365,73**	**5,49**	**1.109,82**
1	Damai	0,72		162,67	58,92		222,31
2	Klandasan Ilir	4,87		131,84	24,96		161,67
3	Klandasan Ulu	0,29		106,64	0,04		106,97
4	Prapatan	1,26		233,25	202,47	5,49	442,47
5	Telaga Sari			97,05	79,34		176,39
III	**Balikpapan Selatan**	**15,65**	**95,16**	**3.131,14**	**639,02**		**3.880,97**
1	Damai Bahagia	6,15	11,39	332,94	25,15		375,63
2	Damai Baru			197,81	17,72		215,53
3	Gunung Bahagia			304,12	69,74		373,86
4	Sepinggan		32,70	664,57	172,45		869,72
5	Sepinggan Baru		0,05	853,66	209,99		1.063,70
6	Sepinggan Raya	9,50	51,01	497,01	105,06		662,58
7	Sungai Nangka		0,02	281,03	38,91		319,95
IV	**Balikpapan Tengah**	**3,11**		**718,91**	**360,56**		**1.082,58**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Persen Lereng					Total
		0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	
1	Gunung Sari Ilir			70,32	38,18		108,51
2	Gunung Sari Ulu			66,97	138,64		205,61
3	Karang Jati	3,11		301,49	53,50		358,10
4	Karang Rejo			95,30	26,60		121,90
5	Mekar Sari			46,02	26,35		72,37
6	Sumber Rejo			138,81	77,29		216,10
V	**Balikpapan Timur**	**337,78**	**1.394,80**	**9.452,17**	**730,77**		**11.915,52**
1	Lamaru	31,72	222,06	3.165,10	188,15		3.607,02
2	Manggar	46,88	479,85	2.484,82	292,18		3.303,73
3	Manggar Baru	49,19	241,37	224,58	6,22		521,35
4	Teritip	209,99	451,53	3.577,68	244,22		4.483,42
VI	**Balikpapan Utara**	**203,78**	**88,69**	**11.540,70**	**1.991,17**		**13.824,34**
1	Batu Ampar	6,98	6,44	566,27	200,36		780,04
2	Graha Indah		22,63	1.481,43	420,53		1.924,59
3	Gunung Samarinda			224,14	42,28		266,42
4	Gunung Samarinda Baru			285,19	19,01		304,20
5	Karang Joang	194,53	59,62	8.748,83	1.229,39		10.232,37
6	Muara Rapak	2,27		234,84	79,60		316,71
	Grand Total	**675,71**	**1.840,27**	**39.306,80**	**9.272,97**	**5,49**	**51.101,24**
	Prosentase (%)	1,32	3,60	76,92	18,15	0,01	100,00

Sumber : Faknal RTRW Kota Balikpapan Tahun 2023

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 76,92% kawasan bergelombang dengan luas 39.306,80 Ha, berbukit dan bergelombang mencapai 18,15% dengan luas 9.272,97 Ha. Wilayah dengan morfologis datar hanya 1,32% dengan luas 675,71 Ha, berada diwilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Wilayah dengan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi, sedangkan lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.5** dibawah ini.

Tabel III.5 Luas Wilayah Berdasarkan Morfologi Per Kelurahan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Keterangan Morfologi (Ha)				
		Datar	Landai	Bergelombang	Berbukit, Bergelombang	Berbukit-bukit
I	Balikpapan Barat	108,24	261,62	13.732,44	5.185,72	
2	Balikpapan Kota	7,15		731,45	365,73	5,49
3	Balikpapan Selatan	15,65	95,16	3.131,14	639,02	
4	Balikpapan Tengah	3,11		718,91	360,56	
5	Balikpapan Timur	337,78	1.394,80	9.452,17	730,77	
6	Balikpapan Utara	203,78	88,69	11.540,70	1.991,17	
	Grand Total	**675,71**	**1.840,27**	**39.306,80**	**9.272,97**	**5,49**
Prosentase (%)		1,32	3,60	76,92	18,15	0,01

Sumber : Faknal RTRW Kota Balikpapan Tahun 2023

Berdasarkan kemiringan lereng dan kontrol struktur geologi yang berkembang, wilayah Kota Balikpapan dapat dibagi menjadi tiga satuan geomorfik, yaitu satuan perbukitan bergelombang sedang, satuan perbukitan bergelombang lemah, dan satuan dataran alluvial. Sebaran dari ketiga satuan ini secara umum relatif sejajar dengan sebaran struktur lipatan yang berkembang, yaitu relatif timurlaut-barat daya.

a. Satuan Geomorfik Perbukitan Bergelombang Sedang

   Satuan geomorfik ini menempati area dengan luas kurang lebih 55%, mempunyai kemiringan lereng rata-rata 15-40% dengan beda tinggi kurang lebih 10-30 meter.

   Satuan geomorfik ini menempati sebagian besar Kota Balikpapan terutama di bagian Utara - Barat Laut yang merupakan daerah hutan lindung, sebagian di timur laut meliputi sebagian dari Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur.

b. Satuan Geomorfik Perbukitan Bergelombang Lemah

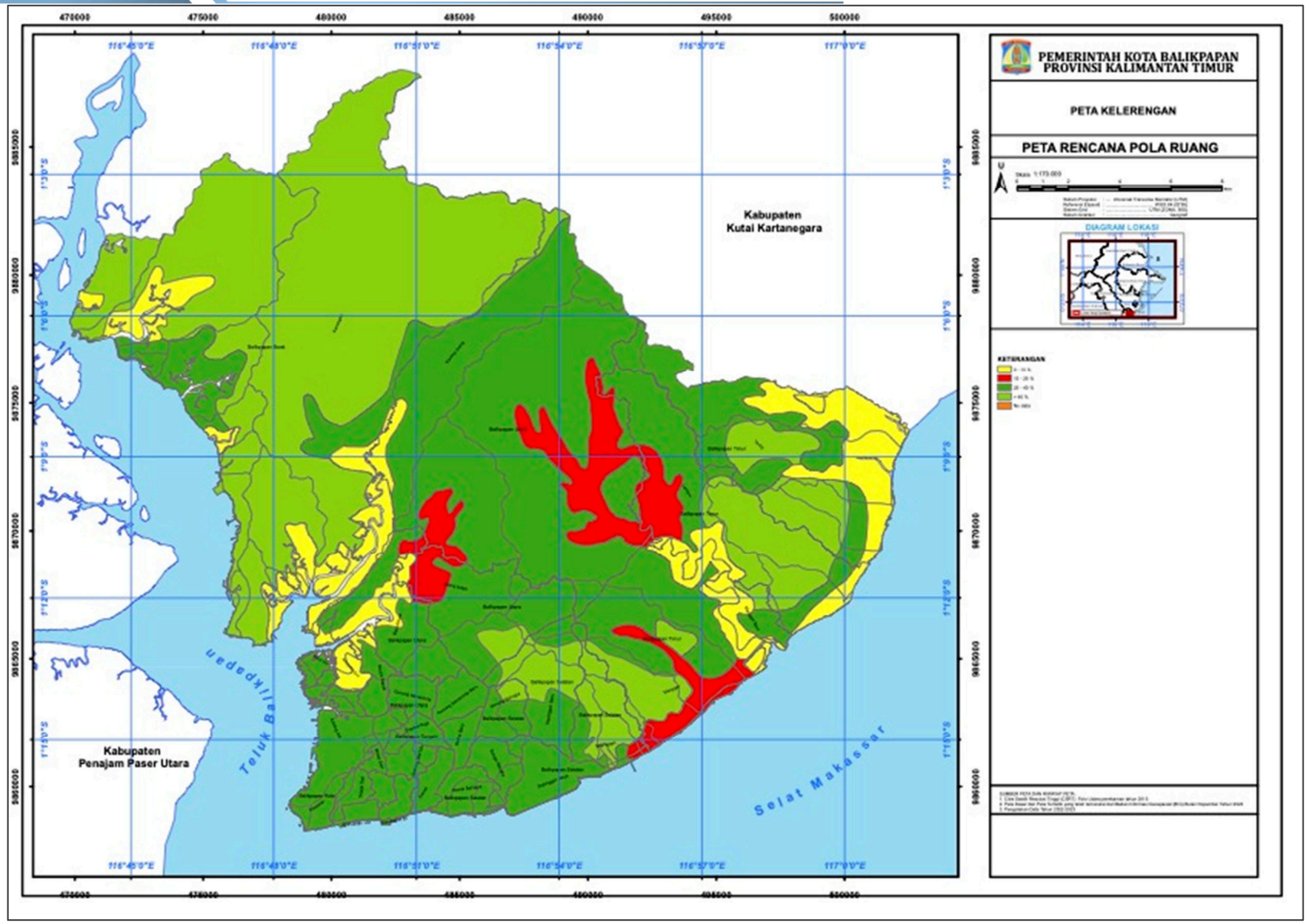
   Satuan geomorfik ini membentuk pola selingan dengan perbukitan bergelombang sedang yang membujur barat daya-timur laut dengan luas kurang lebih 30%, umumnya mempunyai kemiringan lereng 5-15 % dengan beda tinggi kurang lebih 3-15 meter.

   Satuan geomorfik ini menempati bagian tengah Kota Balikpapan tepatnya di lembah Sungai Wain, daerah Gunung Bahagia sampai Gunung Binjai yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur dengan litologi penyusunan batupasir kuarsa, batupasir dengan konkresi/nodul besi, serpih, batu lanau, sisipan batubara dan dikontrol struktur geologi berupa homoklin yang merupakan sayap antiklin atau siklin dengan kemiringan landai sehingga membentuk suatu lembah homoklin.

c. Satuan Dataran Alluvial

   Satuan ini tersebar sebagian besar di pinggir pantai dan lembah-lembah sungai dengan luas kurang lebih 15%, material penyusunnya merupakan endapan kerakal – lempung yang belum terkonsolidasi atau bersifat lepas-lepas yang merupakan hasil pengendapan aktivitas sungai dan air laut. Kemiringan lereng umumnya 0-5% dengan beda tinggi kurang lebih 0-2 meter. Menempati pantai sebelah timur dari Sepinggan hingga Teritip, lembah-lembah disekitar Sungai Wain, Sungai Somber dan Sungai Manggar Besar dan sebagian pantai di Teluk Balikpapan.

Jelasnya mengenai Peta Kemiringan Lereng Kota Balikappan dapat dilihat pada **Gambar 3.2** dibawah ini.



Gambar 3.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Balikpapan

3.1.2.2 Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, volkan, tektonik/ struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.

a. Tanah pada Group Aluvial

Berdasarkan pembentukan tanahnya, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengan 1-3% dengan bahan induk —aluvium". Sifat corak tanah ini yaitu berwarna kelabu tanpa solum, memiliki tekstur liat ataupun pasir, strukturnya pejal, serta konsistensi terdiri dari beberapa tipe yaitu teguh (lembab), plastik (basah), keras (kering) di atas lapisan keras. Bahan induk tanah ini adalah aluvium.

Sifat tanah ini beraneka macam tingkat kemasamannya, kandungan zat organik rendah, daya adsorpsi yang tinggi, permeabilitas rendah, serta kepekaan erosinya besar. Biasanya tanah aluvial ini digunakan untuk kegiatan pertanian seperti padi sawah, palawija dan juga perikanan.

b. Tanah pada Group Marin

Bentukan lahannya berupa dataran pasang surut lumpur, mempunyai kelerengan < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan Somber.

c. Tanah pada Group Fluvio Marin

Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu:

1) Bentukan lahannya berupa dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengan < 1% dan bahan induk aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang Sungai Manggar Besar.

2) Bentukan lahannya berupa dataran fluvio marin dengan kelerengan < 1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap Selat Makassar.

d. Tanah pada Group Volkan

Bentukan lahannya berupa bahan induk volkan. Tanah pada group volkan setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

e. Tanah pada Group Tektonik/Struktural

Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 jenis, yaitu:

1) Bentukan lahannya berupa dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya adalah di pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan.

2) Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi Kecamatan Balikpapan Utara seperti di Kelurahan Muara Rapak Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang.

3) Bentukan lahannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, Karang Joang dan Manggar.

4) Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan Utara.

5) Bentukan lahannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di Karang Joang Km 15.

Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun batupasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning. Faktor pembentuk tanah tektonik ini yaitu dengan iklim curah hujan 2.500-3.500 mm/tahun, berbahan induk tuf asam, batuan pasir dan sedimen kwarsa, memiliki topografi bergelombang sampai berbukit 50-3.500 meter di atas permukaan laut, dan vegetasinya berupa hutan tropika, alang-alang, pinus dan pakis.

Tanah tektonik memiliki corak berwarna merah hingga kuning dengan solum agak tebal 1-2 meter, memiliki tekstur yang beraneka macam, struktur tanahnya menggumpal dibawah dan makin keatas makin pejal, konsistensi tanah teguh sampai gembur.

Adapun sifat tanah memiliki tingkat kemasaman yang sedang hingga tinggi, kejenuhan basa yang rendah (< 20%), memiliki daya adsorpsi rendah hingga tinggi tergantung tekstur dan mineral liatnya, memiliki unsur hara yang rendah, permeabilitas tergantung dari tekstur bahan induk dari lambat hingga ke sedang, serta memiliki kepekaan erosi yang besar. Biasanya tanah jenis ini digunakan untuk perkebunan seperti ladang, karet, dan alang-alang. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.6** dibawah ini.

Tabel III.6 Jenis Tanah di Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2021

No.	Jenis Tanah		Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Tanah pada Grup Aluvial SPT-2		6.025,71	11,93
	Satuan tanah	*Asosiasi Endoaquepts, Dystrudepts, humaquepts*		
	Landform	Dataran Aluvial		
	Relief	Agak datar (1-3%)		
	Bahan Induk	*Aluvium*		
2.	Tanah pada Grup Marin SPT-7		3.125,73	6,19
	- Satuan tanah	*Asosiasi sulfaquents, endoaquepts (sulfic), hydraquents*		
	- Landform	Dataran pasang surut		
	- Relief	datar (<1%)		
	- Bahan Induk	*Aluvium*		
3.	Tanah pada Grup Vulkan SPT 23		267	0,53
	- Satuan tanah	*Hapludalfs, hapludolis,eutrudepts*		

No.	Jenis Tanah		Luas (Ha)	Prosentase (%)
	- Landform	perbukitan volkan, sangat tertoreh		
	- Relief	berbukit (15-30%)		
	- Bahan Induk	volkan		
4.	Tanah pada Grup Tektonik SPT 24		3.307,82	6,55
	- Satuan tanah	*Hapludalfs, Plintudult, Dystrudepts*		
	- Landform	Dataran tektonik berombak, agak tertoreh		
	- Relief	berombak (3-8%)		
	- Bahan Induk	Batu liat & batu pasir		
5.	SPT 26		8.975,63	17.77
	- Satuan tanah	*Hapludalfs, Eutrudepts*		
	- Landform	bergelombang, cukup tertoreh		
	- Relief	bergelombang (8-15%)		
	- Bahan Induk	Batu liat & batu gamping		
6.	GPT-27		13.485,83	26,7
	- Satuan tanah	*Hapludalfs, Dystrudepts, plinthudults*		
	- Landform	dataran tektonik bergelombang, cukup tertoreh		
	- Relief	bergelombang (8-15%)		
	- Bahan Induk	batuliat & batupasir		
7.	Tanah pada Grup Tektonik SPT 29		11.976,01	23,71
	- Satuan tanah	*Hapludalfs, paleudults, dystrudepts*		
	- Landform	dataran tektonik, bergelombang, cukup tertoreh		
	- Relief	berbukit (15-30%)		
	- Bahan Induk	*Batu liat* & batu pasir		
8.	SPT 36		532,03	1,05
	- Satuan tanah	*Hapludalfs, paleudults, dystrudepts*		
	- Landform	Perbukitan paralel lipatan, cukup tertoreh		
	- Relief	berbukit kecil (15-30%)		
	- Bahan Induk	Batu liat & batu pasir		
9.	SPT-38		233,57	0,46
	- Satuan tanah	*Hapludox,* dystrudepts, *hapludalfs*		
	- Landform	perbukitan *paralel* lipatan, sangat tertoreh		
	- Relief	berbukit (15-30%)		
	- Bahan Induk	Batu liat, batu pasir dan batu gamping		

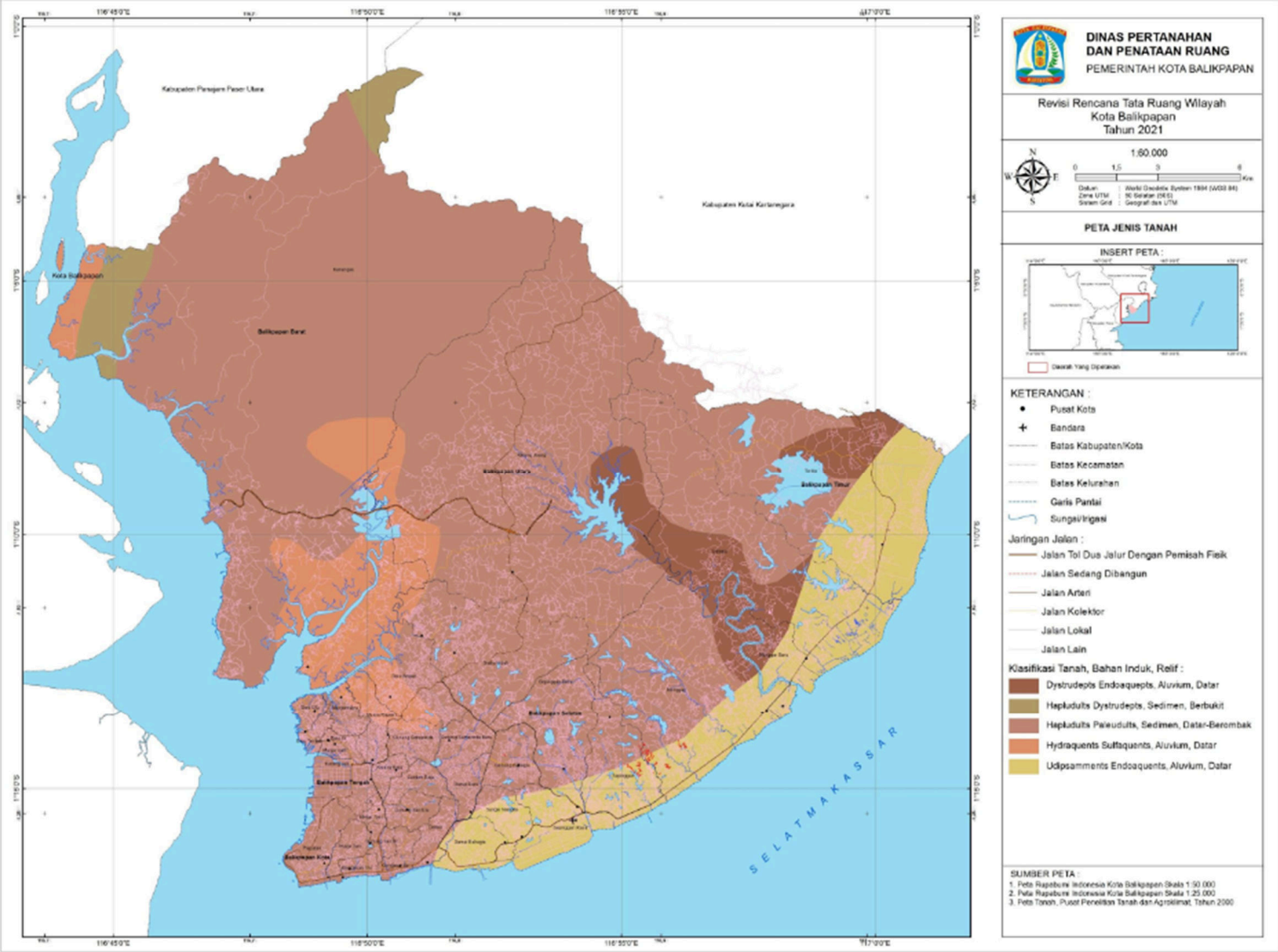
No.	Jenis Tanah		Luas (Ha)	Prosentase (%)
10	TANAH PADA GROUP FLUVIO-MARIN SPT-9		776,88	1,54
	- Satuan tanah	*Sulfaquents, endoaquents, hydraquents (sulfic)*		
	- Landform	dataran *estuarine,* sepanjang muara sungai / pantai		
	- Relief	datar (<1%)		
	- Bahan Induk	*Aluvium*		
11	SPT 12		1.624,36	15,1
	- Satuan tanah	*Sulfaquents, endoaquents, hydraquents (sulfic)*		
	- Landform	dataran *estuarine,* sepanjang muara sungai / pantai		
	- Relief	datar (<1%)		
	- Bahan Induk	Aluvium		
	Total		**51.101,24**	**100**

Sumber : Dokumen RTRW Kota Balikpapan

Tabel III.7 Klasifikasi Jenis Tanah di Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2021

Klasifikasi Tanah	Bahan Induk	Sub_Landform	Relif	Luas (Ha)
Udipsamments Endoaquents	Aluvium	Pesisir Pantai	Datar	5.664,85
Dystrudepts Endoaquepts	Aluvium	Dataran Antar Perbukitan	Datar	2.856,48
Hydraquents Sulfaquents	Aluvium	Dataran Pasang Surut	Datar	4.156,67
Hapludults Dystrudepts	Sedimen	Perbukitan Tektonik	Berbukit	1.117,44
Hapludults Paleudults	Sedimen	Dataran Tektonik	Datar-Berombak	37.305,80
Total				**51.101,24**

Peta Tanah, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Tahun 2000
Analisis Peta ArGIS Tahun 2021



Gambar 3.3 Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan

3.1.2.3 Geomorfologi

Berdasarkan kemiringan lereng dan kontrol struktur geologi yang berkembang, wilayah Kota Balikpapan dapat dibagi menjadi tiga satuan geomorfik, yaitu satuan perbukitan bergelombang sedang, satuan perbukitan bergelombang lemah, dan satuan dataran alluvial. Sebaran dari ketiga satuan ini secara umum relatif sejajar dengan sebaran struktur lipatan yang berkembang, yaitu relatif timurlaut-barat daya.

d. Satuan Geomorfik Perbukitan Bergelombang Sedang

Satuan geomorfik ini menempati area dengan luas kurang lebih 55%, mempunyai kemiringan lereng rata-rata 15-40% dengan beda tinggi kurang lebih 10-30 meter.

Satuan geomorfik ini menempati sebagian besar Kota Balikpapan terutama di bagian Utara - Barat Laut yang merupakan daerah hutan lindung, sebagian di timur laut meliputi sebagian dari Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur.

e. Satuan Geomorfik Perbukitan Bergelombang Lemah

Satuan geomorfik ini membentuk pola selingan dengan perbukitan bergelombang sedang yang membujur barat daya-timur laut dengan luas kurang lebih 30%, umumnya mempunyai kemiringan lereng 5-15 % dengan beda tinggi kurang lebih 3-15 meter.

Satuan geomorfik ini menempati bagian tengah Kota Balikpapan tepatnya di lembah Sungai Wain, daerah Gunung Bahagia sampai Gunung Binjai yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur dengan litologi penyusunan batupasir kuarsa, batupasir dengan konkresi/nodul besi, serpih, batu lanau, sisipan batubara dan dikontrol struktur geologi berupa homoklin yang merupakan sayap antiklin atau siklin dengan kemiringan landai sehingga membentuk suatu lembah homoklin.

f. Satuan Dataran Alluvial

Satuan ini tersebar sebagian besar di pinggir pantai dan lembah-lembah sungai dengan luas kurang lebih 15%, material penyusunnya merupakan endapan kerakal – lempung yang belum terkonsolidasi atau bersifat lepas-lepas yang merupakan hasil pengendapan aktivitas sungai dan air laut. Kemiringan lereng umumnya 0-5% dengan beda tinggi kurang lebih 0-2 meter. Menempati pantai sebelah timur dari Sepinggan hingga Teritip, lembah-lembah disekitar Sungai Wain, Sungai Somber dan Sungai Manggar Besar dan sebagian pantai di Teluk Balikpapan.

3.1.2.4 Geologi

Dibawah ini merupakan penjabaran kondisi geologi di Kota Balikpapan.

A. Stratigrafi

Menurut Hidayat dan Umar (1994), wilayah Kota Balikpapan tersusun atas empat satuan batuan, berurut-turut dari yang paling muda ke tua adalah Satuan Endapan Pasir (Endapan Aluvial), Formasi Kampungbaru, Formasi Balikpapan, dan Formasi Pulaubalang. Pengamatan yang dilakukan selama penelitian, batuan yang terdapat di Kota Balikapapan menunjukkan variasi yang relative sama dengan apa yang telah ditemukan para peneliti terdahulu, umumnya terdiri dari batupasir kuarsa, batupasir dengan sisipan nodul-nodul besi, serpih, batulempung, dan sisipan batubara. Oleh

karena penamaan satuan batuan dalam pembahasan tentang batuan dan stratigrafi secara detil akan mengacu pada penelitian yang telah ada.

1. Satuan Endapan Pasir (Endapan Aluvial)

Satuan ini berupa material lepas berukuran lempung sampai kerakal sebagai hasil endapan sungai, rawa, pantai dan delta. Satuan ini diendapkan secara tidak selaras diatas bidang erosi terhadap satuan batuan dibawahnya. Satuan ini sebagian besar tersebar di sepanjang pantai timur dari wilayah Kota Balikpapan, terutama di daerah Manggar, Lamaru, dan Teritip, demikian juga di kiri-kanan Sungai Wien dan Sungai Somber.

2. Formasi Kampung Baru

Sebaran

Satuan ini mempunyai sebaran yang paling luas di wilayah Kota Balikpapan, terutama di bagian utara dan tengah, meliputi wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, sebagian Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Timur.

Batuan penyusun

Satuan ini terdiri dari perselingan batulempung, batulanau, batupasir kuarsa, serpih dengan sisipan batubara, lignit, dan napal. Pada beberapa lapisan mengandung nodul atau konkresi besi oksida dan batugamping. Satuan ini diendapkan secara selaras dan sebagian menjari dengan satuan di bawahnya. Singkapan batubara yang cukup tebal (> 3 m) dapat dijumpai di Dusun Gunung Binjai.

Umur dan Lingkungan Pengendapan

Formasi ini mempunyai umur Miosen Akhir dan diendapkan pada lingkungan pengendapan darat – laut dangkal dengan fasies delta dan fasies laut dangkal (Moss dan Chambers, 1998). Formasi Kampung Baru diendapkan secara selaras diatas Formasi Balikpapan.

3. Formasi Balikpapan

Sebaran

Formasi Balikapapan sebagian besar tersebar di bagian baratlaut dan barat daya wilayah Kota Balikpapan, meliputi daerah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah dan sebagian Kecamatan Balikpapan Barat.

Batuan penyusun

Bagian atas satuan ini tersusun didominasi oleh batupasir kuarsa, dengan sisipan-sisipan batulempung, batulanau, dan serpih. Sedangkan pada bagian bawah disusun oleh perselingan batulanau, batupasir, dan batulempung dengan sisipan napal, batupasir gampingan, batubara. Pada beberapa lapisan batupasir mengandung fragmen-fragmen batubara. Batubara pada satuan ini umumnya relatif lebih tipis dibanding pada Formasi Kampung Baru. Kenampakan yang paling umum pada satuan ini adalah batupasir kuarsa yang sebagian besar memperlihatkan struktur silang siur (cross bedding).

Umur dan Lingkungan Pengendapan

Formasi ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir bagian bawah dan diendapkan pada lingkungan pengendapan darat – transisi – laut dangkal dengan

fasies delta (Moss dan Chambers, 1998).Formasi ini mempunyai hubungan selaras dengan formasi dibawahnya yaitu Formasi Pulau Balang.

4. Formasi Pulau Balang

Sebaran

Satuan ini tersingkap di Pulau Balang serta bagian ujung baratlaut wilayah Kota Balikpapan, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Batuan penyusun

Satuan ini secara regional terdiri dari batupasir kuarsa, batupasir gampingan, batulanau dengan sisipan batubara. Di lapangan sebagian besar batuan penyusun satuan ini lapuk dan tertutup vegetasi yang lebat. Oleh karena itu data-data batuan yang di dapatkan di lapangan sangat terbatas.

Umur dan Lingkungan Pengendapan

Formasi ini mempunyai umur Miosen Awal dan merupakan formasi tertua yang terdapat di Kota Balikpapan, diendapkan pada lingkungan laut dangkal dengan fasies delta (Moss dan Chambers, 1998), dan memiliki hubungan terhadap formasi dibawahnya yakni Formasi Pamaluan.

B. Struktur Geologi

Dari kenampakan di lapangan menunjukkan bahwa perlapisan batuan di daerah telian telah mengalami perlipatan secara lemah, membentuk struktur antiklin dan sinklin. Di beberapa tempat terlihat adanya kekar-kekar dan patahan (sesar) kecil.

1. Lipatan

   Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan serta dengan studi refensi yang telah ada, geologi Kota Balikapan dikontrol oleh dua sumbu antiklin dan dua sumbu sinklin. Sumbusumbu lipatan tersebut secara umum berarah timur laut-baratdaya, oleh karena itu lapisanlapisan batuan yang ada umumnya miring ke tenggara dan barat laut.

2. Kekar

   Daerah ditemukannya kekar sering berasosiasi dengan terdapatnya zona patahan atau longsoran. Daerah yang banyak terkekarkan kemungkinan besar memang akan berkembang menjadi patahan atau bahkan mempengaruhi terjadinya patahan atau longsoran. Lokasi yang banyak didapatkan kekar antara lain di Tanjungbatu, P. Babi dan sekitarnya, depan SPBU J. Mayjen Soetoyo, Telaga Sari dan di Perum Daksa. Berdasarkan data-data yang diambil langsung di lapangann, penafsiran kelurusan-kelurusan sungai serta data-data survey pendahuluan, pada umumnya kekar-kekar dan patahan-patahan berarah timurlaut-baratdaya dan tenggara barat laut.

3. Sesar

   Data sesar naik ditemukan beberapa tempat, diantaranya di depan SPBU Jl. Mayjen Soetoyo. Data yang nampak adalah patahan-patahan, kekar-kekar, serta sesar naik mikro dengan kedudukan bidang sesar N2350E/680. Juga ditemukan data sesar di Kampung Damai 3 dengan kedudukan bidang sesar N2400E/700.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah berdasarkan jenis batuan dapat dilihat pada Tabel III.8 dan Tabel III.9 dibawah ini.

Tabel III.8 Luas Wilayah Kota Balikpapan Menurut Jenis Batuan

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	(%)
1	Satuan Endapan Pasir (Aluvium)	11.006,46	21,54
2	Formasi Kampung Baru	30.340,12	59,37
3	Formasi Balikpapan	9.754,66	19,09
	Jumlah	**51.101,24**	**100**

Sumber: Analisis ArGIS Tahun 2021

Tabel III.9 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Dirinci Per Kelurahan Di Kota Balikpapan

No	Kecamatan/Kelurahan	Formasi Batuan			Grand Total
		Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Kampung Baru	
I	**Balikpapan Barat**	**5.580,56**	**7.264,14**	**6.443,31**	**19.288,02**
1	Baru Ilir		0,96	70,35	71,31
2	Baru Tengah			91,25	91,25
3	Baru Ulu	1,82		119,39	121,21
4	Kariangau	5.555,98	7.263,19	5.931,09	18.750,25
5	Marga Sari			56,94	56,94
6	Margomulyo	22,76		174,30	197,07
II	**Balikpapan Kota**		**1.106,45**	**3,37**	**1.109,82**
1	Damai		218,94	3,37	222,31
2	Klandasan Ilir		161,67		161,67
3	Klandasan Ulu		106,97		106,97
4	Prapatan		442,47		442,47
5	Telaga Sari		176,39		176,39
III	**Balikpapan Selatan**	**657,37**	**210,27**	**3.013,33**	**3.880,97**
1	Damai Bahagia	2,81	24,61	348,21	375,63
2	Damai Baru		178,82	36,71	215,53
3	Gunung Bahagia		3,42	370,44	373,86
4	Sepinggan	244,75		624,96	869,72
5	Sepinggan Baru	2,60		1.061,10	1.063,70
6	Sepinggan Raya	401,82		260,76	662,58
7	Sungai Nangka	5,40	3,41	311,14	319,95
IV	**Balikpapan Tengah**		**1.056,14**	**26,43**	**1.082,58**
1	Gunung Sari Ilir		108,51		108,51
2	Gunung Sari Ulu		205,61		205,61
3	Karang Jati		335,93	22,17	358,10
4	Karang Rejo		117,64	4,26	121,90
5	Mekar Sari		72,37		72,37
6	Sumber Rejo		216,10		216,10
V	**Balikpapan Timur**	**3.904,31**		**8.011,21**	**11.915,52**
1	Lamaru	953,88		2.653,14	3.607,02
2	Manggar	1.200,25		2.103,47	3.303,73
3	Manggar Baru	499,33		22,03	521,35
4	Teritip	1.250,85		3.232,57	4.483,42
VI	**Balikpapan Utara**	**864,21**	**117,66**	**12.842,47**	**13.824,34**

No	Kecamatan/Kelurahan	Formasi Batuan			Grand Total
		Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Kampung Baru	
1	Batu Ampar	208,33		571,71	780,04
2	Graha Indah	166,23		1.758,36	1.924,59
3	Gunung Samarinda		50,33	216,09	266,42
4	Gunung Samarinda Baru		64,56	239,64	304,20
5	Karang Joang	465,05		9.767,32	10.232,37
6	Muara Rapak	24,59	2,77	289,35	316,71
	Grand Total	**11.006,46**	**9.754,66**	**30.340,12**	**51.101,24**
	Prosentase (%)	**21,54**	**19,09**	**59,37**	**100,00**

Sumber : Analisis ArGIS tahun 2021, Peta Geologi Lembar Balikpapan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Tahun 1978

3.1.2.5 Kondisi Hidrologi dan Sumber Air Baku

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai kondisi Hidrologi dan sumber air baku di Kota Balikpapan.

A. Hidrogeologi

Hidrogeologi Kota Balikpapan secara umum dapat dilihat dari komposisi litologi batuan dan kelulusannya serta keterdapatan air tanah dan produktvitas akuifer. Kondisi hidrogeologi di Kota Balikpapan akan dijelaskan berikut.

a. Komposisi Litologi Batuan dan Kelulusannya

Berdasarkan komposisi litologi dan kelulusannya Kota Balikpapan seluruhnya masuk dalam kategori batu pasir, batu lempung pasiran, serpih dan konglomerat dengan sisipan napsi, batubara dan batu gamping.

b. Keterdapatan Air Tanah dan Produktivitas akuifer

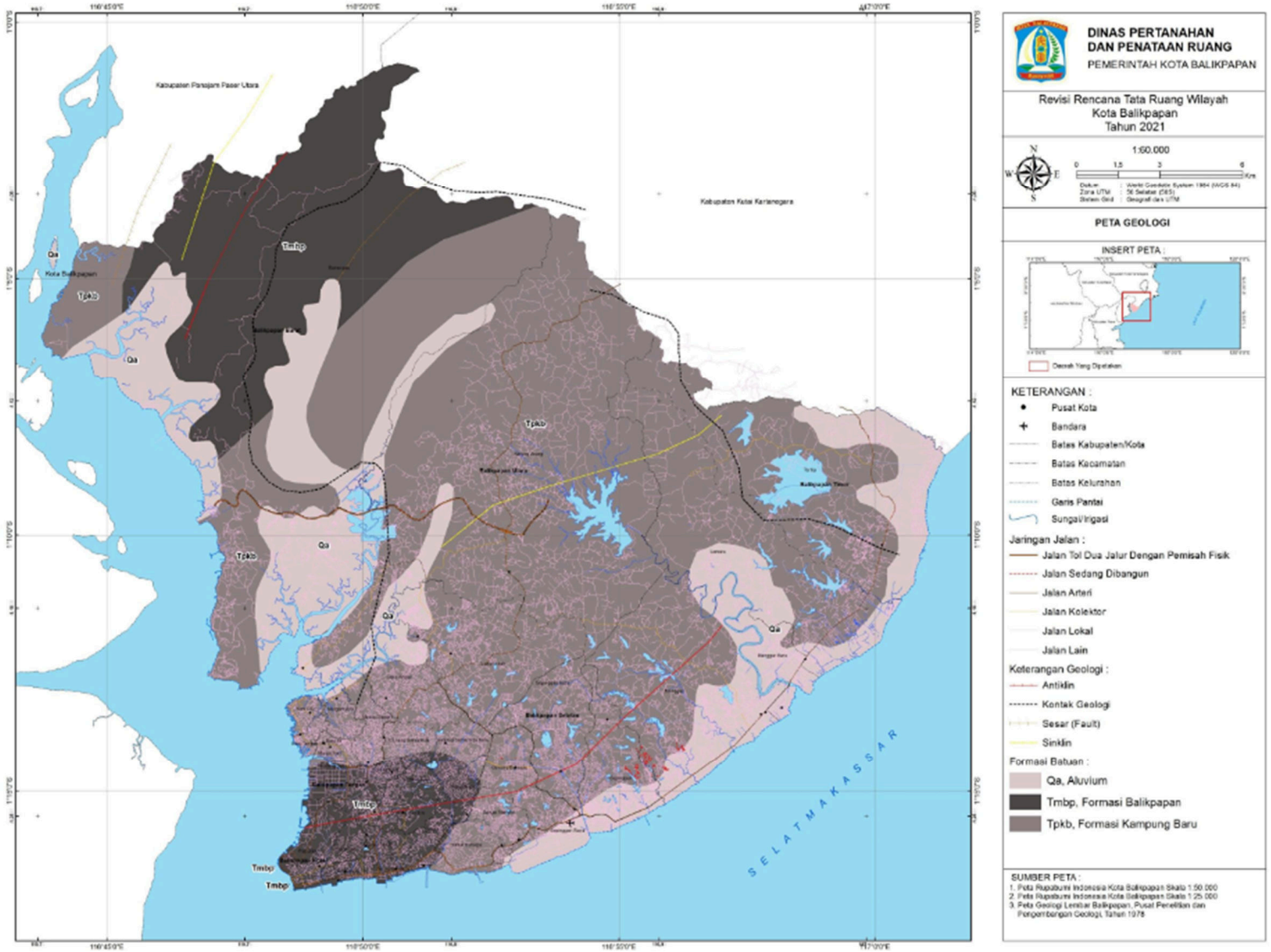
Berdasarkan keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer, Kota Balikpapan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar, yaitu:

- Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, yaitu:
  - ✓ Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas

    Akuifer dengan keterusan beragam, muka air tanah umumnya kurang dari 3 meter di bawah muka tanah setempat, debit air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Akuifer ini umumnya tersebar di Kecamatan Balikpapan/Utara, sebagian kecil dari Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah dan di bagian selatan dari, Kecamatan Balikpapan Selatan
  - ✓ Setempat, Akuifer produktif

    Akuifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya muka airtanahnya dalam, dibeberapa ngan debit kurang dari 2 liter/ detik. Akuifer ini pada umumnya terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur, sebagian Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah
- Akuifer bercelah atau jarang, produktif kecil dan daerah air tanah langka, yaitu :

  Akuifer produktif kecil, setempat berarti Akuifer ini umumnya keterusan rendah, setempat airtanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah dan zona pelapukan batuan padu. Akuifer ini pada umumnya terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, sebagian kecil di Kecamatan Balikpapan Utara, Barat dan Timur.



Gambar 3.4 Peta Geologi Kota Balikpapan

B. Sumber Air Baku

Potensi Air Permukaan (Sungai/Embung/Rawa)

Air permukaan merupakan salah satu alternatif sumber air baku PDAM dalam penyediaan air untuk pelanggan. Air permukaan yang digunakan dapat berupa sungai, danau, rawa. Sumber-sumber air permukaan potensial yang terdapat disekitar Kota Balikpapan adalah Sungai Wain Bugis dan Sungai Teritip dan telah ada rencana pembuatan Waduk Teritip dengan kapasitas 75 l/detik dan Waduk Wain Bugis dengan kapasitas 1.65l/detik Sungai-sungai lain seperti Sungai Somber; Sungai Klandasan Besar dan Kecil; Sungai Sepinggan; Sungai Batakan dan Sungai Manggar Kecil tidak dimanfaatkan karena selain alirannya tidak terus menerus sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Sumber-sumber air permukaan yang dianggap potensial sebagai sumber air baku untuk rencana pengembangan Sistem air bersih Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Waduk Manggar

Waduk Manggar merupakan sumber air baku, utama Kota Balikpapan, setelah dilaksanakan peningkatan kapasitas Waduk dari 3,27 jutaM3 dengan elevasi permukaan 5,8 MMP menjadi 16,3 juta M3 dengan elevasi permukaan 10,30 MMP. Dengan meningkatnya kapasitas waduk tersebut maka tercapailah manfaat utama peningkatan waduk Manggar yaitu tercukupinya kebutuhan air bersih untuk Kota Balikpapan hingga tahun 2011. Waduk Manggar dengan kapasitas 16 juta m3 diperkirakan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan air bersih kota Balikpapan yang kian bertambah, tidak bisa lagi hanya mengandalkan Waduk Manggar sebagai air baku utama sumber air bersih PDAM. Waduk yang berkapasitas 9.00 l/dtk merupakan penyumbang terbesar air baku air bersih PDAM Kota Balikpapan dengan 75% dengan kapasitas produksi 1.100 lt/detik.

Waduk manggar bersumber dari Sungai Manggar. Sungai Manggar merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di kota Balikpapan yang melintas dari Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara menuju Kel. Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. Sungai Manggar yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Balikpapan sebagai sumber air baku adalah Sungai Manggar bagian hulu. Pada bagian hulu, kualitas air lebih bak dari pada bagian tengah dan bagian hilir.

2. Waduk Wain Bugis

Waduk ini merupakan wilayah administrasi Kecamatan Balikpapan Barat. Waduk ini merupakan pertemuan antara S. Wain dan S. Bugis. Luas DPS (daerah pengaruh sungai) adalah 86,93 km^2 dengan panjang sungai utama 9,12 km. Lokasi waduk pada posisi 116°48'00" BT-1°09'14" LS menempati morfologi perbukitan bergelombang dengan elevasi antara 20-100 m di atas permukaan laut. Kemiringan lereng 10°-30°, pola aliran S. Wain adalah sub terellis yang mengindikasikan daerah tersebut telah mengalami perlipatan. Sungai Bugis mengalir ke arah S. Wain Besar hingga ke muara Teluk Balikpapan, merupakan sungai permanen berair mengalir sepanjang tahun dengan lebar sungai berkisar antara 30-40 m. Pemanfaatan S. Wain telah dilakukan oleh Pertamina UP V Balikpapan untuk memenuhi berbagai keperluan di lingkungan Kompleks Pertamina, yaitu dengan cara membuat bendungan dengan kapasitas pemanfaatan mencapai 200 lt/det.

3. Sungai Manggar Bagian Hulu

Pada bagian hulu Sungai Manggar merupakan sumber air baku warga Kota Balikpapan yang dikelola PDAM Kota Balikpapan. Oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bagian hulu

ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk melindungi sumber air dari pencemaran. Sumber pencemar yang mungkin berpotensi masuk ke area hulu Sungai Manggar didominasi dari kegiatan domestik.

4. Sungai Manggar Bagian Tengah

Kegiatan yang mendominasi di bagian tengah Sungai Manggar adalah tambak dan permukiman. Vegetasi di segmen ini adalah hutan mangrove dengan jenis Nipah *(Nypa fruticans)*. Kehadiran tanaman nipah mengindikasikan wilayah perairan payau yang cenderung tawar. Kondisi sungai masih alami belum ada betonisasi.

5. Sungai Manggar Bagian Hilir

Sungai Manggar pada bagian hilir didominasi oleh vegetasi berupa Rhizopora apiculata dan Rhizopora muncronata kemudian semakin menuju hilir berangsur dengan keberadaan permukiman di atas air (kampong nelayan).

6. Sungai Wain

Sungai Wain adalah salah satu sungai yang terletak di kecamatan Balikpapan Barat sepanjang 11.200 m. Oleh Pemerintah Kota Balikpapan Daerah ALiran Sungai (DAS) Wain dijadikan sebagai kawasan Hutan Lindung. Di sekitar wilayah sungai yang tidak terkena sebagai kawasan Hutan Lindung terdapat permukiman. Sehingga Sungai Wain dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi warga sekitar dan oleh PT. Pertamina RU V.

Sungai Wain ini dapat mencapai lebih dari 200 l/dtk, hal ini dapat diketahui bahwa penggunaan PT. Pertamina mencapai 200 l/dtk dan diketahui masih terdapat limpasan dari waduk tersebut ke Sungai Wain bagian hilir.

a) Sungai Wain Bagian Hulu
Debit aliran Sungai Wain ini dapat mencapai lebih dari 200 L/detik, hal ini dapat diketahui bahwa penggunaan PT. Pertamina mencapai 200 L/detik dan masih terdapat limpasan dari waduk tersebut ke Sungai Wain bagian hilir.

b) Sungai Wain Bagian Tengah
Sungai Wain bagian tengah memiliki panjang 4,23 Km terletak di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Secara fisik, masih alami dengan warna air kecoklatan. Di sekitar sungai ini terdapat permukiman penduduk yang tidakpadat. Umumnya aktivitas penduduk di sekitar sungai adalah berkebun. Namun di daerah ini juga sudah terbangun jalan menuju peti kemas Km. 13.

c) Sungai Wain Bagian Hilir.
Sungai Wain bagian Hilir memiliki panjang 3,63 km berada di kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

7. Sungai Somber

Sungai Somber terdapat di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat sepanjang 7.100 m, di sekitar Sungai Somber terdapat usaha perkapalan, permukiman penduduk dan hutan mangrove. Sungai ini cukup terpengaruh oleh keberadaan pasang surut air laut.

8. Sungai Sepinggan

Sungai Sepinggan memiliki panjang 1.710 m. Sungai ini mengalir di Kecamatan Balikpapan Selatan.

9. Sungai Batakan Besar.

Sungai Batakan Besar memiliki panjang 9.530 m. Sumber pencemar di segmen ini adalah aktivitas domestik dan pembukaan lahan.

10. Sungai Klandasan Besar

Sungai Klandasan Besar memiliki panjang 4.900 m. Sumber pencemar di segmen ini adalah aktivitas domestik dan pembukaan lahan. fungsi Sungai Klandasan Besar lebih mengarah sebagai drainase utama yang merupakan daerah tumpahan air dari drainase sekunder dan tersier sebelum ke laut.

11. Sungai Brenga

Sungai Brenga memiliki panjang 6.000 m. Terletak di Kecamatan Balikpapan Barat dan bermuara di Teluk Balikpapan. Sepanjang sungai ini terdapat banyak hutan mangrove. Sungai ini juga terpengaruh oleh pasang surut air laut. Sungai Brenga bagian hulu memiliki banyak cabang atau sub kecil. Lebar sungai diperkirakan 7–10 m. Di sepanjang sungai hanya terdapat vegetasi mangrove.

12. Sungai Lamaru

Sungai Lamaru memiliki panjang 6.700 m. Sumber pencemar di segmen ini adalah aktivitas domestik dan pembukaan lahan.

13. Waduk Teritip

Lokasi bendungan Sungai Teritip terletak pada posisi 1°9’27”BT-1°10’35” LS, menempati morfologi perbukitan bergelombang dengan bukit-bukit kecil, elevasi berkisar antara 10-100 m di atas permukaan laut. Kelerengan daerahnya bervariasi 10°-30°. Pada Sungai Teritip telah dibuat bendung Teritip yang berfungsi sebagai bendung irigasi untuk mengairi areal sawah seluas ±200 ha. Rencana bendungan berada di hulu bendungan eksisting, dengan jarak sekitar 5 km dari IPA Teritip.

14. Sungai Mahakam

Intake Rempanga terletak di tepi S. Mahakam, sekitar 2 km dari Kota Tenggarong ke arah Samarinda dan termasuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara. Posisi intake terletak pada 117°01’00” BT-00°29’46” LS. Daerah aliran S. Mahakam, terutama daerah Loa Janan, menempati morfologi perbukitan bergelombang dengan elevasi antara 20-100 m di atas permukaan laut dan lebar sungai berkisar antara 500-100 m yang menyusuri Kota Tenggarong. Luas DPS Mahakam adalah ±63.463 km^2 dan berdasarkan Studi Potensi Air Baku Kota Balikpapan, waduk ini memiliki kapasitas aman diperkirakan sebesar ±2.000 lt/det. Jarak antara intake Rempanga menuju Kota Balikpapan (IPA Batu Ampar) diperkirakan sepanjang ±109 km

Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Secara umum wilayah sungai yang ada di Balikpapan termasuk kedalam Wilayah Sungai (yang selanjutnya disebut WS) Mahakam terletak antara 114º53’49” Bujur Barat dan 117º57’53” Bujur Timur serta diantara 0º31’30” Lintang Utara dan 1º31’33” Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, WS Mahakam merupakan wilayah sungai Lintas Provinsi dengan luas 85.236 km2.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang termasuk dalam wilayah Kota Balikpapan yaitu: DAS Semboja, DAS Ajiraden, DAS Manggar, DAS Somber, DAS Wain, DAS Sanggai, DAS Maridan, jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.10** dan **Tabel III,11** dibawah ini.

Tabel III.10 DAS WS Mahakam

No	Nama DAS	Luas (km2)	Kabupaten Kota/ Yang Masuk
1	DAS Mahakam	77,423	Kota Samarinda Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Paser Kabupaten Malinau
2	DAS Donang	563	Kabupaten Kutai Kartanegara
3	DAS Semboja	568	Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Penajam Paser Utara
4	DAS Ajiraden	39	Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara
5	DAS Manggar	135	Kota Balikpapan
6	DAS Somber	114	Kota Balikpapan
7	DAS WAIN	163	Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Penajam Paser Utara
8	DAS Sanggai	961	Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Penajam Paser Utara
9	DAS Maridan	38	Kota Balikpapan
10	DAS Riko	588	Kabupaten Penajam Paser Utara
11	DAS Tunan	751	Kabupaten Penajam Paser Utara
12	DAS Telakai	3.893	Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara
Total Luas :		**85.236**	

Sumber : Hasil Analisis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PUPR 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Tabel III.11 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Selokapi	3.196,01	6,25
2	Riko Manggar	26.217,68	51,31
3	Batakan	753,66	1,47
4	Senipah DS	1.495,46	2,93
5	Damai	2.922,16	5,72
6	Samboja Kuala	249,04	0,49
7	Manggar	9.957,88	19,49
8	Lamaru	1.833,02	3,59
9	Sepinggan DS	456,99	0,89
10	Klandasan Ulu	709,11	1,39
11	Teritip	706,68	1,38
12	Batakan DS	538,36	1,05
13	Manggar DS	2.065,19	4,04
Total Luas Balikpapan		**51.101,24**	**100,00**

Sumber : BPDAS Mahakam Berau, Analisis Peta ArGIS Tahun 2021

Berdasarkan data Peta batas DAS KLHK Tahun 2021 dan Analisis ArGIS Tahun 2021, batas DAS yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari 13 DAS. Berdasarkan batas luas, DAS Riko Manggar mempunyai luas 26.217,68 Ha atau 51,31% dari luas total wilayah Kota Balikpapan, berada di Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Utara. Luas DAS Riko Manggar ditandai dengan mengalirnya bebrapa sungai yang melintasi, diantaranya Sungai Wain Besar, Sungai Sumber, Sungai Beruang, Sungai Baru, Sungai Beranga, Sungai Tempadung yang bermuara ke Teluk Balikapan.

DAS Manggar luas kurang lebih 9.957,88 Ha atau 19,49% dari total luas wilayah, meliputi Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikapan Utara. Dilitasi Sungai Manggar Besar dan terdapat Waduk Manggar. Keberadaan DAS Manggar menjadi bagian dalam kawasan hutan lindung. Prosentase batas DAS yang lainnya hanya dibawah 5% terkecualai DAS Selokopi mencapai luas 3.196,01 Ha atau 6,25% dari total luasa wilayah, berada di Kelurahan Lamaru dan Teritip Balikpapan Timur. Untuk DAS Batakan dan DAS Batakan DS, berada di Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur.

Dibawah ini merupakan **Tabel III.12** mengenai kualitas berdasarkan hasil analisis indeks pencemaran di 19 sungai di Kota Balikpapan Tahun 2022.

Tabel III.12 Kualitas Air Sungai Berdasarkan Hasil Indeks Pencemaran di 19 Sungai di Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Nama Sungai	Bagian Sungai	Hasil Analisis Indeks Pencemaran		
			Kelas	Pollution Index	Status
1	Sungai Wain	Hulu	II	0,51	Baik
		Tengah	II	0,54	Baik
		Hilir	II	1,61	Cemar Ringan
2	Sungai Manggar	Hulu	II	0,49	Baik
		Tengah	II	4,42	Cemar Ringan
		Hilir	II	0,96	Baik
3	Sungai Somber	Hulu	II	1,60	Cemar Ringan
		Tengah	II	0,77	Baik
		Hilir	II	3,74	Cemar Ringan
4	Sungai Sepinggan	Hulu	II	0,54	Baik
		Tengah	II	1,50	Cemar Ringan
		Hilir	II	5,06	Cemar Sedang
5	Sungai Batakan Besar	Tengah	II	4,19	Cemar Ringan
		Hilir	II	5,07	Cemar Sedang
6	Sungai Klandasan Besar	Hulu	II	4,19	Cemar Ringan
		Tengah	II	5,67	Cemar Sedang
		Hilir	II	6,93	Cemar Sedang
7	Sungai Klandasan Kecil	Hulu	II	0,66	Baik
		Tengah	II	2,13	Cemar Ringan
		Hilir	II	5,69	Cemar Sedang
8	Sungai Brenga	Hulu	II	0,70	Baik
		Tengah	II	0,76	Baik
		Hilir	II	0,82	Baik
9	Sungai Lamaru	Hulu	II	5,05	Cemar Sedang
		Hilir	II	5,69	Cemar Sedang
10	Sungai Tempadung	Hulu	II	0,67	Baik

No	Nama Sungai	Bagian Sungai	Hasil Analisis Indeks Pencemaran		
			Kelas	Pollution Index	Status
		Tengah	II	0,74	Baik
		Hilir	II	2,15	Cemar Ringan
11	Sungai Teritip	Hulu	II	0,72	Baik
		Tengah	II	1,59	Cemar Ringan
		Hilir	II	2,71	Cemar Ringan
12	Sungai Kemantis	Hulu	II	2,13	Cemar Ringan
		Hilir	II	2,15	Cemar Ringan
13	Sungai Pandan Sri	Hulu	II	7,97	Cemar Sedang
		Hilir	II	9,67	Cemar Sedang
14	Sungai Solok Api	Hulu	II	0,69	Baik
		Hilir	II	0,76	Baik
15	Sungai Batakan Kecil	Hulu	II	7,32	Cemar Sedang
		Hilir	II	8,00	Cemar Sedang
16	Sungai Manggar Kecil	Hulu	II	6,19	Cemar Sedang
		Hilir	II	8,83	Cemar Sedang
17	Sungai Perapatan	Hulu	II	4,21	Cemar Ringan
		Tengah	II	7,77	Cemar Sedang
		Hilir	II	9,84	Cemar Sedang
18	Sungai Kelandasan II	Hulu	II	5,69	Cemar Sedang
		Tengah	II	5,68	Cemar Sedang
		Hilir	II	7,77	Cemar Sedang
19	Sungai Perum PDAM	Tengah	II	8,80	Cemar Sedang
		Hilir	II	9,66	Cemar Sedang

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023 (BPS)

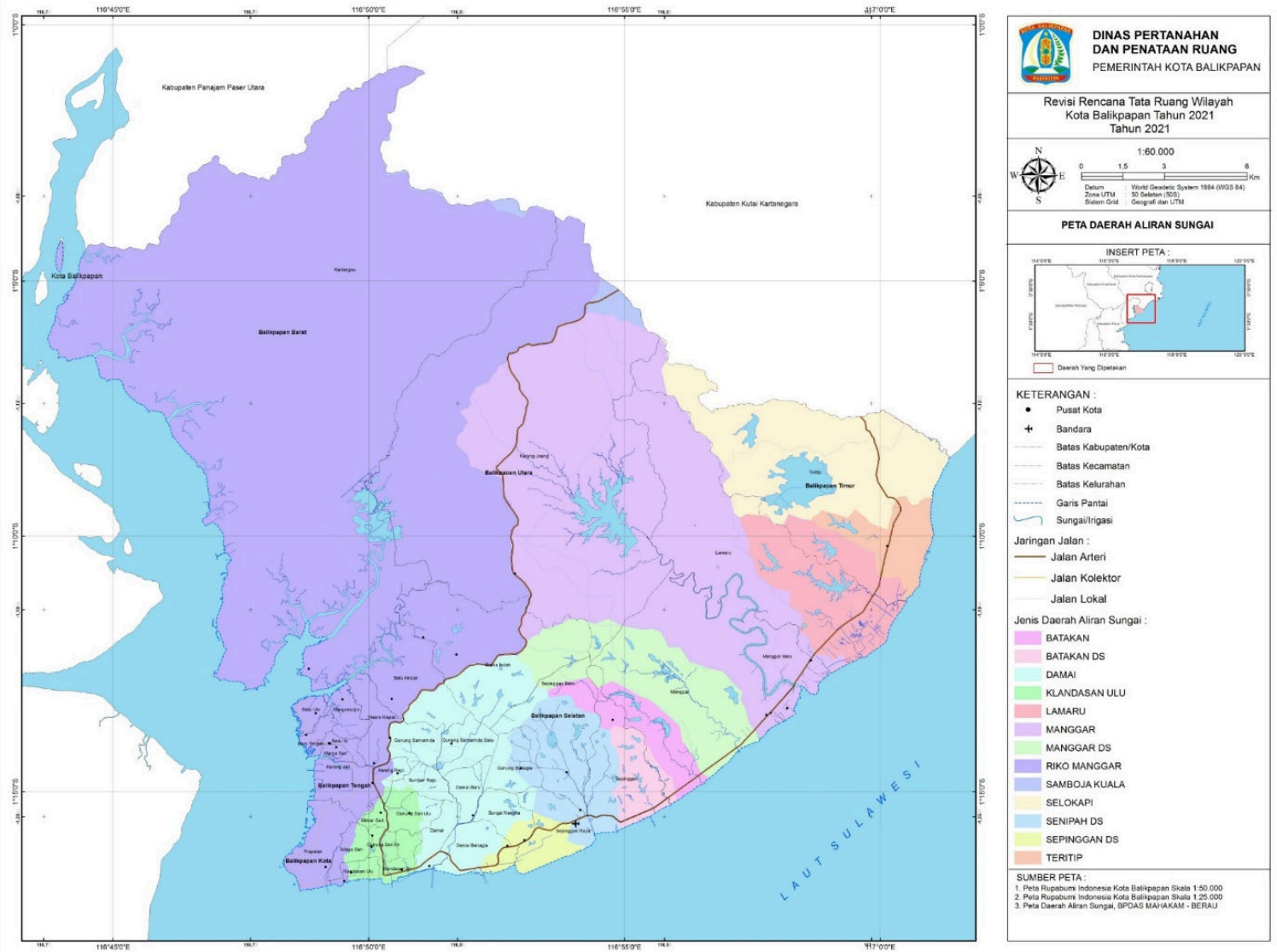
Daerah Irigasi :

Daerah irigasi yang ada di Wilayah Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi meliputi D.I Balikpapan Utara panjang 25 Ha, D.I Gunung Binjai 325 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.13** berikut.

Tabel III.13 Daerah Irigasi (D.I) di Kota Balikpapan

No D.I	Daerah Irigasi	Luas (Ha)
307	D.I Balikpapan Utara	**25**
308	D.I Gunung Binjai	**325**
	Total D. I	**345**

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 / Prt/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi



Gambar 3.5 Peta DAS Kota Balikpapan

Waduk dan Embung

Waduk dan embung memiliki fungsi sebagai penampung air (waktu musim hujan), yang nantinya air yang ditampung tersebut digunakan pada waktu yang diperlukan. Yang membedakan yaitu kapasitas tampungan yang dimiliki, untuk waduk memiliki kapasitas tampungan yang lebih besar daripada embung. Hasil inventarisasi waduk dan embung di WS Mahakam yang ada di wilayah Kota Balikpapan yaitu :

1. Bendung Pengendali Banjir : Bendali I, Bendali II, Bendali III, Bendali IV;
2. Bendungan : Bendungan Manggar dengan volume efektif 14.200.000 M3.
3. Waduk : berupa Waduk Teritip dengan volume efektif 2.150.000 M3
4. Embung : Embung Wain dengan volume efektif 500.000 M3

Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.14** berikut.

Tabel III.14 Waduk dan Embung di Kota Balikpapan Yang Termasuk WS Mahakam

No	Nama	Lokasi	Volume Efektif (M3)	Pemanfaatan
1	Bendali I	Kota Balikpapan	191,491	Pengendalian Banjir Kota Balikpapan
2	Bendalai II	Kota Balikpapan	341.244	Pengendalian Banjir Kota Balikpapan
3	Bendali III	Kota Balikpapan	245.000	Pengendalian Banjir Kota Balikpapan
4	Bendalai IV	Kota Balikpapan	250.000	Pengendalian Banjir Kota Balikpapan
5	Bendungan Manggar	Kota Balikpapan	14.200.000	Penyediaan Air Baku Kota Balikpapan
6	Embung Wain	Kota Balikpapan	500,000	Penyediaan Air Baku Kota Balikpapan
7	Waduk Teritip	Kota Balikpapan	2.150.000	Penyediaan Air Baku Kota Balikpapan

Sumber : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Tahun 2016

3.1.2.6 Klimatologi

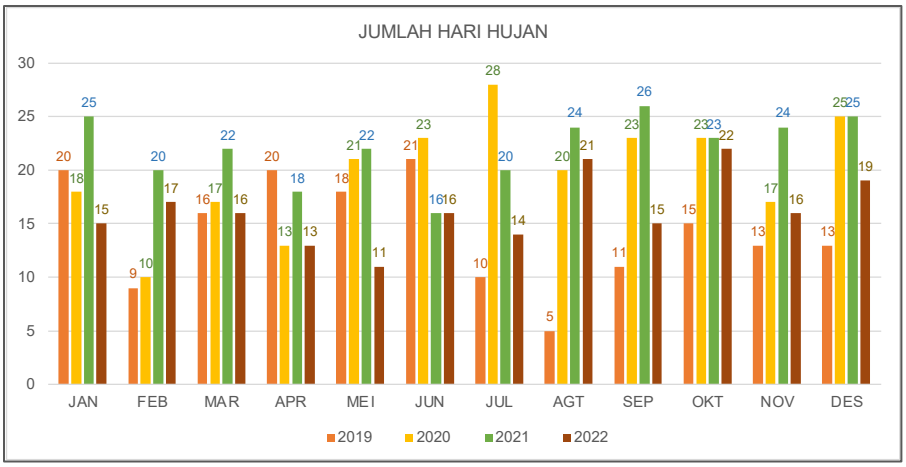
Secara umum iklim di wilayah Kota Balikpapan dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am yang berdasarkan klasifikasi iklim Koppen. Kota Balikpapan, sama seperti daerah lainnya di Indonesia, memiliki iklim tropis dengan hujan sepanjang tahun. Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2021 tercatat pada bulan Maret, sebesar 33,6 derajat Celsius dan terendah pada bulan Februari, April dan Desember sebesar 22,2 derajat celsius. Adapun secara rata-rata, suhu udara tertinggi pada tahun 2021 tercatat pada bulan Mei dan Oktober dengan 27,6 derajat Celsius dan terendah pada bulan Agustus dan September dengan 26,9 derajat celsius. Curah hujan tertinggi pada tahun 2021 tercatat pada bulan Agustus dengan 446,0 mm dan terendah pada bulan Februari dengan 135,4 mm. Adapun hari hujan tertinggi yang tercatat pada tahun 2021 terjadi pada bulan September, dengan 26 hh.

Menurut BMKG dalam rentang waktu 30 tahun, secara umum intensitas curah hujan di Kota Balikpapan tidak mengalami perubahan. Namun, jika rentang waktu tersebut dilihat bulanan, maka terlihat terjadinya fluktuasi intensitas curah hujan. Dapat terjadi hujan dengan durasi 1,5 jam, intensitasnya sama dengan hujan selama 12 hari. Seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut, frekuensi terjadinya hujan di tahun 2022 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2021. Total terjadinya hujan pada tahun 2022 selama 195 hari, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 265 hari.

Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang dari 2200 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah. Pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750 – 450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya.

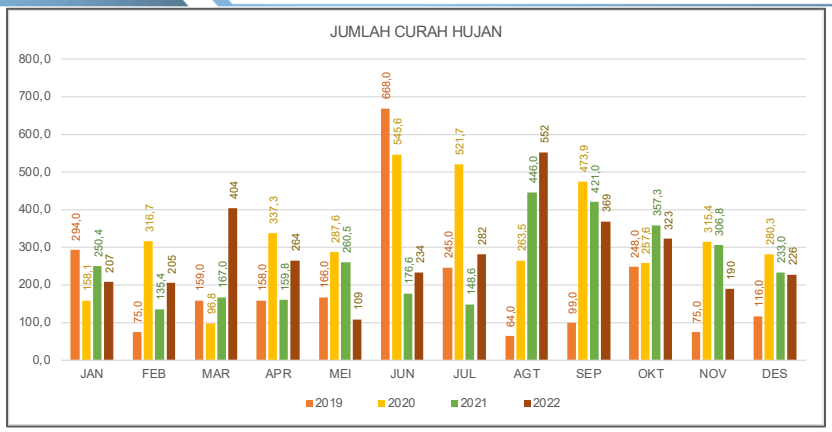
Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.

Kota Balikpapan, sama seperti daerah lainnya di Indonesia, memiliki iklim tropis dengan hujan sepanjang tahun, Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2022 tercatat pada bulan April sebesar 33,4 derajat celsius dan terendah pada bulan Februari sebesar 22 derajat celsius, Adapun secara ratarata, suhu udara tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Mei dengan 27,8 derajat celsius dan terendah pada bulan Januari, Februari dan September dengan 26,8 derajat celsius. Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Agustus dengan curah hujan mencapai 552,0 mm dan terendah pada bulan Mei dengan 109,4 mm. Adapun hari hujan tertinggi yang tercatat pada tahun 2022 terjadi pada bulan Oktober dan Agustus, masing-masing sebanyak 22 dan 21 hari. Jika dikaitkan dengan banjir, pada bulan-bulan tersebut banyak terjadi banjir. Untuk lebih jelasnya mengenai humlah hari hujan dan curah hujan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Gambar 3.6** dan **Gambar 3.7** berikut.



Sumber: BMKG, 2023

Gambar 3.6 Jumlah Hari Hujan di Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2022 (hari)



Sumber: BMKG, 2023

Gambar 3.7 Jumlah Curah Hujan di Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2022 (mm)

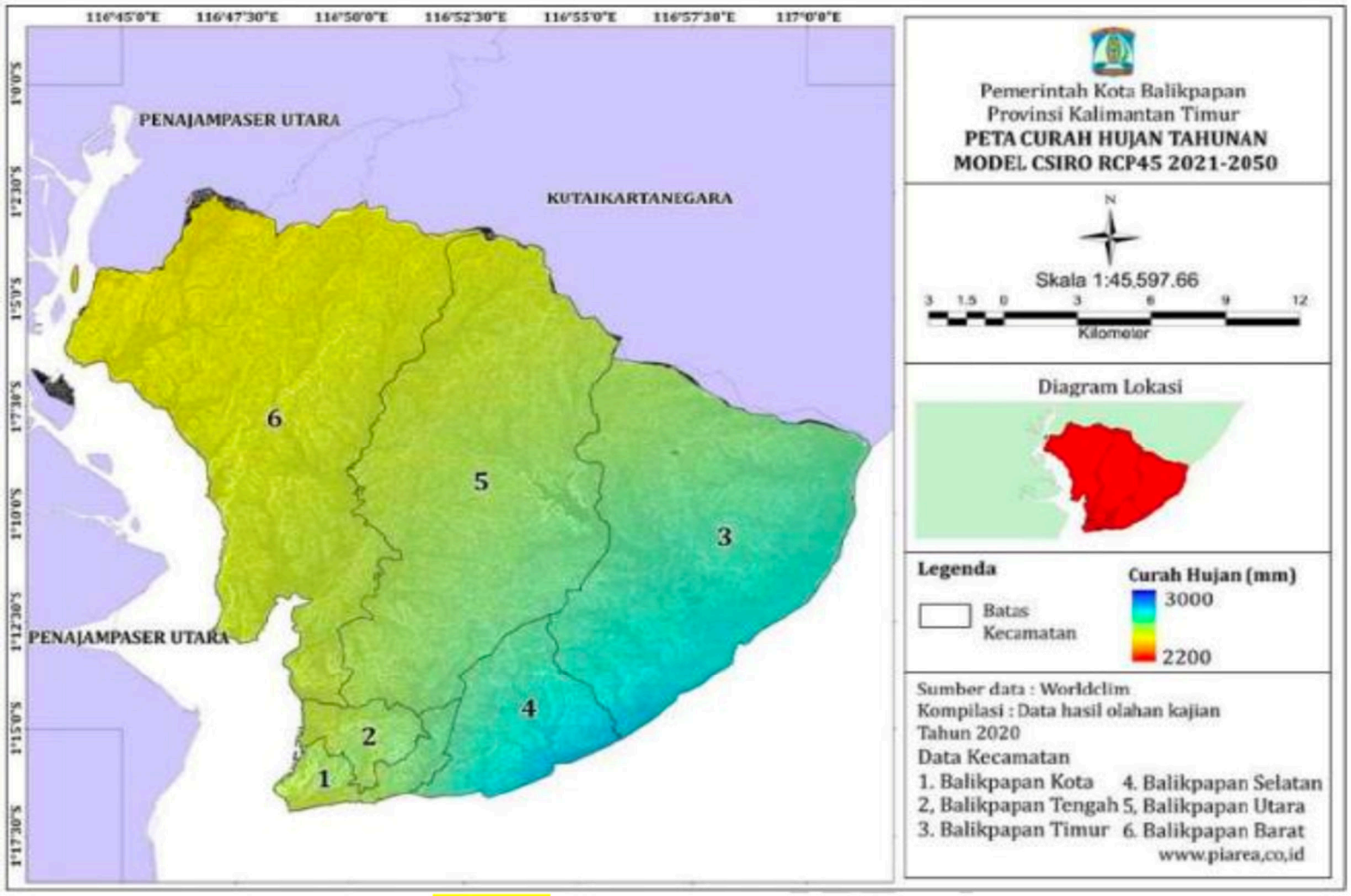
Berdasarkan kajian DLH Kota Balikpapan dalam Kajian DIKPLH Kota Balikpapan (2019), diproyeksikan curah hujan Kota Balikpapan akan mengalami peningkatan secara merata dimasa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap. Model proyeksi curah hujan menggunakan 2 (dua) model, yaitu model CSIRO dan model MIROC RCP45. Untuk lebih jelasnya mengenai Peta Proyeksi Curah Hujan yang di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Gambar 3.8** dan **Gambar 3.9** berikut

Berdasarkan kajian DLH Kota Balikpapan (DIKPLH Kota Balikpapan, 2019), sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah. Kecamatan Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pada tahun 2022 suhu terendah adalah 220C yang terjadi pada bulan Februari. Sedang suhu tertinggi adalah 340C terjadi pada bulan Desember. Suhu rata-rata berkisar antara 26,80C hingga 27,80C. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.15** berikut.

Tabel III.15 Suhu Udara Kota Balikpapan Tahun 2019-2022 (0C)

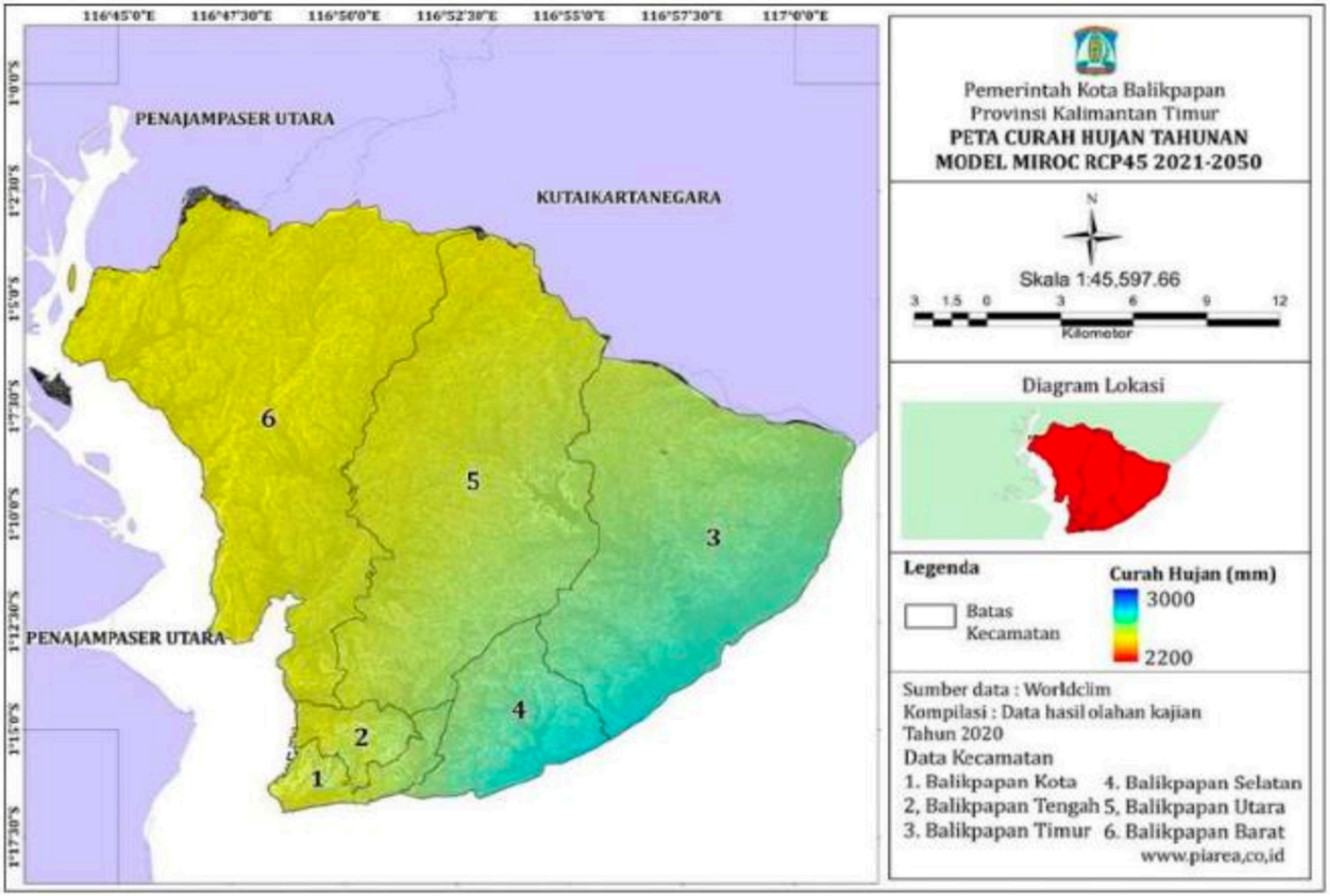
Bulan	Minimum				Rata-rata				Maksimum			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
JAN	22,3	24,4	22,8	22,7	27,3	27,6	27,1	26,8	32,9	31,8	32,4	30,9
FEB	23,2	24,7	22,2	22,0	27,9	27,7	27,2	26,8	33,8	32,0	32,7	33,1
MAR	22,6	24,8	22,7	22,4	27,7	27,7	27,2	27,2	34,5	31,7	33,6	33,0
APR	23,1	24,6	22,2	22,1	27,6	27,5	27,5	27,7	33,4	31,4	33,0	33,4
MEI	22,7	25,2	23,7	23,7	28,3	27,8	27,6	27,8	33,0	31,5	32,9	44,1
JUN	22,8	24,6	22,3	23,0	27,2	27,2	27,4	27,3	31,1	30,6	32,7	32,5
JUL	21,7	24,2	23,4	22,8	27,3	27,6	27,1	27,2	31,6	29,5	31,8	32,4
AGT	22,6	24,5	23,1	22,3	27,6	27,2	26,9	26,9	32,4	30,7	32,1	31,7
SEP	23,0	24,9	23,0	22,7	28,0	27,2	26,9	26,8	32,7	30,5	32,3	33,0
OKT	23,0	24,6	22,6	22,7	28,0	27,6	27,6	27,4	32,6	30,9	33,2	33,1
NOV	23,0	24,6	23,2	23,3	28,3	27,5	27,3	27,3	32,9	31,5	33,1	32,8
DES	23,3	24,6	22,2	22,4	27,7	27,5	27,3	27,4	33,6	31,1	33,0	34,0

Sumber: BMKG, 2023



Sumber: DIKPLH Kota Balikpapan, 2019. DLH Kota Balikpapan

Gambar 3.8 Peta Proyeksi Curah Hujan Tahunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2050 Berdasarkan Model CSIRO



Sumber: DIKPLH Kota Balikpapan, 2019. DLH Kota Balikpapan

Gambar 3.9 Peta Proyeksi Curah Hujan Tahunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2050 Berdasarkan Model MIROC RCP45

Kelembaban udara Kota Balikpapan selama periode 2019 – 2022 rata-rata berkisar antara 80,7 – 92,0%. Pada tahun 2022 kelembaban udara rata-rata di Kota Balikpapan adalah 82 – 86%. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 51%. Sedang kelembaban tertinggi sebesar 100% terjadi hamper di sepanjang tahun. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.16** berikut.

Tabel III.16 Kelembaban Udara Kota Balikpapan Tahun 2019-2022 (%)

Bulan	Minimum				Rata-rata			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Januari	60,0	53,0	51,0	48,0	88,1	85,0	84,0	84,0
Februari	49,0	57,0	63,0	52,0	84,3	85,0	86,0	83,0
Maret	53,0	55,0	48,0	57,0	85,5	88,0	84,0	84,0
April	63,0	65,0	61,0	50,0	89,6	88,0	82,0	82,0
Mei	70,0	62,0	63,0	50,0	87,2	90,0	86,0	82,0
Juni	72,0	71,0	59,0	57,0	88,9	90,0	84,0	83,0
Juli	66,0	73,0	69,0	60,0	85,0	92,0	86,0	84,0
Agustus	65,0	66,0	67,0	57,0	82,0	89,0	85,0	85,0
September	63,0	63,0	66,0	52,0	80,7	89,0	86,0	86,0
Oktober	67,0	54,0	61,0	52,0	84,8	86,0	84,0	83,0
November	42,0	59,0	58,0	53,0	85,2	85,0	85,0	83,0
Desember	53,0	61,0	60,0	42,0	86,7	87,0	83,0	82,0

Sumber: BMKG, 2023

Untuk kualitas udara di Kota Balikpapan berdasarkan parameter seperti S02, N02, CO, HC dan lain sebagainya dapat dilihat pada **Tabel III.17** dibawah ini.

Tabel III.17 Kualitas Udara Berdasarkan Parameter di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022

Parameter	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Area Kampung Baru					
SO2	0,0212	0,026	0,029	0,028	0,027
NO2	0,0354	0,013	0,026	0,013	0,024
CO	0,668	3,693	3,738	3,700	2,864
HC	0,0065	0,007	0,009	0,009	0,009
PM10	0,0174	0,020	0,012	0,010	0,010
Pb	0,00005	<0,0001	0,00002	0,00002	0,00002
Area Simpang Gunung Malang					
SO2	0,032	0,037	0,043	0,042	0,041
NO2	0,0559	0,014	0,038	0,016	0,033
CO	3,1493	4,441	4,735	4,697	3,735
HC	0,0095	0,017	0,020	0,020	0,017
PM10	0,019	0,021	0,016	0,015	0,012
Pb	0,00005	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Area Pelabuhan Semayang					
SO2	0,0277	0,038	0,041	0,041	0,042
NO2	0,0542	0,014	0,038	0,034	0,033
CO	1,9087	4,624	4,693	4,613	3,780

Parameter	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
HC	0,0102	0,017	0,017	0,020	0,020
PM10	0,0199	0,010	0,017	0,008	0,018
Pb	0,00005	0,0002	0,0001	0,00009	0,1
Area Bundaran Rapak					
SO2	0,0169	0,033	0,042	0,040	0,040
NO2	0,0306	0,015	0,037	0,016	0,034
CO	2,0041	4,331	4,407	4,537	3,605
HC	0,0085	0,013	0,020	0,017	0,017
PM10	0,0157	0,034	0,033	0,012	0,037
Pb	0,00005	0,0001	0,0001	0,00009	0,00001
Simpang Plaza Balikpapan					
SO2	0,0254	0,033	0,036	0,037	0,038
NO2	0,0367	0,014	0,031	0,014	0,035
CO	3,531	4,262	4,407	4,296	3,632
HC	0,0127	0,013	0,015	0,015	0,015
PM10	0,0185	0,023	0,07	0,022	0,009
Pb	0,00005	0,0001	0,0007	0,00008	0,00008

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023, BPS

3.1.2.7 Rawan Bencana

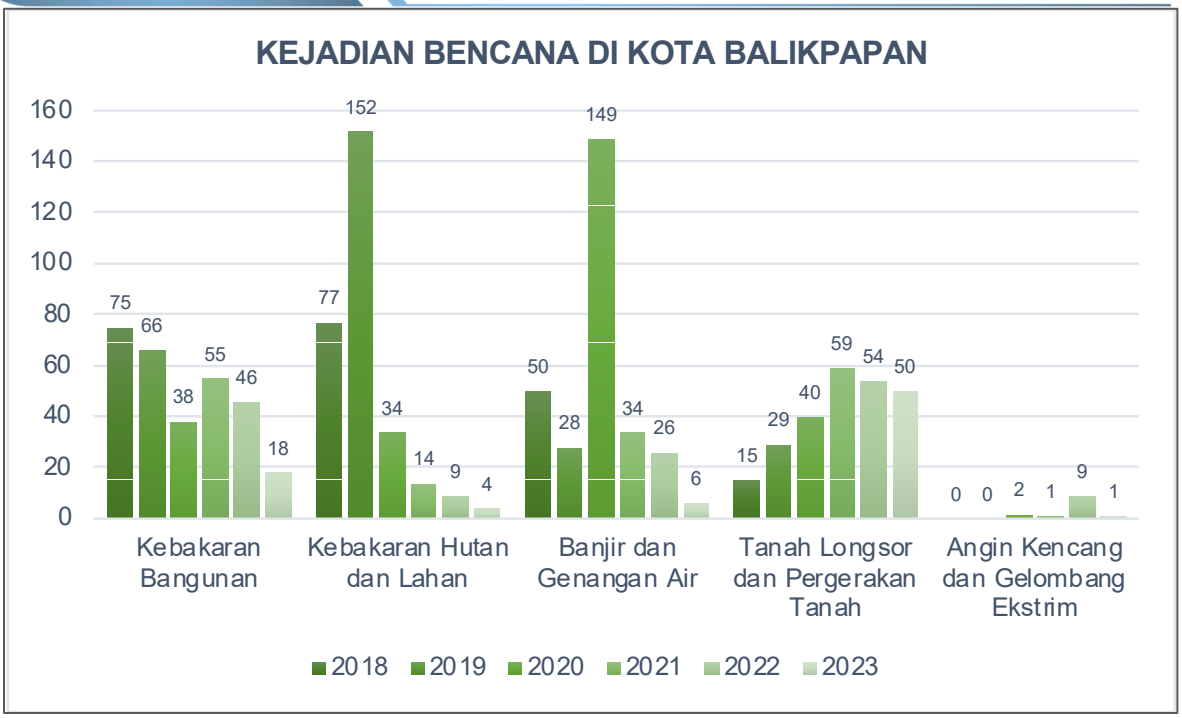
Berdasarkan catatan BPBD Kota Balikpapan tahun 2022 dan beberapa diskusi yang dilakukan serta hasil kajian risiko bencana, Kota Balikpapan memiliki potensi ancaman bencana berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, gempa bumi, cuaca ekstrim dan kekeringan. Ada satu aspek bencana lagi, yakni kebakaran permukiman. Namun untuk bencana kebakaran pemukiman diperlukan kajian lebih lanjut. Dengan melihat potensinya, untuk bencana konflik sosial serta epidemi dan wabah penyakit untuk saat ini dirasa belum memerlukan kajian yang mendalam dan jika dirasa perlu, akan dilakukan kajian lebih lanjut.

Secara umum jenis ancaman bencana di Kota Balikpapan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Bencana geologi meliputi gempa bumi dan tanah longsor.

b) Bencana hidrometeorologi meliputi: banjir, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan serta gelombang ekstrim dan abrasi.

Kejadian bencana di Kota Balikpapan terutama didominasi oleh kebakaran bangunan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan genangan air, serta tanah longsor. Selama periode 2018-2022, bencana kebakaran bangunan, kebakaran lahan, dan banjir mengalami kecenderungan kecuali kejadian kebakaran lahan pada tahun 2019 dan kejadian banjir pada tahun 2020. Sedang bencana tanah longsor relative masih cukup tinggi dan menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun pada tahun 2022 mulai mengalami sedikit penurunan. Jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.10** berikut



Sumber: Pusdalops BPBD Kota Balikpapan, 2023

Gambar 3.10 Kejadian Bencana di Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Dibawah ini akan diuraikan terkait dengan kebencanaan di Kota Balikpapan.

1. **Banjir**

   Banjir adalah bencana alam yang terjadi secara alami maupun oleh ulah manusia. Sekarang ini banjir sering terjadi disebabkan ulah manusia yang mulai tidak menghiraukan keseimbangan alam. Banjir merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir juga dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, peluapan air sungai atau pecahnya bendungan sungai. Beberapa penyebab terjadinya banjir adalah:

   a) Curah hujan dalam jumlah yang besar dan intensitas yang tinggi.

   b) Erosi tanah pada lahan-lahan terbuka yang hanya menyisakan batuan, hingga tidak ada proses peresapan air oleh tanah (infiltrasi).

   c) Pembukaan dan pematangan lahan bervegetasi untuk pemukiman, kawasan niaga dan perkantoran yang mengurangi kapasitas penyerapan air pada permukaan tanah.

   d) Pembangunan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa hingga industri yang dibarengi dengan penutupan tanah dengan semen, paving atau aspal sehingga tidak menyisakan lahan yang tertutup vegetasi alami atau tanah sehingga kemampuan peresapan air oleh tanah sangat rendah.

   e) Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah dalam badan air dan saluran drainase, hingga saluran-saluran drainase dan badan air tersumbat.

   f) Bendungan dan saluran air yang mengalami pendangkalan.

Pengkajian bahaya banjir untuk wilayah Kota Balikpapan dilakukan dengan menerapkan metode Geomorphic Flood Area Index (GFI) sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BNPB pada pertengahan tahun 2019. Metode GFI mempertimbangkan konfigurasi lapangan berupa konfigurasi topografi dan jarak dari sungai kemudian memodelkannya menjadi wilayah potensi genangan banjir. Peta model genangan ini kemudian diverifikasi dengan peta liputan kejadian banjir di Kota Balikpapan yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi.

Wilayah yang masuk dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari atau sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah, wilayah dengan ketinggian genangan 75 hingga 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi.

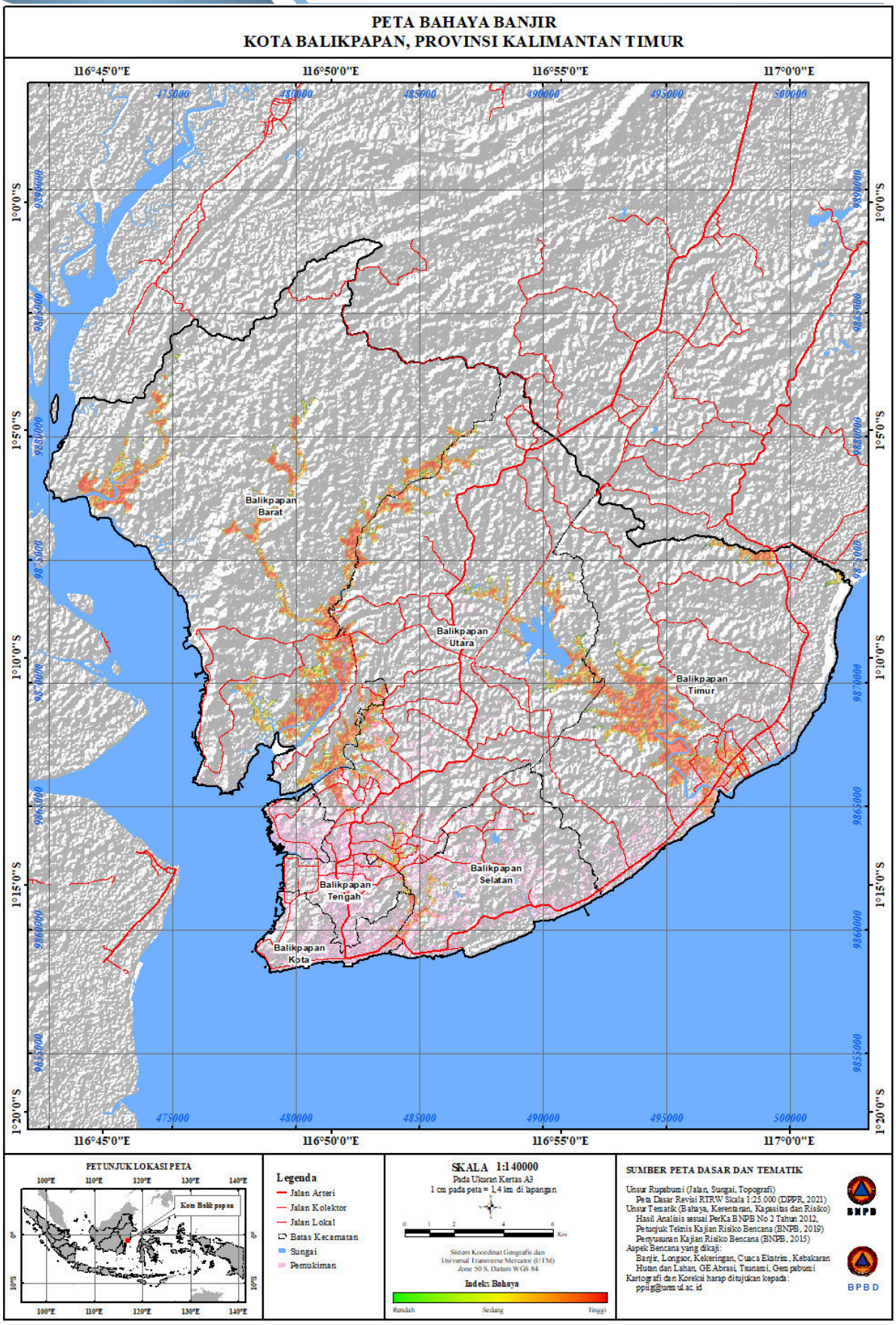
Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di KotaBalikpapan. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kota Balikpapan seperti yang ditampilkan pada **Tabel III.18** berikut.

Tabel III.18 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Banjir di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Balikpapan Barat	26	2.520	1.547	4.093	Tinggi
2	Balikpapan Kota	-	98	64	162	Sedang
3	Balikpapan Selatan	3	546	275	824	Tinggi
4	Balikpapan Tengah	0	268	73	341	Tinggi
5	Balikpapan Timur	142	2.241	2.088	4.471	Tinggi
6	Balikpapan Utara	16	1.045	1.540	2.601	Tinggi
Kota Balikpapan		**187**	**6.718**	**5.587**	**12.492**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Tabel III.19 di atas menunjukkan hasil kajian bahaya terhadap bencana banjir di 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya banjir terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka total luas bahaya bencana banjir di Kota Balikpapan adalah 12.492 ha yang berada pada kelas tinggi. Dari ke-enam kecamatan yang ada di Balikpapan, hanya Kecamatan Balikpapan Kota yang memiliki kelas bahaya banjir pada kategori Sedang, selain itu kategori bahaya banjir termasuk dalam kelas Tinggi. Dilihat dari luasan potensi bahaya banjir, Kecamatan Balikpapan Timur memiliki wilayah bahaya banjir terluas, yakni 4.471 ha atau sekitar 35,79% dari total luas wilayah bahaya banjir. Untuk lebih jelasnya mengenai Peta Bahaya Banjir di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Gambar 3.11** berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Gambar 3.11 Peta Bahaya Banjir Kota Balikpapan

2. Tanah Longsor

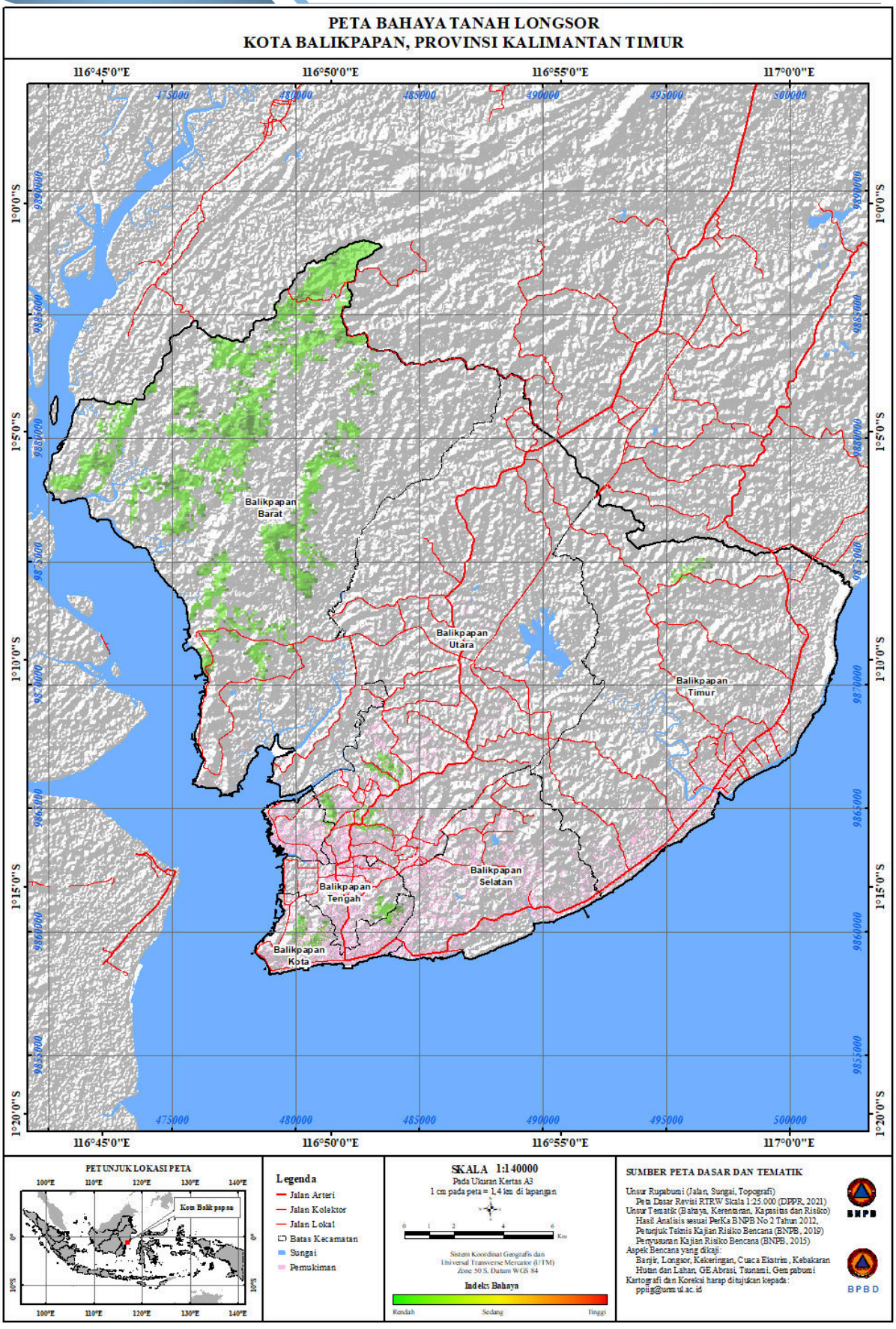
Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai Pengkajian bahaya tanah longsor di Kota Balikpapan dibuat dengan melakukan delineasi terhadap peta zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG. Berdasarkan hasil kajian pemetaan rawan tanah longsor di Kota Balikpapan (BPBD Kota Balikpapan, 2022) mengenai bahaya tanah longsor dapat dilihat pada **Tabel III.19** berikut.

Tabel III.19 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Tanah Longsor di Kota Balikapan

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Balikpapan Barat	382,77	128,79	-	511,56	Rendah
2	Balikpapan Kota	42,57	104,85	-	147,42	Sedang
3	Balikpapan Selatan	8,64	0,09	-	8,73	Rendah
4	Balikpapan Tengah	21,33	25,74	-	47,07	Sedang
5	Balikpapan Timur	-	-	-	-	-
6	Balikpapan Utara	23,94	-	-	23,94	Rendah
Kota Balikpapan		**479,25**	**259,47**	-	**738,72**	**Sedang**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil kajian bahaya terhadap bencana tanah longsor, maka diperoleh potensi luas bahaya di Kota Balikpapan untuk 6 (enam) kecamatan. Luas potensi bahaya tanah longsor di Kota Balikpapan adalah 738,72 ha yang berada pada kelas Sedang. Kecamatan dengan potensi luas bahaya tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Balikpapan Barat, yaitu seluas 511,56 ha atau 69,25% dari total potensi luas bahaya tanah longsor. Perhitungan luas bahaya hanya memperhitungkan luas risiko yang tidak memiliki indeks bahaya bernilai 0 (nol). Artinya indeks bahaya bernilai 0 tidak diperhitungkan atau diakumulasikan ke dalam rekap potensi luas bahaya. Untuk lebih jelasnya mengenai Peta Bahaya Banjir di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Gambar 3.12** berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Gambar 3.12 Peta Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

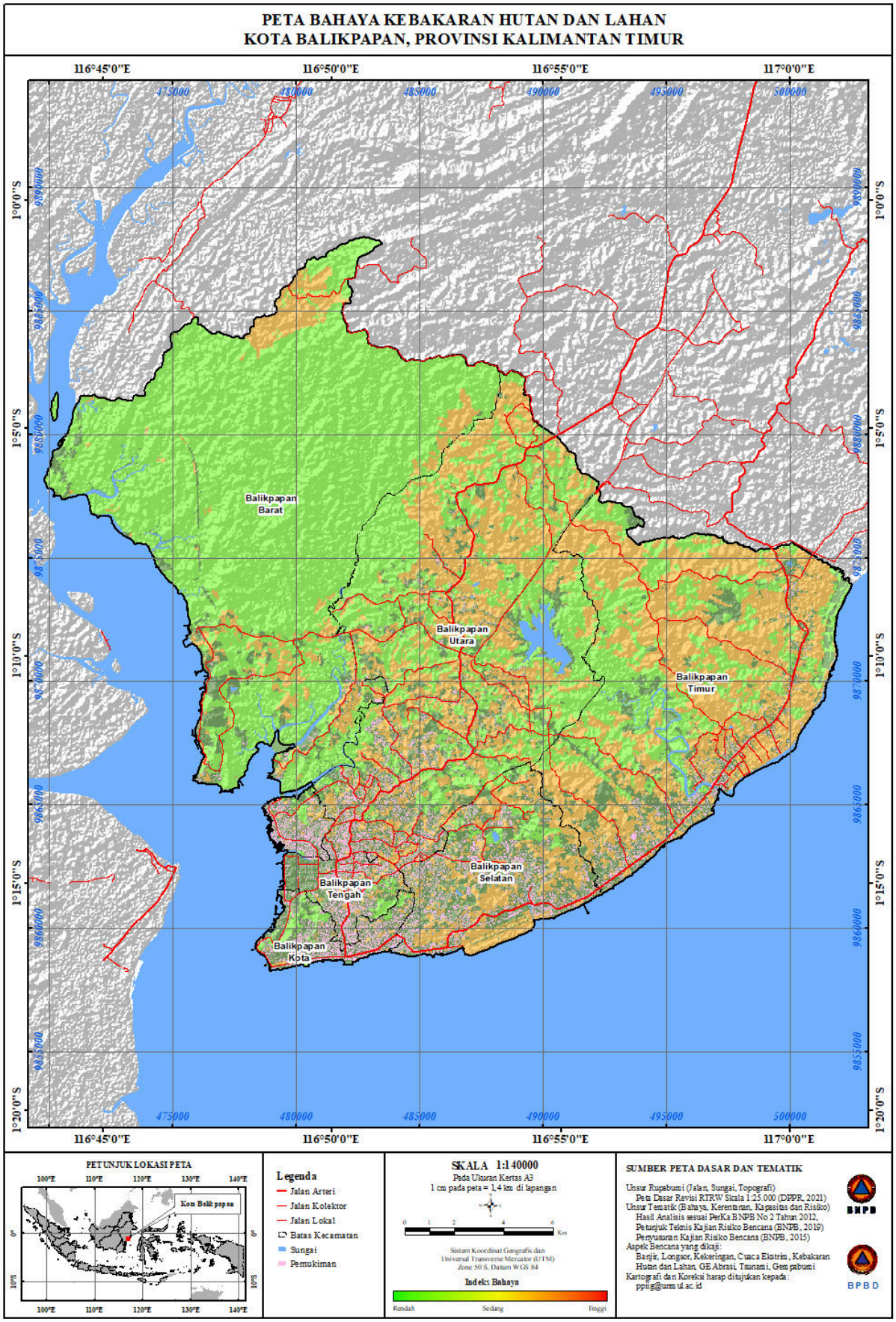
Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan adalah bencana yang disebabkan karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas atau karena sambaran petir. Sedangkan faktor manusia lebih kepada upaya pembukaan lahan yang tidak terkoordinir dan terencana. Wilayah sebaran kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan, jenis tanah, dan jumlah titik api (hot spot). Untuk mengukur besar indeks dari ancaman kebakaran hutan dan lahan maka ditentukan dengan parameter konversi indeks untuk 3 (tiga) jenis parameter, yaitu jenis lahan, curah hujan, dan jenis tanah. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Balikpapan berdasarkan parameternya diketahui berada pada kelas Sedang. Kategori kebakaran hutan dan lahan ini dipengaruhi oleh penutup lahan berupa hutan yang didukung oleh musim kemarau. Selain itu, pembukaan lahan oleh manusia juga sangat berpengaruh. Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Balikpapan seperti pada **Tabel III.20** di bawah ini.

Tabel III.20 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Balikpapan Barat	-	17.551,62	-	17.551,62	Sedang
2	Balikpapan Kota	-	218,79	-	218,79	Sedang
3	Balikpapan Selatan	-	1.674,45	-	1.674,45	Sedang
4	Balikpapan Tengah	-	176,4	-	176,4	Sedang
5	Balikpapan Timur	-	9.525,87	-	9.525,87	Sedang
6	Balikpapan Utara	-	10.672,47	-	10.672,47	Sedang
Kota Balikpapan		-	**39.819,60**	-	**39.819,60**	**Sedang**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Hasil kajian bahaya terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka total luas bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Balikpapan adalah 39.819,60 ha yang berada pada kelas Sedang, di mana seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan juga berada pada kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kategori Sedang. Dilihat dari luasan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan, Kecamatan Balikpapan Barat memiliki wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan terluas, yakni 17.551,62 ha atau sekitar 44,08% dari total potensi luas wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan. Untuk lebih jelasnya mengenai Peta Bahaya Kebakaran Hutan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Gambar 3.13** berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Gambar 3.13 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Balikpapan

4. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

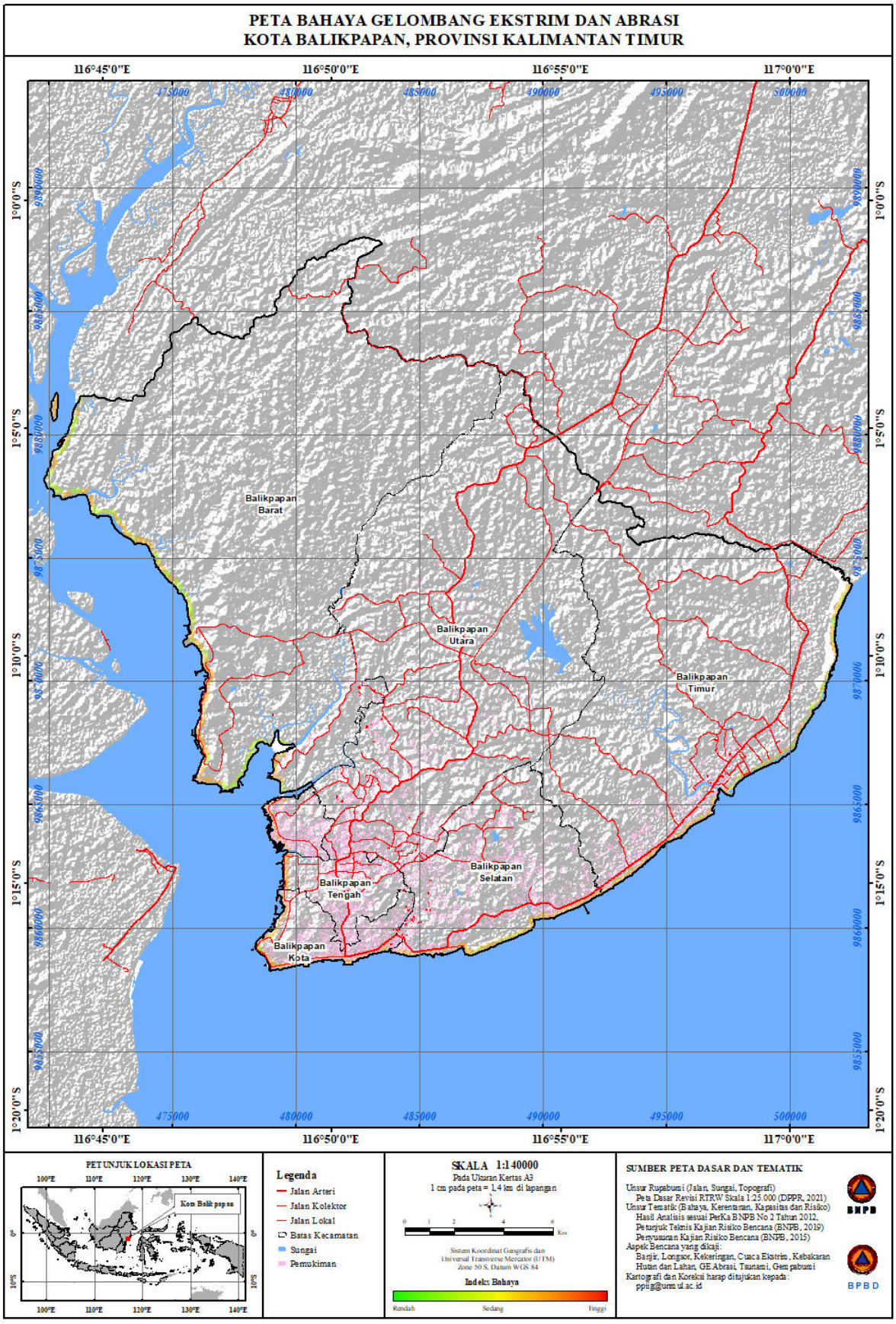
Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sedangkan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi dan bentuk garis pantai. Berdasarkan kajian risiko bencana Kota Balikpapan yang disusun oleh BPBD Kota Balikpapan (2022), berikut ini adalah **Tabel III.21** yang menunjukkan luas dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan.

Tabel III.21 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Balikpapan Barat	-	624,33	-	624,33	Sedang
2	Balikpapan Kota	-	180,72	-	180,72	Sedang
3	Balikpapan Selatan	-	190,53	-	190,53	Sedang
4	Balikpapan Tengah	-	31,41	-	31,41	Sedang
5	Balikpapan Timur	-	303,21	-	303,21	Sedang
6	Balikpapan Utara	-	-	-	-	-
Kota Balikpapan		**-**	**1.330,20**	**-**	**1.330,20**	**Sedang**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Tingkat ancaman gelombang ekstrim dan abrasi di pesisir pantai memiliki intensitas yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh gelombang dan arus, tutupan vegetasi, bentuk garis pantai dan tipologi pantai. Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang terlihat pada tabel di atas. Hasil kajian bahaya terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi menunjukan bahwa 5 kecamatan di Kota Balikpapan berada pada kelas Sedang, yaitu Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur. Total potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah 1.330,20 ha. Sementara Kecamatan Balikpapan Utara terindikasi tidak memiliki potensi bahaya. Perhitungan luas bahaya hanya memperhitungkan luas yang tidak memiliki indeks bahaya bernilai 0 (nol). Artinya indeks bahaya bernilai 0 tidak diperhitungkan atau diakumulasikan ke dalam rekap luas bahaya. Untuk lebih jelasnya mengenai Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Gambar 3.14** berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Gambar 3.14 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

5. Tsunami

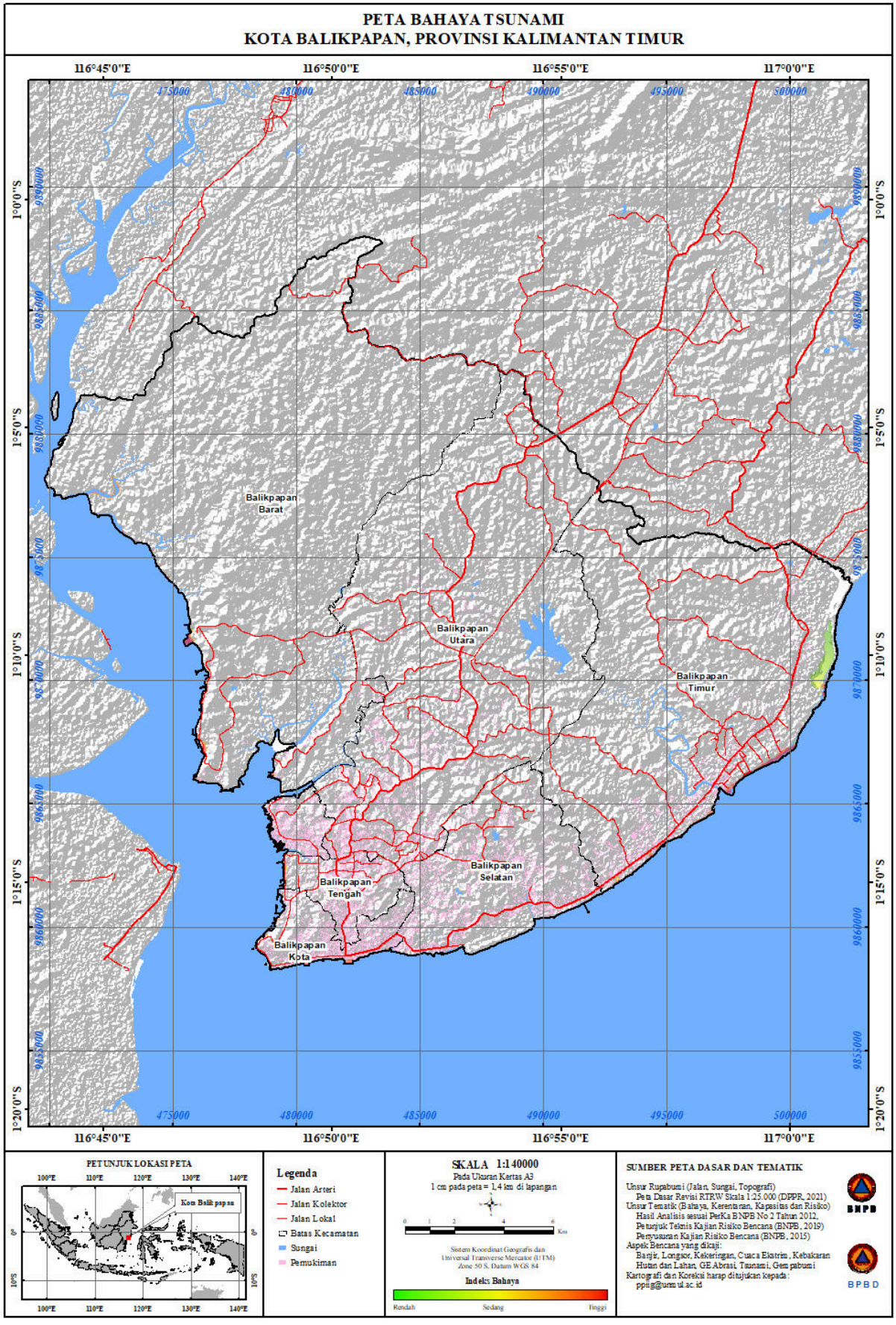
Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivasi tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi *inundasi* (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak *inundasi*, nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, tanpa terkecuali untuk Kota Balikpapan yang juga memiliki wilayah pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Berdasarkan penghitungan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami di Kota Balikpapan seperti yang disajikan pada **Tabel III.22** di bawah ini.

Tabel III.22 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Balikpapan Barat	39,00	5,00	-	44,00	Rendah
2	Balikpapan Kota	2,00	0,00	-	2,00	Rendah
3	Balikpapan Selatan	-	-	-	-	-
4	Balikpapan Tengah	1,00	1,00	-	2,00	Rendah
5	Balikpapan Timur	2,00	1,00	-	3,00	Sedang
6	Balikpapan Utara	-	-	-	-	-
Kota Balikpapan		**44,00**	**7,00**	-	**51,00**	**Sedang**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Tabel III.22 di atas menunjukkan hasil kajian bahaya terhadap bencana tsunami di 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya tsunami terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka total luas bahaya bencana tsunami di Kota Balikpapan adalah 51,00 ha yang berada pada kelas Sedang. Dari ke-enam kecamatan yang ada di Balikpapan, hanya Kecamatan Balikpapan Timur yang memiliki kelas bahaya tsunami pada kategori Sedang, selain itu kategori bahaya tsunami termasuk dalam kelas Rendah. Sementara Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara terindikasi tidak memiliki potensi bahaya tsunami. Dilihat dari luasan potensi bahaya tsunami, Kecamatan Balikpapan Barat memiliki wilayah bahaya tsunami terluas, yakni 44,00 ha atau sekitar 86,27% dari total luas wilayah bahaya tsunami. Perhitungan luas bahaya hanya memperhitungkan luas yang tidak memiliki indeks bahaya bernilai 0 (nol). Artinya indeks bahaya bernilai 0 tidak diperhitungkan atau diakumulasikan ke dalam rekap luas bahaya. Untuk lebih jelasnya mengenai Peta Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Gambar 3.15** berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Gambar 3.15 Peta Bahaya Tsunami Kota Balikpapan

6. Gempa Bumi

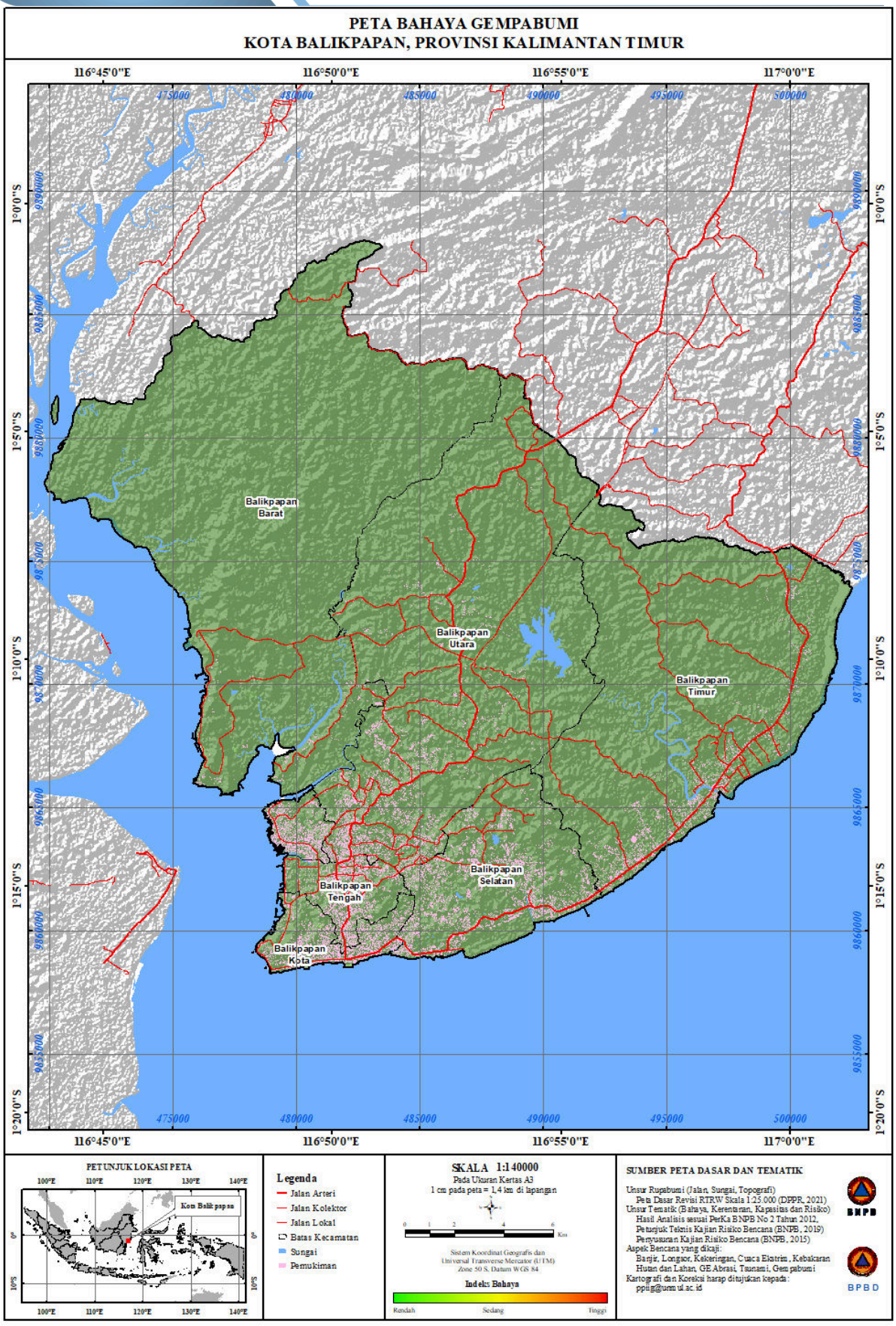
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan (BNPB). Metode kajian untuk gempa bumi pada dokumen ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. Berdasarkan hasil kajian pemetaan rawan (bahaya) gempa bumi di Kota Balikpapan berdasarkan kondisi daerah terhadap setiap parameter gempa bumi, dapat ditentukan potensi bahaya gempa bumi di Kota Balikpapan. Luas potensi bahaya gempa bumi dapat dilihat pada **Tabel III.23** berikut.

Tabel III.23 Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Balikpapan Barat	19.194	-	-	19.194	Rendah
2	Balikpapan Kota	1.089	-	-	1.089	Rendah
3	Balikpapan Selatan	3.844	-	-	3.844	Rendah
4	Balikpapan Tengah	1.075	-	-	1.075	Rendah
5	Balikpapan Timur	11.737	-	-	11.737	Rendah
6	Balikpapan Utara	13.906	-	-	13.906	Rendah
Kota Balikpapan		**50.845**	-	-	**50.845**	**Rendah**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Tabel III.23 di atas menunjukkan hasil kajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya gempa bumi terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka total luas bahaya bencana gempa bumi di Kota Balikpapan adalah 50.845 ha yang seluruh kecamatan berada pada kelas Rendah. Dilihat dari luasan potensi bahaya gempa bumi, Kecamatan Balikpapan Barat memiliki wilayah bahaya gempa bumi terluas, yakni 19.194 ha atau sekitar 37,75% dari total potensi luas wilayah bahaya gempa bumi. Dari tabel III.24 ini juga terlihat bahwa potensi bahaya gempa bumi mencakup seluruh wilayah Kota Balikpapan.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026, BPBD Kota Balikpapan

Gambar 3.16 Peta Bahaya Gempa Bumi Kota Balikpapan

3.1.2.8 Kondisi Fisik Pantai

Kota Balikpapan merupakan kota pesisir yang mempunyai garis pantai sepanjang ±80 km. Potensi tersebut akan dikembangkan dengan pemanfaatan wisata alam dan air, konservasi alam, kawasan permukiman pelabuhan, perikanan, industri dan bahkan komersial.

Rencana pengembangan Kawasan Pantai Kota Balikpapan tersebar di beberapa Lokasi yaitu:

- Kawasan Pantai Pasir Putih di Kariangau (dekat kawasan KIK) dengan luas 1,46 Ha
- Pantai Melawai di Kelurahan Prapatan dengan luas 23,156 Ha
- Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 456,38 Ha

Untuk perkembangan di masa yang akan datang seperti yang diungkap pada RTRW Kota Balikpapan (2012-2032), Kota Balikpapan diarahkan sebagai kota pantai, potensi tersebut dikembangkan dengan konsep Waterfront City dengan pengaturan sebagai berikut;

- Mengidentifikasi potensi pantai Kota Balikpapan
- Pemberian legitimasi kawasan pantai sebagai areal yang dilindungi baik sebagai kawasan wisata maupun untuk kegiatan konservasi alam seperti mangrove atau fauna tertentu
- Pembuatan paket-paket wisata pantai dan ekowisata
- Menampilkan seni budaya masyarakat (pesta laut dan sebagainya)
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan wisata pantai (transportasi, MCK, TPS, ruang informasi dan gazebo)
- Pengaturan kawasan/ garis sempadan pantai: merupakan kawasan sepanjang tepi pantai yang berfungsi melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai kondisi pantai di Kota Balikpapan.

A. Kondisi Geografis Pantai Kota Balikpapan

Secara geografis Pantai Balikpapan terletak diantara Selat Makasar dengan panjang fatch yang cukup besar, hal ini memungkinkan terjadinya gelombang angin yang cukup besar terutama yang ditimbulkan angin dari timur sampai dengan selatan. Berdasarkan data angin yang telah dihimpun dari Badan Meteorologi dan Geofisika Balikpapan, bahwa angin pada umumnya terbesar dan tersering adalah dari arah tenggara.

Sementara posisi pantai Balikpapan membentang kearah Timur Laut-Barat Daya, sehingga berdasarkan kondisi diatas maka pembangkitan gelombang akibat angin akan digunakan hitungan dengan pengertian Fully Developed Sea (FDS) bila terhadap data angin dari arah selatan sampai dengan arah timur.

Arus air laut akan didekati dengan melakukan pengukuran beda fase antara di kedua titik tertentu, kemudian dianalisa matematis. Dari hasil pengukuran pasang surut di kedua titik di wilayah Kota Balikpapan, didapatkan beda fase yang relatif pendek, yakni sekitar 40 menit dan beda tinggi 30 cm di antara jarak pengukuran 30 km. Pada gambar berikut ini ditunjukkan hasil pengukuran pasang surut di Pelabuhan Semayan dan di Pantai Lamaru.

B. Kondisi Bathimetri Pantai Kota Balikpapan

Bathimetri pantai Balikpapan secara umum dapat dijelaskan bahwa rata-rata bathimetri pantai Kota Balikpapan dapat digolongkan landai, kelandaiannya antara pantai di Kelurahan Prapatan ke arah timur sampai di pantai Kelurahan Lamaru menunjukkan keadaan yang sama yaitu landai sekitar 2% s/d 4%.

Di depan Kelurahan Prapatan yaitu dekat mulut Teluk Balikpapan, menunjukkan adanya delta yang berbentuk oval panjang sampai di depan Bandara Sepinggan. Terbentuknya delta ini diperkirakan terjadi adanya dua kemungkinan, yaitu pertama terjadi akibat endapan sediment yang dihasilkan dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Balikpapan termasuk Sungai Somber dan Sungai Wain secara komulatif dari tahun ke tahun. Dan yang kedua adalah bekas bagian daratan yang terkena abrasi sehingga terkikis habis dan meninggalkan batuan keras dari bagian daratan yang dimaksud. Kemungkinan ini dapat terjawab jika dilakukan penelitian pada kondisi batuan delta yang dimaksud, jika keadaannya batuan keras, maka terbentuknya delta tersebut adalah pada kondisi yang ke dua, tetapi jika sebaliknya yaitu keadaan tanahnya lunak yang merupakan endapan dari sedimentasi, maka terbentuknya delta tersebut adalah yang pada kondisi yang pertama.

Delta tersebut sementara ini permukaannya terendam diperkirakan pada elevasi antara 1 s/d 2 m dibawah muka air laut surut.

C. Potensi Alam Teluk Balikpapan dan Penggunaannya

Teluk Balikpapan merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian Kota Balikpapan, karena di Teluk Balikpapan terdapat berbagai kegiatan yang sangat potensial baik dari segi perekonomian, transportasi maupun pendayagunaan sumber daya alam. Hal ini semua dapat terjadi karena kondisi Teluk Balikpapan yang secara alami memiliki potensi alam yang cukup tinggi.

Teluk Balikpapan merupakan ekosistem perairan semi tertutup dimana pengaruh air laut lebih dominan pada saat musim kemarau, dengan demikian salinitas airnya cukup tinggi. Dilihat dari ekosistem yang ada dan posisi geografis serta kekayaan alam yang terkandung di wilayah ini sehingga Teluk Balikpapan menjadi berkembang sebagai kawasan yang sangat kompiek dan tumpang tindih pengelolaannya. Pada saat ini pemanfaatan alam Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan internasional, tambang minyak, transportasi air, pelabuhan ikan, budidaya ikan, penangkapan ikan.

Ekosistem yang ada merupakan bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga keseimbangannya, Kegiatan perekonomian dan kegiatan pengembangan infrastruktur kota sebagai sebagai kensekuansi logis perkembangan tutuntutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penataan ruang secara komprehensif di wilayah ini sangat diperlukan agar diperoleh pegelolaan yang terpadu dan memperhatikan pertimbangan penting kelestarian ekosystem lingkungan.

Potensi Hutan Mangrove, Teluk Balikpapan memiliki potensi hutan mangrove yang cukup besar. Jenis komunitas hutan mangrove yang dijumpai adalah Rhizophora spp, Avicennia spfi, Sonneratia spp, Bruguiera spp, Ceriops spp serta Nypa fructicans. Jenis mangrove Rhizophora spp adalah komunitas terbesar yang ada di kawasan Teluk Balikpapan. Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting artinya dalam pengertian ekologis, yaitu sebagai barrier pantai terhadap gempuran gelombang, juga sebagai habitat tempat berkembang biaknya jenis ikan, udang dan jenis hewan vertebrata.

Selain itu sebagai tempat berkembang dan berlindung burung dan fauna lainnya. Dari hasil laporan Proyek Pesisir, di hutan mangrove Teluk Balikpapan dijumpai burung Elang Bondol (Heliastur Indus), Elang Hitam (Ictinaeus Malayensis), Elang Laut (Haliaeetus Leucogaster), Burung Raja Udang (Halcyon Chloris) burung Rangkong, Pelatuk dan lain-lain. Jenis mamalia yang dijumpai antara lain Kera (Macaca Fascicularis) dan Bekantan (Nasalis Larvantus).

Hutan mangrove yang ada, saat ini telah mengalami degradasi yang disebabkan oleh konversi untuk usaha pertambakan, kegiatan industri dan pembangunan sarana fisik lainnya, pengembangan wilayah penduduk, serta aktifitas di daerah hulu/ pedalaman. Degradasi ini akan diperkirakan meningkat jika tidak ada upaya pengelolaan secara terkoordinir dan terpadu oleh dinas dan instansi terkait serta masyarakat.

Potensi perikanan Teluk Balikpapan memiliki potensi perikanan yang cukup besar, hal ini terjadi karena ekosistem perairan teluk yang sangat menguntungkan bagi kembang tumbuhnya habitat perikanan. Kondisi hutan mangrove yang cukup subur, salinitas air dan suhu yang stabil dan sesuai, serta kualitas air yang jernih membawa suburnya perikanan di peraiaran Teluk Balikpapan dan sekitarnya.

Potensi perikanan Teluk Balikpapan dikelompokkan sebagai hasil budidaya dan sebagai hasil penangkapan. Hasil Budidaya terdiri dari budidaya tambak tradisional yaitu tambak ikan bandeng, udang windu dan teripang. Oleh karena potensi alam yang mendukung baik kondisi makanan alami yang terkandung, kualitas air dengan sirkulasinya dan lingkungan hutan mangrove disekitarnya maka budidaya perikanan di kawasan ini sangat memungkinkan dikembangkan. Selain itu bibit berupa benur dan nener dapat diperoleh dengan mudah di kawasan Teluk Balikpapan, karena benur dan nener tersebut tersedia secara alami di kawasan Teluk Balikpapan. Budidaya lain yang dihasilkan adalah hasil pengembangan budidaya apung udang dan ikan bandeng.

3.1.2.9 Penggunaan Lahan dan Pertanahan

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai penggunaan lahan dan pertanahan di Kota Balikpapan.

A. Tutupan Lahan

Karakteristik tutupan lahan di Kota Balikpapan berdasarkan analisis peta citra tahun 2020, memperlihatkan komposisi tutupan lahan didominasi oleh luasan hutan yang cukup besar ± 22.767,12 atau 44,55% dari luas keseluruhan wilayah; sedangkan luasan dengan komposisi 10%-15% terdiri dari Kawasan permukiman/perumahan ±6.814,76 atau 13,33 %, perkebunan ± 8.025,28 atau 15,70 %; tanah terbuka ±6.488,16 atau 12,70%. Untuk tutupan lahan lainnya relatif kecil dibawah 3%. Pertanian lahan basah 595,93 1,17%; Badan jalan 1.018,54 atau 1,99%; badan air 538,94 Ha atau 1,05%, bakau 1.024,35 Ha atau 2,00%.

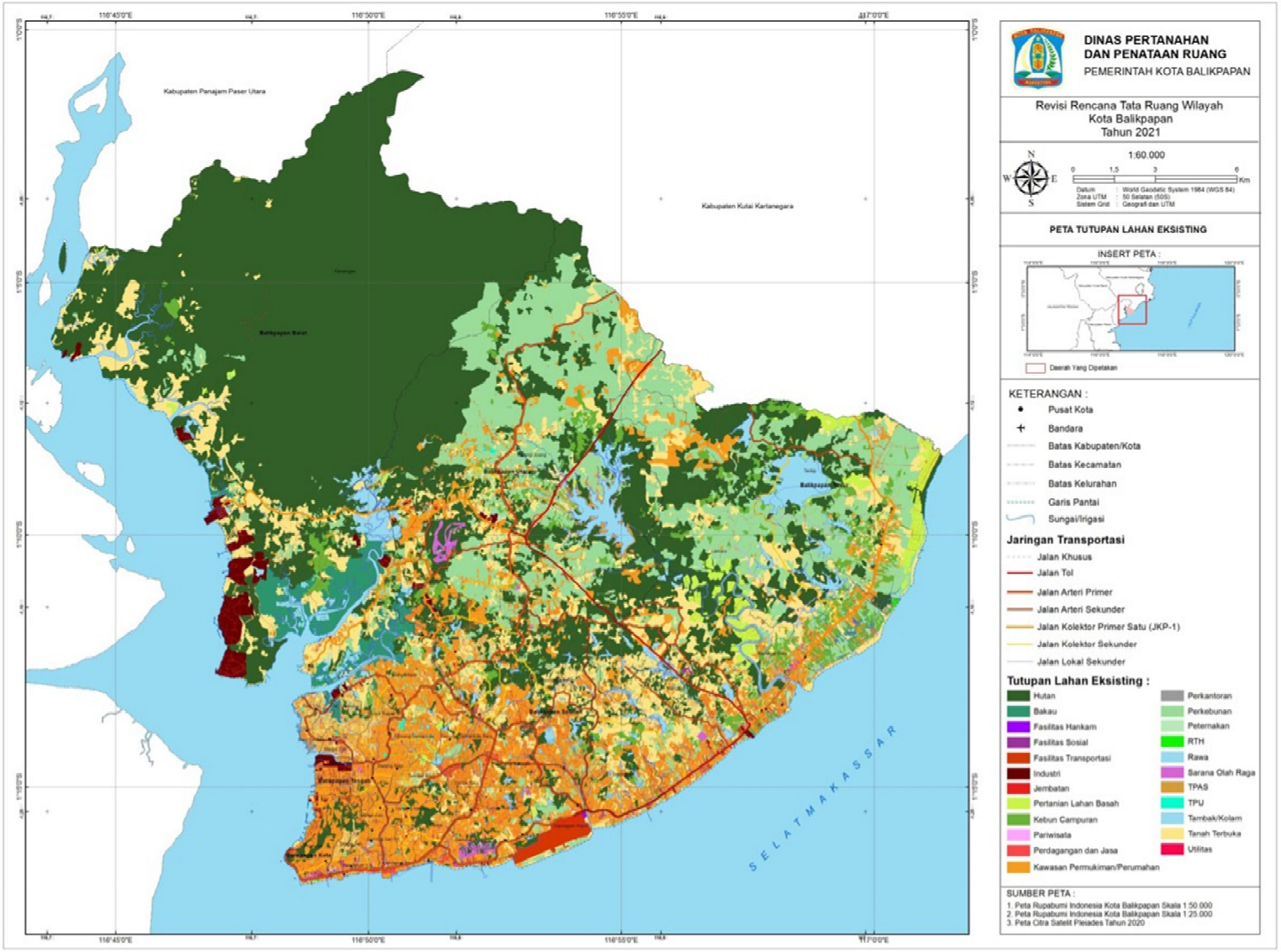
Komposisi tutupan lahan berdasarkan lahan yang tidak terbangun dibandingkan dengan lahan terbangun (build up area), memperlihatkan perbandingan lahan terbangun mencapai ± 9.191,98 atau 17,99% dan tidak terbangun mencapai ± 41.914,51 atau 82,01%. Luas tutupan lahan terbangun didominasi oleh kawasan permukiman/ perumahan perumahan ± 6.814,76 Ha atau 13,33%. Luas tutupan lahan tidak terbangun didominasi oleh penggunaan lahan hutan ± 22.767,12 atau 44,55% kemudian perkebunan sekitar 8.025,28 Ha atau 15,70%. Penjelasan luasan tutupan lahan dapat dilihat pada **Tabel II.24** dan **Gambar 2.17** berikut ini.

Tabel III.24 Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2020

NO	TUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)	%
1	Hutan	22.767,12	44,55
2	Perkebunan	8.025,28	15,70
3	Kawasan Permukiman/Perumahan	6.814,76	13,33
4	Tanah Terbuka	6.488,16	12,70
5	Kebun Campuran	1.571,34	3,07
6	Bakau	1.024,35	2,00
7	Badan Jalan	1.018,54	1,99
8	Industri	663,65	1,30
9	Pertanian Lahan Basah	595,93	1,17
10	Badan Air	538,94	1,05
11	Sungai	497,89	0,97
12	Fasilitas Transportasi	270,71	0,53
13	Rawa	267,42	0,52
14	Sarana Olah Raga	143,53	0,28
15	Fasilitas Sosial	102,57	0,20
16	Perdagangan dan Jasa	87,39	0,17
17	Tambak/Kolam	61,76	0,12
18	Perkantoran	56,94	0,11
19	RTH	46,67	0,09
20	TPU	29,60	0,06
21	Pariwisata	15,25	0,03
22	Fasilitas Hankam	14,32	0,03
23	Utilitas	4,15	0,01
24	TPAS	0,09	0,00
25	Jembatan	0,06	0,00
26	Peternakan	0,03	0,00
27	Irigasi	0,01	0,00
TOTAL		**51.101,24**	**100,00**

Sumber : Hasil analisis Tahun 2021, Interpretasi Peta Citra Tahun 2020

Dibawah ini merupakan **Tabel III.25** tutupan lahan dirinci per kelurahan yang ada di Kota Balikpapan.



Gambar 3.17 Peta Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2020

Tabel III.25 Tutupan Lahan Berdasarkan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Kecamatan/ Kelurahan	JENIS TUTUPAN LAHAN TAHUN 2020												
		Badan Air	Badan Jalan	Bakau	Fasilitas Hankam	Fasilitas Sosial	Fasilitas Transportasi	Hutan	Industri	Irigasi	Jembatan	Kawasan Permukiman/ Perumahan	Kebun Campuran	Pariwisata
I	**Balikpapan Barat**	**62,51**	**117,59**	**903,73**	**0,18**	**7,92**	**5,34**	**14.424,56**	**488,79**	**0,01**		**254,04**	**186,91**	**1,52**
1	Baru Ilir		5,66		0,04	2,04	0,05		0,34			29,73	0,69	0,94
2	Baru Tengah	3,62	5,90	0,94	0,02	1,56	0,23		0,04			42,82	0,35	
3	Baru Ulu	2,56	5,96	3,44	0,03	1,46	3,21	1,29	1,92			38,30	0,08	
4	Kariangau	54,24	87,02	870,35	0,02	0,26	1,23	14.405,44	473,21	0,01		81,72	184,61	
5	Marga Sari		4,32		0,04	0,96			0,03			22,42		0,58
6	Margomulyo	2,08	8,72	29,01	0,02	1,64	0,63	17,83	13,26			39,05	1,19	
II	**Balikpapan Kota**	**1,78**	**80,94**		**3,95**	**18,66**	**19,43**	**162,57**	**15,46**		**0,06**	**643,66**	**0,15**	**7,56**
1	Damai	0,20	15,88		0,27	1,77	0,70	20,98	0,79			148,15		0,80
2	Klandasan Ilir		12,27		0,11	2,43	2,23	2,44	1,18			112,66	0,15	2,59
3	Klandasan Ulu		9,09		0,83	4,05	3,17				0,06	66,40		3,45
4	Prapatan	0,22	31,79		0,77	6,38	12,26	108,30	13,49			242,49		0,63
5	Telaga Sari	1,36	11,91		1,97	4,03	1,05	30,86				73,96		0,09
III	**Balikpapan Selatan**	**39,56**	**260,73**		**5,85**	**23,54**	**209,88**	**473,44**	**6,10**			**1.560,39**	**91,00**	**3,63**
1	Damai Bahagia	2,57	22,84		1,47	4,13	6,26	50,60	1,96			181,08	0,41	1,37
2	Damai Baru	0,03	29,45		0,04	1,92	4,71	9,32	0,60			113,81		0,10
3	Gunung Bahagia	0,85	30,16		0,88	3,50	3,38	45,04	0,07			215,56	0,59	0,54
4	Sepinggan	1,24	45,46		0,06	3,02	2,86	89,05	2,41			316,78	66,78	0,07
5	Sepinggan Baru	22,65	65,36		0,05	4,47	0,76	208,29	0,18			391,30	18,61	0,20
6	Sepinggan Raya	3,02	38,78		3,33	4,68	188,99	48,89	0,08			151,04	4,62	1,06
7	Sungai Nangka	9,20	28,68		0,02	1,82	2,93	22,24	0,80			190,81		0,28
IV	**Balikpapan Tengah**	**0,22**	**64,23**		**0,17**	**10,71**	**5,63**	**105,88**	**59,97**			**722,11**	**1,12**	**0,59**
1	Gunung Sari Ilir		6,86		0,02	3,17	0,39					94,57		0,16
2	Gunung Sari Ulu	0,14	7,28		0,08	2,01	1,57	61,42	1,17			125,16		0,18
3	Karang Jati	0,08	26,66		0,02	2,51	2,80	11,91	58,65			232,07	1,12	0,03
4	Karang Rejo		8,10		0,01	1,39	0,01	2,93				106,40		0,12
5	Mekar Sari		4,73		0,04	0,57	0,87	2,02				59,96		0,07
6	Sumber Rejo		10,60		0,01	1,06		27,61	0,15			103,96		0,04
V	**Balikpapan Timur**	**52,90**	**218,50**		**2,59**	**16,65**	**15,72**	**3.044,34**	**29,71**			**1.363,26**	**905,47**	**0,73**
1	Lamaru	18,71	46,48		0,07	3,26	0,18	946,03	5,34			296,21	336,72	0,21
2	Manggar	17,16	110,00		0,08	10,45	14,85	821,94	20,14			654,37	112,03	0,52
3	Manggar Baru	5,74	15,99		2,41	1,93	0,67	18,08	2,03			138,02	80,01	
4	Teritip	11,30	46,04		0,03	1,01	0,03	1.258,29	2,20			274,66	376,72	
VI	**Balikpapan Utara**	**381,97**	**276,55**	**120,63**	**1,58**	**25,09**	**14,70**	**4.556,33**	**63,60**			**2.271,31**	**386,69**	**1,23**
1	Batu Ampar	3,25	34,55	77,33		3,36	4,86	48,56	3,00			379,19	18,85	0,24
2	Graha Indah	8,57	63,77	29,98		7,86	4,96	811,16	20,84			441,26	72,12	0,65
3	Gunung Samarinda	0,44	15,40			4,60	0,31		0,94			181,85	2,50	
4	Gunung Samarinda Baru	1,07	29,18			0,84	2,10	21,54	1,03			172,20		0,14
5	Karang Joang	364,99	115,21	2,42	1,05	5,00	1,77	3.668,54	36,13			936,11	282,46	0,20
6	Muara Rapak	3,65	18,44	10,90	0,53	3,42	0,69	6,53	1,67			160,70	10,76	
	TOTAL	**538,94**	**1.018,54**	**1.024,35**	**14,32**	**102,57**	**270,71**	**22.767,12**	**663,65**	**0,01**	**0,06**	**6.814,76**	**1.571,34**	**15,25**

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021, Ineterpretasi Peta Citra Tahun 2020

Tabel III.25 Lanjutan.

No	Kecamatan/ Kelurahan	JENIS TUTUPAN LAHAN TAHUN 2020														Grand Total
		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Perkebunan	Pertanian Lahan Basah	Peternakan	Rawa	RTH	Sarana Olah Raga	Sungai	Tambak/ Kolam	Tanah Terbuka	TPAS	TPU	Utilitas	
I	**Balikpapan Barat**	**9,34**	**0,39**	**411,44**	**24,06**	**0,03**	**180,51**	**3,18**	**1,20**	**281,13**	**60,94**	**1.860,87**	**0,01**	**3,13**	**0,39**	**19.289,71**
1	Baru Ilir	2,06	0,17					0,13	0,74	0,18		27,37		1,19	0,00	71,33
2	Baru Tengah	0,80	0,07	4,38			0,54		0,12	0,27		29,60			0,00	91,26
3	Baru Ulu	0,28	0,03	7,05			0,43		0,22	1,50		52,42		1,04	0,01	121,21
4	Kariangau	2,57	0,08	387,23	24,06	0,03	176,29	2,80	0,01	271,20	60,94	1.667,73	0,01		0,35	18.751,41
5	Marga Sari	3,51	0,02					0,13		3,38		21,53			0,02	56,94
6	Margomulyo	0,13	0,02	12,79			3,24	0,13	0,12	4,59		62,22		0,90	0,01	197,57
II	**Balikpapan Kota**	**15,78**	**8,28**	**9,84**				**6,36**	**10,29**	**3,16**	**0,14**	**99,63**		**1,42**	**0,70**	**1.109,82**
1	Damai	2,55	0,87	3,17				0,58	0,13	1,42		23,97			0,07	222,31
2	Klandasan Ilir	8,15	1,59	4,24				0,33	0,12	0,91	0,02	9,45		0,69	0,10	161,67
3	Klandasan Ulu	4,88	2,85	1,54				1,19	2,51	0,36	0,03	6,44			0,12	106,97
4	Prapatan	0,11	2,40	0,88				3,05	6,20	0,21	0,05	13,01			0,25	442,48
5	Telaga Sari	0,10	0,58					1,20	1,34	0,26	0,04	46,77		0,73	0,16	176,39
III	**Balikpapan Selatan**	**32,69**	**19,34**	**258,30**	**9,04**			**15,77**	**47,78**	**16,64**	**0,42**	**801,20**		**5,06**	**0,74**	**3.881,12**
1	Damai Bahagia	7,74	4,22	6,81	0,68			0,60	40,18	2,93	0,03	37,90		1,78	0,06	375,63
2	Damai Baru	8,27	1,94	6,13				2,45	0,36	1,90		34,35			0,15	215,53
3	Gunung Bahagia	5,03	1,59	18,08				1,26	1,36	0,68		45,17			0,12	373,86
4	Sepinggan	2,65	5,21	48,89				2,50	0,15	2,80		278,35		1,31	0,15	869,73
5	Sepinggan Baru	4,43	2,34	56,16				6,51	2,02	5,20	0,15	274,80			0,22	1.063,70
6	Sepinggan Raya	2,14	2,91	101,66	6,79			1,35	3,33	2,61	0,12	97,28			0,04	662,72
7	Sungai Nangka	2,43	1,14	20,56	1,58			1,10	0,38	0,52	0,12	33,35		1,98		319,95
IV	**Balikpapan Tengah**	**3,36**	**3,29**	**22,96**	**3,43**			**1,28**	**2,29**	**8,86**		**64,88**		**1,32**	**0,26**	**1.082,57**
1	Gunung Sari Ilir	0,97	0,61	0,15				0,24	0,03	0,58		0,36		0,38	0,01	108,51
2	Gunung Sari Ulu	0,85	1,20	0,52				0,17		0,33		2,52		0,95	0,05	205,61
3	Karang Jati	0,47	1,17	2,68				0,27	2,24	6,05		9,30			0,07	358,09
4	Karang Rejo	0,47	0,11	1,18				0,20		0,47		0,45			0,08	121,90
5	Mekar Sari	0,05	0,20					0,13	0,02	0,43		3,26			0,03	72,37
6	Sumber Rejo	0,55		18,42	3,43			0,27		0,99		48,99			0,03	216,10
V	**Balikpapan Timur**	**5,96**	**22,49**	**3.269,27**	**518,55**		**27,56**	**8,02**	**13,64**	**130,63**	**0,26**	**2.265,13**	**0,08**	**2,52**	**1,55**	**11.915,54**
1	Lamaru	1,59	1,53	1.229,95	78,05			7,62	1,59	29,27		603,17	0,01	0,91	0,11	3.607,02
2	Manggar	1,61	19,88	221,93	130,71		27,56	0,28	9,59	62,05	0,24	1.066,17	0,07	0,72	1,40	3.303,74
3	Manggar Baru	2,43	0,45	44,55	32,68			0,09	2,26	34,30	0,01	139,29		0,40	0,03	521,35
4	Teritip	0,33	0,63	1.772,84	277,12			0,02	0,20	5,01		456,50		0,50	0,00	4.483,42
VI	**Balikpapan Utara**	**20,26**	**3,15**	**4.053,47**	**40,84**		**59,36**	**12,07**	**68,32**	**57,47**		**1.396,45**		**16,14**	**0,52**	**13.827,72**
1	Batu Ampar	5,32	0,74	78,12	1,02		1,16	0,80	0,35	19,27		99,76		0,27	0,11	780,10
2	Graha Indah	5,77	0,39	197,67			4,19	1,81	1,56	4,93		247,41		1,72	0,04	1.926,66
3	Gunung Samarinda	2,13	0,47	32,51	15,93			0,04	0,24	1,42		2,87		4,90	0,00	266,55
4	Gunung Samarinda Baru	4,13	0,50	41,42			1,74	4,67	1,23	3,20		19,61			0,04	304,64
5	Karang Joang	0,89	0,85	3.680,90	23,11		47,77	4,70	64,77	22,85		966,32		6,75	0,26	10.233,03
6	Muara Rapak	2,03	0,20	22,86	0,78		4,49	0,05	0,17	5,80		60,48		2,51	0,06	316,73
	TOTAL	**87,39**	**56,94**	**8.025,28**	**595,93**	**0,03**	**267,42**	**46,67**	**143,53**	**497,89**	**61,76**	**6.488,16**	**0,09**	**29,60**	**4,15**	**51.106,48**

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021, Ineterpretasi Peta Citra Tahun 2020

B. Bangunan Bernilai Sejarah

Kota Balikpapan memiliki sejumlah bangunan bernilai sejarah, baik berupa kawasan permukiman, tugu, makam, bunker, Meriam, taman atau bangunan bersejarah lainnya. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Cagar budaya di Kota Balikpapan relative beragam, meliputi kawasan permukiman, tugu, makam, bunker, meriam, taman atau bangunan. Cagar budaya yang terdapat di kota Balikpapan terdiri dari Tugu Matilda di Kelurahan Prapatan, Goa/Bunker Jepang di Kelurahan Prapatan, Margo Mulyo dan Manggar, Makam Jepang di Pantai Lamaru, Meriam Jepang di Kelurahan Margo Mulyo, Tugu Australia dan Taman Monpera di Kelurahan Prapatan. Secara khusus detail kawasan cagar budaya di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Tabel III.26** berikut.

Tabel III.26 Kawasan Cagar Budaya di Kota Balikpapan

No.	Cagar Budaya	Lokasi		Keterangan
		Kelurahan	Kecamatan	
1	Tugu Matilda	Prapatan	Balikpapan Selatan	Peninggalan Perang Dunia II
2	Tugu Australia	Prapatan	Balikpapan Selatan	
3	Taman Monpera	Prapatan	Balikpapan Selatan	
4	Goa/ *Bunker* Jepang	Klandasan Ulu	Balikpapan Selatan	
5		Sepinggan	Balikpapan Selatan	
6		Manggar	Balikpapan Timur	
7		Lamaru	Balikpapan Timur	
8	Meriam Jepang	Margo Mulyo	Balikpapan Barat	
9	Tugu Perdamaian Australia dan Jepang	Karangjoang	Balikpapan Utara	
10	Kaw. Perumahan Nelayan Margasari		Kec. Balikpapan Barat	Cikal bakal Kota Balikpapan

Sumber : Faknal RTRW Kota Balikpapan Tahun 2023

C. Zona Nilai Tanah

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengeluarkan sebuah kebijakan untuk dapat menyediakan peta zona nilai tanah. Hal ini berkaitan dengan keberadaan tanah yang juga termasuk ke dalam objek pajak. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hasil dari kajian terhadap ZNT dalam menentukan NJOP akan digunakan sebagai dasar pembaruan data nilai tanah dan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi peralihan kepemilikan tanah serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi instansi pemerintah

dalam menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui NJOP.

Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.

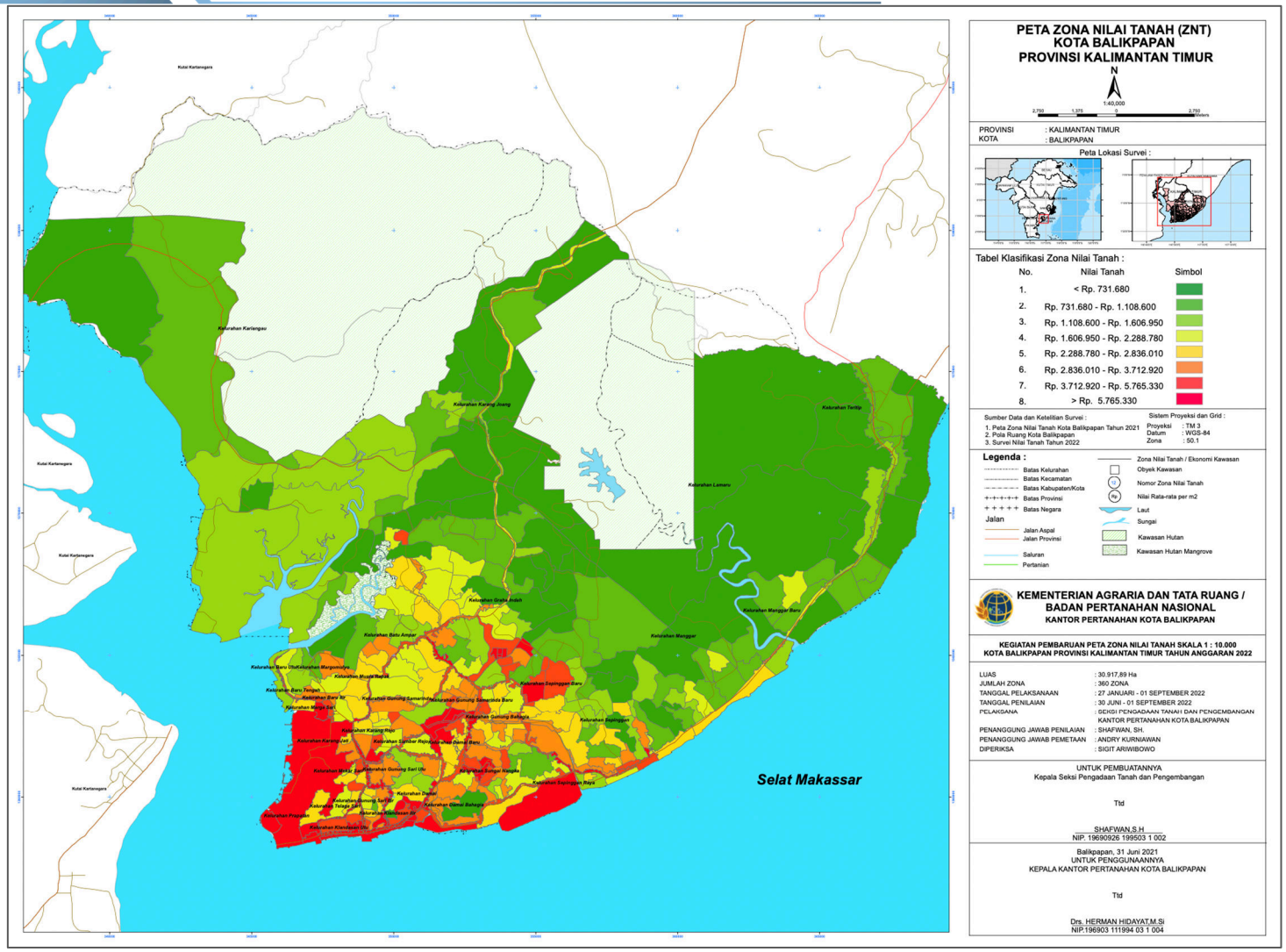
Perbedaan nilai antara satu tanah dengan yang lainnya berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya. Informasi yang ditampilkan ZNT adalah nilai tanah dalam keadaan "kosong", tidak termasuk nilai benda-benda yang melekat padanya.

Secara umum Zona Nilai Tanah (ZNT) menggambarkan perbedaan nilai tanah antar kawasan dalam satu wilayah. Terdapat sejumlah factor yang berpengaruh terhadap nilai tanah. Lokasi merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi besaran harga nilai tanah, semakin strategis lokasi tanah tersebut, maka semakin baik pula nilai tanah tersebut. Strategis dapat diartikan sebagai dekatnya lokasi tanah dengan berbagai fasilitas penting yang terdapat di sekitarnya, seperti keberadaan fasilitas komersil, fasilitas transportasi, pemerintahan, dan sebagainya. Faktor lainnya adalah kondisi internal dari tanah itu sendiri, seperti jenis tanah, kondisi tanah, keterjangkauan terhadap fasilitas telekomunikasi/internet, ketersediaan air tanah, dan sebagainya

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (2022), zona nilai tanah di Kota Balikpapan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) klasifikasi, yaitu:

1) Zona Nilai Tanah < Rp 731.680;
2) Zona Nilai Tanah Rp 731.680 – Rp 1.108.600;
3) Zona Nilai Tanah Rp 1.108.600 – Rp 1.606.950;
4) Zona Nilai Tanah Rp 1.606.950 – Rp 2.288.780;
5) Zona Nilai Tanah Rp 2.288.780 – Rp 2.836.010;
6) Zona Nilai Tanah Rp 2.836.010 – Rp 3.712.920;
7) Zona Nilai Tanah Rp 3.712.920 – Rp 5.765.330;
8) Zona Nilai Tanah > Rp 5.765.330

Ditinjau dari sebaran zona nilai tanahnya, wilayah dengan zona nilai tanah relative rendah (di bawah Rp 1.606.950,-) terutama tersebar di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur. Sedang wilayah di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan umumnya sudah memiliki zona nilai tanah di atas Rp 2.000.000,.



Sumber: Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Gambar 3.18 Peta Zona Nilai Tanah Kota Balikpapan

D. Obyek Vital Nasional

Berdasarkan KepPres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, yang dimaksud dengan objek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Obyek Vital Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:

- menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Obyek vital nasional (obvitnas) yang ada di Kota Balikpapan terutama berupa obyek vital nasional di bidang energi dan sumber daya alam. Berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor . 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 77 K/90/MEM/2019 TENTANG OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, ditetapkan 9 (Sembilan) lokasi Obvitnas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tertera pada **Tabel III.27** di bawah ini.

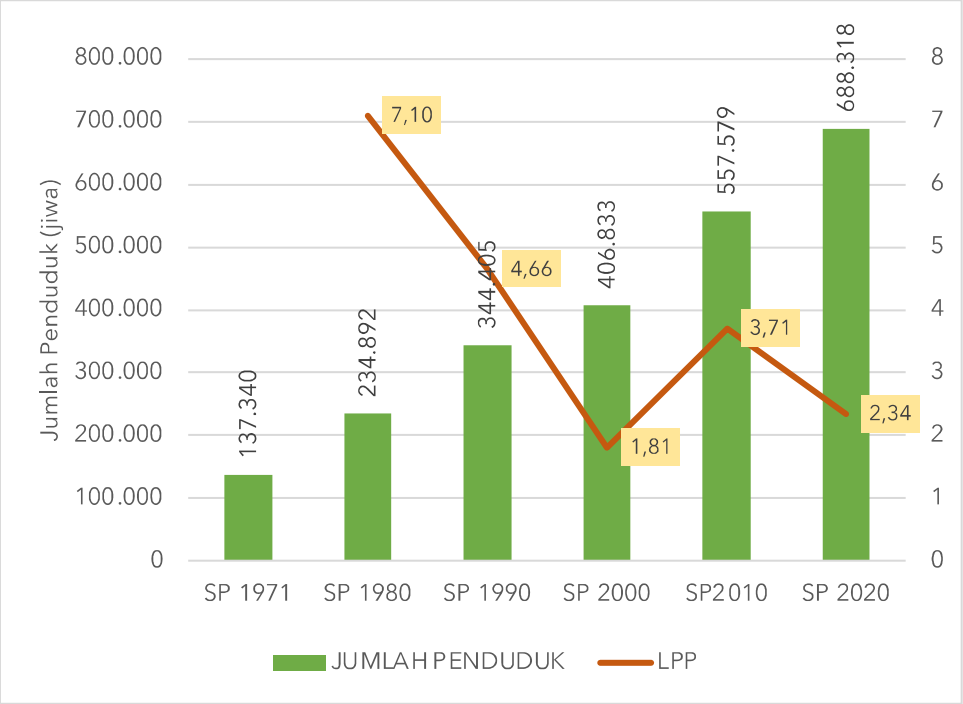
Tabel III.27 Obyek Vital Nasional di Kota Balikpapan

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASI
1	Fasilitas Wilayah Kerja *East* Kalimantan	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	*Offshore* dan *Onshore* di Kota Balikpapan
2	Fasilitas Wilayah Kerja Mahakam dan Tengah serta pipa penyalur gas Handil - Bontang	PT Pertamina Hulu Mahakam	*Offshore* dan *Onshore* di Kota Balikpapan
3	*Refinery Unit V* Balikpapan	PT Kilang Pertamina Internasional	Jl. Yos Sudarso No. 1
4	DPPU Sepinggan	PT Pertamina Putra Niaga	Jl. Marsma Iswahyudi No. 1
5	*Integrated Fuel Terminal* Balikpapan	PT Pertamina Putra Niaga	Jl. Yos Sudarso No. 148
6	*Region Control Center* dan GI Karang Joang	1. PT PLN (Persero) UP2B Kalimantan (RCC); dan 2. PT PLN (Persero) UPT Kaltimra (GI 150 kV)	Jl. Soekarno Hatta Km.15 No. 1, Kel. Karanjoang
7	DCC dan Server SCADA Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	PT PLN (Persero) UIW UP2D Kaltimra	Jl. Mayjend Sutoyo No. 2
8	PLTU Teluk Balikpapan dan GI Kariangau	1. PT PLN (Persero) UPDK Balikpapan (PLTU 2x100MW); dan 2. PT PLN (Persero) UPT Kaltimra (GI 150 kV)	Jl. PLTU No. 1, Teluk Waru, Kel. Kariangau
9	GI Manggarsari	PT PLN (Persero) UPT Kaltimra (GI 150 kV)	Jl. Mulawarman KM. 18,5, Kel. Manggar

Sumber: SK MenESDM No. 270/2022

3.1.3 Kondisi Sosial dan Kependudukan

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 5 tahun terakhir. Jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.19** berikut.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.19 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1971 – 2020

Berdasarkan **Gambar 3.19** di atas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan pada masa awal terutama periode 1971 sampai dengan 1990 relatif cukup tinggi. Pada tahun 1980 laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan mencapai lebih kurang 7,19% per tahun. Pada periode berikutnya di tahun 1990 mulai terjadi penurunan dari 4,66% per tahun hingga sebesar 1,81% per tahun di tahun 2000. Namun periode berikutnya terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk kembali hingga mencapai 3,71% per tahun.

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Balikpapan, pada tahun 2022 penduduk Kota Balikpapan tercatat sebanyak 733.396 jiwa, terdiri atas 374.627 jiwa penduduk laki-laki dan 358.769 jiwa penduduk perempuan.

Tabel III.28 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2016-2023 Berdasarkan Data Disdukcapil

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)			LPP (%)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
2016	316.389	301.739	618.128	
2017	323.614	309.582	633.196	2,44
2018	332.765	317.041	649.806	2,62
2019	341.657	325.531	667.188	2,67
2020	352.802	335.516	688.318	3,17
2021	359.860	344.250	704.110	2,29
2022	371.777	355.888	727.665	3,35
2023	**374.627**	**358.769**	**733.396**	**0,79**

Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2023

Berdasarkan data jumlah penduduk Disdukcapil, pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan selama periode 2017 – 2023 rata-rata sebesar 2,76% per tahun, lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 2,1% serta di atas laju pertambahan penduduk Nasional yang tercatat sebesar 1,25%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan yang cukup tinggi salah satunya disebabkan oleh tingginya migrasi maksuk ke Kota Balikpapan. Sebagai kawasan perkotaan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menjadi daya tarik yang cukup tinggi bagi pendatang. Data Disdukcapil Kota Balikpapan selama periode 2016-2019 rata-rata jumlah pendatang di Kota Balikpapan berkisar antara 19.000 sampai 30.000 jiwa per tahun.

Penetapan Ibu Kota Nusantara dimana Kota Balikpapan memiliki peran penting sebagai pintu gerbang dari dan menuju IKN, maka diperkirakan jumlah pendatang dan urbanisasi di Kota Balikpapan akan meningkat pesat. Hal ini akan berimplikasi terhadap kebutuhan penyediaan pelayanan public serta sarana dan prasarana kota, selain mengantisipasi dampak urbanisasi yang sangat tinggi terhadap kualitas Kota Balikpapan itu sendiri. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.29** berikut.

Tabel III.29 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA			JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L + P	L	P	JML
1	BALIKPAPAN TIMUR	**Jumlah**	27.103	6.388	33.491	52.336	49.300	101.636
		MANGGAR	13.044	3.029	16.073	25.093	23.695	48.788
		LAMARU	4.009	864	4.873	7.642	7.185	14.827
		TERITIP	4.730	1.182	5.912	9.308	8.887	18.195
		MANGGAR BARU	5.320	1.313	6.633	10.293	9.533	19.826
2	BALIKPAPAN BARAT	**Jumlah**	25.914	7.682	33.596	50.335	47.102	97.437
		BARU ILIR	4.980	1.682	6.662	9.680	8.897	18.577
		BARU TENGAH	5.766	1.852	7.618	11.441	10.978	22.419
		BARU ULU	5.893	1.698	7.591	11.579	10.778	22.357
		KARIANGAU	2.153	358	2.511	3.885	3.340	7.225
		MARGO MULYO	3.934	1.076	5.010	7.486	7.145	14.631
		MARGA SARI	3.188	1.016	4.204	6.264	5.964	12.228
3	BALIKPAPAN UTARA	**Jumlah**	49.986	12.004	61.990	94.829	91.143	185.972
		BATU AMPAR	10.543	2.545	13.088	19.692	18.855	38.547
		GUNUNGSAMARINDA	6.860	1.708	8.568	12.824	12.769	25.593
		KARANG JOANG	9.533	1.941	11.474	18.140	16.928	35.068
		MUARARAPAK	8.068	2.506	10.574	15.330	14.862	30.192

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA			JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L + P	L	P	JML
		GUNUNGS AMARINDA BARU	2.938	706	3.644	5.569	5.694	11.263
		GRAHA INDAH	12.044	2.598	14.642	23.274	22.035	45.309
4	BALIKPAPAN TENGAH	**Jumlah**	28.636	9.141	37.777	54.057	52.079	106.136
		GUNUNGSARI ULU	4.096	1.303	5.399	7.814	7.487	15.301
		GUNUNGSARI ILIR	5.806	1.998	7.804	10.846	10.498	21.344
		KARANG REJO	6.461	2.028	8.489	12.086	11.871	23.957
		KARANG JATI	3.110	1.011	4.121	5.985	5.698	11.683
		MEKAR SARI	3.508	1.183	4.691	6.569	6.342	12.911
		SUMBER REJO	5.655	1.618	7.273	10.757	10.183	20.940
5	BALIKPAPAN SELATAN	**Jumlah**	41.706	10.709	52.415	79.687	77.262	156.949
		SEPINGGAN	10.120	2.297	12.417	19.387	18.624	38.011
		GUNUNGBAHAGIA	5.804	1.594	7.398	10.979	10.797	21.776
		SEPINGGAN BARU	9.160	1.990	11.150	17.655	17.227	34.882
		SEPINGGAN RAYA	4.437	1.299	5.736	8.644	8.228	16.872
		SUNGAINANGKA	5.203	1.482	6.685	9.816	9.610	19.426
		DAMAI BARU	2.100	552	2.652	3.871	3.866	7.737
		DAMAI BAHAGIA	4.882	1.495	6.377	9.335	8.910	18.245
6	BALIKPAPAN KOTA	**Jumlah**	23.422	7.057	30.479	43.383	41.883	85.266
		PRAPATAN	3.223	895	4.118	5.899	5.778	11.677
		TELAGA SARI	4.876	1.376	6.252	9.125	8.863	17.988
		KLANDASAN ULU	3.745	1.145	4.890	6.956	6.556	13.512
		KLANDASAN ILIR	6.201	2.034	8.235	11.421	11.043	22.464
		DAMAI	5.377	1.607	6.984	9.982	9.643	19.625
TOTAL			**196.767**	**52.981**	**249.748**	**374.627**	**358.769**	**733.396**

Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2023

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Balikpapan tahun 2023, kepadatan penduduk rata-rata Kota Balikpapan adalah 41 jiwa/Ha. Berdasarkan standar kepadatan penduduk dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahandi Perkotaan, kepadatan penduduk di Kota Balikpapan tersebut dikategorikan sebagai kepadatan rendah.

Namun angka kepadatan penduduk tersebut adalah angka kepadatan penduduk bruto. Berdasarkan kepadatan penduduk bruto, rata-rata kepadatan penduduk di setiap kecamatan dan kelurahan adalah kategori kepadan rendah. Kelurahan dengan kepadatan penduduk tinggi, yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/Ha hanya terdapat di 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Baru Tengah, dan Kelurahan Margasari. Ketiganya berada di Kecamatan Balikpapan Barat. Sedang kelurahan dengan kepadatan penduduk sedang, yaitu kepadatan penduduk antara 150 – 200 jiwa/Ha terdapat di 4 (empat) kelurahan, yaitu Kelurahan Baru Ulu di Kecamatan Balikpapan Barat, serta Kelurahan Gunungsari Ilir, Kelurahan Karangrejo, dan Kelurahan Mekarsari di Kecamatan Balikpapan Tengah. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel II.30** di bawah ini mengenai Gambaran kepadatan penduduk Kota Balikpapan berdasarkan distribusi kelurahan dan kecamatan.

Tabel III.30 Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	LUAS WILAYAH (HA)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Ha)
1	BALIKPAPAN TIMUR	**Jumlah**	101.636	11.915,52	9
		MANGGAR	48.788	3.303,73	15
		LAMARU	14.827	3.607,02	4
		TERITIP	18.195	4.483,42	4
		MANGGAR BARU	19.826	521,35	38
2	BALIKPAPAN BARAT	**Jumlah**	97.437	19.288,02	5
		BARU ILIR	18.577	71,31	261
		BARU TENGAH	22.419	91,25	246
		BARU ULU	22.357	121,21	184
		KARIANGAU	7.225	18.750,25	0
		MARGO MULYO	14.631	197,07	74
		MARGA SARI	12.228	56,94	215
3	BALIKPAPAN UTARA	**Jumlah**	185.972	13.824,34	13
		BATU AMPAR	38.547	780,04	49
		GUNUNGSAMARINDA	25.593	266,42	96
		KARANG JOANG	35.068	10.232,37	3
		MUARARAPAK	30.192	316,71	95
		GUNUNGSAMARINDA BARU	11.263	304,2	37
		GRAHA INDAH	45.309	1.924,59	24
4	BALIKPAPAN TENGAH	**Jumlah**	106.136	1.082,58	98
		GUNUNGSARI ULU	15.301	205,61	74
		GUNUNGSARI ILIR	21.344	108,51	197
		KARANG REJO	23.957	121,9	197
		KARANG JATI	11.683	358,1	33
		MEKAR SARI	12.911	72,37	178
		SUMBER REJO	20.940	216,1	97
5	BALIKPAPAN SELATAN	**Jumlah**	156.949	3.880,97	40
		SEPINGGAN	38.011	869,72	44
		GUNUNGBAHAGIA	21.776	373,86	58
		SEPINGGAN BARU	34.882	1.063,70	33
		SEPINGGAN RAYA	16.872	662,58	25
		SUNGAINANGKA	19.426	319,95	61
		DAMAI BARU	7.737	215,53	36
		DAMAI BAHAGIA	18.245	375,63	49
6	BALIKPAPAN KOTA	**Jumlah**	85.266	1.109,81	77
		PRAPATAN	11.677	442,47	26
		TELAGA SARI	17.988	176,39	102
		KLANDASAN ULU	13.512	106,97	126
		KLANDASAN ILIR	22.464	161,67	139
		DAMAI	19.625	222,31	88
TOTAL			**733.396**	**51.101,24**	**14**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keterangan:

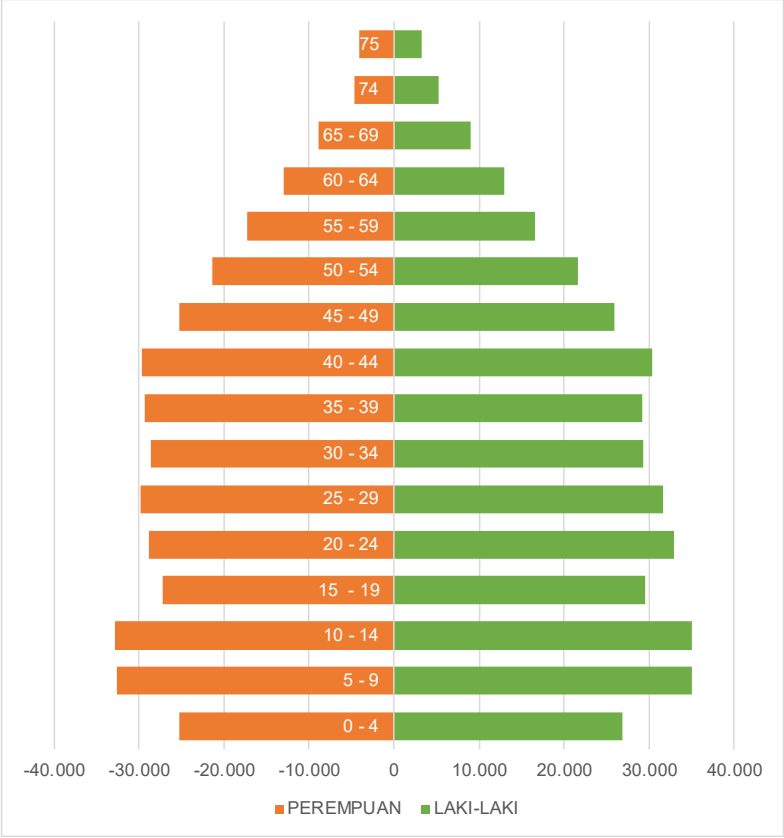
Kepadatan Rendah
Kepadatan Sedang
Kepadatan Tinggi

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki di Kota Balikpapan tahun 2023 tercatat lebih kurang 51,08% sedang jumlah penduduk perempuan tercatat sebesar 48,92%. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.31** dan **Gambar 3.20** berikut.

Tabel III.31 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)			RASIO (%)	
		L	P	JML	L	P
1	BALIKPAPAN TIMUR	52.336	49.300	101.636	51,49	48,51
2	BALIKPAPAN BARAT	50.335	47.102	97.437	51,66	48,34
3	BALIKPAPAN UTARA	94.829	91.143	185.972	50,99	49,01
4	BALIKPAPAN TENGAH	54.057	52.079	106.136	50,93	49,07
5	BALIKPAPAN SELATAN	79.687	77.262	156.949	50,77	49,23
6	BALIKPAPAN KOTA	43.383	41.883	85.266	50,88	49,12
TOTAL		**374.627**	**358.769**	**733.396**	**51,08**	**48,92**

Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2023. Diolah

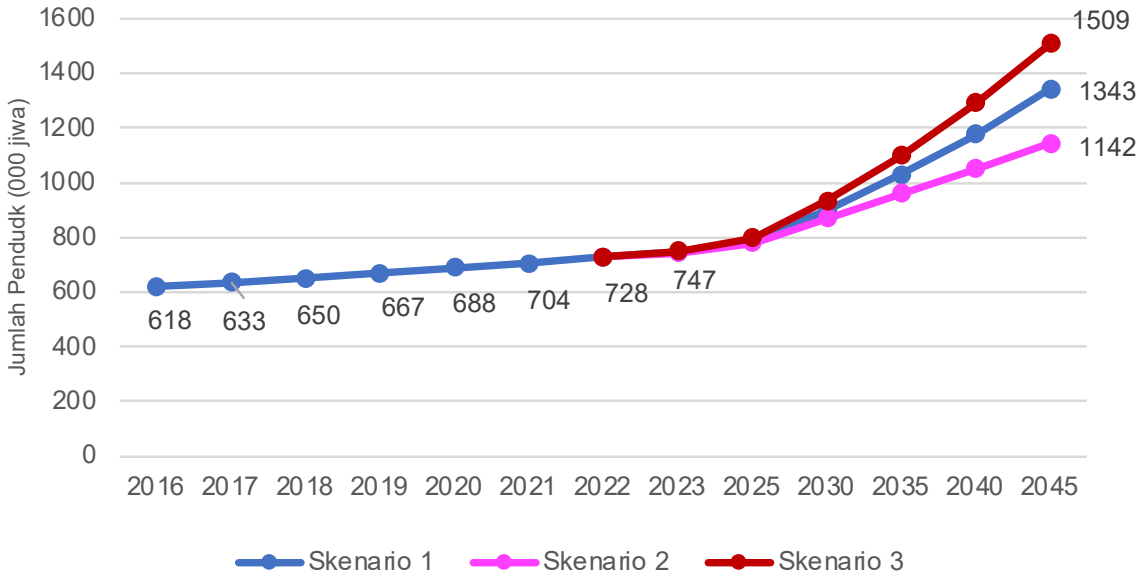


Gambar 3.20 Piramida Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2023

Didalam skenario proyeksi jumlah penduduk yang telah diuraikan dalam Materi Teknis RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 dijelaskan bahwa proyeksi jumlah penduduk dua puluh tahun mendatang (hingga akhir tahun rencana) diperkirakan dengan menggunakan 3 (tiga) proyeksi pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

- Skenario I: proyeksi penduduk Kota Balikpapan dilakukan dengan metoda linier dan menggunakan angka pertumbuhan penduduk sebesar 2,77% per tahun yang didasarkan pada LPP rata-rata Kota Balikpapan tahun 2016-2022 berdasarkan data Disdukcapil.
- Skenario II: proyeksi penduduk Kota Balikpapan dilakukan dengan menggunakan kecenderungan linier berdasarkan perkembangan jumlah penduduk penduduk Kota Balikpapan tahun 2016-2022.
- Skenario III: proyeksi penduduk Kota Balikpapan dilakukan dengan menggunakan kecenderungan polynomial berdasarkan perkembangan jumlah penduduk Kota Balikpapan tahun 2016-2022.

Berdasarkan ketiga scenario di atas, maka jumlah penduduk di Kota Balikpapan dua puluh tahun ke depan akan berkisar antara 1.142 ribu sampai dengan 1.509 ribu jiwa. Jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.21** berikut



Sumber : Materik Teknis RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Gambar 3.21 Skenario Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2023 – 2045

Pengembangan ibu kota Nusantara yang berada lebih kurang 50 km arah Barat Laut Kota Balikpapan akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi maupun jumlah penduduk di Kota Balikpapan. Pengembangan ibu kota Nusantara terutama pada periode awal pengembangan diperkirakan akan menambah jumlah migrasi masuk ke Kota Balikpapan. Jika diasumsikan berdasarkan scenario pertambahan penduduk di IKN dan Sebagian diantaranya akan bertempat tinggal di Kota Balikpapan dengan skenario yang dapat dilihat pada **Tabel III.32** sebagai berikut.

Tabel III.32 Skenario Persentase Penduduk IKN yang akan Tinggal di Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2045

	2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Skenario I	50%	30%	30%	10%	10%
Skenario II	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber : Matek RTRW Kota Balikpapan, 2023 - 2044

Berdasarkan skenario di atas, maka akan terdapat tambahan penduduk di Kota Balikpapan akibat pengembangan IKN 300 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa pada tahun 2045.

Tabel III.33 Skenario Jumlah Penduduk IKN yang akan Tinggal di Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2045

	2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Skenario I	167.500	404.200	453.700	474.600	498.900
Skenario II	67.000	224.800	257.800	299.600	348.200

Sumber : Matek RTRW Kota Balikpapan, 2023 - 2044

Berdasarkan scenario proyeksi pertumbuhan alami ditambah dengan scenario jumlah penduduk IKN yang akan tinggal di Kota Balikpapan, maka diperkirakan jumlah penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2045 akan berkisar antara 1,5 – 2,0 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut dibandingkan dengan analisis daya tampung berdasarkan ketersediaan lahan untuk perumahan relative masih mencukupi.

Untuk indeks pembangunan manusia di Kota Balikpapan dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami pertumbuhan itu dapat dilihat pada pertumbuhan IPM tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu 0,35. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.34** dibawah ini.

Tabel III.34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Balikpapan

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Balikpapan		
Tahun	**IPM**	**Pertumbuhan IPM**
2019	80,11	0,38
2020	80,01	-0,12
2021	80,71	0,87
2022	81,31	0,52
2023	81,66	0,35

Sumber : BPS, Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2024

Kemiskinan di Kota Balikpapan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 2,31% atau sekitar 14.990 jiwa. Namun bila dilihat pada perkembangannya kemiskinan yang terjadi di Kota Balikpapan relatif turun dari tahun ke tahun. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.35** dibawah ini.

Tabel III.35 Kemiskinan di Kota Balikpapan

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	572.108	15.780	2,42	0,26	0,06
2020	613.622	17.020	2,57	0,38	0,12
2021	657.521	18.530	2,89	0,50	0,15
2022	680.499	15.830	2,45	0,17	0,02
2023		14.990	2,31	0,25	0,04

Sumber : BPS, Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2024

3.1.4 Kondisi Ekonomi

Berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan, selama periode 2018 – 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan rata-rata menunjukkan nilai positif kecuali di tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan berkisar antara 1,90 sampai dengan 4,99 persen per tahun dengan rata-rata selama satu decade sebesar 3,85% per tahun. Kontraksi ekonomi di tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh turunnya produksi di tiga lapangan usaha dominan, seperti Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan Besar dan Eceran.

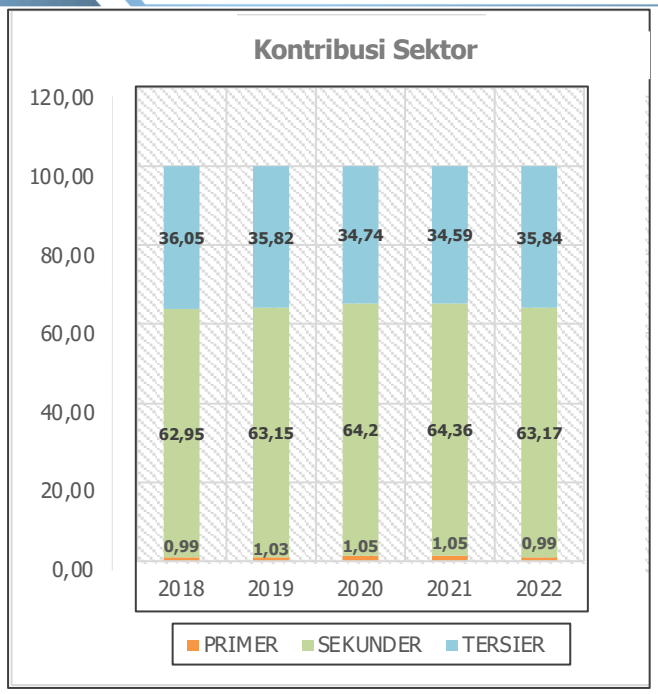
Berdasarkan kontribusi sektornya, sebagai kawasan perkotaan, sector yang mendominasi sebagai pembentukan PDRB Kota Balikpapan adalah sector sekunder dan sector tersier. Sektor sekunder menjadi sector utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Balikpapan, terutama kontribusi sector industry pengolahan. Selama periode 2012-2022 kontribusi sector ini rata-rata sebesar 63,81%.

Selama periode 2012 – 2022, sector tersier tercatat memberikan kontribusi rata-rata sebesar 35,13%. Sektor tersier ini terutama didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta sector transportasi dan pergudangan. Sedangkan sector primer hanya berkontribusi rata-rata sebesar 1,05%. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.36** berikut

Tabel III.36 Kontribusi Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Kota Balikpapan Tahun 2012-2022

TAHUN	KONTRIBUSI PDRB (%)		
	SEKTOR PRIMER	SEKTOR SEKUNDER	SEKTOR TERSIER
2018	0,99	62,95	36,05
2019	1,03	63,15	35,82
2020	1,05	64,20	34,74
2021	1,05	64,36	34,59
2022	0,99	63,17	35,84

Sumber: BPS Kota Balikpapan. 2023. Diolah



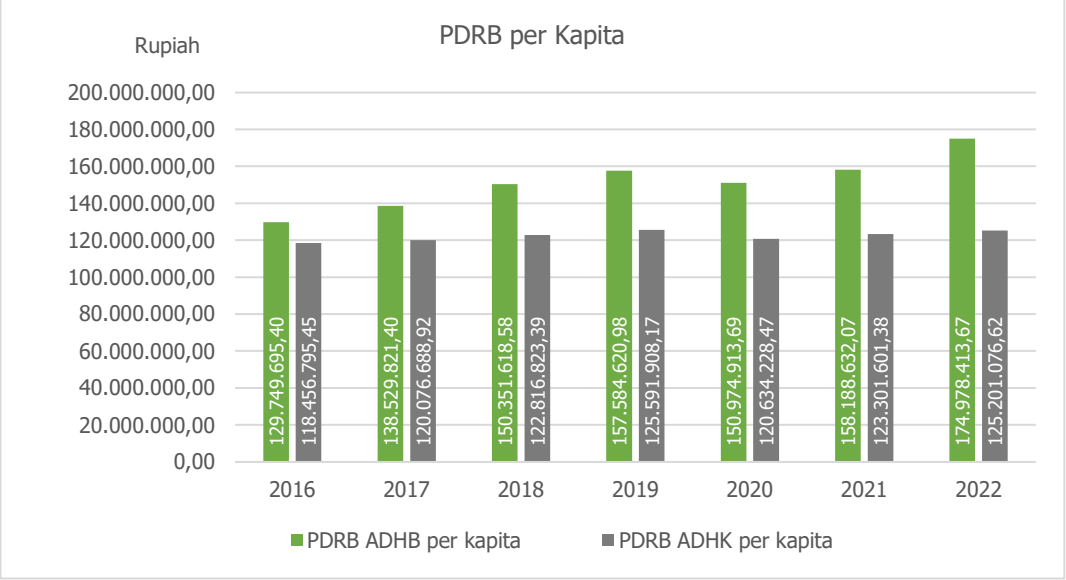
Sumber: BPS Kota Balikpapan. 2023. Diolah

Gambar 3.22 Kontribusi Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2020

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan penduduknya. Pendapatan per kapita Kota Balikpapan tahun 2022 berdasarkan harga berlaku tercatat sebesar Rp 174,98 juta. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencatat angka Rp 158,19 juta. Selama periode 2016 sampai 2022 secara umum. Pendapatan per kapita Kota Balikpapan berdasarkan harga berlaku cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan pandemic Covid-19. Namun pada tahun 2021 pendapatan per kapita Kota Balikpapan mulai mengalami peningkatan kembali seperti sebelum terjadi pandemic Covid-19.

Pendapatan per kapita Kota Balikpapan tahun 2022 berdasarkan harga konstan tercatat sebesar Rp 125,20 juta. Angka ini meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 123,30 juta. Secara umum pendapatan per kapita Kota Balikpapan masih berada di bawah pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 182,54 juta. Namun demikian pendapatan per kapita Kota Balikpapan jauh di atas pendapatan per kapita rata-rata Nasional yang tercatat sebesar Rp 62,24 juta. Diagram di bawah ini menunjukkan pendapatan per kapita Kota Balikpapan Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.23** berikut



Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS 2023

Gambar 3.23 Pendapatan Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2022

3.2 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

3.2.1 Wilayah Fungsional (Batas Ekologis)

Wilayah sebagai sistem berarti suatu entitas yang terdiri atas komponen-komponen yang memiliki keterkaitan (hubungan fungsional) satu sama lain. Salah satunya system kompleks, yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah dan jenis komponen yang ada serta keragaman bentuk hubungan antara komponen-komponen tersebut, yaitu system ekologi (ekosistem). Konsep wilayah sistem/fungsional ekologi ini diartikan bahwa wilayah yang dibatasi berdasarkan pada sifat-sifat tertentu pada wilayah baik sifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan atau pengelolaan dalam hal ini berupa wilayah ekologis. Ada beberapa contoh konsep wilayah ekologis ini antara lain Daerah Aliran Sungai (DAS), sistem wilayah sungai dan lain-lain. Wilayah ekologis tersebut menggambarkan bahwa wilayah dibatasi oleh kondisi ekologi yang ada di masing-masing wilayah.

Konsep wilayah ekologis ini memberikan landasan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan karena dalam sistem ekologi ini pembatasan kawasan didasarkan pada komponen ekologi yang tersusun di dalamnya yang saling berpengaruh atau terkait satu dengan yang lainnya dan berdasarkan adanya kesamaan karakteristik fenomena alami yang menyusunnya. Apabila pengelolaan kawasan dapat menjaga sistem ekologi yang ada di dalamnya maka keberlangsungan kawasan akan tetap terjaga walaupun di dalamnya terjadi perubahan-perubahan. Perencanaan pengembangan wilayah yang terpadu antara bagian hulu dan bagian hilir penting untuk dilakukan karena dalam jangka panjang apabila terjadi kerusakan atau tidak terjadinya keterpaduan dalam perencanaan di daerah hulu makan akan berdampak juga pada bagian hilir. Dalam konteks KLHS, keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup di Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh dan mempengaruhi status dan kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar Kota Balikpapan.

Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-

masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Berdasarkan hal ini dengan mempertimbangkan peta ekoregion, peta batas daerah aliran sungai (DAS) dan batas wilayah di Kota Balikpapan, maka delineasi batas fungsional wilayah yang mempengaruhi Kota Balikpapan. Batas fungsional ini menjadi batas wilayah kajian pelaksanaan dan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Balikpapan secara umum. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.37** dan **Gambar 3.24** dibawah ini.

Tabel III.37 Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada di dalam Wilayah Fungsional KLHS RPJMD Kota Balikpapan

No	Wilayah Ekologis	Grand Total (Ha)
1	Kota Balikpapan	50.853,36
2	Kutai Kartanegara	58.351,84
3	Penajam Paser Utara	88.771,86
	Grand Total	**197.977,06**

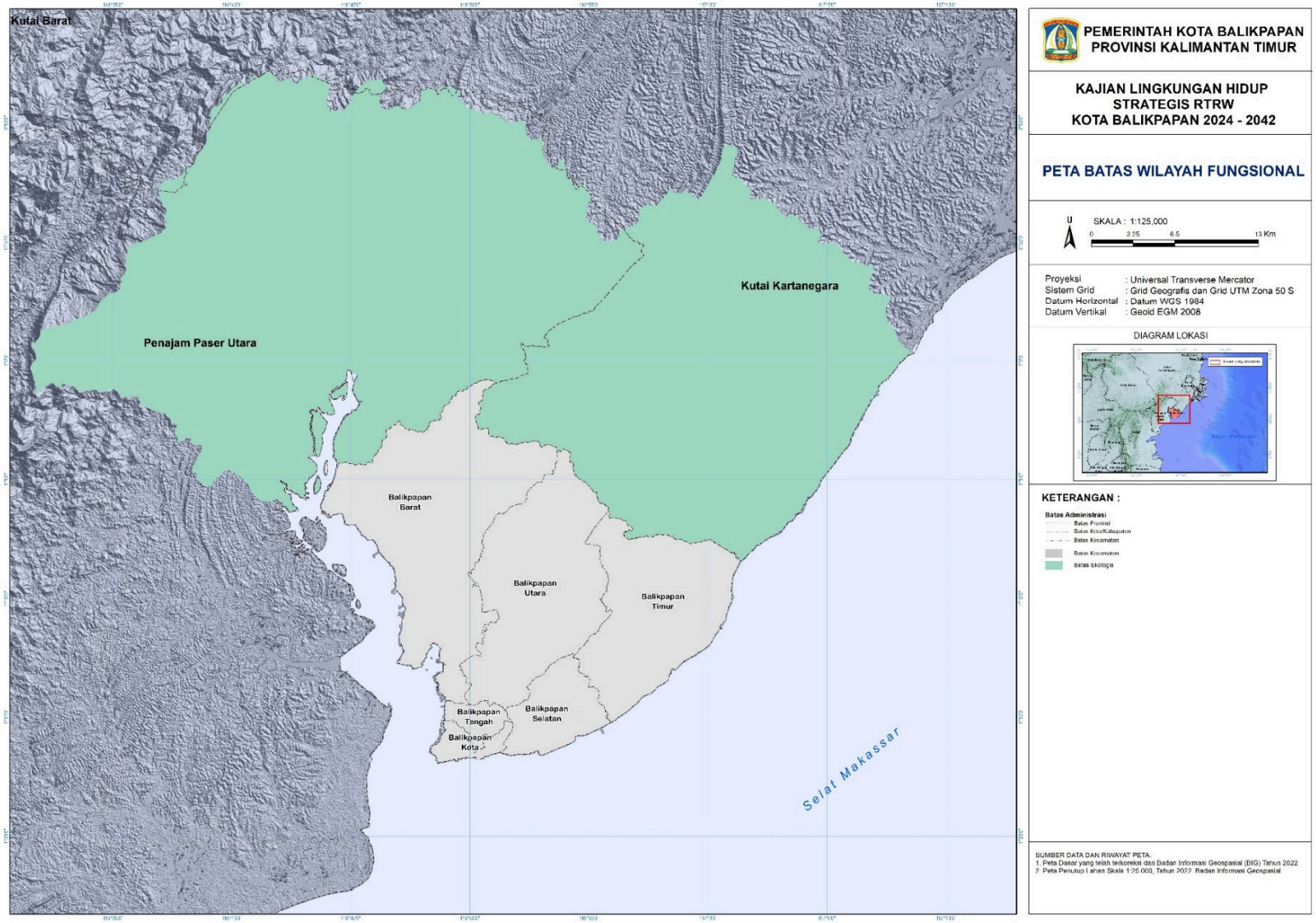
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk wilayah ekologis yang berhubungan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan terdiri dari 6 DAS yaitu DAS Ajiraden, DAS Manggar, DAS Sanggai, DAS Semboja, DAS Sumbir, dan DAS Wain. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.38** dan **Gambar 3.25** dibawah ini.

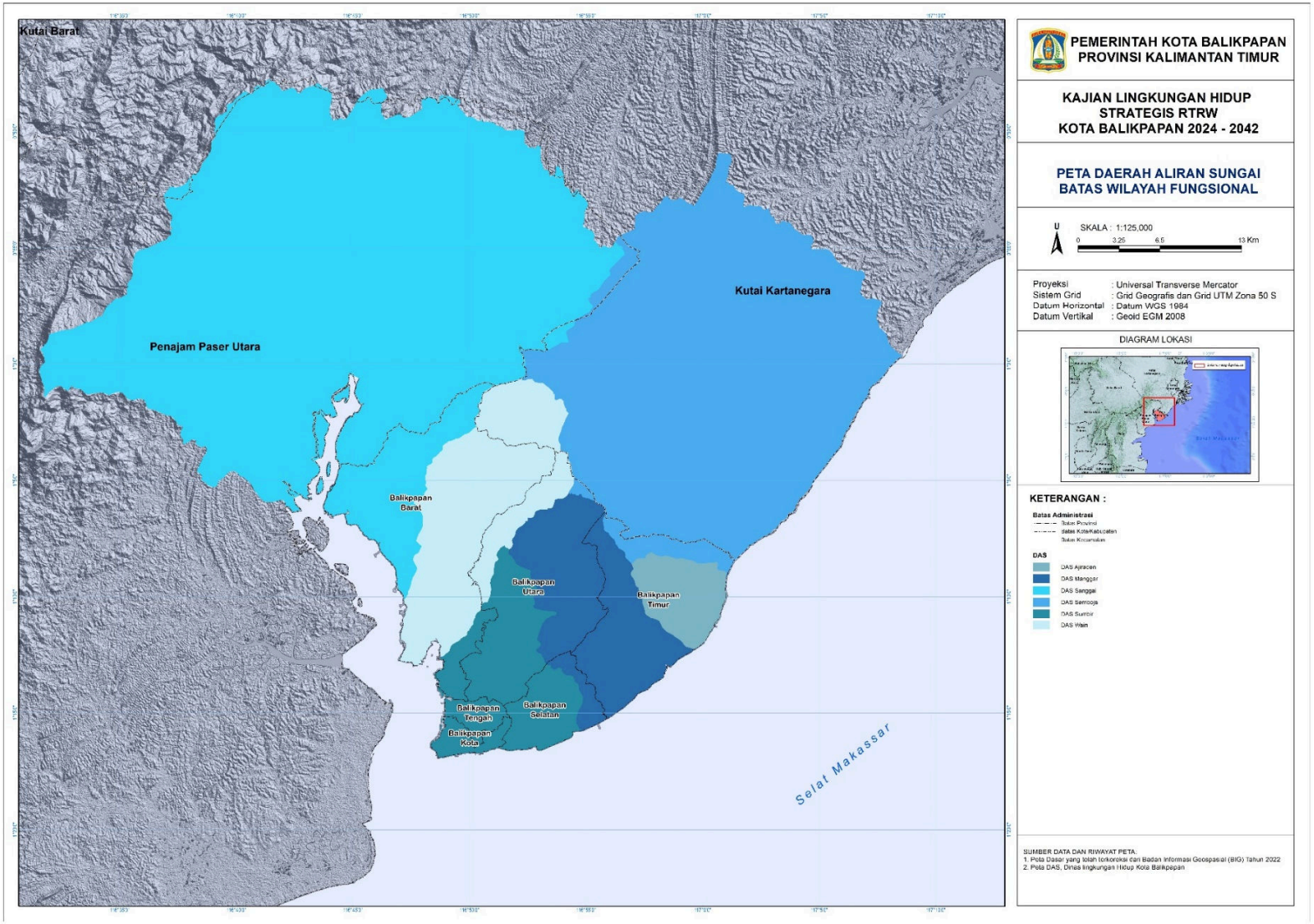
Tabel III.38 DAS Yang Berada di dalam Wilayah Fungsional KLHS RPJMD Kota Balikpapan

No	Nama DAS	Grand Total (Ha)
1	DAS Ajiraden	3.929,26
2	DAS Manggar	13.491,28
3	DAS Sanggai	96.050,81
4	DAS Semboja	56.836,74
5	DAS Sumbir	11.327,72
6	DAS Wain	16.341,24
	Grand Total	**197.977,06**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.24 Peta Batas Wilayah Ekologis Kota Balikpapan



Gambar 3.25 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

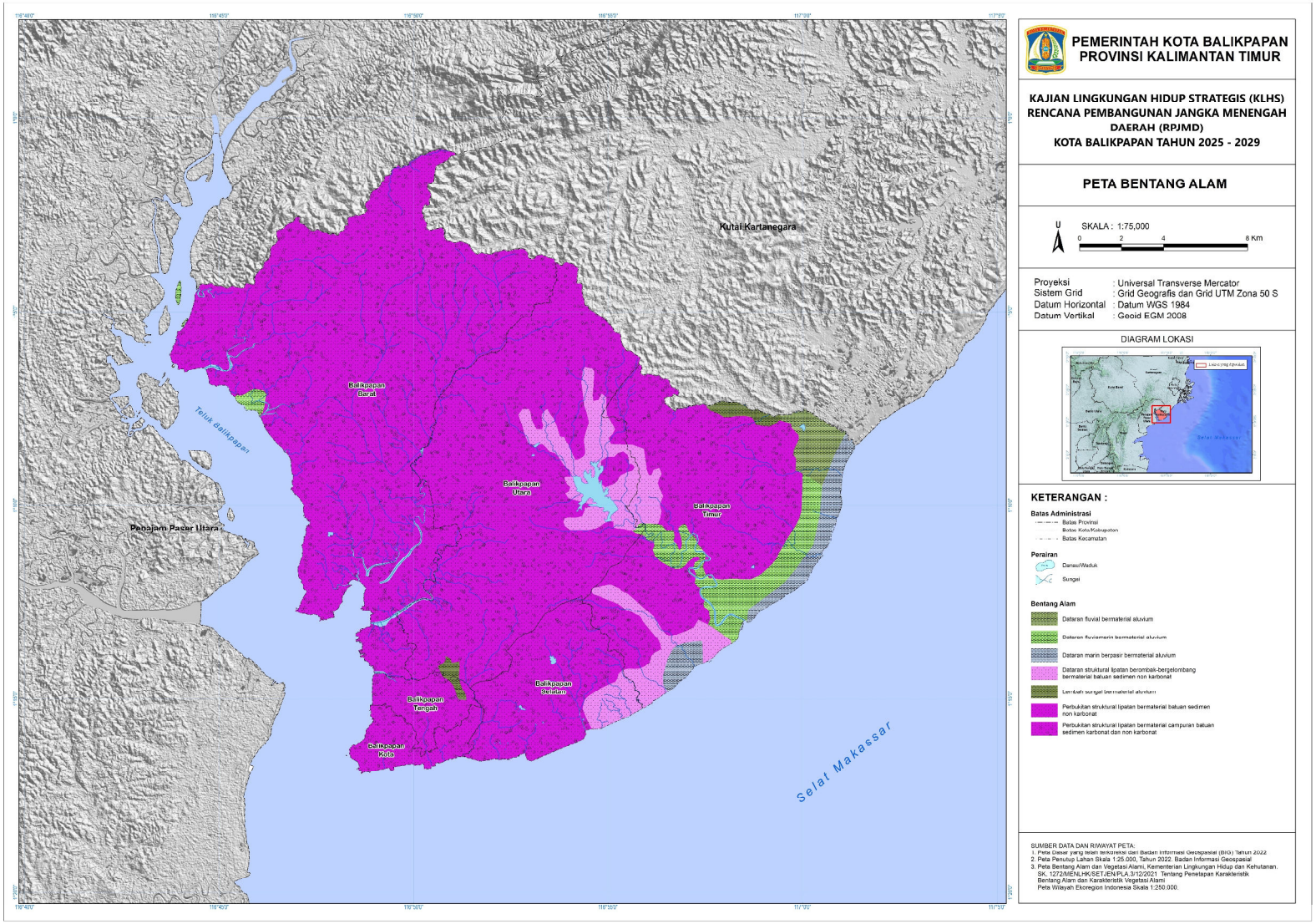
3.2.2 Kondisi Ekoregion di Kota Balikpapan

Bentang alam yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari 7 jenis bentang alam yaitu Dataran fluvial bermaterial aluvium, Dataran fluviomarin bermaterial aluvium, Dataran marin berpasir bermaterial aluvium, Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat, Lembah sungai bermaterial aluvium, Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat, dan Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.39** dan **Gambar 3.26** dibawah ini.

Tabel III.39 Bentang Alam Kota Balikpapan

No	Jenis Bentang Alam	Kecamatan (Ha)						Grand Total
		Balikpapan Barat	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan	Balikpapan Tengah	Balikpapan Timur	Balikpapan Utara	
1	Dataran fluvial bermaterial aluvium					585,56		585,56
2	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	139,95				1.633,33	17,59	1.790,87
3	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium					979,77		979,77
4	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat			456,99		1.213,94	1598,28	3.269,20
5	Lembah sungai bermaterial aluvium				45,98	186,51	71,87	304,36
6	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	188,86						188,86
7	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	18.930,16	1.087,11	3.400,00	1.038,28	7.153,33	12226,25	43.835,14
	Grand Total	**19.258,96**	**1.087,11**	**3.856,99**	**1.084,26**	**11.752,44**	**13.913,99**	**51.101,24**

Sumber : SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000



Gambar 3.26 Peta Bentang Alam Kota Balikpapan

Vegetasi alami yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari 6 jenis vegetasi alami yaitu Vegetasi hutan dipterokarpa pamah, Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa), Vegetasi hutan pantai, Vegetasi hutan rawa air payau, Vegetasi hutan tepian sungai payau, dan Vegetasi mangrove. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.40** dan **Gambar 3.27** dibawah ini.

Tabel III.40 Vegetasi Alami Kota Balikpapan

No	Jenis Bentang Alam	Kecamatan (Ha)						Grand Total
		Balikpapan Barat	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan	Balikpapan Tengah	Balikpapan Timur	Balikpapan Utara	
1	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	18.930,16	1087,11	3.400,00	1.038,28	7.153,33	12.226,25	43.835,14
2	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	188,86		456,99		1.213,94	1.598,28	3.458,06
3	Vegetasi hutan pantai					979,77		979,77
4	Vegetasi hutan rawa air payau				45,98	186,51	71,87	304,36
5	Vegetasi hutan tepian sungai payau					585,56		585,56
6	Vegetasi mangrove	139,95				1.633,33	17,59	1.790,87
Grand Total		**19.258,96**	**1.087,11**	**3.856,99**	**1.084,26**	**11.752,44**	**13.913,99**	**51.101,24**

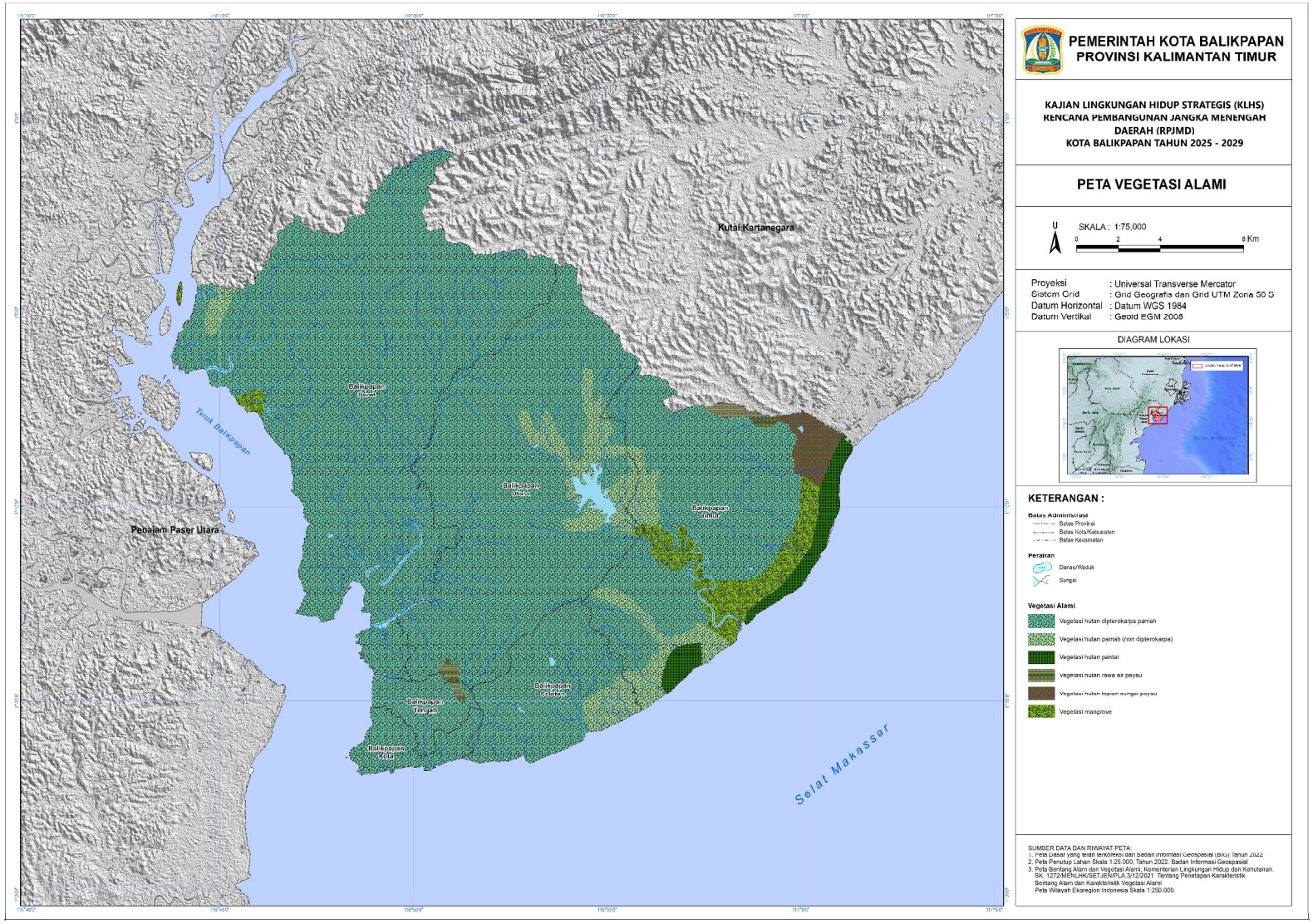
Sumber : SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000

Berdasarkan pemetaan, secara umum Kota Balikpapan memiliki 2 jenis ekoregion yaitu Ekoregion Kompleks Dataran Struktural P. Laut dengan luas sebesar 0,03 Ha dan Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus dengan luas sebesar 50.953,72 ha. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.41** dan **Gambar 3.28** dibawah ini.

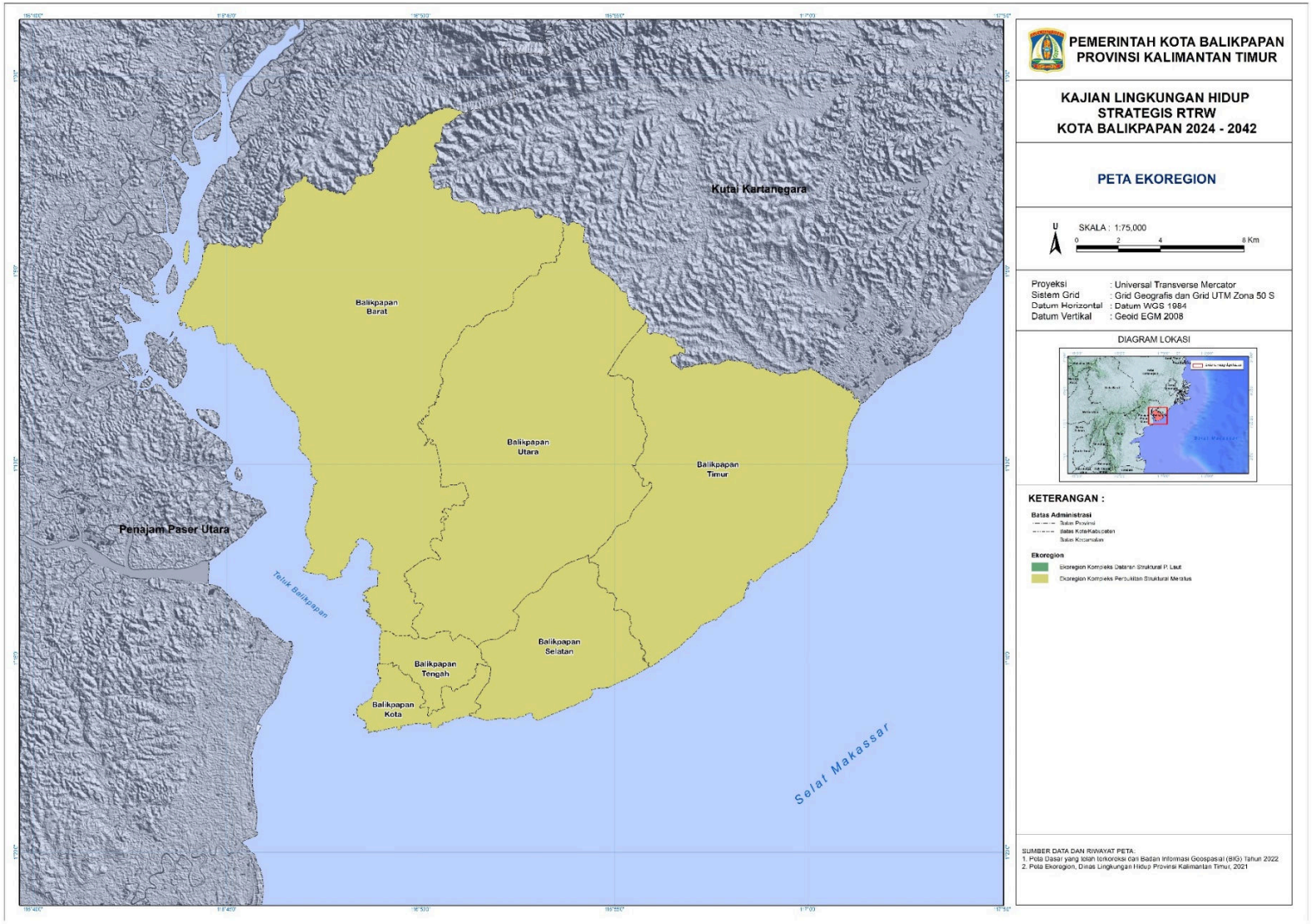
Tabel III.41 Ekoregion Kota Balikpapan

No	Jenis Ekoregion	Kecamatan (Ha)						Grand Total
		Balikpapan Barat	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan	Balikpapan Tengah	Balikpapan Timur	Balikpapan Utara	
1	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural P. Laut		0,03					0,03
2	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus	19.287,71	1.076,95	3.854,43	1.084,18	11.736,47	13.913,99	50.953,72
Grand Total		**19.287,71**	**1.076,98**	**3.854,43**	**1.084,18**	**11.736,47**	**13.913,99**	**51.101,24**

Sumber : Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan skala 1:500.000 Tahun 2023



Gambar 3.27 Peta Vegetasi Alami Kota Balikpapan



Gambar 3.28 Peta Ekoregion Kota Balikpapan

3.2.3 Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pada kajian ini, ambang batas Jasa Lingkungan penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kota Balikpapan yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UUPPLH No.32/2009).

Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum (Norvyani, dkk., 2018). Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan Jasa Lingkungan penyedia bahan pangan dan Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan asumsi tidak terjadi aliran materi/energi *(closed system).*

A. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

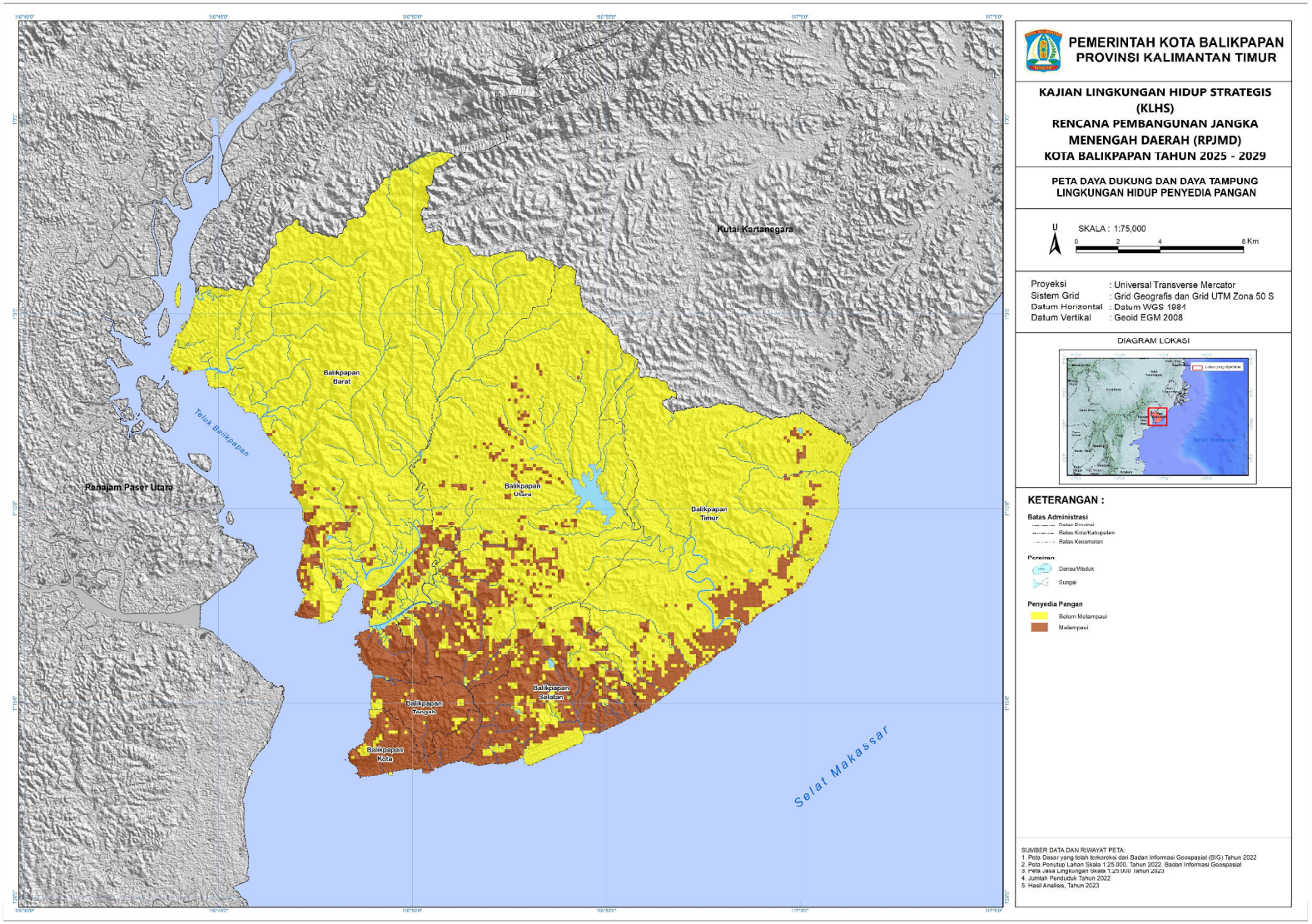
Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa Status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui sebesar 81% dan sudah melampaui sebesar 19%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.31 dibawah ini.

Tabel III.42 Luasan DDDLH Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Status (Ha)		Grand Total
		Belum Melampaui	Melampaui	
1	Balikpapan Barat	**17.941,54**	1.317,42	19.258,96
2	Balikpapan Kota	85,74	1.001,37	1.087,11
3	Balikpapan Selatan	1.298,81	**2.558,18**	3.856,99
4	Balikpapan Tengah	66,05	1.018,21	1.084,26
5	Balikpapan Timur	10.481,30	1.271,14	11.752,44
6	Balikpapan Utara	11.570,21	2.343,77	13.913,99
Grand Total		**41.443,64**	**9.510,11**	**51.101,24**

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.12 dibawah ini.



Gambar 3.29 Peta Status Daya Dukung Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023

Untuk ketersediaan dan Kebutuhan pangan di Kota Balikpapan dapat dilihat yaitu Luasan Ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan yaitu 916.178.290.606,89 Kkal / Tahun, untuk kebutuhan pangan 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.43** dan **Gambar 3.30** dan **Gambar 3.31** dibawah ini.

Tabel III.43 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	355.851.962.292,23	61.550.296.750,00	294.301.665.542,23	453.459,02
2	Balikpapan Kota	17.309.636.348,82	60.537.184.500,00	-43.227.548.151,21	22.057,52
3	Balikpapan Selatan	59.839.708.148,50	84.120.491.500,00	-24.280.783.351,50	76.253,21
4	Balikpapan Tengah	17.981.253.627,96	79.236.992.250,00	-61.255.738.622,07	22.913,35
5	Balikpapan Timur	205.971.870.671,05	46.788.364.500,00	159.183.506.171,05	262.468,14
6	Balikpapan Utara	259.223.859.518,33	100.009.324.750,00	159.214.534.768,33	330.326,68
	Grand Total	**916.178.290.606,89**	**432.242.654.250,00**	**483.935.636.356,83**	**1.167.477,91**

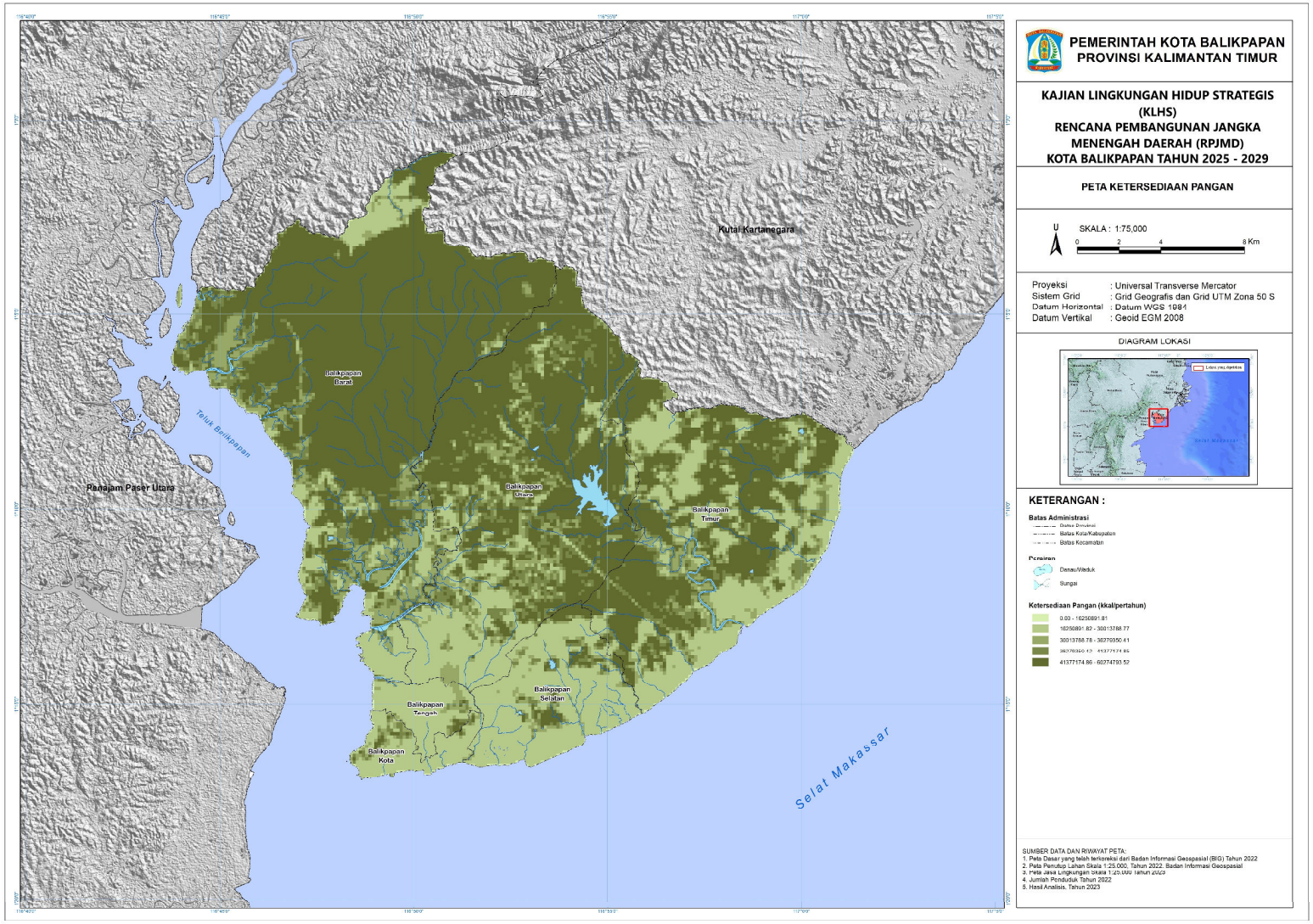
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dari hasil analisis status, ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Balikpapan, kemudian dilakukan forecasting / proyeksi status, ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Balikpapan 5 tahun kedepan sampai dengan tahun 2029, hal ini dilakukan untuk melihat apakah status daya dukung serta ketersediaan pangan mencukupi mengingat Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Ibukota Nusantara yang penduduknya diproyeksikan sekitar 20% nya tinggal di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.44** dan **Gambar 3.32** dibawah ini.

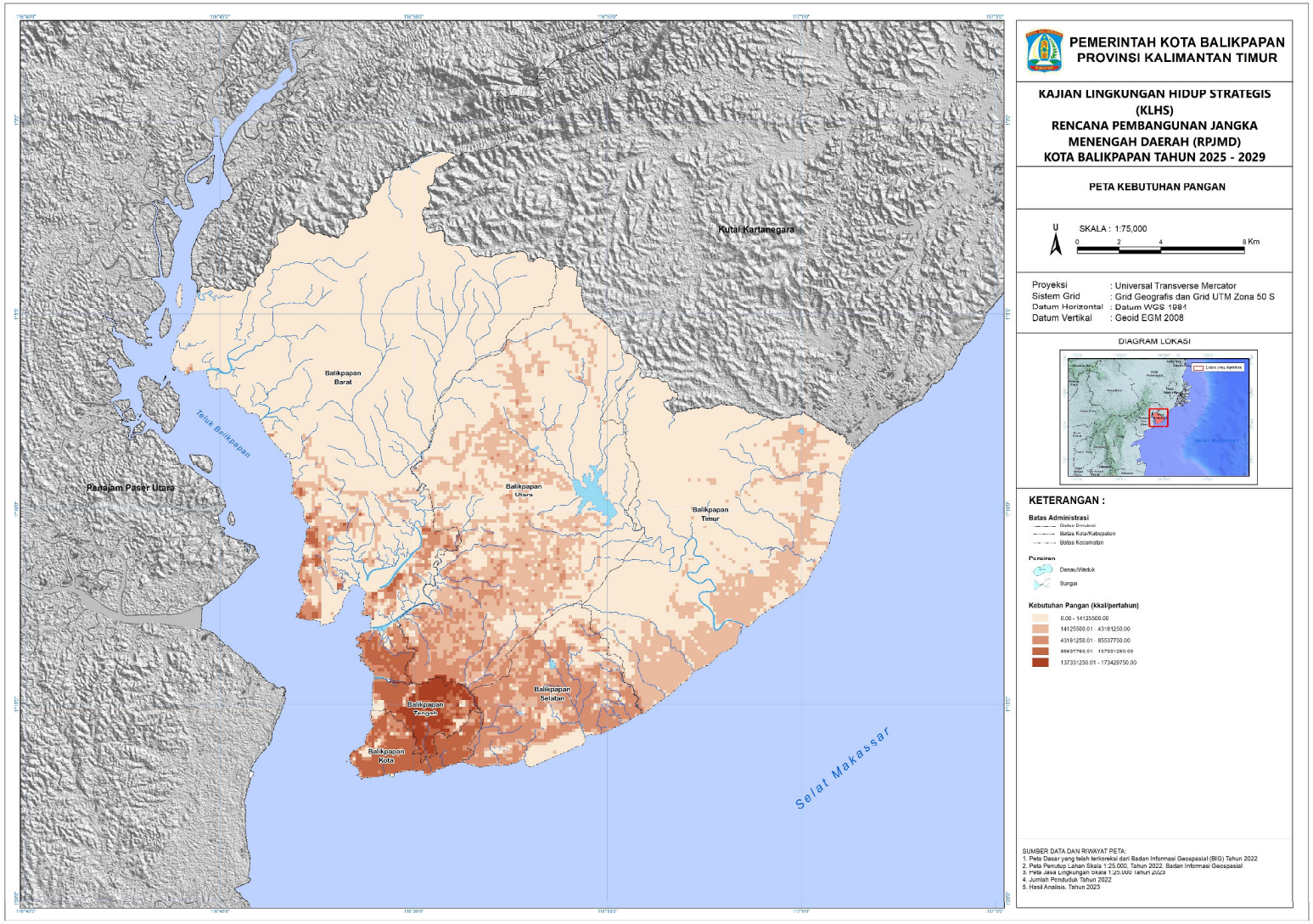
Tabel III.44 Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan dan Status Daya Dukung Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2029

No	Kecamatan	Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2029 (Juta.Kkal/Tahun)			Ambang Batas (Ribu Jiwa)	Stasus Daya Dukung Pangan Tahun 2029 (Ha)	
		Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih		Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Balikpapan Barat	355.851,96	86.466,89	269.385,07	343,28	17.549,95	1.709,02
2	Balikpapan Kota	17.309,64	79.269,17	-61.959,53	-78,95	67,19	1.019,92
3	Balikpapan Selatan	59.839,71	161.702,45	-101.862,74	-129,80	911,05	2.945,94
4	Balikpapan Tengah	17.981,25	109.209,73	-91.228,48	-116,25	54,03	1.030,23
5	Balikpapan Timur	205.971,87	113.960,61	92.011,26	117,25	9.027,75	2.724,69
6	Balikpapan Utara	259.223,86	203.152,16	56.071,70	71,45	9.374,87	4.539,11
	Grand Total	**916.178,29**	**753.761,01**	**162.417,28**	**206,97**	**36.984,84**	**13.968,91**

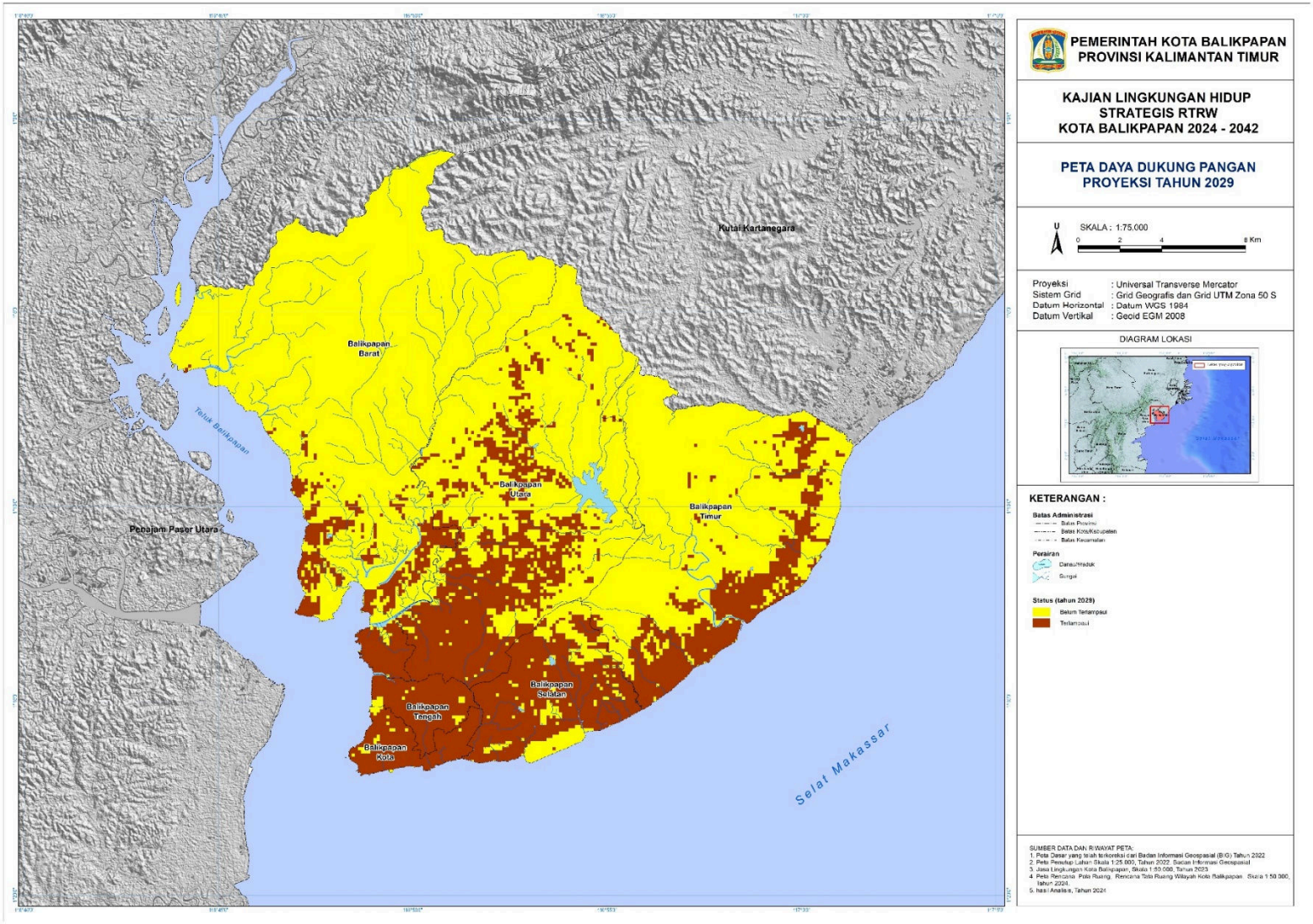
Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.30 Peta Ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023



Gambar 3.31 Peta Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023



Gambar 3.32 Peta Proyeksi Status Daya Dukung Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2029

B. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air Bersih

Sama halnya dengan penentuan status daya dukung penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas. Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37%, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.45** dan **Gambar 3.33** dibawah ini.

Tabel III.45 Luasan DDDLH Air Bersih Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Status (Ha)		Grand Total
		Belum Melampaui	Melampaui	
1	Balikpapan Barat	16.728,04	2.530,92	19.258,96
2	Balikpapan Kota	62,26	1.024,85	1.087,11
3	Balikpapan Selatan	824,58	3.032,41	3.856,99
4	Balikpapan Tengah	49,51	1.034,75	1.084,26
5	Balikpapan Timur	6.430,76	5.321,68	11.752,44
6	Balikpapan Utara	7.968,07	**5.945,92**	13.913,99
	Grand Total	**32.063,22**	**18.890,53**	**51.101,24**

Sumber : Hasil Analisis, 2023

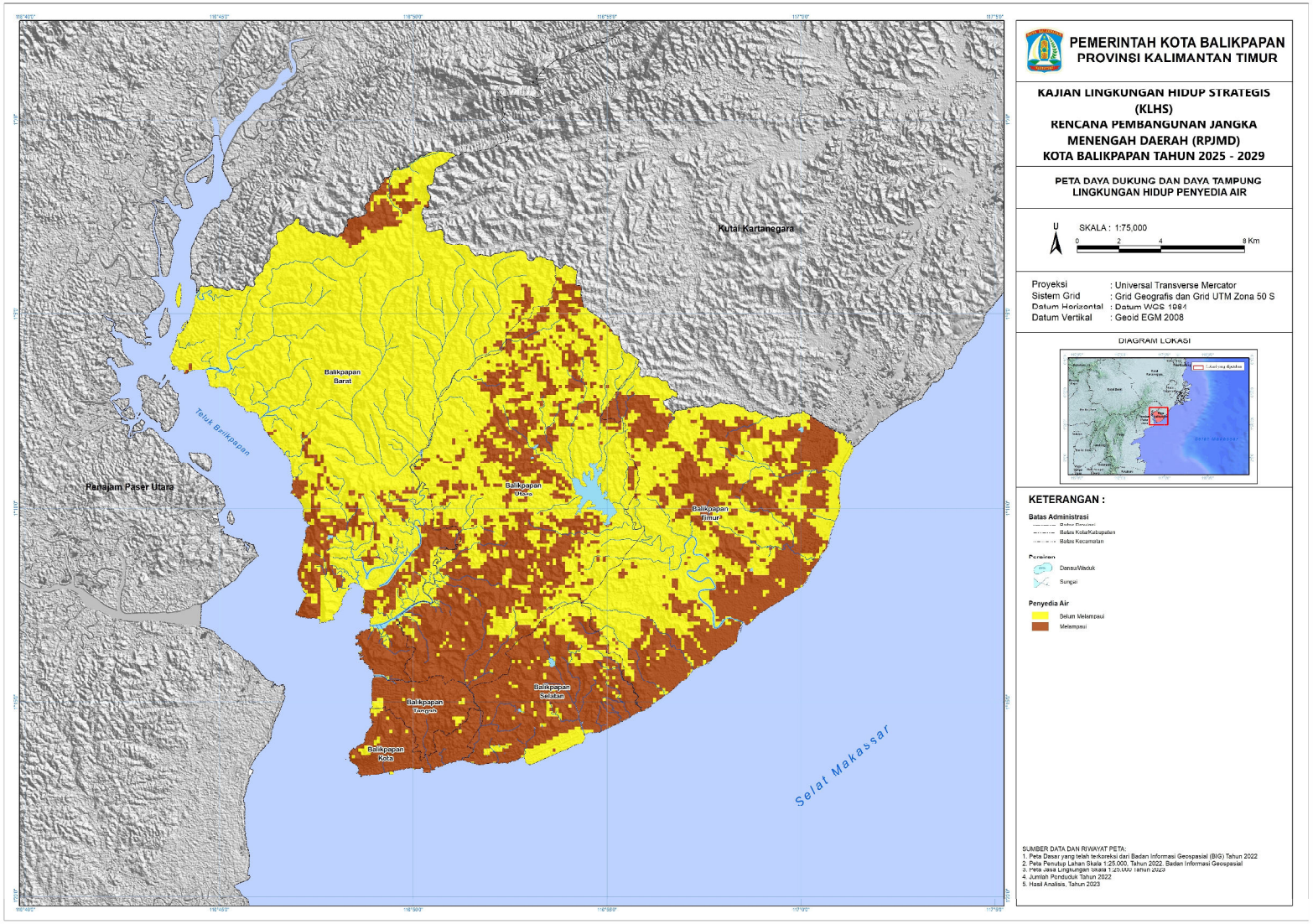
Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha

Ketersediaan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 524.147.443,99 M3/Tahun dan untuk kebutuhan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 525.625.678,16 M3/Tahun. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.46** dan **Gambar 3.34** dibawah ini.

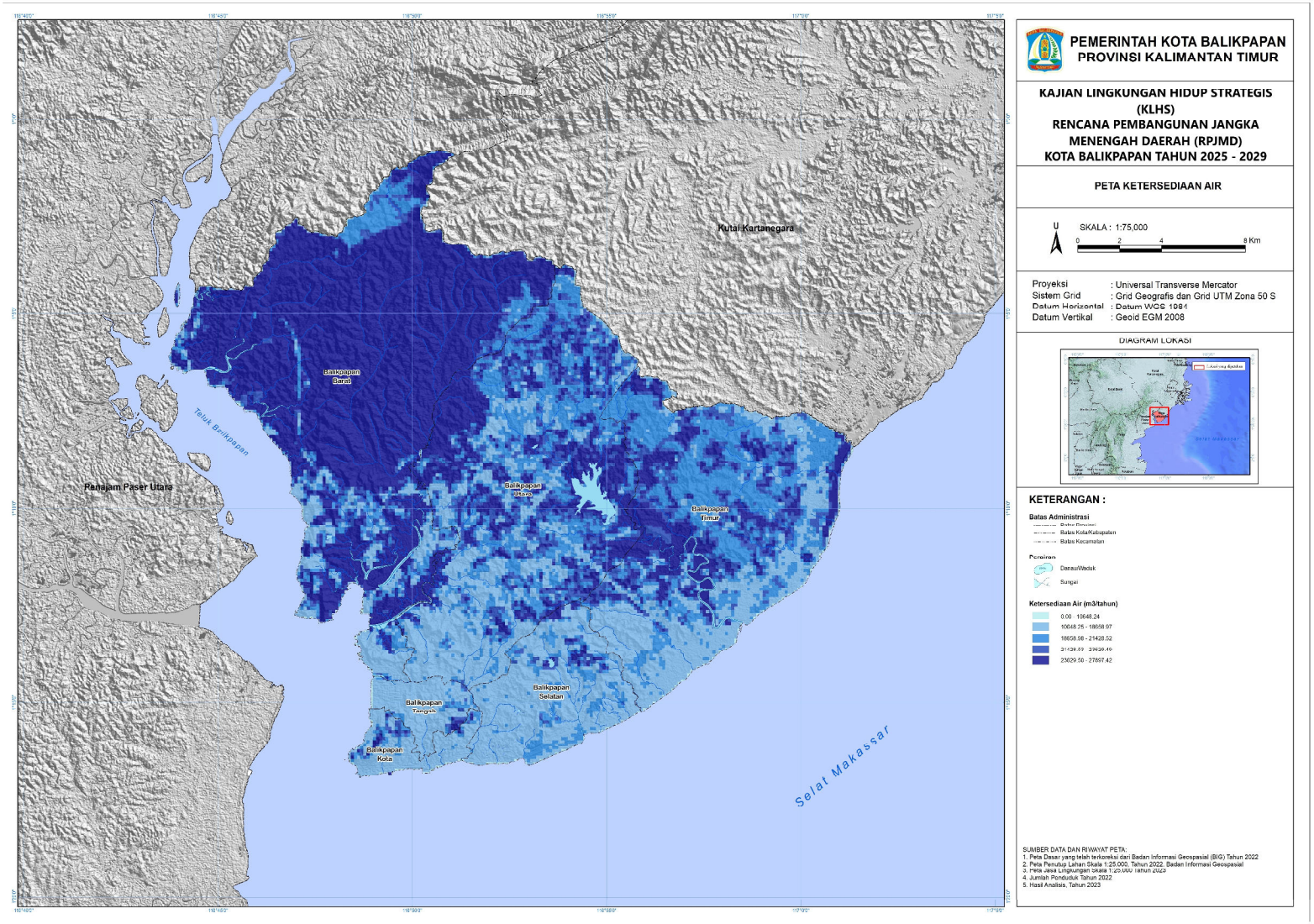
Tabel III.46 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan (M3/Tahun)	Kebutuhan (M3/Tahun)	Selisih (M3/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	208.478.674,78	71.655.727,90	136.822.946,89	258.209,00
2	Balikpapan Kota	10.897.248,70	61.815.593,49	-50.918.344,78	13.695,00
3	Balikpapan Selatan	36.595.054,51	88.885.350,79	-52.290.296,28	45.863,00
4	Balikpapan Tengah	11.286.464,01	81.044.835,90	-69.758.371,90	14.180,00
5	Balikpapan Timur	116.936.986,93	92.331.427,75	24.605.559,19	145.983,00
6	Balikpapan Utara	139.953.015,05	129.892.742,34	10.060.272,72	174.504,00
	Grand Total	**524.147.443,99**	**525.625.678,16**	**-1.478.234,17**	**652.434,00**

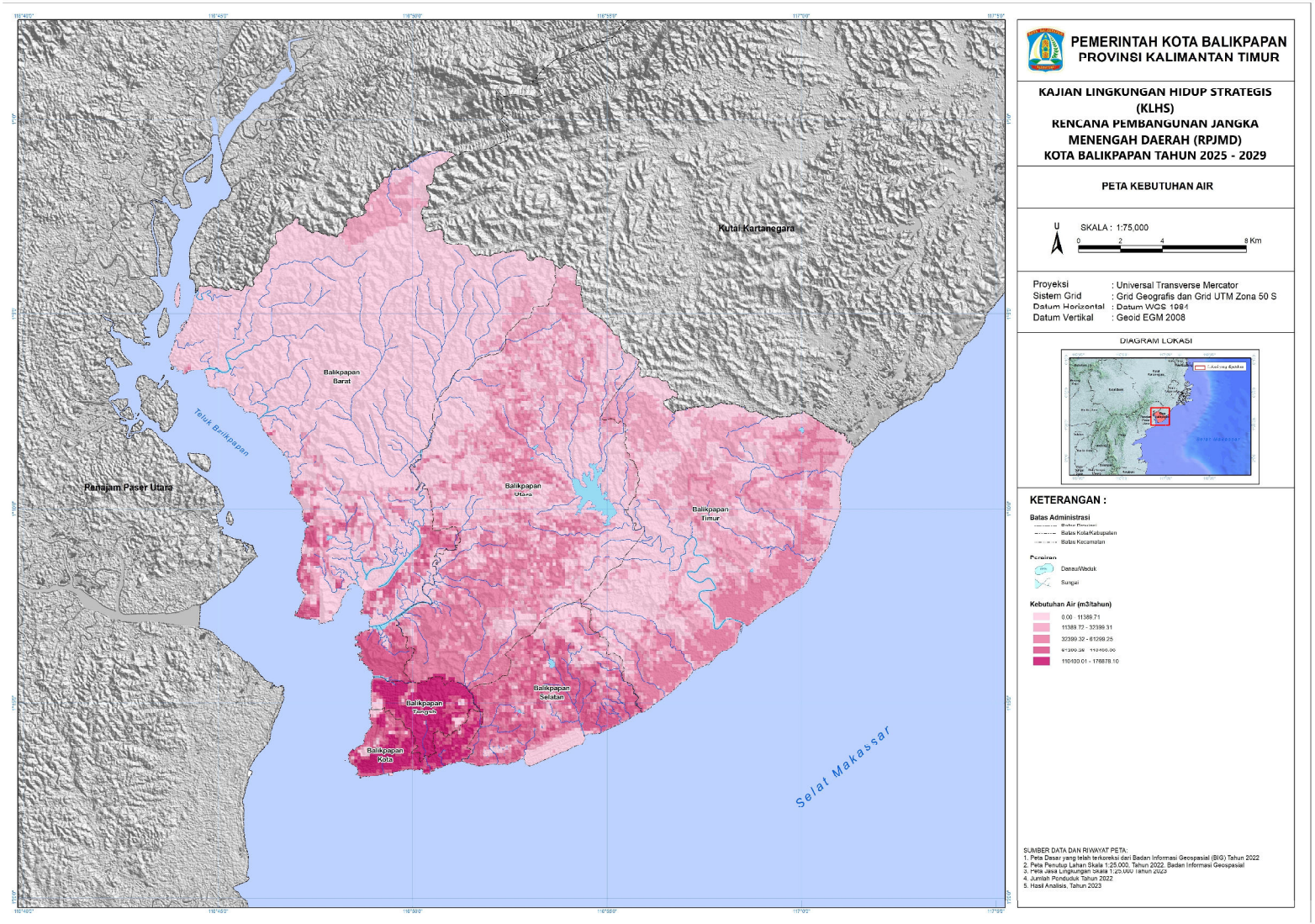
Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.33 Peta Proyeksi Status Daya Dukung Air di Kota Balikpapan Tahun 2023



Gambar 3.34 Peta Ketersediaan Air di Kota Balikpapan Tahun 2023



Gambar 3.35 Peta Kebutuhan Air di Kota Balikpapan Tahun 2023

Dari hasil analisis status daya dukung air serta ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Balikpapan diatas, maka dapat dilakukan forecasting / proyeksi status daya dukung air, ketersediaan dan kebutuhan air sampai dengan tahun 2029 di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.47** dan **Gambar 3.36** dibawah ini.

Tabel III.47 Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan dan Status Daya Dukung Air Tahun 2029

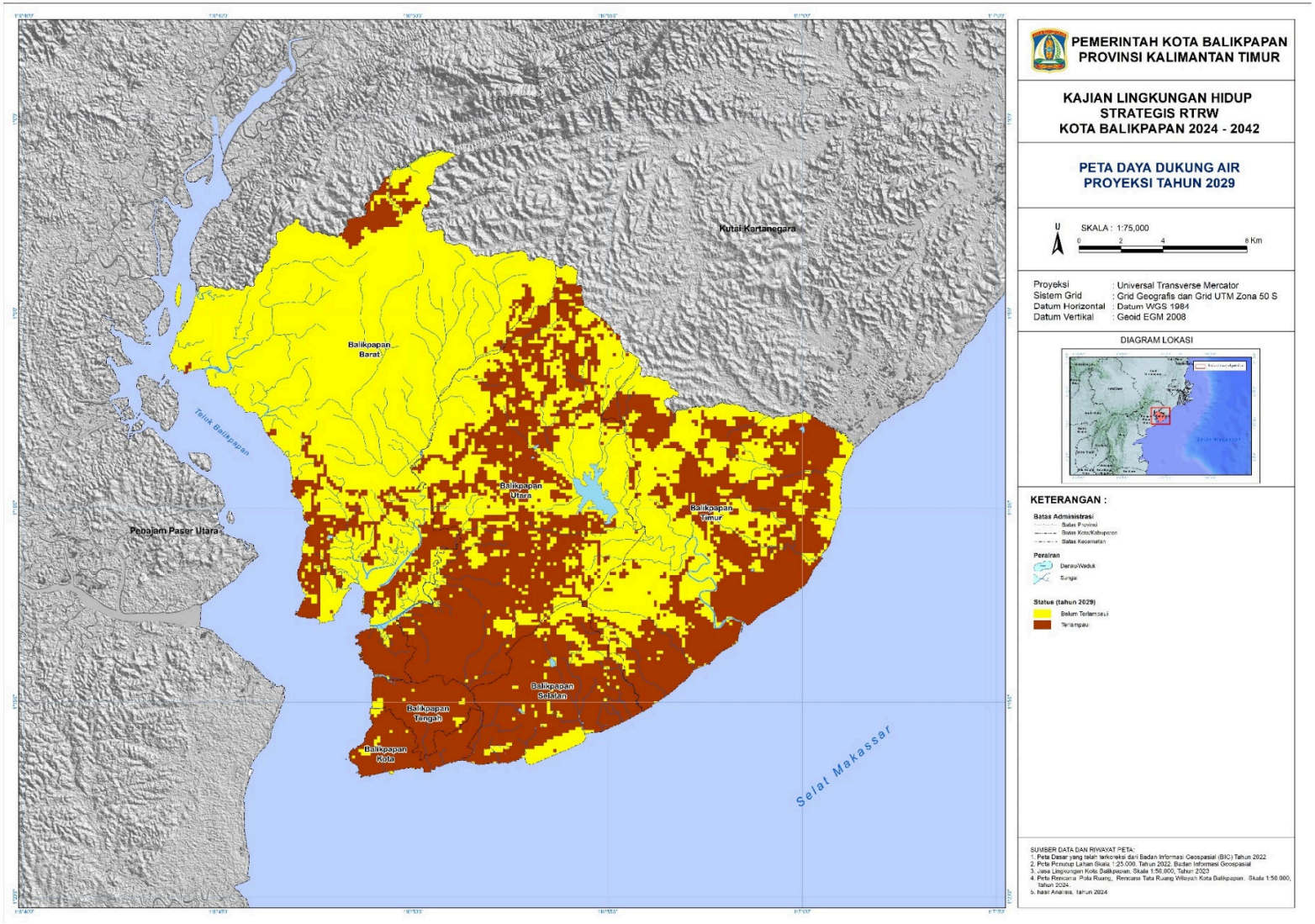
No	Kecamatan	Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kota Balikpapan Tahun 2029 (Juta.m3/Tahun)			Ambang Batas (Ribu Jiwa)	Stasus Daya Dukung Air Tahun 2029 (Ha)	
		Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih		Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui
1	Balikpapan Barat	208,48	97,06	111,42	148,03	16.605,52	2.653,45
2	Balikpapan Kota	10,90	80,91	-70,01	-87,32	57,76	1.029,35
3	Balikpapan Selatan	36,60	167,97	-131,38	-160,19	726,22	3.130,77
4	Balikpapan Tengah	11,29	111,60	-100,31	-124,99	49,51	1.034,75
5	Balikpapan Timur	116,94	160,81	-43,87	0,76	5.496,22	6.256,22
6	Balikpapan Utara	139,95	235,04	-95,09	-84,37	6.456,60	7.457,39
Grand Total		**524,15**	**853,39**	**-329,24**	**-308,08**	**29.391,82**	**21.561,93**

Sumber : Hasil Analisis, 2023

3.2.4 Kinerja Layanan Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) dapat direpresentasikan oleh Jasa Lingkungan, dengan pemahaman bahwa DDDTLH merupakan kapasitas Jasa Lingkungan dalam medukung perikehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Semakin baik atau tinggi DDDTLH suatu lokasi atau ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan Jasa Lingkungannya (Riqqi, dkk. 2018). Setiap ekoregion terdiri dari beberapa tipe ekosistem yang menghasilkan jasa. Jasa Lingkungan dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu jasa penyediaan, pengaturan, kultural, dan pendukung. Nilai untuk setiap Jasa Lingkungan – selanjutnya disebut sebagai Indeks Jasa Lingkungan (IJE) ditentukan dengan pembobotan setiap ekoregion dan penutup lahan. Hasil perhitungan akan menghasilkan indeks Jasa Lingkungan dengan rentang indeks 0 sampai 5. Indeks ini kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kategori dengan menggunakan skala likert. Nilai interval tiap kategori adalah 1, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Untuk memudahkan visualisasi pada peta, masing-masing kategori memiliki warna yang berbeda.

Jasa lingkungan penyedia pangan di Kota Balikpapan didominasi berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.48** dan **Gambar 3.37** dan **Gambar 3.38** dibawah ini.

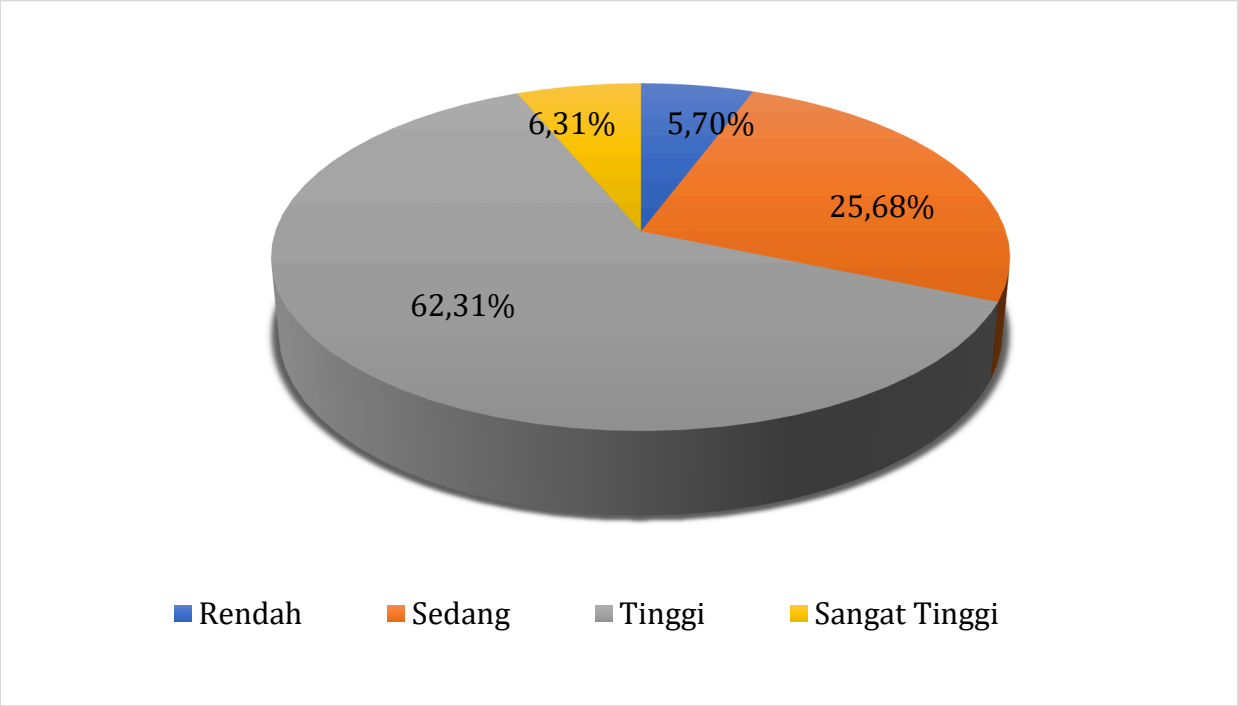


Gambar 3.36 Peta Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Balikpapan Tahun 2029

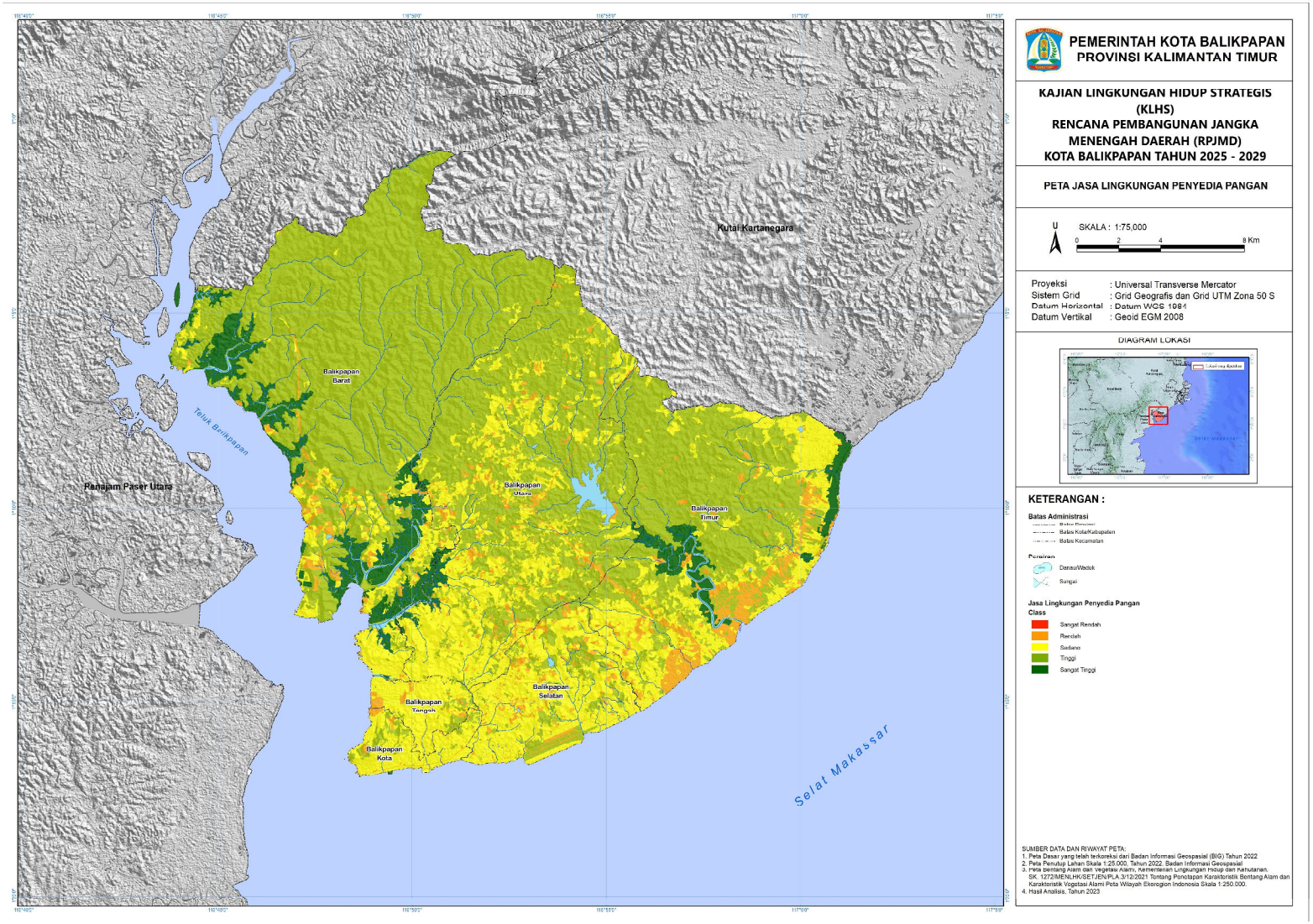
Tabel III.48 Luasan Jasa Penyedia Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	477,97	1.486,01	15.110,42	2.179,09	19.253,49
2	Balikpapan Kota	69,39	840,56	173,69	3,01	1.086,65
3	Balikpapan Selatan	382,96	2.678,44	793,71	0,46	3.855,58
4	Balikpapan Tengah	92,68	874,67	116,83		1.084,18
5	Balikpapan Timur	1.261,29	2.910,19	6.747,24	823,87	11.742,59
6	Balikpapan Utara	618,53	4.288,13	8797,77	209,56	13.913,99
Grand Total		**2.902,82**	**13.078,00**	**31.739,67**	**3.215,99**	**51.101,24**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.37 Presentase Luas Jasa Penyedia Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023



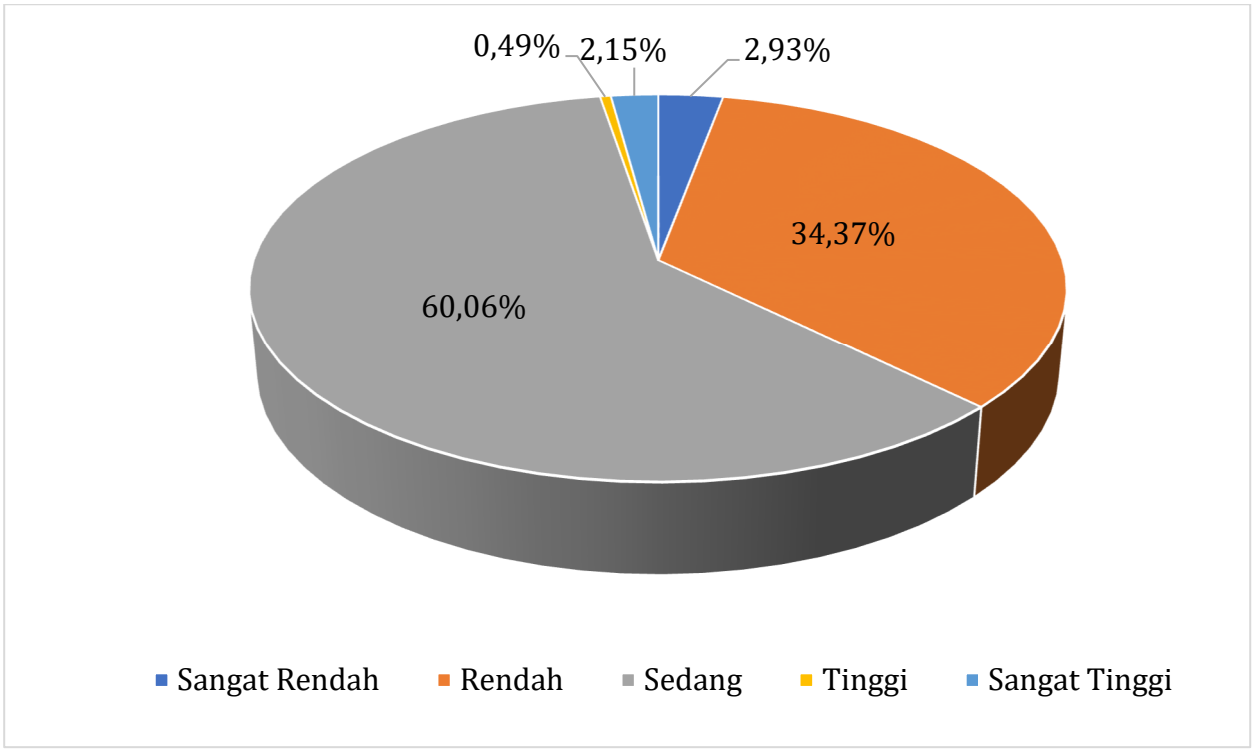
Gambar 3.38 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan Tahun 2023

Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan terbesar masuk kedalam kategori sedang dengan luasan total seluas 30.591,15 Ha yang meliputi 6 (enam) kecamatan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.49** dan **Gambar 3.39** dan **Gambar 3.40** dibawah ini.

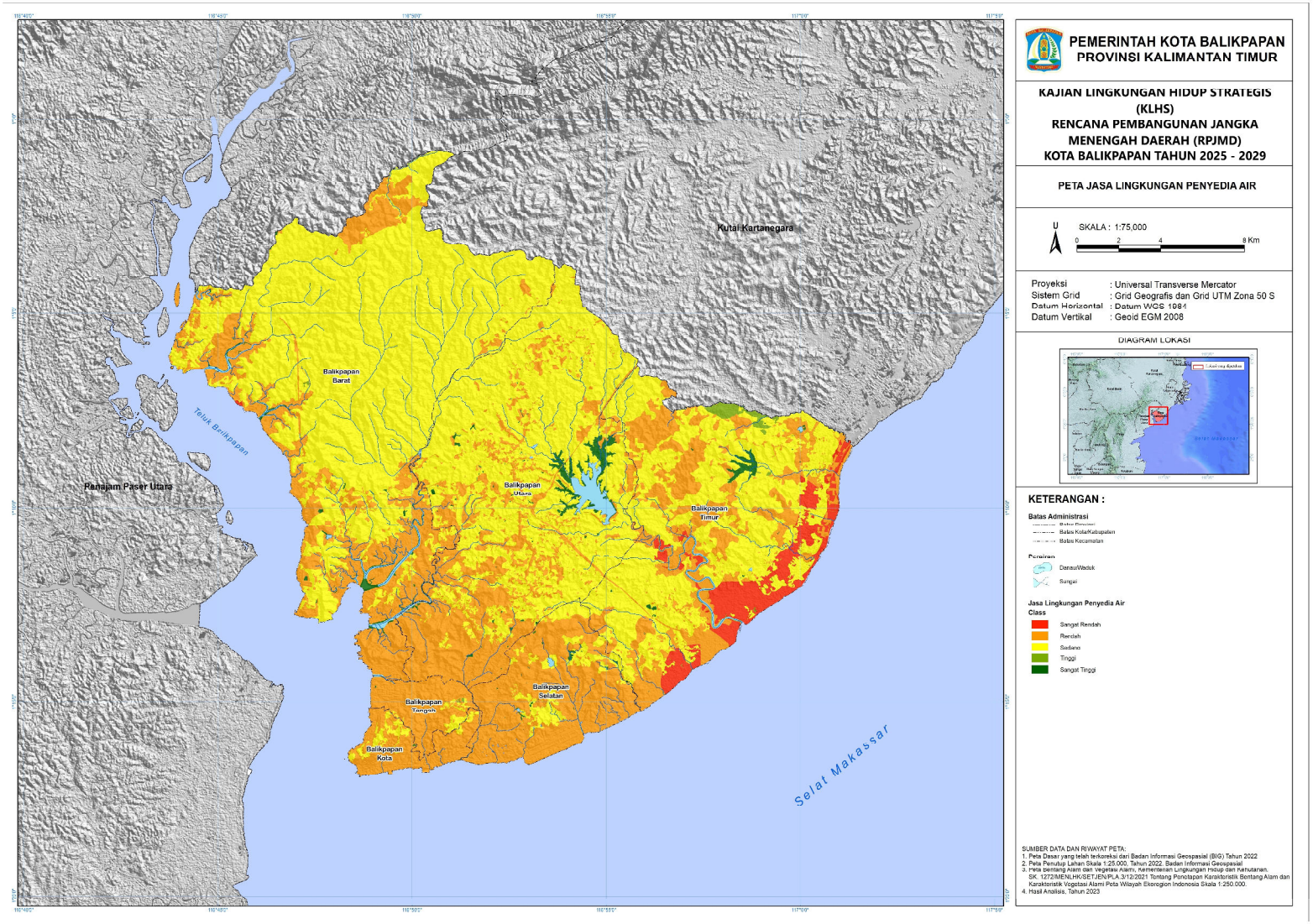
Tabel III.49 Luasan Jasa Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	5,62	4.627,83	14.269,54	8,85	341,66	19.253,49
2	Balikpapan Kota		931,05	1.53,36		2,24	1.086,65
3	Balikpapan Selatan		3.249,75	5.62,75		43,08	3.855,58
4	Balikpapan Tengah		1.004,20	71,29	4,02	4,67	1.084,18
5	Balikpapan Timur	1488,56	3.542,79	6.338,77	236,13	136,34	11.742,59
6	Balikpapan Utara	0,08	4.150,92	9.195,44		567,54	13.913,99
	Grand Total	**1494,25**	**17.506,54**	**30.591,15**	**249,01**	**1.095,53**	**51.101,24**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.39 Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023



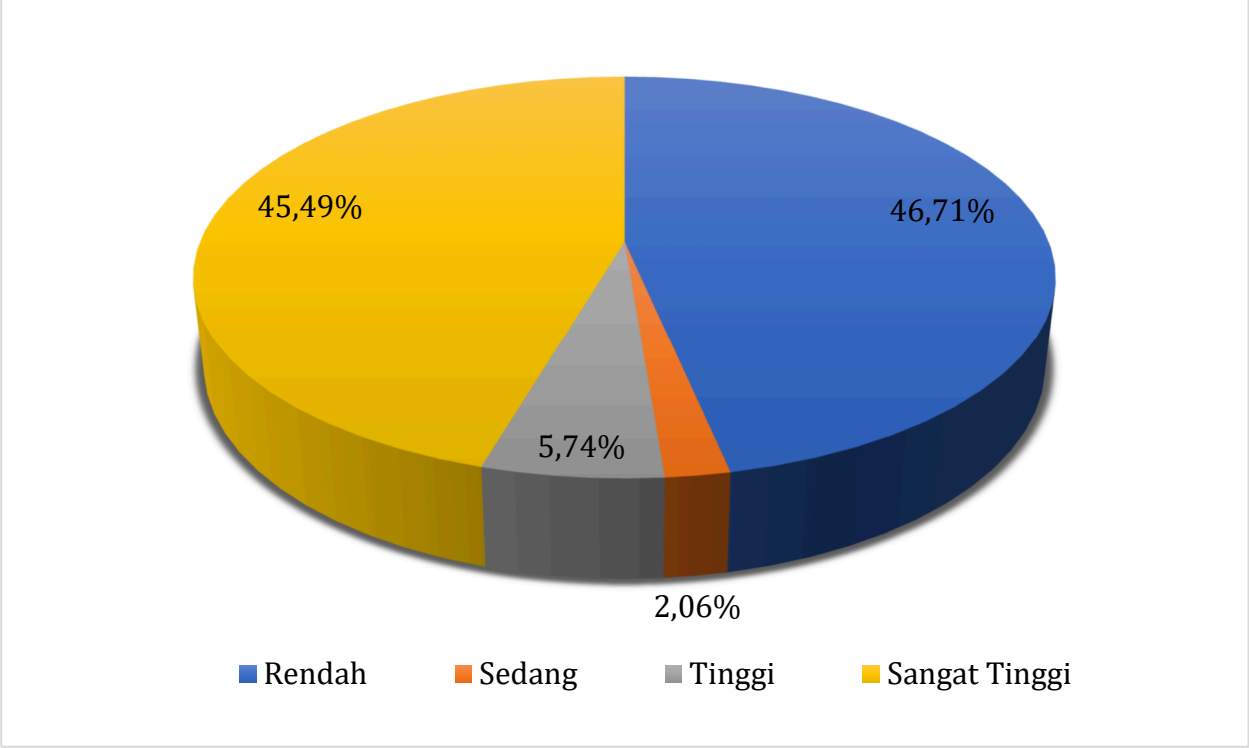
Gambar 3.40 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023

Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kota Balikpapan didominasi kedalam kategori Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 Ha yang meliputi 6 (enam) kecamatan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.50** dan **Gambar 3.41** dan **Gambar 3.42** dibawah ini.

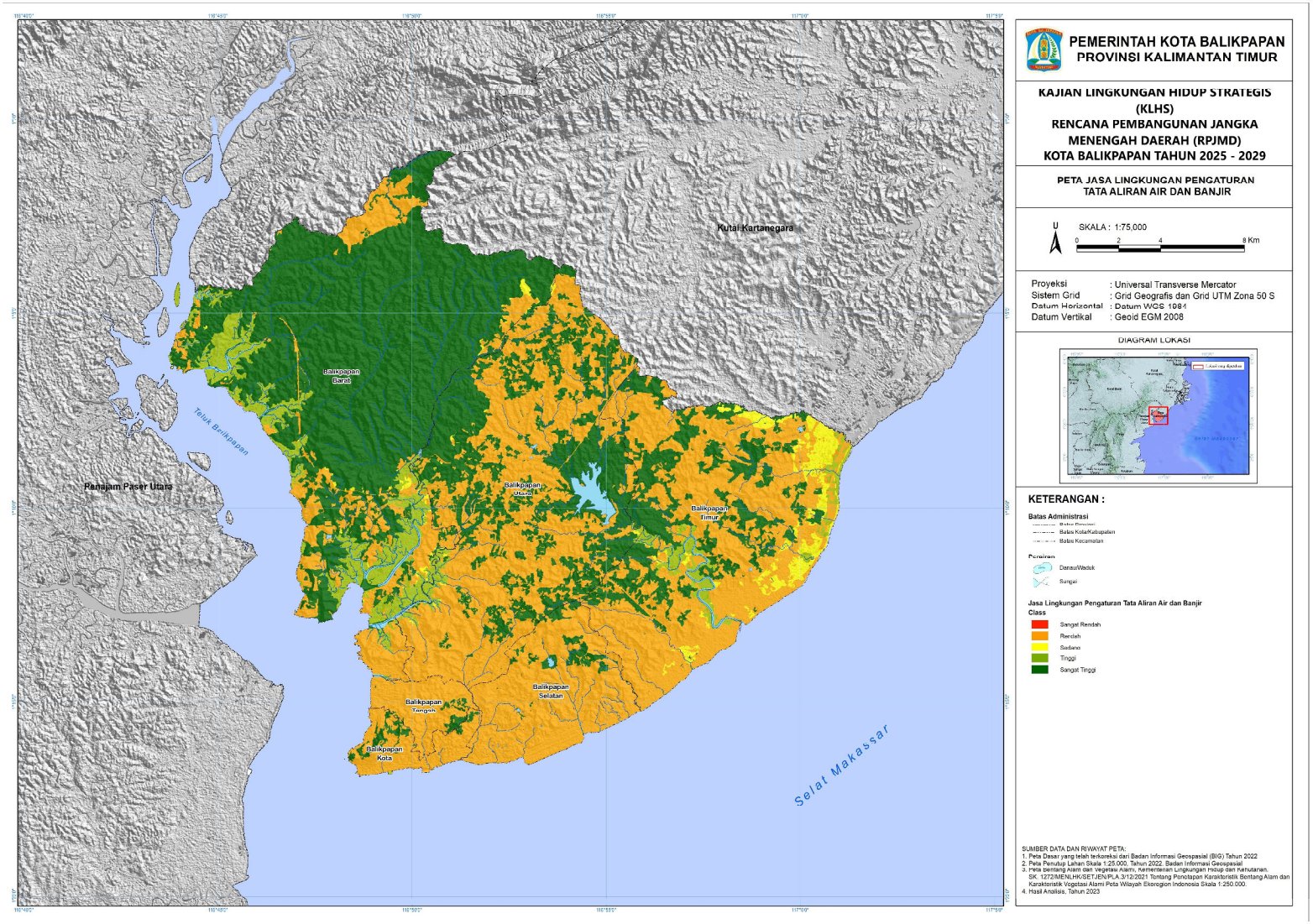
Tabel III.50 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	2.791,33	110,53	2.151,87	14.199,76	19.253,49
2	Balikpapan Kota	928,03		3,01	155,60	1.086,65
3	Balikpapan Selatan	3.556,17		0,46	298,95	3.855,58
4	Balikpapan Tengah	1.004,20			79,98	1.084,18
5	Balikpapan Timur	7.371,04	901,25	566,42	2.903,87	11.742,59
6	Balikpapan Utara	8.140,12	35,71	203,36	5.534,80	13.913,99
	Grand Total	**23.790,89**	**1.047,49**	**2.925,13**	**23.172,96**	**51.101,24**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.41 Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2023



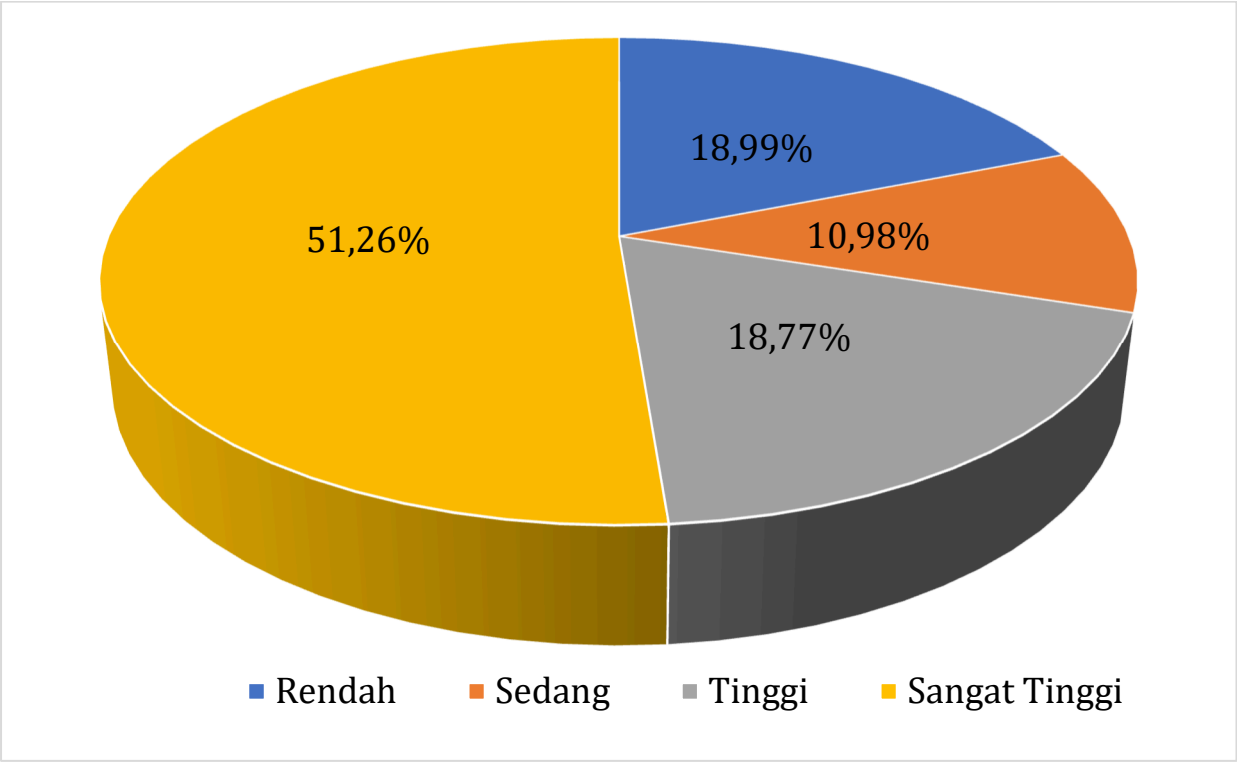
Gambar 3.42 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2023

Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kota Balikpapan didominasi berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 26.110,44 Ha yang meliputi 6 (enam) kecamatan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.51** dan **Gambar 3.43** dan **Gambar 3.44** dibawah ini.

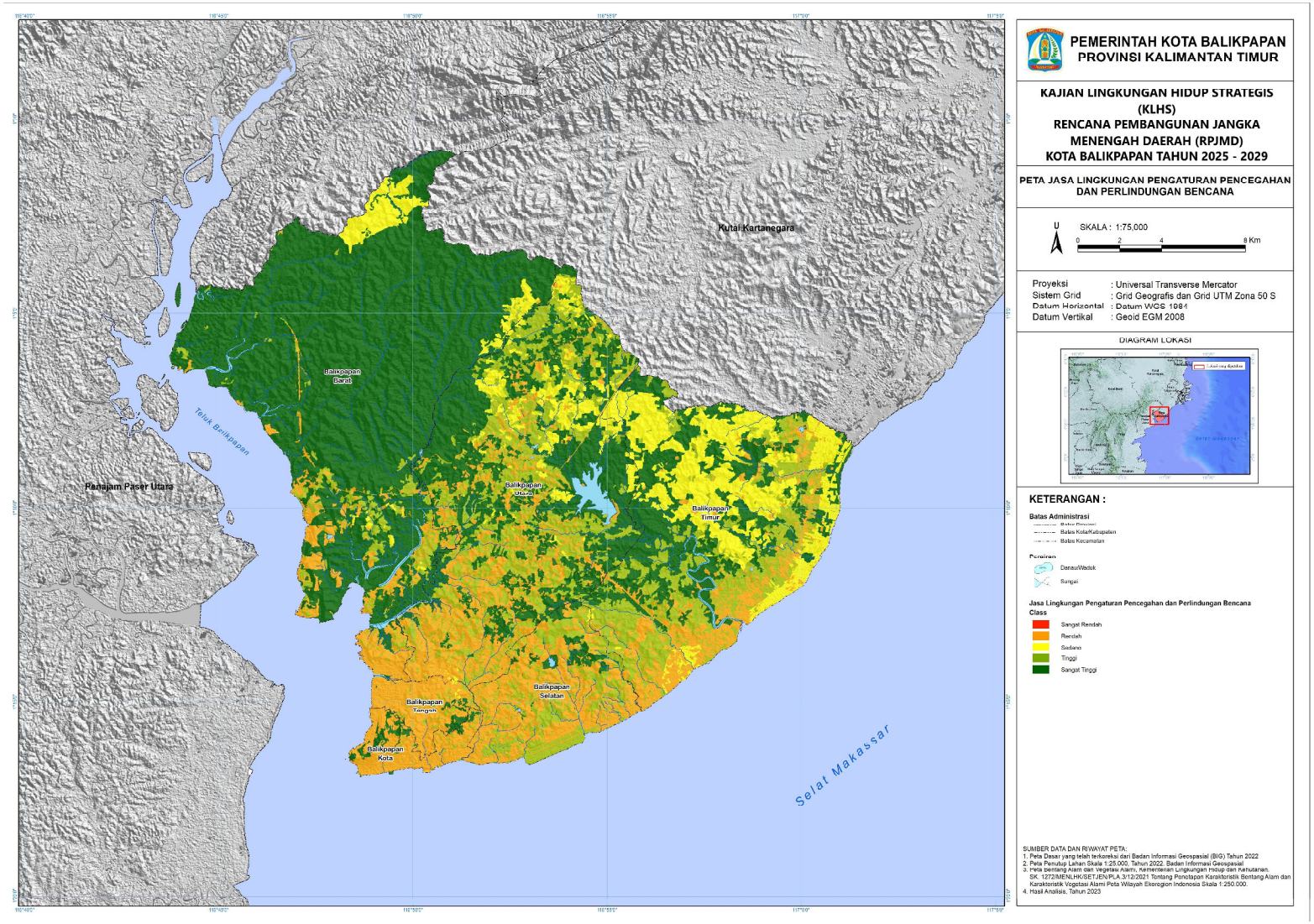
Tabel III.51 Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	1.239,30	807,81	802,57	16.403,82	19.253,49
2	Balikpapan Kota	871,57		56,75	158,32	1.086,65
3	Balikpapan Selatan	2.143,46	8,08	1.407,11	296,93	3.855,58
4	Balikpapan Tengah	905,86	11,13	88,39	78,80	1.084,18
5	Balikpapan Timur	1.708,44	3.617,63	2.968,26	3.448,26	11.742,59
6	Balikpapan Utara	2.803,15	1.146,53	4.240,01	5.724,30	13.913,99
	Grand Total	**9.671,77**	**5.591,17**	**9.563,10**	**26.110,44**	**51.101,24**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.43 Persentase Luas Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan Tahun 2023



Gambar 3.44 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan Tahun 2023

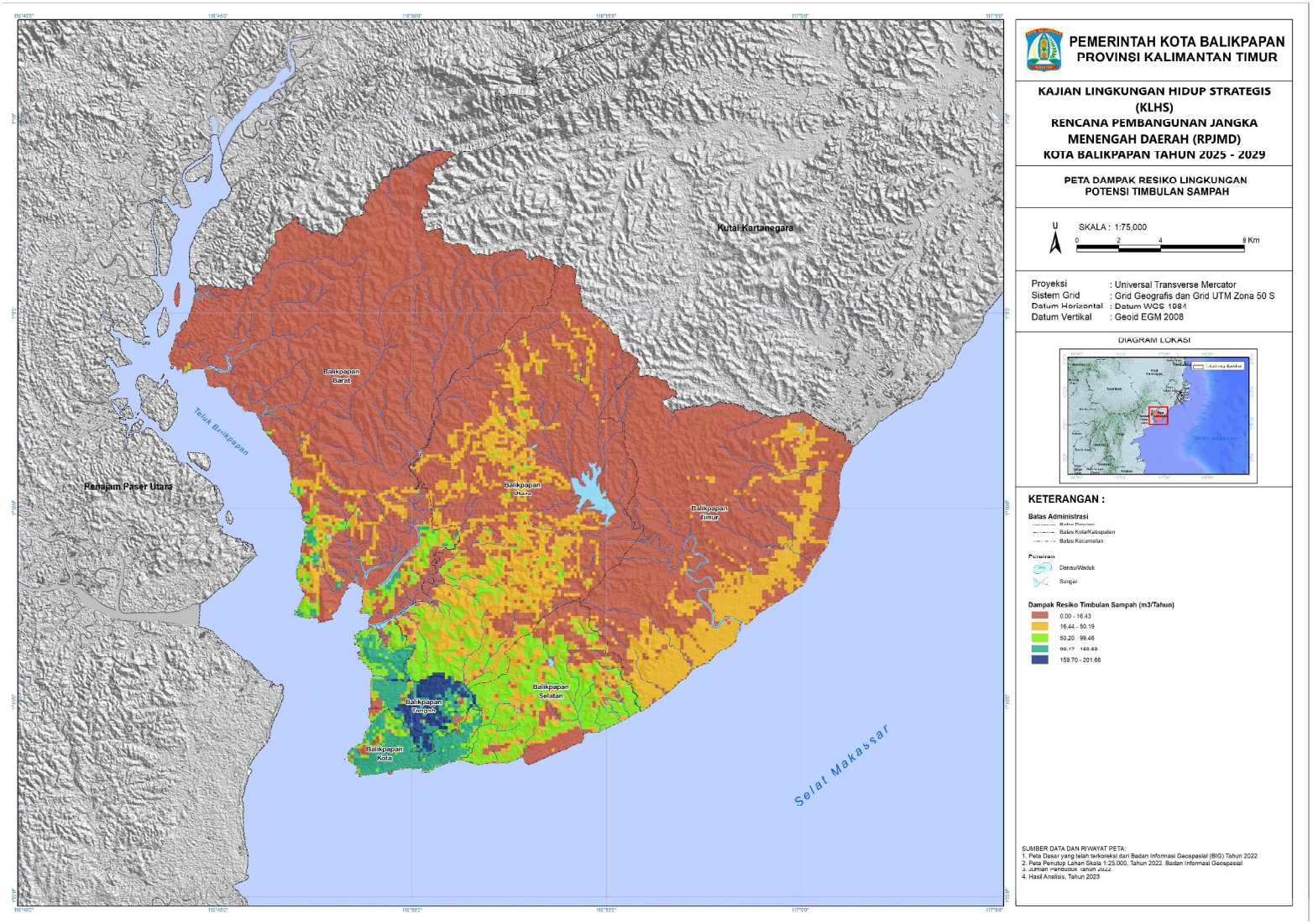
3.2.5 Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan Hidup

Analisis dampak dan resiko lingkungan yang dibahas dalam hal ini disesuaikan dengan dinamika perkotaan seperti sampah, tinja dan beban pencemar. Bertambahnya volume jumlah sampah setiap harinya diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya daerah permukiman dan tingkat aktifitas kegiatan sosial. Sarana dan prasarana persampahan yang terbatas akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks sehingga masyarakat akhirnya membuang sampah di jalan, saluran selokan, sungai dan lahan-lahan terbuka ataupun dibakar. Jumlah timbulan di Kota Balikpapan sebesar 502.607,74 M3/Tahun, dan Wilayah Kecamatan yang memiliki jumlah timbulan sampah paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 116.289,91 M3/Tahun. Untuk Jumlah timbulan tinja di Kota Balikpapan sebesar 100.521,55 M3/Tahun dengan wilayah Kecamatan yang memiliki jumlah timbulan tinja paling besar berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 23.257,98 M3/Tahun. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.52** dan **Gambar 3.45** dan **Gambar 3.46** dibawah ini.

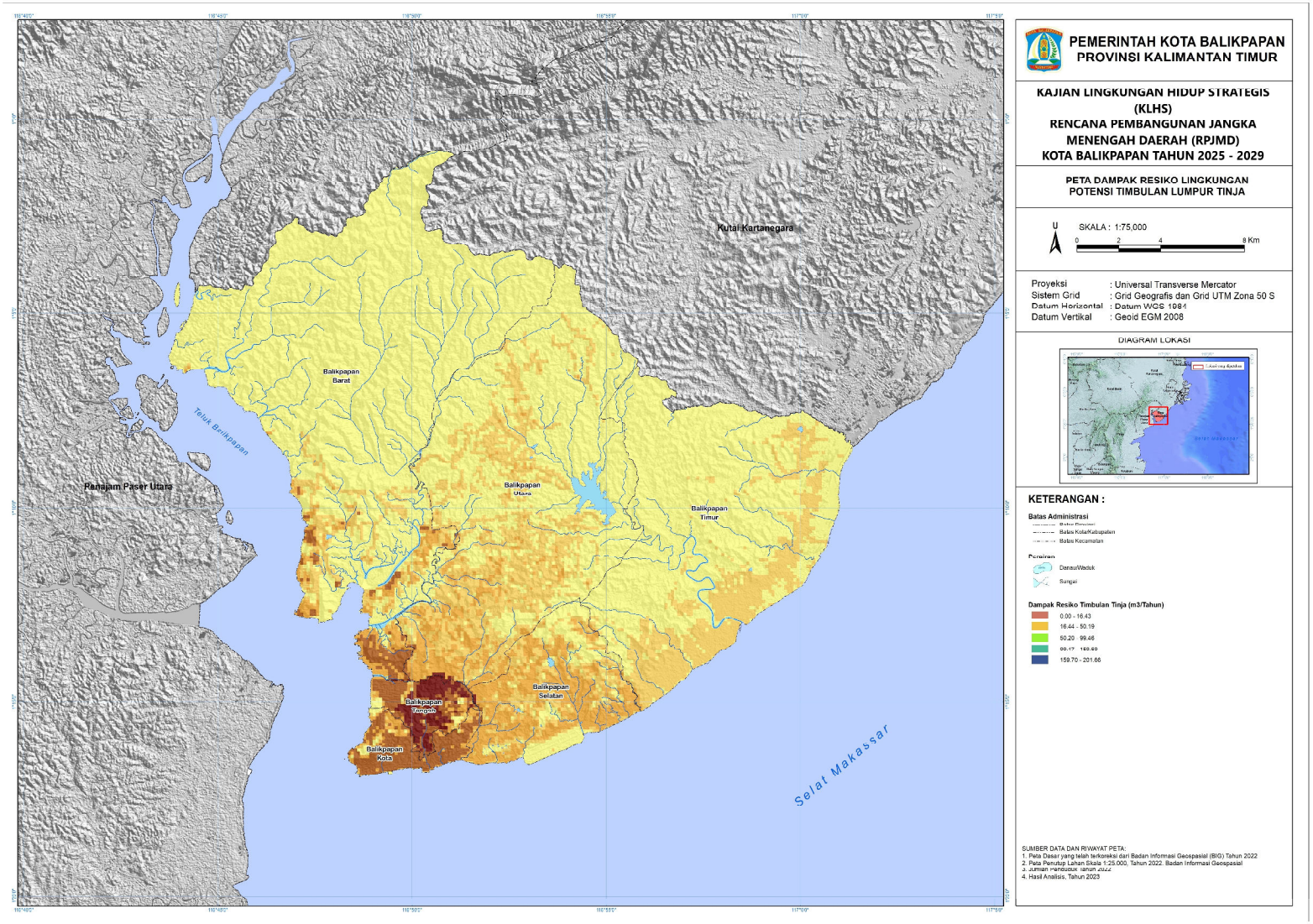
Tabel III.52 Timbulan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Sampah M3/Tahun	Tinja M3/Tahun
1	Balikpapan Barat	71.570,11	14.314,02
2	Balikpapan Kota	70.392,08	14.078,42
3	Balikpapan Selatan	97.814,53	19.562,91
4	Balikpapan Tengah	92.136,04	18.427,21
5	Balikpapan Timur	54.405,08	10.881,01
6	Balikpapan Utara	116.289,91	23.257,98
	Grand Total	**502.607,74**	**100.521,55**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.45 Peta Timbulan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2023



Gambar 3.46 Peta Timbulan Tinja di Kota Balikpapan Tahun 2023

BOD merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bekteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan, dinyatakan dengan BOD hari pada suhu 20 °C dalam mg/liter atau ppm. Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran terhadap air buangan domestik atau industri juga untuk mendesain sistem pengolahan limbah biologis bagi air tercemar. Penguraian zat organik adalah peristiwa alamiah, jika suatu badan air tercemar oleh zat organik maka bakteri akan dapat menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses biodegradable berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada biota air dan keadaan pada badan air dapat menjadi anaerobik yang ditandai dengan timbulnya bau busuk. Jumlah Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan sebesar 26.758 Kg/Hari dan untuk wilayah yang memiliki Beban Pencemar BOD paling tinggi berada di Kecamatan Utara sebesar 6.851,64 Kg/Hari. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.53** dan **Gambar 3.47** berikut.

Tabel III.53 Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	BOD (Kg/Hari)
1	Balikpapan Barat	3.614,38
2	Balikpapan Kota	3.134,49
3	Balikpapan Selatan	4.454,55
4	Balikpapan Tengah	4.140,13
5	Balikpapan Timur	4.563,41
6	Balikpapan Utara	6.851,64
	Grand Total	**26.758,59**

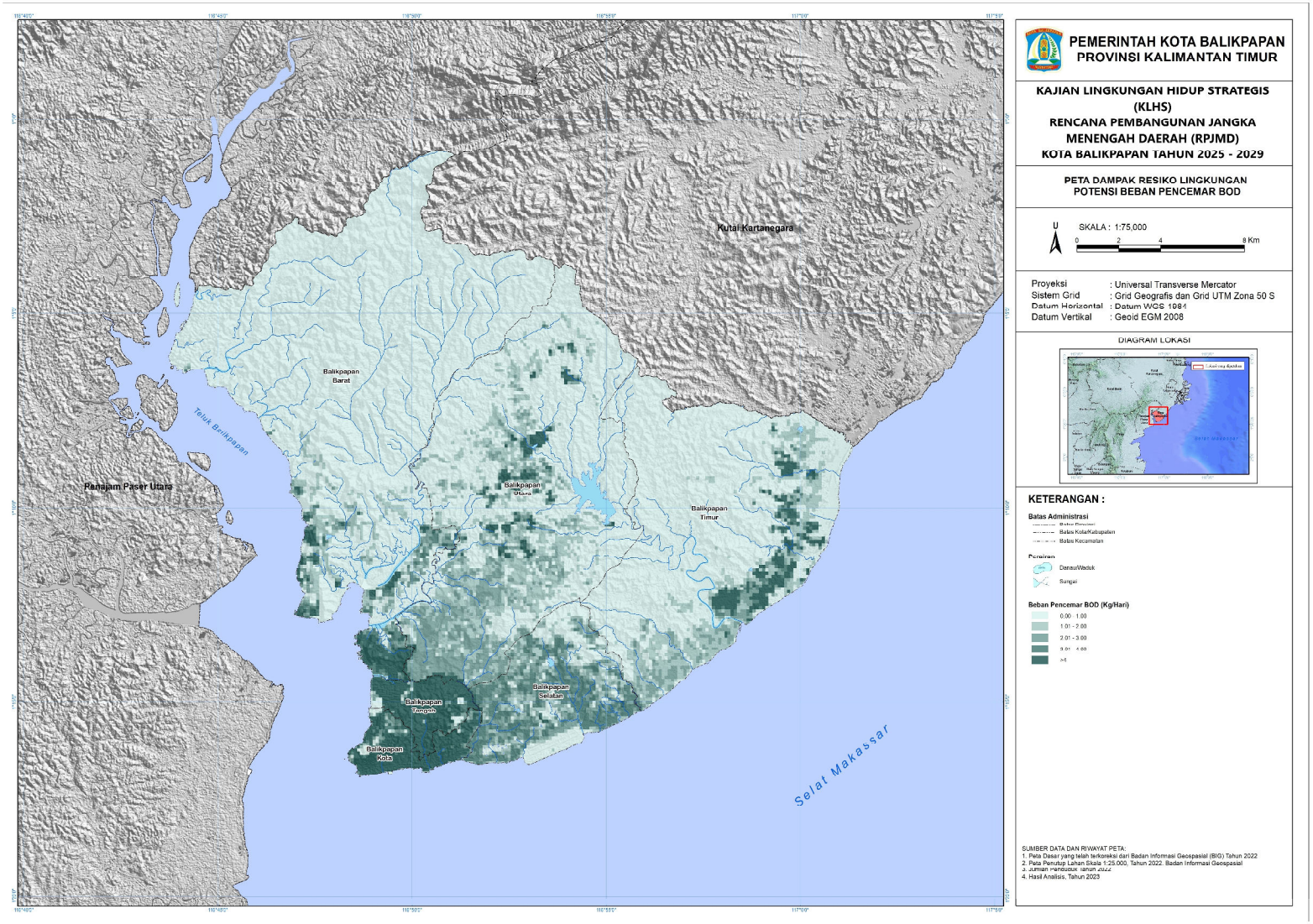
Sumber : Hasil Analisis, 2023

COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Jumlah Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan sebesar 30.364,12 Kg/Hari dan untuk wilayah yang memiliki Beban Pencemar COD paling tinggi berada di Kecamatan Utara sebesar 7.042,77Kg/Hari. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.54** dan **Gambar 3.48** berikut.

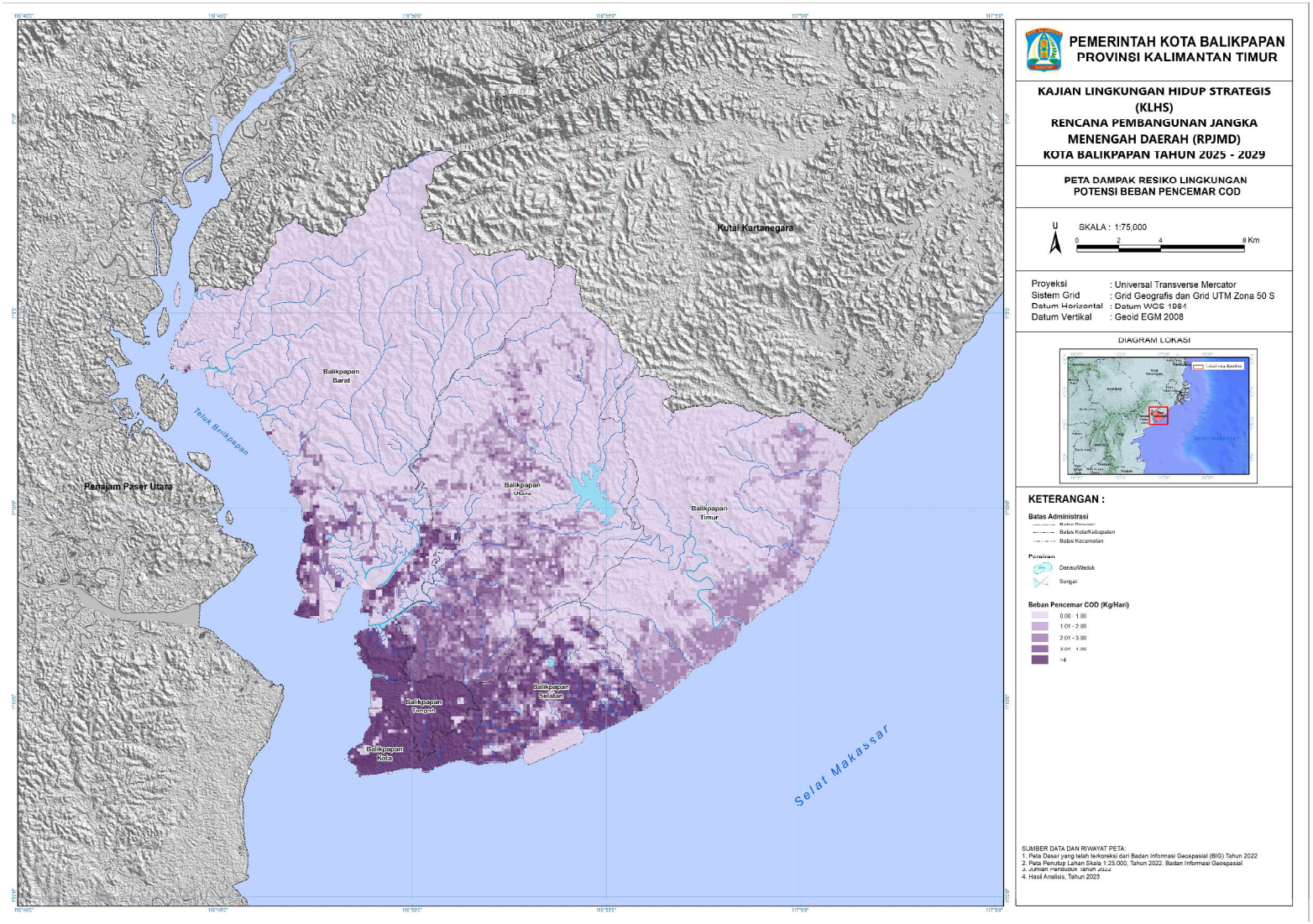
Tabel III.54 Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	COD (Kg/Hari)
1	Balikpapan Barat	4.317,19
2	Balikpapan Kota	4.243,12
3	Balikpapan Selatan	5.896,25
4	Balikpapan Tengah	5.553,75
5	Balikpapan Timur	3.311,04
6	Balikpapan Utara	7.042,77
	Grand Total	**30.364,12**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.47 Peta Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan Tahun 2023



Gambar 3.48 Peta Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan Tahun 2023

Total Susppended Solid (TSS) yaitu Zat yang tersuspensi biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air, secara fisika zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air. Limbah cair yang mempunyai kandungan zat tersuspensi tinggi tidak boleh dibuang langsung ke badan air karena disamping dapat menyebabkan pendangkalan juga dapat menghalangi sinar matahari masuk kedalam dasar air sehingga proses fotosintesa mikroorganisme tidak dapat berlangsung. Jumlah Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan sebesar 21.026,16 Kg/Hari dan untuk wilayah yang memiliki Beban Pencemar TSS paling tinggi berada di Kecamatan Utara sebesar 4.879,85 Kg/Hari. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.55** dan **Gambar 3.49** berikut.

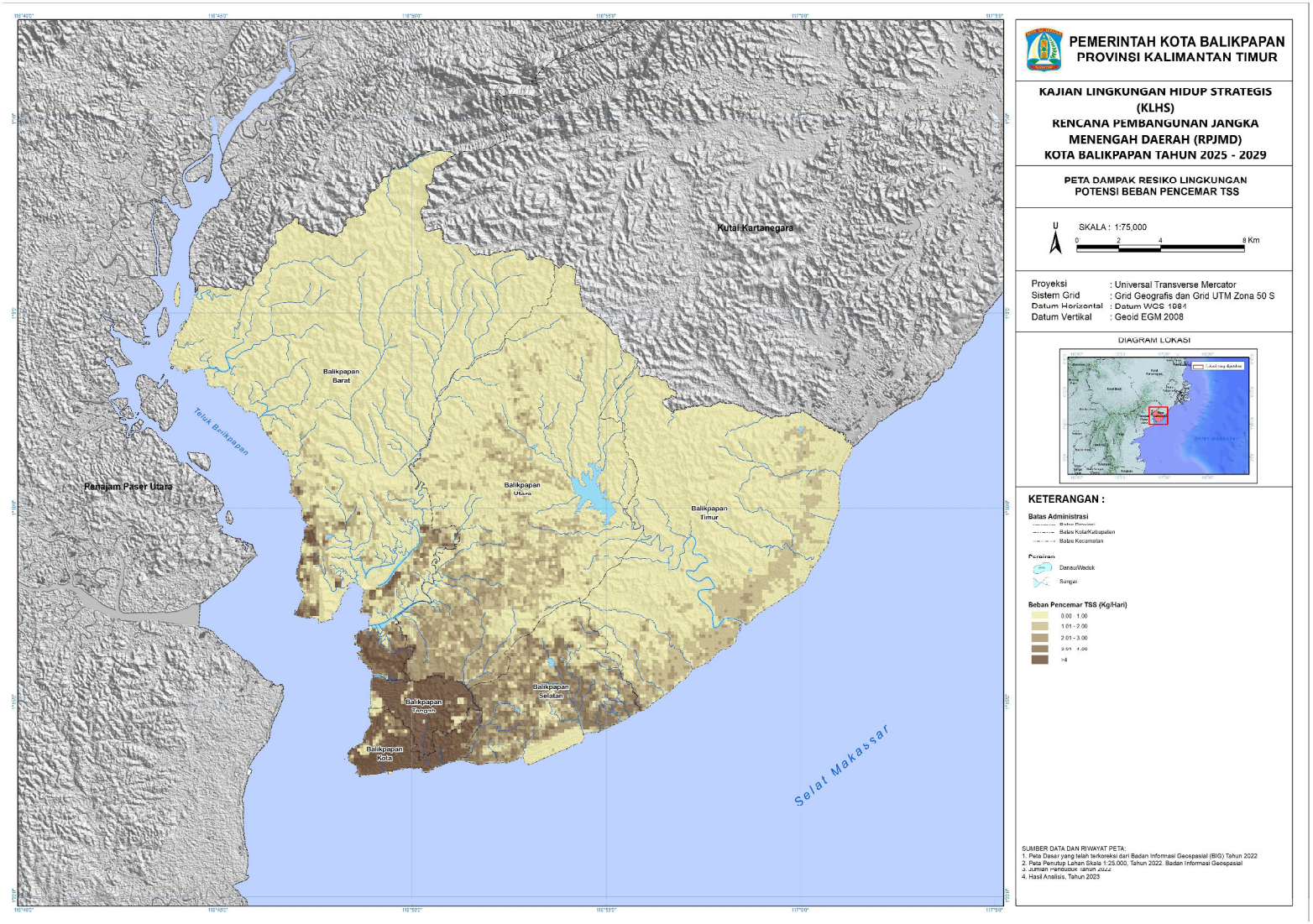
Tabel III.55 Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	TSS (Kg/Hari)
1	Balikpapan Barat	2.984,44
2	Balikpapan Kota	2.931,45
3	Balikpapan Selatan	4.075,70
4	Balikpapan Tengah	3.837,98
5	Balikpapan Timur	2.316,74
6	Balikpapan Utara	4.879,85
	Grand Total	**21.026,16**

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Resiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai resiko ekologis. Risiko fisik-ekologis dapat disebabkan oleh proses alam atau oleh kegiatan manusia (manmade risk). Resiko mental dapat meliputi kerusakan psikis yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kerusakan parah lingkungan mental disebabkan oleh pembiaran aneka resiko mental dari berbagai tindakan sosial, misalnya pembiaran kekerasan dan korupsi. Resiko sosial adalah kerusakan bangunan sosial sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal kondisi alam, teknologi, dan industri. Pada umumnya resiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan terhadap komunitas sosial adalah risiko kesehatan dan kesejahteraan. Tiga macam resiko ekologis tersebut jika dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan efek yang negatif untuk sistem biosfer dimana manusia dan lingkungan hidup secara berdampingan.

Resiko Bahaya Bencana yang berdampak pada risiko lingkungan di Kota Balikpapan diantaranya yaitu, Bahaya Gempa Bumi, dan Bahaya Tsunami. Jelasnya mengenai Bencana yang berdampak risiko lingkungan hidup akan di jabarkan sebagai berikut.



Gambar 3.49 Peta Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan Tahun 2023

1. Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Di Kota Balikpapan masuk kedalam rawan bencana gempa bumi dengan tingkat resiko bahaya rendah yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.56** dan **Gambar 3.50** berikut.

Tabel III.56 Luasan Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Rendah	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	19.024,71	19.024,71
2	Balikpapan Kota	1.069,14	1.069,14
3	Balikpapan Selatan	3.845,55	3.845,55
4	Balikpapan Tengah	1.078,47	1.078,47
5	Balikpapan Timur	11.694,50	11.694,50
6	Balikpapan Utara	13.893,50	13.893,50
	Grand Total	**50.605,87**	**50.605,87**

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023

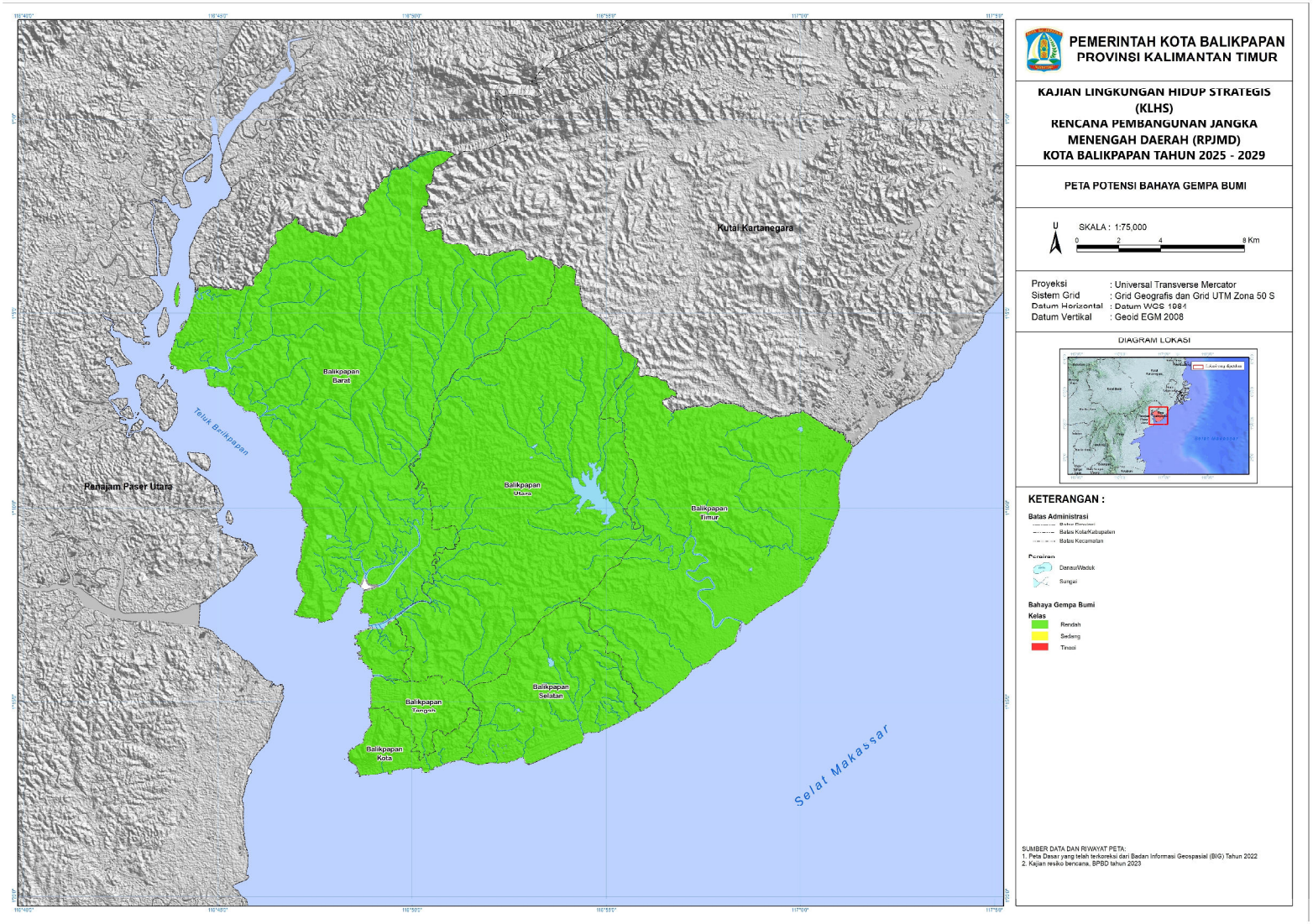
2. Bahaya Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunungapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Kota Balikpapan masuk kedalam kategori bahaya tsunami dengan tingkat resiko rendah dan sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.57** dan **Gambar 3.51** berikut.

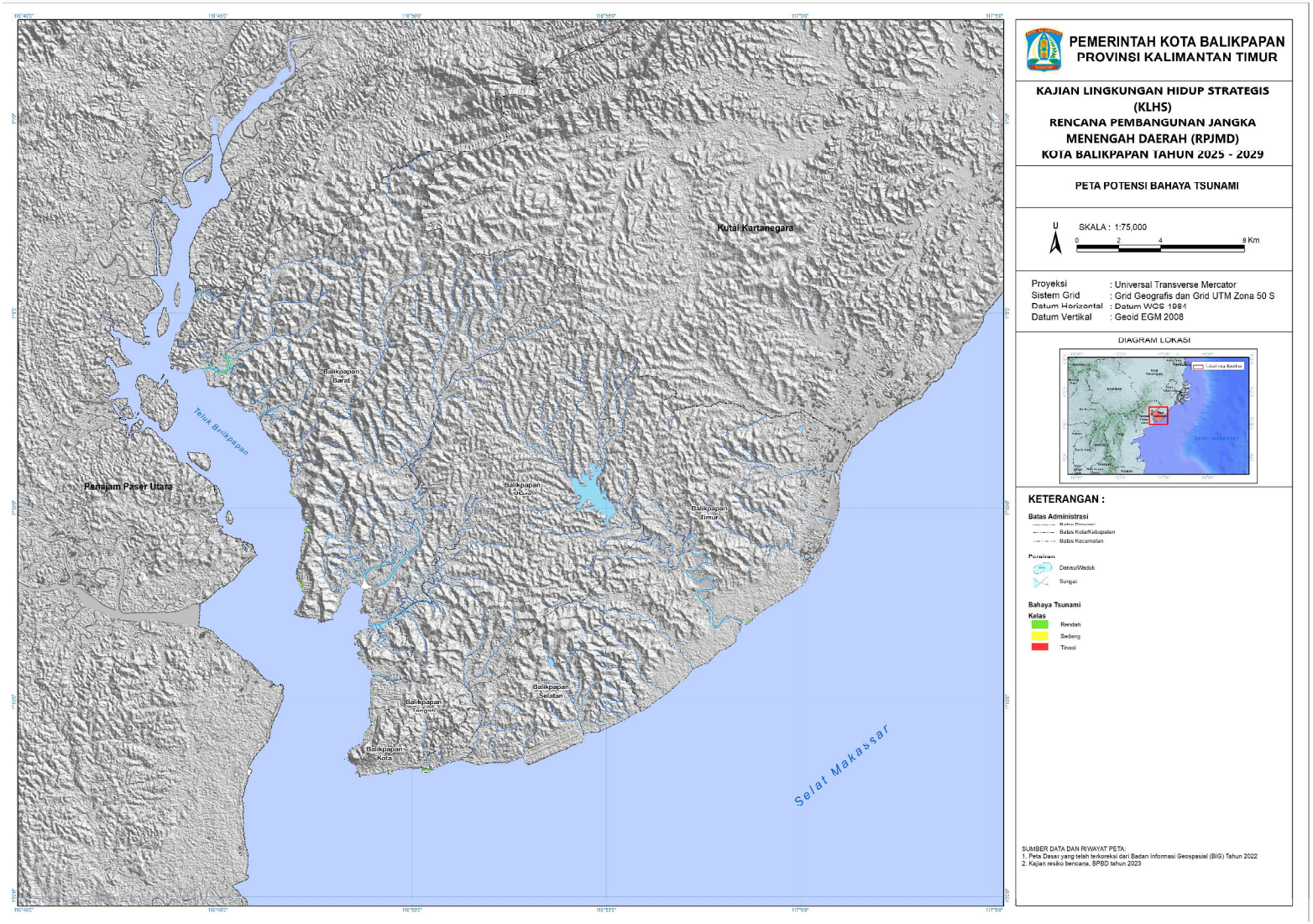
Tabel III.57 Luasan Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tingkat Resiko		Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	
1	Balikpapan Barat	40,30	4,09	44,39
2	Balikpapan Kota	3,58	1,40	4,98
3	Balikpapan Selatan		0,13	0,13
4	Balikpapan Tengah	0,74	0,43	1,17
5	Balikpapan Timur	1,63	0,61	2,24
	Grand Total	**46,25**	**6,67**	**52,92**

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



Gambar 3.50 Peta Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan



Gambar 3.51 Peta Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan

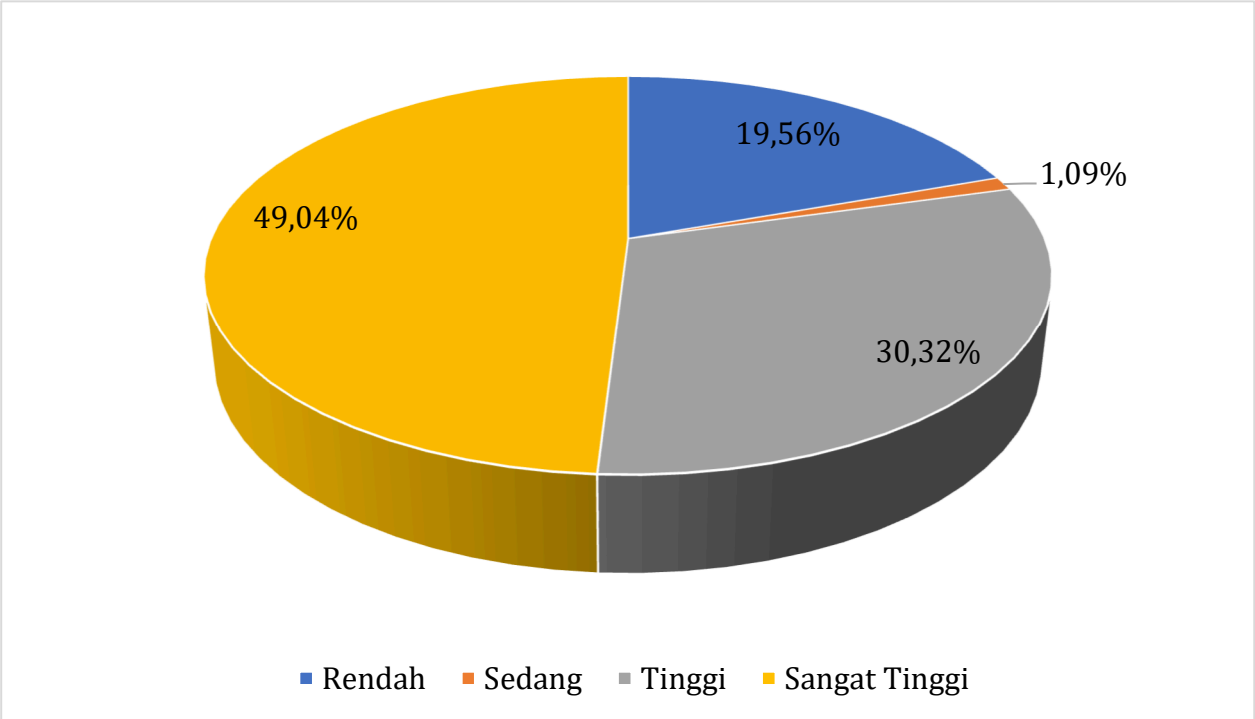
3.2.6 Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim

Salah satu cara untuk mengindentifikasi kerentanan kapasitas adaptasi perubahan iklim di Kota Balikpapan dilihat dari Jasa Lingkungan pengaturan iklim dan Sidik. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.58** dan **Gambar 3.52** dan **Gambar 3.53** berikut.

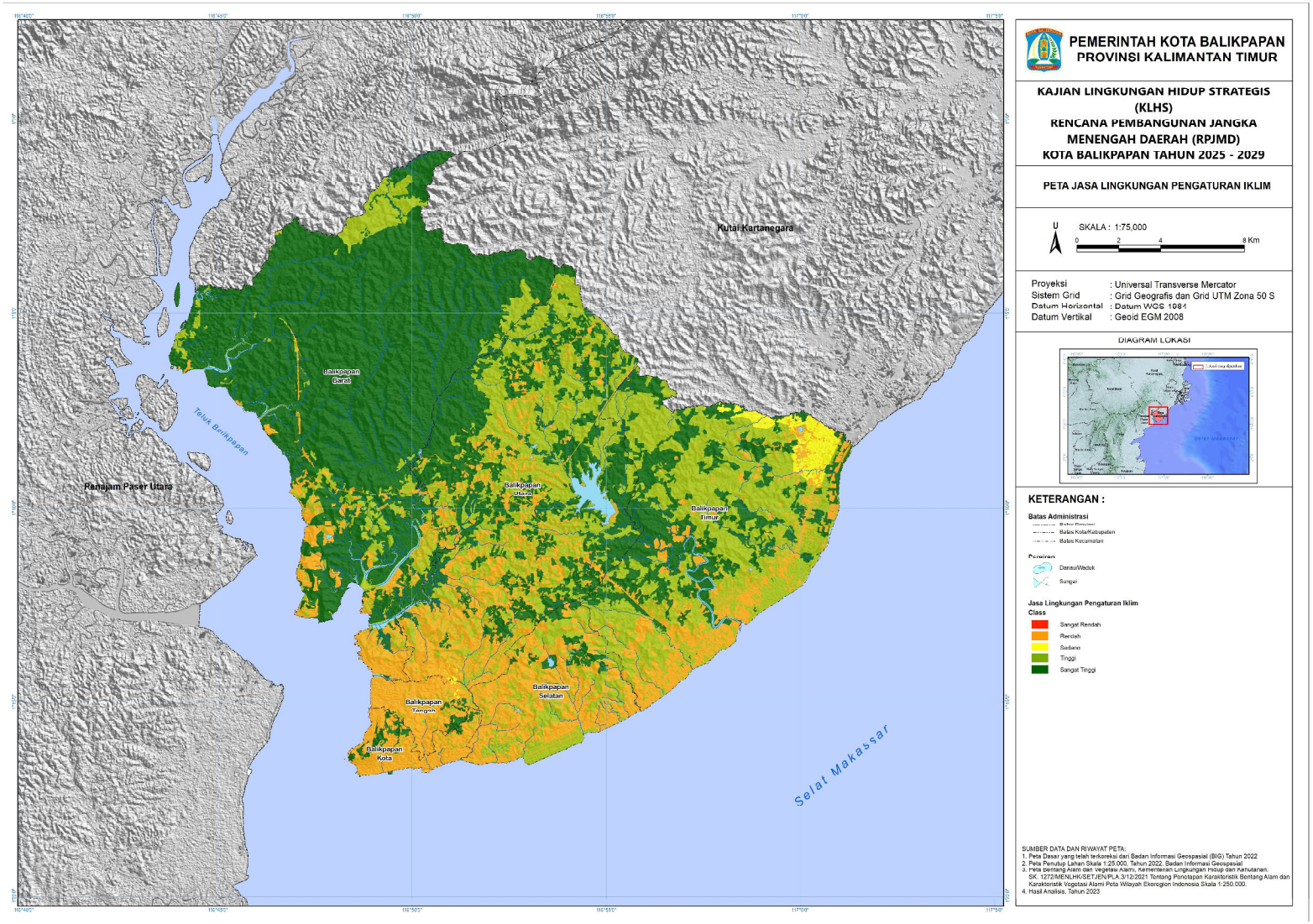
Tabel III.58 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	1.266,51		1.990,93	15.996,05	19.253,49
2	Balikpapan Kota	871,57		58,70	156,37	1.086,65
3	Balikpapan Selatan	2.143,46		1.455,79	256,33	3.855,58
4	Balikpapan Tengah	905,86	10,16	92,85	75,31	1.084,18
5	Balikpapan Timur	1.965,88	531,82	5.922,42	3.322,48	11.742,59
6	Balikpapan Utara	2.809,34	11,36	5.922,80	5.170,48	13.913,99
	Grand Total	**9.962,63**	**553,34**	**15.443,48**	**24.977,03**	**51.101,24**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.52 Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan



Gambar 3.53 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan Tahun 2023

Bila dilihat dari sistem informasi data indeks kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat bahwa Kota Balikpapan masuk kedalam kelas kerentanan sangat rendah dan rendah. Jelasnya dapat dilihat Pada **Tabel III.59** dan **Gambar 3.54** berikut.

Tabel III.59 Luasan SIDIK di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Kelas Kerentanan	Luas (Ha)
1	Balikpapan Barat	Sangat Rendah	19.258,96
2	Balikpapan Kota	Rendah	1.087,11
3	Balikpapan Selatan	Sangat Rendah	3.856,99
4	Balikpapan Tengah	Sangat Rendah	1.084,26
5	Balikpapan Timur	Sangat Rendah	11.752,44
6	Balikpapan Utara	Sangat Rendah	13.913,99

Sumber : Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan tahun 2022

Mengenai Bahaya yang terkait dengan perubahan iklim di Kota Balikpapan diantaranya yaitu bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Bahaya Cuaca Ekstrim, Bahaya Longsor, Bahaya Banjir, Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Bahaya Kekeringan, Jelasnya akan di jabarkan sebagai berikut.

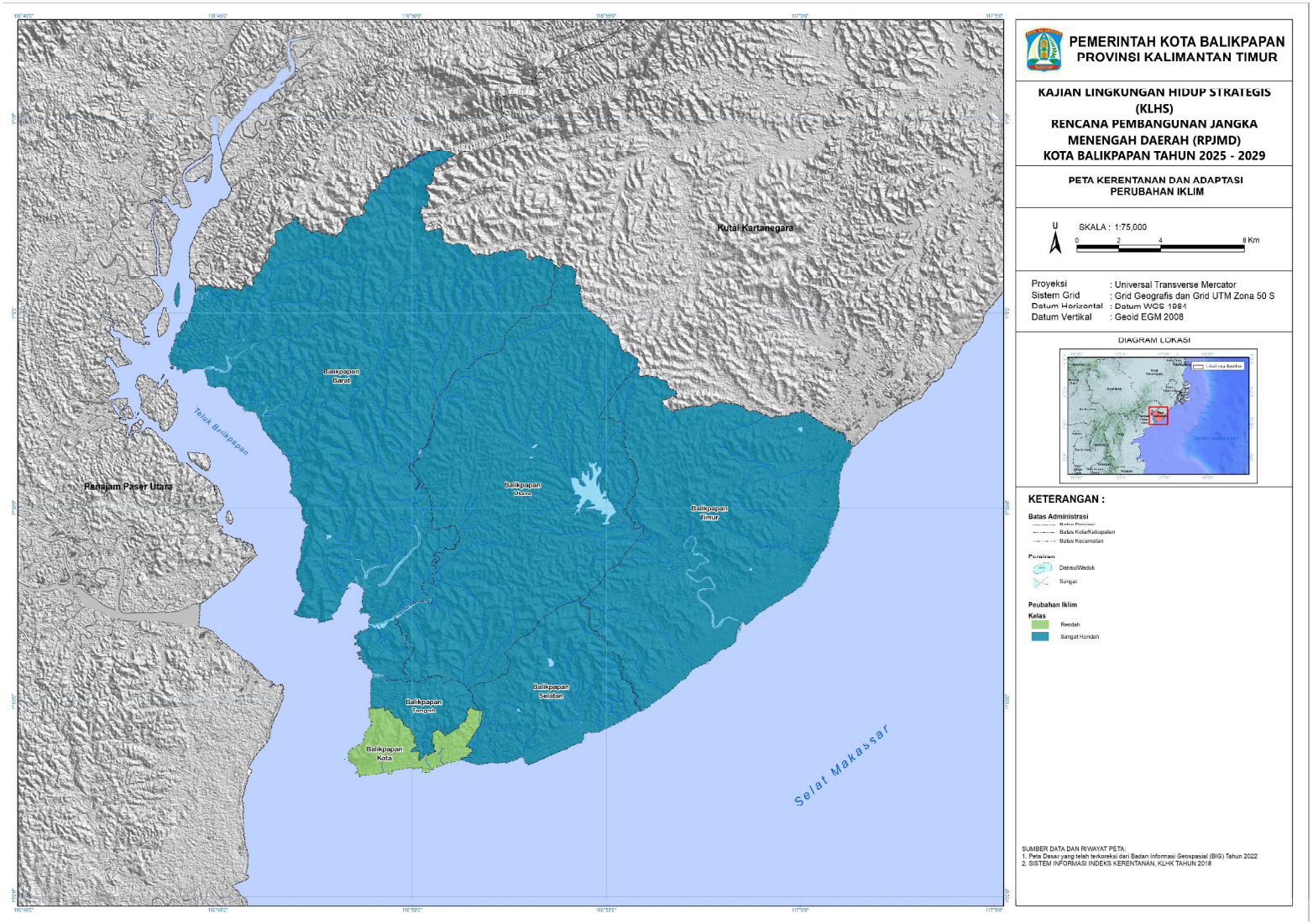
1. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

   Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008). Di Kota Balikpapan kebakaran hutan dan lahan masuk kedalam dominasi bahaya sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat Pada **Tabel III.60** dan **Gambar 3.55** berikut.

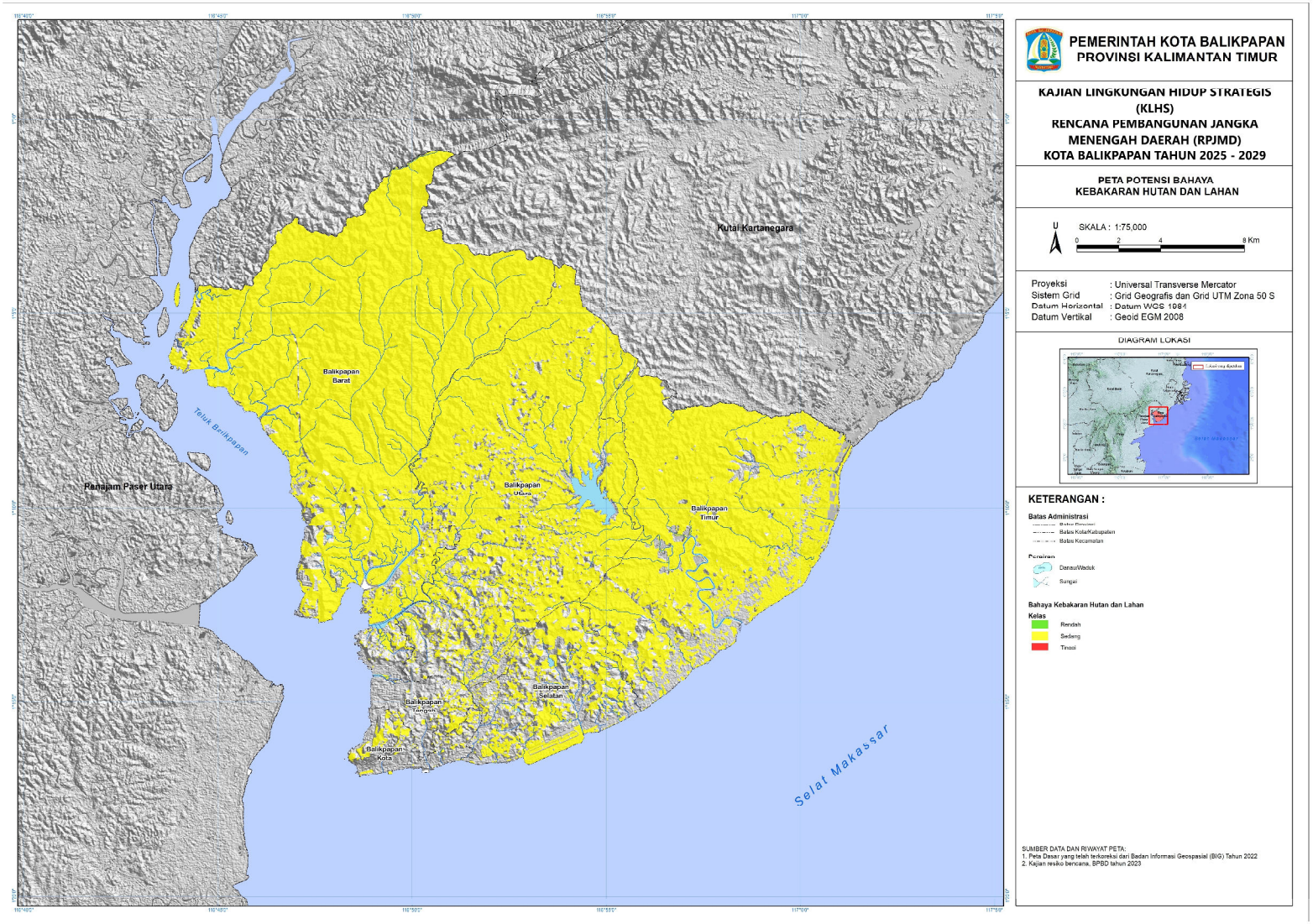
Tabel III.60 Luasan Bahaya Karhutla di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Tingkat Bahaya		Grand Total (Ha)
		Tidak Terjadi	Sedang	
1	Balikpapan Barat	1684,17	17553,37	19237,53
2	Balikpapan Kota	869,30	214,42	1083,72
3	Balikpapan Selatan	2189,71	1665,09	3854,80
4	Balikpapan Tengah	911,28	172,62	1083,89
5	Balikpapan Timur	2197,84	9543,67	11741,51
6	Balikpapan Utara	3213,35	10698,70	13912,05
	Grand Total	**11065,64**	**39847,87**	**50913,51**

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



Gambar 3.54 Peta SIDIK di Kota Balikpapan



Gambar 3.55 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Balikpapan

2. Bahaya Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Kota Balikpapan bila dilihat mempunyai resiko bahaya cuaca ekstrim sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat Pada **Tabel III.61** dan **Gambar 3.56** berikut.

Tabel III.61 Luasan Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Sedang	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	19.175,84	19.175,84
2	Balikpapan Kota	1.082,78	1.082,78
3	Balikpapan Selatan	3.855,27	3.855,27
4	Balikpapan Tengah	1.082,93	1.082,93
5	Balikpapan Timur	11.740,28	11.740,28
6	Balikpapan Utara	13.912,14	13.912,14
	Grand Total	**50.849,25**	**50.849,25**

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023

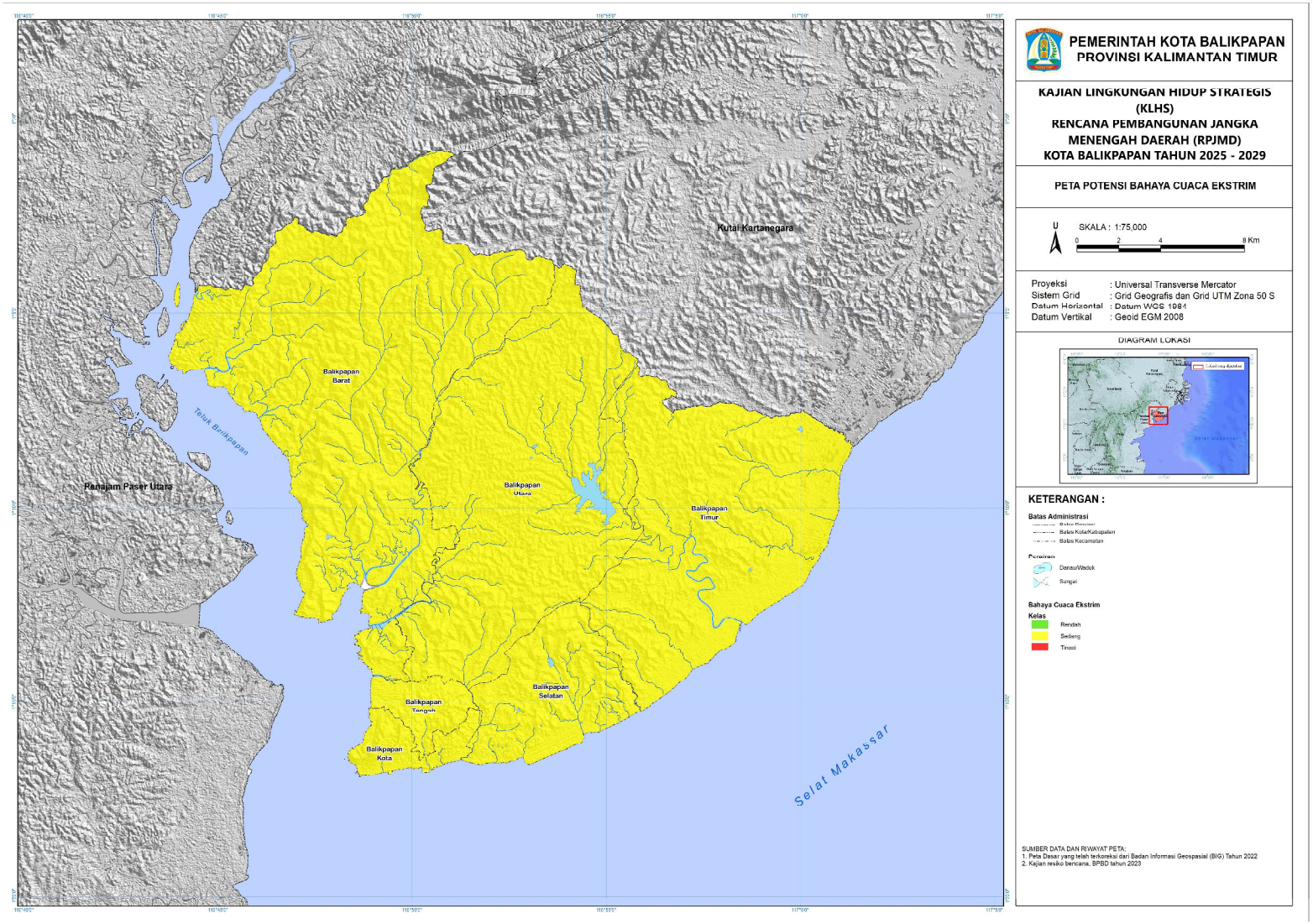
3. Bahaya Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Kota Balikpapan masuk kedalam bahaya tanah longsor dengan tingkat resiko rendah dan sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat Pada **Tabel III.62** dan **Gambar 3.57** berikut.

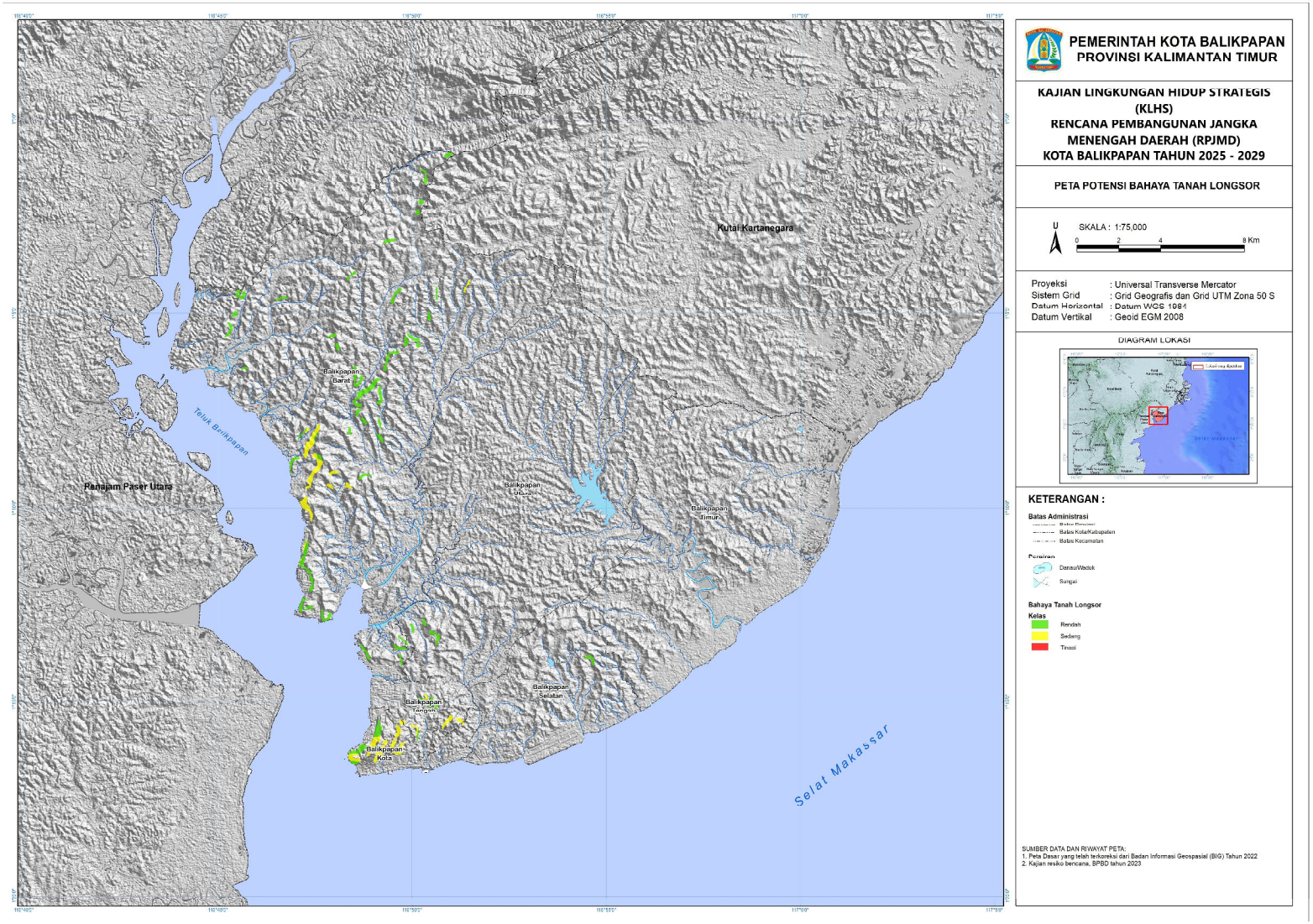
Tabel III.62 Luasan Bahaya Longsor di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Tingkat Resiko		Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	
1	Balikpapan Barat	375,15	127,92	503,07
2	Balikpapan Kota	42,00	104,78	146,78
3	Balikpapan Selatan	8,50	0,06	8,56
4	Balikpapan Tengah	20,91	25,18	46,09
5	Balikpapan Utara	23,52		23,52
	Grand Total	**470,08**	**257,93**	**728,01**

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



Gambar 3.56 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Balikpapan



Gambar 3.57 Peta Bahaya Longsor di Kota Balikpapan

4. Bahaya Banjir

Banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Di Kota Balikpapan bahaya banjir menjadi salah satu bencana yang sering terjadi, dapat dilihat bahwa tingkat resiko bencana banjir yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari resiko Rendah dengan total luas 169,68 ha, resiko sedang 6560,92 ha, dan resiko tinggi 5512,65 ha, yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat Pada **Tabel III.63** dan **Gambar 3.58** berikut.

Tabel III.63 Luasan Bahaya Banjir di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Tingkat Resiko			Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Balikpapan Barat	20,56	2456,99	1524,72	4002,27
2	Balikpapan Kota		91,01	63,36	154,37
3	Balikpapan Selatan	2,00	533,21	265,92	801,14
4	Balikpapan Tengah		268,55	67,58	336,13
5	Balikpapan Timur	134,19	2210,02	2062,57	4406,78
6	Balikpapan Utara	12,93	1001,13	1528,50	2542,56
	Grand Total	**169,68**	**6560,92**	**5512,65**	**12243,26**

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023

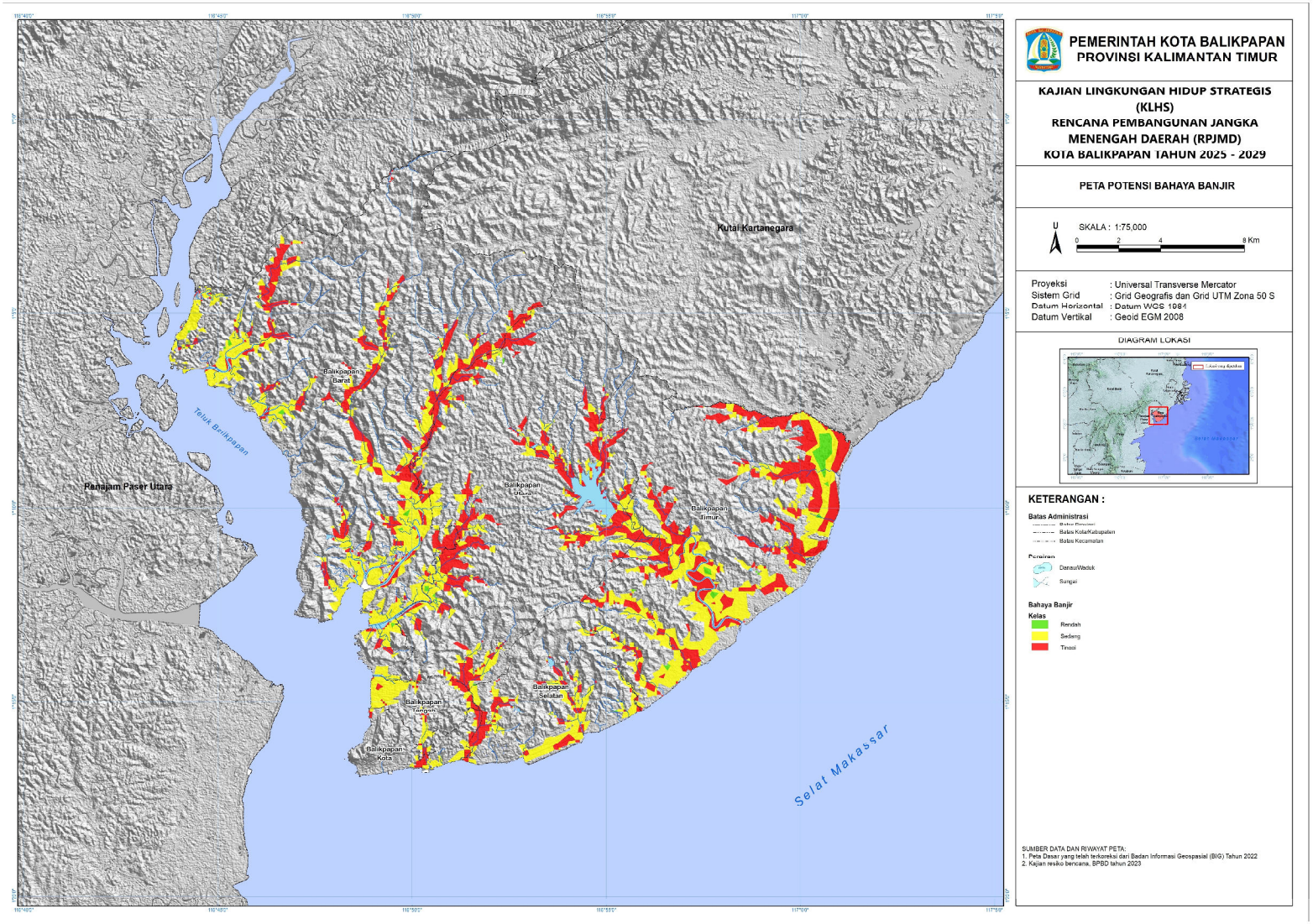
5. Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang pasang ekstrem atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efekk terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi atau kata lain biasa disebut erosi pantai. Kota Balikpapan masuk kedalam rawan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dengan tingkat resiko bahaya sedang yang tersebar di lima (5) kecamatan di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat Pada **Tabel III.64** dan **Gambar 3.59** berikut.

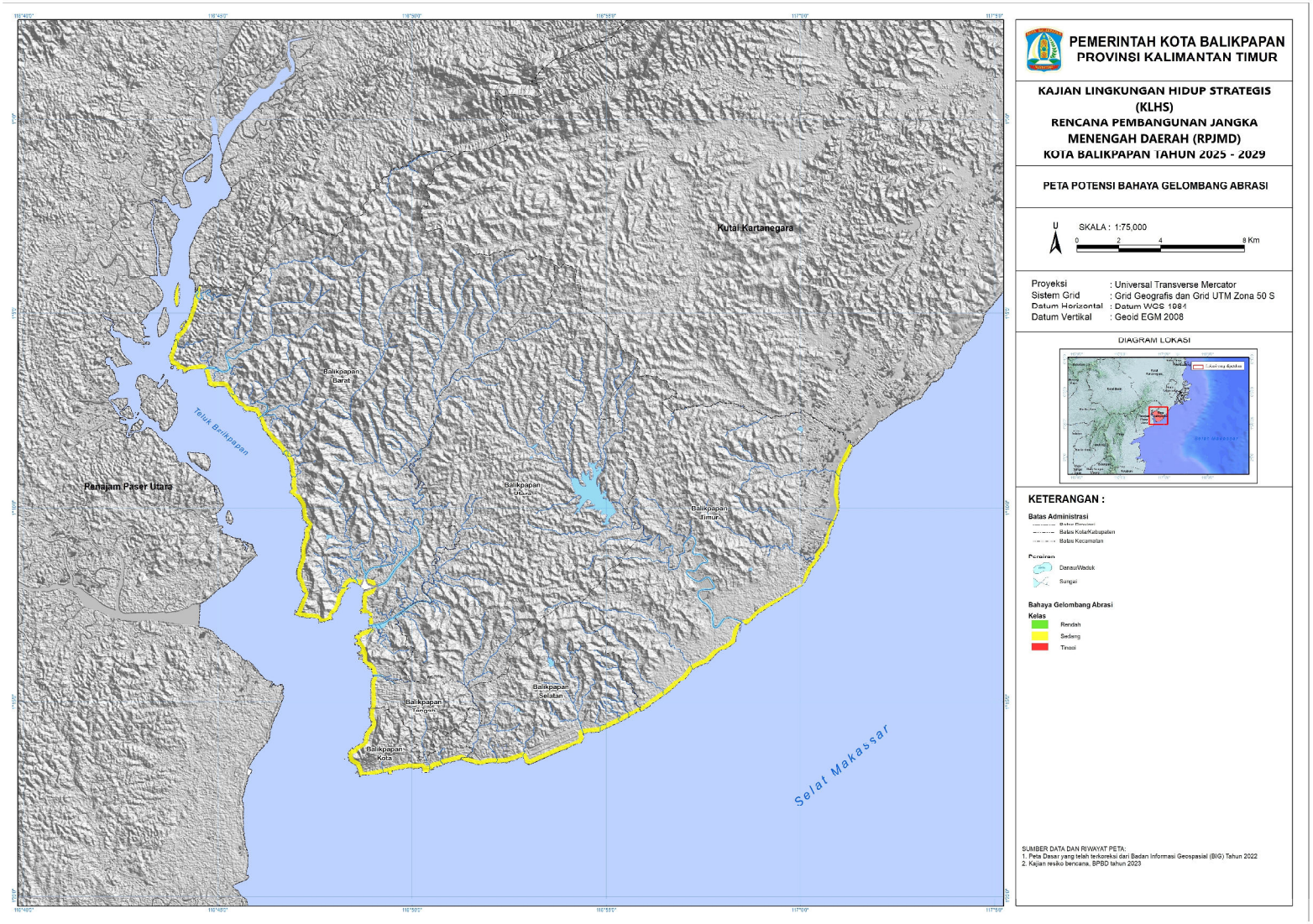
Tabel III.64 Luasan Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Tingkat Resiko	Grand Total (Ha)
		Sedang	
1	Balikpapan Barat	611,54	611,54
2	Balikpapan Kota	180,05	180,05
3	Balikpapan Selatan	190,43	190,43
4	Balikpapan Tengah	30,97	30,97
5	Balikpapan Timur	300,60	300,60
	Grand Total	**1313,60**	**1313,60**

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



Gambar 3.58 Peta Bahaya Banjir di Kota Balikpapan



Gambar 3.59 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan

6. Bahaya Kekeringan

Kekeringan secara umum adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Untuk bahaya kekeringan di Kota Balikpapan masuk kedalam resiko bahaya kekeringan sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat Pada **Tabel III.65** dan **Gambar 3.60** berikut.

Tabel III.65 Luasan Bahaya Kekeringan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Sedang	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	19048,76	19048,76
2	Balikpapan Kota	1061,58	1061,58
3	Balikpapan Selatan	3848,00	3848,00
4	Balikpapan Tengah	1074,37	1074,37
5	Balikpapan Timur	11728,76	11728,76
6	Balikpapan Utara	13902,68	13902,68
	Grand Total	**50664,14**	**50664,14**

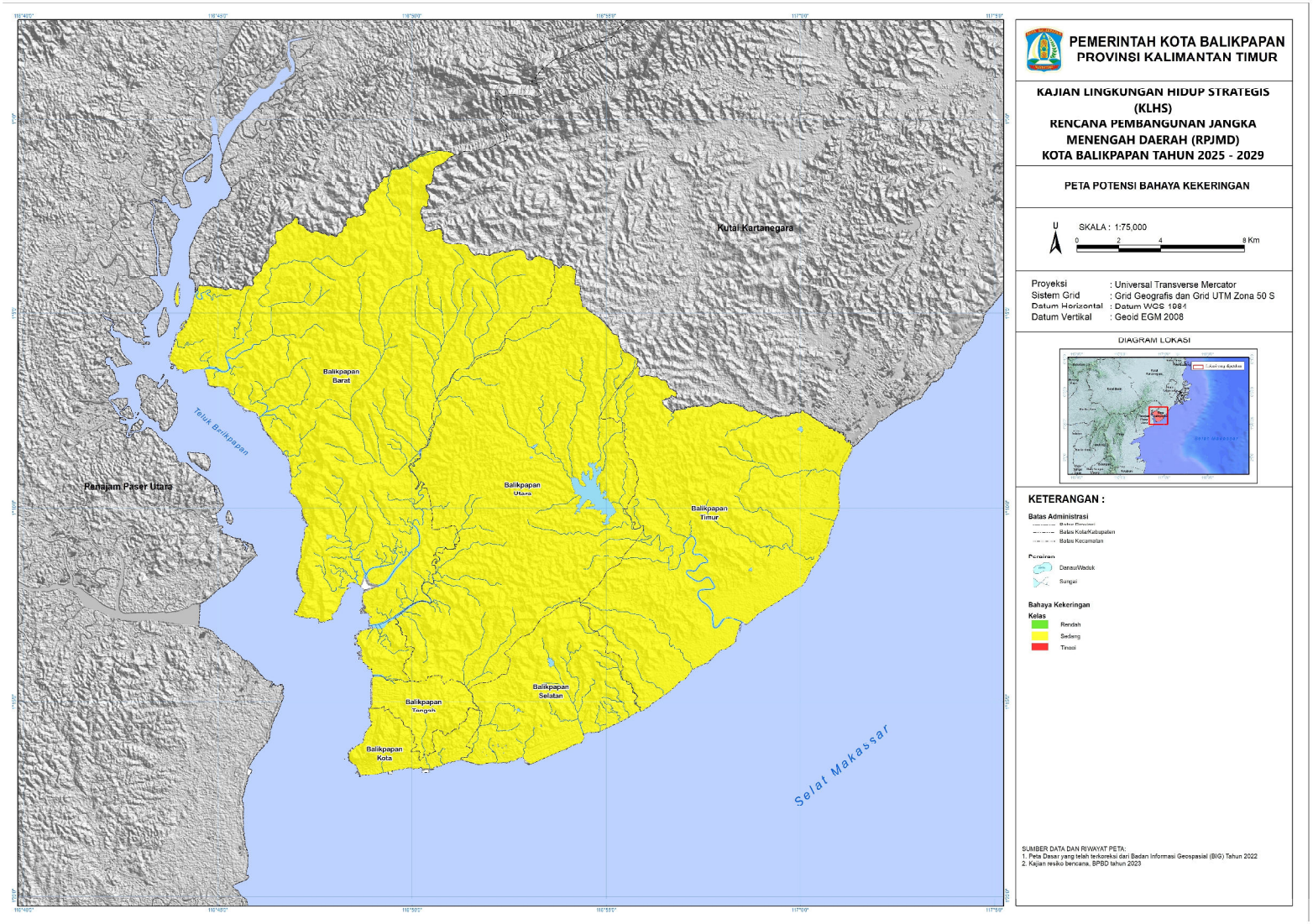
Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023

Dari seluruh bahaya bencana yang ada di Kota Balikpapan bila dilihat secara multi bencana masuk kedalam tingkat resiko bahaya rendah dan sedang. Jelasnya dapat dilihat Pada **Tabel III.66** dan **Gambar 3.61** berikut.

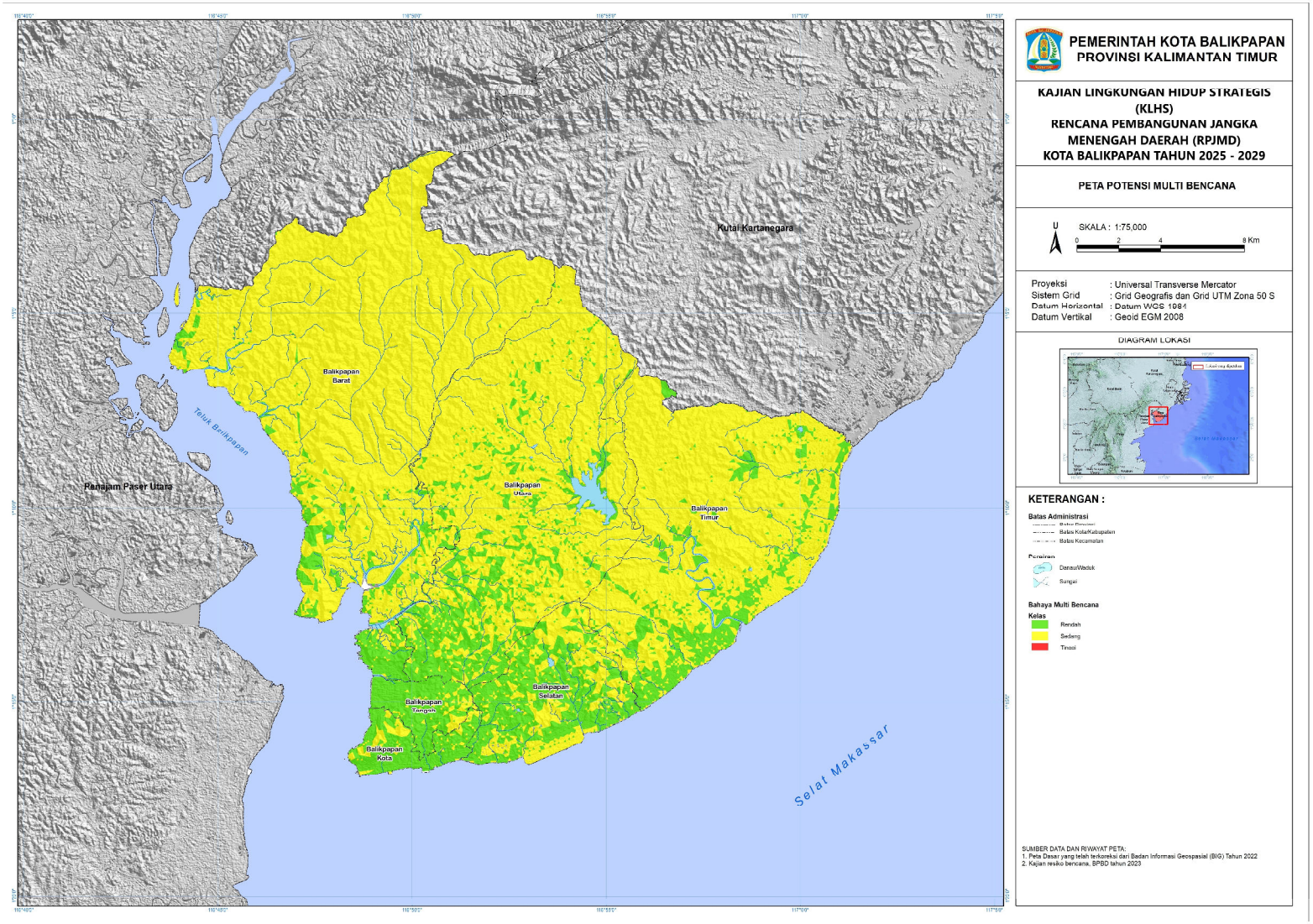
Tabel III.66 Luasan Bahaya Multi Bencana di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Sedang	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	19048,76	19048,76
2	Balikpapan Kota	1061,58	1061,58
3	Balikpapan Selatan	3848,00	3848,00
4	Balikpapan Tengah	1074,37	1074,37
5	Balikpapan Timur	11728,76	11728,76
6	Balikpapan Utara	13902,68	13902,68
	Grand Total	**50664,14**	**50664,14**

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



Gambar 3.60 Peta Bahaya Kekeringan di Kota Balikpapan



Gambar 3.61 Peta Multi Bahaya di Kota Balikpapan

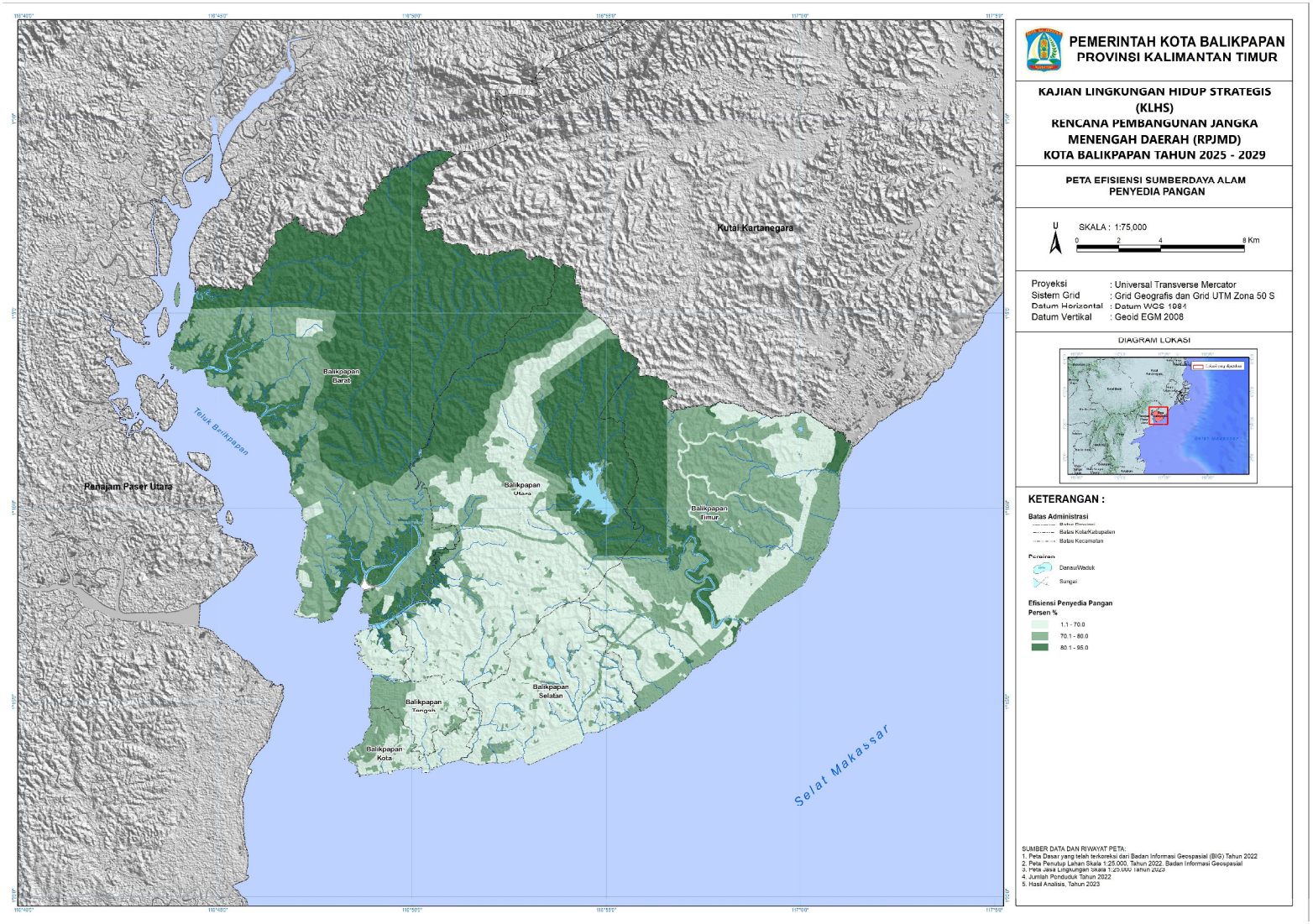
3.2.7 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk melihat seberapa optimal sumberdaya alam telah dimanfaatkan. Salah satunya, efisisensi pemanfaatan dapat dinilai dari kondisi pola ruang/penutup lahan yang diinginkan dibandingkan terhadap penutup lahan faktual. Efisiensi dihitung dengan menggunakan perbandingan antara hasil kali luas dan nilai Indeks Jasa Lingkungan (IJE) setiap pola ruang dengan luas maksimum dan nilai IJE maksimum di setiap pola ruang. IJE yang digunakan dalam pemanfaatan efisiensi adalah penyedia pangan dan pengaturan tata air. Untuk perhitungan luasan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kota Balikpapan terdiri dari EF Penyedia Panganm EF Penyedia Air dan EF pengaturan tata aliran air dan bajir yang di overlay dengan pola ruang yang menghasilkan yaitu untuk EF penyedia pangan sebesar 95,02%, untuk EF Penyedia Air sebesar 71,26% dan EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 89,21%. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.67** dan **Gambar 3.62** sampai dengan **Gambar 3.64** dibawah ini.

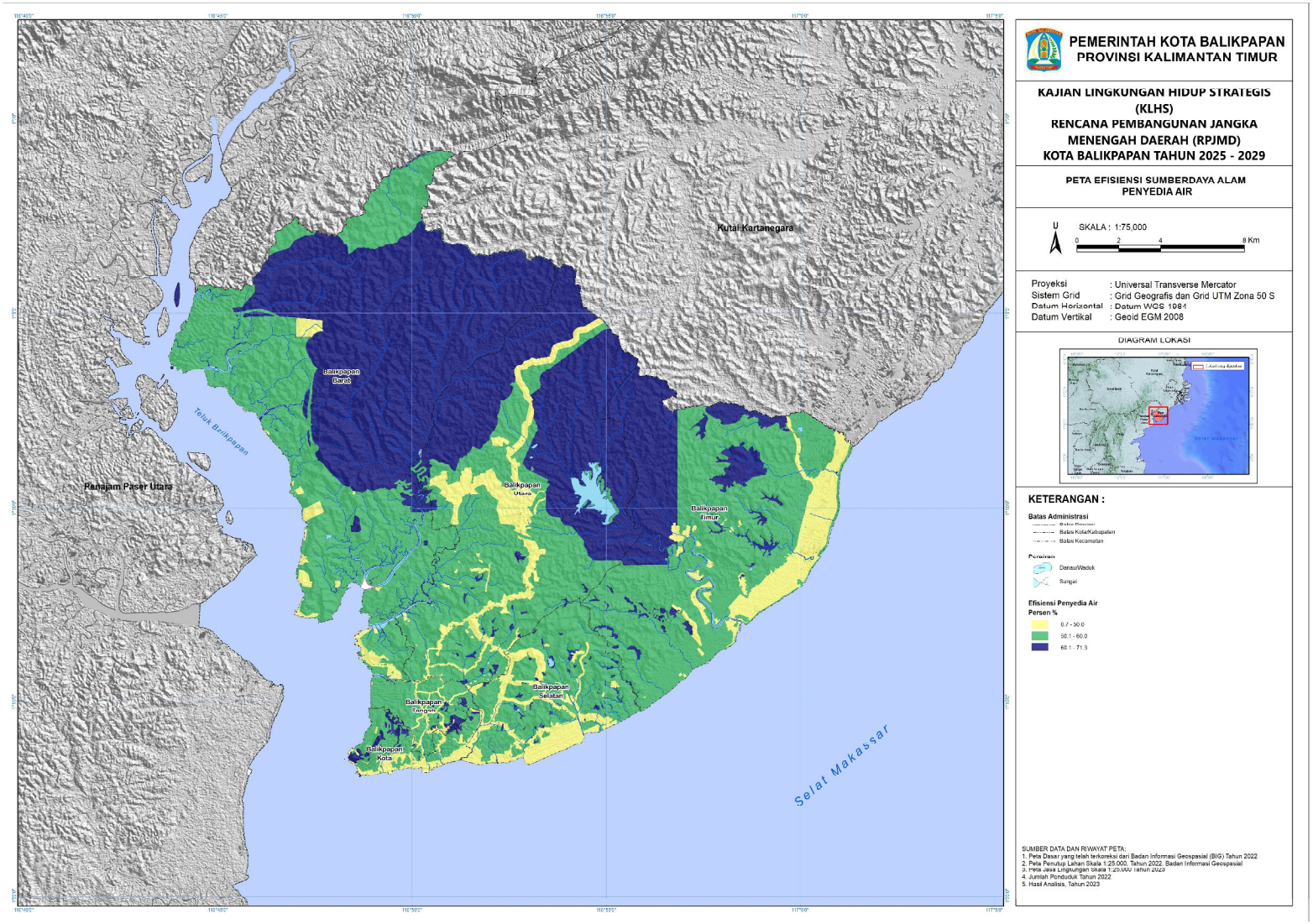
Tabel III.67 Luasan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pangan, Air dan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan

Rencana Pola Ruang	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (%)		
	EF Penyedia Pangan	EF Penyedia Air	EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
Badan Air	79,68	71,26	75,49
Badan Jalan	73,06	55,79	65,00
Kawasan Campuran	1,14	0,71	0,77
Kawasan Ekosistem Mangrove	94,26	52,19	76,26
Kawasan Hutan Produksi Tetap	83,08	55,25	76,01
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	71,75	53,27	60,58
Kawasan Pariwisata	71,22	44,61	55,87
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	57,93	42,32	43,98
Kawasan Perdagangan dan Jasa	66,46	47,42	51,00
Kawasan Perikanan Budi Daya	85,48	44,70	62,81
Kawasan Perkantoran	79,37	57,77	76,00
Kawasan Perkebunan	77,81	56,29	59,46
Kawasan Perlindungan Setempat	71,35	53,44	63,46
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	69,36	47,56	56,80
Kawasan Perumahan	67,94	50,03	51,89
Kawasan Peruntukan Industri	75,61	53,85	68,27
Kawasan Peternakan	81,21	67,33	89,21
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	22,70	14,77	15,13
Kawasan Tanaman Pangan	68,13	68,17	73,94
Kawasan Transportasi	60,37	36,34	37,56
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	84,26	63,30	81,93
Pemakaman	74,49	49,97	55,45
Rimba Kota	79,76	60,68	72,07
Suaka Margasatwa	95,02	54,73	79,78
Taman Kelurahan	65,96	39,67	40,58
Taman Kota	54,07	39,16	46,22
Grand Total	**95,02**	**71,26**	**89,21**

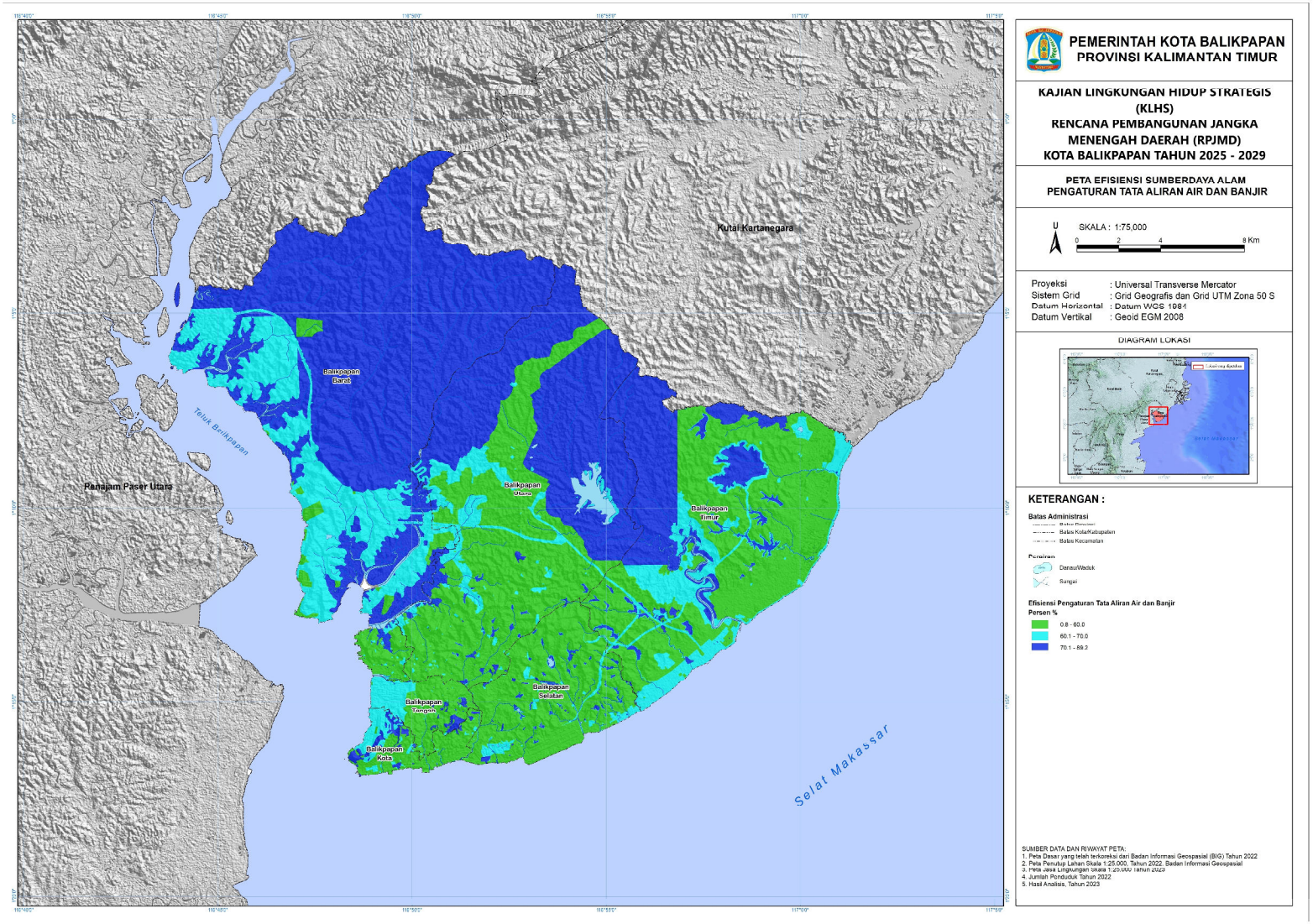
Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.62 Peta EF Penyedia Pangan di Kota Balikpapan



Gambar 3.63 Peta EF Penyedia Air di Kota Balikpapan



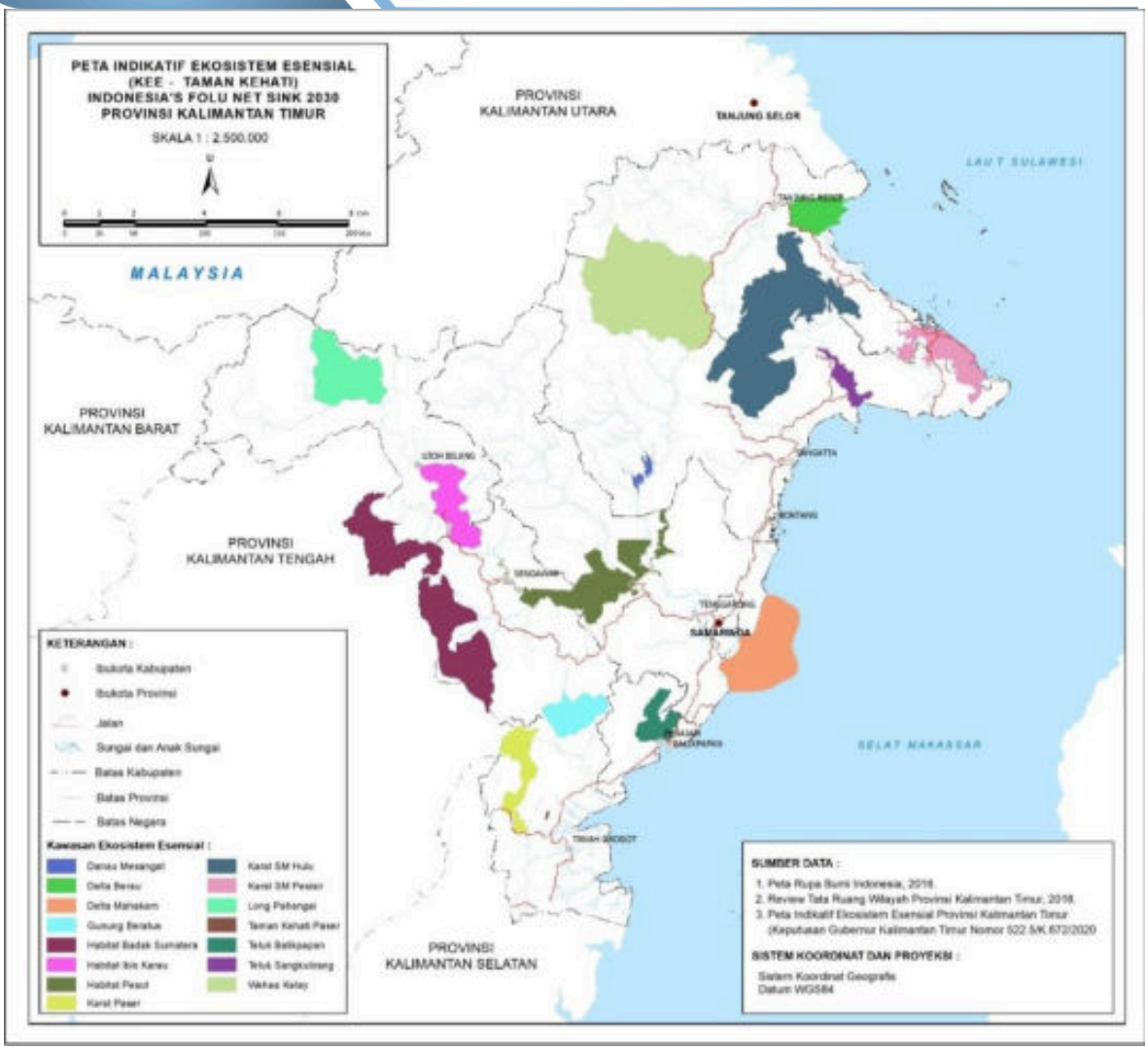
Gambar 3.64 Peta EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan

3.2.8 Keanekaragaman Hayati

Menurut Dokumen RIP Keanekaragaman Hayati Tahun 2024-2029 dijelaskan bahwa di Kota Balikpapan terdapat sumber-sumber keanekaragaman hayati terrestrial maupun perairan (lahan basah). Setidaknya di Kota Balikpapan terdapat beberapa catatan penting terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah. Tetapi terdapat beberapa poin penting yang harus disampaikan dalam dokumen ini terkait keanekeragaman hayati di Kota Balikpapan, seperti

1) Tipe hutan tropis Kalimantan berupa hutan tropis dataran rendah, hutan mangrove, hutan pantai, padang lamun dan terumbu karang.
2) Terdapat spesies penting baik alami maupun dari program penyelamatan satwa liar.
3) Terdapat Kawasan Ekosistem penting dan tercatat sebagai Kawasan Ekosistem Esensial di Kalimantan Timur, yaitu KEE Teluk Balikpapan
4) Terdapat inisiatif dan komitmen yang sejalan dengan Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dan Kebijakan Nasional, seperti Perubahan Iklim, Pengelolaan Hutan Lestari, dan lain-lain, serta kerjasama parapihak
5) Hutan Lindung Sungai Wain merupakan salah satu contoh pengelolaan hutan lindung terbaik namun perhatian maksimal dan kerjasama aktif karena pengelolaannya saat ini tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 522.5/K.672/2020 tentang Kawasan Ekosistem Esensial Indikatif dan Taman Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Timur terdapat terdapat 12 indikati Kawasan Ekosistem Esensial di Kalimantan Timur termasuk Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan. Berikut ini peta Kawasan Ekosistem Esensial di Kalimantan Timur Jelasnya dapat dilihat Pada **Gambar 3.65** berikut.



Gambar 3.65 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kalimantan Timur (KEE Teluk Balikpapan)

Teluk Balikpapan berada di lintas wilayah administrasi dan bermuara wilayah Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Secara ekologis kawasan ini penting karena memiliki jasa lingkungan penting dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan status belum terlampaui serta tempat beberapa ekosistem dan spesies spesifik. Terdapat ekosistem hutan tropis dataran rendah Kalimantan yang kaya akan keanekaragaman hayati, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun dan terumbu karang. Sementar spesies penting di kawasan ini, seperti Dugong *(Dugong dugon)*, Pesut *(Orcaella brevirostris)*, Bekantan *(Nasalis larvatus)*, Buaya Muara *(Crocodylus porosus)*, Penyu hijau *(Chelonia mydas)*, berbagai spesies ikan dan satwa liar daratan lainnya.

Ekosistem hutan tropis dataran rendah terbaik dan juga berada DAS Teluk Balikpapan adalah Hutan Lindung Sungai Wain. Hutan Lindung Sungai Wain menyimpan banyak sekali spesies penting Kalimantan dari spesies primata, carnivore, burung hingga ampibi dan reptil ciri khas hutan tropis dataran rendah, seperti Orangutan *(Pongo pygmaeus)*, Lutung Dahi Putih *(Presbytis frontata)*, Lutung Merah *(Presbytis rubicunda)*, Beruang Madu *(Helarctos malayanus)*, Macan Dahan *(Neofelis diardi)*, Kucing Batu *(Pardofelis marmorata)*, Kucing Merah *(Pardofelis badia)*, dan banyak mamalia lainnya. Demikian pula dengan spesies

burung yang relatif lengkap, seperti beberapa spesies rangkong Rangkong Badak *(Buceros rhinoceros),* Sempidan Kalimantan *(Lophura bulweri),* Kuau Raja *(Argusianus argus),* Kuau Kerdil Kalimantan *(Polyplectron schleiermacheri),* dan banyak lagi spesies burung lainnya.

Secara ekosistem dan bentang alam lainnya tentu terdapat beberapa area yang mewarnai kondisi status keanekaragaman hayati di Balikpapan, seperti ekosistem pantai yang berada di pesisir selatan Kota Balikpapan, yang juga sering ditemukan berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Selain itu juga terdapat kawasan penyelamatan satwa dan pendidikan lingkungan hidup (KWPLH) serta Kebun Raya Balikpapan yang menjadi kawasan untuk pendidikan lingkungan dan koleksi tumbuhan alami.

Di Kota Balikpapan tidak ada perizinan berbasis lahan yang memiliki dampak atau daya rusak yang vital, seperti umumnya di Kabupaten Kota di Kalimantan, seperti perizinan pertambangan batu bara atau perkebunan pada skala luas. Sejak lama Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota yang ramah lingkungan dan keanekaragaman hayati. Namun tentu perlu kesungguhan dalam pengelolaan baik perlindungan dalam tata ruang, hingga mencari peluang pemanfaatan lestari dan berkelanjutan.

Oleh karenanya beberapa keanekaragaman hayati penting yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas untuk dikelola di Kota Balikpapan menurut kelompok keaneragaman hayati pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 seperti berikut ini :

1) Lansekap, yaitu
    a. Teluk Balikpapan
    b. Bagian Koridor Selatan IKN
2) Ekosistem, Hutan Lindung, dan Kelola Kehati, seperti :
    a. Ekosistem Mangrove
    b. Ekosistem Padang Lamun
    c. Ekosistem Terumbu Karang
    d. Ekosistem Pantai
    e. Ekosistem Dataran Rendah
    f. Hutan Lindung Sungai Wain dan Sungai Manggar
    g. Kawasan Wisata dan Pendidikan Lingkungan Hidup
3) Spesies Penting dan Prioritas, seperti :
    a. Orangutan (Pongo pygmaeus)
    b. Bekantan (Nasalis larvatus)
    c. Beruang Madu (Helarctos malayanus)
    d. Dugong (Dugong dugon)
    e. Pesut (Orcaella brevirostris)
    f. Berbagai spesies burung migran
4) Genetik, seperti :
    a. Jahe Balikpapan

5) Kawasan Kelola Masyarakat, seperti :
   a. Area Hutan Kemasyarakatan (HKm)
   b. Area Mangrove
   c. Pemanfaat Kehati Berkelanjutan

Mengenai beberapa spesies penting di Hutan Lindung Sungai wain Kota Balikpapan diantaranya:

1. Bekantan (Nasalis larvatus) (kiri),
2. Orangutan (Pongo pygmaeus) (tengah atas),
3. Beruang Madu (Helarctos malayanus) (tengah tengah),
4. Kuau Raja (Argusianus argus) (tengah bawah),
5. Trenggiling (Manis javanica) (kanan atas),
6. Kucing Merah (Pardofelis badia) (kanan tengah) dan
7. Kucing Tandang (Prionailurus planiceps) (kanan bawah) (Sumber: ProNature dan Gabriella Fredrikson).



Sumber : Dokumen RIP Kehati Kota Balikpapan Tahun 2024-2029

Gambar 3.66 Beberapa spesies penting di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan

Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan di dominasi pada kelas jasa Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.68** dan **Gambar 3.67** dibawah ini.

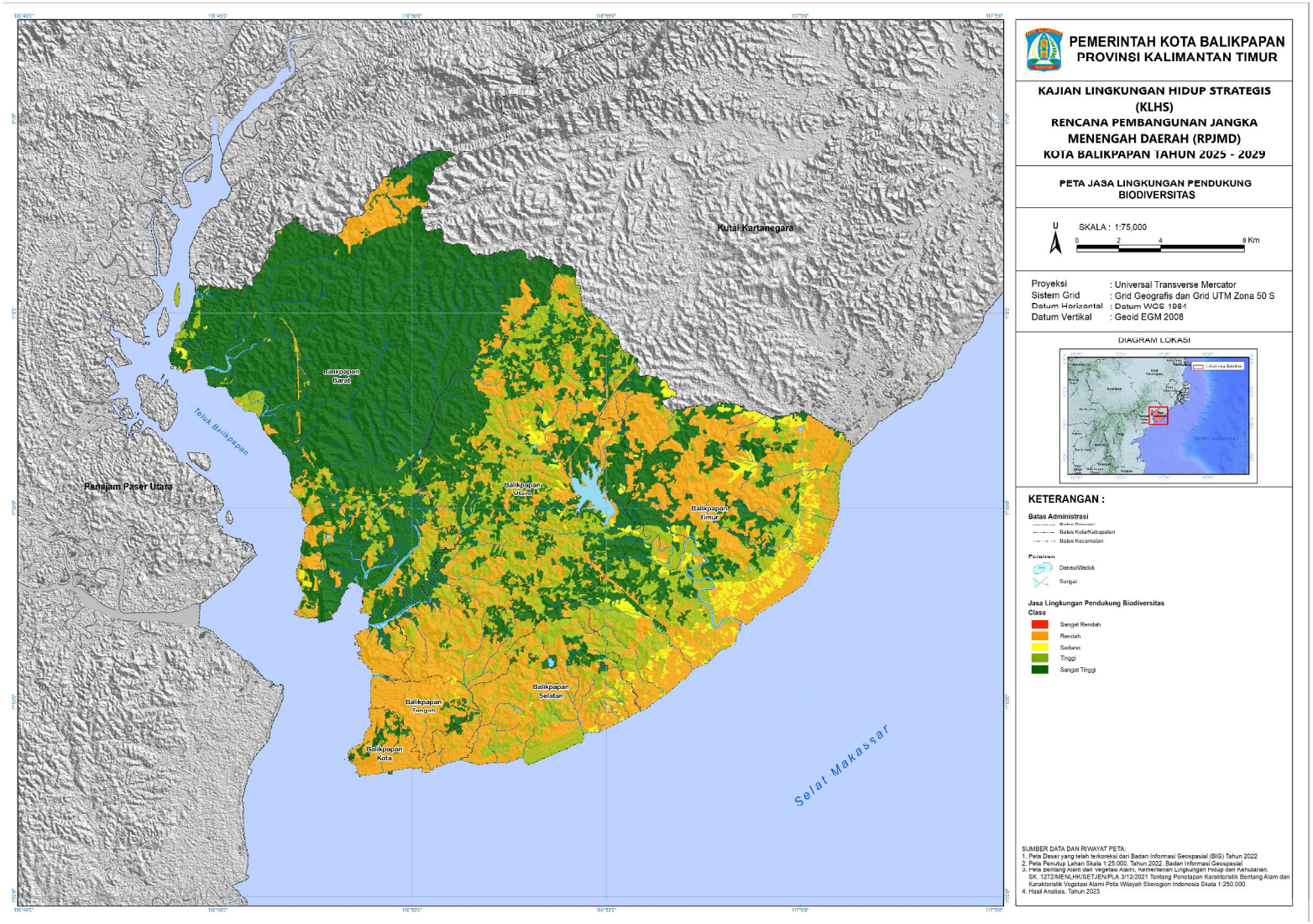
Tabel III.68 Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	2.050,95	49,05	954,92	16.198,56	19.253,49
2	Balikpapan Kota	872,80		56,97	156,88	1.086,65
3	Balikpapan Selatan	2.157,70	85,08	1.326,03	286,77	3.855,58
4	Balikpapan Tengah	906,83	10,16	88,39	78,80	1.084,18
5	Balikpapan Timur	5.255,40	1.154,12	2.684,87	2.648,20	11.742,59
6	Balikpapan Utara	4.374,57	256,57	4.069,51	5.213,35	13.913,99
	Grand Total	**15.618,25**	**1.554,97**	**9.180,69**	**24.582,56**	**51.101,24**

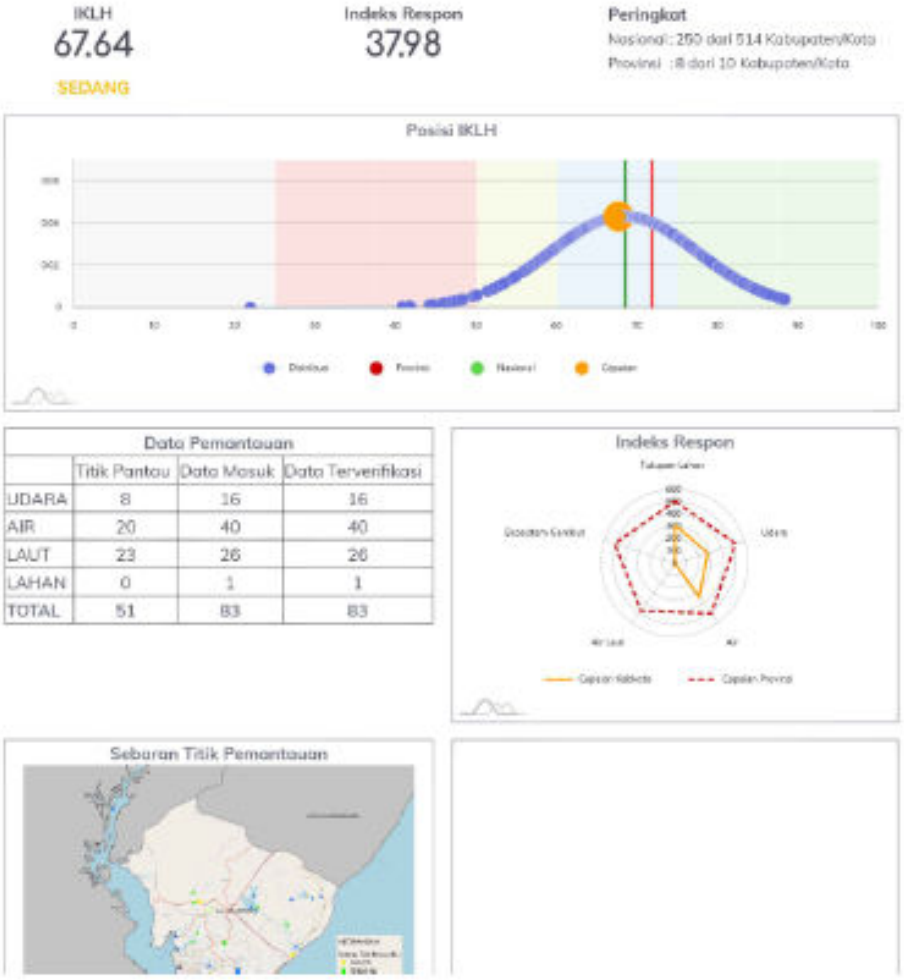
Sumber : Hasil Analisis, 2023

3.2.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu ukuran atau metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas lingkungan hidup suatu wilayah atau negara. IKLH biasanya mencakup berbagai aspek lingkungan hidup, termasuk kualitas udara, Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Lahan. Dibawah ini merupakan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023. Jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.68** dibawah ini.



Gambar 3.67 Peta Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan Tahun 2023



Gambar 3.68 Gambaran Informasi IKLH di Kota Balikpapan Tahun 2023

3.3 GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3.3.1 Kinerja Keuangan Kota Balikpapan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 mengubah pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tetap mengatur aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kinerja pencapaian pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah serta struktur dan akurasi

belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung). Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Untuk kinerja Pelaksanaan APBD Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu :

1. **Realisasi Pendapatan Daerah**

   Untuk realisasi pendapatan pemerintah Kota Balikpapan seperti pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba UMD, dan Penerimaan lain – lain dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuatif namun pada Tahun 2022 Pajak daerah yang diterima mengalami kenaikan dari Tahun 2021. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.69** dibawah ini.

Tabel III.69 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2019-2022

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba UMD	Penerimaan Lain-Lain	Jumlah
2019	565.627.071	55.709.878	16.870.675	126.325.777	764.533.401
2020	425.103.356	49.223.978	16.174.599	74.146.860	564.658.895
2021	537.513.232	43.032.708	17.906.485	83.252.098	681.704.525
2022	623.584.890	40.110.967	11.317.875	136.234.878	811.248.610
2023	715.879.767	52.194.433	42.960.450	81.781.004	892.815.654

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2024, BPS

Bila diprosentasikan masing – masing realisasi pendapatan di Kota Balikpapan masih bertumpu pada Pajak Daerah, atau pada tahun 2022 prosentasi pendapatan pemerintah Kota Balikpapan pajak daerah menyumbang sebesar 76,87 %, retribusi daerah 4,94%, bagian laba UMD 1,40% dan Penerimaan lain – lain sebesar 16,79 %. Jelasnya mengenai prosesntase realiasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Tabel III.70** dibawah ini.

Tabel III.70 Prosentase Realiasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 - 2022

Tahun	Pajak Daerah	Persentase (%)	Retribusi Daerah	Persentase (%)	Bagian Laba UMD	Persentase (%)	Penerimaan Lain-Lain	Persentase (%)	Jumlah
2019	565.627.071	73,98 %	55.709.878	7,29 %	16.870.675	2.21 %	126.325.777	16,52 %	764.533.401
2020	425.103.356	75,28 %	49.223.978	8,72 %	16.174.599	2,86 %	74.146.860	13,13 %	564.658.895
2021	537.513.232	78,85 %	43.032.708	6,31 %	17.906.485	2,63 %	83.252.098	12,21 %	681.704.525
2022	623.584.890	76,87 %	40.110.967	4,94 %	11.317.875	1,40 %	136.234.878	16,79 %	811.248.610

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023, BPS

Bila dilihat mengenai realisasi pendapatan di Kota Balikpapan dibagi kedalam 3 bagian yaitu Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain pendaptan yang sah. Dapat dilihat pada **Tabel III.71** dibawah ini bahwa dana perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang pada Tahun 2022 berjumlah Rp. 1.504.953.615,- atau yang paling besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan dari Pendapatan Asli daerah dan Lain – Lain pendapatan yang sah.

Tabel III.71 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenisnya (ribu rupiah), 2019–2023

No	Jenis Pendapatan	Tahun (Rupiah)				
		2019	2020	2021 (unaudited)	2022	2023
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**764.553.400**	**764.087.241**	**716.389.341**	**811.248.611**	**966 621 225**
1.1	Pajak Daerah	565.627.071	565.236.192	537.513.233	623.584.890	715.203.480
1.2	Retribusi Daerah	55.709.878	55.653.797	43.867.680	40.110.967	52.553.529
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.870.674	16.870.674	17.906.485	11.317.876	42.960.450
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	126.325.776	126.326.576	117.101.943	163.234.878	155.903.765
2	**Dana Perimbangan**	**1.061.676.408**	**1.136.041.501**	**980.884.290**	**1.504.953.615**	**2 014 246 024**
2.1	Bagi Hasil Pajak	524.878.519	524.878.519	293.977.314	125.872.308	2.055.847.928
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	806.281.724	2.014.246.024
2.3	Dana Alokasi Umum	439.818.664	439.818.664	428.306.693	419.347.040	470.198.907
2.4	Dana Alokasi Khusus	96.979.225	-	57.754.108	153.452.543	209.152.299
3	**Lain - Lain Pendapatan Yang Sah**	**579.208.341**	**569.399.749**	**3.840.294**	**487.758.255**	
3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000	67.556.501	3.174.000	4.683.000	
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	298.759.062	298.759.062	666.294	381.760.182	509.462.665
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	120.899.279	46.534.186	-	44.427.677	41.601.904
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	156.550.000	156.550.000	148.314	56.666.000	96.250.000
3.6	Lainnya/Others	-	-	517.980	215.396	33.895
	Jumlah (Rp)	**2.405.418.150**	**2.469.528.492**	**2.163.488.055**	**2.803.954.481**	**3.373.560.406**

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2024, BPS

2. Belanja Daerah

Belanja dalam APBD dibagi menjadi dua jenis yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Jika dibandingkan dengan pendapatan, belanja di Kota Balikpapan selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.60** dibawah ini.

Tabel III.72 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2019–2022

No	Jenis Pendapatan	Tahun (Ribu Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**Belanja Tidak Langsung**	**868.514.654**	**979.352.869**	**967.721.740**	**883.366.523**	**1.053.856.062**
1.1	Belanja Pegawai	745.557.517	698.670.023	726.884.839	729.192.890	800.696.660
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
1.3	Belanja Subsidi	1.000.000	-	1.000.000	-	
1.4	Belanja Hibah	114.721.353	119.747.002	154.568.055	113.545.507	227.118.842
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.228.826	39.228.690	-	7.102.120	2.075.896
1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.141.232	1.271.220	-	-	1.500.000
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.865.726	120.435.934	85.268.846	33.526.006	22.464.664
2	**Belanja Langsung**	**1.539.947.317**	**1.165.854.862**	**1.407.300.076**	**1.792.932.260**	**2.201.597.028**
2.1	Belanja Pegawai	230.111.913	-	-	-	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	622.064.723	737.162.177	861.598.601	1.007.369.902	821.826.475
2.3	Belanja Modal	687.770.681	428.692.685	545.701.475	785.562.358	1.379.770.553
Jumlah (Rp)		**2.408.416.971**	**2.145.207.731**	**2.375.021.816**	**2.676.298.783**	**3.255.453.090**

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023, BPS

Bila dilihat dari proporsi prosentase antara belanja tidak langsung dan belanja langsung pada setiap tahun nya lebih besar belanja langsung dimulai pada Tahun 2019 dimana belanja tidak langsung sebesar 36,06 % dengan proporsi yang paling besar berdaa pada belanja pegawai sebesar 30,96 %, untuk belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 63,94 % dengan proporsi yang paling besar berada pada belanja barang dan jasa sebesar 25,83%, untuk Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 45,65 % sedangkan untuk belanja langsung sebesar 54,35%.

Pada Tahun 2021 untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 40,75% dan belanja tidak langsung sebesar 59,25% dimana proporsi yang terbesar untuk belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai sebesar 30,61 % sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar berada pada belanja barang dan jasa sebesar 59,25%.

Untuk prosentase pada tahun 2022 mengalami kenaikan untuk belanja langsung sebesar 66,99% atau naik 7,74% dari tahun 2021 dan proporsi yang terbesar pada belanja langsung yaitu belanja barang dan jasa sebesar 37,64% atau naik 1,36% dari tahun 2021, sedangkan untuk belanja tidak langsung pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 33,01 % atau turun sebesar -7,74% dari tahun 2021.

3.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing sebuah bangsa dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas daya pembangunan sebuah bangsa diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan wilayah. Indikator lain yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kemampuan daya beli, indeks pendidikan dan indeks kesehatan.

Selain kedua indikator di atas, dalam era globalisasi ini dalam rangka reformasi daya saing, untuk mengukur capaian peningkatan daya saing, *The World Economic Forum* setiap tahunnya telah menerbitkan sebuah indeks yang disebut Indeks Daya Saing. Indeks ini memiliki 114 indikator yang kemudian dikelompokan menjadi 12 pilar. Salah satu dari indikator tersebut adalah inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha *(business sophistication factors).*

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 97 060,15 milliar, meningkat pula bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka PDRB harga konstan ini dapat diturunkan menjadi laju pertumbuhan Kota Balikpapan, yang pada periode 2021-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,49 persen. Bila dirinci per kategori, kategori terbesar pada tahun 2023 berada pada Pengadaan Listrik dan Gas dengan capaian 15,23%.

Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.73** dan **Tabel III.74** berikut ini.

Tabel III.73 Laju Pertumbuhan PDR Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) di Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.98	-3.85	2.34	1.98	1,61
B.	Pertambangan dan Penggalian	6.06	-0.07	3.77	-4.84	1,66
C.	Industri Pengolahan	4.25	-1.06	4.56	4.69	6,19
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.40	7.73	3.89	4.45	15,23
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.92	6.32	1.88	6.43	4,99
F.	Konstruksi	10.38	5.59	5.07	-3.24	6,85
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.23	-3.07	7.08	8.42	5,66
H.	Transportasi dan Pergudangan	0.01	-13.89	2.24	15.91	10,79
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.17	-10.04	1.92	9.56	4,78
J.	Informasi dan Komunikasi	6.97	8.86	7.89	7.93	5,43
K.	Jasa Keuangan	3.77	2.20	2.94	8.91	9,96
L.	Real Estate	2.55	-1.16	0.16	2.19	2,93
M,N.	Jasa Perusahaan	3.48	-3.53	3.92	5.33	4,97
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.72	-5.46	1.58	8.48	6,81
P.	Jasa Pendidikan	4.58	5.07	1.09	2.05	3,96
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.82	27.49	10.69	4.89	5,86
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	9.06	-3.44	1.28	6.47	3,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**4.99**	**-0.91**	**4.56**	**4.96**	**6,49**

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2024 (BPS)

Tabel III.74 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Balikpapan Tahun 2019 - 2023 Menurut Lapangan Usaha (Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	783.118,57	752.931,32	770.543,55	785.369,68	798,41
B.	Pertambangan dan Penggalian	37.684,21	37.656,73	39.076,39	37.185,60	37,8
C.	Industri Pengolahan	47.381.670,80	46.877.785,28	49.014.821,09	51.315.174,24	54.532,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	76.027,20	81.902,24	85.086,57	88.876,75	102,42
E.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	59.026,26	62.757,80	63.934,81	68.045,58	71,44

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
F.	F. Konstruksi	10.497.732,05	11.084.167,31	11.646.022,83	11.268.748,09	12.040,82
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.970.883,60	6.757.018,53	7.235.431,54	7.844.556,64	8.288,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.277.655,96	5.405.994,30	5.527.050,52	6.406.269,54	7.097,48
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.341.582,59	1.206.931,44	1.230.154,74	1.347.790,15	1.412,21
J.	Informasi dan Komunikasi	2.974.248,84	3.237.909,36	3.493.220,02	3.770.314,31	3.975,20
K.	Jasa Keuangan	2.612.608,15	2.670.128,50	2.748.497,58	2.993.329,46	3.291,33
L.	Real Estate	1.417.880,50	1.401.437,25	1.403.667,74	1.434.419,68	1.476,41
M,N.	Jasa Perusahaan	214.752,26	207.173,56	215.291,98	226.766,54	238,03
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	994.195,72	939.939,35	954.811,42	1.035.751,99	1.106,28
P.	Jasa Pendidikan	1.137.683,76	1.195.361,44	1.208.434,40	1.233.191,98	1.282,07
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	433.098,06	552.151,62	611.164,30	641.041,18	678,6
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	583.565,49	563.464,84	570.681,06	607.610,01	630,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**83.793.414,03**	**83.034.710,87**	**86.817.890,55**	**91.104.441,42**	**97 060,15**

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2024 (BPS)

3.4.2 Infrastruktur Wilayah

Dibawah ini merupakan infrastruktur wilayah di Kota Balikpapan yang terdiri dari sarana dan prasarana.

1. Sarana Wilayah

A. <u>Sarana Pendidikan</u>

Jumlah dan sebaran sarana pendidikan di Kota Balikpapan berdasarkan data Tahun 2022 menurut BPS yaitu untuk TK dengan status negeri berjumlah 1 unit dan swasta 152 unit, SD dengan status negeri berjumlah 137 unit dan Swasta 55 Unit, MI dengan status negeri berjumlah 1 unit dan swasta berjumlah 25 unit, SMP dengan status negeri berjumlah 23 unit dan swasta 52 unit, MTS dengan status negeri 2 unit dan swasta 13 unit, SMA dengan status negeri 9 unit dan swasta 19 unit, SMK dengan status negeri 6 unit dan swasta 26 unit serta MA dengan status negeri 1 unit dan swasta 6 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.75** berikut

Tabel III.75 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Kecamatan/ Kelurahan	FASILITAS PENDIDIKAN (unit)															
		TK		SD		MI		SMP		MTS		SMA		SMK		MA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Balikpapan Barat		18	22	5	0	1	5	5	0	1	2	0	0	2	0	0
2	Balikpapan Kota		17	15	14	0	0	3	9	0	0	1	4	0	5	1	0
3	Balikpapan Selatan	1	42	15	17	0	6	4	16	0	1	2	3	3	5	0	0
4	Balikpapan Tengah		29	30	7	0	4	2	9	0	2	0	4	0	7	0	1
5	Balikpapan Timur		12	21	4	1	9	4	3	1	3	1	1	1	2	0	3
6	Balikpapan Utara		34	34	8	0	5	7	10	1	6	3	7	2	5	0	2
	Grand Total	**1**	**152**	**137**	**55**	**1**	**25**	**25**	**52**	**2**	**13**	**9**	**19**	**6**	**26**	**1**	**6**

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun Tahun 2023

Untuk perguruan tinggi yang ada di Kota Balikpapan berjumlah 15 unit adalah sebagai berikut :

1. STT Migas Balikpapan
2. Politeknik Negeri Balikpapan
3. Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan
4. Universitas Mulia
5. Akademi Bahasa Asing Balikpapan
6. STIE Madani Balikpapan
7. Poltekkes Kemenkes Kaltim Kampus C
8. Universitas Balikpapan
9. STIE Balikpapan
10. Akademi Kebidanan Borneo Medistra
11. STMIK Borneo Internasional
12. Akademi Kebidanan Bakti Indonesia
13. Universitas Tri Dharma
14. Institut Kristen Borneo
15. Institut Teknologi Kalimantan

B. Sarana Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang baik, murah, dan terjangkau oleh semua kalangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Lebih jauh, hal ini menjadi prasyarat tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah kota terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Keberadaan rumah sakit di Kota Balikpapan terus ditopang dengan sarana kesehatan yang sudah lazim dikenal masyarakat, yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Tercatat pada tahun 2022, di Kota Balikpapan terdapat 11 rumah sakit umum, 2 rumah sakit bersalin, 1 rumah sakit khusus mata dan 75 Klinik Pratama Kesehatan yang ditunjang dengan 34 posyandu dan 27 puskesmas yang terdiri dari 7 puskesmas rawat inap dan 20 puskesmas non rawat inap yang tersebar di tiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.76** berikut

Tabel III.76 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Kecamatan/ Kelurahan	FASILITAS KESEHATAN (unit)					
		RS	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Balikpapan Barat	0	1	2	6	2	5
2	Balikpapan Kota	2	0	4	4	0	5
3	Balikpapan Selatan	5	0	6	2	2	7
4	Balikpapan Tengah	2	1	4	6	0	6
5	Balikpapan Timur	1	0	1	4	2	4
6	Balikpapan Utara	1	0	4	5	2	6
	Grand Total	**11**	**2**	**21**	**27**	**8**	**33**

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun Tahun 2023

C. Sarana Peribadatan

Kegiatan keagamaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk yang berdasarkan kelompok agama, tetapi juga harus ditunjang oleh ketersediaan sarana peribadatan. Demikian halnya dalam penyediaan fasilitas peribadatan dapat terukur berdasarkan kelompok pemeluk suatu agama. Penduduk di Kota Balikpapan didominasi oleh pemeluk agama Islam, oleh karenanya fasilitas peribadatan di wilayah Kota Balikpapan tahun 2022 menurut data BPS juga didominasi oleh jenis peribadatan mesjid sebanyak 479 unit, mushollah sebanyak 286 unit, gereja sebanyak 162 unit dan gereja katolik 5 unit, pura 3 unit, vihara 8 unit dan klenteng 1 unit (lihat tabel jumlah persebaran fasilitas). Fasilitas peribadatan untuk kelompok agama lainnya berupa wihara, pura dan kuil masih belum banyak, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya populasi pemeluk agama tersebut, sehingga tidak mencapai standar fasilitas peribadatan yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.77** berikut

Tabel III.77 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan di Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Kecamatan/ Kelurahan	FASILITAS PERIBADATAN (unit)						
		Mesjid	Mushollah	G. Kristen	G. Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
1	Balikpapan Barat	52	34	6	1	0	0	0
2	Balikpapan Kota	56	7	24	0	1	4	1
3	Balikpapan Selatan	102	91	45	1	0	0	0
4	Balikpapan Tengah	61	62	28	1	0	3	0
5	Balikpapan Timur	71	42	23	1	0	0	0
6	Balikpapan Utara	137	50	36	1	2	1	0
	Grand Total	**479**	**286**	**162**	**5**	**3**	**8**	**1**

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun Tahun 2023

D. Sarana Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan jenis perdagangan berupa pasar di Kota Balikpapan terdapat 2 jenis pasar yaitu modern dan tradisional. Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota mempunyai jumlah fasiltas pasar modern terbanyak, Sedangkan Balikpapan Barat mempunyai jenis pasar tradisional terbanyak berupa pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Kampung Baru Tengah, Pasar Loak Besi Baru Tengah, Pasar Penampungan A, dan Pasar Pandan Sari. Untuk pasar sejak tahun 2016 pengelolaannya berada di Dinas Perdagangan. Selain fasilitas perdagangan di Kota Balikpapan terdapat juga kawasan pusat perbelanjaan (data BPS tahun 2023) mencatat terdapat 8 (delapan) pusat perbelanjaan yang rata-rata berada pada koridor jalan utama Jl. Jenderal Sudirman, Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Letjen Suprapto, Jl. Soekarno Hatta, Jl. MT. Haryono. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.78** dan **Tabel III.79** berikut.

Tabel III.78 Daftar Pusat Perbelanjaan di Kota Balikpapan, 2022

No	Nama Pusat Perbelanjaan	Alamat
1	Balikpapan Plaza	Jl. Jenderal Sudirman
2	Mall Fantasi Balikpapan Baru	Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru
3	Balikpapan Super Block	Jl. Jenderal Sudirman
4	Plaza Kebun Sayur	Jl. Letjen Suprapto
5	Plaza Rapak	Jl. Soekarno Hatta
6	Living Plaza	Jl. MT. Haryono
7	Balikpapan Ocean Square (BOS)	Jl. Jenderal Sudirman
8	Ramayana (Muara Rapak)	Jl. Soekarno Hatta

Sumber : BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel III.79 Daftar Nama Pasar Modern dan Tradisional Menurut Kecamatan, Tahun 2022

No	Kecamatan	NAMA PASAR	
		Modern	Tradisional
1	Balikpapan Selatan	Food Mart BSB	Pasar Sepinggan
		Hypermart Pentacity	
		Lottemart	
		Trans Mart	

No	Kecamatan	NAMA PASAR	
		Modern	Tradisional
		HeroMall Fantasy	
2	Balikpapan Timur		Pasar Teritip/ Gn Tembak
			Pasar Manggar
3	Balikpapan Utara	Robinson (Muara Rapak)	Pasar Buton KM 4,5
			Pasar Rakyat KM 12
			Pasar Batu Ampar
			Pasar Muara Rapak
			Pasar Segar
4	Balikpapan Tengah	-	-
5	Balikpapan Barat	Farmers Familly	Pasar Inpres Kebun Sayur
			Pasar Kampung Baru Tengah
			Pasar Loak Besi Baru Tengah
			Pasar Penampungan A
			Pasar Pandansari
6	Balikpapan Kota	Hypermart BTC	Klandasan I
		PT. Jeffrindo Eka Putra (Yova)	Klandasan II
		PT. Kenongo Delapan Lembusuan (Gajah Mada)	Pasar Damai
		Farmers Market	Pasar Baru

Sumber : BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023

E. Sarana Perkantoran

Pendistribusian fasilitas pemerintahan dan Perkantoran terdiri dari: Perkantoran swasta dan Perkantoran Pemerintahan. Perkantoran pemerintahan di Kota Balikpapan sebagian besar mengumpul di pusat Kota Balikpapan yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Balikpapan Kota dan sebagian lainnya mengumpul di Jl. Ruhui Rahayu Kecamatan Balikpapan Selatan.

Fasilitas perkantoran swasta terdistribusi melalui jalan utama di Kota Balikpapan yaitu di sepanjang Jl. Yos Sudarso, Jl. Mulawarman, Jl. Sudirman, Jl. MT Haryono, Jl. Syarifuddin Yoes, Jl. Ahmad Yani, Jl. Soekarno Hatta.

2. Prasarana Wilayah

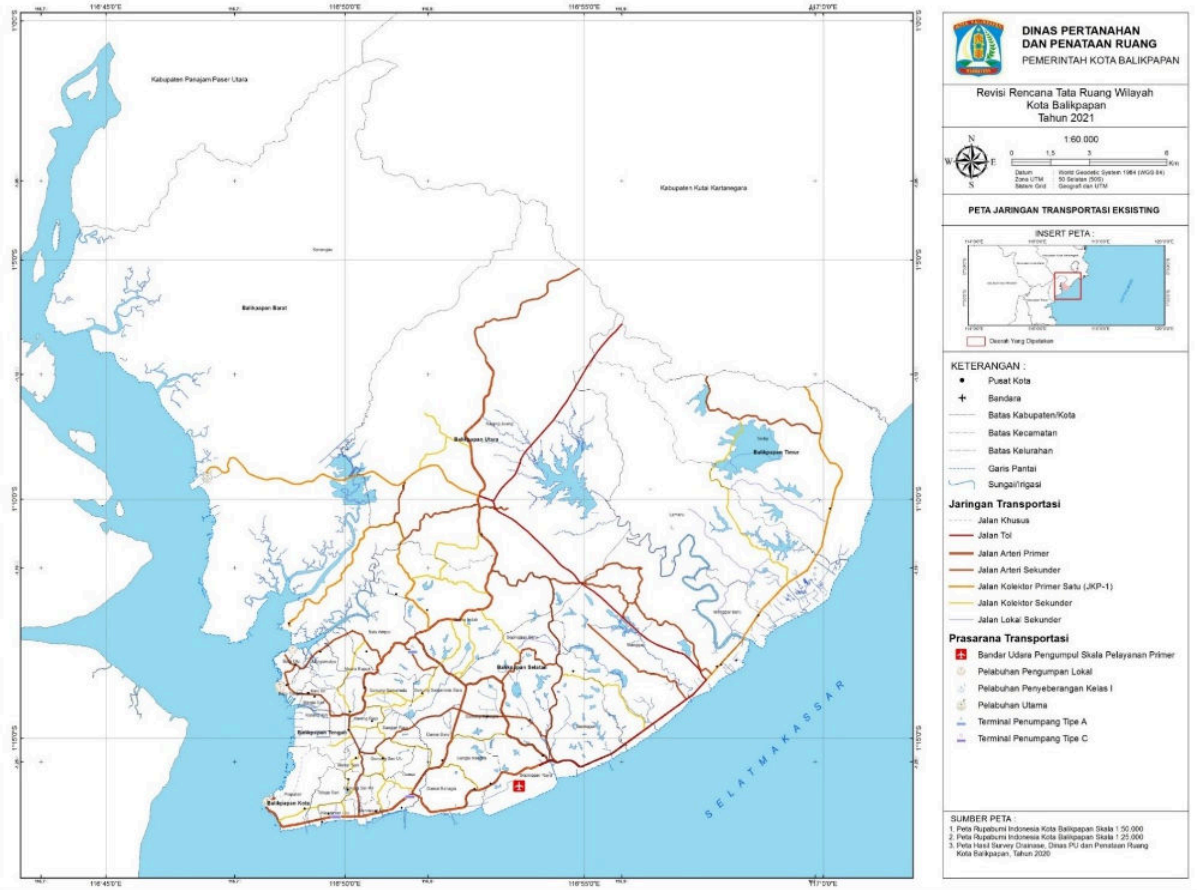
A. Sistem Transportasi dan Sistem Pergerakan

Secara umum sistem jaringan jalan di Kota Balikpapan berdasarkan kewenangan Tahun 2020 terdiri dari 45,66 Km jalan Negara, 31,61 Km berupa jalan provinsi dan 501,180 Km jalan kewenangan Kota. Untuk panjang jalan menurut jenis permukaan Tahun 2020, jenis permukaan aspal panjang 45,36 Km dan rigid 0,30 Km.

B. Jalan Tol

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 56 Tahun 2018. Signifikasi pembangunan jalan tol akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri berbasis kelapa sawit, batubara, migas, dan pertanian di kedua kota dan disepanjang jalan tol. Proyek jalan tol ini juga akan meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh antara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Berdasarkan Komite Percepatan Penyediaan infrastruktur Prioritas (KPPIP), Secara keseluruhan, jalan tol Balikpapan Samarinda memiliki total panjang 97,99 Km yang dibagi menjadi lima seksi, yaitu:

- Seksi 5 ruas Sepinggan (11,09 Km)-Balikpapan (Km 13) Bandara Sepinggan;
- Seksi 1 ruas Balikpapan (Km 13)-Samboja (22,03 Km),
- Seksi 2 ruas Samboja-Muara Jawa (30,98 Km),
- Seksi 3 Muara Jawa-Palaran (17,30 Km), dan
- Seksi 4 Palaran-Samarinda (16,59 Km).



Gambar 3.69 Peta Jaringan Transportasi

C. Terminal Penumpang, Dan Terminal Barang

Terminal berdasarkan Permen Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan ddidefinisikan Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan kenberangkatan, menakar dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Terminal Penumpang :

Sistem transportasi darat berupa terminal penumpang yang ada di Kota Balikpapan saat ini berupa Terminal Tipe A Batu Ampar, berada di JL. Kapten Pattimura Batu Ampar Balikpapan Utara (1013'11,1"S ; 116°51'24.8"E/-1.219744, 116.856878). Ditetapkan dalam dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2019 sebagai terminal tipe A. Saat ini melayani sistem transportasi angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP). Jalur pelayanan saat ini melayani :

- Balikpapan _ Samarinda (Bus)
- Balikpapan – Bontang (Bus)
- Balikpapan – Banjarmasin (Bus)
- Balikpapan – Sepaku/Semoi (Mini Bus)

Terminal lainnya yaitu Terminal Damai tipe B yang melayani angkutan umum dalam kota. Rute pelayanan saat ini untuk angkutan umum dilayani oleh angkutan umum minibus dengan pelayanan 8 rute trayek.

Rencana pengembangan terminal penumpang disesuaikan dengan konsep pengembangan sistem angkutan umum yang direncanakan di Kota Balikpapan. Berdasarkan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 prasarana lalulintas dan angkutan jalan berupa terminal angkutan direncanakan meliputi :

a. pengembangan terminal tipe A di Kelurahan Karang Joang;
b. peningkatan terminal tipe B di Kelurahan Batu Ampar;
c. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Manggar;
d. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Teritip;
e. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Kariangau;
f. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Prapatan;
g. peningkatan terminal tipe C di Kelurahan Damai; dan
h. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Sepinggan.

- **Terminal Barang :**

  Terminal barang di Kota Balikpapan saat ini terdiri dari :

  1. Terminal Peti Kemas Kariangau, dengan penanggung jawab operasional Kaltim Kariangau Terminal. Lokasi berada di Desa Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara. Kegiatan utama bongkar muat barang dan penumpang.
  2. Terminal Barang Teritip, di Kecamatan Balikpapan Timur

  Dalam rencana pengembangan yang tertuang dalam RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 direncanakan pengembangan terminal barang yaitu :

  a. pengembangan terminal barang kawasan industri Kariangau di Kelurahan Kariangau; dan
  b. pengembangan terminal barang di Kelurahan Teritip.

D. Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api di Kota Balikpapan, berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang terbit pada Desember 2018, termasuk dalam rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan. Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan adalah untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan memicu pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah, khususnya untuk angkutan batubara. Sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap prasarana perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan fasilitas operasi kereta api, diantaranya meliputi:

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota pada lintas: Puruk Cahu - Bangkuang, BalikpapanTanah Grogot - Tanjung, Balikpapan - Samarinda, Tanjung – Paringin – Barabai – Rantau – Martapura Banjarmasin, Banjarmasin - Palangkaraya, Bandara Supadio – Pontianak – Mempawah - Singkawang-Batas Negara, Tabang – Maloy, Kutai Barat – Paser – Balikpapan, Gunung Mas – Katingan.
2. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan diantaranya: Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Balikpapan (Kalimantan Timur).
3. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan pusat kota dengan bandara, meliputi: Supadio (Kalimantan Barat), Syamsudin Noor (Kalimantan Selatan).
4. Pengembangan layanan kereta api perintis.
5. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.
6. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Spesifikasi teknis dasar untuk jaringan kereta api di koridor Kalimantan secara umum diarahkan menggunakan lebar jalan rel 1435 mm guna mengakomodir potensi angkutan barang di wilayah tersebut. Penggunaan lebar gauge yang berbeda tetap dimungkinkan berdasarkan kajian maupun kebijakan.

E. Sistem transportasi laut dan penyebrangan

Berdasarkan Permen Nomor : PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar memuat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Terminal Khusus (Tersus) adalah terminal yang terletak DILUAR Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Sedangkan Dermaga Untuk kepentingan Sendiri (DUKS) adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada Didalam Daerah Lingkungan Kerja dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Setelah berlakunya UU No. 17 tahun 2008, maka istilah DUKS berubah menjadi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Pengertian TUKS dan DUKS adalah sama.

Sedangkan istilah Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.

Terminal Khusus (TERSUS) dan TUKS dibangun dan dioperasikan, hanya bersifat menunjang kegiatan pokok perusahaan. Pembangunan Pelabuhan hanya bertujuan untuk menunjang usaha pokok dari perusahaan tersebut. Kegiatan usaha pokok antara lain; pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan dok dan galangan kapal.

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Pintu Gerbang Provinsi Kalimantan Timur sehingga memiliki sarana dan prasarana perhubungan dengan skala pelayanan Nasional bahkan Internasional. Sistem transportasi laut dan penyebrangan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- Pelabuhan Semayang, penanggung jawab PT. Pelindo IV, lokasi di Kelurahan Prapatan Kecamatan, status umum (pelabuhan utama) kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
- Pelabuhan Somber, penanggung jawab DishubKota Balikpapan, lokasi Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Kota, status umum dengan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
- Pelabuhan Penyebrangan Kariangau, penanggung jawab BPTD Kaltim Tara, lokasi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara, status umum, kegiatan penyebrangan.

- Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, penanggung jawab Kaltim Kariangau Terminal, lakasi Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara, status umum, kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
- Pelabuhan Kampung Baru, di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Kota, penanggung jawab PT. Pelindo IV kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.

Selain pelabuhan laut, di wilayah Kota Balikpapan terdapat beberapa Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS)/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), yang Didalam Daerah Lingkungan Kerja (DDLK) dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut (DLKPr). DUKS/TUKS di Kota Balikpapan berdasarkan data Dishub Provinsi Kaltim Tahun 2020 yaitu terlihat pada **Tabel III.80** berikut:

Tabel III.80 Terminal Khusus di Kota Balikpapan

N0	Nama	Penanggung Jawab	Kelurahan/ Kecamatan	Status	Kegiatan
1	Terminal Peti Kemas Kariangau	Kaltim Kariangau Terminal	Kariangau, Balikpapan Utara	Umum	Bongkar Muat Barang dan Penumpang
2	Pelabuhan Semayang	PT. Pelindo IV	Prapatan, Balikpapan Kota	Umum	Bongkar Muat Barang dan Penumpang
3	Pelabuhan Somber	Dishub Kota Balikpapan	Batu Ampar, Balikpapan Utara	Umum	Bongkar Muat Barang dan Penumpang
4	Pelabunan Penyebrangan Kariangau	BPTD KaltimTara	Kariangau, Balikpapan Barat	Umum	Penyebrangan
5	PT. Dwimanunggal Reksa Wood	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Teluk Waru, Balikpapan Barat	DUKS/TUKS	Plywood
6	PT. H & H Utama Internasional	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Batakan, Balikpapan Selatan	DUKS/TUKS	Galangan Kapal
7	PT. Galangan Balikpapan Utama	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Kampung Baru, Balikpapan Tengah	DUKS/TUKS	Galangan Kapal
8	PT. Dermaga Perkasa Pratama	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Kariangau	DUKS/TUKS	Batubara
9	Pertamina Tanjung Batu	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Tanjung Batu	DUKS/TUKS	BBM
10	PT. Lestari Samudera Balikpapan	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	Tanjung Batu	DUKS/TUKS	Gakangan Kapal
11	PT. Dwi Duta Rahmat Agung	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Kampung Baru, Balikpapan Tengah	DUKS/TUKS	Batu Gunung

N0	Nama	Penanggung Jawab	Kelurahan/ Kecamatan	Status	Kegiatan
12	PT. Thies Contractor Indonesia	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Manggar, Balikpapan Timur	DUKS/TUKS	Alat Berat
13	PT. DERMAGA KENCANA INDONESIA (DERMAGA B)	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Kariangau, Balikpapan Barat	DUKS/TUKS	CPO
14	PT. DERMAGA KENCANA INDONESIA (DERMAGA A)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	Kariangau, Balikpapan Barat	DUKS/TUKS	CPO
15	PT. MEKAR BUMI ANDALAS	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	Kariangau, Balikpapan Barat	DUKS/TUKS	CPO
16	PT. SARANA TELUK SUMBER	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	PENUMPUKAN BARANG/ALAT BERAT
17	CV. ALAM BARU Eks. PT. INHUTANI	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	Kampung Baru Tengah, Balikpapan Tengah	DUKS/TUKS	PENUMPUKAN PASIR DAN BATU
18	PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	SAWMILL
19	PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	SAWMILL
20	CV. PANCUNG PUTRA	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	SAWMILL
21	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 1)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
22	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 2)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
23	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 4)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
24		PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	
25	PERTAMINA UP-IV			DUKS/TUKS	MIGAS

N0	Nama	Penanggung Jawab	Kelurahan/ Kecamatan	Status	Kegiatan
	BALIKPAPAN (JETTY 5)				
26	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 5/A)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
27	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 5/B)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
28	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 5/C)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
29	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 6)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			MIGAS
30	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 7/A)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			MIGAS
31	PERTAMINA LAWE - LAWE	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	LAWE - LAWE		BBM
32	KUA KARYA HARAPAN	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	KARIANGAU		
33	PLTD BATAKAN	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	MANGGAR		LISTRIK
34	PT. IQBAL BHAKTI NUSANTARA				BATUBARA
35	PT. KALAMARINDO SATYA TIMUR		TANJUNG BATU		PETI KEMAS
36	CV. EDY JAYA		KAMPUNG BARU UJUNG		JASA SUPPLIER
37	PERTAMINA V A,B,C BALIKPAPAN	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			BBM
38	PERTAMINA UP V STS (SHIP TO SHIP)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			BBM
39	PT. KUTAI CHIP MILL (DERMAGA I)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU SERPIH (CHIPWOOD MILL)

N0	Nama	Penanggung Jawab	Kelurahan/ Kecamatan	Status	Kegiatan
40	PT. KUTAI CHIP MILL (DERMAGA II)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU SERPIH (CHIPWOOD MILL)
41	PT. SEMEN GRESIK	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			SEMEN
42	PT. SEMEN TONASA	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			SEMEN

Sumber : RTRW Kota Balikpapan

F. Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara di Kota Balikpapan adalah dengan adanya Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dikelola oleh PT. Angkasa Pura I. Pelayanan melayani penerbangan domestik juga melayani penerbangan internasional. Setelah dilakukan pengembangan pada tahun 2013, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan memiliki luas terminal 110.000 m2 yang dapat menampung hingga 10 juta penumpang dengan desain yang menerapkan konsep modern disisipi nuansa etnik Kalimantan. Bandar Udara Sepinggan Balikpapan merupakan bandara pengumpul, sehingga mempunyai peran sebagai Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai Bandar Udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

G. Energi Kelistrikan

Prasarana kelistrikan dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas dan kegiatan seperti penerangan, kegiatan industri dan lain-lain sebagainya. Energi kelistrikan di Kota Balikpapan saat ini dilayani oleh PLN Persero. Sedangkan wilayah lain yang belum terlayani jaringan listrik masih menggunakan energi listrik lain atau sumber penerangan lainnya.

Menurut data BPS tahun 2023 Jumlah pelanggan listrik di Kota Balikpapan mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2021. Berdasarkan data darPT PLN Area Balikpapan, pada tahun 2022 pelanggan listrik PLN ada sebanyak 254.585 pelanggan, yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah pelanggan dari tahun 2021 sebanyak 245.471 pelanggan. Darjumlah tersebut, 136.177 berada pada rayon Balikpapan Selatan dan 118.408 berada pada rayon Balikpapan Utara.

H. Sistem Penyediaan Air Minum

Air Minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidupnya. Prasarana air bersih dibutuhkan tidak hanya untuk konsumsi, akan tetapi juga untuk keperluan MCK, kebutuhan kegiatan industri dan kegiatan lainnya. Kota Balikpapan memiliki beberapa sumber air yang dapat digunakan untuk air baku, diantaranya mata air, air tanah, dan sungai. Untuk pemenuhan air bersih dibutuhkan beberapa persyaratan teknis, seperti standar sanitasi dan kesehatan untuk layak konsumsi. Peningkatan pembangunan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk pedesaan.

Menurut data BPS tahun 2023 jumlah pelanggan air PDAM di Kota Balikpapan juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Berdasarkan data dari PDAM Kota Balikpapan, pada tahun 2022 pelanggan air PDAM Kota Balikpapan mencapai 115.094 pelanggan. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dari jumlah pelanggan pada tahun 2021 sebanyak 111.394 pelanggan.

I. Drainase

Jaringan drainase, selain berfungsi sebagai saluran air hujan juga berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga. Sistem jaringan drainase di Kota Balikapapan mengikuti kontur alami yakni mengikuti alur-alur sungai yang ada. Keadaan jaringan drainase di Kota Balikapapan, pada wilayah perkotaan sebagian besar berupa jaringan permanen sedangkan pada wilayah perdesaan jaringan drainase sebagian besar masih berupa saluran tanah. Sebagian besar jaringan drainase di Kota Balikapapan mengikuti pola jaringan jalan, dan bermuara pada alur sungai atau pantai.

Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang langsung bermuara di teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang melayani pamatusan Kota Balikpapan. Tidak ada saluran primer drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air pematusan dan air buangan keluar daerah perkotaan. Semua saluran primer drainase yang ada sekarang merupakan saluran alam yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase.

Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 m, wilayah Sungai Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, wilayah somber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungai-sungai kecil yang mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981 m. Namun, kondisi drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen sehingga seringkali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan menyebabkan genangan jika hujan.

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/-85% dan +/-15% merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan yang berpotensi terhadap banjir. Dengan kondisi yang berbukit-bukit maka diperlukan pengelolaan drainase yang cukup baik di Kota Balikpapan. Menurut dokumen

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 titik banjir di Kota Balikpapan adalah sebanyak 51 titik yang tersebar di kawasan Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur dengan rincian yang dapat dilihat pada **Tabel III.81** sebagai berikut:

Tabel III.81 Titik Banjir Kota Balikpapan

No.	Lokasi	No.	Lokasi
1	RT 2,3,6,7,13,14,28 Kel. Marga Sari (Jl. Sepaku)	26	Perum BDI
	RT 3,4,5 Kel. Baru Ilir (Jl. Rico)	27	Perum BDI RT27,28 Kel. Sungai Nangka
	RT 6,7,23 Kel. Baru Ilir	28	RT 51 Kel. Gn Bahagia dan RT 30 Kel. Sungai Nangka (Jalan M.T. Haryono)
	RT 14, 15 Kel. Marga Sari	29	RT 31,55 Kel. Graha Indah
2	RT 17, 19 Kel. Marga Sari	30	RT 8,9,54 Kel. Graha Indah
3	RT 26,28 Kel. Marga Sari	31	RT 2,56 Kel. Grah Indah
4	RT 27,39 Kel. Marga Sari	32	RT 6 Kel. Kariangau
5	RT 24 Kel. Marga Sari	33	RT 21 Kel. Karang Joang
6	RT 18 Kel. Marga Sari dan RT 43 Kel. Baru Ilir (Depan Blue Sky)	34	Jalan Poros KIK KM.13
7	RT 21 Kel. Marga Sari dan RT 51 Kel. Baru Ilir (Depan Diklat Pertamina)	35	Jalan Poros KIK KM.13
	RT 20 Margomulyo	36	Jalan Poros KIK KM.13
	Depan SDN 004 dan MTSN Kel. Muara Rapak	37	Jalan Poros KIK KM.13
	Simpang 4 Karang Rejo	38	Jalan Poros KIK KM.13
8	Simpang Jalan AMD	39	Jalan Poros KIK KM.13
	RT 23,28,29 Kel. Mekar Sari	40	RT 10 Kel. Karang Joang
9	Depan Puskib		RT 4 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo)
10	RT 30 Kel. Batu Ampar		RT 5 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo)
11	RT 48,60 Kel. Batu Ampar		RT 6 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo)
12	RT 42,43 Kel. Graha Indah	41	RT 32 Kel. Sepinggan
13	Jalan Tumaritis	42	RT 5 Kel. Manggar
14	RT 8 Kel. Gn Samarinda Baru (Depsos)	43	RT 52 Kel. Manggar
15	RT 4 Kel. Gn. Samarinda Baru		RT 26 Kel. Manggar
16	RT 5 Kel. Gn. Samarinda Baru		RT 59 Kel. Manggar
	RT 6,9 Kel. Gn. Samarinda Baru	44	RT 32 Kel. Manggar
	RT 1,3 Kel. Gn. Samarinda Baru		RT 12 Kel. Lamaru
17	RT 26 Kel. Gn. Samarinda Baru	45	RT 9 Teritip Hilir
18	RT 16 Kel. Gn. Samarinda Baru	46	RT 9 Teritip Hulu
19	RT 14,15 Kel. Gn. Samarinda Baru		Titik Banjir Baru
20	RT 17,18 Kel. Gn. Samarinda Baru (perum Pemda)	47	Jalan depan kantor Sutindo
21	RT 15 Kel. Gn. Samarinda Baru (perum Pemda)	48	Jalan Soekarno-Hatta, Km 17, RT 37&39 Karang Joang
22	RT 48 Kel. Sumber Rejo dan RT 38 Kel. Gn Sari Ulu	49	Jalan Wonorejo Kelurahan Gunung Samarinda
23	RT 31 Kel. Gn. Sari Ulu dan RT 18 Kel. Damai Baru (Jalan Beler)	50	Kompleks Balikpapan Baru (BB) depan Pasar Segar
24	RT 32 Kel. Damai dan RT 11 Kel. Damai Baru (Jembatan PDAM)	51	Depan Asrama Haji s.d Kantor Camat Balikpapan Timur
25	RT 26 Kel. Sungai Nangka (Jl. M.T Haryono)		

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan, 2016-2021

J. Limbah Cair

Air limbah yang dimaksudkan yaitu air sisa buangan yang berasal dari rumah tangga yang terdiri dari kotoran-kotoran yang sebagian berbentuk kotoran dan sebagian lagi merupakan larutan tersuspensi. Jumlah air limbah tergantung jumlah pemakaian air bersih dalam rumah tangga. Apabila penggunaan air bersih yang cukup maka akan menghasilkan air limbah 100 ltr/hari/orang.

Layanan pengelolaan air limbah di Kota Balikpapan saat ini terdiri dari air limbah terpusat dengan jumlah sambungan rumah 1.308 SR yang dilayani oleh IPAL Margasari. Selebihnya dengan sistem setempat baik yang individu mapun komunal. Prasarana air limbah komunal terdapat di 29 lokasi yang tersebar di Kelurahan Klandasan Ulu (1 unit), Kelurahan Batu Ampar (2 unit), Kelurahan Gunung Bahagia (4 unit), Kelurahan Klandasan Ilir (1 unit), Kelurahan Margo Mulyo (6 unit). Kelurahan Damai (2 unit), Kelurahan Sepinggan (5 unit), Kelurahan Manggar (2 unit), Kelurahan Sungai Nangka (4 unit), Kelurahan Damai Baru (1 unit), Kelurahan Gunung Samarinda (1 unit).

K. Persampahan

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh penduduk Kota Balikpapan umumnya masih konvensional, dengan cara membuat lobang tempat sampah yang kemudian dilakukan pembakaran atau penimbunan. Di Kota Balikpapan, telah memiliki sistem pembuangan sampah yang relatif sudah teratur dan baik dengan dukungan sarana dan prasarana persampahan yang disiapkan pemerintah maupun masyarakat secara swadaya.

Masalah sampah di Kota Balikpapan saat ini menjadi masalah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga produksi sampah ikut meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perencanaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sistem pengelolaan sampah yang akan ditetapkan di wilayah Kota Balikpapan, yaitu masyarakat membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan selanjutnya oleh Pemerintah/Swasta sampah yang ada di TPS diangkut menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Guna mendukuing sistem ini diperlukan :

- Setiap bangunan rumah tangga disediakan pewadahan/bak sampah
- Pelayanan disediakan perwadahan yang disesuaikan dengan volume sampah.
- Penyediaan gerobak pengangkut sampah guna mengangkut sampah ke TPS yang dilakukan oleh masyarakat.
- Penyediaan Dump Truck untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA yang dikelolah oleh Pemerintah atau Swasta.

Pengelolaan sampah secara garis besar saat ini dilayani TPA Manggar dengan sistem *sanitary landfill*. Jumlah sampah terangkut ke TPA klo dirata – ratakan dalam 1 tahun yaitu sebesar 374,77 ton/hari. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.82** dibawah ini.

Tabel III.82 Jumlah Sampah Yang Masuk ke TPA Manggar Per Bulan di Kota Balikpapan Tahun 2022

Bulan	Jumlah Sampah (Ton/Hari)
Januari	383,94
Februari	372,39
Maret	385,91
April	404,74
Mei	386,90
Juni	361,38
Juli	372,70
Agustus	381,92
September	384,73
Oktober	358,97
November	354,53
Desember	349,62
Rata - Rata	**374,77**

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023 (BPS)

3.5 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Para pemangku kepentingan (stakeholders) utama yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Kota Balikpapan terdiri dari empat platform, yaitu meliputi:

- Pemerintah dan Parlemen
- Akademisi dan Pakar
- Filantropi dan Pelaku Usaha
- Organisasi Kemasyarakatan dan Media

Untuk meningkatkan dan memperkuat kemitraan dengan semua pemangku kepentingan SDGs, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan lima prinsip kemitraan yaitu;

1) Membangun kepercayaan *(trust building);* rasa saling percaya antar para pemangku kepentingan yang bermitra. Kepercayaan (trust) adalah modal dasar dalam membangun kemitraan secara sinergis. Untuk membangun kepercayaan, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi oleh itikad yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.
2) Kemitraan setara *(equal partnership);* setiap pihak mempunyai kedudukan yang setara.
3) Partisipasi; keterlibatan secara aktif para pemangku kepentingan dalam sinergitas pelaksanaan pencapaian SDGs di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
4) Akuntabilitas; adanya evaluasi terhadap proses pelaksanaan pencapaian kegiatan SDGs dan kinerja para pemangku kepentingan secara bertanggung jawab.
5) Manfaat bersama *(mutual benefit);* asas saling menguntungkan dalam bermitra melalui kontribusi para pihak sesuai peran dan kapasitas masing-masing.

Didalam penjabaran atau optimalisasi pencapaian TPB di Kota Balikpapan ada peran pemangku kepentingan, baik itu organisasi kemasyarakatan, Filantropi maupun pelaku

usaha, berikut peran pemangku kepentingan di Kota Balikpapan didalam mendukung optimalisasi pencapaian TPB. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.83** dibawah ini.

Tabel III.83 Pemangku Kepentingan di Kota Balikpapan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kecamatan	Akademisi	Swasta / LSM
1) Sekretariat Daerah 2) Dinas Pekerjaan Umum 3) Dinas Perumahan Dan Permukiman 4) Dinas Lingkungan Hidup 5) Dinas Sosial 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 7) Dinas Kesehatan 8) Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan 9) Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata 10) Dinas Pendidikan 11) Dinas Ketenagakerjaan 12) Dinas Komunikasi Dan Informatika 13) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 14) Dinas Perhubungan 15) Dinas Koperasi Umkm Dan Perindustrian 16) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan 17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18) Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 19) Badan Keuangan Dan Aset Daerah 20) Inspektorat 21) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 22) Badan Pusat Statistik 23) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung 24) Perusahaan Listrik Negara	1) Balikpapan Barat 2) Balikpapan Kota 3) Balikpapan Selatan 4) Balikpapan Tengah 5) Balikpapan Timur 6) Balikpapan Utara	1) Institut Teknologi Kalimantan 2) Politeknik Negeri Balikpapan 3) STT Migas 4) Universitas Balikpapan 5) Universitas Tridharma 6) Universitas Mulia	1) Pandu Lingkungan Hidup 2) Borneo Environmental Community 3) Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL) 4) Ecco Walibar 5) Borneo Energy dan Mineral Care

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Terkait dengan informasi belanja untuk capaian TPB atau kontribusi dari para pihak khususnya swasta maupun NGO belum ada data, sehingga diharapkan hal ini menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan untuk melakukan pendataan bagi seluruh para pihak untuk mengukur kontribusi para pihak dalam pencapaian TPB di masa yang akan datang.



BAB 4
ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dalam mencapai tujuan pembangunan, ketergantungan antara manusia dan alam harus diperhatikan. Manusia hidup dan sangat bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh alam dalam biosfer. Demikian pula, proses ekologis juga tidak dapat dijelaskan tanpa mempertimbangkan pengaruh manusia (Folke dkk., 2016). Pada Gambar 4.1, diilustrasikan bahwa kondisi lingkungan dalam biosfer merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, disertai dengan daya dukung lingkungan yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia. Kondisi masyarakat yang sehat dan bahagia akan mendukung aktivitas manusia sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendukung terciptanya kesejahteraan hidup manusia yang berkelanjutan.



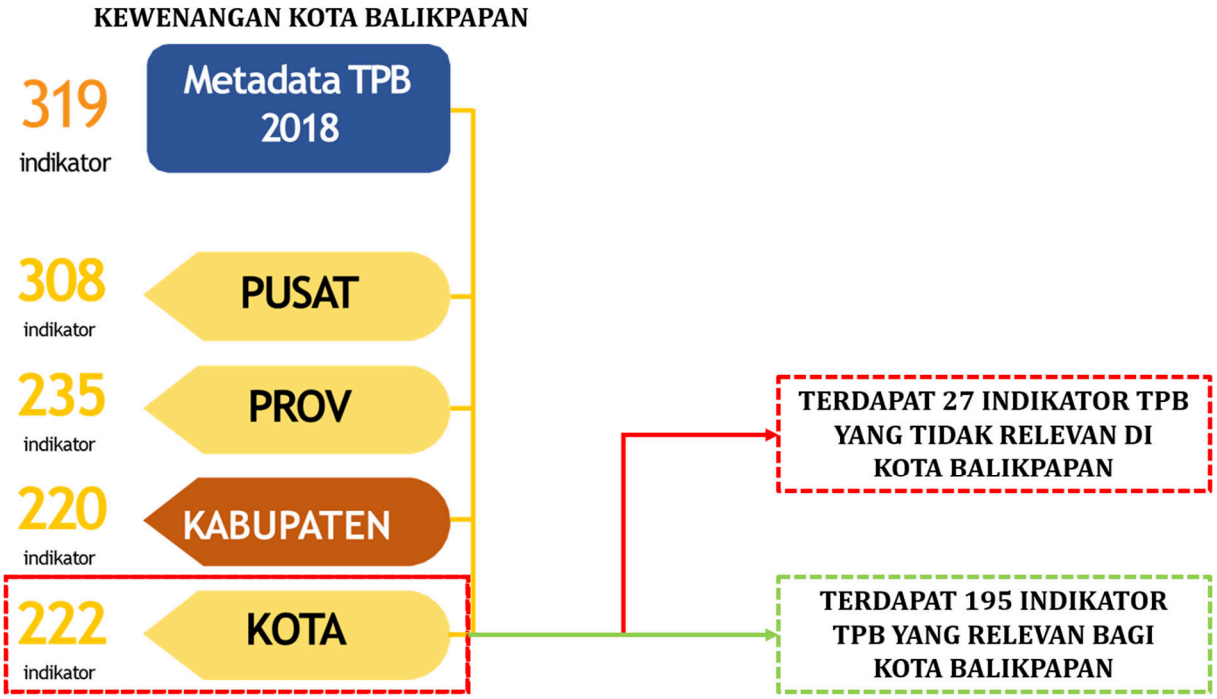
Sumber: Folke, dkk., 2016

Gambar 4.1 Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB

Kaitan antara aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Keempat pilar tersebut diuraikan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolok ukur perumusan kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masing-masing tujuan pada TPB memiliki indikator yang berperan sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target TPB.

4.1 PENAPISAN INDIKATOR TPB DI KOTA BALIKPAPAN

Di Indonesia, terdapat 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 TPB. Upaya pencapaian indikator TPB tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Menurut metadata 1 perpres 59/2017 menjelaskan bahwa indikator yang menjadi kewenangan Kota berjumlah 222 indikator, kemudian 222 indikator tersebut dilakukan penapisan sesuai dengan karakteristik dan yang dianggap relevan di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.2** dibawah ini.



Gambar 4.2 Indikator TPB sesuai Perpres 59/2017 dan Hasil Penapisan Indikator Yang Relevan di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil dari indikator yang telah dilakukan penapisan dengan pokja KLHS RPJMD Kota Balikpapan, disepakati bahwa terdapat 27 indikator yang tidak relevan di Kota Balikpapan. Terkait 27 indikator tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 2**. dan untuk capain indikator dari keseluruhan TPB dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi karateristik Kota Balikpapan, didapatkan 195 indikator TPB yang relevan bagi Kota Balikpapan. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kota Balikpapan ini memiliki 4 (empat) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu **"sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional"**, **"sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional"**, **"tidak/belum ada data"**, dan "**belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional"**. Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional serta nantinya akan dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 (dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB).

Dari 195 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan didapatkan beberapa hasil diantaranya indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

sebanyak 112 (57,44%), Indikator Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target Nasional (SB) sebanyak 34 (17,44%), Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB) sebanyak 2 (1,03%) indikator, dan Tidak Ada Data (N/A) sebanyak 47 (24,10%). Kategori "telah mencapai target" dan "belum mencapai target" diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres 59 Tahun 2017. Sementara indikator "belum dilaksanakan" merupakan indikator yang sampai saat ini belum dilaksanakan atau target capaiannya belum terakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di RPJMD Kota Balikpapan serta untuk kategori "tidak ada data" diberikan pada indikator yang tidak tersedia atau belum ada data capaiannya. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator TPB yang ada di Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Tabel IV.1** dan **Gambar 4.3** dibawah ini.

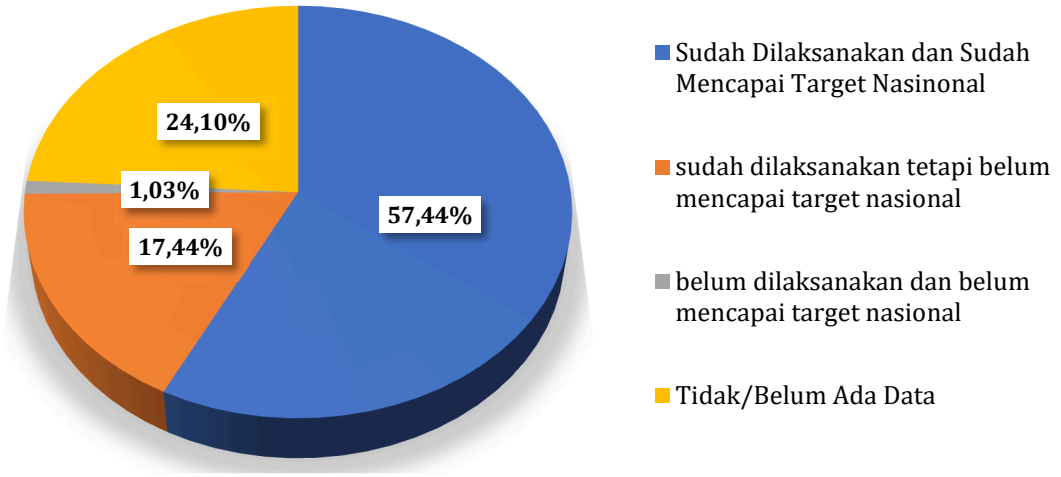
Tabel IV.1 Capaian TPB di Kota Balikpapan

No TPB	TPB	SS	SB	BB	NA	Grand Total
1	Tanpa Kemiskinan	13	5		6	24
2	Tanpa Kelaparan	6	2	1		9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	21	6		3	30
4	Pendidikan Berkualitas	10	1		2	13
5	Kesetaraan Gender	6	3		5	14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	4		5	15
7	Energi Bersih dan Terjangkau				1	1
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	6		2	18
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	1		3	11
10	Berkurangnya Kesenjangan	2			2	4
11	Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	7	1		4	12
12	Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	2			3	5
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	2				2
14	Ekosistem Laut	-	-	-	-	-
15	Ekisistem Darat	1	1		1	3
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	12	1	1	6	20
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	7	3		4	14
Grand Total		**112**	**34**	**2**	**47**	**195**
Persentase (%)		**57,44%**	**17,44%**	**1,03%**	**24,10%**	**100,00%**

Keterangan :
SS (Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional)
SB (Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target Nasional)
BB (Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional)
NA (Tidak Ada Data)

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Capaian TPB Kota Balikpapan



Gambar 4.3 Prosentase Pencapaian TPB di Kota Balikpapan Tahun 2023

Untuk capaian TPB per masing – masing di Kota Balikpapan akan diuraikan dibawah ini :

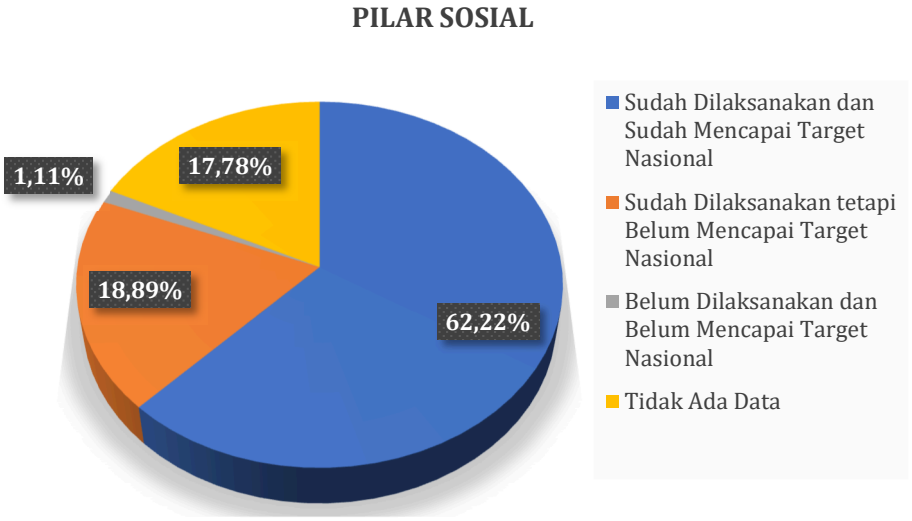
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	Jumlah indikator berjumlah 24 dengan indikator yang sudah tercapai di Kota Balikpapan sebesar 13 atau sekitar 54,17%, indikator belum mencapai target sebanyak 5 atau sekitar 20,83% dan 6 indikator yang tidak ada data atau sekitar 25%.
TPB 2	Tanpa Kelaparan	Jumlah indikator berjumlah 9, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 6 atau sekitar 66,67%, indikator belum mencapai target berjumlah 2 atau sekitar 22,22%, dan indicator yang belum dilaknsakan berjumlah 1 atau sekitar 11,11%
TPB 3	Kehidupan sehat dan Sejahtera	Jumlah indikator berjumlah 30, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 21 atau sekitar 70,00%, indikator belum mencapai target berjumlah 6 atau sekitar 20,00% dan indikator yang tidak ada data 3 atau sekitar 10,00%.
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	Jumlah indikator berjumlah 13, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 10 atau sekitar 76,92%, indikator belum mencapai target berjumlah 1 atau sekitar 7,69% dan indikator yang tidak ada data 2 atau sekitar 15,38%.
TPB 5	Kesetaraan Gender	Jumlah indikator berjumlah 14, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 6 atau sekitar 42,86%, indikator belum mencapai target berjumlah 3 atau sekitar 21,43% dan indikator tidak ada data 5 atau sekitar 35,71%.

TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Jumlah 6ndicator berjumlah 14, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai 6 atau sekitar 40,00%, 6ndicator belum mencapai target berjumlah 4 atau sekitar 26,67% dan 6ndicator tidak ada data 5 atau sekitar 33,33%.
TPB 7	Energi Bersih dan Terjangkau	Jumlah 6ndicator 1 dan masuk kedalam kategori tidak ada data
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah 6ndicator 18, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai 10 atau sekitar 55,56%, 6ndicator belum mencapai target berjumlah 6 atau sekitar 33,33% dan 6ndicator tidak ada data berjumlah 2 atau sekitar 11,11%.
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Jumlah 6ndicator 11, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai 7 atau sekitar 63,64%, 6ndicator yang belum mencapai target berjumlah 1 atau sekitar 9,09% dan 6ndicator tidak ada data berjumlah 3 atau sekitar 27,27%.
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	Jumlah Indikator 4, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai berjumlah 2 atau sekitar 50%, 6ndicator tidak ada data berjumlah 2 atau sekitar 50%.
TPB 11	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Jumlah 6ndicator 12, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai berjumlah 7 atau sekitar 58,33%, 6ndicator yang belum mencapai target 1 atau sekitar 8,33% dan 6ndicator tidak ada data berjumlah 4 atau sekitar 33,33%.
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	Jumlah 6ndicator 5, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai berjumlah 2 atau sekitar 40% dan 6ndicator tidak ada data berjumlah 3 atau sekitar 60%.
TPB 13	Penanggulangan Perubahan Iklim	Jumlah 6ndicator 2, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai 2 atau sekitar 100%.
TPB 15	Ekosistem Darat	Jumlah Indikator 3, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai 1 atau sekitar 33,33%, Indikator belum mencapai target berjumlah 1 atau sekitar 33,33% dan 6ndicator tidak ada data 1 atau sekitar 33,33%.
TPB 16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh	Jumlah 6ndicator 20, di Kota Balikpapan yang sudah tercapai 12 indikator atau sekitar 60%, 1 indikator yang belum mencapai target berjumlah atau sekitar 5%, 1 indikator yang belum dilaksanakan berjumlah atau sekitar 5%, dan 1 indikator tidak ada atau sekitar 30,00%
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai target	Jumlah 6ndicator 14, di Kota Balikpapan 6ndicator yang sudah tercapai 7 atau sekitar 50%, 6ndicator yang belum mencapai target 3 atau sekitar 21,43% dan 6ndicator tidak ada data 4 atau sekitar 28,57%.

4.2 CAPAIAN TARGET INDIKATOR TPB BERDASARKAN PILAR

4.2.1 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

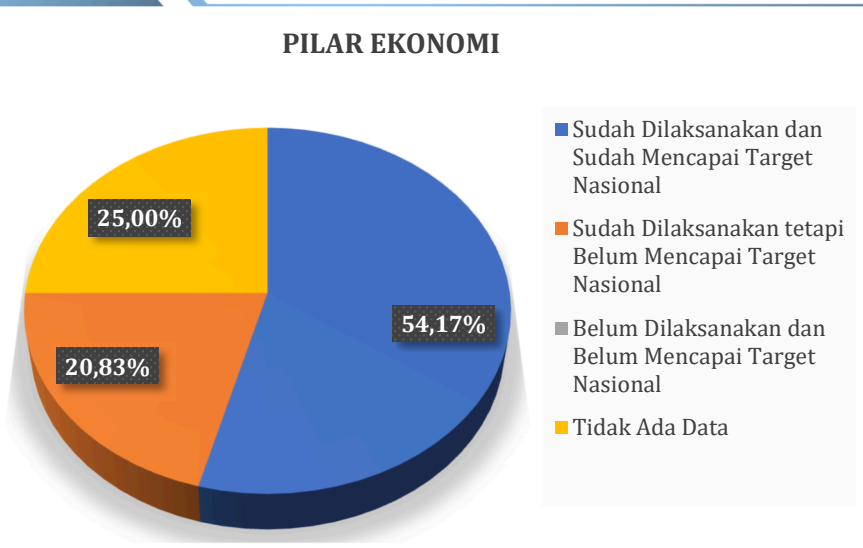
Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar sosial, yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Kelima TPB dalam pilar sosial tersebut terdiri dari 90 indikator yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan. Persentase capaian indikator TPB Pilar Sosial di Kota Balikpapan ditunjukan pada **Gambar 4.4** sebagian besar indikator TPB Pilar Sosial di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 62,22 % telah mencapai target nasional, 18,89% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 1,11% belum dilaksanakan dan 17,78% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Sosial yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.



Gambar 4.4 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

4.2.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

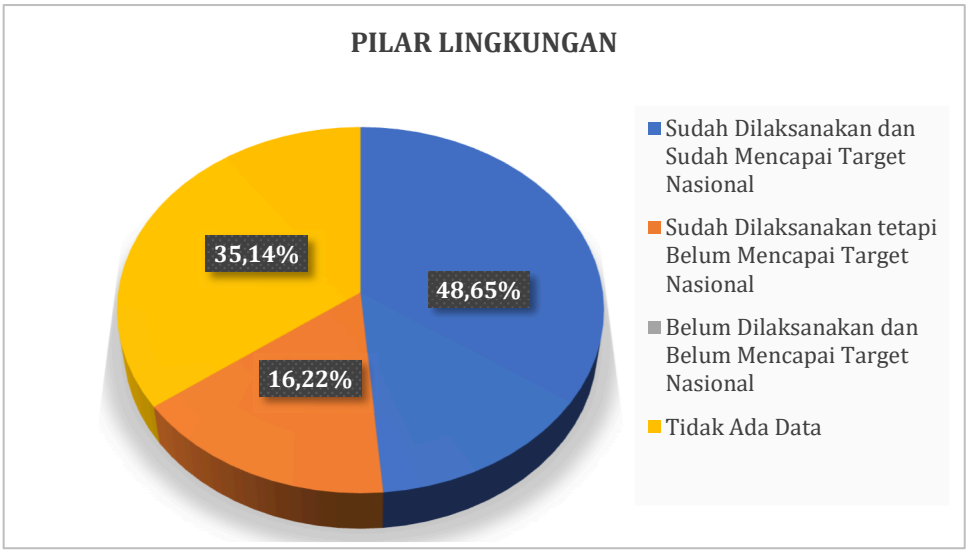
Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar ekonomi, yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Jumlah indikator TPB dalam Pilar Ekonomi yang menjadi kewengan Kota Balikpapan berjumlah 48 indikator. Persentase capaian indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Balikpapan ditunjukan pada **Gambar 4.5** sebagian besar indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 54,17% telah mencapai target nasional, 20,83% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, dan 25% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Ekonomi yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.



Gambar 4.5 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

4.2.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

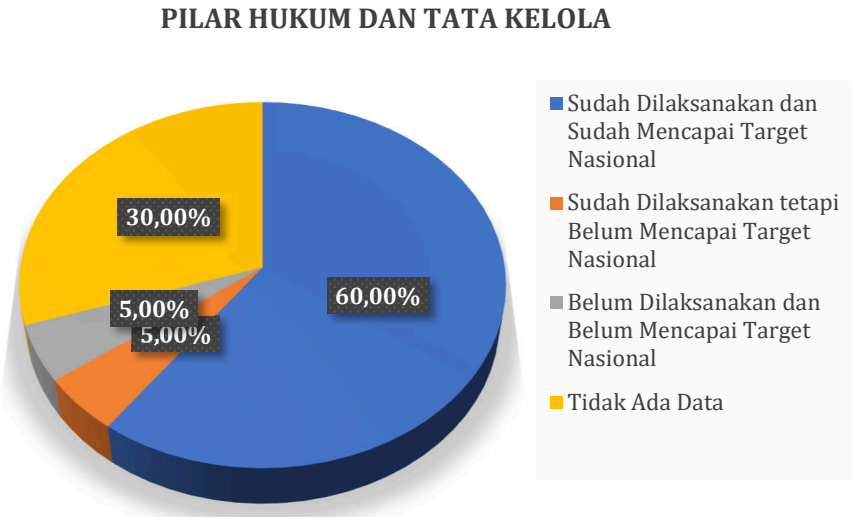
Terdapat 6 TPB yang termasuk dalam pilar lingkungan hidup, yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB, 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Lautan), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Namun, TPB 14 tidak menjadi kewenangan Kota Balikpapan, melainkan merupakan kewenangan provinsi sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Kelima TPB dalam pilar lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan terdiri dari 37 indikator. Persentase capaian indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan ditunjukan pada **Gambar 4.6** sebagian besar indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 48,65% telah mencapai target nasional, 16,22% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, dan 35,14% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.



Gambar 4.6 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

4.2.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) merupakan satu-satunya TPB yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB 16 ini terdiri dari 20 indikator. Persentase capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola kelembagaan di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Gambar 4.7** sebagian besar indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 60% telah mencapai target nasional, 5% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 5% belum dilaksanakan dan 30% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.



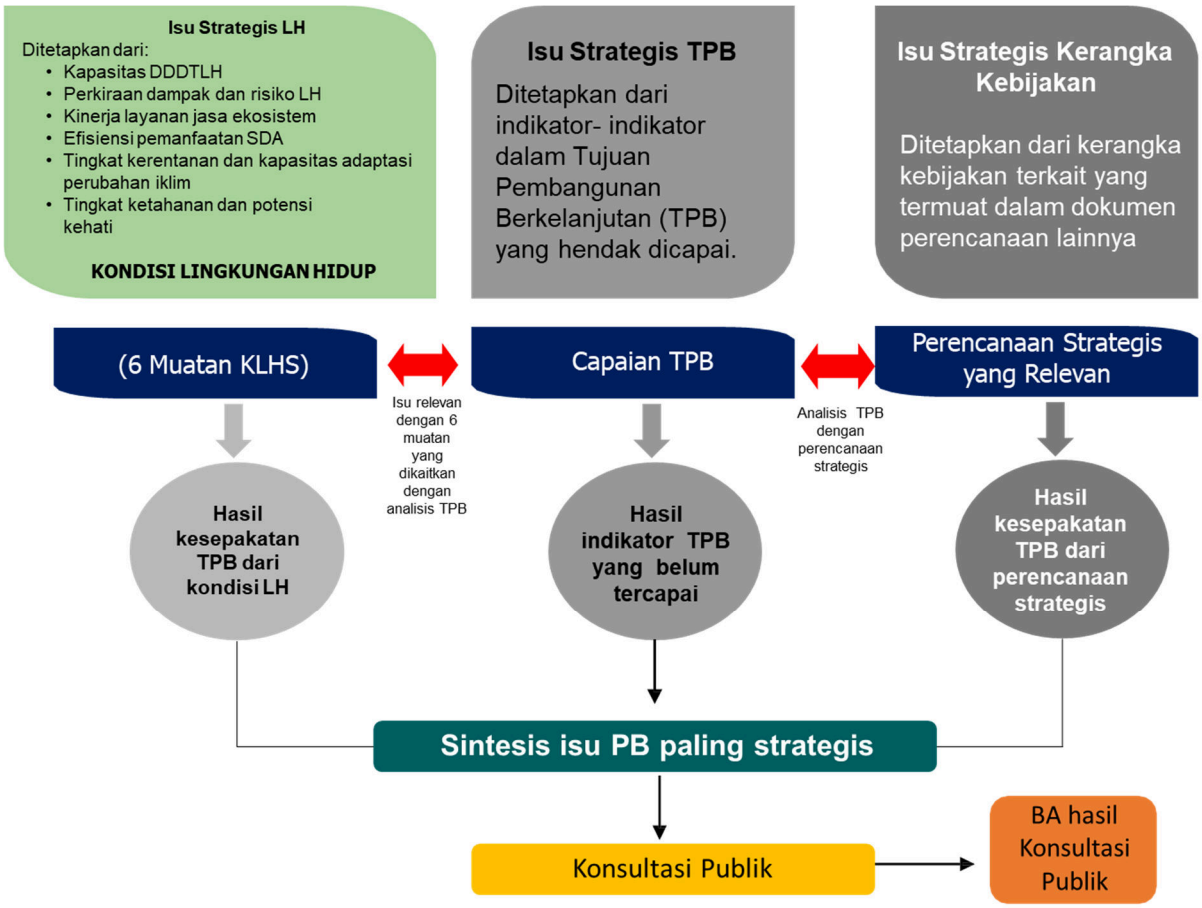
Gambar 4.7 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola

4.3 RUMUSAN ISU STRATEGIS DI KOTA BALIKPAPAN

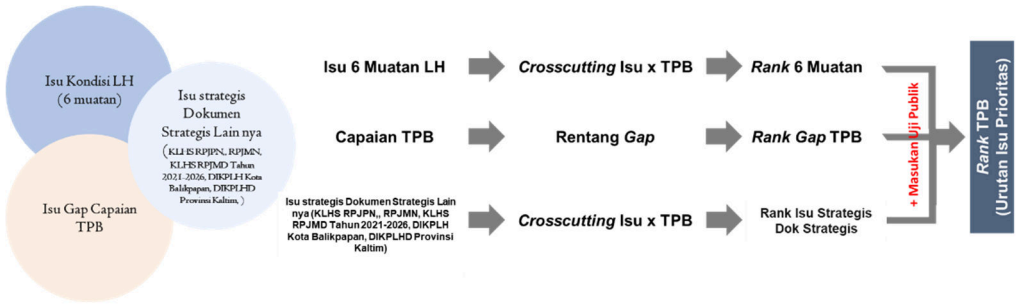
4.3.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis

Pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian target TPB, keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal *(baseline)* dalam mencapai target dari setiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan. Berdasarkan kajian pada 4 Pilar, sebanyak 57% indikator TPB di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, sedangkan masih terdapat 18% indikator TPB yang belum mencapai target nasional, 1% belum dilaksanakan belum mencapai target nasioanl dan 24% tidak ada data.

Adanya kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu Strategis. Selain memperhitungkan gap capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu Strategisjuga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari dokumen strategis lainnya, dan isu dari masukan uji publik. Kerangka analisis dan pemeringkatan isu TPB untuk menentukan isu Strategis di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Gambar 4.8** dan **Gambar 4.9** dibawah ini.



Gambar 4.8 Kerangka Pikir Penentuan Isu PB Strategis Dalam KLHS RPJMD



Gambar 4.9 Kerangka Analisis dan Pemeringkatan Isu TPB di Kota Balikpapan

4.3.1.1 Gap Capaian TPB

Analisis capaian TPB dilakukan dengan menghitung selisih antara capaian indikator TPB di Kota Balikpapan terhadap target capaian nasional. Semakin besar selisih/gap capaian indikator (belum mencapai target nasional), maka semakin berpotensi menjadi isu Strategis. Dibawah ini merupakan permasalahan dari setiap indikator dari masing-masing TPB yang masih memiliki Gap baik untuk kategori SB, BB dan NA di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel IV.2** dibawah ini.

Tabel IV.2 Gap Capaian Masing – Masing TPB di Kota Balikpapan Tahun 2023

TPB	INDIKATOR	KETERANGAN
TPB 1 TANPA KEMISKINAN	Jumlah indikator 24, 11 indikator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Belum tercapainya** Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan **dan perlu ditingkatkan** 2. **Penyediaan data** Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 3. **Penyediaan data** Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 4. **Belum tercapainya** Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan **dan perlu ditingkatkan** 5. **Belum tercapainya** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan **perlu ditingkatkan** 6. **Belum tercapainya** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan **perlu ditingkatkan** 7. **Penyediaan data terkait** Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN 8. **Penyediaan Data** Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 9. **Masih tingginya** Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana dan perlu diturunkan 10. **Penyediaan Data** Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 11. **Penyediaan Data** Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
TPB 2 TANPA KELAPARAN	Jumlah indikator 9, 4 indicator masih ada gap permasalahan	1. **Pelaksanaan dan Penyediaan Data** Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 2. **Masih tingginya** angka Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita **dan perlu diturunkan** 3. **Masih tingginya** angka Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta **dan perlu diturunkan** 4. **Belum Tercapainya** Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan **perlu ditingkatkan**
TPB 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Jumlah Indikator 30 Indikator, 9 indikator	1. **Masih tingginya** angka prevalensi tekanan darah tinggi **dan perlu diturunkan** 2. **Penyediaan Data** Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.

TPB	INDIKATOR	KETERANGAN
	yang masih ada Gap Permasalahan	3. **Belum tercapainya** Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan perlu ditingkatkan 4. **Penyediaan Data** Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 5. **Belum tercapainya** Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin **perlu ditingkatkan** 6. **Masih tingginnya** Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dan **perlu diturunkan** 7. **Masih tingginya** angka Unmet need pelayanan Kesehatan dan **perlu diturunkan** 8. **Penyediaan Data** Proporsi kematian akibat keracunan. 9. **Masih tingginya** Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun dan **perlu diturunkan**
TPB 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	Jumlah Indikator 13, 3 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Penyediaan Data** Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 2. **Belum tercapainya Angka** Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **perlu ditingkatkan** 3. **Penyediaan Data Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).**Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
TPB 5 KESETARAAN GENDER	Jumlah Indikator 14, 8 Indikator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Penyediaan Data** Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. **Masih tingginya** Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Perlu diturunkan 3. **Penyediaan Data** Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 4. **Penyediaan Data** Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 5. **Penyediaan Data** Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

TPB	INDIKATOR	KETERANGAN
		6. **Penyediaan Data** Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 7. **Masih tingginya** angka Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dan **perlu diturunkan** 8. **Belum Tercapainya** Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dan perlu ditingkatkan
TPB 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	Jumlah Indikator 15, 9 Indikator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Belum Tercapainya** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. **dan perlu ditingkatkan** 2. **Belum Tercapainya** Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan **dan perlu ditingkatkan** 3. **Penyediaan Data** Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 4. **Belum Tercapainya** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak **dan perlu ditingkatkan** 5. **Belum Tercapainya** Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) **dan perlu ditingkatkan** 6. **Penyediaan Data** Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 7. **Penyediaan Data** Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 8. **Penyediaan Data** Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 9. **Penyediaan Data** Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
TPB 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	Jumlah Indikator 1, 1 Indikator yang masih ada Gap Permasalahan	**1. Penyediaan Data** Bauran energi terbarukan.
TPB 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Jumlah Indikator 18, 8 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Belum Tercapainya** PDB per kapita. **dan perlu ditingkatkan** 2. **Penyediaan Data** Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa 3. **Penyediaan Data** Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). 4. **Belum Tercapainya** Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun **dan perlu ditingkatkan** 5. **Belum Tercapainya** Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian **dan perlu ditingkatkan** 6. **Belum Tercapainya** Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) **dan perlu ditingkatkan**

TPB	INDIKATOR	KETERANGAN
		7. **Belum Tercapainya** Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB **dan perlu ditingkatkan** 8. **Belum Tercapainya** Jumlah wisatawan mancanegara **dan perlu ditingkatkan**
TPB 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR	Jumlah Indikator 11, 4 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Penyediaan Data** Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. 2. **Penyediaan Data** Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 3. **Penyediaan Data** Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. 4. **Belum Tercapainya** Proporsi individu yang menggunakan internet perlu ditingkatkan
TPB 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN	Jumlah Indikator 4, 2 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Penyediaan Data** Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 2. **Penyediaan Data** Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
TPB 11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	Jumlah Indikator 12, 5 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Penyediaan Data** Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. 2. **Penyediaan Data** Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. 3. **Penyediaan Data** Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 4. **Penyediaan Data** Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. 5. **Masih tingginya** Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana **dan perlu diturunnkan**
TPB 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	Jumlah Indikator 5, 3 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Penyediaan Data** Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 2. **Penyediaan Data** Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 3. **Penyediaan Data** Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
TPB 15 EKOSISTEM DARATAN	Jumlah Indikator 3, 2 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Belum Tercapainya** Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan **dan perlu ditingkatkan** 2. **Penyediaan Data** Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
TPB 16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Jumlah indicator 20, 8 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Penyediaan Data** Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. 2. **Penyediaan Data** Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 3. **Penyediaan Data** Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 4. **Penyediaan Data** Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.

TPB	INDIKATOR	KETERANGAN
		5. **Penyediaan Data** Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. 6. **Pelaksanaan dan Penyediaan Data** Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 7. **Penyediaan Data** Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. 8. **Belum tercapainya** Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan **dan perlu ditingkatkan**
TPB 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	Jumlah Indikator 14, 7 indicator yang masih ada Gap Permasalahan	1. **Belum tercapainya** Rasio penerimaan pajak terhadap PDB **dan perlu ditingkatkan** 2. **Penyediaan Data** Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 3. **Penyediaan Data** Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 4. **Penyediaan Data** Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 5. **Penyediaan Data** Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. 6. **Belum tercapainya** Proporsi penduduk terlayani mobile broadband **dan perlu ditingkatkan** 7. **Belum tercapainya** Proporsi individu yang menggunakan internet **dan perlu ditingkatkan**

Dari hasil identifikasi gap pada masing-masing indikator TPB diatas kemudian dilakukan analisis capaian TPB, yang jelasnya dapat dilihat pada **Tabel IV.3** dibawah ini.

Tabel IV.3 Analisis Gap Capaian TPB di Kota Balikpapan

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator (Total)	Indikator Tidak Ada Data (NA)		Indikator Belum Tercapai		Total Skor	Rank Strategis Capaian TPB
			Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Tanpa Kemiskinan	24	6	25,00	5	20,83	45,83	**8**
2	Tanpa Kelaparan	9		0,00	4	36,36	36,36	**9**
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	30	3	10,00	6	20,00	30,00	**10**
4	Pendidikan Berkualitas	13	2	15,38	1	7,69	23,08	**12**
5	Kesetaraan Gender	14	5	35,71	3	21,43	57,14	**4**
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	15	5	33,33	4	26,67	60,00	**2**
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	1	50,00		0,00	50,00	**6**
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	2	11,11	6	33,33	44,44	**7**
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	11	3	27,27	1	9,09	36,36	**9**
10	Berkurangnya Kesenjangan	4	2	28,57		0,00	28,57	**11**
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	12	4	33,33	1	8,33	41,67	**5**
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	3	60,00		0,00	60,00	**3**
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	2						**13**
14	Ekosistem Laut	0						**13**
15	Ekosistem Darat	3	1	25,00	1	25,00	50,00	**6**
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	20	6	37,50	2	12,50	50,00	**6**
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	14	4	44,44	3	33,33	77,78	**1**

Sumber : Hasil Analisis, 2023

4.3.1.2 Telahaan Dokumen Strategis

Untuk merumuskan isu Strategis didalam KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 tentu dokumen – dokumen strategis baik dokumen nasional dan provinsi hrus menjadi pertimbangan, adapun dokumen strategis yang ditelaah terkait dengan isu yaitu:

1) Longlist KLHS RPJPN Tahun 2025 – 2045

a) Upaya Penurunan Emisi GRK Dilakukan Melalui Pembanguann Rendah Karbon yang difokuskan pada sektor Prioritas seperti lahan, energi dan limbah

b) Pembangunan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukan oleh menurunnya intensitas emisi GRK

c) Kebijakan Reformasi pengelolaan Sampah, Limbah Cair, Limbah B3 dan Limbah Medis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan prilaku masyakarat

d) Kebijakan pengurangan laju deforestasi di lahan gambut dan mineral, Rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk mangrove serta restorasi gambut yang lebih ambisius sebagai upaya mencegah pelepasan emisi karbon dan mempertahankan habitat flora dan fauna

e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan

f) Pengukuran upaya pengurangan ancaman dan pemanfaatan kehati secara berkelanjutan dengan menggunakan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK)

g) Kebijakan intensifikasi pertanian dan akuakultur melalui sawah, irigasi, pertanian organik, peremajaan sawit, sertifikasi ISPO, tambak intensif, dan produksi ikan tangkap dibawah batasan biologis aman (MSY) untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan

h) Kebijakan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risikon bencana dan dampak perubahan iklim dalam upaya pengurangan dampak kerugian ekonomi

i) Kebijakan pengembangan frey infrastucture (Sea wall, Breakwater, Spilway, Dll) dan nature-based solution, (pembanguan green belt, vegetasi pelindung pantai, dsb)

j) Kebijakan Efisiensi energi pada sektor industri, komersial dan rumah tangga untuk menjaga tingkat konsumsi energi sebagai upaya konservasi dan meningkatkan ketahanan energi

k) Pengembangan EBT pada sektor pembangkit listrik dan Nonpembangkit dengan pemanfaatan tenaga air, panas bumi, biomassa, biogas, surya, bayu, nukli, dsb

l) Pemanfaatan teknologi carbon capture pada sektor pembangkit dan sektor industri untuk memitigasi emisi dari sumber energi fosil yang belum bisa digantikan oleh EBT

m) Percepatan phase-out PLTU batubara sebagai upaya penurunan emisi sektor energi

n) Ekonomi sirkular, sebagai arah kebijakan ekonomi hijau, diterapkan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, perpanjangan masa pakai produk, dan pemanfaatan kembali sisa produk dan konsumsi

o) Arah kebijakan depan perlu mencakup peningkatan pendanaan dari sumber inovatif, pengembangan skill SDM untuk pekerjaan hijau, dan penginkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup yang rendah karbon

p) Untuk mencapai Visi Indonesia 2045, modal ekonomi businees-as-usual yang masih berbasis eksploitasi sumber daya alam tidak lagi sesuai untuk diterapkan

q) Salah satu strategi Transformasi Ekonomi adalah melalui Ekonomi Hijau, Indonesia penting untuk menerapkan Ekonomi Hijau jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan

r) Penerapan kota kompak dengan implementasi integrasi aktivitas dan transportasi antarmoda atau Transit Oriented Development (TOD)

s) Pengembangan transportasi massal yang handal dan efisien

2) Isu Besar di dalam Dokumen RPJPN Tahun 2025 - 2045

a) Tata Kelola di Indonesia Masih Relative Lemah
b) Middle Income Trap
c) Tata Kelola di Indonesia Masih Relative Lemah
d) Hukum Berkeadilan, Ketahanan Nasional dan Demokrasi Substansi
e) Stabilitas Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan
f) Ketahanan Sosial-Ekologi

3) Isu di dalam Dokumen RPJMN Tahun 2020-2040

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas
b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c) Meningatkan SDM Berkualitas dan Berdayasaing
d) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
e) Memperkuat Infrastuktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

4) Isu Strategis didalam Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

a) Masih terdapat masyarakat Kota Balikpapan yang hidup di bawah garis kemiskinan
b) Masih terdapat masyarakat penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
c) Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas bidang Kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan Pekerja
d) Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran
e) Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
f) Masih tingginya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi dengan sumber bahan baku energi yang tidak terbarukan Belum maksimalnya pengelolaan sumberdaya energi terbarukan
g) Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja terpuruknya bidang pekerjaan sektor informal selama pandemi Covid 19
h) Masih diperlukannya peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk serta perlunya peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha

i) Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi jika dilihat dari Rasio Gini Kota Balikpapan

j) Masih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah

k) Masih teradapat warga kota yang belum memperoleh layanan air bersih Masih terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan air baku

l) Masih terdapat permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah Masih terjadinya banjir diwilayah Kota Balikpapan adanya pembukaan/pengupasan lahan yang tidak terpantau

m) Masih tingginya produksi timbulan sampah domestik warga

n) Masih perlunya peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim terutama di bidang kesehatan

o) Adanya pencemaran laut akibat peristiwa tumpahan minyak dan aktivitas lalu lintas laut, adanya ancaman terhadap keragaman hayati laut akibat aktivitas lalu lintas laut. Perlunya konservasi kawasan pesisir dan keterbukaan akses bagi masyarakat umum

p) Masih adanya aktivitas pembangunan yang tidak memepertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan

q) Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum

5) Isu didalam Dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan Tahun 2016 sampai tahun 2020

- **ISU DIKPLHD 2016**

a) Keterbatasan Ketersediaan Air Baku

b) Banjir

c) Degradasi Kawasan Pesisir Timur Balikpapan

d) Pengupasan Lahan yang Tidak Terkendali

e) Persoalan Sanitasi Limbah Domestik

f) Kebakaran area tambang Batubara

- **ISU DIKPLHD 2017**

a) Timbulan Sampah di Pesisir/Laut

b) Tanah Longsor

c) Belum Terkelolanya Limbah B3 Rumah Tangga

d) Wabah Difteri

e) Semburan Gas Liar Saat Pengeboran Air Tanah

f) Tercemarnya Air Permukaan

g) Eksploitasi Air Tanah Secara Berlebihan

- **ISU DIKPLHD 2018**
  a) Pemanfaatan air tanah dan penurunan level muka air tanah
  b) Kerusakan mangrove
  c) Penurunan Kualitas Air Sungai
  d) Penurunan Kualitas Udara
  e) Pengupasan Lahan yang tidak terkendali
  f) Meningkatnya bencana kebakaran lahan
  g) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
  h) Kurangnya tenaga pengawas lingkungan hidup
- **ISU DIKPLHD 2019**
  a) Belum Berhasilnya Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber
  b) Dampak Lingkungan Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN (Ibu Kota Negara)
  c) Belum Terkelolanya Sampah B3 Rumah Tangga
  d) Banyaknya Pengakuan Kepemilikan Lahan Hutan Kota
  e) Tingginya Intensitas Bencana Kebakaran
  f) Perubahan Iklim di Kota Balikpapan
  g) Tidak Terkendalinya Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Domestik
  h) Pencemaran Laut Akibat Sampah dan Ceceran Batubara
- **ISU DIKPLHD 2020**
  a) Masih adanya lahan kritis yang berada diluar kawasan hutan;
  b) Pelanggaran tata ruang atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya;
  c) Pencemaran Lingkungan dan Persampahan;
  d) Pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga;
  e) IPAL industi belum terpantau dengan baik;
  f) Produksi sampah rumah tangga yang tinggi;
  g) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai;
  h) Kurangnya tempat pengelolaan sampah yang memadai;
  i) Pengelolaan limbah yang kurang baik;
  j) Pencemaran sungai oleh e-coli;
  k) Pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan, di jembatan, tepi sungai, sawah dan lainnya;
  l) Penurunan kualitas air;
  m) Penurunan kualitas udara;
  n) Bencana Alam Kejadian bencana alam;

o) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana;

p) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;

q) Tingginya jumlah kendaraan bermotor penyumbang emisi;

r) Masih banyak perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai izin;

s) Adanya aktivitas yang menjadi kegiatan wisata yang belum menjadi objek pembinaan pemerintah Kota Balikpapan.

6) Isu Prioritas DIKPLHD Provinsi Kalimntan Timur Tahun 2023

a) Kerusakan Sumber Daya Alam Kerusakan Keanekaragaman Hayati

b) Pencemaran atau Kerusakan Liingkungan Hidup yang terjadi berdampak signifikan

c) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera

7) Isu didalam Dokumen KLHS RTRW Kota Balikpapan Tahun 2022

a) Pertumbuhan dan Migrasi Penduduk

b) Rawan Banjir

c) Keterbatasan Sumber dan Penurunan Kualitas air Bersih

d) Degradasi dan Pencemaran Wilayah Pesisir

e) Pengelolaan Sampah Belum Optimal

f) Alih Fungsi dan Konflik Lahan

g) Potensi Terjadinya Bencana Alam Berupa ancaman Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan

h) Belum Optimalnya pengelolaan transportasi darat dan laut

i) Keterancaman Biodiversity

8) Isu Hasil FGD dan Konsultasi Publik KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 230

Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Balikpapan yang telah dilakukan Konsultasi Publik pada Tanggal 18 September 2023 menghasilkan 51 isu panjang, jelasnya dapat dilihat pada **Tabel IV.4** dibawah ini.

Tabel IV.4 Longlist Isu Pembangunan Berkelanjutan

No	Longlist Isu KLHS RPJMD Kota Balikpapan	Pemusatan Isu
1	Penurunan kualitas air;	Ketersediaan Air Baku
2	Tercemarnya Air Permukaan	
3	Penurunan Kualitas Air Sungai	
4	Eksploitasi Air Tanah Secara Berlebihan	
5	Masih terbatasnya kapasitas pemenuhan kebutuhan air baku	
6	Minimnya ketersediaan dan pelayanan air bersih	
7	Perlunya pengembangan desalinasi air	
8	Tingginya pemanfaatan air tanah dan penurunan level muka air tanah	
9	Tingginya emisi GRK;	Pengendalian Emisi GRK
10	Penurunan kualitas udara;	
11	Belum adanya upaya penurunan Emisi GRK oleh daerah	
12	Perlunya upaya penggunaan EBT	
13	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal	
14	Pencemaran Laut Akibat Sampah dan Ceceran Batubara	Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut
15	Degradasi Keanekaragaman Hayati	
16	Degradasi Kawasan Pesisir Timur Balikpapan	
17	Kerusakan mangrove	
18	Pengupasan Lahan yang tidak terkendali	Keterbatasan dan kerusakan lahan
19	Polemik Pengakuan Kepemilikan Lahan Hutan Kota	
20	Masih adanya lahan kritis yang berada diluar kawasan hutan;	
21	Alih fungsi lahan	
22	masih adanya pelanggaran periijnan penggunaan lahan	
23	Minimnya lahan potensial di Balikpapan untuk pengembangan permukiman	
24	Rendahnya sanitasi Limbah Domestik	Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah
25	IPAL industi belum terpantau dengan baik;	
26	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah	
27	Kurangnya tempat pengelolaan sampah yang memadai;	
28	Kebakaran area tambang Batubara	Masih adanya risiko bencana
29	Banjir	
30	Semburan Gas Liar Saat Pengeboran Air Tanah	
31	Tanah Longsor	
32	Tingginya Intensitas Bencana Kebakaran	
33	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana;	
34	Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;	
35	Masih perlunya peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim terutama di bidang kesehatan	
36	Masih terdapat permukiman kumuh	perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan
37	masih adanya wabah Difteri	
38	Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas bidang Kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan Pekerja	
39	Kurangnya tenaga pengawas lingkungan hidup	masih adanya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah
40	Masih banyak perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai izin;	
41	Adanya aktivitas yang menjadi kegiatan wisata yang belum menjadi objek pembinaan pemerintah Kota Balikpapan.	

No	Longlist Isu KLHS RPJMD Kota Balikpapan	Pemusatan Isu
42	Tata Kelola di Indonesia Masih Relative Lemah	
43	Middle Income Trap	
44	Masih adanya aktivitas pembangunan yang tidak memepertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan	
45	Masih terdapat masyarakat penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
46	Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran	
47	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	
48	Masih tingginya angka pengangguran	
49	masih rendahnya kapasitas entrepreneurship masyarakat	
50	Dampak Lingkungan Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN (Ibu Kota Negara)	Dampak bangkitan dari pembangunan IKN
51	Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum	Masih lemahnya penegakan hukum

Sumber : Hasil Analisis, 2023 (FGD & KP 1)

Kedelepan isu didalam dokumen strategis tersebut kemudian dicrosscutting dengan 17 TPB yang menghasilkan rank Strategis. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel IV.5** dibawah ini.

Tabel IV.5 Analisis Crosscutting TPB dengan Isu Menurut Dokumen Strategis di Kota Balikpapan

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1	2	3	4	5	6	7	8	Skor	Rank Strategis
1	Tanpa Kemiskinan	*		*			*			3,00	3
2	Tanpa Kelaparan			*			*			2,00	4
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*	*	*			*			4,00	2
4	Pendidikan Berkualitas			*			*			2,00	4
5	Kesetaraan Gender			*			*			2,00	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak		*			*			*	3,00	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau								*	1,00	5
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	*	*	*						3,00	3
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	*	*	*						3,00	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	*								1,00	5
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	*	*		*	*		*	*	6,00	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab					*		*	*	3,00	3
13	Penanggulangan Perubahan Iklim		*			*		*	*	4,00	2
14	Ekosistem Laut					*				1,00	5
15	Ekosistem Darat					*				1,00	5
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh				*					1,00	5
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	*								1,00	5

Sumber : Hasil Analisis, 2023

4.3.1.3 Isu Muatan Kondisi Lingkungan Hidup

Penelahaan kondisi lingkungan hidup di Kota Balikpapan telah diuraikan pada Bab 3. Berdasarkan hasil kajian 6 muatan lingkungan hidup tersebut, berikut merupakan kondisi yang menjadi isu di Kota Balikpapan:

1) Tingginya degradasi dan kerentanan ekosistem darat, laut, dan pesisir
2) Tingginya risiko bencana akibat perubahan iklim
3) Kurang optimalnya efisiensi pengaturan tata air dan banjir
4) Rendahnya Jasa ekosistem penyedia air

Setiap isu berdasarkan muatan kondisi lingkungan hidup tersebut selanjutnya disilangkan *(crosscutting)* dengan 17 TPB. TPB yang memiliki hubungan paling banyak dengan isu kondisi lingkungan hidup lebih menjadi Strategis. Hasil *crosscutting* TPB dengan isu kondisi lingkungan hidup di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Tabel IV.6** dibawah ini.

Tabel IV.6 Analisis Crosscutting TPB dengan Isu Kondisi Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tingginya degradasi dan kerentanan ekosistem darat, laut, dan pesisir	Kurang optimalnya efisiensi pengaturan tata air dan banjir	Rendahnya Jasa ekosistem penyedia air	Jumlah	Rank Strategis
1	Tanpa Kemiskinan	*			2,00	3
2	Tanpa Kelaparan	*	*	*	4,00	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*		*	3,00	2
4	Pendidikan Berkualitas				0,00	4
5	Kesetaraan Gender				0,00	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	*	*	*	4,00	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau				0,00	4
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				0,00	4
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	*	*	*	4,00	1
10	Berkurangnya Kesenjangan				0,00	4
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	*	*	*	4,00	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	*			2,00	3
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	*	*	*	4,00	1
14	Ekosistem Laut	*			2,00	3
15	Ekosistem Darat	*	*	*	4,00	1
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh				0,00	4
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan				0,00	4

Sumber : Hasil Analisis, 2023

4.3.2 Pemeringkatan Isu

Dari hasil penelahaan isu diatas baik dari dokumen strategis maupun dari penjaringan isu PB melalui FGD dan Konsultasi Publik 1, isu yang ada kemudian dilakukan crosscutting adalah sebagai berikut. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel IV.7** berikut.

Tabel IV.7 Analisis Crosscutting Isu dengan 6 Kajian Muatan di Kota Balikpapan

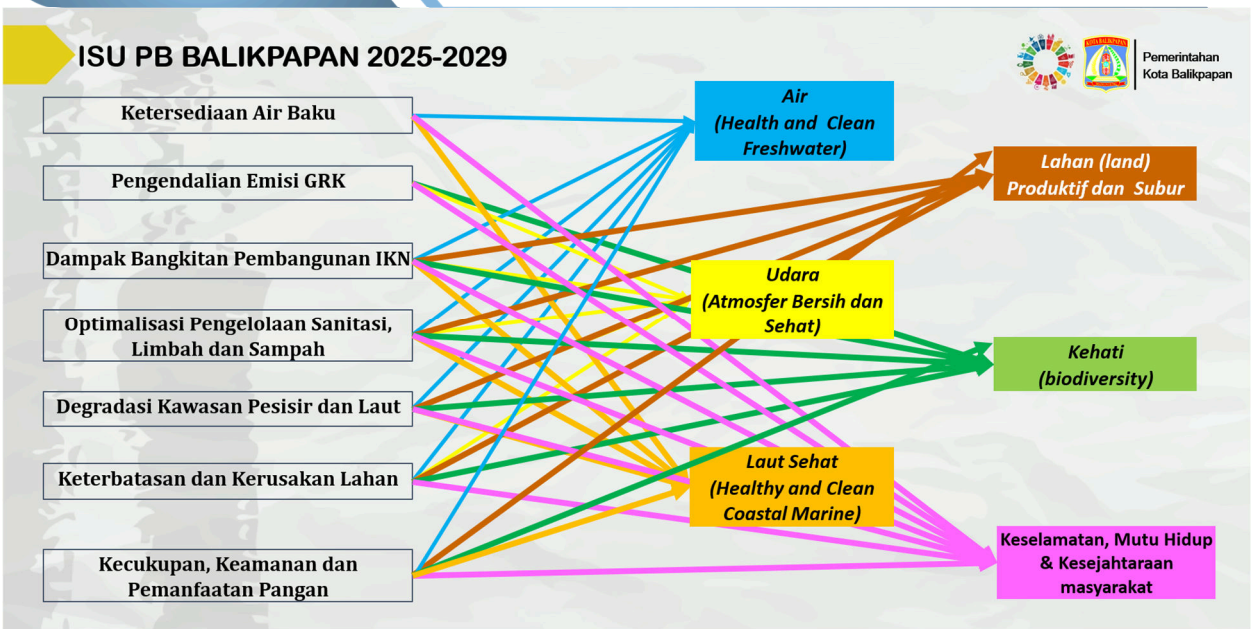
Hasil Pemusatan Isu	Kajian 6 Muatan						Total Skor
	D3TLH	JLH	Efisiensi	Risiko Dampak LH	Iklim	Kehati	
Ketersediaan Air Baku	V	V		V	V		4
Pengendalian Emisi GRK	V	V		V	V	V	5
Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut	V	V	V	V	V	V	6
Keterbatasan dan kerusakan lahan	V	V	V	V	V	V	6
Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah	V	V		V	V		4
Masih adanya risiko bencana				V	V		2
perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan		V					1
masih adanya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah			V				1
Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat			V				1
Dampak bangkitan dari pembangunan IKN	V	V	V	V	V	V	6
Masih lemahnya penegakan hukum	V						1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dari hasil *croscutting* menghasilkan 6 isu Strategis, kemudian pada saat dilakukan Konsultasi Publik 1 terdapat masukan untuk menambahkan 1 isu, maka hasil dari kesepakatan dengan Stakeholder dan Pokja KLHS didapatkan 7 daftar pendek isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Balikpapan yaitu :

1) Ketersediaan Air Baku
2) Pengendalian Emisi GRK
3) Dampak Bangkitan Pembangunan IKN
4) Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah
5) Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut
6) Keterbatasan dan Kerusakan Lahan
7) Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan

Lebih jelasnya mengenai Isu PB Balikpapan yang dikaitkan dengan *Landscape Sustainability* dapat dilihat pada **Gambar 4.10** dibawah ini



Gambar 4.10 Isu PB Kota Balikpapan dikaitkan dengan *Landscape Sustainability*

Setelah melakukan proses identifikasi isu strategis dalam kerangka kebijakan terkait, selanjutnya dilakukan pengelompokan isu strategis sehingga dapat membantu organisasi atau pemerintah untuk fokus pada tantangan dan peluang khusus yang berkaitan. Hasil pengelompokan isu strategis pembangunan berkelanjutan berdasarkan telaah dokumen strategis di Kota Balikpapan menghasilkan 7 Isu Strategis diantaranya :

1) Ketersediaan Air Baku

Kota Balikpapan yang merupakan salah satu kota utama di Provinsi Kalimantan Timur dan berfungsi sebagai daerah penyangga IKN, menghadapi masalah dalam penyediaan air bersih yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan domestik masyarakat, tetapi juga pada kebutuhan industri dan kawasan pembangunan yang terus berkembang.

- Keterbatasan Sumber Daya Air

  Ketersediaan air bersih di Balikpapan terbatas karena bergantung pada beberapa sumber air utama yang ada di sekitar kota, seperti sungai dan waduk, yang saat ini sudah mulai mengalami tekanan akibat pertumbuhan populasi yang pesat dan kebutuhan air yang terus meningkat. Balikpapan menghadapi tantangan besar dalam mengelola kualitas dan kuantitas sumber daya air, terlebih lagi ketika pembangunan IKN yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara mulai mempengaruhi kebutuhan air di wilayah sekitar.

  Sebagai kota yang berada di kawasan pesisir, Balikpapan juga rentan terhadap perubahan kualitas air akibat pencemaran dari aktivitas industri, domestik, serta limpasan air laut. Dengan pembangunan IKN yang akan menarik lebih banyak aktivitas ekonomi, demografis, serta proyek infrastruktur besar-besaran, permintaan terhadap air bersih diperkirakan akan semakin meningkat, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk kebutuhan industri dan konstruksi yang terkait dengan pembangunan IKN.

- Tantangan Infrastruktur Air Bersih

  Salah satu masalah utama yang dihadapi Balikpapan adalah keterbatasan infrastruktur penyediaan air bersih yang belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan permintaan. Sebagai kota yang terus berkembang, baik dari sisi populasi maupun aktivitas industri, sistem penyediaan air bersih di Balikpapan membutuhkan perbaikan dan perluasan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor industri. Pembangunan infrastruktur air bersih yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk pabrik pengolahan air dan jaringan distribusi yang lebih luas, menjadi prioritas dalam mendukung keberlanjutan pembangunan kota, terutama dalam konteks Balikpapan sebagai kota penyangga IKN.

  Dalam konteks ini, proyek-proyek yang berkaitan dengan pembangunan IKN dapat memberikan tekanan lebih besar pada kapasitas infrastruktur air di Balikpapan. Permintaan yang meningkat untuk kebutuhan air bersih, baik dari sektor domestik maupun sektor industri yang berkembang pesat, akan memerlukan investasi besar-besaran untuk pengembangan infrastruktur air bersih yang memadai.

2) Pengendalian emisi GRK

Kota Balikpapan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki peran strategis dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan. Sebagai kota yang dekat dengan lokasi IKN, Balikpapan berpotensi menjadi salah satu daerah yang terdampak langsung oleh perkembangan IKN, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam konteks pembangunan IKN adalah pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), yang berhubungan erat dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Meningkatnya emisi GRK di Balikpapan berpotensi menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, termasuk fenomena *urban heat island* (UHI) atau pulau panas perkotaan. Fenomena ini menjadi isu krusial yang harus segera diatasi, mengingat Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi, transportasi, dan logistik, serta menjadi pintu gerbang bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan datang.

Kota Balikpapan, dengan segala potensi dan tantangannya, harus mulai mengintegrasikan pengendalian emisi GRK ke dalam perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan. Fenomena Urban Heat Island (UHI) yang berpotensi semakin parah seiring dengan urbanisasi dan peningkatan emisi GRK menjadi ancaman yang perlu diatasi secara serius. Pengendalian emisi GRK di Kota Balikpapan sangat terkait dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang akan membawa perubahan signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian emisi GRK di Balikpapan harus menjadi prioritas dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan Kota Balikpapan dapat bertransformasi menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian emisi GRK dan mitigasi UHI tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Balikpapan, tetapi juga akan memberikan kontribusi besar terhadap keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan.

3) Dampak Bangkitan Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan bagi Kota Balikpapan. Sebagai salah satu kota yang berfungsi sebagai daerah penyangga IKN, Balikpapan akan menghadapi berbagai dampak bangkitan dari pembangunan IKN, yang bisa dirasakan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Dampak-dampak ini tidak hanya akan mempengaruhi perkembangan Kota Balikpapan, tetapi juga menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola dengan bijak agar dapat menciptakan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan. Salah satu dampak utama dari pembangunan IKN terhadap Kota Balikpapan adalah peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan semakin berkembangnya IKN, Balikpapan, yang berfungsi sebagai pusat logistik, perdagangan, dan sumber daya untuk pembangunan IKN, akan mengalami lonjakan permintaan dalam sektor konstruksi, industri, dan jasa. Kota ini diperkirakan akan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan IKN dengan wilayah lain di Indonesia dan luar negeri. Peningkatan kebutuhan akan bahan bangunan, peralatan industri, dan tenaga kerja akan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk berkembang pesat. UMKM di Balikpapan akan mendapat kesempatan untuk terlibat dalam penyediaan produk dan jasa yang dibutuhkan selama proses pembangunan IKN. Oleh karena itu, sektor industri dan perdagangan di Balikpapan akan mengalami peningkatan, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan daerah. Salah satu dampak penting dari pembangunan IKN terhadap Balikpapan adalah dampak lingkungan. Peningkatan aktivitas pembangunan di sekitar IKN dapat mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah di wilayah Balikpapan. Proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, jalan tol, dan pemukiman baru dapat berpotensi merusak ekosistem alami dan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar Balikpapan, termasuk kawasan pesisir dan hutan tropis. Selain itu, peningkatan jumlah kendaraan dan industri dapat menyebabkan polusi udara dan kemacetan yang memperburuk kualitas hidup masyarakat. Balikpapan perlu merencanakan pembangunan yang lebih berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta penanggulangan pencemaran yang lebih efektif. Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kota Balikpapan juga akan merasakan dampak dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan akan mendorong kebutuhan akan tenaga kerja terampil dalam berbagai bidang, mulai dari konstruksi hingga teknologi informasi. Oleh karena itu, Balikpapan perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap terlibat dalam berbagai proyek terkait IKN. Hal ini dapat membuka peluang bagi Balikpapan untuk menjadi pusat pelatihan keterampilan dan pendidikan tinggi, terutama dalam bidang yang relevan dengan kebutuhan pembangunan IKN seperti infrastruktur, teknologi, dan manajemen.

4) Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah

Kota Balikpapan, sebagai salah satu kota penyangga bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sanitasi, limbah, dan sampah. Meskipun Kota Balikpapan telah mengalami berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan di sektor ini, namun masalah pengelolaan yang kurang optimal masih tetap menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan. Hal ini menjadi lebih krusial mengingat adanya rencana pembangunan IKN yang

diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan urbanisasi di Kalimantan Timur, khususnya di sekitar Kota Balikpapan. Pembangunan IKN yang besar dan berkelanjutan berpotensi meningkatkan volume sampah, limbah industri, dan kebutuhan akan sanitasi yang lebih baik, yang pada gilirannya akan memperburuk masalah pengelolaan di Kota Balikpapan jika tidak diatasi secara serius.

- Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah dan Limbah

  Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kota Balikpapan adalah keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah. Sistem pengumpulan sampah yang ada saat ini belum sepenuhnya mencakup seluruh wilayah kota, terutama di daerah pinggiran dan pemukiman padat penduduk. Selain itu, pengelolaan sampah rumah tangga, komersial, dan industri sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, yang mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa area, bahkan di kawasan pusat kota.

  Peningkatan jumlah penduduk yang pesat, khususnya akibat urbanisasi yang terus meningkat, berkontribusi pada semakin tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Meskipun sudah ada tempat pembuangan akhir (TPA) di Balikpapan, kapasitas TPA tersebut sering kali tidak mencukupi untuk menampung sampah yang terus bertambah. Hal ini menyebabkan masalah sampah yang terbuang sembarangan, yang berpotensi mencemari lingkungan dan merusak estetika kota.

- Sanitasi yang Tidak Merata

  Pengelolaan sanitasi di Kota Balikpapan juga masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat sejumlah pemukiman yang belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memadai. Banyak rumah tangga yang masih mengandalkan septic tank yang tidak terawat dengan baik, yang berpotensi mencemari sumber air tanah dan menciptakan masalah kesehatan masyarakat.

  Di daerah-daerah tertentu, pengelolaan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan pencemaran air dan penyakit berbasis sanitasi, seperti diare dan penyakit saluran pencernaan lainnya. Sanitasi yang buruk juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat, serta menambah beban pada sektor kesehatan kota. Oleh karena itu, akses terhadap sanitasi yang aman dan layak harus menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur kota.

- Pengelolaan Limbah Industri dan Domestik yang Tidak Terpadu

  Balikpapan sebagai kota industri, terutama dengan adanya sektor minyak dan gas yang berkembang pesat, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah industri. Banyak industri yang menghasilkan limbah berbahaya yang tidak sepenuhnya dikelola dengan baik. Selain itu, limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga dan kawasan komersial juga seringkali tidak dikelola dengan cara yang ramah lingkungan.

  Kurangnya fasilitas pengolahan limbah yang memadai dan kurangnya pengawasan terhadap pembuangan limbah industri ke lingkungan menjadi isu strategis yang harus diselesaikan. Jika tidak ditangani dengan serius, limbah berbahaya ini dapat mencemari udara, air, dan tanah di sekitar Balikpapan, yang pada gilirannya dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu ekosistem di wilayah tersebut.

- Keterbatasan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

  Isu sanitasi, limbah, dan sampah juga terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Masyarakat Balikpapan, meskipun sudah ada upaya sosialisasi, masih belum sepenuhnya menerapkan pola hidup ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan limbah. Banyak individu yang belum teredukasi dengan baik mengenai pentingnya pengurangan sampah, pemilahan sampah, dan daur ulang.

  Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah di tingkat rumah tangga turut memperburuk masalah ini. Sebagian besar sampah masih dibuang sembarangan atau tidak dipisahkan sesuai jenisnya, sehingga menghambat proses daur ulang dan pengelolaan yang lebih efisien. Perlu ada upaya yang lebih masif dalam kampanye pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan limbah.

5) Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut

Kota Balikpapan, sebagai salah satu kota pesisir yang terletak di Kalimantan Timur, memiliki potensi alam yang sangat besar dengan wilayah laut dan pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kawasan pesisir dan laut ini bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal, tetapi juga memiliki nilai penting sebagai area konservasi alam dan penyangga ekosistem. Namun, seiring dengan pesatnya pembangunan dan aktivitas industri, Kota Balikpapan kini menghadapi isu strategis terkait degradasi kawasan pesisir dan laut yang semakin parah.

Degradasi kawasan pesisir dan laut di Balikpapan diakibatkan oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas industri, perubahan penggunaan lahan, hingga polusi yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Kawasan pesisir yang dulu menjadi habitat alami bagi berbagai spesies, seperti mangrove, terumbu karang, dan berbagai ikan, kini mengalami kerusakan yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

- Polusi Laut dan Sampah Plastik

  Salah satu penyebab utama degradasi kawasan pesisir dan laut di Balikpapan adalah polusi sampah, terutama sampah plastik. Meningkatnya aktivitas ekonomi, baik dari sektor industri maupun konsumsi rumah tangga, menyebabkan volume sampah plastik yang dibuang ke laut semakin meningkat. Sampah plastik yang mencemari pantai dan perairan Balikpapan mengancam ekosistem laut, terutama bagi spesies laut yang hidup di daerah pesisir.

  Sampah plastik yang terbuang ke laut tidak hanya mencemari kualitas air, tetapi juga dapat merusak habitat terumbu karang, mengganggu kehidupan biota laut, dan membahayakan kesehatan makhluk hidup yang mengonsumsinya. Selain itu, sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat berkontribusi pada penurunan kualitas wisata pesisir yang menjadi salah satu daya tarik Kota Balikpapan.

- Pengaruh Aktivitas Industri terhadap Lingkungan Laut

  Kota Balikpapan juga merupakan pusat industri besar, terutama dalam sektor minyak dan gas, serta pertambangan yang berdekatan dengan kawasan pesisir dan

laut. Aktivitas industri ini sering kali menghasilkan limbah berbahaya yang dibuang ke laut atau saluran pembuangan yang tidak dikelola dengan baik. Limbah industri ini mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kualitas air laut dan menyebabkan pencemaran yang berpengaruh pada kesehatan ekosistem pesisir dan laut.

Pencemaran akibat aktivitas industri ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air, mempengaruhi kelangsungan hidup terumbu karang, serta berdampak pada ketahanan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Dampak ini semakin dirasakan dengan adanya perburuan ikan yang semakin intensif, yang mengurangi keberagaman hayati dan kualitas stok ikan di perairan Balikpapan.

- Kehilangan Ekosistem Mangrove dan Terumbu Karang

  Kehilangan atau kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang di kawasan pesisir Balikpapan merupakan bagian dari degradasi lingkungan yang semakin memperburuk kondisi ekosistem laut. Pembangunan pesisir yang tidak terkendali, seperti reklamasi, pembangunan pemukiman, dan pengembangan industri yang mengorbankan kawasan mangrove, telah menyebabkan hilangnya perlindungan alam yang seharusnya berfungsi untuk mencegah erosi pantai dan melindungi biodiversitas laut.

  Mangrove dan terumbu karang memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka tidak hanya menyediakan tempat berlindung bagi berbagai spesies ikan, tetapi juga berfungsi sebagai penyaring alami untuk polutan dan menjaga kestabilan pesisir dari ancaman abrasi. Tanpa perlindungan yang memadai, kawasan pesisir di Balikpapan semakin rentan terhadap bencana alam, seperti banjir dan abrasi pantai, yang mengancam pemukiman dan sumber daya alam lokal.

- Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Kawasan Pesisir

  Perubahan iklim global juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi kawasan pesisir dan laut di Kota Balikpapan. Kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global mengancam garis pantai, mengurangi luas daratan pesisir, serta memperburuk masalah erosi. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi suhu dan salinitas air laut, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan memperburuk kesehatan terumbu karang.

  Peningkatan frekuensi dan intensitas badai tropis juga berisiko merusak infrastruktur pesisir dan mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang garis pantai. Oleh karena itu, penanganan isu perubahan iklim yang berdampak pada kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi lingkungan di Kota Balikpapan.

6) Keterbatasan dan kerusakan lahan

Kota Balikpapan, yang terletak di pesisir timur Kalimantan, merupakan salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi besar, terutama di sektor industri dan energi. Namun, di balik pesatnya perkembangan kota ini, Kota Balikpapan menghadapi masalah serius terkait dengan keterbatasan dan kerusakan lahan, yang menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani. Masalah ini tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem,

tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat serta kelangsungan pembangunan kota yang berkelanjutan.

- Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur dan Perumahan

  Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kebutuhan akan lahan untuk pengembangan infrastruktur dan perumahan semakin meningkat di Kota Balikpapan. Keterbatasan lahan yang tersedia, terutama lahan yang berada di wilayah strategis atau dekat dengan kawasan pusat bisnis dan pemerintahan, menjadi salah satu tantangan utama dalam merencanakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

  Sebagian besar lahan yang tersedia di Balikpapan sudah terpakai untuk kepentingan industri, pertambangan, dan pemukiman. Akibatnya, pengembangan kawasan baru, baik untuk perumahan maupun industri, sering kali terhambat oleh tingginya harga lahan, keterbatasan aksesibilitas, serta faktor lingkungan yang harus diperhatikan. Sementara itu, banyak kawasan potensial untuk pengembangan yang terletak di daerah-daerah rawan bencana atau yang memiliki keanekaragaman hayati yang harus dilindungi.

- Kerusakan Lahan Akibat Konversi Lahan untuk Sektor Industri

  Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan lahan di Balikpapan adalah konversi lahan untuk kebutuhan sektor industri, terutama sektor minyak dan gas serta pertambangan. Ekspansi industri yang cepat menyebabkan banyak lahan yang sebelumnya berupa hutan atau lahan pertanian diubah menjadi area industri, kawasan pemukiman, atau area komersial. Konversi lahan yang tidak terkelola dengan baik ini menyebabkan degradasi lahan, penurunan kualitas tanah, serta berkurangnya fungsi ekologis yang penting, seperti penyerapan air dan keseimbangan ekosistem.

  Selain itu, kegiatan pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, termasuk penurunan kualitas tanah, penggundulan hutan, dan erosion yang memperburuk kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan. Kerusakan lahan akibat eksploitasi sumber daya alam ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga menambah beban sosial-ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada lahan untuk mata pencaharian mereka.

- Keterbatasan Lahan untuk Pertanian dan Ketahanan Pangan

  Keterbatasan dan kerusakan lahan di Balikpapan juga berpengaruh terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Lahan pertanian yang semakin sempit dan terdesak oleh ekspansi kawasan industri mengancam ketersediaan produk pertanian lokal, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketahanan pangan daerah. Terlebih lagi, kerusakan lahan pertanian akibat konversi menjadi area komersial atau pemukiman menyebabkan berkurangnya daya dukung lahan untuk produksi pangan.

  Masalah ini semakin diperburuk dengan penggunaan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggundulan lahan untuk pertanian tanpa mengedepankan prinsip konservasi tanah, yang menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan kerusakan ekosistem. Hal ini akan menambah tantangan dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk Kota Balikpapan yang terus berkembang.

- Kerusakan Lahan Akibat Perubahan Penggunaan Lahan dan Urbanisasi

  Urbanisasi yang pesat di Kota Balikpapan juga menjadi faktor yang memperburuk kerusakan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terencana dengan baik menyebabkan konversi hutan dan kawasan hijau menjadi kawasan permukiman atau komersial tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan ini menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau, penurunan kualitas udara, dan meningkatnya pemanasan urban yang berpotensi memperburuk dampak perubahan iklim di masa depan.

  Perubahan ini juga mengancam keanekaragaman hayati yang ada di kawasan pesisir dan sekitar Balikpapan, seperti hilangnya mangrove, hutan bakau, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai penyaring alami polusi, serta memberikan habitat bagi berbagai spesies. Kawasan hijau yang hilang tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga mengurangi kapasitas kota dalam menghadapi bencana alam seperti banjir, abrasi pantai, dan erosi.

7) Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan

Kota Balikpapan, yang terletak di pesisir timur Kalimantan, telah mengalami transformasi pesat baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun demografi. Seiring dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, Kota Balikpapan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kecukupan, keamanan, dan pemanfaatan pangan yang seimbang dan berkelanjutan. Masalah ini menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam merancang kebijakan pembangunan yang dapat memastikan ketahanan pangan kota di masa depan.

- Peningkatan Permintaan Pangan akibat Pertumbuhan Penduduk

  Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, baik yang berasal dari migrasi maupun pertumbuhan alami, kebutuhan akan pangan di Kota Balikpapan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Balikpapan terus bertambah, seiring dengan perkembangan sektor industri, pertambangan, serta proyek-proyek besar yang berkaitan dengan pembangunan IKN.

  Meningkatnya populasi tersebut menyebabkan pergeseran pola konsumsi dan kebutuhan pangan yang semakin kompleks, dengan permintaan terhadap bahan pangan segar, pangan olahan, serta pangan pokok seperti beras, jagung, sayuran, dan protein hewani terus meningkat. Hal ini menuntut sistem distribusi pangan yang efisien dan pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal agar dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

- Keterbatasan Lahan Pertanian dan Ketergantungan pada Impor

  Keterbatasan lahan pertanian di Kota Balikpapan menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berkelanjutan. Perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan pengembangan kawasan industri mengurangi lahan yang tersedia untuk pertanian, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, maupun perikanan. Akibatnya, Kota Balikpapan semakin bergantung pada pangan impor dan pengiriman bahan pangan dari daerah lain, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi.

Sebagian besar produk pangan yang dibutuhkan oleh kota ini, seperti beras, daging, dan sayuran, harus didatangkan dari luar daerah, sehingga meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan luar dan mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan. Hal ini semakin menambah tantangan dalam mewujudkan kecukupan pangan yang dapat diandalkan untuk seluruh lapisan masyarakat.

- Keamanan Pangan dan Kualitas Pangan

  Masalah keamanan pangan di Kota Balikpapan juga menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Mengingat sebagian besar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat diperoleh dari luar daerah, kualitas dan keamanan pangan menjadi perhatian utama. Beberapa tantangan terkait dengan keamanan pangan antara lain adalah kontaminasi pangan, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian, serta masalah kebersihan dan kualitas produk pangan yang masuk ke pasar kota.

  Pemenuhan standar keamanan pangan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mengingat dampak dari pangan yang terkontaminasi atau tidak memenuhi standar gizi yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap rantai distribusi pangan, dari produsen hingga konsumen, untuk memastikan kualitas pangan yang aman dan layak konsumsi.

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pangan Lokal

  Seiring dengan pembangunan IKN yang berfokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan, Kota Balikpapan memiliki peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Potensi besar yang dimiliki Balikpapan sebagai daerah pesisir memungkinkan untuk memperkuat sektor perikanan dan pertanian berbasis lokal, termasuk produk-produk pertanian yang adaptif terhadap kondisi lokal dan ramah lingkungan.

  Namun, pemanfaatan sumber daya alam tersebut masih menghadapi tantangan, seperti konversi lahan menjadi kawasan pemukiman dan industri, serta kurangnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, pemanfaatan produk pangan lokal, seperti ikan, rumput laut, serta hasil pertanian lokal lainnya, perlu diperkuat melalui program-program yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan petani dan nelayan lokal.

- Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Distribusi Pangan

  Dengan adanya rencana pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur pangan menjadi sangat krusial. Kota Balikpapan memerlukan sistem distribusi pangan yang efisien dan terintegrasi antara sektor produksi, penyimpanan, dan pendistribusian pangan. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, dan cold storage, akan memperlancar proses distribusi bahan pangan ke pasar-pasar lokal dan mengurangi kerugian akibat pembusukan atau kerusakan pangan selama proses distribusi.

  Selain itu, dengan adanya peningkatan arus migrasi yang dibawa oleh pembangunan IKN, kota ini juga perlu memperhatikan ketersediaan pasar pangan yang cukup, agar kebutuhan pangan dari seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai dengan harga yang wajar dan stabil.

- Tantangan Pembangunan IKN Terhadap Ketahanan Pangan

  Pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan membawa dampak yang besar terhadap permintaan pangan di kawasan sekitar, termasuk Kota Balikpapan, yang

menjadi pintu gerbang dan daerah penyangga utama. Meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan pekerja, dan meningkatnya aktivitas ekonomi akan mempercepat permintaan pangan, yang memerlukan penyesuaian dalam strategi ketahanan pangan.

Pembangunan IKN juga membuka peluang untuk memperkenalkan teknologi pertanian dan perikanan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berbasis pada konsep *smart city* dalam pengelolaan pangan. Dengan demikian, keberadaan IKN bisa menjadi peluang bagi Kota Balikpapan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengintegrasikan teknologi dalam produksi dan distribusi pangan.

Dari daftar pendek isu strategis PB di Kota Balikpapan kemudian dilakukan keterkaitan dengan indikator SDGs Tahun 2022 yaitu antara lain Belum tercapai, Perlu Dicapai, dan Telah Tercapai. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel IV.8** dibawah ini.

4.3.3 Analisis Gap Terhadap Pencapaian TPB

Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi gap atau kesenjangan, berupa target TPB yang menjadi isu didalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029. **Tabel IV.9** dibawah ini merupakan hasil analisis kebijakan dan strategi terhadap TPB di Kota Balikpapan.

Tabel IV.8 Identifikasi Isu Strategis PB di Kota Balikpapan

No	Daftar Pendek Isu PB	Indikator Pencapaian SDGs di Kota Balikpapan Tahun 2022			
		SS (Sudah dilaksanakan sudah mencapai Target Nasional)	SB (Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target Nasional)	Belum Dilaksanakan Belum mencapai target nasional	NA (Tidak Ada Data)
1	Ketersediaan Air Baku		6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
2	Pengendalian Emisi GRK				
3	Dampak bangkitan pembangunan IKN		TPB 1 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		TPB 1 1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 1.3.1 (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN 1.5.1 (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 1.a.1’ Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 1.a.2’ Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
			TPB 11 11.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		TPB 11 11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. 11.3.2 (a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. 11.3.2 (b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 11.5.1 (b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
			TPB 15 15.1.1 (a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		TPB 15 15.3.1 (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
4			TPB 6		TPB 6

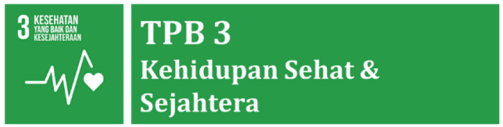
No	Daftar Pendek Isu PB	Indikator Pencapaian SDGs di Kota Balikpapan Tahun 2022			
		SS (Sudah dilaksanakan sudah mencapai Target Nasional)	SB (Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target Nasional)	Belum Dilaksanakan Belum mencapai target nasional	NA (Tidak Ada Data)
	Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah		6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
			TPB 11 11.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		TPB 11 11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. 11.3.2 (a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. 11.3.2 (b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 11.5.1 (b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
5	Keterbatasan dan kerusakan lahan		TPB 2 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.1 (a)Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2 (c)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	TPB 2 2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	
			TPB 6 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		TPB 6 6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
			TPB 15 15.1.1 (a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		TPB 15 15.3.1 (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

No	Daftar Pendek Isu PB	Indikator Pencapaian SDGs di Kota Balikpapan Tahun 2022			
		SS (Sudah dilaksanakan sudah mencapai Target Nasional)	SB (Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target Nasional)	Belum Dilaksanakan Belum mencapai target nasional	NA (Tidak Ada Data)
6	Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan		TPB 2 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.1 (a)Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2 (c)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	TPB 2 2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	
5	Degradasi kawasan pesisir dan laut		TPB 15 15.1.1 (a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		TPB 15 15.3.1 (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel IV.9 Analisis Gap Kebijakan dan Strategi Pada RPJMD Terhadap TPB di Kota Balikpapan

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun		
		1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	**1.3.1 (a)** Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
			1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
			1.3.1 (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
			1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
		1.4. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	**1.4.1 (d)** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
			1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
			1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
		1.5 Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	**1.5.1 (c)** Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
			1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	**1.a.1'** Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
			1.a.2' Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan		
		2.1 Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	**2.1.2 (a)** Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
		2.2 Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	**2.2.1*** Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
			2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia		
		3.4 Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	**3.4.1.(b)** Prevalensi tekanan darah tinggi.
			3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
			3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	**3.5.2*** Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
		3.7 Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	**3.7.1.(a)** Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
			3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
		3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	**3.8.1.(a)** Unmet need pelayanan kesehatan.
		3.9 Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	**3.9.3.(a)** Proporsi kematian akibat keracunan.
		3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	**3.a.1*** Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	 **TPB 4** **Pendidikan Berkualitas**	
		4.1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang	**4.1.1** Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai

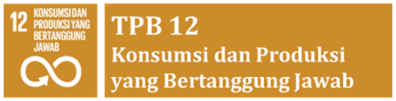
No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
		4.2 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	**4.2.2.(a)** Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
		4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	**4.a.1*** Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan		
		5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	**5.1.1*** Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
		5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	**5.2.1*** Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
		5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	**5.3.1*** Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
			5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
			5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
		5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	**5.6.1*** Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
			5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
			5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua		
		6.1 Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
			6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
		6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
			6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
			6.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
			6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
		6.4 Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air,	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	
		6.5 Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
			6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.		
		7.2 Meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1* Bauran energi terbarukan.
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua		
		8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	**8.1.1 (a)** PDB per kapita.
		8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	**8.2.1*** Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
		8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	**8.3.1 (b)** Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		8.6 Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	**8.6.1*** Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
		8.9 Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	**8.9.1*** Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
			8.9.1 (a) Jumlah wisatawan mancanegara.
		8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	**8.10.1*** Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
			8.10.1(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	 **TPB 9** Industri, Inovasi & Infrastruktur	
		9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	**9.3.1*** Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
			9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
		9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	**9.c.1*** Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
			9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	 **TPB 10** Berkurangnya Kesenjangan	

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		10.2 Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	**10.2.1*** Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
		10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	**10.4.1.(b)** Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan		
		11.2 Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	**11.2.1 (a)** Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
		11.3 Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	**11.3.2 (a)** Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
			11.3.2 (b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
		11.5 Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus	**11.5.1 (b)** Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
			11.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan		
		12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	**12.6.1 (a)** Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
		12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	**12.7.1.(a)** Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
		12.8 Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	**12.8.1 (a)** Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.		
		15.1 Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	**15.1.1 (a)** Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
		15.3 Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena	**15.3.1 (a)** Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan		
		16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	**16.1.2 (a)** Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
			16.1.3 (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
			16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
		16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	**16.2.1.(a)** Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
			16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
		16.5 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	**16.5.1 (a)** Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
		16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	**16.6.1*** Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
			16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	**TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**	
		17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	**17.1.1.(a)** Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
			17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
		17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	**17.6.2.(b)** Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
			17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
		17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	**17.8.1*** Proporsi individu yang menggunakan internet
		17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	**17.17.1.(a)** Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
			17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sumber : Hasil Analisis, 2023



BAB 5
ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berfokus kepada analisis capaian masing-masing indikator TPB yang sudah dilakukan setiap OPD. Capaian ini dilihat dari urusan yang ditangani oleh OPD mengenai penilaian dan analisis capaian serta ketercapaiannya dalam penggunaan anggaran untuk program yang berkaitan dengan TPB yang menjadi tugas, pokok dan fungsi OPD. Selain itu juga digambarkan terkait keterlibatan pihak lain dalam mendukung OPD menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mencapai target TPB.

5.1 CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI

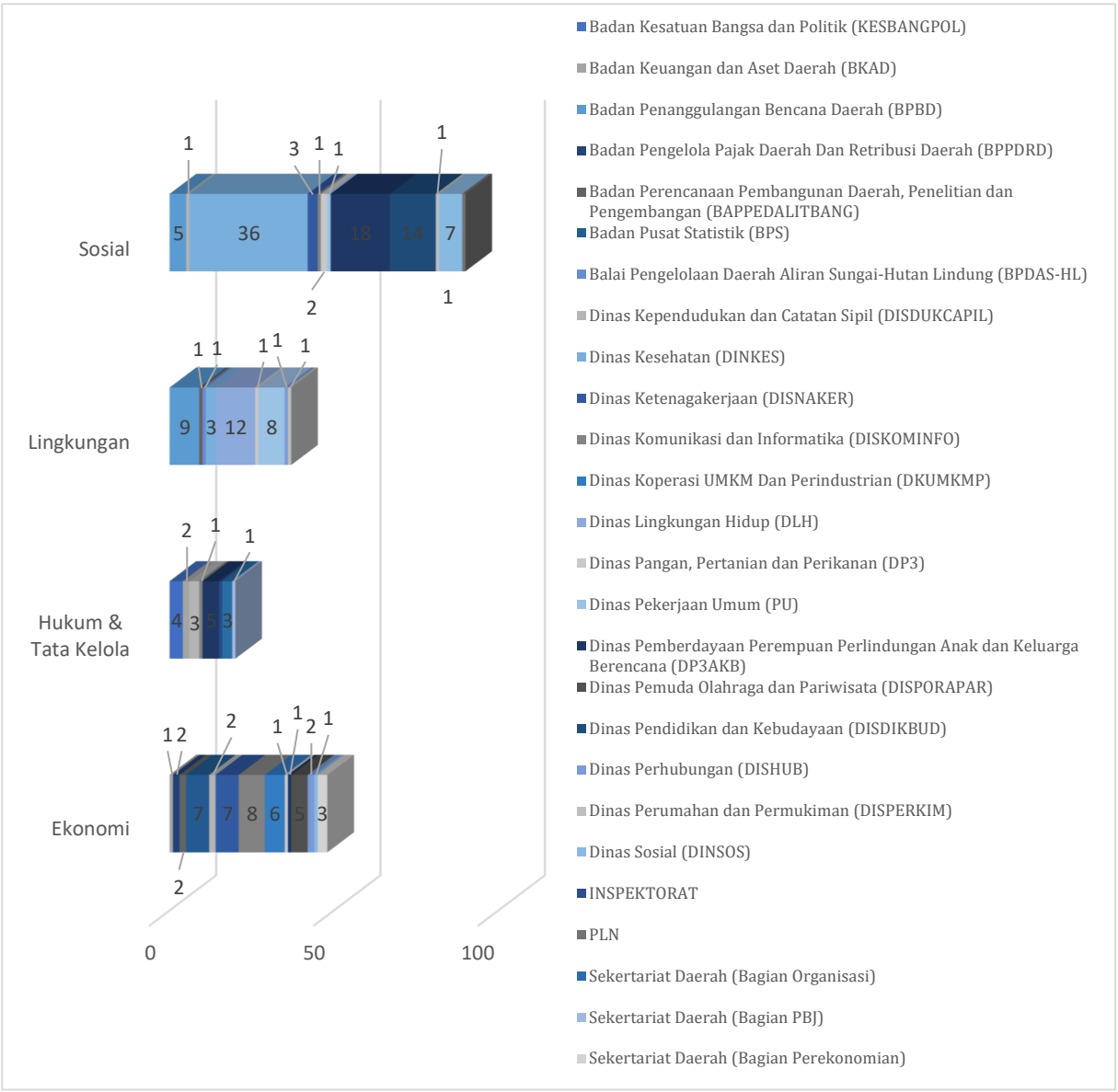
Untuk kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD, berfokus kepada analisis capaian masing-masing indikator TPB yang sudah dilakukan setiap OPD. Capaian ini dilihat dari urusan yang ditangani oleh OPD, dimana hasil dari kondisi capaian dan analisis menjadi salah satu bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Kota Balikpapan yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing OPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD. Berikut ini merupakan ringkasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan, sebagaimana dapat dlihat pada **Tabel V.1.** Sedangkan capaian indikator TPB oleh OPD di Kota Balikpapan yang dibagi berdasarkan kategori dapat dilihat pada **Gambar 5.1** dibawah ini.

Tabel V.1 Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD dirinci Per Pilar

OPD Pelaksana	Ekonomi	Hukum & Tata Kelola	Lingkungan	Sosial	Grand Total
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)		4			4
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	1	2			3
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)			9	5	14
Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (BPPDRD)	2				2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)	2		1		3
Badan Pusat Statistik (BPS)	7				7
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDAS-HL)			1		1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)	2	3		1	6
Dinas Kesehatan (DINKES)			3	36	39
Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)	7			3	10
Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	8	1		1	10
Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (DKUMKMP)	6				6
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)			12		12
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)	1		1	2	4
Dinas Pekerjaan Umum (PU)			8	1	9
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	1	5		18	24
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)	5				5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)				14	14
Dinas Perhubungan (DISHUB)	2		1		3
Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM)			1	1	2

OPD Pelaksana	Ekonomi	Hukum & Tata Kelola	Lingkungan	Sosial	Grand Total
Dinas Sosial (DINSOS)	1			7	8
INSPEKTORAT		1			1
PLN				1	1
Sekertariat Daerah (Bagian Organisasi)		3			3
Sekertariat Daerah (Bagian PBJ)		1			1
Sekertariat Daerah (Bagian Perekonomian)	3				3
Grand Total	**48**	**20**	**37**	**90**	**195**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Sumber : Hasil Analisis, 2023

Gambar 5.1 Grafik Pelaksanaan Indikator TPB Pada Setiap OPD dirinci Per Pilar

Untuk melihat kinerja pelaksanaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan terkait dengan Indikator TPB dapat dilihat pada **Tabel V.2** dibawah ini.

Tabel V.2 Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD

No	OPD	TPB																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KESBANGPOL																4	
2	BKAD																2	1
3	BPBD	5										7		2				
4	BPPDRD																	2
5	BAPPEDALITBANG									1	1	1						
6	BPS								3									4
7	BPDAS-HL															1		
8	DISDUKCAPIL	1															3	2
9	DINKES	4	7	25			3											
10	DISNAKER	2			1				5	1	1							
11	DISKOMINFO					1				3							1	5
12	DKUMKMP								2	4								
13	DLH						4					1	5			2		
14	DP3		2				1		1									
15	PU	1					7					1						
16	DP3AKB			5		13					1						5	
17	DISPORAPAR					5												
18	DISDIKBUD	2			12													
19	DISHUB									2		1						
20	DISPERKIM	1										1						
21	DINSOS	7									1							
22	INSPEKTORAT																1	
23	PLN	1																
24	SEKDA (Bagian Organisasi)																3	
25	SEKDA (Bagian PBJ)																1	
26	SEKDA (Bagian Perekonomian)							1	2									

Sumber : Hasil Analisis, 2023

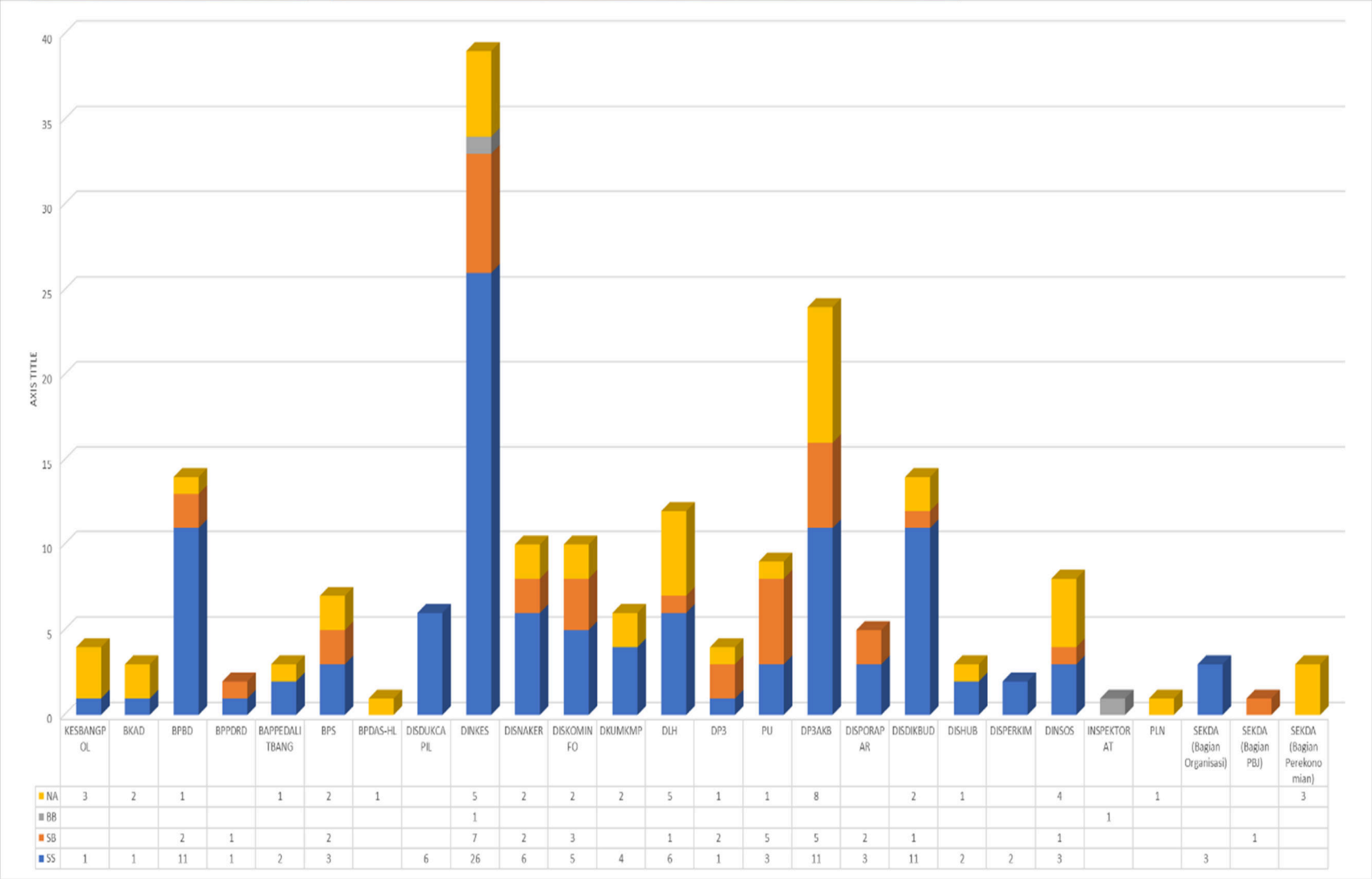
Sedangkan untuk melihat capaian indikator per masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan dapat dilihat pada **Tabel V.3** dibawah ini.

Tabel V.3 Capaian Indikator TPB pada Setiap OPD

No	OPD	Capaian Indikator			
		SS	SB	BB	NA
1	KESBANGPOL	1			3
2	BKAD	1			2
3	BPBD	11	2		1
4	BPPDRD	1	1		
5	BAPPEDALITBANG	2			1
6	BPS	3	2		2
7	BPDAS-HL				1
8	DISDUKCAPIL	6			
9	DINKES	26	7	1	5
10	DISNAKER	6	2		2
11	DISKOMINFO	5	3		2
12	DKUMKMP	4			2
13	DLH	6	1		5
14	DP3	1	2		1
15	PU	3	5		1
16	DP3AKB	11	5		8
17	DISPORAPAR	3	2		
18	DISDIKBUD	11	1		2
19	DISHUB	2			1
20	DISPERKIM	2			
21	DINSOS	3	1		4
22	INSPEKTORAT			1	
23	PLN				1
24	SEKDA (Bagian Organisasi)	3			
25	SEKDA (Bagian PBJ)		1		
26	SEKDA (Bagian Perekonomian)				3

Keterangan :
SS (Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional)
SB (Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target Nasional)
BB (Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional)
NA (Tidak Ada Data)

Sumber : Hasil Analisis, 2023



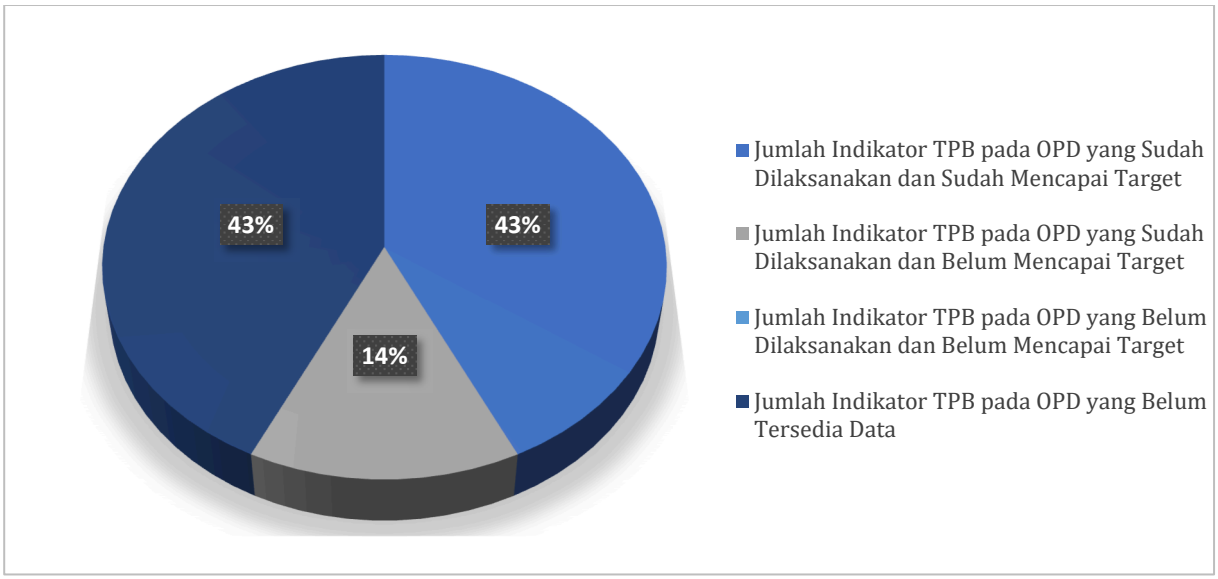
	KESBANGPOL	BKAD	BPBD	BPPDRD	BAPPEDALITBANG	BPS	BPDAS-HL	DISDUKCAPIL	DINKES	DISNAKER	DISKOMINFO	DKUMKMP	DLH	DP3	PU	DP3AKB	DISPORAPAR	DISDIKBUD	DISHUB	DISPERKIM	DINSOS	INSPEKTORAT	PLN	SEKDA (Bagian Organisasi)	SEKDA (Bagian PBJ)	SEKDA (Bagian Perekonomian)
NA	3	2	1		1	2	1		5	2	2	2	5	1	1	8		2	1		4		1			3
BB									1													1				
SB			2	1		2			7	2	3		1	2	5	5	2	1			1				1	
SS	1	1	11	1	2	3		6	26	6	5	4	6	1	3	11	3	11	2	2	3			3		

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Gambar 5.2 Grafik Capaian Indikator TPB Pada Setiap OPD

5.1.1 SEKRETARIAT DAERAH

Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yaitu membantu Walikota dalam merumus dan menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan memiliki 7 indikator yang tersebar pada TPB 7, TPB 8 dan TPB 16 serta terbagi kedalam beberapa bagian antara lain, Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan Jumlah 1 indikator, Bagian organisasi dengan jumlah 3 indikator dan Bagian Perekonomian dengan jumlah 3 indikator. Dari 7 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 3 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.3 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.3 Persentase Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.4 dibawah ini.

Tabel V.4 Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Tidak Tersedia Data	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	Tidak Tersedia Data
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

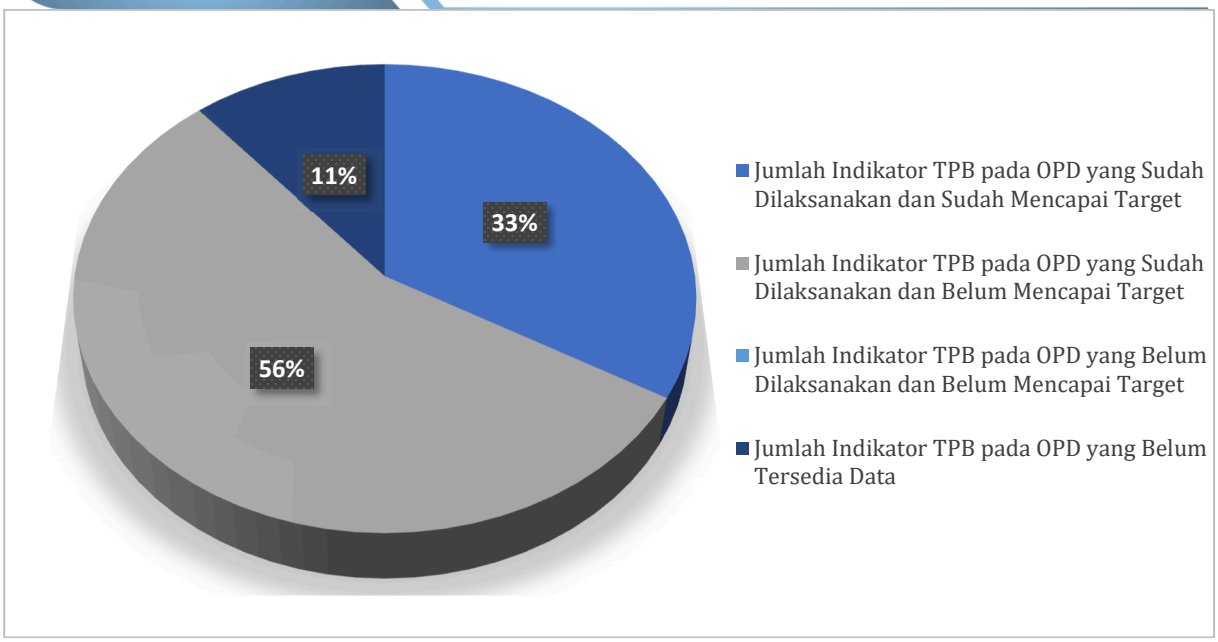
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Tidak Tersedia Data	Menurun (mendekat)	Tidak Tersedia Data
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	69.5/ 0.32%	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	24,25	Menjadi menjadi 80%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	68,91	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	87,12	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp.137.932.609.683 atau sekitar 5,02% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.91.265.163.090,64 atau sekitar 66,17% dari total anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 7 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.2 DINAS PEKERJAAN UMUM

Adapun tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, yaitu membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan umum memiliki 9 indikator yang tersebar pada TPB 1, TPB 6 dan TPB 11. Dari 9 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 5 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.4 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.4 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.5 dibawah ini.

Tabel V.5 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	82,05	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	98,54	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1598	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	99,1	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	97,1	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

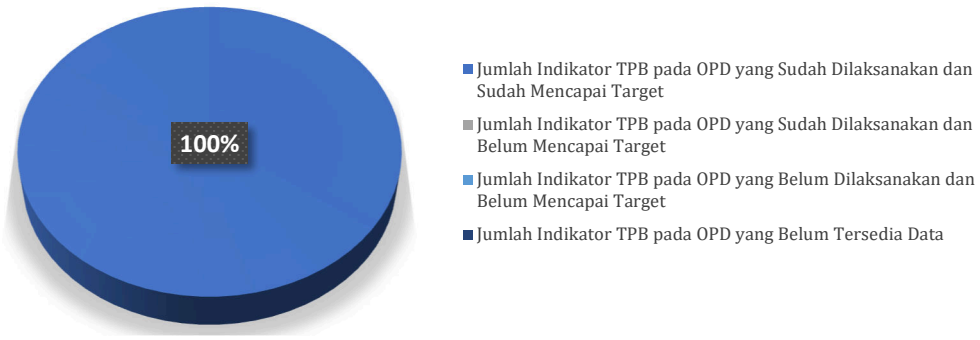
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	34	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	4 (SPALD-T) (DPU)	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	11980	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tidak Tersedia Data	Ada	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 553.786.604.039,68 atau sekitar 20,17% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.48.509.617.053,17 atau sekitar 8,76% dari total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 9 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.3 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Adapun tugas pokok Dinas Perumahan dan Permukiman, yaitu menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perumahan, dan permukiman. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki 2 indikator yang berada pada TPB 1 dan TPB 11. Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, capaian TPB untuk 2 indikator tersebut sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.5 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.5 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.6 dibawah ini.

Tabel V.6 Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

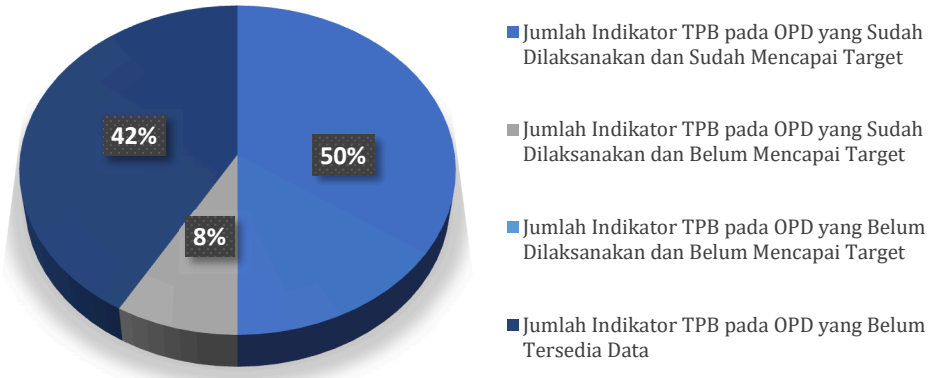
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0,21%	Meningkat menjadi 18,6 juta	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	99,79%	3,7 juta rumah tangga	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 19.168.930.498,9 atau sekitar 0,70% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.144.183.269,74 atau sekitar 32,05% dari total anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.4 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Adapun tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup, yaitu memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan memiliki 12 indikator TPB yang tersebar pada TPB 6, TPB 11, TPB 12 dan TPB 15. Dari 12 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 6 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 5 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.6 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.6 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.7 dibawah ini.

Tabel V.7 Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

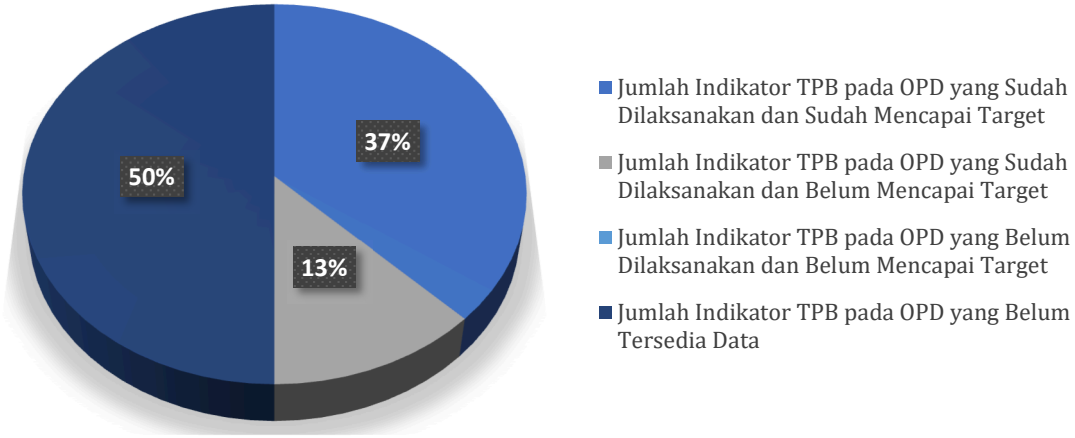
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	50	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	50	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tidak Tersedia Data	10 WS (skala nasional)	Tidak Tersedia Data
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak Tersedia Data	ada	Tidak Tersedia Data
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	99,1% (186.188,69 Ton)	Meningkat menjadi 80%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	LB3 yang dihasilkan : 80150,43 (Ton) LB3 yang dikelola : 78928,98 (Ton)	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	35706,089 (ton/Tahun)	20 ton per hari (skala nasional)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	50,32	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1 (Masterplan RTH Kota Balikpapann)	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 127.115.870.133,86 atau sekitar 4,63% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.93.188.619.097,54 atau sekitar 73,31% dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 12 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.5 DINAS SOSIAL

Adapun tugas pokok Dinas Sosial, yaitu memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial. Dinas Sosial Kota Balikpapan memiliki 8 indikator TPB yang berada pada TPB 1 dan TPB 10. Dari 10 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 4 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.7 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.7 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.8 dibawah ini.

Tabel V.8 Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2,45	Menurun menjadi 7-8%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 17,12%	Tidak Tersedia Data
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	4857	Menurun menjadi 2,8 juta	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100%	Menurun menjadi 7-8%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

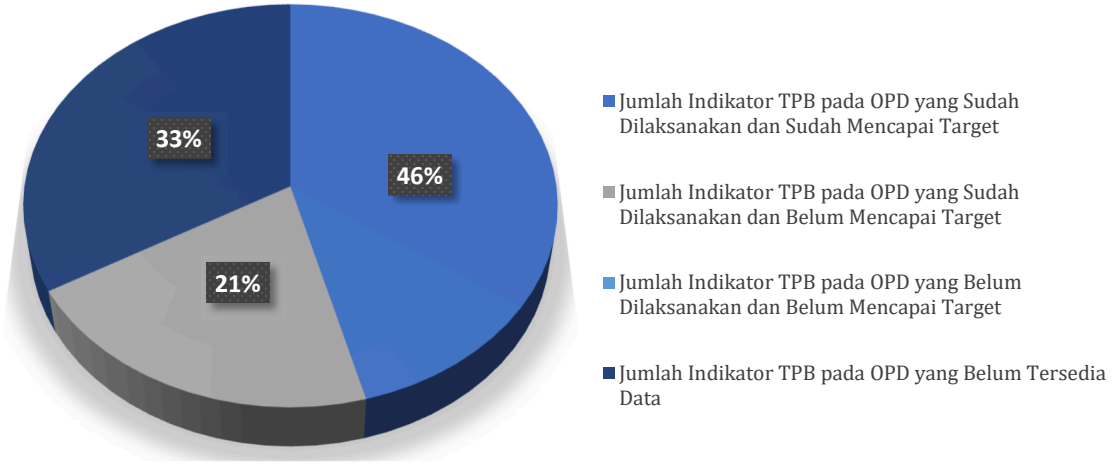
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 17,12%	Tidak Tersedia Data
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Tidak Tersedia Data	Menurun menjadi 2,8 juta	Tidak Tersedia Data
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 151 ribu	Tidak Tersedia Data
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2,45	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp.11.961.033.357,38 atau sekitar 0,44% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.6.671.555.919,38 atau sekitar 55,78% dari total anggaran Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 8 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.6 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Adapun tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu memiliki tugas pokok dalam menangani segala permasalahan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 24 indikator TPB yang berada pada TPB 3, TPB 5, TPB 10 dan TPB 16. Dari 24 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 11 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 5 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 8 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.8 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.8 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.9 dibawah ini.

Tabel V.9 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	93,5	Meningkat menjadi 66%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	56,66	Meningkat menjadi 65%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	31,13	Meningkat menjadi 23,5%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	19,2	Menurun menjadi 38	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,06	Menurun menjadi 2,28	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Tidak Tersedia Data	bertambah sebanyak 16	Tidak Tersedia Data
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	74 orang (0.02%)	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,045	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	45 orang	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	74 orang (0.02%)	Meningkat menjadi 70%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 21 tahun	Tidak Tersedia Data
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Tidak Tersedia Data	Menurun menjadi 38 tahun	Tidak Tersedia Data
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	21,56	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	40	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	30,57	Menurun menjadi 9,9%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS)	39,4	Meningkat menjadi 85%	Sudah dilaksanakan namun belum

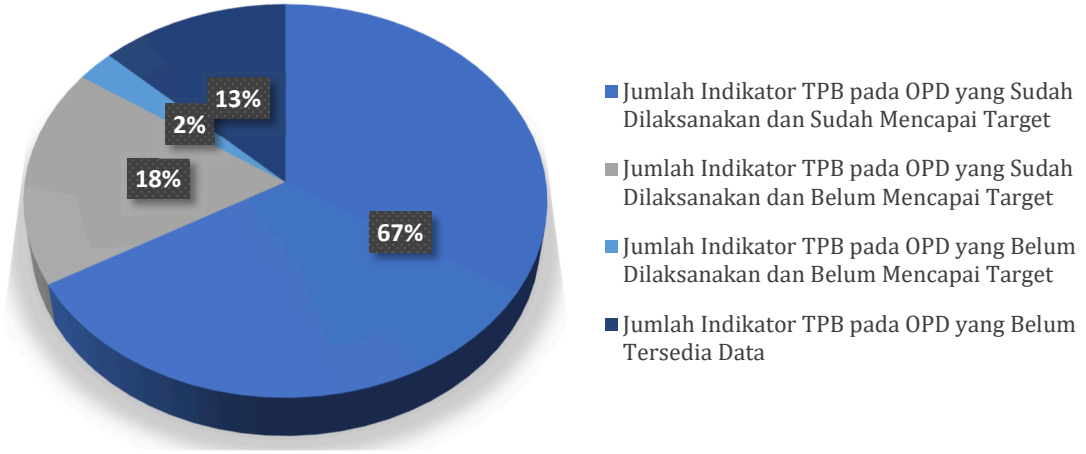
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
	tentang metode kontrasepsi modern.			mencapai target nasional
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0,025	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	20,74	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	0,4	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 20.919.361.863,00 atau sekitar 0,76% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 13.921.744.680,00 atau sekitar 66,55% dari total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 24 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.7 DINAS KESEHATAN

Adapun tugas pokok Dinas Kesehatan, yaitu tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memiliki 39 indikator TPB yang berada pada TPB 1, TPB 2, TPB 3 dan TPB 6. Dari 39 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 26 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 7 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional., 5 indikator yang tidak tersedia data, dan 1 indikator yang belum dilaksanakan. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.9 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.9 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.10 dibawah ini.

Tabel V.10 Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	96.19	Meningkat menjadi 70%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	99.2	Meningkat menjadi 63%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	78.91	Meningkat menjadi 65%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	89.67%	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	10.46%	Menurun menjadi 17%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Belum dilaksanakan	Menurun menjadi 8,5 %	Belum dilaksanakan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	6,93%	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	7,02%	Menurun menjadi 28%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	8,18%	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	14.84	Menurun menjadi 28%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	67.90	Meningkat menjadi 50%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	39.67/100000	Menurun menjadi 306	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	96.25	Meningkat menjadi 95%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	96.19	Meningkat menjadi 85 %	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7.83/1000	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	5.95/1000	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	7.14/1000	Menurun menjadi 24	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100%	Meningkat menjadi 95%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,05	Menurun menjadi <0,5%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	262,8/100000	Menurun menjadi 245	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,15	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	22	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	0.0013	Menurun menjadi 5,4%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

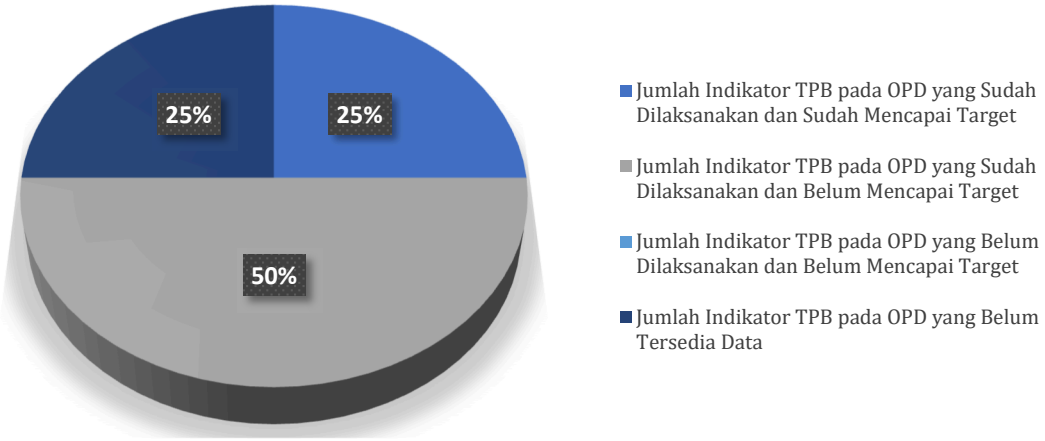
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	39.27%	Menurun menjadi 24,3%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	2.23	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	27	Meningkat menjadi 280	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0.012	Menurun menjadi angka 0,02%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	14.04%	Menurun menjadi 9,91%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	991/1000 Penduduk	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	109,33	Meningkat menjadi minimal 95%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	1.84	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	8,1	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	29/85.29%	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp.273.968.564.034,61 atau sekitar 9,98% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.180.746.347.209,32 atau sekitar 65,97% dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 39 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.8 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Adapun tugas pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki 4 indikator yang berada pada TPB 2, TPB 6, dan TPB 8. Dari 4 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.10 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.10 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.11 dibawah ini.

Tabel V.11 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	86,1	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

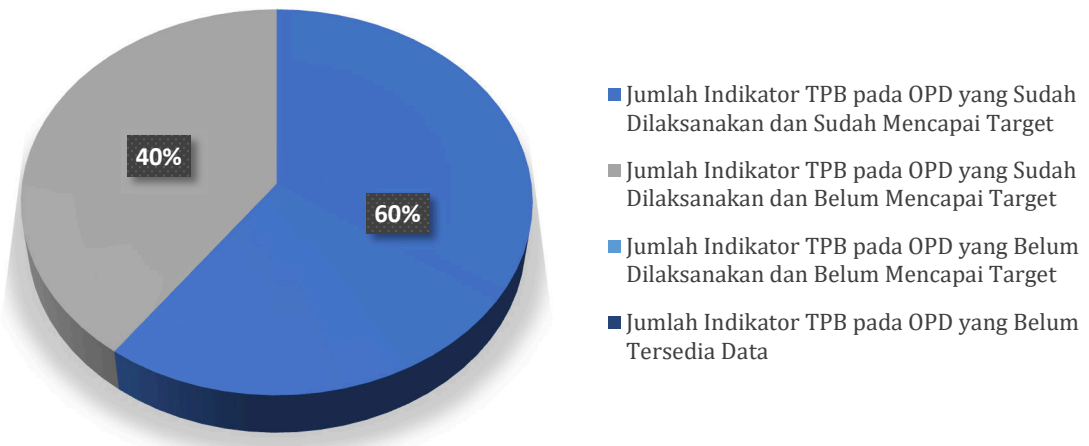
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	117,47	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Tidak Tersedia Data	ada	Tidak Tersedia Data
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	75,67	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 21.053.993.475,60 atau sekitar 0,77% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.528.253.313,60 atau sekitar 31,01% dari total anggaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 4 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.9 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Adapun tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, bidang olahraga, dan bidang pariwisata. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki 5 indikator yang berada pada TPB 8. Pada Dari 5 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.11 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.11 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.11 dibawah ini.

Tabel V.12 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan

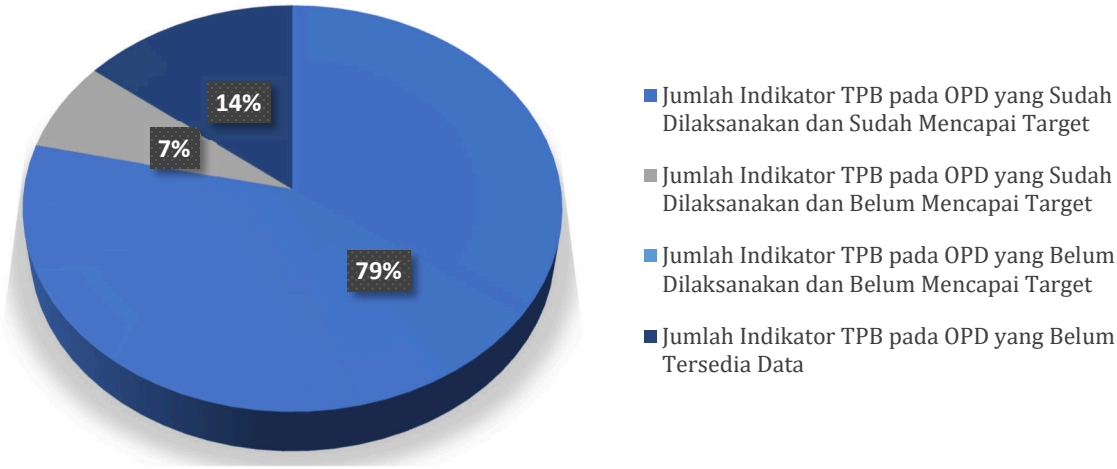
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1,48%	Meningkat menjadi 8%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	11704	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	1748085	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp 3.947.435.000	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	9.920	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 52.267.677.752,70 atau sekitar 1,90% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 37.918.805.234,17 atau sekitar 72,55% dari total anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 5 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.10 DINAS PENDIDIKAN

Adapun tugas pokok Dinas Pendidikan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memiliki 14 indikator yang tersebar pada TPB 1 dan TPB 4. Dari 14 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 11 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.12 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.12 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.13 dibawah ini.

Tabel V.13 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	98,84	Meningkat menjadi 94,78%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	85,77	Meningkat menjadi 82,2%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	94,63	Meningkat menjadi 84,2%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	83,13	Meningkat menjadi 81%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	105,17	Meningkat menjadi 114,09%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	110,56	Meningkat menjadi 106,94%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

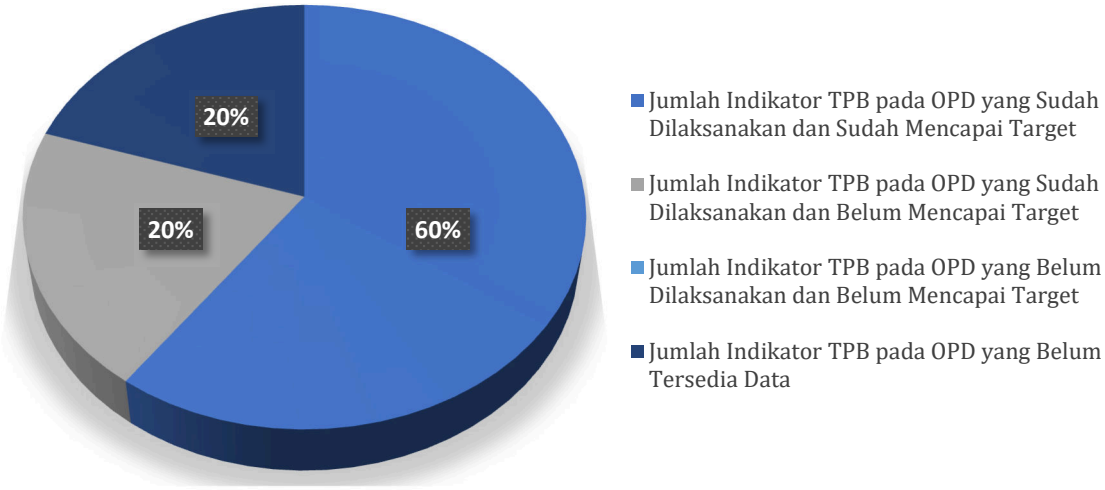
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	10,92	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	49,37	Meningkat menjadi 77,2%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD 98,84/ SMP 85,77	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,98	Meningkat menjadi 96,1%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,98	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	40,76	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp.706.028.187.019,62 atau sekitar 25,72% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.191.352.542.490,93 atau sekitar 27,10% dari total anggaran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 14 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.11 DINAS KETENAGAKERJAAN

Adapun tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan memiliki 10 indikator yang tersebar pada TPB 1, TPB 4, TPB 8, TPB 9 dan TPB 10. Dari 10 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 6 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.13 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.13 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.14 dibawah ini.

Tabel V.14 Capaian Indikator TPB pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	89%	Meningkat menjadi 95%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Tidak Tersedia Data
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	PR-TIK remaja : 99.32 PD-TIK dewasa : 91.99	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	64,87	51%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	18.025,42	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	6,9	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	4,17	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

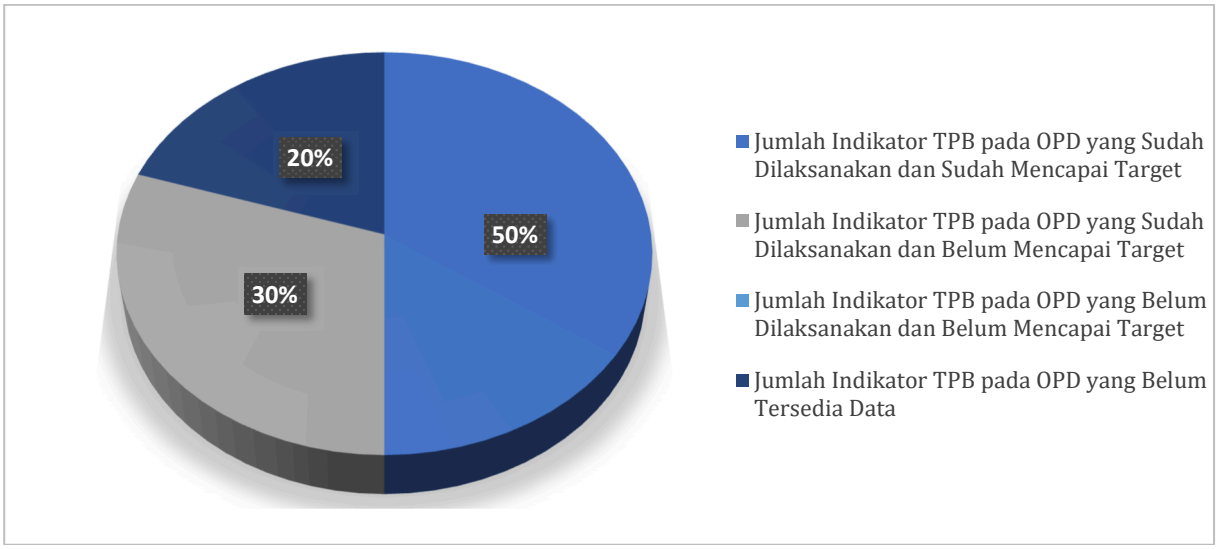
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	23,97	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	20,05	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 8.234.464.692,97 atau sekitar 0,30% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.772.431.374,97 atau sekitar 33,67% dari total anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 10 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Adapun tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki 10 indikator yang tersebar pada TPB 5, TPB 9, TPB 16 dan TPB 17. Dari 10 indikator yang telah dilaksanakan, terdapat 5 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 3 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data . Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.14 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.14 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.15 dibawah ini.

Tabel V.15 Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

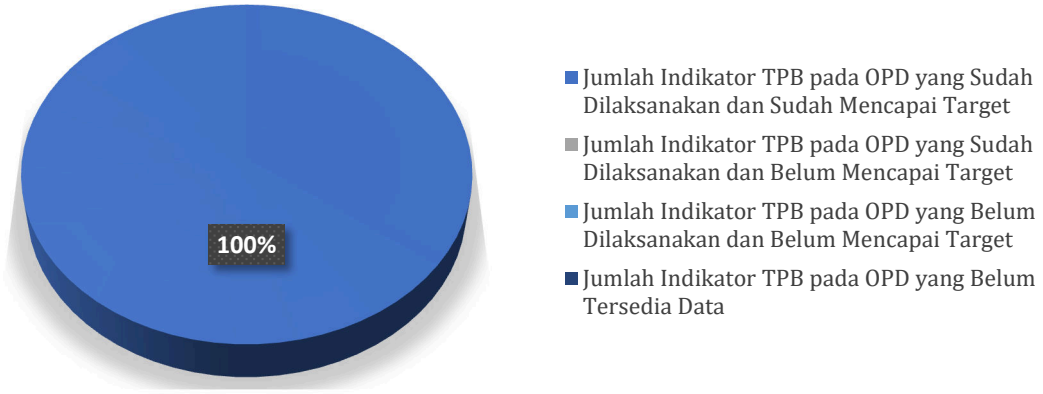
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	82,23	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	88,46	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	85,60	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	3	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	47.021	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	100	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Tidak Tersedia Data
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	69,68	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	85,60	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 15.580.760.229,00 atau sekitar 0,57% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 9.760.507.730,00 atau sekitar 62,64% dari total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 10 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Adapun tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikapapan memiliki 6 indikator yang tersebar pada TPB 1, TPB 16 dan TPB 17. Dari 6 indikator tersebut sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.15 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.15 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.16 dibawah ini.

Tabel V.16 Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	99,58	Meningkat menjadi 77,4%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99,91	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

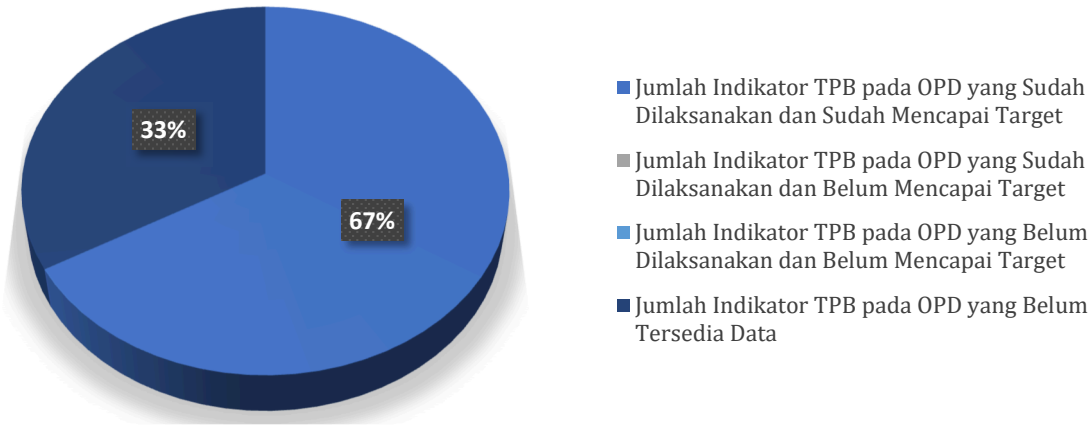
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	99,58	Meningkat menjadi 77,4%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	99,58	Meningkat menjadi 85%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	87,10%	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 12.931.472.295,00 atau sekitar 0,47% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.825.834.359,00 atau sekitar 45,05% dari total anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 6 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.14 DINAS PERHUBUNGAN

Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki 3 indikator yang ada pada TPB 9 dan TPB 11. Dari 3 indikator tersebut terdapat 2 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.16 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.16 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Perhubungan Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.17 dibawah ini.

Tabel V.17 Capaian Indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan

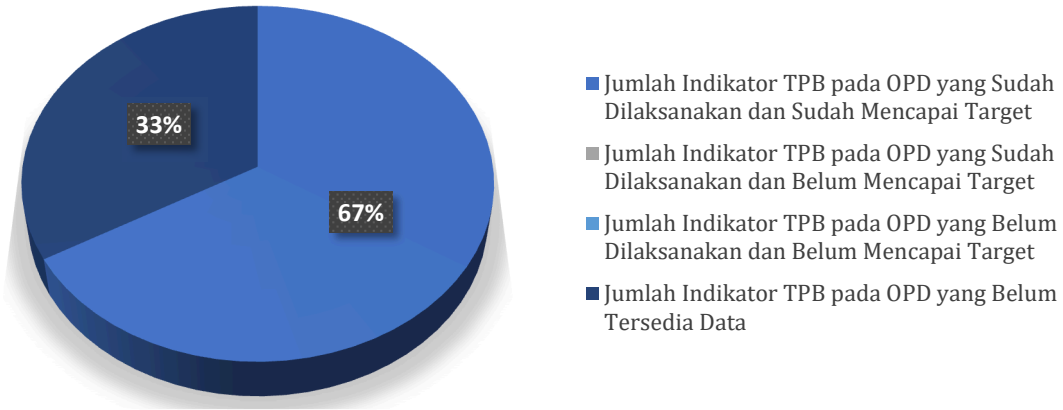
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	3	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	2	24 pelabuhan (skala nasional)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 32%	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp.80.759.382.647,09 atau sekitar 2,94% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 50.075.924.708,86 atau sekitar 62,01% dari total anggaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.15 DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN

Adapun tugas pokok Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta bidang perindustrian. Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian memiliki 6 indikator yang ada pada TPB 8 dan TPB 9. Dari 6 indikator yang telah dilaksanakan, terdapat 4 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.17 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.17 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.18 dibawah ini.

Tabel V.18 Capaian Indikator TPB pada Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan

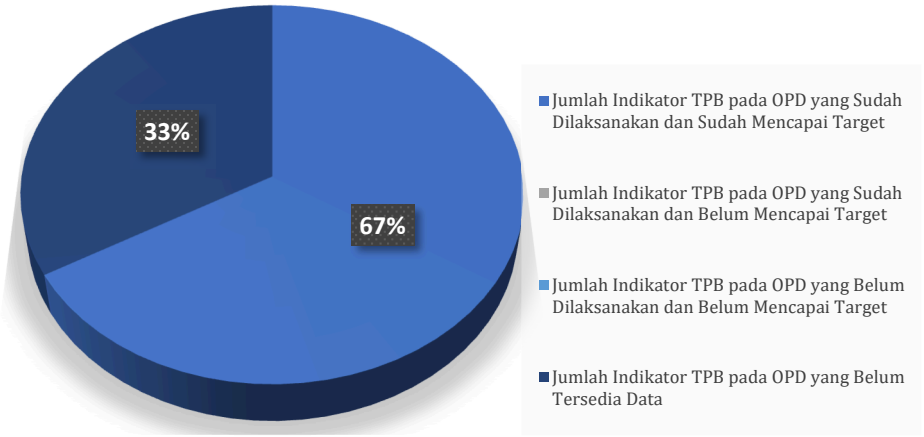
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	26,59	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	36,5	25%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	47.20	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	4,69	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 30.704.433.351,07 atau sekitar 1,12% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 8.311.207.008,00 atau sekitar 27,07% dari total anggaran Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 6 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.16 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Adapun tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki 3 indikator yang ada pada TPB 9, TPB 10, dan TPB 11. Dari 3 indikator terdapat 2 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.18 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.18 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.19 dibawah ini.

Tabel V.19 Capaian Indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0,00152	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
10.1.1*	Koefisien Gini.	0,334	Menurun menjadi 0,36	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

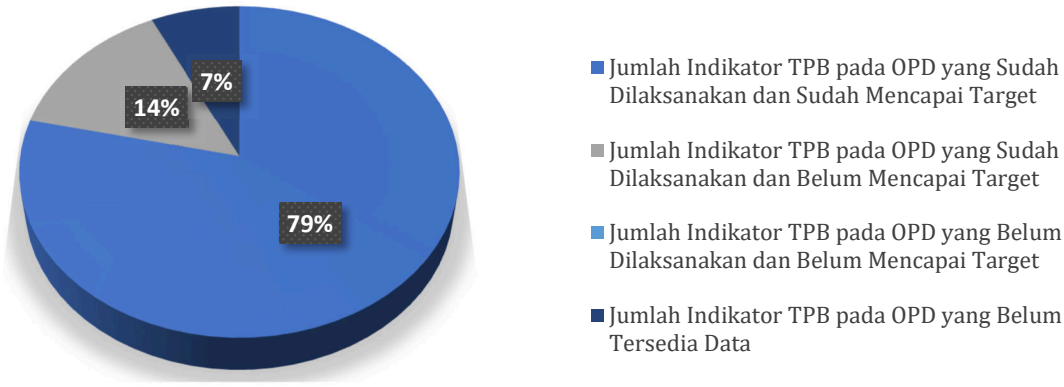
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 14.908.296.901,00 atau sekitar 0,54% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.828.858.809,00 atau sekitar 39,10% dari total anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Adapun tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan memiliki 14 indikator yang tersebar pada TPB 1, TPB 11, dan TPB 13. Dari 14 indikator yang telah dilaksanakan, terdapat 11 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.19 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.19 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.20 dibawah ini.

Tabel V.20 Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	2	Meningkat menjadi 39 daerah	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	41	Meningkat menjadi 450	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2.773.383.000,00	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana	1	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

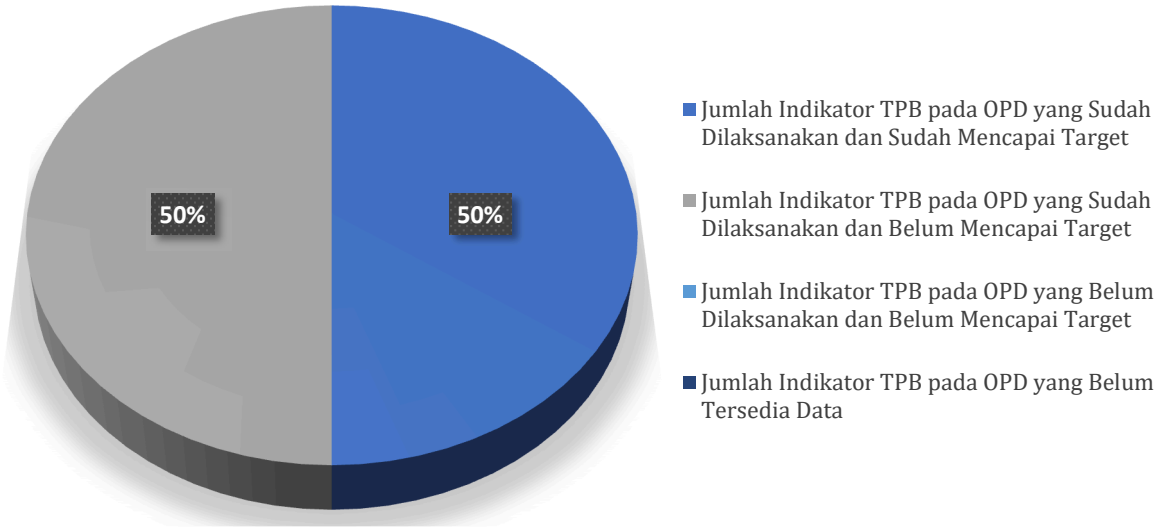
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
	(PRB) tingkat nasional dan daerah.			
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	110,79	Menurun menjadi 30%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2.773.383.000,00	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	1	Meningkat/ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 41.005.558.629,00 atau sekitar 1,49% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 13.733.766.193,00 atau sekitar 33,49% dari total anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 14 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.18 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki 2 indikator yang berada pada TPB 17. Dari 2 indikator tersebut terdapat 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.20 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.20 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.21 dibawah ini.

Tabel V.21 Capaian Indikator TPB pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

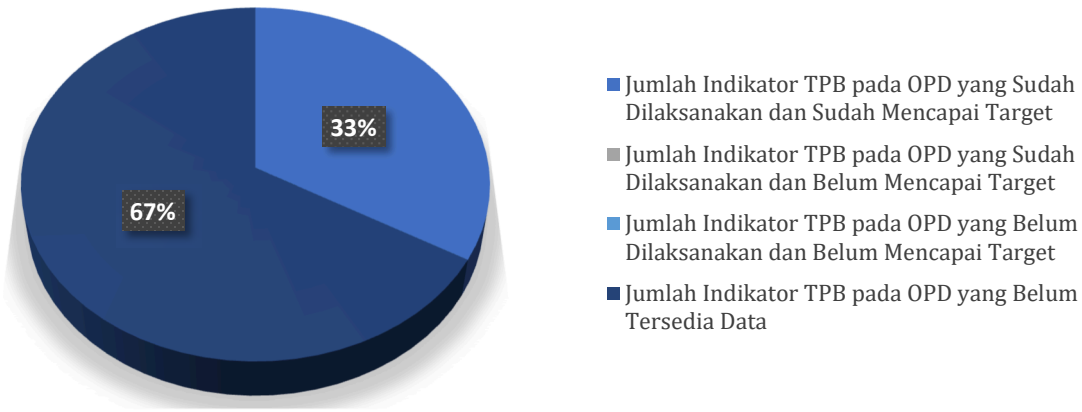
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	91 T	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,89%	Di atas 12%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 37.837.495.545,00 atau sekitar 1,38% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.929.903.805,00 atau sekitar 18,31% dari total anggaran Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.19 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Adapun tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai bendahara daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, memiliki 3 indikator yang berada pada TPB 16 dan TPB 17. Dari 3 indikator yang telah dilaksanakan, terdapat 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.21 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.21 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.22 dibawah ini.

Tabel V.22 Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

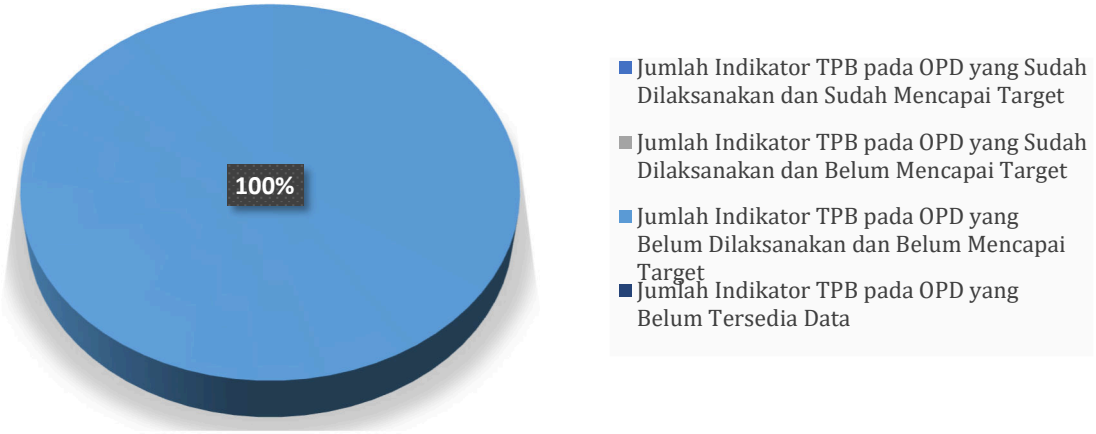
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp. 84.110.316.326,57 atau sekitar 3,06% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 38.348.211.435,00 atau sekitar 45,59% dari total anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.20 INSPEKTORAT

Inspektorat memiliki 1 indikator yang berada pada TPB 16 dan dari 1 indikator tersebut belum dilaksanakan. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.22 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.22 Persentase Capaian Indikator TPB Inspektorat Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Inspektorat Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.23 dibawah ini.

Tabel V.23 Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kota Balikpapan

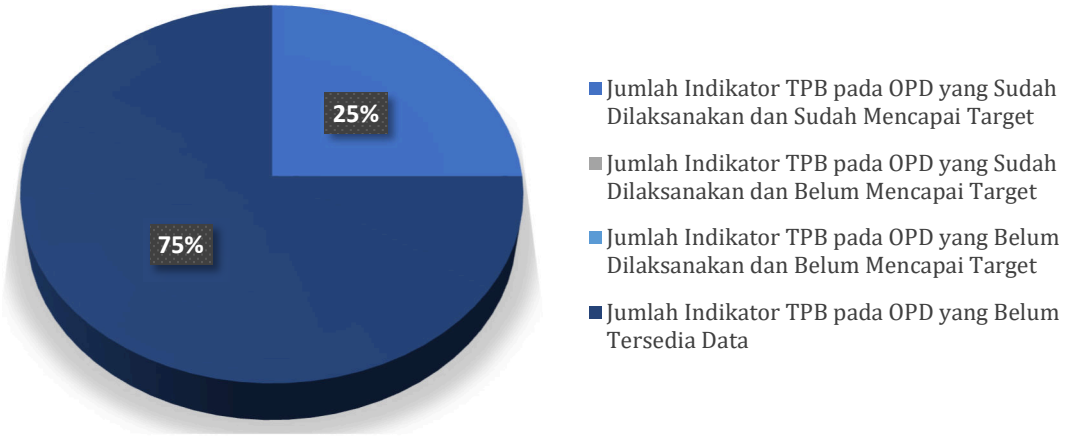
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 4,0	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Inspektorat Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp.13.376.482.603,00 atau sekitar 0,49% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.4.335.391.611,00 atau sekitar 32,41% dari total anggaran Inspektorat Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 1 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.21 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 indikator yang berada pada TPB 16. Dari 4 indikator tersebut terdapat 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 3 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.23 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.23 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.24 dibawah ini.

Tabel V.24 Capaian Indikator TPB pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

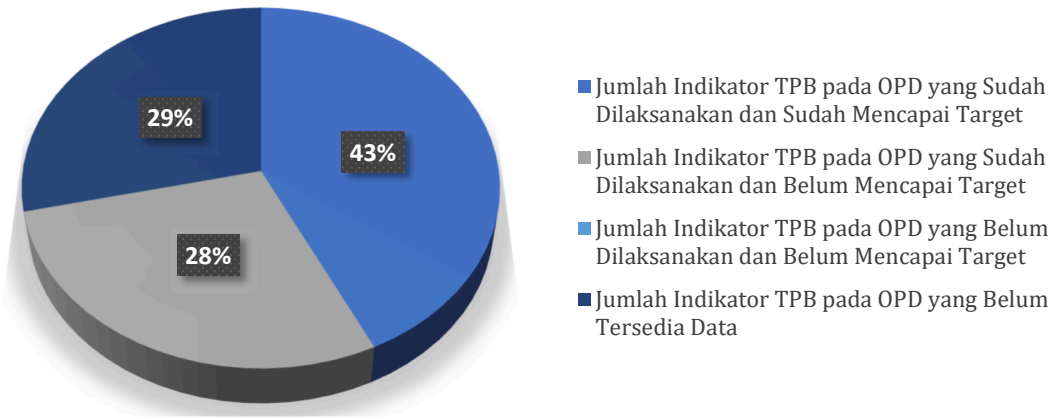
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	1	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar Rp.11.759.086.513,00 atau sekitar 0,43% dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikapapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.697.860.025,00 atau sekitar 48,45% dari total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 4 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.1.22 BADAN PUSAT STATISTIK

Adapun tugas pokok Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data statistik. Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan memiliki 7 indikator yang berada pada TPB 8 dan TPB 17. Dari 7 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.24 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.24 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.25 dibawah ini.

Tabel V.25 Capaian Indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan

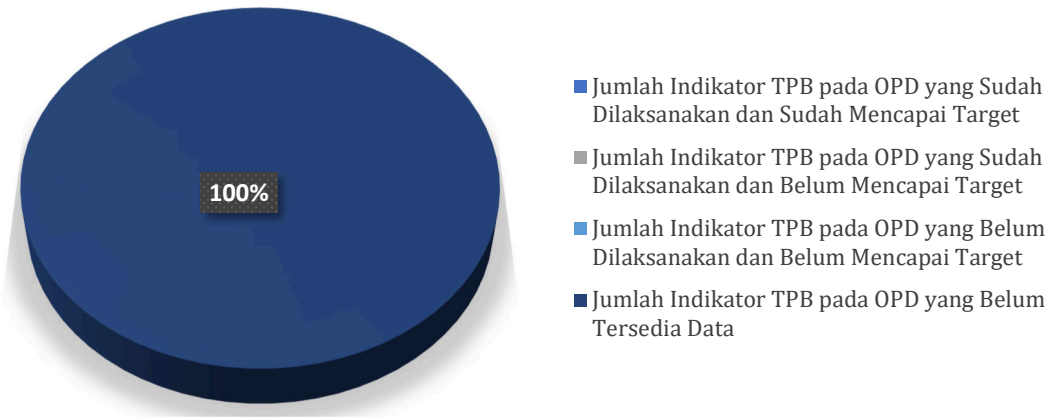
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.7**	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	129481.26**	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	-0,29%	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak Tersedia Data	ada	Tidak Tersedia Data
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak Tersedia Data	ada	Tidak Tersedia Data
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	57	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

5.1.23 BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI-HUTAN LINDUNG

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung memiliki 1 indikator yang berada pada TPB 15 dan dari 1 indikator tersebut tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.25 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.25 Persentase Capaian Indikator TPB Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung

Adapun capaian indikator TPB pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.26 dibawah ini.

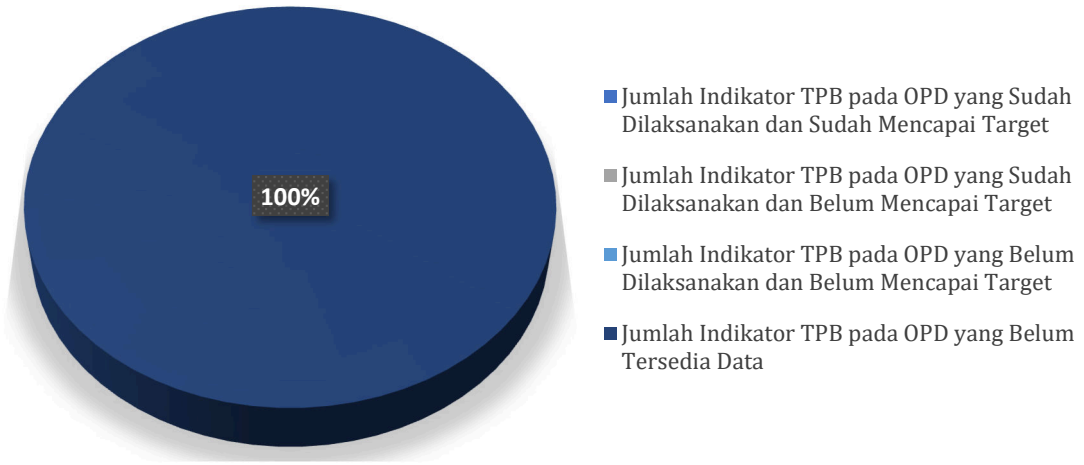
Tabel V.26 Capaian Indikator TPB pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Tidak Tersedia Data	5,5 juta ha (skala nasional)	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

5.1.24 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Balikpapan memiliki 1 indikator yang berada pada TPB 1. Dari 1 tersebut indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.26 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

Gambar 5.26 Persentase Capaian Indikator TPB Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.27 dibawah ini.

Tabel V.27 Capaian Indikator TPB pada Perusahaan Listrik Negara (PLN)

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 100%	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tantangan dan potensi kedepan Untuk dapat mengukur pencapaian dari Target TPB/SDGs, diperlukan perangkat indikator dan ketersediaan data yang memungkinkan untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Balikpapan berdasarkan pada sasaran dan indikator TPB/SDGs. Pencapaian dari Target TPB/SDGs ditujukan untuk mengevaluasi kinerja permbangunan hijau yang ada di Kota Balikpapan. Dalam prosesnya tidak mudah mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang detil kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Perlunya inventarisasi (pengarsipan) data yang rapi, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan khususnya untuk diagregasi indikator TPB. Pengarsipan dengan sistem satu data ini diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk mendapatkan data yang

5.2 PERAN PARA PIHAK KOTA BALIKPAPAN

Selain dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan program indikator pada setiap TPB, ada beberapa organisasi diluar dari pemerintah ikut berpartisipasi didalam melaksanakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena pencapaian SDGs tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maka dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan SDGs yang meliputi aspek lingkungan, social, ekonomi, cover the environment, social, economic, governance, and partnership issue. Dalam pemenuhan target yang ada terdapat para pihak dengan perannya masing-masing yang berkontribusi untuk Kota Balikpapan yang terdiri dari berbagai macam bidang dan latar belakang Kontribusi dari masing-masing para pihak tersebut juga merupakan bagian dari indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dilakukan oleh tiap-tiap daerah di Indonesia. Para pihak yang terlibat sudah berkontribusi dan membantu Pemerintah Kota Balikpapan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai ketercapaian keuangan daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan indikator TPB. Dalam hal ini, anggaran yang dapat dilihat untuk mencapai indikator TPB adalah penggunaan anggaran pada belanja langsung. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah yang merupakan tools untuk mencapai indikator TPB. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi anggaran belanja langsung Kota Balikpapan yang digunakan untuk melaksanakan indikator TPB. Dibawah ini merupakan kinerja keuangan daerah Kota Balikpapan dirinci per organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pencapaian indikator TPB dapat dilihat pada **Tabel V.28** dibawah ini.

Tabel V.28 Kinerja Keuangan Daerah Kota Balikpapan dalam Pencapaian Indikator TPB Dirinci Per OPD

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
BELANJA	**3.273.129.855.262,00**	**2.745.398.221.161,00**
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	**868.946.157.669,00**	**706.028.187.019,62**
BELANJA OPERASI	**707.794.609.683,00**	**572.017.768.517,93**
Belanja Pegawai	351.134.624.573,00	296.533.105.613,00
Belanja Barang dan Jasa	221.036.444.870,00	191.352.542.490,93
Belanja Hibah	135.623.540.240,00	84.132.120.414,00
BELANJA MODAL	161.151.547.986,00	134.010.418.501,69
DINAS KESEHATAN	**308.047.174.783,00**	**273.968.564.034,61**
BELANJA OPERASI	**281.079.557.343,00**	**254.563.705.567,32**
Belanja Pegawai	73.356.810.962,00	70.817.358.358,00
Belanja Barang dan Jasa	204.722.746.381,00	180.746.347.209,32
Belanja Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
BELANJA MODAL	26.967.617.440,00	19.404.858.467,29
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	**26.965.324.940,00**	**23.893.083.832,69**
BELANJA OPERASI	**21.778.291.600,00**	**18.966.145.509,61**
Belanja Pegawai	8.958.629.600,00	7.430.056.192,00
Belanja Barang dan Jasa	12.819.662.000,00	11.536.089.317,61
BELANJA MODAL	5.187.033.340,00	4.926.938.323,08
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	**118.595.156.900,00**	**113.346.943.015,45**
BELANJA OPERASI	**96.500.100.400,00**	**92.419.469.943,45**
Belanja Pegawai	16.917.561.000,00	15.886.909.984,00
Belanja Barang dan Jasa	79.582.539.400,00	76.532.559.959,45
BELANJA MODAL	22.095.056.500,00	20.927.473.072,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	**642.654.970.529,00**	**553.786.604.039,68**
BELANJA OPERASI	**70.417.582.628,00**	**62.865.085.952,17**
Belanja Pegawai	10.212.933.000,00	9.506.597.421,00
Belanja Barang dan Jasa	55.343.403.150,00	48.509.617.053,17
Belanja Hibah	4.861.246.478,00	4.848.871.478,00
BELANJA MODAL	572.237.387.901,00	490.921.518.087,51
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	**23.119.226.478,00**	**19.168.930.498,90**
BELANJA OPERASI	**15.479.982.863,00**	**12.994.839.201,74**
Belanja Pegawai	6.430.811.045,00	5.533.735.532,00
Belanja Barang dan Jasa	7.729.171.818,00	6.144.183.269,74
Belanja Bantuan Sosial	1.320.000.000,00	1.316.920.400,00
BELANJA MODAL	7.639.243.615,00	6.174.091.297,16
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**41.829.185.600,00**	**41.005.558.629,00**
BELANJA OPERASI	**35.668.350.100,00**	**34.862.546.649,00**
Belanja Pegawai	21.308.691.000,00	21.078.780.456,00
Belanja Barang dan Jasa	14.309.659.100,00	13.733.766.193,00
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00
BELANJA MODAL	6.160.835.500,00	6.143.011.980,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	**31.351.056.432,00**	**30.499.739.736,00**
BELANJA OPERASI	**31.234.077.432,00**	**30.383.272.236,00**
Belanja Pegawai	24.588.489.936,00	24.463.871.358,00
Belanja Barang dan Jasa	6.645.587.496,00	5.919.400.878,00
BELANJA MODAL	116.979.000,00	116.467.500,00
DINAS SOSIAL	**14.187.588.345,00**	**11.961.033.357,38**
BELANJA OPERASI	**14.002.888.345,00**	**11.777.633.357,38**
Belanja Pegawai	6.007.044.000,00	4.687.077.438,00
Belanja Barang dan Jasa	7.526.844.345,00	6.671.555.919,38
Belanja Hibah	469.000.000,00	419.000.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
BELANJA MODAL	184.700.000,00	183.400.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN	**9.448.997.120,00**	**8.234.464.692,97**
BELANJA OPERASI	**9.187.205.120,00**	**8.010.541.695,97**
Belanja Pegawai	5.589.037.000,00	5.238.110.321,00
Belanja Barang dan Jasa	3.598.168.120,00	2.772.431.374,97
BELANJA MODAL	261.792.000,00	223.922.997,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	**27.793.017.610,00**	**20.919.361.863,00**
BELANJA OPERASI	**27.447.537.610,00**	**20.627.560.239,00**
Belanja Pegawai	6.729.661.000,00	6.235.815.559,00
Belanja Barang dan Jasa	20.187.876.610,00	13.921.744.680,00
Belanja Hibah	530.000.000,00	470.000.000,00
BELANJA MODAL	345.480.000,00	291.801.624,00
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	**80.517.867.990,00**	**25.638.313.301,21**
BELANJA OPERASI	**14.367.739.500,00**	**9.853.511.805,00**
Belanja Pegawai	6.520.409.000,00	5.673.846.250,00
Belanja Barang dan Jasa	7.847.330.500,00	4.179.665.555,00
BELANJA MODAL	66.150.128.490,00	15.784.801.496,21
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	**136.098.824.212,00**	**127.115.870.133,86**
BELANJA OPERASI	**112.586.021.982,00**	**103.855.957.575,54**
Belanja Pegawai	11.372.410.893,00	10.667.338.478,00
Belanja Barang dan Jasa	101.213.611.089,00	93.188.619.097,54
BELANJA MODAL	23.512.802.230,00	23.259.912.558,32
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**14.209.553.933,00**	**12.931.472.295,00**
BELANJA OPERASI	**13.383.053.933,00**	**12.177.994.645,00**
Belanja Pegawai	6.854.723.000,00	6.352.160.286,00
Belanja Barang dan Jasa	6.528.330.933,00	5.825.834.359,00
BELANJA MODAL	826.500.000,00	753.477.650,00
DINAS PERHUBUNGAN	**86.800.949.620,00**	**80.759.382.647,09**
BELANJA OPERASI	**71.987.219.620,00**	**67.101.590.344,86**
Belanja Pegawai	16.509.422.220,00	15.925.865.636,00
Belanja Barang dan Jasa	53.677.797.400,00	50.075.924.708,86
Belanja Bantuan Sosial	1.800.000.000,00	1.099.800.000,00
BELANJA MODAL	14.813.730.000,00	13.657.792.302,23
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**17.075.297.100,00**	**15.580.760.229,00**
BELANJA OPERASI	**15.479.227.100,00**	**13.994.791.629,00**
Belanja Pegawai	5.001.536.000,00	4.234.283.899,00
Belanja Barang dan Jasa	10.477.691.100,00	9.760.507.730,00
BELANJA MODAL	1.596.070.000,00	1.585.968.600,00
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	**36.368.074.875,00**	**30.704.433.351,07**
BELANJA OPERASI	**21.473.888.837,00**	**17.482.712.179,00**
Belanja Pegawai	6.513.621.815,00	4.990.705.171,00
Belanja Barang dan Jasa	10.460.267.022,00	8.311.207.008,00
Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000,00	4.180.800.000,00
BELANJA MODAL	14.894.186.038,00	13.221.721.172,07
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	**15.069.915.547,00**	**13.078.339.214,00**
BELANJA OPERASI	**14.310.586.047,00**	**12.326.802.614,00**
Belanja Pegawai	8.957.468.147,00	7.520.444.176,00
Belanja Barang dan Jasa	5.353.117.900,00	4.806.358.438,00
BELANJA MODAL	759.329.500,00	751.536.600,00
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	**69.156.315.885,00**	**52.267.677.752,70**
BELANJA OPERASI	**63.008.200.885,00**	**46.903.051.737,17**
Belanja Pegawai	6.512.833.092,00	5.884.246.503,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	48.743.450.693,00	37.918.805.234,17
Belanja Hibah	7.751.917.100,00	3.100.000.000,00
BELANJA MODAL	6.148.115.000,00	5.364.626.015,53
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	**10.361.787.902,00**	**9.610.153.859,00**
BELANJA OPERASI	**9.630.469.902,00**	**8.919.388.963,00**
Belanja Pegawai	4.574.041.300,00	4.333.973.447,00
Belanja Barang dan Jasa	5.056.428.602,00	4.585.415.516,00
BELANJA MODAL	731.318.000,00	690.764.896,00
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	**24.371.817.100,00**	**21.053.993.475,60**
BELANJA OPERASI	**21.874.346.300,00**	**18.787.297.372,60**
Belanja Pegawai	13.597.296.000,00	11.679.444.059,00
Belanja Barang dan Jasa	7.470.050.300,00	6.528.253.313,60
Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	732.000.000,00	504.600.000,00
BELANJA MODAL	2.497.470.800,00	2.266.696.103,00
DINAS PERDAGANGAN	**29.894.677.416,00**	**23.964.839.170,35**
BELANJA OPERASI	**22.544.276.216,00**	**19.898.963.638,12**
Belanja Pegawai	11.090.826.984,00	9.763.922.138,00
Belanja Barang dan Jasa	11.453.449.232,00	10.135.041.500,12
BELANJA MODAL	7.350.401.200,00	4.065.875.532,23
SEKRETARIAT DAERAH	**159.128.028.678,00**	**137.932.609.683,24**
BELANJA OPERASI	**150.507.030.678,00**	**130.253.764.148,64**
Belanja Pegawai	30.285.545.791,00	23.809.306.973,00
Belanja Barang dan Jasa	103.246.484.887,00	91.265.163.090,64
Belanja Hibah	16.975.000.000,00	15.179.294.085,00
BELANJA MODAL	8.620.998.000,00	7.678.845.534,60
SEKRETARIAT DPRD	**117.713.300.471,00**	**99.673.636.105,01**
BELANJA OPERASI	**105.930.630.471,00**	**88.529.554.752,01**
Belanja Pegawai	38.895.937.100,00	34.570.259.859,00
Belanja Barang dan Jasa	67.034.693.371,00	53.959.294.893,01
BELANJA MODAL	11.782.670.000,00	11.144.081.353,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**17.920.481.000,00**	**14.908.296.901,00**
BELANJA OPERASI	**14.805.206.000,00**	**11.839.637.281,00**
Belanja Pegawai	8.064.731.000,00	6.010.778.472,00
Belanja Barang dan Jasa	6.740.475.000,00	5.828.858.809,00
BELANJA MODAL	3.115.275.000,00	3.068.659.620,00
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	**50.888.909.390,00**	**37.837.495.545,00**
BELANJA OPERASI	**50.095.690.390,00**	**37.055.995.295,00**
Belanja Pegawai	42.253.227.290,00	30.126.091.490,00
Belanja Barang dan Jasa	7.842.463.100,00	6.929.903.805,00
BELANJA MODAL	793.219.000,00	781.500.250,00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	**115.609.435.241,00**	**84.110.316.326,57**
BELANJA OPERASI	**60.915.784.905,00**	**46.396.134.530,00**
Belanja Pegawai	16.735.714.427,00	8.047.923.095,00
Belanja Barang dan Jasa	44.180.070.478,00	38.348.211.435,00
BELANJA MODAL	4.582.254.272,00	4.188.175.687,20
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.111.396.064,00	33.526.006.109,37
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**23.169.152.050,00**	**18.241.432.487,00**
BELANJA OPERASI	**22.898.185.800,00**	**18.031.322.537,00**
Belanja Pegawai	8.467.336.600,00	7.580.325.380,00
Belanja Barang dan Jasa	14.430.849.200,00	10.450.997.157,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
BELANJA MODAL	270.966.250,00	210.109.950,00
INSPEKTORAT	**15.298.367.800,00**	**13.376.482.603,00**
BELANJA OPERASI	**15.025.367.800,00**	**13.103.702.403,00**
Belanja Pegawai	9.880.936.400,00	8.768.310.792,00
Belanja Barang dan Jasa	5.144.431.400,00	4.335.391.611,00
BELANJA MODAL	273.000.000,00	272.780.200,00
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	**20.935.205.078,00**	**18.449.456.848,00**
BELANJA OPERASI	**19.429.247.078,00**	**16.960.711.478,00**
Belanja Pegawai	10.853.685.000,00	9.000.048.510,00
Belanja Barang dan Jasa	8.575.562.078,00	7.960.662.968,00
BELANJA MODAL	1.505.958.000,00	1.488.745.370,00
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	**21.203.645.086,00**	**18.919.860.361,00**
BELANJA OPERASI	**20.981.365.086,00**	**18.699.310.516,00**
Belanja Pegawai	10.551.957.000,00	8.785.375.308,00
Belanja Barang dan Jasa	10.429.408.086,00	9.913.935.208,00
BELANJA MODAL	222.280.000,00	220.549.845,00
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	**20.969.630.950,00**	**16.515.828.044,00**
BELANJA OPERASI	**20.556.350.950,00**	**16.114.972.694,00**
Belanja Pegawai	9.873.389.000,00	7.649.935.763,00
Belanja Barang dan Jasa	10.682.961.950,00	8.465.036.931,00
BELANJA MODAL	413.280.000,00	400.855.350,00
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	**22.261.312.100,00**	**19.565.027.534,00**
BELANJA OPERASI	**21.887.005.100,00**	**19.192.422.559,00**
Belanja Pegawai	10.706.355.350,00	8.948.230.709,00
Belanja Barang dan Jasa	11.180.649.750,00	10.244.191.850,00
BELANJA MODAL	374.307.000,00	372.604.975,00
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	**24.899.638.050,00**	**22.801.458.480,00**
BELANJA OPERASI	**24.368.638.050,00**	**22.280.813.020,00**
Belanja Pegawai	12.327.854.000,00	10.872.211.314,00
Belanja Barang dan Jasa	12.040.784.050,00	11.408.601.706,00
BELANJA MODAL	531.000.000,00	520.645.460,00
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	**17.537.227.650,00**	**15.789.527.582,00**
BELANJA OPERASI	**17.064.273.650,00**	**15.322.421.757,00**
Belanja Pegawai	8.438.891.400,00	7.201.330.526,00
Belanja Barang dan Jasa	8.625.382.250,00	8.121.091.231,00
BELANJA MODAL	472.954.000,00	467.105.825,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**12.732.583.732,00**	**11.759.086.513,00**
BELANJA OPERASI	**12.311.453.732,00**	**11.354.194.273,00**
Belanja Pegawai	3.661.798.000,00	3.385.113.648,00
Belanja Barang dan Jasa	6.178.435.132,00	5.697.860.025,00
Belanja Hibah	2.471.220.600,00	2.271.220.600,00
BELANJA MODAL	421.130.000,00	404.892.240,00
(SURPLUS/DEFISIT) Rp.	**(445.730.975.673,00)**	**123.731.899.744,73**

Sumber : Perda APBD Kota Balikpapan Tahun 2022

Anggaran setiap OPD untuk mendukung Indikator TPB



BAB 6
ALTERANTIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Skenario pembangunan berkelanjutan dirumuskan dari kondisi pencapaian TPB yang diproyeksikan dari analisis data, untuk menghasilkan kondisi dan alternatif target pencapaian TPB selama masa pencapaian TPB yang disesuaikan dalam jangka waktu masa berlakunya RPJMD atau 5 tahun.

Pencapaian target TPB selama periode tersebut dilaksanakan dengan menysun serangkaian alternatif skenario sebagai berikut:

a) Alternatif skenario tanpa upaya tambahan, yaitu skenario yang disusun dengan mempertahankan TPB yang telah menyamai atau melampui target nasional;

b) Alternatif skenario dengan upaya tambahan, yaitu percepatan pencapaian target TPB dengan memperhatikan:

   - Pencapaian target tanpa upaya tambahan;

     Melihat kesenjangan (Gap) antara proyeksi capaian TPB tanpa upaya tambahan dengan target TPB tahun 2030. Target skenario tanpa upaya tambahan menjadi baseline untuk menentukan besaran intervensi yang harus dilakukan.

   - Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;

     Sasaran strategis yang disusun beserta targetnya harus dapat berkontribusi pada pencapaian target TPB yang ditetapkan secara nasional. Upaya tambahan merupakan bentuk intervensi untuk mencapai target dalam rangka mengurangi gap antara capaian TPB daerah dengan target TPB nasional.

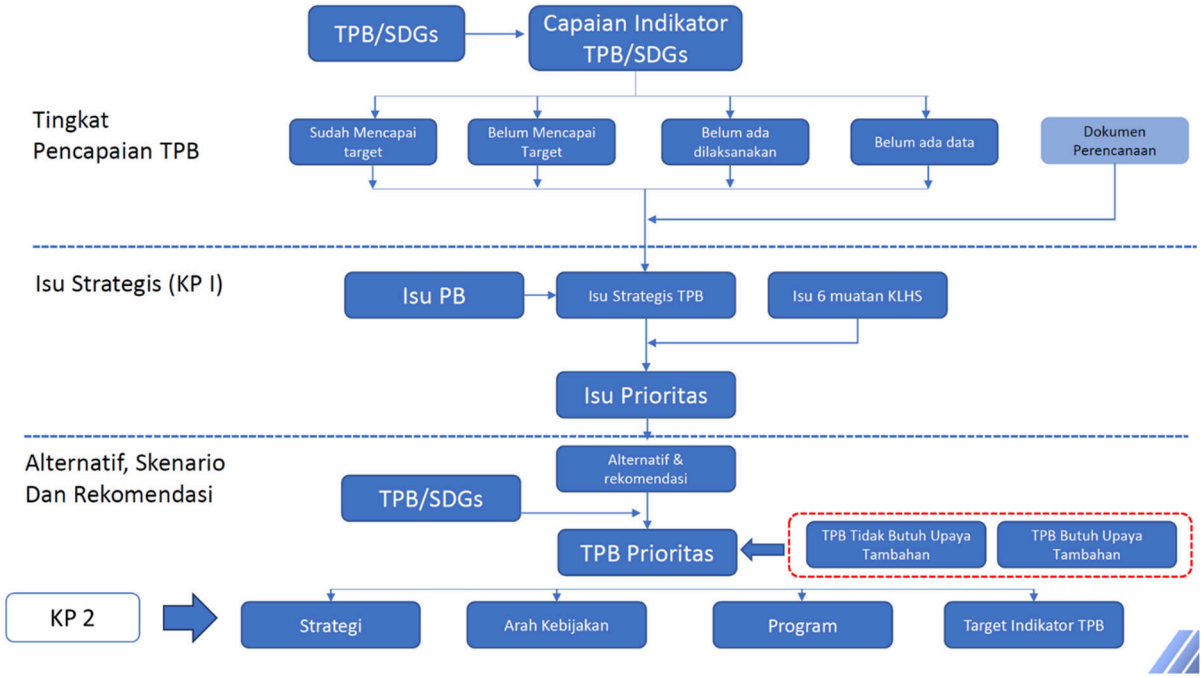
   - Potensi, daya saing, dan inovasi daerah;

     Upaya tambahan memperhatikan rekomendasi terkait sasaran strategis pembangunan berkelanjutan. Rumusan sasaran strategis mempertimbangkan potensi, daya saing, dan inovasi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber sumber pendanaan.

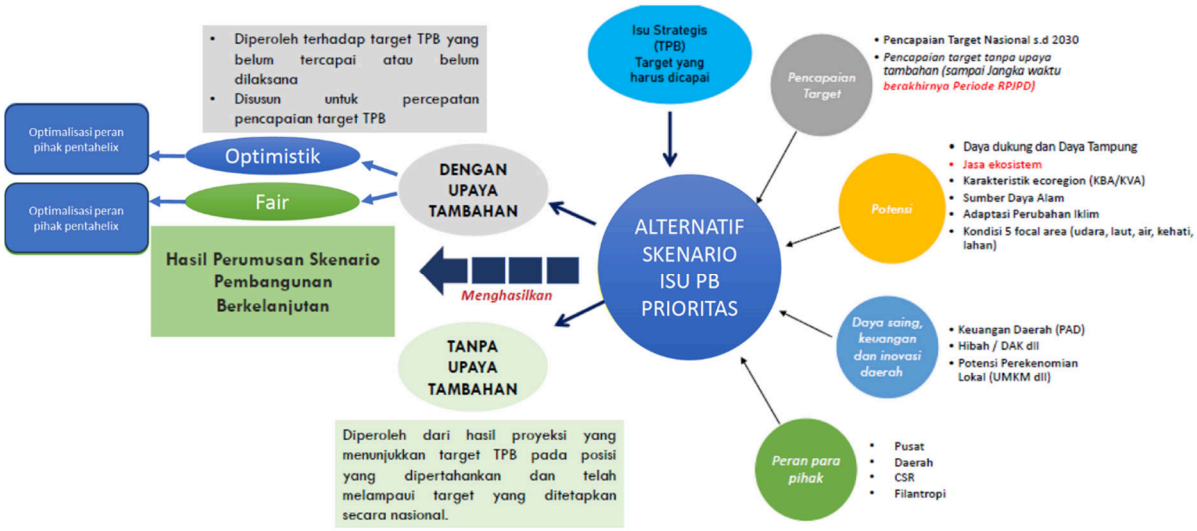
Alternatif proyeksi tanpa atau dengan upaya tambahan pada perumusan skenario pembangunan di atas, menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi yang berisi permasalahan, isu strategis, dan sasaran strategis daerah, dengan ketentuan :

- Rumusan permasalahan menggambarkan kendala dan tantangan dalam pencapaian TPB, serta menjelaskan penyebab terjadinya kesenjangan/gap antara proyeksi pencapaian TPB dan target capaian TPB secara nasional.
- Rumusan isu strategis menjelaskan isu utama pencapaian TPB sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian TPB.
- Sasaran strategis daerah merupakan kondisi pencapaian TPB yang disusun berdasarkan isu strategis dan permasalahan. Sasaran strategis dilengkapi dengan target capaian selama periode RPJMD. Dalam merumuskan sasaran strategis daerah, DDDT-LH menjadi salah satu pertimbangan.

Dibawah ini merupakan Gambar rumusan alternatif skenario yang digunakan di Kota Balikpapan.



Gambar 6.1 Alur Penyusunan KLHS RPJMD Kota Balikpapan



Gambar 6.2 Rumusan Alterantif Skenario

6.1 ALTERANTIF SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN

6.1.1 Skenario Pencapaian Target TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

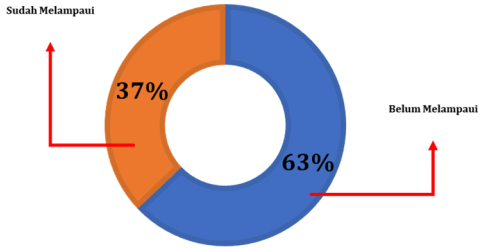
Alternatif pencapaian target TPB 6 air bersih dan sanitasi layak di Kota Balikapapan dengan target yang menjadi isu yaitu Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok

masyarakat rentan, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

Bila dilihat 6 kajian muatan KLHS untuk alterantif skenario TPB 6 di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

DDDTLH :

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha

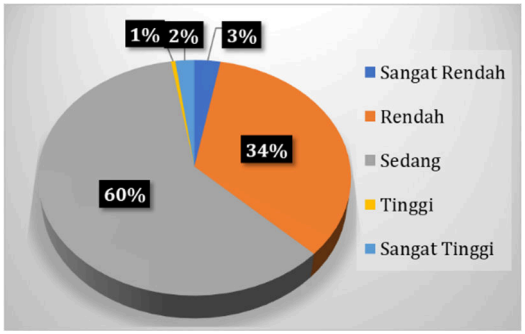


Ketersediaan air di Kota Balikpapan : 524.147.443,99 m3/Tahun

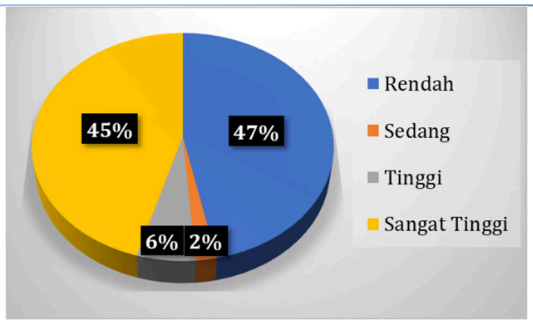
Kebutuhan air di Kota Balikpapan : 525.625.678,16 m3/Tahun

Jasa LH Penyediaan Air terbesar masuk ke dalam kategori sedang dengan luasan total seluas 30.591,15 Ha yang meliputi 6 (enam) kecamatan

Kinerja Jasa Lingkungan :



Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 Ha.



Efisiensi Pemanfaatan SDA	:	EF Penyediaan Air Luasan total EF Penyedia Air di Kota Balikpapan sebesar 71,26%, nilai ini merata diseluruh wilayah Kota Balikpapan EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Luasan terbesar pada EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Timut dengan total 89,21%

Adapun Gap/masalah pada TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak dapat dilihat pada **Tabel VI..6** sebagai berikut :

Tabel VI.1 Analisis Gap TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kota Balikpapan

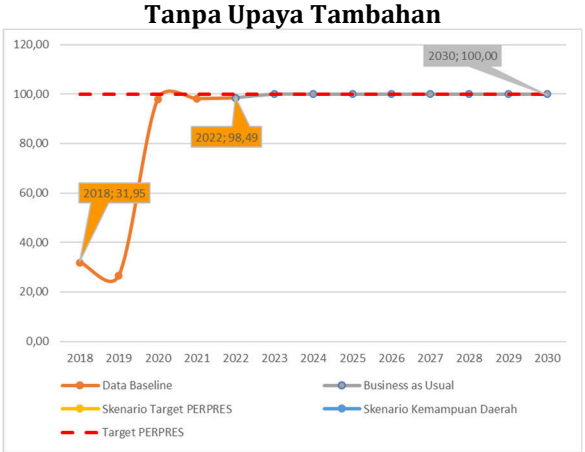
TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
6.1 Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	**6.1.1.(a)** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	**6.2.1 (a)** Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Tidak Tersedia Data (NA
	6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	6.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Tidak Tersedia Data (NA
6.4 Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan	**6.4.1.(b)** Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Tidak Tersedia Data (NA

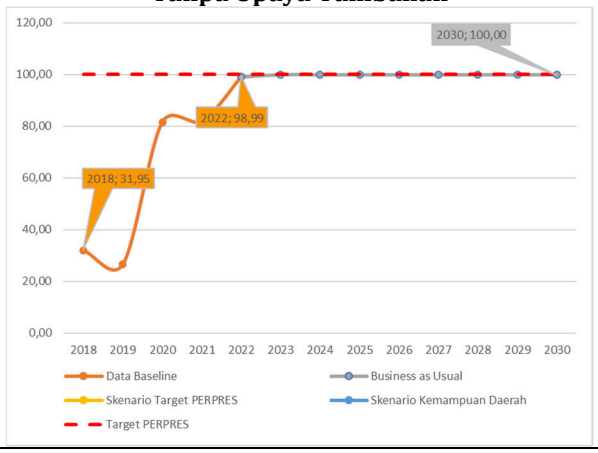
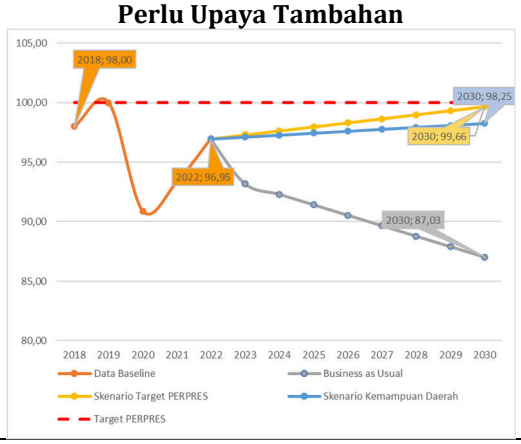
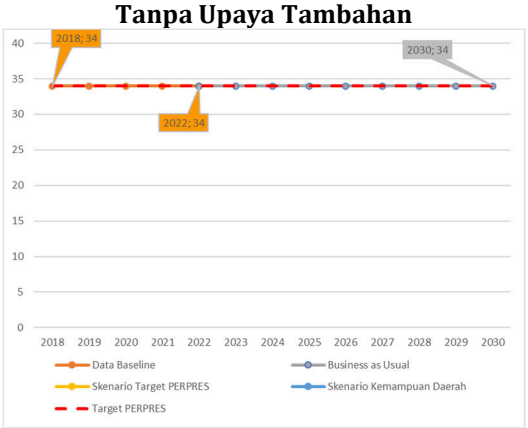
TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.		
6.5 Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	**6.5.1 (f)** Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tidak Tersedia Data (NA
	6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak Tersedia Data (NA

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk menjawab analisis gap diatas maka akan dijabarkan mengenai skenario pencapaian TPB baik melalui skenario tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan terhadap TPB 6 di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.2** berikut ini

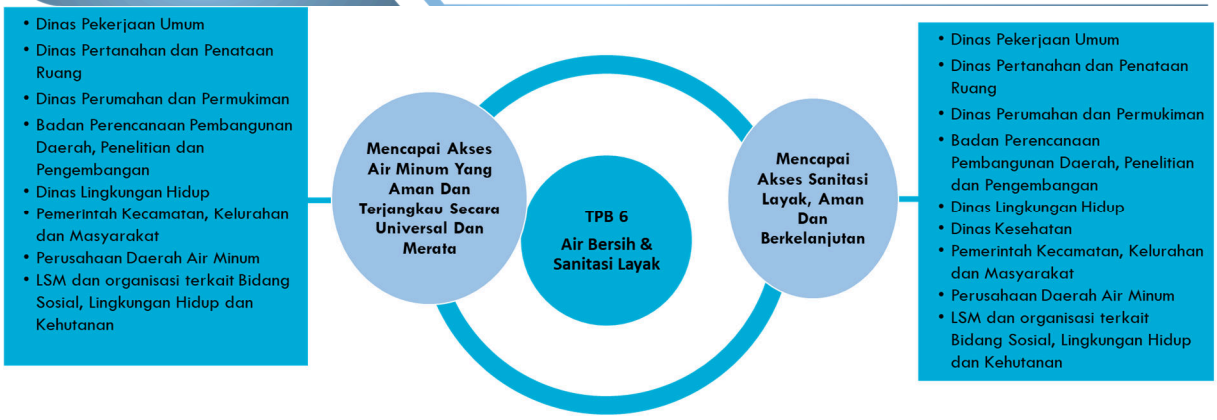
Tabel VI.2 Proyeksi Skenario TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kota Balikpapan

Indikator TPB	Proyeksi BAU	Keterangan
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	**Tanpa Upaya Tambahan** 	Capaian Eksisting Tahun 2022 98,49% Target Perpres Meningkat 100% Proyeksi Bau dilakukan tanpa upaya tambahan dikarenakan dapat tercapai target perpres Tahun 2030

Indikator TPB	Proyeksi BAU	Keterangan
6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	**Tanpa Upaya Tambahan** 	Capaian Eksisting Tahun 2022 98,99% Target Perpres Meningkat 100% Proyeksi Bau dilakukan tanpa upaya tambahan dikarenakan dapat tercapai target perpres Tahun 2030
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	**Perlu Upaya Tambahan** 	Capaian Eksiting Tahun 2022 96,95% Target Perpres meningkat 100% Proyeksi Bau dilakukan perlu upaya tambahan karena sampai dengan Tahun 2030 belum mencapai target Perpres
6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	**Tanpa Upaya Tambahan** 	Jumlah desa / kelurahan di Kota Balikpapan berjumlah 34 Target Perpres Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) Proyeksi Bau dilakukan tanpa upaya tambahan karena sampai dengan Tahun 2030 sudah mencapai target.

Keterangan : Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 6 di Kota Balikpapan terdapat 2 outcome yaitu Mencapai Akses Air Minum Yang Aman Dan Terjangkau Secara Universal Dan Merata dan Mencapai Akses Sanitasi Layak, Aman Dan Berkelanjutan. Kedua outcome ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6.3**. untuk mewujudkan Outcome TPB 6 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program dapat dilihat pada **Tabel VI.3** dibawah ini.



Gambar 6.3 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 6 di Kota Balikpapan

Tabel VI.3 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Ketersediaan Air Baku	1. Mencapai akses air minum yang aman dan terjangkau secara universal dan merata	a. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur penyediaan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		b. Peningkatan koordinasi kerjasama pengelolaan sumber air antar wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		c. Pengendalian beban pencemar di sumber air baku kota	• Pencegahan masuknya bahan pencemar dari aktivitas pertanian dan peternakan di sekitar Waduk Manggar • Aksi Perubahan Waduk Manggar Segar Program pemantauan, pengawasan dan penindakan terkait pencemaran air di sumber air baku Kota Balikpapan
		d. Peningkatan tutupan vegetasi untuk pemulihan ekosistem pengaturan tata air dan banjir	Program Peningkatan atau Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	2. Meningkatkan akses sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	a. Peningkatan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
			Program Pengelolaan Persampahan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Kawasan Permukiman
		b. Peningkatan penyuluhan terkait sanitasi	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		c. Peningkatan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 6 Air Bersih dan dan sanitasi layak di Kota Balikpapan sendiri memiliki keterkaitan dengan TPB 11, TPB 1 dan TPB 2. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.4** dibawah ini.

Tabel VI.4 Interaksi Keterkaitan TPB 6 dengan TPB 11, 1 dan 2 di Kota Balikpapan

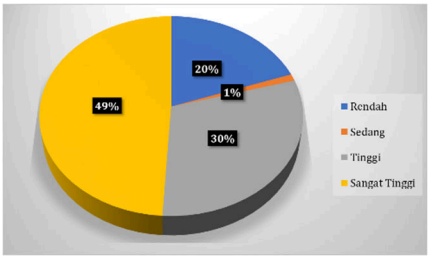
Isu Strategis	TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
• Ketersediaan Air Baku • Dampak bangkitan pembangunan IKN • Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah • Keterbatasan dan kerusakan lahan	TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Pelayanan dasar
		TPB 1 Tanpa Kemiskinan	Adanya akses layanan air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat khusunya masyarakat miskin.
		TPB 2 Tanpa Kelaparan	Ketersediaan air bersih dapat berpengaruh pada produktivitas pertanian yang pada akhirnya mempengaruhi produksi pangan. Begitu juga sebaliknya, peningkatan produksi pertanian dapat meningkatkan pengambilan air dan memperburuk degradasi air dan tanah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan tata kelola air yang baik serta pengembangan sistem dan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan ketersediaan air bersih dan juga peningkatan produktivitas pertanian.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

6.1.2 Skenario Pencapaian Target TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim

Skenario pencapaian target TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim di Kota Balikpapan dengan target yang menjadi isu yaitu Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara dan Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Bila dilihat 6 kajian muatan KLHS untuk alterantif skenario TPB 13 di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Kinerja Jasa Lingkungan :	Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha. 
Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan	Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah. Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Bahaya Cuaca Ekstrim Di kota Balikpapan tingkat bahaya Karhutla dan Bahaya Cuaca Ekstrim berada pada tingkat sedang yang tersebar diseluruh kecamatan. Bahaya Gempa Bumi Tingkat bahaya gempa bumi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 50605,87 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan Bahaya Tsunami Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan Bahaya Longsor Tingkat bahaya longsor di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dan sedang, untuk bahaya rendah dengan luas 470,08 Ha yang tersebar di lima kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan luas 257,93 Ha yang tersebar di empat kecamatan. Bahaya Banjir Tingkat bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi, untuk bahaya banjir tinggi dengan total luas 5512,65 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan.

Bahaya Kekeringan

Tingkat bahaya kekeringan di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total 50.664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Tabel VI.5 Analisis Gap TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim di Kota Balikpapan

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 13 di Kota Balikpapan terdapat 1 outcome yaitu Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bencana alam. Outcome ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6.4.** untuk mewujudkan Outcome TPB 1 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program dapat dilihat pada **Tabel VI.6** dibawah ini.



Gambar 6.4 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 13 di Kota Balikpapan

Tabel VI.6 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 13 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Pengendalian Emisi GRK	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bencana alam	Menekan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanggulangan Bencana
			Program Penanganan Bencana
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pendidikan dan pelatihan
			Program Desa Tanggap Bencana

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim di Kota Balikpapan sendiri memiliki keterkaitan dengan TPB 3 dan TPB 11. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.7** dibawah ini.

Tabel VI.7 Interaksi Keterkaitan TPB 13 dengan TPB 3 dan TPB 11 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
• Pengendalian Emisi GRK	TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim	TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Perubahan iklim dapat mendorong penyebaran penyakit, berkontribusi terhadap kerawanan pangan dan air, dsb.
		TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	Perubahan iklim dapat menyebabkan becana alam yang dapat menimbulkan korban, kerugian, dan kerusakan. Sehingga diperlukan untuk memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya yang terkait dengan perubahan iklim.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

6.1.3 Skenario Pencapaian Target TPB 1 Tanpa Kemiskinan

Skenario pencapaian target TPB 1 Tanpa Kemiskinan di Kota Balikpapan dengan target yang menjadi isu yaitu Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan, Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, dan Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang

berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

Adapun Gap/masalah pada TPB 1 Tanpa Kemiskinan dapat dilihat pada **Tabel VI.8** sebagai berikut :

Tabel VI.8 Analisis Gap TPB 1 Tanpa Kemiskinan di Kota Balikpapan

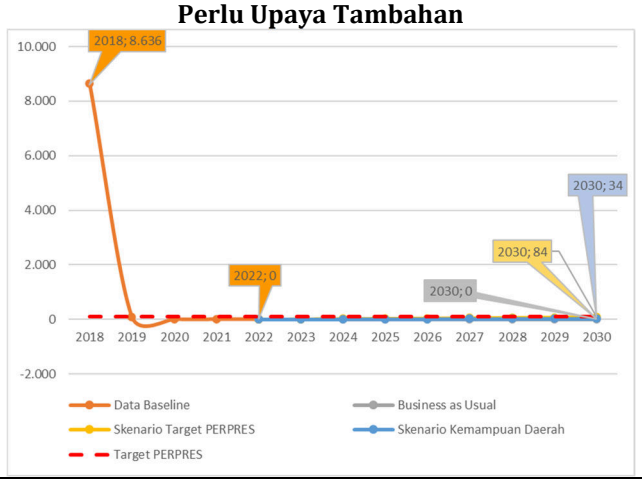
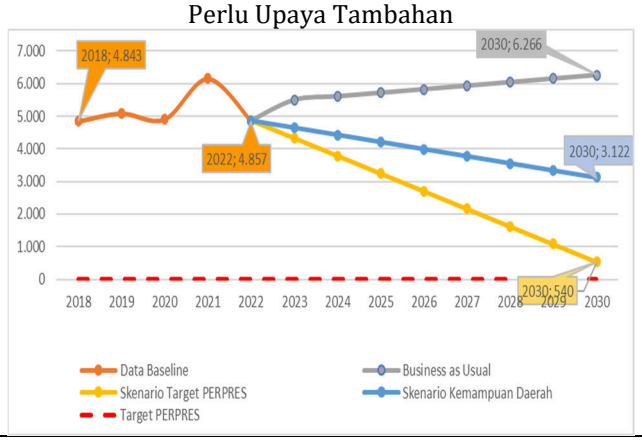
TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	**1.3.1 (a)** Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak Tersedia Data (NA)
	1.3.1 (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Tidak Tersedia Data (NA)
	1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
1.4. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	**1.4.1 (d)** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Tidak Tersedia Data (NA)
1.5 Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	**1.5.1 (c)** Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak Tersedia Data (NA)
	1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

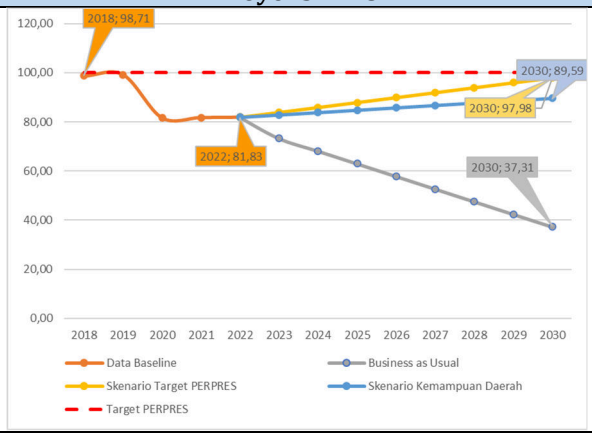
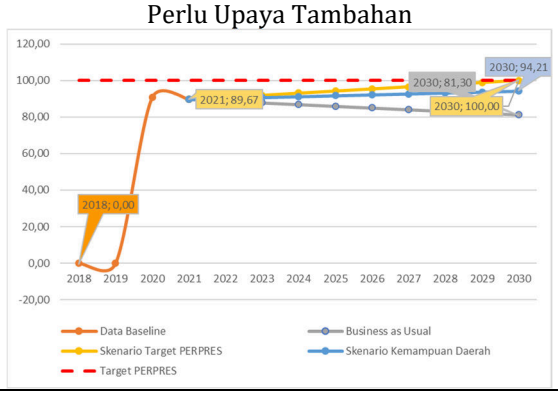
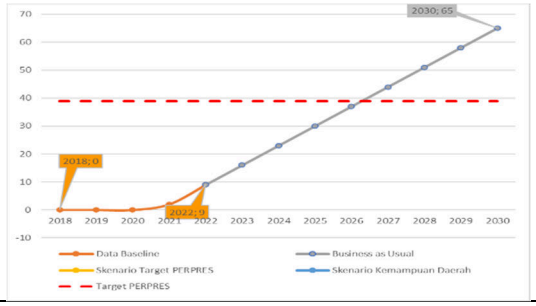
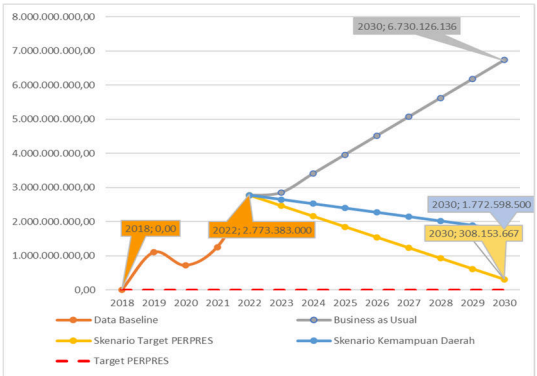
TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	**1.a.1'** Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Tidak Tersedia Data (NA)
	1.a.2' Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Tidak Tersedia Data (NA)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk menjawab analisis gap diatas maka akan dijabarkan mengenai skenario pencapaian TPB baik melalui skenario tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan terhadap TPB 1 di Kota Balikpapan.Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.9** berikut ini

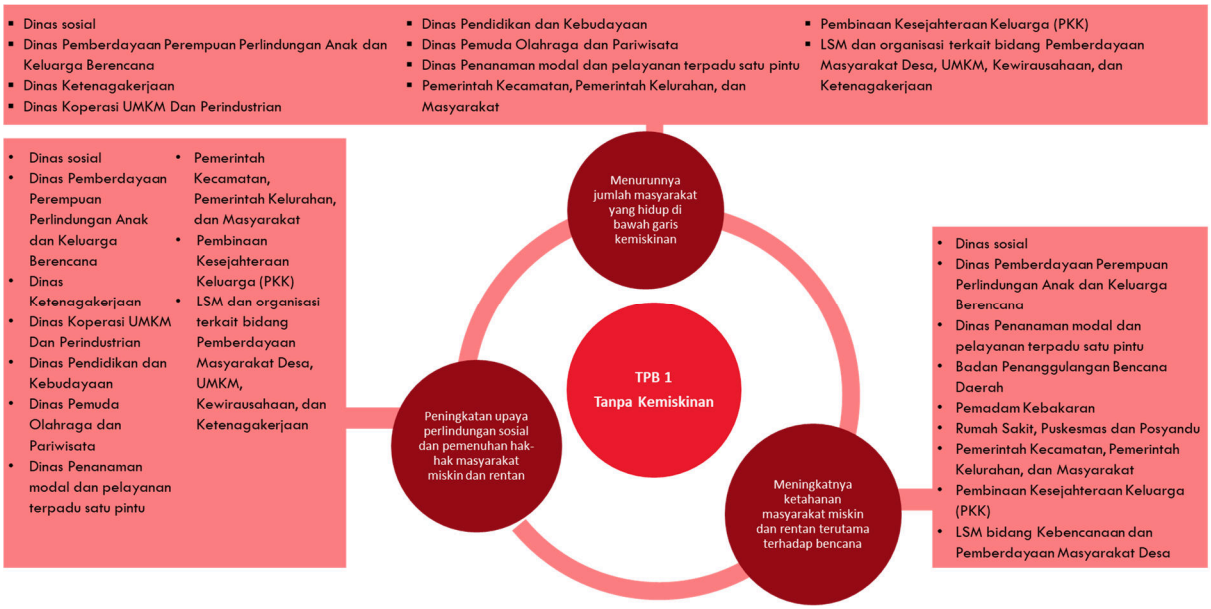
Tabel VI.9 Proyeksi Skenario TPB 1 Tanpa Kemiskinan di Kota Balikpapan

Indikator TPB	Proyeksi BAU	Keterangan
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Perlu Upaya Tambahan 	Capaian Eksisting Tahun 2019 89% Target Perpres meningkat menjadi 95% Proyeksi BAU dilakukan perlu upaya tambahan karena sampai dengan Tahun 2030 belum mencapai target nasional atau perpres
1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Perlu Upaya Tambahan 	Capaian Eksisting Tahun 2022 sebesar 4.857 Jt Target perpres Menurun menjadi 2,8 juta Proyeksi BAU dilakukan dengan upaya tambahan karena sampai dengan Tahun 2030 belum mencapai Target Perpres
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses	Perlu Upaya Tambahan	Capaian Eksisting Tahun 2022 81,83% Target Perpres meningkat 100%

Indikator TPB	Proyeksi BAU	Keterangan
terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.		Proyeksi BAU dilakukan dengan upaya tambahan karean sampai dengan Tahun 2030 belum mencapai Target Perpres atau baru sekitar 89,59%
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Perlu Upaya Tambahan 	Capaian eksisting Tahun 2022 89,67% Target Perpres meningkat menjadi 100% Proyeksi BAU dilakukan dengan upaya tambahan karena sampai dengan Tahun 2030 belum mencapai target atau baru sekitar 94,21%
1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Tanpa Upaya Tambahan 	Capaian eksisting tahun 2022 9 Target Perpres meningkat menjadi 39 daerah Proyeksi BAU dilakukan dengan tanpa upaya tambahan karena pada Tahun 2030 sudah tercapai sesuai dengan target perpres
1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Perlu Upaya Tambahan 	Capaian Eksisting Rp. 2.773.383.000 Target Perpres menurun Proyeksi BAU dilakukan perlu upaya tambahan untuk

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 1 di Kota Balikpapan terdapat 3 outcome yaitu Menurunnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, Peningkatan upaya perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan rentan dan Meningkatnya ketahanan masyarakat miskin dan rentan terutama terhadap bencana. ketiga outcome ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6.5**. untuk mewujudkan Outcome TPB 1 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program dapat dilihat pada **Tabel VI.10** dibawah ini.



Gambar 6.5 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 1 di Kota Balikpapan

Tabel VI.10 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 1 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Dampak bangkitan pembangunan IKN	1. Menurunnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan	a. Peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan serta masyarakat miskin dan rentan	Program Pemberdayaan Sosial
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		b. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha mikro	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			Program Pengembangan UMKM
		c. Peningkatan kemudahan akses modal usaha melalui koperasi	Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	2. Peningkatan upaya perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan rentan	a. Perlindungan dan jaminan sosial	Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		b. Perlindungan anak dan perempuan	Program Perlindungan Perempuan
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Program Perlindungan Khusus Anak
		c. Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Pendidikan
	3. Peningkatan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terutama terhadap bencana	Peningkatan upaya penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Program Desa Tangguh Bencana

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Beberapa tujuan TPB dapat saling berinteraksi satu sama lain (Griggs, et al., 2017). Tujuan-tujuan tersebut didesain sebagai seperangkat prioritas global dan tujuan yang saling bergantung secara fundamental. Interaksi dapat mengarah ke dampak negatif ataupun positif, sehingga TPB prioritas dapat saling berinteraksi dengan TPB prioritas maupun dengan TPB non-prioritas.

Untuk TPB 1 Tanpa Kemiskinan di Kota Balikpapan sendiri memiliki keterkaitan dengan TPB 3, 4, 6 dan 11. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.11** dibawah ini.

Tabel VI.11 Interaksi Keterkaitan TPB 1 dengan TPB 3, 4, 6 dan 11 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
	TPB 1 Tanpa Kemiskinan	TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Tanpa kemiskinan dapat menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses

Isu Strategis	TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
• Dampak bangkitan pembangunan IKN			pelayanan dasar salah satunya layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.
		TPB 4 Pendidikan Berkualitas	Tanpa kemiskinan dapat menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar salah satunya layanan pendidikan.
		TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Tanpa kemiskinan dapat menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar salah satunya akses layanan air bersih dan sanitasi.
		TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Tanpa kemiskinan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat miskin menghadapi bencana melalui perencanaan kota yang berkelanjutan dan perumahan yang layak dan terjangkau.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

6.1.4 Skenario Pencapaian Target TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

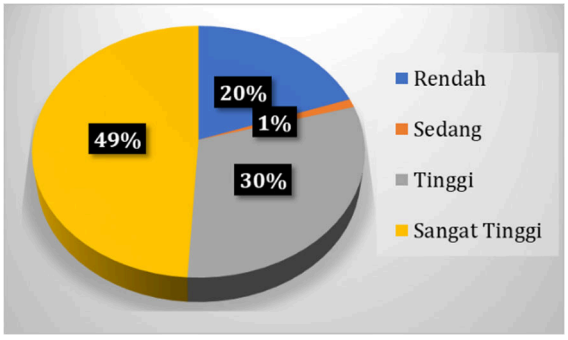
Skenario pencapaian target TPB 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan di Kota Balikpapan dengan target yang menjadi isu yaitu Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua, Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara, dan Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Bila dilihat 6 kajian muatan KLHS yang berkaitan dengan TPB 11 di Kota Balikpapan

Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

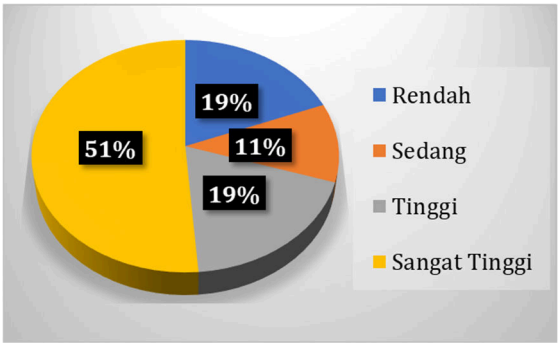
Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha.

Kinerja Jasa Lingkungan :



Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 26.110,44 Ha.



Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan Hidup :

Timbulan Sampah

Rentang terbesar timbulan sampah paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 502.607,74 M3/Tahun.

Timbulan Tinja

Rentang terbesar timbulan Tinja paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 23.257,98 M3/Tahun

Beban Pencemar

Total Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan sebesar 26758,59 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 6.851,64 Kg/Hari

Total Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan sebesar 30364,12 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 7.042,12 Kg/Hari

Total Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan sebesar 21026,16 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 4.879,85 Kg/Hari.

Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Bahaya Cuaca Ekstrim

Di kota Balikpapan tingkat bahaya Karhutla dan Bahaya Cuaca Ekstrim berada pada tingkat sedang yang tersebar diseluruh kecamatan.

Bahaya Gempa Bumi

Tingkat bahaya gempa bumi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 50605,87 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan

Bahaya Tsunami

Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan

Bahaya Longsor

Tingkat bahaya longsor di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dan sedang, untuk bahaya rendah dengan luas 470,08 Ha yang tersebar di lima kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan luas 257,93 Ha yang tersebar di empat kecamatan.

Bahaya Banjir

Tingkat bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi, untuk bahaya banjir tinggi dengan total luas 5512,65 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan.

Bahaya Kekeringan

Tingkat bahaya kekeringan di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total 50.664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Dibawah ini merupakan **Tabel VI.12** mengenai analisis gap pada TPB 11.

Tabel VI.12 Analisis Gap TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kota Balikpapan

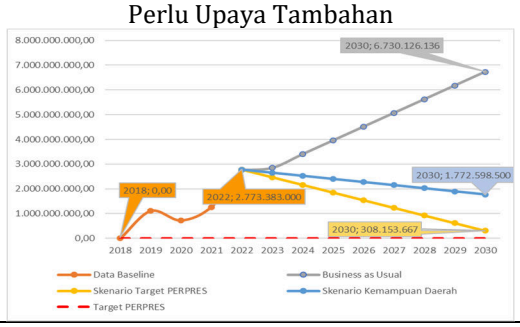
TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
11.2 Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	**11.2.1 (a)** Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Tidak Tersedida Data (NA
11.3 Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	**11.3.2 (a)** Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Tidak Tersedida Data (NA

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
	11.3.2 (b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tidak Tersedida Data (NA
11.5 Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	**11.5.1 (b)** Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Tidak Tersedida Data (NA
	11.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

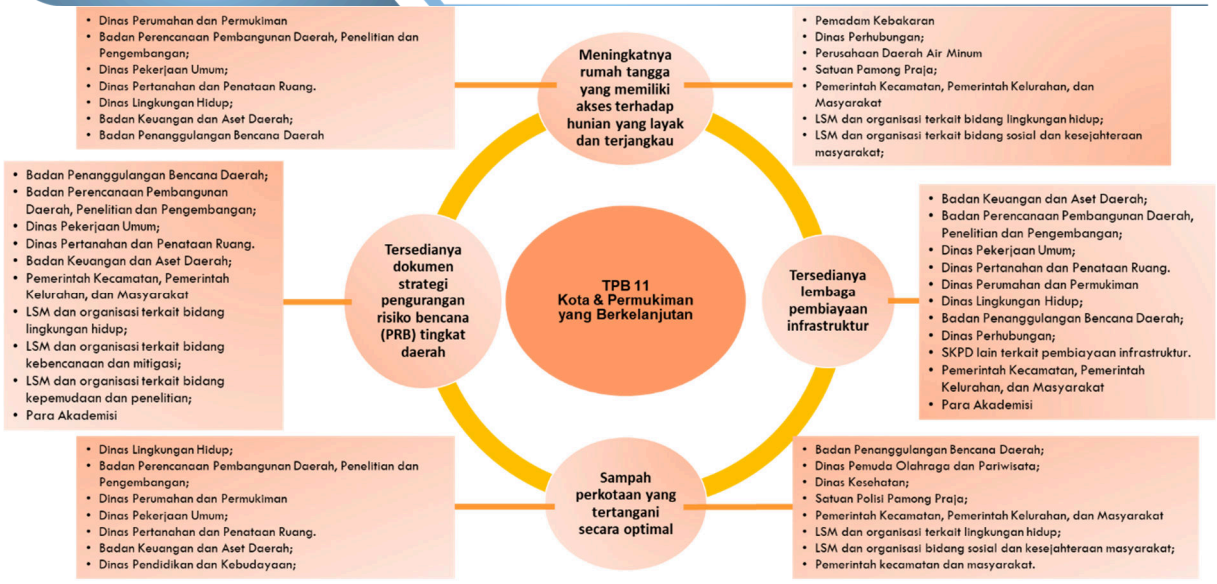
Untuk menjawab analisis gap diatas maka akan dijabarkan mengenai skenario pencapaian TPB baik melalui skenario tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan terhadap TPB 11 di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.13** berikut,

Tabel VI.13 Proyeksi Skenario TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kota Balikpapan

Indikator TPB	Proyeksi BAU	Keterangan
11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Perlu Upaya Tambahan 	Capaian eksisting tahun 2022 sebesar Rp. 2.773.383.000 Target Perpres menurun Proyeksi BAU memerlukan upaya tambahan untuk mengejar target perpres

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 11 di Kota Balikpapan terdapat 4 outcome yaitu Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur, Sampah perkotaan yang tertangani secara optimal dan Tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. keempat outcome ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6.6**. untuk mewujudkan Outcome TPB 11 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program dapat dilihat pada **Tabel VI.14** dibawah ini.



Gambar 6.6 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 11 di Kota Balikpapan

Tabel VI.14 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 11 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
• Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah	1. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	a. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		b. Peningkatan keamanan, dan ketertiban kawasan perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		c. Perencanaan dan koordinasi perencanaan penataan ruang untuk optimalisasi lahan hunian	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Program Penataan Bangunan Gedung
		d. Pengembangan kawasan hunian dengan memperhatikan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		lingkungan hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		e. Pengembangan, pengendalian, serta pengawasan akses lalu lintas di sekitar kawasan hunian	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	2. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	a. Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan
	3. Sampah perkotaan yang tertangani secara optimal.	a. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		b. Pengelolaan dan pengawasan sistem drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		c. Peningkatan perlindungan kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		d. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		e. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		masyarakat untuk pengelolaan sampah dan limbah	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	4. Tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	a. Perencanaan penyusunan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Program Penanggulangan Bencana
			Program Penanganan Bencana
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kota Balikpapan sendiri memiliki keterkaitan dengan TPB 1, TPB 3, dan TPB 6. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.15** dibawah ini.

Tabel VI.15 Interaksi Keterkaitan TPB 11 dengan TPB 1, TPB 3 dan TPB 6 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
• Ketersediaan Air Baku • Dampak bangkitan pembangunan IKN • Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah • Keterbatasan dan kerusakan lahan	TPB 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	TPB 1 Tanpa Kemiskinan	Perencanaan kota yang berkelanjutan dan perumahan yang layak dan terjangkau dapat meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap bencana sehingga secara signifikan dapat mengurangi jumlah kematian dan orang terdampak serta kerugian ekonomi.
		TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Kota dan permukiman berkelanjutan memusatkan pertumbuhan populasi global yang dapat memiliki pengaruh kritis terhadap kesehatan fisik dan mental. Perencanaan kota yang berkelanjutan dan perumahan yang layak dan terjangkau dapat mendukung kesehatan manusia dan akses layanan kesehatan, serta mengurangi penyakit tidak menular dan membatasi dampak lingkungan.
		TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Adanya akses layanan air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

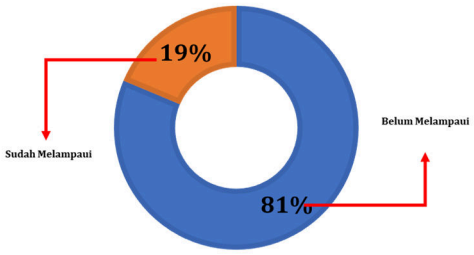
6.1.5 Skenario Pencapaian Target TPB 2 Tanpa Kelaparan

Skenario pencapaian target TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan dengan target yang menjadi isu yaitu Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun dan Menghilangkan

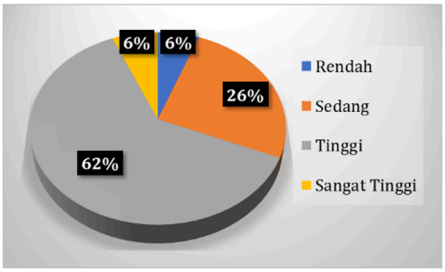
segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Bila dilihat 6 kajian muatan KLHS untuk alterantif skenario TPB 2 di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

DDDTLH	:	Daya Dukung Pangan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.



		Ketersediaan Pangan = 916.178.290.606,89 Kkal/thn; Kebutuhan pangan = 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun
Kinerja Jasa Lingkungan	:	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha.



Efisiensi Pemanfaatan SDA	:	EF Penyedia Pangan Nilai Efisiensi Penyedia Pangan terbesar di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%

Adapun Gap/masalah pada TPB 2 Tanpa Kelaparan dapat dilihat pada Tabel VI.16 berikut.

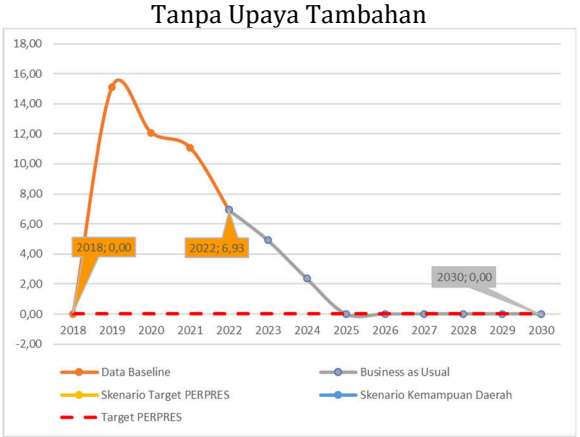
Tabel VI.16 Analisis Gap TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan

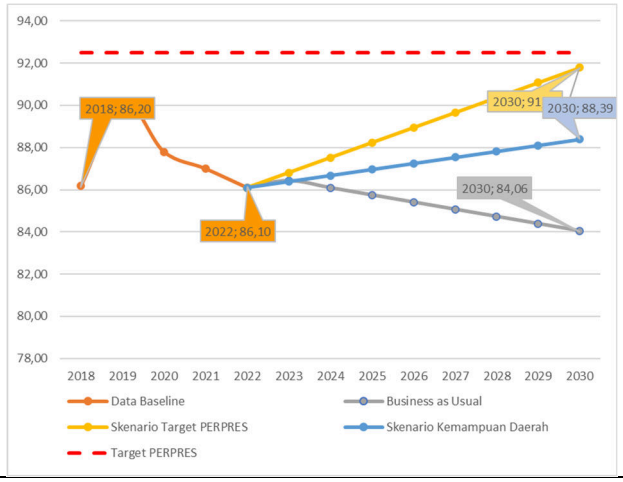
TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
2.1 Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	**2.1.2 (a)** Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Belum Dilaksanakan (BB)
2.2 Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	**2.2.1*** Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk menjawab analisis gap diatas maka akan dijabarkan mengenai skenario pencapaian TPB baik melalui skenario tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan terhadap TPB 2 di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat diliihat pada **Tabel VI.17** berikut.

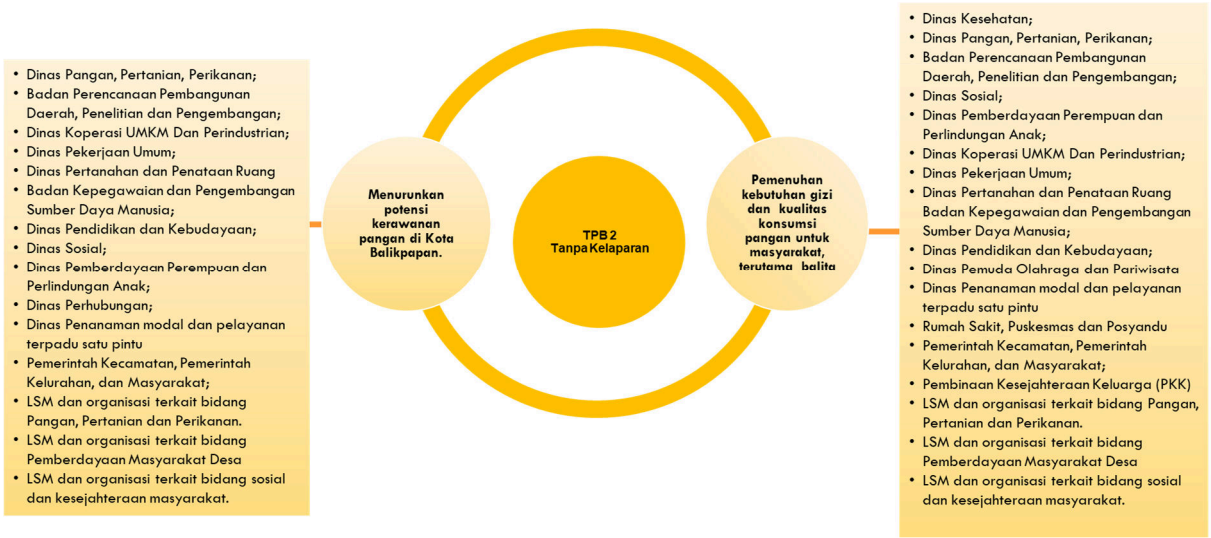
Tabel VI.17 Proyeksi Skenario TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan

Indikator TPB	Proyeksi BAU	Keterangan
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Tanpa Upaya Tambahan 	Capaian Eksisting Tahun 2022 6,93 % Target Perpres menurun Proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan karena pada Tahun 2030 sudah mencapai target perpres.
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Perlu Upaya Tambahan	Capaian eksisting Tahun 2022 86,10% Target Perpres 92,5% Proyeksi BAU dilakukan dengan upaya tambahan karena sampai dengan Tahun 2030 belum mencapai target yang ditetapkan oleh Perpres.

Indikator TPB	Proyeksi BAU	Keterangan
		

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 2 di Kota Balikpapan terdapat 2 outcome yaitu Menurunkan potensi kerawanan pangan di Kota Balikpapan dan Pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat, terutama balita. Kedua outcome ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6.7**. untuk mewujudkan Outcome TPB 2 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program dapat dilihat pada **Tabel VI.18** dibawah ini.



Gambar 6.7 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 2 di Kota Balikpapan

Tabel VI.18 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 2 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
• Dampak bangkitan pembangunan IKN • Keterbatasan dan kerusakan lahan • Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan	1. Menurunkan potensi kerawanan pangan di Kota Balikpapan.	a. Peningkatan ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Program Hubungan Industri
			Program Peningkatan Kerjasama Desa
		b. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung ketersediaan pangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Tanah Kosong
			Program Penatagunaan Tanah
		c. Optimalisasi pertanian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		d. Optimalisasi perikanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		e. Peningkatan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Pengembangan UMKM
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		f. Peningkatan perlindungan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		pangan bagi masyarakat rentan dan korban bencana	Program Penanganan Bencana
	2. Pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat, terutama balita, di Kota Balikpapan.	a. Menjamin terpenuhinya nutrisi, khususnya anak pada usia balita	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		b. Peningkatan nutrisi dan kualitas bahan pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
		c. Optimalisasi penggunaan lahan dan diversifikasi tanaman pangan.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pengelolaan Tanah Kosong
			Program Penatagunaan Tanah
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		d. Peningkatan kerjasama dan hubungan industri untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas konsumsi pangan	Program Hubungan Industri
			Program Peningkatan Kerjasama Desa
		e. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas konsumsi pangan.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan
		f. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM terkait kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan sendiri memiliki keterkaitan dengan TPB 6, dan TPB 3. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.19** dibawah ini.

Tabel VI.19 Interaksi Keterkaitan TPB 2 dengan TPB 6 dan TPB 3 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
• Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan • Keterbatasan dan kerusakan lahan • Ketersediaan Air Baku	TPB 2 Tanpa Kelaparan	TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Kota dan permukiman berkelanjutan memusatkan pertumbuhan populasi global yang dapat memiliki pengaruh kritis terhadap kesehatan fisik dan mental. Perencanaan kota yang berkelanjutan dan perumahan yang layak dan terjangkau dapat mendukung kesehatan manusia dan akses layanan kesehatan, serta mengurangi penyakit tidak menular dan membatasi dampak lingkungan.
		TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Adanya akses layanan air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

6.1.6 Skenario Pencapaian Target TPB 14 Ekosistem Laut

Untuk kondisi TPB 14 ekosistem laut di Kota Balikpapan dapat dilihat kondisi Bathimetri pantai Balikpapan secara umum dapat dijelaskan bahwa rata-rata bathimetri pantai Kota Balikpapan dapat digolongkan landai, kelandaiannya antara pantai di Kelurahan Prapatan ke arah timur sampai di pantai Kelurahan Lamaru menunjukkan keadaan yang sama yaitu landai sekitar 2% s/d 4%.

Di depan Kelurahan Prapatan yaitu dekat mulut Teluk Balikpapan, menunjukkan adanya delta yang berbentuk oval panjang sampai di depan Bandara Sepinggan. Terbentuknya delta ini diperkirakan terjadi adanya dua kemungkinan, yaitu pertama terjadi akibat endapan sediment yang dihasilkan dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Balikpapan termasuk Sungai Somber dan Sungai Wain secara komulatif dari tahun ke tahun. Dan yang kedua adalah bekas bagian daratan yang terkena abrasi sehingga terkikis habis dan meninggalkan batuan keras dari bagian daratan yang dimaksud. Kemungkinan ini dapat terjawab jika dilakukan penelitian pada kondisi batuan delta yang dimaksud, jika keadaannya batuan keras, maka terbentuknya delta tersebut adalah pada kondisi yang ke dua, tetapi jika sebaliknya yaitu keadaan tanahnya lunak yang merupakan endapan dari sedimentasi, maka terbentuknya delta tersebut adalah yang pada kondisi yang pertama. Delta tersebut sementara ini permukaannya terendam diperkirakan pada elevasi antara 1 s/d 2 m dibawah muka air laut surut.

Teluk Balikpapan merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian Kota Balikpapan, karena di Teluk Balikpapan terdapat berbagai kegiatan yang sangat potensial baik dari segi perekonomian, transportasi maupun pendayagunaan sumber daya alam. Hal ini semua dapat terjadi karena kondisi Teluk Balikpapan yang secara alami memiliki potensi alam yang cukup tinggi.

Teluk Balikpapan merupakan ekosistem perairan semi tertutup dimana pengaruh air laut lebih dominan pada saat musim kemarau, dengan demikian salinitas airnya cukup tinggi. Dilihat dari ekosistem yang ada dan posisi geografis serta kekayaan alam yang terkandung

di wilayah ini sehingga Teluk Balikpapan menjadi berkembang sebagai kawasan yang sangat kompiek dan tumpang tindih pengelolaannya. Pada saat ini pemanfaatan alam Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan internasional, tambang minyak, transportasi air, pelabuhan ikan, budidaya ikan, penangkapan ikan.

Ekosistem yang ada merupakan bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga keseimbangannya, Kegiatan perekonomian dan kegiatan pengembangan infrastruktur kota sebagai sebagai kensekuansi logis perkembangan tutuntutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penataan ruang secara komprehensif di wilayah ini sangat diperlukan agar diperoleh pegelolaan yang terpadu dan memperhatikan pertimbangan penting kelestarian ekosystem lingkungan.

Potensi Hutan Mangrove, Teluk Balikpapan memiliki potensi hutan mangrove yang cukup besar. Jenis komunitas hutan mangrove yang dijumpai adalah Rhizophora spp, Avicennia spfi, Sonneratia spp, Bruguiera spp, Ceriops spp serta Nypa fructicans. Jenis mangrove Rhizophora spp adalah komunitas terbesar yang ada di kawasan Teluk Balikpapan. Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting artinya dalam pengertian ekologis, yaitu sebagai barrier pantai terhadap gempuran gelombang, juga sebagai habitat tempat berkembang biaknya jenis ikan, udang dan jenis hewan vertebrata. Selain itu sebagai tempat berkembang dan berlindung burung dan fauna lainnya. Dari hasil laporan Proyek Pesisir, di hutan mangrove Teluk Balikpapan dijumpai burung Elang Bondol (Heliastur Indus), Elang Hitam (Ictinaeus Malayensis), Elang Laut (Haliaeetus Leucogaster), Burung Raja Udang (Halcyon Chloris) burung Rangkong, Pelatuk dan lain-lain. Jenis mamalia yang dijumpai antara lain Kera (Macaca Fascicularis) dan Bekantan (Nasalis Larvantus).

Hutan mangrove yang ada, saat ini telah mengalami degradasi yang disebabkan oleh konversi untuk usaha pertambakan, kegiatan industri dan pembangunan sarana fisik lainnya, pengembangan wilayah penduduk, serta aktifitas di daerah hulu/ pedalaman. Degradasi ini akan diperkirakan meningkat jika tidak ada upaya pengelolaan secara terkoordinir dan terpadu oleh dinas dan instansi terkait serta masyarakat.

Potensi perikanan Teluk Balikpapan memiliki potensi perikanan yang cukup besar, hal ini terjadi karena ekosistem perairan teluk yang sangat menguntungkan bagi kembang tumbuhnya habitat perikanan. Kondisi hutan mangrove yang cukup subur, salinitas air dan suhu yang stabil dan sesuai, serta kualitas air yang jernih membawa suburnya perikanan di peraiaran Teluk Balikpapan dan sekitarnya.

Potensi perikanan Teluk Balikpapan dikelompokkan sebagai hasil budidaya dan sebagai hasil penangkapan. Hasil Budidaya terdiri dari budidaya tambak tradisional yaitu tambak ikan bandeng, udang windu dan teripang. Oleh karena potensi alam yang mendukung baik kondisi makanan alami yang terkandung, kualitas air dengan sirkulasinya dan lingkungan hutan mangrove disekitarnya maka budidaya perikanan di kawasan ini sangat memungkinkan dikembangkan. Selain itu bibit berupa benur dan nener dapat diperoleh dengan mudah di kawasan Teluk Balikpapan, karena benur dan nener tersebut tersedia secara alami di kawasan Teluk Balikpapan. Budidaya lain yang dihasilkan adalah hasil pengembangan budidaya apung udang dan ikan bandeng.

Skenario pencapaian target TPB 14 Ekosistem Laut di Kota Balikpapan dengan target yang menjadi isu yaitu Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

Bila dilihat 6 kajian muatan KLHS untuk alterantif skenario TPB 14 di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim	:	Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah.
Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan Hidup	:	Bahaya Tsunami Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan.
Keanekaragaman Hayati	:	Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati terdapat beberapa biota laut yang dilindungi yaitu antara lain penyu lekang, kepiting tapal kuda, paus bungkuk, paus kepala melon, paus pembunuh palsu dan kepiting bakau bertelur. Hewan Endemik seperti orangutan, Bekantan, dan Burung Kalimantan – sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara

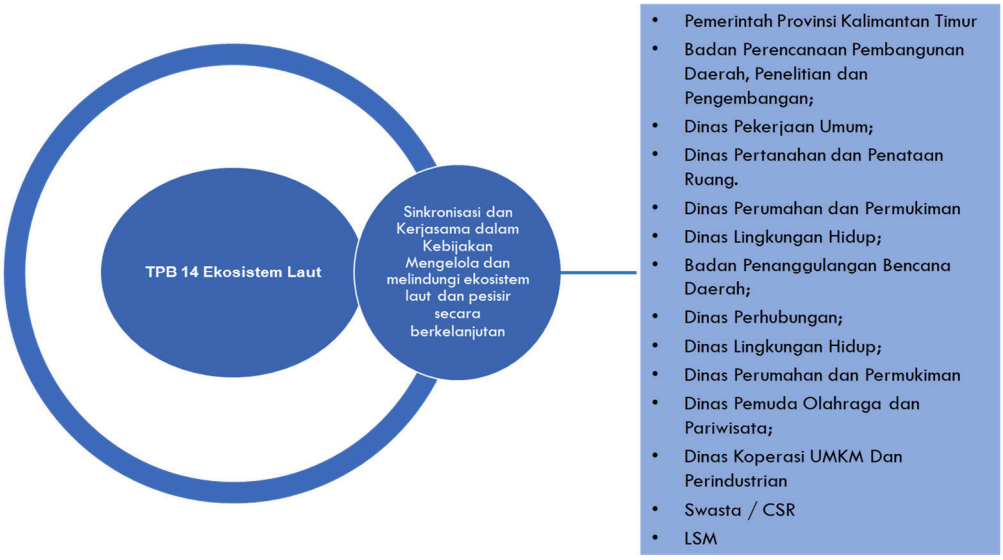
Adapun Gap/masalah pada TPB 14 Ekosistem Laut dapat dilihat pada Tabel VI.20 berikut.

Tabel VI.20 Analisis Gap TPB 14 Ekosistem Laut di Kota Balikpapan

Target Yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
14.2 Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 14 di Kota Balikpapan terdapat 1 outcome yaitu Sinkronisasi dan Kerjasama dalam Kebijakan Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan. Outcome ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6.8**. untuk mewujudkan Outcome TPB 14 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program dapat dilihat pada **Tabel VI.21** dibawah ini.



Gambar 6.8 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 14 di Kota Balikpapan

Tabel VI.21 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 14 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Degradasi kawasan pesisir dan laut	Sinkronisasi dan Kerjasama dalam Kebijakan Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	Sinkronisasi dan Kerjasama dalam Kebijakan Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 14 Ekosistem Laut di Kota Balikpapan sendiri memiliki keterkaitan dengan TPB 11, dan TPB 15. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.22** dibawah ini.

Tabel VI.22 Interaksi Keterkaitan TPB 14 dengan TPB 11 dan TPB 15 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
• Degradasi kawasan pesisir dan laut	TPB 14 Ekosistem Laut	TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	
		TPB 15 Ekosistem Darat	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

6.1.7 Skenario Pencapaian Target TPB 15 Ekosistem Darat

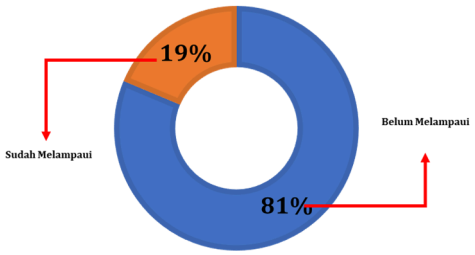
Skenario pencapaian target TPB 15 Ekosistem Darat di Kota Balikpapan dengan target yang menjadi isu yaitu Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Bila dilihat 6 kajian muatan KLHS untuk alterantif skenario TPB 15 di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Daya Dukung Pangan

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.

DDDTLH :

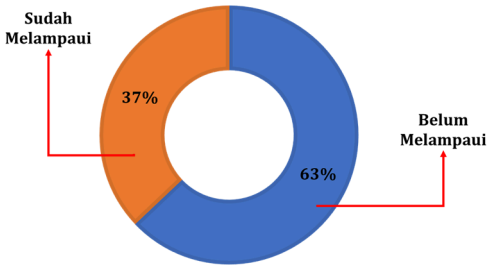


Ketersediaan Pangan = 916.178.290.606,89 Kkal/thn;

Kebutuhan pangan = 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun

Daya Dukung Air

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha.

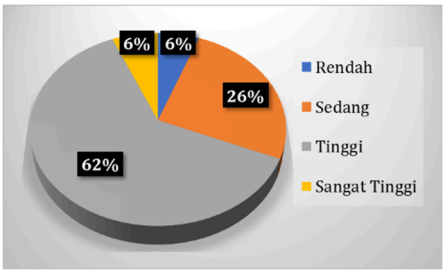


Ketersediaan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 524.147.443,99 M3/Tahun dan untuk kebutuhan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 525.625.678,16 M3/Tahun

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

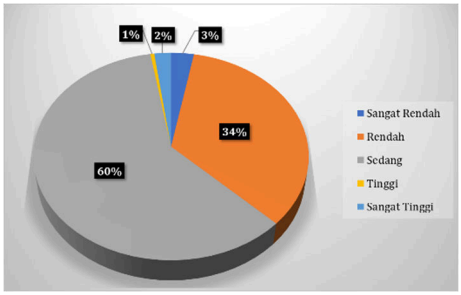
Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha.

Kinerja Jasa Lingkungan :



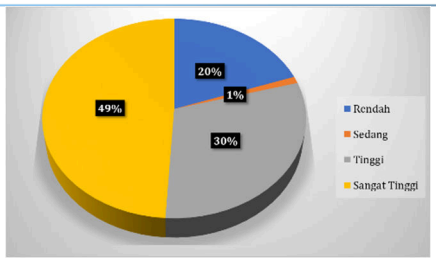
Jasa Lingkungan Penyedia Air

Pada Jasa Ekosistem Penyediaan Air terbesar masuk kedalam kategori sedang dengan luasan total seluas 30.591,15 Ha yang meliputi 6 (enam) kecamatan.



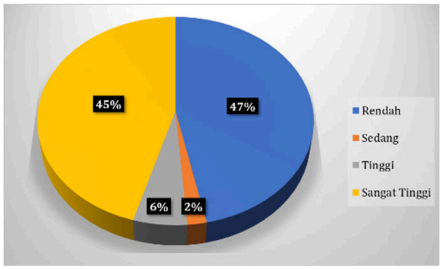
Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha.



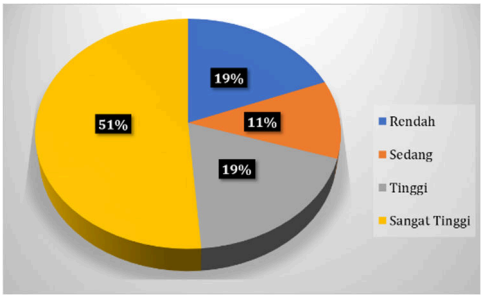
Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 Ha.



Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 26.110,44 Ha.



Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim

Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah.

Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan

Timbulan Sampah

Rentang terbesar timbulan sampah paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 502.607,74 M3/Tahun.

Timbulan Tinja

Rentang terbesar timbulan Tinja paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 23.257,98 M3/Tahun

Beban Pencemar

Total Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan sebesar 26758,59 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 6.851,64 Kg/Hari

Total Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan sebesar 30364,12 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 7.042,12 Kg/Hari

Total Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan sebesar 21026,16 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 4.879,85 Kg/Hari.

Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Bahaya Cuaca Ekstrim

Di kota Balikpapan tingkat bahaya Karhutla dan Bahaya Cuaca Ekstrim berada pada tingkat sedang yang tersebar diseluruh kecamatan.

Bahaya Gempa Bumi

Tingkat bahaya gempa bumi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 50605,87 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan

Bahaya Tsunami

Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan

Bahaya Longsor

Tingkat bahaya longsor di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dan sedang, untuk bahaya rendah dengan luas 470,08 Ha yang tersebar di lima kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan luas 257,93 Ha yang tersebar di empat kecamatan.

Bahaya Banjir

Tingkat bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi, untuk bahaya banjir tinggi dengan total luas 5512,65 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan.

Bahaya Kekeringan

Tingkat bahaya kekeringan di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total 50.664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Efisiensi Pemanfaatan SDA :

EF Penyedia Pangan

Nilai Efisiensi Penyedia Pangan terbesar di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%

EF Penyedia Air

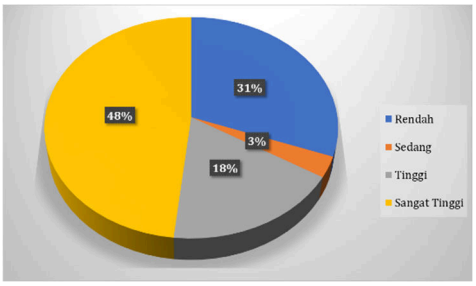
Luasan total EF Penyedia Air di Kota Balikpapan sebesar 71,26%, nilai ini merata diseluruh wilayah Kota Balikpapan

EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Luasan terbesar pada EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Timut dengan total 89,21%

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha.

Keanekaragaman hayati :



Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati terdapat beberapa biota laut yang dilindungi yaitu antara lain penyu lekang, kepiting tapal kuda, paus bungkuk, paus kepala melon, paus pembunuh palsu dan kepiting bakau bertelur.

Hewan Endemik seperti orangutan, Bekantan, dan Burung Kalimantan – sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara

Adapun Gap/masalah pada TPB 14 Ekosistem Laut dapat dilihat pada Tabel VI.23 berikut.

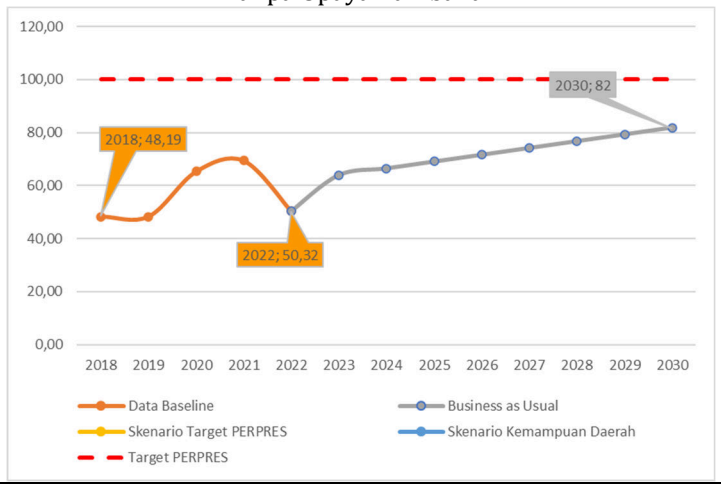
Tabel VI.23 Analisis Gap TPB 15 Ekosistem Darat di Kota Balikpapan

Target Yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
15.1 Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1. Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan 2. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

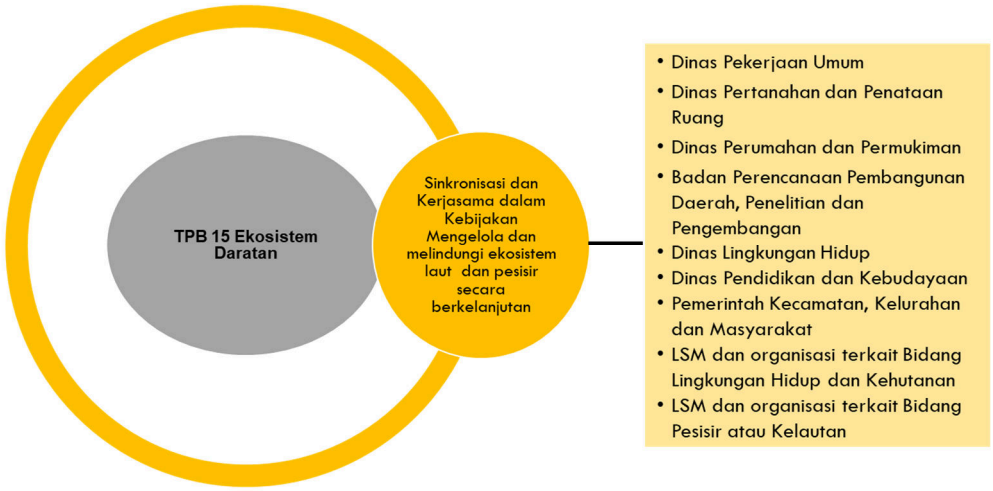
Untuk menjawab analisis gap diatas maka akan dijabarkan mengenai skenario pencapaian TPB baik melalui skenario tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan terhadap TPB 15 di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel VI.24 berikut.

Tabel VI.24 Proyeksi Skenario TPB 15 Ekosistem Darat di Kota Balikpapan

Indikator TPB	Proyeksi BAU	Keterangan
15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Tanpa Upaya Tambahan 	Capian Eksisting 50,32 % Target Perpres Meningkat Proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan karena pada Tahun 2030 sudah mencapai target yang ditetaplan perpres

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 15 di Kota Balikpapan terdapat 1 outcome yaitu Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Outcome ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6.9**. untuk mewujudkan Outcome TPB 15 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program dapat dilihat pada **Tabel VI.25** dibawah ini.



Gambar 6.9 Outcomes Para Pihak Yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 15 di Kota Balikpapan

Tabel VI.25 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 15 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Program
Degradasi kawasan pesisir dan laut	Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	• Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam • Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah • Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota/Kota
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Program
			Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk TPB 15 Ekosistem Darat di Kota Balikpapan sendiri memiliki keterkaitan dengan TPB 11, dan TPB 14. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.26** dibawah ini.

Tabel VI.26 Interaksi Keterkaitan TPB 15 dengan TPB 11 dan TPB 14 di Kota Balikpapan

Isu Strategis	TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
• Degradasi kawasan pesisir dan laut	TPB 15 Ekosistem Darat	TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	Perencanaan kota yang berkelanjutan dan perumahan yang layak dan terjangkau dapat meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap bencana sehingga secara signifikan dapat mengurangi jumlah kematian dan orang terdampak serta kerugian ekonomi.
		TPB 14 Ekosistem Laut	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

6.2 REKOMENDASI BERDASARKAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN

Subbab ini memuat rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap dan/atau kesenjangan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Balikpapan. Pemberian rumusan rekomendasi ditujukan pada pencapaian sasaran dan target TPB yang akan dicapai dan/atau diprioritaskan untuk dicapai; hal tersebut disajikan pada penjelasan dibawah ini.

6.2.1 Rekomendasi TPB Yang Berkaitan Dengan Isu Strategis

TPB di Kota Balikpapan yang berkaitan dengan Isu Strategis berjumlah 7 TPB yaitu :

1. TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
2. TPB 13 Penganan Perubahan Iklim
3. TPB 1 Tanpa Kemiskinan
4. TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan
5. TPB 2 Tanpa Kelaparan
6. TPB 14 Ekosistem Laut
7. TPB 15 Ekosistem Darat

Ketujuh TPB tersebut sangat berkaitan dengan isu strategis yang telah dikaji dan disepakati melalui FGD dan Konsultasi Publik 1 di Kota Balikpapan, adapun isu strategisnya adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Air Baku
2. Pengendalian Emisi GRK
3. Dampak Bangkitan Pembangunan IKN
4. Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah
5. Degradasi Kawasan Pesisir Dan Laut
6. Keterbatasan Dan Kerusakan Lahan
7. Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan

Dibawah ini merupakan Perumusan Rekomendasi TPB yang berkaitan dengan isu strategis yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel VI.27**, **Tabel VI.28** dan **Tabel VI.29** dibawah ini.

Tabel VI.27 Perumusan Rekomendasi TPB Yang Berkaitan Dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan

No	Isu Strategis	TPB Terkait	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Hasil Capaian Indikator TPB	
					Perlu Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
1	Ketersediaan Air Baku	TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak TPB 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan TPB 1 Tanpa Kemiskinan TPB 2 Tanpa Kelaparan	1) Sumber Air Baku di Kota Balikpapan • Sumber-sumber air permukaan potensial yang terdapat disekitar Kota Balikpapan adalah Sungai Wain Bugis dan Sungai Teritip dan telah ada rencana pembuatan Waduk Teritip dengan kapasitas 75 l/detik dan Waduk Wain Bugis dengan kapasitas 1.65l/detik • Sungai-sungai lain seperti Sungai Somber; Sungai Klandasan Besar dan Kecil; Sungai Sepinggan; Sungai Batakan dan Sungai Manggar Kecil tidak dimanfaatkan karena selain alirannya tidak terus menerus sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. • Sungai Manggar Bagian Hulu Bagian hulu Sungai Manggar merupakan sumber air baku warga Kota Balikpapan yang dikelola PDAM Kota Balikpapan. Oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bagian hulu ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk melindungi sumber air dari pencemaran. • Waduk Manggar Waduk manggar bersumber dari Sungai Manggar. Sungai Manggar merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di kota Balikpapan yang melintas dari Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara menuju Kel. Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. Sungai Manggar yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Balikpapan sebagai sumber air baku adalah Sungai Manggar bagian hulu. Pada bagian hulu, kualitas air lebih bak dari pada bagian tengah dan bagian hilir. • Waduk Wain Bugis Waduk ini merupakan pertemuan antara S. Wain dan S. Bugis, Sungai Bugis mengalir ke arah S. Wain Besar hingga ke muara Teluk Balikpapan, merupakan sungai permanen berair mengalir sepanjang tahun dengan lebar sungai berkisar antara 30-40 m. 2) Hasil 6 Kajian Muatan • Daya Dukung Air Daya dukung Air di Kota Balikpapan dengan status 37% sudah melampaui dan 63% belum melampaui dengan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha. Ketersediaan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 524.147.443,99 M3/Tahun dan untuk kebutuhan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 525.625.678,16 M3/Tahun • JE Penyedia Air JE penyedia air di Kota Balikpapan terbagi kedalam 5 kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dan yang mendominasi atau terbesar berada pada kelas jasa sedang.	• Meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, dan pengendalian pencemaran air • Pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk penyediaan air baku bagi rumah tangga, perdagangan dan jasa, industri serta pengendali banjir • Pemanfaatan air waduk/bendungan untuk air baku air minum; • Penggunaan Teknologi Desalinasi sebagai alternatif sumber air baku di Kota Balikpapan • Pengembangan SPAM untuk daerah rawan kekeringan dan pengembangan system tabungan air melalui sumur resapan, biopori, dan embung • Pemantauan kualitas air pada air sungai, waduk, dan sumur pada kawasan – kawasan padat penduduk	TPB 6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak capaian eksisting saat ini 96,95% target perpres 100% (Perlu Upaya Tambahan)	TPB 6 • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layananan sumber air minum layak capaian eksisting 98,49% target perpres 100%. (Tanpa Upaya Tambahan) • Proporsi Populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan capaian eksisting 98,99% target Perpres 100% (Tanpa Upaya Tambahan) • Jumlah Desa / kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) berjumlah 34 kelurahan target perpres meningkat. (Tanpa Upaya Tambahan)

No	Isu Strategis	TPB Terkait	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Hasil Capaian Indikator TPB	
					Perlu Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
2	Pengendalian Emisi GRK	TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim TPB 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	• Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha. • Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah. • Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Bahaya Cuaca Ekstrim Di kota Balikpapan tingkat bahaya Karhutla dan Bahaya Cuaca Ekstrim berada pada tingkat sedang yang tersebar diseluruh kecamatan. • Bahaya Gempa Bumi Tingkat bahaya gempa bumi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 50605,87 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan • Bahaya Tsunami Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan • Bahaya Longsor Tingkat bahaya longsor di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dan sedang, untuk bahaya rendah dengan luas 470,08 Ha yang tersebar di lima kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan luas 257,93 Ha yang tersebar di empat kecamatan. • Bahaya Banjir Tingkat bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi, untuk bahaya banjir tinggi dengan total luas 5512,65 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. • Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan. • Bahaya Kekeringan Tingkat bahaya kekeringan di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total 50.664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.	• Mengembangkan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi terkait perubahan iklim dan Peningkatan Lahan RTH • Optimalisasi regulasi RTH private dan publik • Penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana • Rekayasa Vegetasi dan pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalan sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim		
3	Dampak bangkitan pembangunan IKN	TPB 1 Tanpa Kemiskinan TPB 4 Pendidikan Berkualitas	• Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2022 yaitu 2,45% • Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	Peningkatan kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat, perempuan,	TPB 1 • Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN	TPB 1 • Jumlah lokasi penguatan

No	Isu Strategis	TPB Terkait	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Hasil Capaian Indikator TPB	
					Perlu Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
		TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak TPB 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim	Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha. • Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah. • Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Bahaya Cuaca Ekstrim Di kota Balikpapan tingkat bahaya Karhutla dan Bahaya Cuaca Ekstrim berada pada tingkat sedang yang tersebar diseluruh kecamatan. • Bahaya Gempa Bumi Tingkat bahaya gempa bumi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 50605,87 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan • Bahaya Tsunami Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan • Bahaya Longsor Tingkat bahaya longsor di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dan sedang, untuk bahaya rendah dengan luas 470,08 Ha yang tersebar di lima kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan luas 257,93 Ha yang tersebar di empat kecamatan. • Bahaya Banjir Tingkat bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi, untuk bahaya banjir tinggi dengan total luas 5512,65 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. • Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan. • Bahaya Kekeringan Tingkat bahaya kekeringan di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total 50.664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.	dan pembinaan kualitas hidup keluarga terutama masyarakat miskin dan rentan.	Bidang Kesehatan Capaian Eksisting Tahun 2019 89% sedangkan Target Perpres meningkat menjadi 95% • Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan Capaian Eksisting Tahun 2022 sebesar 4.857 Jt sedangkan Target perpres Menurun menjadi 2,8 juta • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Capaian Eksisting Tahun 2022 81,83% sedangkan Target Perpres meningkat 100% • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Capaian eksisting Tahun 2022 89,67% sedangkan Target Perpres meningkat menjadi 100%	pengurangan risiko bencana daerah Capaian eksisting tahun 2022 yaitu 9 sedangkan Target Perpres meningkat menjadi 39 daerah (secara nasional) • Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Capaian Eksisting Rp. 2.773.383.000 sedangkan Target Perpres menurun
4	Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah	TPB 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan TPB 1 Tanpa Kemiskinan	Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan Hidup • Timbulan Sampah Rentang terbesar timbulan sampah paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 502.607,74 M3/Tahun.	• Pengembangan TPA Manggar • Pembangunan dan Pengembangan TPS 3R yang terintegrasi • Optimalisasi bank sampah		TPB 11 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Capaian eksisting tahun 2022 sebesar Rp.

No	Isu Strategis	TPB Terkait	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Hasil Capaian Indikator TPB	
					Perlu Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
		TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	• Timbulan Tinja Rentang terbesar timbulan Tinja paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 23.257,98 M3/Tahun • Beban Pencemar Total Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan sebesar 26758,59 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 6.851,64 Kg/Hari Total Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan sebesar 30364,12 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 7.042,12 Kg/Hari Total Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan sebesar 21026,16 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 4.879,85 Kg/Hari.	• Pengembangan IPAL Komunal untuk permukiman sepanjang bantaran sungai		2.773.383.000 sedangkan Target Perpres menurun
5	Keterbatasan dan kerusakan lahan	TPB 2 Tanpa Kelaparan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	• Luas tutupan lahan terbangun didominasi oleh kawasan permukiman/ perumahan ± 6.814,76 Ha atau 13,33%. Luas tutupan lahan tidak terbangun didominasi oleh penggunaan lahan hutan ± 22.767,12 ha atau 44,55% kemudian perkebunan sekitar 8.025,28 Ha atau 15,70% • Masih adanya lahan kritis yang berada diluar kawasan hutan		TPB 2 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan Capaian eksisting Tahun 2022 86,10% sedangkan Target Perpres 92,5%	TPB 2 • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Capaia Eksisting Tahun 2022 6,93 % sedangkan Target Perpres menurun
6	Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan	TPB 2 Tanpa Kelaparan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	• Daya Dukung Pangan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha. Ketersediaan Pangan = 916.178.290.606,89 Kkal/thn; Kebutuhan pangan = 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun • Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha. • EF Penyedia Pangan Nilai Efisiensi Penyedia Pangan terbesar di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%			
7	Degradasi kawasan pesisir dan laut	TPB 14 Ekosistem Laut TPB 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan TPB 15 Ekosistem Darat	• Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha. • Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah. • Perkiraan Mengenai Dampak • Bahaya Tsunami	• Mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan memalui penanaman mangrove • Penanganan masalah pencemaran perairan melalui pembersihan pantai secara berkala, penyediaan sarana persampahan, penertiban saluran buangan limbah dan mengontrol pembuangan limbah • Pemantauan kualitas air laut		

No	Isu Strategis	TPB Terkait	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Hasil Capaian Indikator TPB	
					Perlu Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
			Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan • Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha. • Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati terdapat beberapa biota laut yang dilindungi yaitu antara lain penyu lekang, kepiting tapal kuda, paus bungkuk, paus kepala melon, paus pembunuh palsu dan kepiting bakau bertelur. • Hewan Endemik seperti orangutan, Bekantan, dan Burung Kalimantan – sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara	• Mengelola perubahan fishing ground nelayan tradisional yang terkena dampak dari kegiatan Pelabuhan • Penyusunan aturan dan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan • Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal • Penyusunan Studi model penyebaran sedimen sehingga dapat memprediksi arah sedimentasi • Meningkatkan perlindungan lingkungan dengan cara menurunkan pencemaran yang masuk ke pelabuhan, terutama limbah cair, sampah, sedimen, sanitary, dan limbah B3 (termasuk minyak); • Pembatasan lokasi dan aktifitas pelabuhan yang berdekatan dengan ekosistem pesisir • Memberlakukan zonasi perikanan tangkap berkelanjutan • Menjaga ekosistem dan habitat sumber daya ikan • Melakukan penataan Fasilitas pendukung pelabuhan yang dilakukan melalui perencanaan secara terpadu melalui pembatasan jumlah, klasifikasi dan pola sebarannya yang disesuaikan dengan ketersediaan potensi komoditas, jarak antar lokasi yang optimal, frekuensi dan besaran, sarana dan prasarana angkutan yang dipergunakan, kepadatan arus lalu lintas, kampung nelayan, fishing ground dan kawasan konservasi.		

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel VI.28 Perumusan Arahan Kebijakan dan Program TPB Yang Berkaitan Dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak					
Ketersediaan Air Baku Dan Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah	1. Mencapai akses air minum yang aman dan terjangkau secara universal dan merata	a. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur penyediaan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	• Peningkatan infrastruktur pendukung kualitas dan cakupan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat melalui pengeloaan dan pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pengembangan SPAM untuk daerah rawan kekeringan dan pengembangan system tabungan air melalui sumur resapan, biopori, dan waduk • Penggunaan Teknologi Desalinasi sebagai alternatif sumber air baku di Kota Balikpapan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	
		b. Peningkatan koordinasi kerjasama pengelolaan sumber air antar wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Lintas Kota / Kabupaten	• Peningkatan koordinasi dengan Kota Balikpapan dalam hal kerja sama pengelolaan sumber air baku utama dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan. • Pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk penyediaan air baku bagi rumah tangga, perdagangan dan jasa, industri serta pengendali banjir
		c. Pengendalian beban pencemar di sumber air baku kota	Program pemantauan, pengawasan dan penindakan terkait pencemaran air di sumber air baku Kota Balikpapan	Waduk Manggar, Waduk Teritip, Rencana Embung Haji Raden, Dll	• Pencegahan masuknya bahan pencemar dari aktivitas pertanian khususnya Peternakan di sekitar Waduk Manggar, Waduk Teritip, Rencana Embung Haji Raden, Dll • Aksi Perubahan Waduk Manggar Segar • Pemantauan kualitas air pada air sungai, waduk, dan sumur pada kawasan – kawasan padat penduduk
		d. Peningkatan tutupan vegetasi untuk pemulihan ekosistem pengaturan tata air dan banjir	Program Peningkatan atau Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	• Perubahan Koefisien Daerah Hijau : 48 % terbangun 52 % daerah hijau • Optimalisasi regulasi RTH private dan publik • Rekayasa Vegetasi dan pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalan sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim
	2. Meningkatkan akses sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	a. Peningkatan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	• Peningkatan penyediaan dan pengelolaan sanitasi yang berwawasan lingkungan melalui pengelolaan air limbah domestik (melaui optimalisasi IPAL terpusat) dan pengelolaan limbah industri, pengelolaan persampahan, dan pengembangan pengelolaan eco-drainase. Selain itu juga diperlukan koordinasi dengan pemerintahan provinsi dalam peningkatan penyediaan septic tank melalui program kawasan permukiman karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini • Pengembangan TPA Manggar • Pembangunan dan Pengembangan TPS 3R yang terintegrasi • Optimalisasi bank sampah • Pengembangan IPAL Komunal untuk permukiman sepanjang bantaran sungai
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	
			Program Pengelolaan Persampahan	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	
			Program Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	
		b. Peningkatan penyuluhan terkait sanitasi	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	Peningkatan penyuluhan atau sosialisasi untuk menanamkan menjaga kebersihan lingkungan dan pelaksaanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
		c. Peningkatan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	
TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim					
Pengendalian Emisi GRK	Memperkuat kapasitas ketahanan danadaptasi terhadap bencana alam	Menekan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pendidikan dan pelatihan Program Desa Tanggap Bencana	Seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan	• Penurunan jumlah warga terdampak bencana diupayakan melalui program pencegahan, penanggulangan dan penangaan bencana diantaranya dengan program SKPD, alokasi anggaran, pendidikan dan pelatihan, pembentukan Desa Tangguh Bencana dan membentuk kemitraan. • Kota Balikpapan telah menyusun peta KRB untuk RDTR dengan melakukan penetapan zonasi disertai dengan arahan pemanfaatan lahan. • Pada zona merah, pemanfaatan lahan diarahkan pada kawasan lindung yang tidak boleh ada kegiatan di kawasan tersebut untuk meminimalisir risiko bencana • Dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan
TPB 1 Tanpa Kemiskinan					
Dampak bangkitan pembangunan IKN	1. Menurunnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan	a. Peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan serta masyarakat miskin dan rentan	Program Pemberdayaan Sosial Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	Peningkatan kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan pembinaan kualitas hidup keluarga terutama masyarakat miskin dan rentan.
		b. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha mikro	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	Penyelenggaraan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk usia produktif yang belum mendapat pekerjaan melaluI pengembangan SDM berupa pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan, serta mendukung terciptanya wirausaha atau UKM dan penyejahteraan tenaga sektor informal.
		c. Peningkatan kemudahan akses modal usaha melalui koperasi	Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	Mempermudah akses modal bagi wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan memaksimalkan potensi koperasi.
	2. Peningkatan upaya perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan rentan	a. Perlindungan dan jaminan sosial	Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	Meningkatan upaya perlindungan sosial masyarakat, perempuan, dan anak melalui pemenuhan hak-hak dan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
		b. Perlindungan anak dan perempuan	Program Perlindungan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program Perlindungan Khusus Anak		
		c. Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Pendidikan	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	Meningkatkan upaya pelayanan dasar berupa sandang, pangan, papan yang layak bagi masyarakat miskin dan rentan serta memudahkan
	3. Peningkatan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terutama terhadap bencana	Peningkatan upaya penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Program Desa Tangguh Bencana	Seluruh Kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan	• Perlu aktualisasi dokumen kajian pengurangan risiko bencana. • Mengoptimalkan pelaksanaan RAD Perubahan Iklim. • Pembangunan Kolam retensi untuk penanggulangan bencana kekeringan di wilayah yang rentan mengalami kekeringan. • Memastikan pemanfaatan lahan zona merah risiko bencana pada RDTR sebagai kawasan lindung • Peningkatan frekuensi pelaksanaan pelatihan mitigasi berupa simulasi, dll. • Pemberdayaan Desa Tangguh Bencana
TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan					
Dampak bangkitan pembangunan IKN dan Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah	1. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	a. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Kawasan Permukiman Program Pengembangan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	• Perbaikan rumah yang tidak layak huni untuk pencegahan agak tidak berkembang menjadi kawasan kumuh. • Perlu penyediaan lahan milik Pemerintah Daerah atau pihak swasata (CSR) dalam menyediakan hunian vertikal guna mengatasi kawasan kumuh dan mewujudkan permukiman yang layak huni. • Pembangunan hunian vertical dapat dilakukan di daerah pantai, sehingga kawasan di tata menjadi kawasan sehat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan terhadap bencana, terutama bencana pesisir. • Hunian vertikal dapat menjadi salah satu solusi dari keterbatasan lahan di Kota Balikpapan, tentunya dengan melalui kajian terkait dampak dari hunian vertikal terlebih dahulu. ***Dapat dilihat dari Perda No 5 Tahun 2013 Tentang Penyediaan PSU pada Kawasan Perumahan***
		b. Peningkatan keamanan, dan ketertiban kawasan perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	Pengadaan posko keamanan atau poskampling di setiap kawasan permukiman/perumahan dengan pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
		c. Perencanaan dan koordinasi perencanaan penataan ruang untuk optimalisasi lahan hunian	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	Dengan terbatasnya lahan hunian, maka diperlukan inovasi dan tekonologi yang dapat diterapkan sebagai bentuk optimalisasi dari lahan yang ada. Hunian vertikal dapat menjadi salah satu solusi

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program Penataan Bangunan Gedung		dari keterbatasan lahan di Kota Balikpapan, tentunya dengan melalui kajian terkait dampak dari hunian vertikal terlebih dahulu.
		d. Pengembangan kawasan hunian dengan memperhatikan lingkungan hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	• Pengadaan RTH di setiap blok kawasan permukiman atau perumahan dengan memanfaatkan lahan kosong, walaupun dengan luasan yang kecil. • Pengalokasian RTH agar dapat bersifat multifungsi, selain sebagai persyaratan tata ruang, juga digunakan untuk menjaga fungsi ekologis. • Pengembangan RTH privat melalui penyediaan rooftop garden pada bangunan gedung.
		e. Pengembangan, pengendalian, serta pengawasan akses lalu lintas di sekitar kawasan hunian	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Seluruh ruas jalan yang menjadi kewengan kota di Kota Balikpapan	• Pengawasan dan perbaikan kondisi jalan dan trotoar, termasuk saluran drainase, salah satunya gorong-gorong di bawah trotoar yang sebagian besar sudah dangkal. Hal ini menyebabkan adanya luapan dan genangan air di badan jalan, sehingga akan mempengaruhi keselamatan akibat banjir dari luapan dan rusaknya aspal karena adanya genangan air. • Penataan dan pengendalian kondisi lalu lintas serta pinggiran jalan untuk mengurangi kemacetan, termasuk dengan mewadahi pedagang kali lima yang bebas berjualan di pinggir jalan ke suatu lokasi yang khusus disediakan. Pemeliharaan anak terlantar dan gelandangan pengemis juga perlu dilakukan
	2. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	a. Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Penyediaan lembaga pembiayaan infrastruktur dapat dibentuk oleh pemerintah daerah atau dengan bekerjasama dengan pihak swasta (CSR) atau BUMN untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memperhatikan kondisi lingkungan hidup. • Dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan
		b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	
	3. Sampah perkotaan yang tertangani secara optimal.	a. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Pengembangan TPA Manggar • Pembangunan dan Pengembangan TPS 3R yang terintegrasi • Optimalisasi bank sampah • Pengembangan IPAL Komunal untuk permukiman sepanjang bantaran sungai • penyuluhan dan sosialisasi terkait pemilahan sampah; • penyediaan jasa layanan pengelolaan sampah;
			Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan	
		b. Pengelolaan dan pengawasan sistem drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Seluruh Jaringan Jalan di Kota Balikpapan	• Pengembangan eko-drainase. • Peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan sistem drainase dan saluran air yang telah ada sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengalirkan genangan air, terutama akibat perkembangan kota, seperti untuk mencegah banjir, salah satunya melalui koordinasi, baik dalam Kota Balikpapan dan/atau koordinasi lintas sektor/kewenangan.

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
		c. Peningkatan perlindungan kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Seluruh Kecamatan Kota Balikpapan	• Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut, termasuk juga pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. • Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat • Pengadaan taman atau RTH di setiap blok kawasan untuk menjaga kelestarian lingkungan, Kota Balikpapan telah memiliki Taman Keanekaragaman Hayati. • Pengadaan anggaran untuk pemulihan dan rehabilitasi fungsi kawasan akibat pencemaran lingkungan,
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
		d. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	Penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah melalui budaya buang sampah pada tempatnya. Hal ini dapat dilakukan bersama, melalui persuasi dari pemerintah daerah, pemerintah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, hingga warga setempat
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	
		e. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah dan limbah	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan	• Pemberdayaan masyarakat setempat dan kerjasama antar wilayah dalam upaya pengurangan timbulan sampah atau pengelolaan sampah. Seperti dengan melakukan 3R (reduce reuse recycle), melalui pembekalan keterampilan dalam pendaurulangan sampah. Dilakukan pengembangan 3R (reduce, reuse, recycle) di Dukuh Semar yang mulai dilaksanakan tahun ini • Dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan	
	4. Tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	a. Perencanaan penyusunan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Program Penanggulangan Bencana	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Penyusunan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) disusun dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas dan pihak terkait dan diintegrasikan terhadap dokumen perencanaan yang telah ada atau sedang dibuat; serta perencanaan penganggaran dalam pelaksanaan penyusunan dokumen PRB. • Kota Balikpapan telah menyusun peta KRB untuk RDTR dengan melakukan penetapan zonasi disertai dengan arahan pemanfaatan lahan. Pada zona merah, pemanfaatan lahan diarahkan pada kawasan lindung yang tidak boleh ada kegiatan di kawasan tersebut untuk meminimalisir risiko bencana • Terkait dengan isu perubahan iklim, Kota Balikpapan perlu penyusunan RAD Adaptasi Peruabahan Iklim untuk kemudian dapat diintegrasikan dengan dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan analisis yang lebih tajam pada penanganan perubahan iklim. • Dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan
			Program Penanganan Bencana	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
TPB 2 Tanpa Kelaparan					
Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan	1. Menurunkan potensi kerawanan pangan di Kota Balikpapan.	a. Peningkatan ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan	Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Hubungan Industri Program Peningkatan Kerjasama Desa	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Perlu dilakukan penyusunan peta kerawanan pangan untuk membantu dalam pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada wilayah kerawanan rangan. • Kerjasama antar lembaga untuk mempertahankan pangan, misalnya dengan bulog dan lembaga terkait lainnya. Kerjasama antar desa/kelurahan juga perlu dilakukan dengan dibantu fasilitasi oleh pemerintah kota, salah satunya dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan distribusi pangan.
		b. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung ketersediaan pangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	Pengelolalaan kawasan sekitar LP2B dan memberikan batasan kawasan yang tegas untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan.
			Program Pengelolaan Tanah Kosong		Optimalisasi pemanfaatan dan penataan lahan yang ada sebagai pendukung pemenuhan pangan, bukan produksi pangan.
			Program Penatagunaan Tanah		Saat ini sedang dikembangkan pertanian dengan pemanfaatan lahan sempit, seperti urban farming, pertanian Verticulture, dan Kegiatan Kampung Pangan Lestari dan Hijau (KPLH) dengan memanfaatkan pinggir jalan dan halaman rumah dibudidayakan tanaman2 penghasil pangan dalam polybag. KPLH juga memanfaatkan gang dan pekarangan warga agar terbentuk suatu kawasan yang hijau dan kaya sumber pangan yang diproduksi sendiri
		c. Optimalisasi pertanian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Pengelolaan dan pengawasan LP2B dan kawasan sekitar LP2B, serta penggunaan sarana dan infrastruktur pendukung pertanian agar dapat memberikan hasil yang optimal. Peningkatan mutu dari benih, bibit ternak, hingga pakan ternak juga penting untuk dilakukan. • Pemberdayaan masyarakat dan para pemuda dalam optimalisasi pertanian melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas Saat ini,
		d. Optimalisasi perikanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Fasilitasi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, seperti dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan infrastuktur sarana prasarana dan kelembagaan. • Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar (termasuk mutu dan kualitas) pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
		e. Peningkatan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	Peningkatan kerjasama antar dinas terkait untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan sehingga mampu meningkatkan daya beli pangan, serta meminimalkan konflik yang dapat menghambat supply pangan ke Kota alikpapan.

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
			Program Pengembangan UMKM		
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
		f. Peningkatan perlindungan pangan bagi masyarakat rentan dan korban bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	Warga dan pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan setempat dapat turut serta dalam mengevaluasi kerawanan pangan, sehingga diperoleh informasi lokasi yang memerlukan bantuan dan dapat dilakukan distribusi cadangan pangan dari pemerintah.
			Program Pemberdayaan Sosial		
			Program Penanganan Bencana		
	2. Pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat, terutama balita, di Kota Balikpapan.	a. Menjamin terpenuhinya nutrisi, khususnya anak pada usia balita	Program Peningkatan Kualitas eluarga	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	Perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan, khusunya untuk para Ibu, sebagai pemahaman terkait nutrisi untuk keluarga. Perlu adanya penanganan terkait penyakit-penyakit yang bersumber dari kekurangan gizi atau pangan. Pembentukan dan fasilitasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
		b. Peningkatan nutrisi dan kualitas bahan pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Seluruh Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan	• Pengawasan dan perketat perizinan dan peredaran bahan pangan untuk menghindari pangan dengan kualitas tidak baik beredar di masyarakat. • Kota Balikpapan juga melakukan kampanye tentang gemar makan sayur dan buah, serta gemar makan ikan. Perlu adanya koordinasi dengan pihak yang bekerja di bidang kesehatan dalam upaya peningkatan nutrisi dan kualitas bahan pangan.
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.		
	2. Pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat, terutama balita, di Kota Balikpapan.	c. Optimalisasi penggunaan lahan dan diversifikasi tanaman pangan.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Optimalisasi pemanfaatan dan penataan lahan yang ada sebagai pendukung pemenuhan pangan dan produksi pangan. • pengembangan dengan pemanfaatan lahan sempit, seperti urban farming, pertanian Verticulture, dengan memanfaatkan pinggir jalan dan halaman rumah dibudidayakan tanaman-tanama penghasil pangan dalam polybag
			Program Pengelolaan Tanah Kosong		
			Program Penatagunaan Tanah		
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
		d. Peningkatan kerjasama dan hubungan industri untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas konsumsi pangan	Program Hubungan Industri	Seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan	Kerjasama baik antar desa/kelurahan, LSM, hingga lembaga swasta sebagai upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan diversifikasi jenis bahan pangan yang dapat dikonsumsi.
			Program Peningkatan Kerjasama Desa		
		e. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas konsumsi pangan.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	Perencanaan kegiatan dan penganggaran pendanaan untuk kegiatan terkait kualitas konsumsi pangan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan perencanaan lain terkait, serta dalam keberjalannya melibatkan LSM atau organisasi yang bergerak pada bidang kualitas konsumsi pangan.
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program Perekonomian dan Pembangunan		
		f. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM terkait kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan	• Pengembangan kapasitas masyarakat terkait kualitas konsumsi pangan melalui penyuluhan, dapat dilakukan melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada tingkat kecamatan atau desa/kelurahan. • Membuka peluang pengembangan pengetahuan dan penelitian terkait kualitas konsumsi pangan melalui pembedayaan masyarakat dan/atau akademisi untuk menciptakan kualitas konsumsi pangan yang baik.
TPB 14 Ekosistem Laut					
Degradasi kawasan pesisir dan laut	Sinkronisasi dan Kerjasama dalam Kebijakan Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	Sinkronisasi dan Kerjasama dalam Kebijakan Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan	Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kota/Kota Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota/Kota Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kota/Kota • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
TPB 15 Ekosistem Darat					
Keterbatasan dan kerusakan lahan	Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan	Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan	• Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kota • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan • Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya

Isu Strategis	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
	kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.		Program Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah		
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
			Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat		
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
			Program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota/Kota		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dari Alternatif skenario dengan atau tanpa upaya tambahan yang telah dijabarkan pada masing-masing TPB Strategis serta dengan mempertimbangkan kondisi 6 muatan KLHS serta arahan program yang berdasarkan dengan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024., dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator pada TPB strategis yang direkomendasikan untuk skenario alternatif yaitu akselarasi yang didasarkan pada capaian serta target perpres serta melihat target proyeksi pada masing-masing indikator serta melihat outcomes yang dirumuskan berdasarkan gap permasalahan pada masing-masing indikator pada setiap TPB strategis yang ada di Kota Balikpapan. Jelasnya mengenai perumusan rekomendasi dengan atau tanpa upaya tambahan kategori SB, NA dan BB pada TPB Strategis Terpilih di Kota Balikpapan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel VI.29 Perumusan Rekomendasi Dengan atau Tanpa Upaya Tambahan Kategori SB, NA dan BB pada TPB Strategis Terpilih di Kota Balikpapan

Isu Strategis PB	TPB	Kondisi 6 Muatan KLHS	No Indikator	Indikator TPB	Baseline	Capaian	Permasalahan dalam Pencapaian TPB	Target Proyeksi		Proeyksi Status Capaian	Alternatif Skenario	Rekomendasi			
								2025	2029			Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Ketersediaan Air Baku	6	• Luas tutupan lahan terbangun didominasi oleh kawasan permukiman/ perumahan ± 6.814,76 Ha atau 13,33%. Luas tutupan lahan tidak terbangun didominasi oleh penggunaan lahan hutan ± 22.767,12 ha atau 44,55% kemudian perkebunan sekitar 8.025,28 Ha atau 15,70% • Masih adanya lahan kritis yang berada diluar kawasan hutan • Daya Dukung Pangan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	98,54	SB	1. Belum Tercapainya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. dan perlu ditingkatkan 2. Belum Tercapainya Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan dan perlu ditingkatkan 3. Penyediaan Data Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 4. Belum Tercapainya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan perlu ditingkatkan 5. Belum Tercapainya Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total	100	100	Tanpa Upaya Tambahan	BAU	1. Mencapai akses air minum yang aman dan terjangkau secara universal dan merata	▪ Dinas Pekerjaan Umum ▪ Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ▪ Dinas Perumahan dan Permukiman ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Dinas Kesehatan ▪ Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat ▪ Perusahaan Daerah Air Minum ▪ LSM dan organisasi terkait Bidang Sosial, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur penyediaan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	99,1	SB		100	100	Tanpa Upaya Tambahan	BAU				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		NA				Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi			b. Peningkatan koordinasi kerjasama pengelolaan sumber air antar wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	97,1	SB		97,44	98,09	Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi			c. Pengendalian beban pencemar di sumber air baku kota	Program pemantauan, pengawasan dan penindakan terkait pencemaran air di sumber air baku Kota Balikpapan
			6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan	34	SB		34	34	Tanpa Upaya Tambahan	BAU			d. Peningkatan tutupan vegetasi untuk pemulihan ekosistem pengaturan tata air dan banjir	Program Peningkatan atau Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Isu Strategis PB	TPB	Kondisi 6 Muatan KLHS	No Indikator	Indikator TPB	Baseline	Capaian	Permasalahan dalam Pencapaian TPB	Target Proyeksi 2025	Target Proyeksi 2029	Proeyksi Status Capaian	Alternatif Skenario	Rekomendasi: Outcomes	Rekomendasi: Para Pihak	Rekomendasi: Arahan Kebijakan	Rekomendasi: Arahan Program
		dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha. Ketersediaan Pangan = 916.178.290.606,89 Kkal/thn; Kebutuhan pangan = 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun • Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha. • EF Penyedia Pangan Nilai Efisiensi Penyedia Pangan terbesar di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).			Berbasis Masyarakat (STBM) dan perlu ditingkatkan								
			6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	NA	NA	6. Penyediaan Data Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi	2. Meningkatkan akses sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan		a. Peningkatan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	NA	NA	7. Penyediaan Data Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	NA	NA	8. Penyediaan Data Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
			6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	NA	NA	9. Penyediaan Data Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pengelolaan Persampahan
															Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
															Program Kawasan Permukiman
														b. Peningkatan penyuluhan terkait sanitasi	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
														c. Peningkatan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dampak bangkitan pembangunan IKN	1	• Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2022 yaitu 2,45% • Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha. • Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah. • Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Bahaya Cuaca Ekstrim Di kota Balikpapan tingkat bahaya Karhutla dan Bahaya Cuaca Ekstrim berada pada tingkat sedang yang tersebar diseluruh kecamatan. • Bahaya Gempa Bumi Tingkat bahaya gempa bumi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 50605,87 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan • Bahaya Tsunami Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	89%	SB	1. Belum tercapainya Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan dan perlu ditingkatkan	4,97	11,60	Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi	1. Menurunnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan	▪ Dinas sosial ▪ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ▪ Dinas Ketenagakerjaan ▪ Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ▪ Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ▪ Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat ▪ Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ▪ LSM dan organisasi terkait bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, UMKM, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	a. Peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan serta masyarakat miskin dan rentan	Program Pemberdayaan Sosial
			1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	NA	NA	2. Penyediaan data Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	NA	NA	3. Penyediaan data Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	6150	SB	4. Belum tercapainya Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan dan perlu ditingkatkan	4206,55	3339,28	Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	82,05	SB	5. Belum tercapainya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan perlu ditingkatkan	84,74	88,62	Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pengendalian Penduduk
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	89.67%	SB	6. Belum tercapainya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan perlu ditingkatkan	91,69	93,71	Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	NA	NA	7. Penyediaan data terkait Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi			b. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha mikro	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	NA	NA	8. Penyediaan Data Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 9. Masih tingginya Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana dan perlu diturunkan			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Isu Strategis PB	TPB	Kondisi 6 Muatan KLHS	No Indikator	Indikator TPB	Baseline	Capaian	Permasalahan dalam Pencapaian TPB	Target Proyeksi 2025	Target Proyeksi 2029	Proeyksi Status Capaian	Alternatif Skenario	Rekomendasi: Outcomes	Rekomendasi: Para Pihak	Rekomendasi: Arahan Kebijakan	Rekomendasi: Arahan Program
		tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan • Bahaya Longsor Tingkat bahaya longsor di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dan sedang, untuk bahaya rendah dengan luas 470,08 Ha yang tersebar di lima kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan luas 257,93 Ha yang tersebar di empat kecamatan. • Bahaya Banjir Tingkat bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi, untuk bahaya banjir tinggi dengan total luas 5512,65 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. • Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan. • Bahaya Kekeringan Tingkat bahaya kekeringan di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total 50.664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2.773.383.000,00	SB	10. Penyediaan Data Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 11. Penyediaan Data Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	2.398.088.812,44	1.897.696.562,36	Tanpa Upaya Tambahan	BAU				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	NA	NA				Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pengembangan UMKM
			1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	NA	NA				Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi	2. Peningkatan upaya perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan rentan	▪ Dinas sosial ▪ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ▪ Dinas Ketenagakerjaan ▪ Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ▪ Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ▪ Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat ▪ Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ▪ LSM dan organisasi terkait bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, UMKM, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	c. Peningkatan kemudahan akses modal usaha melalui koperasi	Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
															Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
															Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
															Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
															Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
														a. Perlindungan dan jaminan sosial	Program Rehabilitasi Sosial
															Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
														b. Perlindungan anak dan perempuan	Program Perlindungan Perempuan
															Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
															Program Perlindungan Khusus Anak
														c. Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
															Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
															Program Pengelolaan Pendidikan
												3. Peningkatan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terutama terhadap bencana		Peningkatan upaya penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana
															Program Desa Tangguh Bencana
Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah	11	Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan Hidup • Timbulan Sampah Rentang terbesar timbulan sampah paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 502.607,74 M3/Tahun.	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	NA	NA	1. Penyediaan Data Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. 2. Penyediaan Data Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. 3. Penyediaan Data Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi	1. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	1. Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Pekerjaan Umum;	a. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	NA	NA				Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Kawasan Permukiman

Isu Strategis PB	TPB	Kondisi 6 Muatan KLHS	No Indikator	Indikator TPB	Baseline	Capaian	Permasalahan dalam Pencapaian TPB	Target Proyeksi		Proeyksi Status Capaian	Alternatif Skenario	Rekomendasi			
								2025	2029			Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		• Timbulan Tinja Rentang terbesar timbulan Tinja paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 23.257,98 M3/Tahun • Beban Pencemar Total Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan sebesar 26758,59 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 6.851,64 Kg/Hari Total Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan sebesar 30364,12 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 7.042,12 Kg/Hari Total Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan sebesar 21026,16 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 4.879,85 Kg/Hari. • Luas tutupan lahan terbangun didominasi oleh kawasan permukiman/ perumahan ± 6.814,76 Ha atau 13,33%. Luas tutupan lahan tidak terbangun didominasi oleh penggunaan lahan hutan ± 22.767,12 ha atau 44,55% kemudian perkebunan sekitar 8.025,28 Ha atau 15,70% • Masih adanya lahan kritis yang berada diluar kawasan hutan • Daya Dukung Pangan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha. Ketersediaan Pangan = 916.178.290.606,89 Kkal/thn; Kebutuhan pangan = 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun • Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha. • EF Penyedia Pangan Nilai Efisiensi Penyedia Pangan terbesar di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	NA	NA	4. Penyediaan Data Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. 5. 5. Masih tingginya Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana dan perlu diturunnkan			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi		4. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. 5. Dinas Lingkungan Hidup; 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Pemadam Kebakaran 9. Dinas Perhubungan; 10. Perusahaan Daerah Air Minum 11. Satuan Pamong Praja; 12. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat 13. LSM dan organisasi terkait bidang lingkungan hidup; 14. LSM dan organisasi terkait bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;		Program Pengembangan Permukiman
			11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	NA	NA				Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Pengembangan Perumahan
			11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2.773.383.000,00	SB		2.398.088.812,44	1.897.696.562,36	Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
															Program Pengembangan Jasa Konstruksi
															Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
														b. Peningkatan keamanan, dan ketertiban kawasan perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
															Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
															Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
														c. Perencanaan dan koordinasi perencanaan penataan ruang untuk optimalisasi lahan hunian	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
															Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
															Program Penataan Bangunan Gedung
														d. Pengembangan kawasan hunian dengan memperhatikan lingkungan hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
															Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
															Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
														e. Pengembangan, pengendalian, serta pengawasan akses lalu lintas di sekitar kawasan hunian	Program Penyelenggaraan Jalan
															Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
															Program Rehabilitasi Sosial
															Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
												2. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Pekerjaan Umum; 4. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat	a. Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
															Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
														b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
															Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
															Program Perekonomian dan Pembangunan

Isu Strategis PB	TPB	Kondisi 6 Muatan KLHS	No Indikator	Indikator TPB	Baseline	Capaian	Permasalahan dalam Pencapaian TPB	Target Proyeksi		Proeyksi Status Capaian	Alternatif Skenario	Rekomendasi			
								2025	2029			Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
													7. LSM dan organisasi terkait bidang lingkungan hidup; 8. LSM dan organisasi terkait bidang kebencanaan dan mitigasi; 9. LSM dan organisasi terkait bidang kepemudaan dan penelitian; 10. Para Akademisi		
												3. Sampah perkotaan yang tertangani secara optimal.	1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Perumahan dan Permukiman 4. Dinas Pekerjaan Umum; 5. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; 10. Dinas Kesehatan; 11. Satuan Polisi Pamong Praja; 12. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat 13. LSM dan organisasi terkait lingkungan hidup; 14. LSM dan organisasi bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat; 15. Pemerintah kecamatan dan masyarakat.	a. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
															Program Pengelolaan Persampahan
															Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
															Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
														b. Pengelolaan dan pengawasan sistem drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
														c. Peningkatan perlindungan kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
															Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
															Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
															Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
															Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
														d. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
															Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
															Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
														e. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah dan limbah	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
															Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
															Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
												4. Tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Pekerjaan Umum; 4. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. 5. Dinas Perumahan dan Permukiman	Perencanaan penyusunan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Program Penanggulangan Bencana
															Program Penanganan Bencana
															Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
															Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
															Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Isu Strategis PB	TPB	Kondisi 6 Muatan KLHS	No Indikator	Indikator TPB	Baseline	Capaian	Permasalahan dalam Pencapaian TPB	Target Proyeksi		Proeyksi Status Capaian	Alternatif Skenario	Rekomendasi			
								2025	2029			Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
													6. Dinas Lingkungan Hidup; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Dinas Perhubungan; 9. SKPD lain terkait pembiayaan infrastruktur. 10. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat 11. Para Akademisi		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
▪ Dampak bangkitan pembangunan IKN ▪ Keterbatasan dan kerusakan lahan ▪ Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan	2	• Daya Dukung Pangan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha. Ketersediaan Pangan = 916.178.290.606,89 Kkal/thn; Kebutuhan pangan = 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun • Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha. • EF Penyedia Pangan Nilai Efisiensi Penyedia Pangan terbesar di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	BB	BB	1. Pelaksanaan dan Penyediaan Data Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 2. Masih tingginya angka Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita dan perlu diturunkan 3. Masih tingginya angka Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta dan perlu diturunkan 4. Belum Tercapainya Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan perlu ditingkatkan			Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi	1. Menurunkan potensi kerawanan pangan di Kota Balikpapan.	1. Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian; 4. Dinas Pekerjaan Umum; 5. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Dinas Sosial; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Dinas Perhubungan; 11. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 12. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat; 13. LSM dan organisasi terkait bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. 14. LSM dan organisasi terkait bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 15. LSM dan organisasi terkait bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat.	a. Peningkatan ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	10,38%	SB		0,00%	0,00%	Tanpa Upaya Tambahan	BAU				Program Pengawasan Keamanan Pangan
															Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
															Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
															Program Hubungan Industri
															Program Peningkatan Kerjasama Desa
														b. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung ketersediaan pangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
															Program Pengelolaan Tanah Kosong
															Program Penatagunaan Tanah
			2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	86,1	SB		86,96	88,11	Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi			c. Optimalisasi pertanian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
															Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
															Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
															Program Perizinan Usaha Pertanian
															Program Penyuluhan Pertanian
															Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
														d. Optimalisasi perikanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
															Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
															Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
															Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
															Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
														e. Peningkatan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
															Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
															Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
															Program Pengembangan UMKM

Isu Strategis PB	TPB	Kondisi 6 Muatan KLHS	No Indikator	Indikator TPB	Baseline	Capaian	Permasalahan dalam Pencapaian TPB	Target Proyeksi		Proeyksi Status Capaian	Alternatif Skenario	Rekomendasi			
								2025	2029			Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
															Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
															Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
															Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
															Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
														f. Peningkatan perlindungan pangan bagi masyarakat rentan dan korban bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
															Program Pemberdayaan Sosial
															Program Penanganan Bencana
												2. Pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat, terutama balita, di Kota Balikpapan.	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 4. Dinas Sosial; 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian; 7. Dinas Pekerjaan Umum; 8. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 11. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 12. Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu 13. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat; 14. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 15. LSM dan organisasi terkait bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. 16. LSM dan organisasi terkait bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 17. LSM dan organisasi terkait bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat.	a. Menjamin terpenuhinya nutrisi, khususnya anak pada usia balita	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
															Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
															Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
															Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
														b. Peningkatan nutrisi dan kualitas bahan pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
															Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
															Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
														c. Optimalisasi penggunaan lahan dan diversifikasi tanaman pangan.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
															Program Pengelolaan Tanah Kosong
															Program Penatagunaan Tanah
															Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
														d. Peningkatan kerjasama dan hubungan industri untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas konsumsi pangan	Program Hubungan Industri
															Program Peningkatan Kerjasama Desa
														e. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas konsumsi pangan.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
															Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
															Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
															Program Perekonomian dan Pembangunan
														f. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM terkait kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
															Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
															Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Degradasi kawasan pesisir dan laut	14	Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah. Bahaya Tsunami Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat	Kewenangan Pusat dan Provinsi										1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur 3. Dinas pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir	▪ Rehabilitasi hutan mangrove ▪ Pemberdayaan masyarakat pesisir

Isu Strategis PB	TPB	Kondisi 6 Muatan KLHS	No Indikator	Indikator TPB	Baseline	Capaian	Permasalahan dalam Pencapaian TPB	Target Proyeksi		Proeyksi Status Capaian	Alternatif Skenario	Rekomendasi			
								2025	2029			Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati terdapat beberapa biota laut yang dilindungi yaitu antara lain penyu lekang, kepiting tapal kuda, paus bungkuk, paus kepala melon, paus pembunuh palsu dan kepiting bakau bertelur. Hewan Endemik seperti orangutan, Bekantan, dan Burung Kalimantan – sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara											4. WALHI 5. Akademisi 6. LSM dan Organisasi terkait bidang kelautan Koordinasi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan seluruh stakeholder yang berwenang di sektor kelautan		
Keterbatasan dan kerusakan lahan	15	Daya Dukung Pangan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha. Ketersediaan Pangan = 916.178.290.606,89 Kkal/thn; Kebutuhan pangan = 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun Daya Dukung Air Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha. Ketersediaan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 524.147.443,99 M3/Tahun dan untuk kebutuhan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 525.625.678,16 M3/Tahun Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 Ha.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	50,32	SB	1. Belum Tercapainya Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dan perlu ditingkatkan 2. Penyediaan Data Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	69,069	79,273	Tanpa Upaya Tambahan	BAU	Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 3. Dinas Perumahan dan Permukiman 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat 8. LSM dan organisasi terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. LSM dan organisasi terkait Bidang Keanekaragaman Hayati	Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya	▪ Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ▪ Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH ▪ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ▪ Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ▪ Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat ▪ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ▪ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ▪ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	NA	NA				Dengan Upaya Tambahan	Akselerasi				

Sumber : Hasil Analisis, 2024

6.2.2 Rekomendasi TPB Yang Tidak Berkaitan Dengan Isu Strategis

Untuk rekomendasi TPB yang tidak berkaitan dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan terdiri dari :

1. TPB 3 - Kehidupan sehat dan Sejahtera
2. TPB 4 - Pendidikan Berkualitas
3. TPB 5 - Kesetaraan Gender
4. TPB 7 - Energi Bersih dan Terjangkau
5. TPB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
6. TPB 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur
7. TPB 10 - Berkurangnya Kesenjangan
8. TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab
9. TPB 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh
10. TPB 17 - Kemitraan untuk mencapai target

Ke-sepuluh TPB diatas merupakan TPB yang tidak berkaitan dengan Isu Strategis namun masih memiliki gap yang harus disesaikan dengan Proyeksi BAU tanpa Upaya Tambahan dan dengan Upaya Tambahan. Jelasnya dapat dilihat dari **Tabel VI.29** dan **Tabel VI.30** dibawah ini.

Tabel VI.30 Perumusan Rekomendasi TPB Yang Tidak Berkaitan Dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan

No	TPB Terkait	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Hasil Capaian Indikator TPB	
				Perlu Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
1	TPB 3 - Kehidupan sehat dan Sejahtera	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah indikator berjumlah 29, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 21 atau sekitar 72,41%, indikator belum tercapai berjumlah 6 atau sekitar 20,69% dan indikator yang tidak ada data 3 atau sekitar 10,34%.	• Peningkatan fasilitas kesehatan • Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses kesehatan	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun capaian eksisting 1,84% sedangkan target perpres menurun atau 0%	
2	TPB 4 - Pendidikan Berkualitas	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah indikator berjumlah 13, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 10 atau sekitar 76,92%, indikator belum tercapai berjumlah 1 atau sekitar 7,69% dan indikator yang tidak ada data 2 atau sekitar 15,38%.	• Peningkatan fasilitas pendidikan • Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan • Penerapan Pendidikan sejak dini terkait mitigasi bencana upaya dalam meningkatkan indeks kesiapsigaan masyarakat • Menurunkan angka pengangguran terbuka dengan memberikan kemudahan lapangan kerja serta mengembangkan Pendidikan secara formal maupun non formal (skill) yang dipiroritaskan pada dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Capaian Eksisting 49,37% sedangkan target perpres meningkat menjadi 77,2%	
3	TPB 5 - Kesetaraan Gender	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah indikator berjumlah 14, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 6 atau sekitar 42,86%, indikator belum tercapai berjumlah 3 atau sekitar 21,43% dan indikator tidak ada data 5 atau sekitar 35,71%.		• 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir capaian eksisting 74% sedangkan target perpres menurun. • 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) capaian eksisting 30,57% sedangkan target perpres menurun menjadi 9,9%	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern capaian eksisting 39,40% sedangkan target perpres meningkat menjadi 85%
4	TPB 7 - Energi Bersih dan Terjangkau	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah indikator 2, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai tidak ada, indikator yang belum tercapai berjumlah 1 atau sekitar 50% dan indikator tidak ada data berjumlah 1 atau sekitar 50%.	Pengembangan inovasi sumber energi terbarukan dengan teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah		
5	TPB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis	• Meningkatkan pendapatan per kapita dengan pengembangan lapangan usaha pada sektor unggulan dan potensi wilayah	• 8.1.1.(a) PDB per kapita capaian eksisting 129.481,26 target	• 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat

No	TPB Terkait	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Hasil Capaian Indikator TPB	
				Perlu Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
		• Jumlah indikator 17, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 10 atau sekitar 58,82%, indikator belum tercapai berjumlah 6 atau sekitar 35,29% dan indikator tidak ada data berjumlah 2 atau sekitar 11,76%.	sebagai nilai tambah ekonomi wilayah sehingga dapat memberikan multiplier effect pada sektor perekonomian lainnya, seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, pariwisata, dll. • Memfasilitasi kebutuhan UMK dan mendorong serta mempromosikan produk unggulan lokal, dan meningkatkan kualitas produk agar dapat berdaya saing dengan wilayah lainnya.	perpres meningkat menjadi lebih dari 50 jt • 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB capaian eksisting 1,48% sedangkan target perpres meningkat menjadi 8% • 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara capaian eksisting 11.704,00 wisatawan mancanegara sedangkan target perpres meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun capaian eksisting -0,29% sedangkan target perpres meningkat • 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian capaian eksisting 75,67% sedangkan target perpres meningkat • 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) capaian eksisting 23,97 % sedangkan target perpres meningkat
6	TPB 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah indikator 11, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 7 atau sekitar 63,64%, indikator yang belum tercapai berjumlah 1 atau sekitar 9,09% dan indikator tidak ada data berjumlah 3 atau sekitar 27,27%.			9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet capaian eksisting 85,60% sedangkan target perpres meningkat 100%
7	TPB 10 - Berkurangnya Kesenjangan	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah Indikator 7, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai berjumlah 2 atau sekitar 28,57%, indikator tidak ada data berjumlah 2 atau sekitar 28,57%.			10.1.1* Koefisien Gini capaian eksisting 0,33% target perpres menurun menjadi 0,36%
8	TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah indikator 5, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai berjumlah 2 atau sekitar 40% dan indikator tidak ada data berjumlah 3 atau sekitar 60%.		11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana capaian eksisting 2.773.383.000 sedangkan target perpres menurun	
9	TPB 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah indikator 16, di Kota Balikpapan yang sudah tercapai 12 atau sekitar 75%, indikator yang belum tercapai berjumlah atau sekitar 12,50%.		16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan capaian eksisting 24,25% sedangkan target perpres meningkat menjadi 80%	

No	TPB Terkait	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Hasil Capaian Indikator TPB	
				Perlu Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
10	TPB 17 - Kemitraan untuk mencapai target	• Tidak Berdampak secara langsung dengan kajian lingkungan strategis, dan tidak tergolong kelompok usulan isu strategis • Jumlah indikator 9, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 7 indikator, yang belum tercapai 3 dan indikator tidak ada data 4 indikator		17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB capaian eksisting 0,89 % sedangkan target perpres diatas 12%	• 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband capaian eksisting 69,68% sedangkan target perpres Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi. • 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet capaian eksisting 85,60% sedangkan target perpres meningkat

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel VI.31 Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Program TPB Yang Tidak Berkaitan Dengan Isu Strategis di Kota Balikpapan

TPB	No Target	Target	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi
TPB 3 - Kehidupan sehat dan Sejahtera					
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Seluruh Fasilitas Kesehatan di wilayah Kota Balikpapan
	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat yang membahayakan		
	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.		
	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Mencapai cakupan kesehatan termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan serta vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau		
	3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.		
	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control		
TPB 4 - Pendidikan Berkualitas					
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Menjamin bahwa semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Seluruh Fasilitas Pendidikan di wilayah Kota Balikpapan
	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang	Menjamin semua anak untuk mendapatkan akses terhadap perkembangan dan pengasuhan serta		

TPB	No Target	Target	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi
		berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	pendidikan pra sekolah, sehingga siap menembuh pendidikan dasar		
	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Membangun dan meningkatkan fasilitas yang ramah, aman, inklusif dan efektif bagi semua		
TPB 5 - Kesetaraan Gender					
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Mengakhiri diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	• Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Program Pemberdayaan Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan
	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan, perdagangan maunusia, eksploitasi terhadap perempuan.		
	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa.		
	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi		
TPB 7 - Energi Bersih dan Terjangkau					
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7,2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
TPB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik	• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif • Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting • Program Pengembangan Ekspor • Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen • Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan
	8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi		
	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah		
	8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.		
	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Melaksanakan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal		
	8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik		
TPB 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur					

TPB	No Target	Target	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Seluruh Kawasan Industri di wilayah Kota Balikpapan
	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi	• Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
TPB 10 - Berkurangnya Kesenjangan					
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat status apapun	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Seluruh Wilayah Kota Balikpapan
	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Mengadopsi kebijakan dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar		
TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab					
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Mendorong perusahaan perusahaan untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan		Seluruh Wilayah Kota Balikpapan
	12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan		
	12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Menjamin masyarakat untuk memiliki informasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan alam		
TPB 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh					
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan		Seluruh Wilayah Kota Balikpapan
	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	• Program perlindungan dan jaminan sosial • Program peningkatan kualitas keluarga • Program pengelolaan sistem data gender dan anak • Program pemenuhan hak anak (PHA) • Program perlindungan khusus anak	
	16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan		
	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan		
TPB 17 - Kemitraan untuk mencapai target					
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		Seluruh Wilayah Kota Balikpapan
	17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan	Meningkatkan kerjasama dalam sains, teknologi, inovasi, serta berbagi pengetahuan dengan meningkatkan koordinasi yang lebih baik.		

TPB	No Target	Target	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi
		Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.			
	17,8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Mengopersionalisasikan penggunaan teknologi dan sains, mekanisme pembangunan teknologi dan inovasi, dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi		
	17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif		

Sumber : Hasil Analisis, 2023



BAB 7
KESIMPULAN

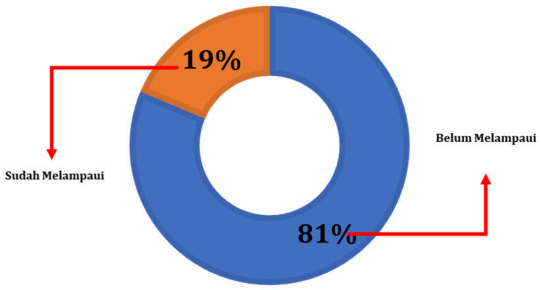
Dibawah ini merupakan kesimpulan dari KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 yaitu antara lain :

1. Kesimpulan 6 Kajian Muatan

Daya Dukung Pangan

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.

DDDTLH :

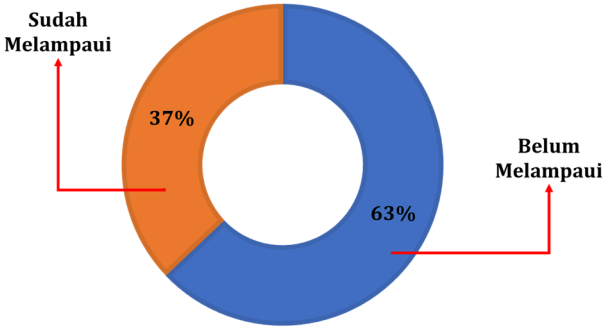


Ketersediaan Pangan= 916.178.290.606,89 Kkal/thn;

Kebutuhan pangan = 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun

Daya Dukung Air

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha.

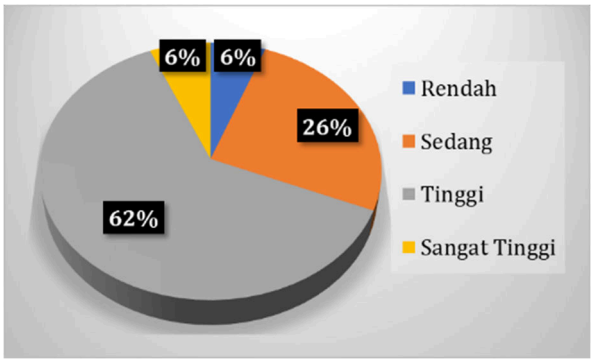


Ketersediaan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 524.147.443,99 M3/Tahun dan untuk kebutuhan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 525.625.678,16 M3/Tahun

Kinerja Jasa Lingkungan :

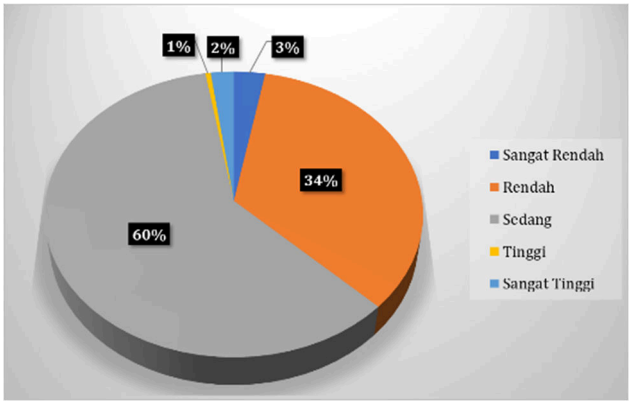
Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha.



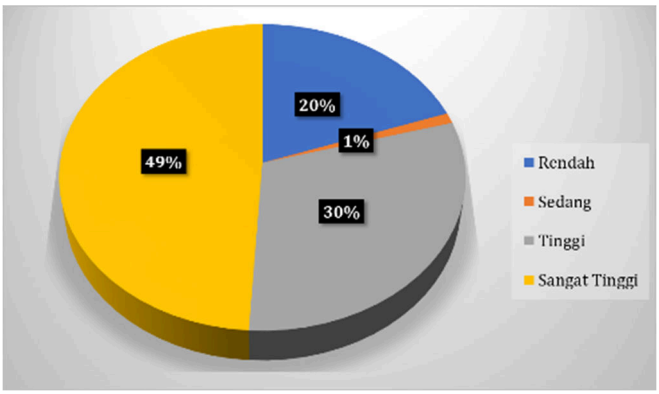
Jasa Lingkungan Penyedia Air

Pada Jasa Ekosistem Penyediaan Air terbesar masuk kedalam kategori sedang dengan luasan total seluas 30.591,15 Ha yang meliputi 6 (enam) kecamatan.



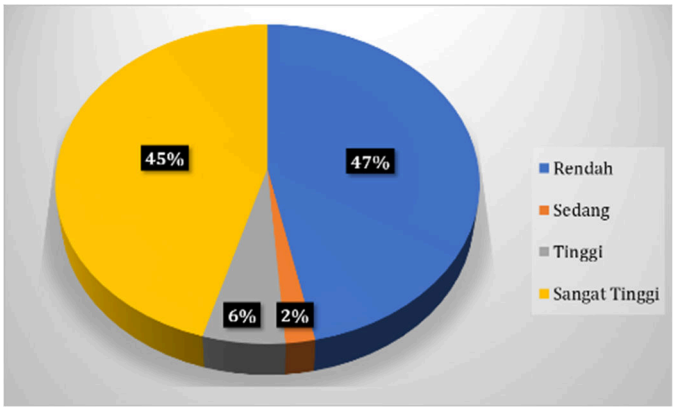
Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha.



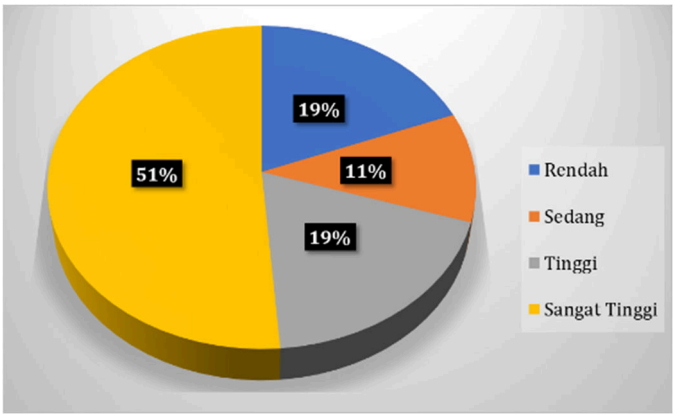
Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 Ha.



Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 26.110,44 Ha.



Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim

Untuk kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kelas kerentanan sangat rendah dan rendah.

Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan

Timbulan Sampah

Rentang terbesar timbulan sampah paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 502.607,74 M3/Tahun.

Timbulan Tinja

Rentang terbesar timbulan Tinja paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 23.257,98 M3/Tahun

Beban Pencemar

Total Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan sebesar 26758,59 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 6.851,64 Kg/Hari

Total Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan sebesar 30364,12 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 7.042,12 Kg/Hari

Total Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan sebesar 21026,16 Kg/Hari. Paling tinggi berada di Kecamatan Balikapapan Utara sebesar 4.879,85 Kg/Hari.

Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Bahaya Cuaca Ekstrim

Di kota Balikpapan tingkat bahaya Karhutla dan Bahaya Cuaca Ekstrim berada pada tingkat sedang yang tersebar diseluruh kecamatan.

Bahaya Gempa Bumi

Tingkat bahaya gempa bumi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 50605,87 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan

Bahaya Tsunami

Tingkat bahaya tsunami di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dengan luas total 46,25 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan total luas 6,67 Ha yang tersebar di lima kecamatan

Bahaya Longsor

Tingkat bahaya longsor di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya rendah dan sedang, untuk bahaya rendah dengan luas 470,08 Ha yang tersebar di lima kecamatan, sedangkan untuk tingkat bahaya sedang dengan luas 257,93 Ha yang tersebar di empat kecamatan.

Bahaya Banjir

Tingkat bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi, untuk bahaya banjir tinggi dengan total luas 5512,65 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total sebesar 1.313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan.

Bahaya Kekeringan

Tingkat bahaya kekeringan di Kota Balikpapan berada pada tingkat bahaya sedang dengan luas total 50.664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Efisiensi Pemanfaatan SDA :

EF Penyedia Pangan

Nilai Efisiensi Penyedia Pangan terbesar di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%

EF Penyedia Air

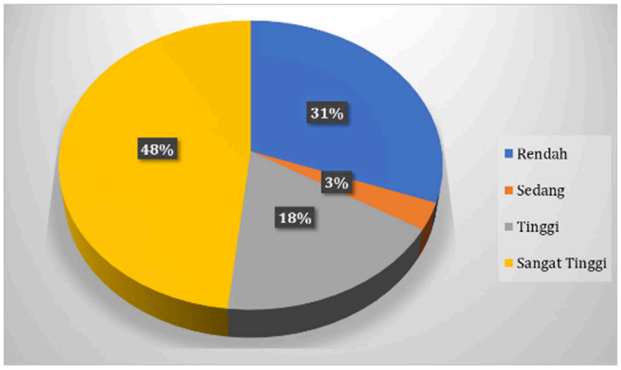
Luasan total EF Penyedia Air di Kota Balikpapan sebesar 71,26%, nilai ini merata diseluruh wilayah Kota Balikpapan

EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Luasan terbesar pada EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Timut dengan total 89,21%

Keanekaragaman hayati :

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha.



Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati terdapat beberapa biota laut yang dilindungi yaitu antara lain penyu lekang, kepiting tapal kuda, paus bungkuk, paus kepala melon, paus pembunuh palsu dan kepiting bakau bertelur.

Hewan Endemik seperti orangutan, Bekantan, dan Burung Kalimantan – sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara

2. Kesimpulan Capaian Indikator

Terdapat 57,44% dari 195 indikator TPB di Kota Balikpapan yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kota Balikpapan sebesar 17,44% dan 1,03% untuk TPB yang belum dilaksanakan serta 24,10% TPB yang tidak ada data.

3. Kesimpulan Isu Strategis

Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1) Ketersediaan Air Baku
2) Pengendalian Emisi GRK
3) Dampak Bangkitan Pembangunan IKN
4) Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah
5) Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut
6) Keterbatasan dan Kerusakan Lahan
7) Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan

4. Kesimpulan TPB

Adapun TPB yang menjadi prioritas di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
2) TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim
3) TPB 1 Tanpa Kemiskinan
4) TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan
5) TPB 2 Tanpa Kelaparan
6) TPB 14 Ekosistem Laut
7) TPB 15 Ekosistem Darat

Dibawah ini merupakan rekomendasi kepada pemerintah Kota Balikpapan yaitu antara lain:

1. Rekomendasi Berdasarkan Capaian TPB

- Untuk indikator TPB yang memiliki data dan sudah tercapai, maka diharapkan dapat mempertahankan capaian dan mengembangkannya *(business as usual)* sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya, indikator ini tidak perlu upaya tambahan untuk mencapai Target.
- Untuk indikator TPB yang memiliki data dan belum tercapai, maka perlu dilakukan upaya melalui rekomendasi arah kebijakan dan sasaran pokok yang nantinya di turunkan kepada program-program, program dari rencana program OPD yang sesuai. Artinya, indikator ini perlu upaya tambahan untuk mencapai Target.

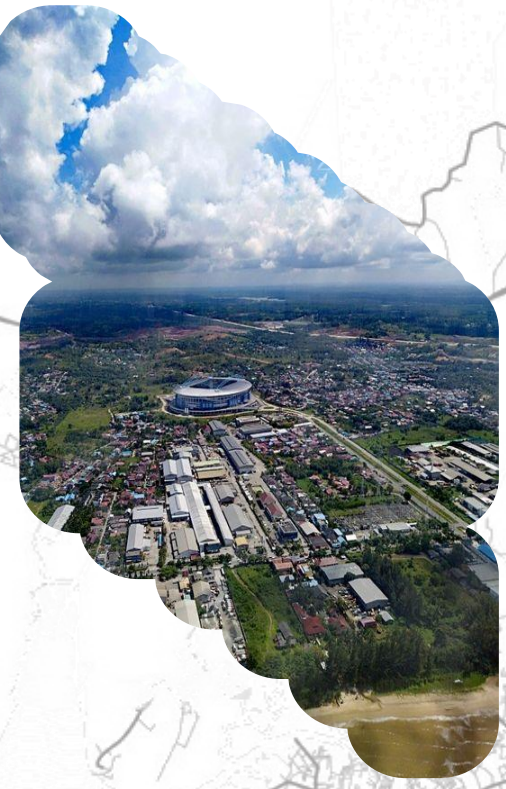
- Untuk indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, maka direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan pengumpulan data yang sesuai dengan indikator TPB *(termasuk disagregasinya).* Artinya, indikator ini perlu upaya intervensi untuk mencapai Target.
- Untuk indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, maka direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan pengumpulan data yang sesuai dengan indikator TPB (termasuk disagregasinya). Artinya, indikator ini perlu upaya intervensi untuk mencapai Target.

2. Rekomendasi Secara Keseluruhan

- Perlunya inventarisasi (pengarsipan) data yang rapi, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan khususnya untuk diagregasi indikator TPB. Pengarsipan dengan sistem satu data ini diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk mendapatkan data yang kredibel.
- Perlunya pendataan berupa identifikasi lokasi, jumlah, maupun satuan lainnya sesuai dengan indikator TPB untuk indikator TPB yang belum ada data dan TPB yang belum tercapai untuk mendapatkan pembaruan data.
- Perlunya memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh bantuan mitra pemerintah melalui program-program yang mendukung percepatan tercapainya indikator TPB.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat menginventaris program/kegiatan non pemerintah (mitra pemerintah) seperti NGO, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya khususnya yang terkait dengan TPB agar kegiatan tersebut dapat terukur dan terhimpun dalam capaian TPB daerah. Hal ini juga dapat bermanfaat sebagai gambaran proporsi bantuan yang diterima pemerintah daerah apabila masih memerlukan kerja sama dengan pihak tersebut.
- Perlunya Penyusunan RAD SDGs sebagai bahan monitoring dan rencana aksi setiap target.
- Hasil rekomendasi berupa arahan program dari KLHS RPJMD Kota Balikpapan wajib dilakukan integrasi dengan dokumen RPJMD sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (verifikasi pengintegrasian sesuai arahan pada Surat Mendagri Nomor 660.11.2/8754/Bangda) yang hasilnya harus dituangkan kedalam Berita Acara.

PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LAMPIRAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KLHS RPJMD

KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2025 - 2029

TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 1

CAPAIAN INDIKATOR TPB DI KOTA BALIKPAPAN

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	2,42	2,57	2,89	2,45		SS	Dinas Sosial (DINSOS)
		SOSIAL	1,3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	89%					SB	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
				1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal						NA	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
				1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%						NA	Dinas Sosial (DINSOS)
				1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	5089	4909	6156	4857	6150	SB	Dinas Sosial (DINSOS)
		SOSIAL	1,4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	99.56	99.9	96.53	96.19	97.29 (Juli 2023)	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	97.8	95.2	95.70%	99.2		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	70.02	74.5	76.56	78.91	62.93 (Juli 2023)	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	99,25	81,59	81.70	81,83	82,05	SB	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
				1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%		90.60%	89.67%			SB	Dinas Kesehatan (DINKES)
				1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta	0,37%	0,29%	0,29%	0,26%	0,21%	SS	Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM)
				1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	94,75	87,86	80,40	98,84		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
				1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	78,08	86,20	74,46	85,77		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
				1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	96,5	93,11	99,21	99,58		SS	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)
				1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%						NA	PLN
		SOSIAL	1,5	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0	0	0	0	0	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	0	0	2	9	2	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	68	100%	100%	100%	100%	SS	Dinas Sosial (DINSOS)
				1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	Dinas Sosial (DINSOS)
				1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	0	0	0	5	41	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	############	724.433.920,00	1.259.141.020,00	2.773.383.000,00		SB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	0	0	1	1	1	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		SOSIAL	1.a	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat		257%				NA	Dinas Sosial (DINSOS)
				1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	Pendidikan = 20% dari total APBD dan kesehatan = 10% dari APBD	8001%				NA	Dinas Sosial (DINSOS)
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	13.04%	9.63%	10.01%	10.46%	11.12%	**SS**	Dinas Kesehatan (DINKES)
				2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	BB	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	2,2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	15,12%	12,08%	11,09%	6,93%	10,38%	SB	Dinas Kesehatan (DINKES)
				2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	14,56%	11,51%	13,12%	7,02%	11,04	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada	Menurun	10,62%	7,16%	7,07%	8,18%	6,88%	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
					usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.								
				2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	13.14	12.1	14.76	14.84	11.80 (Juli 2023)	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	75.68	77.98	68.70	67.90	59.40	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	90,2	87,8	87	86,1	Belum Dihitung	SB	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)
		SOSIAL	2,3	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	107,68	111,36	118,92	117,47	133,01	SS	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	72/100000 KH	73,43 / 100000 KH	178/100000 KH	39.67/100000	39.59/100000	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	99.56	99.7	96.66	96.25	47.68	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	100	99.9	96.53	96.19	97.29	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	3,2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	7/1000	7/1000	9,8/1000	7.83/1000		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	7/1000		7,9/1000	5.95/1000		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	7/1000	7/1000	9,2/1000	7.14/1000		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	100%	100%	100,00%	100%		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	3,3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	2,26	0,43	1	0,05	0,02	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	272,29/100000	141,1/100000	179,2/100000	262,8/100000	175,2/100000	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0,16	0,12	0,07	0,15	0,11	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	28	25	29	22	15	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	3,4	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	0.0010	0.0012	0.0015	0.0013	0.0013	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	23.47%	24.74%	16.43%	39.27%		SB	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	1.87	2.03	1.59	2.23		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun						NA	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	27	27	27	27	27	SB	Dinas Kesehatan (DINKES)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
		SOSIAL	3,5	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	0.019	0.015	0.01	0.012		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun						NA	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	3,7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	94,09	94,59	94,67	94,39	93,5	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	70,02	70,61	70,3	58,21	56,66	SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	27,99	26,29	27,01	31,41	31,13	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	14,8			19,2		SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	2,297			2,06		SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		SOSIAL	3,8	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	14.49%	14.04%				SB	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	981/1000 Penduduk	983/1000 Penduduk	987/1000 Penduduk	991/1000 Penduduk		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	102,8	105	110,6	109,33		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	3,9	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun						NA	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	1.7	1.74	1.55	1.84		SB	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	3.b	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	100%	100%	100%		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
		SOSIAL	3.c	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	8	8,2	8,1	8,1	8,1	SS	Dinas Kesehatan (DINKES)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	Meningkat					NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
				4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	98,48	98,48	95,57	94,63		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
				4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	90,79	90,79	85,19	83,13		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
				4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	94,75	96,12	88,73	105,17		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
				4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	105,68	110,87	92,88	110,56		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
				4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	10,67	10,68	10,91	10,92		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
		SOSIAL	4,2	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	22,85	71,37	38,38	49,37		SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
		SOSIAL	4,4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	PR-TIK remaja : 94.42 PD-TIK dewasa : 79.30	PR-TIK remaja : 96.04 PD-TIK dewasa : 86.10	PR-TIK remaja : 98.99 PD-TIK dewasa : 93.22	PR-TIK remaja : 99.32 PD-TIK dewasa : 91.99		SS	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
		SOSIAL	4,5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	SD 94,75/ SMP 78,08	SD 87,86/ SMP 86,20	SD 80,40/ SMP 74,46	SD 98,84/ SMP 85,77		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
		SOSIAL	4,6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	99,92	99,41	99,98			SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
				4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	99,92	99,41	99,98			SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
		SOSIAL	4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	Meningkat					NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
		SOSIAL	4.c	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	43,85	40,64	39,68	40,76		SS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	4					NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		SOSIAL	5,2	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	12	39 orang	63 orang (0.01%)	74 orang (0.02%)	belum ada data	SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0,050	0,028	0,046	0,045	belum ada data	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	89	29 orang	48 orang	45 orang	belum ada data	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	62,16	72,86	63 orang (0.01%)	74 orang (0.02%)	belum ada data	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		SOSIAL	5,3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	23,12	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun						NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	36					NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
													dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		SOSIAL	5,5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	17,78			21,56		SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	22,58	20,69	28	42,86	40	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		SOSIAL	5,6	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat						NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	14,49	14,04	14,29	30,57	19,96	SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	14,49	47,86	49,85	39,4	23,23	SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		SOSIAL	5.b	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	82,81	73,69	81,62	82,23		SS	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	26,68	97,98	98,21	98,49	98,54	SB	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
				6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	1525	1570	1572,17	1582	1598	SS	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
				6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	26,68	81,59	81,76	98,99	99,1	SB	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
		LINGKUNGAN	6,2	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat				46,60%		NA	Dinas Kesehatan (DINKES)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
				6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	100	90,9	93,3	96,95	97,1	SB	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
				6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	34	34	34	34	34	SB	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
				6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	14/41.18%	14/41.18%	20/58.82%	29/85.29%		SS	Dinas Kesehatan (DINKES)
				6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	6 (SPALD-T) (Dieperkim)	IPAL Margasari	3 (SPALD-T) (Disperkim)	1 (SPALD-T) (Disperkim) 4 (SPALD-T) (DPU)	4 (SPALD-T) (DPU)	SS	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
				6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	100			30,32%		NA	Dinas Kesehatan (DINKES)
		LINGKUNGAN	6,3	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	100	4941	3723	10710	11980	SS	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
				6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	100		49,44	50		SS	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
				6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	34		49,44	50		SS	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		LINGKUNGAN	6,4	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)
		LINGKUNGAN	6,5	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)						NA	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
				6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada						NA	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	EKONOMI	7,2	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%						NA	Sekertariat Daerah (Bagian Perekonomian)
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	6,85	-8,44	3.28*	3.7**		SS	Badan Pusat Statistik (BPS)
				8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	132.055,04	120904,03	124.866.26*	129481.26**		SB	Badan Pusat Statistik (BPS)
		EKONOMI	8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	-1,54%	3,92%	1,22%	-0,29%		SB	Badan Pusat Statistik (BPS)
		EKONOMI	8,3	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	65,8	63,23	63,88	64,87		SS	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
				8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	68,36	65,05	79,22	75,67		SB	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)
				8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	36,74	36,50				SS	Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (DKUMKMP)
		EKONOMI	8,5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	16.350,30	17.741,71	17.741,71	18.025,42	18.505,18	SS	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
				8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	7,15	9	8,94	6,9		SS	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
				8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun		7,16	5,83	4,17		SS	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
		EKONOMI	8,6	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	23,79	25,45	23,97			SB	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
		EKONOMI	8,9	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	1,60%	1,49%	1,42%	1,48%		SB	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)
				8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	56577	16.510	17458	11704	5415 s/d Juni	SB	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)
				8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	2878561	1072569	1431862	1748085	1018385 s/d Juni	SS	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)
				8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	############	###########	Rp 2.684.390.000	Rp 3.947.435.000	Rp 3.418.605.001 s/d Juni	SS	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)
				8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	NA	7.710	8.568	9.920		SS	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)
		EKONOMI	8,10	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat						NA	Sekertariat Daerah (Bagian Perekonomian)
				8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)						NA	Sekertariat Daerah (Bagian Perekonomian)
				8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	36,74	36,50	29,72	26,20	26,59	SS	Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (DKUMKMP)
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan	EKONOMI	9,1	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	1	1		3		SS	Dinas Perhubungan (DISHUB)
				9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	1	4		2		SS	Dinas Perhubungan (DISHUB)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
	Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	47,51	46.83	46.64	47.20		SS	Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (DKUMKMP)
				9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	4,47	-1,06	4,56	4,69		SS	Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (DKUMKMP)
				9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	23,58	18,98	19,80	20,05		SS	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
		EKONOMI	9,3	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	Data ada di BPS Pusat	Data ada di BPS Pusat	Data ada di BPS Pusat	Data ada di BPS Pusat	Data ada di BPS Pusat	NA	Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (DKUMKMP)
				9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	Data ada di BPS Pusat	Data ada di BPS Pusat	Data ada di BPS Pusat	Data ada di BPS Pusat	Data ada di BPS Pusat	NA	Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (DKUMKMP)
		EKONOMI	9,5	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	0,00043	0,00053	0,00022	0,00152		SS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
		EKONOMI	9,c	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat						NA	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
				9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	82,81	81,08	88,23	88,46		SS	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
				9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	69,68	76,08	85,91	85,60		SB	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,302	0,311	0,325	0,334		SS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
				10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	2,42	2,57	2,89	2,45		SS	Dinas Sosial (DINSOS)
		EKONOMI	10,2	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun						NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		EKONOMI	10,4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta						NA	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,	LINGKUNGAN	11,1	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	99,63%	99,71%	99,71%	99,74%	99,79%	SS	Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
	Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,2	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%						NA	Dinas Perhubungan (DISHUB)
		LINGKUNGAN	11,3	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat						NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
				11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada						NA	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
		LINGKUNGAN	11,5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0	0	0	0	0	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	108.14	108.14	123,46	110,79		SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	0	0	0	0	0	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	0	0	2	0	1	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	############	724.433.920,00	1.259.141.020,00	2.773.383.000,00		SB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		LINGKUNGAN	11,6	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	20,4% 34147,85 (ton)	22,32% (39248,41) Ton	98,97% (179.619,66) Ton	99,1% (186.188,69 Ton)		SS	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		LINGKUNGAN	11.b	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Meningkat/ada	0	0	1	1	1	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	0	0	1	1	1	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,4	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	LB3 yang dihasilkan : 78851,4894 (Ton) LB3 yang dikelola : 70379,6896 (Ton)	LB3 yang dihasilkan : 103345,0422 (Ton) LB3 yang dikelola : 95483,8788 (Ton)	LB3 yang dihasilkan : 73813,63 (Ton) LB3 yang dikelola : 65292,75 (Ton)	LB3 yang dihasilkan : 80150,43 (Ton) LB3 yang dikelola : 78928,98 (Ton)	LB3 yang dihasilkan : 39587,21263 (Ton) LB3 yang dikelola : 38101,39848 (Ton) (Bulan Januari - Juli)	SS	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		LINGKUNGAN	12,5	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	26471,117 (ton/tahun)	28175,191 (Ton/tahun)	30815,699 (ton/tahun)	35706,089 (ton/Tahun)		SS	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
		LINGKUNGAN	12,6	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat						NA	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		LINGKUNGAN	12,7	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat						NA	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		LINGKUNGAN	12,8	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat						NA	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	LINGKUNGAN	13,1	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	0	0	1	1	1	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
				13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0	0	0	0	0	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	48.24	65,33	69,49	50,32		SB	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		LINGKUNGAN	15,3	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)						NA	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDAS-HL)
		LINGKUNGAN	15,9	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1 (Inventarisi dan Identifikasi Keanekaragaman Hayati Kawasan Pesisir dan Laut Kota Balikpapan			1 (Masterplan RTH Kota Balikpapann)		SS	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	2	2	2	1		SS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) KEPOLISIAN
				16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun						NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) KEPOLISIAN
				16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun						NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) KEPOLISIAN
				16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat						NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) KEPOLISIAN
		HUKUM & TATA KELOLA	16,2	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	Menurun					NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
													Berencana (DP3AKB)
				16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	0,030	0,0161	0,029	0,025	belum ada data	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
				16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	No data					NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		HUKUM & TATA KELOLA	16,5	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	6,89	Tidak Pernah Menghitung	Tidak Pernah Menghitung	Tidak Pernah Menghitung	Tidak Pernah Menghitung	BB	INSPEKTORAT
		HUKUM & TATA KELOLA	16,6	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Meningkat					NA	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
				16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	SS	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
				16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	68.68/ 0.81%	68.99/ 0.45%	69.28/ 0.42%	69.5/ 0.32%	Belum dilaksanakan evaluasi	SS	Sekertariat Daerah (Bagian Organisasi)
				16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	27,97	14,11	28,57	24,25	14,41	SB	Sekertariat Daerah (Bagian PBJ)
				16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	67,31	67,33	68,00	68,91	Belum dilaksanakan evaluasi	SS	Sekertariat Daerah (Bagian Organisasi)
				16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	Tidak dilakukan penilaian karena Kota Balikpapan sudah Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi (2017: 83.19)	Tidak dilakukan penilaian karena pandemi covid-19	99,25	87,12	Sudah dilakukan penilaian, namun hasil belum keluar	SS	Sekertariat Daerah (Bagian Organisasi)
		HUKUM & TATA KELOLA	16,7	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	17,78		0,0031	20,74		SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
				16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	Meningkat		0,25		0,4	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		HUKUM & TATA KELOLA	16,9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	98,85	99,10	99,82	99,91		SS	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)
				16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	77,44	93,11	97,77	99,58		SS	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)
				16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	98,85	93,11	97,77	99,58		SS	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)
		HUKUM & TATA KELOLA	16,10	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	3	3	3	3	3	SS	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	83 T	83 T	86 T	91 T		SS	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (BPPDRD)
				17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,91%	0,73%	0,87%	0,89%		SB	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (BPPDRD)
				17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat						NA	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
		EKONOMI	17,6	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi						NA	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
				17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	69,68					SB	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
		EKONOMI	17,8	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	69,68	76,08	85,91	85,60		SB	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
		EKONOMI	17,17	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada						NA	Badan Pusat Statistik (BPS)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian	OPD PELAKSANA
				17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada						NA	Badan Pusat Statistik (BPS)
		EKONOMI	17,18	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	#N/A	87,21	93,55	100		SS	Badan Pusat Statistik (BPS)
				17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat			74,19%	87,10%		SS	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)
				17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat						SS	Badan Pusat Statistik (BPS)
		EKONOMI	17,19	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SS	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)
				17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	22.265	33.266	34.199	47.021		SS	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
				17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	#N/A	87,21	93,55	100		SS	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)

LAMPIRAN 2

CAPAIAN INDIKATOR TPB TIDAK RELEVAN DI KOTA BALIKPAPAN

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun
				2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300
				3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat
				3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi
				3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota
		LINGKUNGAN	6,5	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada
				6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	EKONOMI	7,3	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	1000 Km (skala nasional)
				9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 km
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,3	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87
				10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,1	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)
				11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)
		LINGKUNGAN	11,2	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	ada
		LINGKUNGAN	11,3	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Minimal 20 kota sedang (skala nasional)
				11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)
		LINGKUNGAN	11,4	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada
		LINGKUNGAN	11,6	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ada

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan
		LINGKUNGAN	11,7	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,6	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16.b	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat
			18	**27**		

LAMPIRAN 3

MATRIKS PENELAHAAN KLHS RPJMD KE DOKUMEN RPJMD KOTA BALIKPAPAN

INTEGRASI KEBIJAKAN UMUM								
	Laporan KLHS RPJMD	Pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development).						
	Dokumen RPJMD	**Latar Belakang (Muatan tentang komitmen pembangunan berkelanjutan)**	**Hal**	**Dasar Hukum (Permendagri 7 Tahun 2018)**		**Hal**		
		Tidak ada Kalimat Pembangunan Bekelanjutan		Tidak Termuat didalam Dasar Hukum				

INTEGRASI GAMBARAN UMUM							
	Laporan KLHS RPJMD	**Daya Dukung Air**	**Hal**	**Daya Dukung Pangan**	**Hal**	**Data Pendukung Lain**	**Hal**
		Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37%, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63%.	3-83	Status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui sebesar 81% dan sudah melampaui sebesar 19%.	3-77	- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	3-87 - 3-130
	Dokumen RPJMD	**Gambaran Umum**	**Hal**	**Gambaran Umum**	**Hal**	**Gambaran Umum**	**Hal**
		Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37%, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63%.	20	Status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui sebesar 81% dan sudah melampaui sebesar 19%.	19	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Pengelolaan sampah dan Limbah - Resilensi terhadap bencana dan perubahan Iklim	28-34

INTEGRASI ISU

1	**Laporan KLHS RPJMD**	**Isu PB**			
		Ketersediaan Air Baru			
	Dokumen RPJMD	**Isu dan Permasalahan**			Hal.
		Isu Strategis 1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan	179	• Perekonomian daerah didominasi oleh industri besar • Partisipasi angkatan kerja rendah • Kontribusi UMKM terhadap perekonomian belum optimal • Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian belum optimal • Belum optimalnya investasi daerah	170-178
2	**Laporan KLHS RPJMD**	**Isu PB**			
		Pengendalian Emisi GRK			
	Dokumen RPJMD	**Isu dan Permasalahan**			Hal.
		Isu Strategis 2. Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial	180	• Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan • Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas • Perwujudan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas masih perlu dioptimalkan • Upaya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan masih perlu dioptimalkan	170-178
3	**Laporan KLHS RPJMD**	**Isu PB**			
		Dampak Bangkitan Pembangunan IKN			
	Dokumen RPJMD	**Isu dan Permasalahan**			Hal.
		Isu Strategis 3. Maju Sebagai Mitra IKN	188		
4	**Laporan KLHS RPJMD**	**Isu PB**			
		Optimalisasi Pengolahan Sanitasi, Limbah dan Sampah			
	Dokumen RPJMD	**Isu dan Permasalahan**			Hal.
		Isu Strategis 4. Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	182	• Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup • Ketahanan bencana dan perubahan iklim • Belum optimalnya ketahanan bencana dan perubahan iklim • Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana • Sumber daya air baku belum memadai • Kapasitas TPA sudah overload	170-178
5	**Laporan KLHS RPJMD**	**Isu PB**			
		Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut			
	Dokumen RPJMD	**Isu dan Permasalahan**			Hal.
		Isu Strategis 5. Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota	184	• Belum meratanya jalan dalam kondisi mantap • Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan • Sumber daya air baku belum memadai • Kapasitas TPA sudah overload • Akses permukiman layak belum optimal • Belum optimalnya akses dan kualitas perumahan • Belum terpenuhinya PSU pada lingkungan perumahan • Layanan transportasi publik belum optimal	170-178

INTEGRASI ISU

6	**Laporan KLHS RPJMD**	**Isu PB**			
		Keterbatasan dan Kerusakan Lahan			
	Dokumen RPJMD	**Isu dan Permasalahan**			Hal.
		Isu Strategis 6. Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni	185	• Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan • Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas • Perwujudan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas masih perlu dioptimalkan • Upaya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan masih perlu dioptimalkan • Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan • Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat • Masih adanya ancaman dan gangguan stabilitas sosial masyarakat • Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak	170-178
7	**Laporan KLHS RPJMD**	**Isu PB**			
		Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan			
	Dokumen RPJMD	**Isu dan Permasalahan**			Hal.
		Isu Strategis 7. Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	186	• Akuntabilitas kinerja belum optimal • Kemandirian keuangan daerah belum optimal • Kolaborasi lintas sektor belum optimal	170-178

INTEGRASI REKOMENDASI

1	**Laporan KLHS RPJMD**	**Rekomendasi**								**Isu PB**		**Data Gambaran Umum**	
		• Peningkatan infrastruktur pendukung kualitas dan cakupan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat melalui pengeloaan dan pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pengembangan SPAM untuk daerah rawan kekeringan dan pengembangan system tabungan air melalui sumur resapan, biopori, dan waduk • Penggunaan Teknologi Desalinasi sebagai alternatif sumber air baku di Kota Balikpapan • Peningkatan koordinasi dengan Kota Balikpapan dalam hal kerja sama pengelolaan sumber air baku utama dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan. • Pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk penyediaan air baku bagi rumah tangga, perdagangan dan jasa, industri serta pengendali banjir • Pencegahan masuknya bahan pencemar dari aktivitas pertanian khususnya Peternakan di sekitar Waduk Manggar, Waduk Teritip, Rencana Embung Haji Raden, Dll • Aksi Perubahan Waduk Manggar Segar • Pemantauan kualitas air pada air sungai, waduk, dan sumur pada kawasan – kawasan padat penduduk • Perubahan Koefisien Daerah Hijau : 48 % terbangun 52 % daerah hijau • Optimalisasi regulasi RTH private dan publik • Rekayasa Vegetasi dan pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalan sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim						• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program pemantauan, pengawasan dan penindakan terkait pencemaran air di sumber air baku Kota Balikpapan		Ketersediaan Air Baru		- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Dokumen RPJMD	**Tujuan Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Sasaran Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Strategi Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Program Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Isu dan Permasalahan**	**Hal.**	**Data Gambaran Umum**	**Hal.**
		Perekonomian daerah yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan berkelanjutan	198	• Menurunnya pengangguran terbuka • Menurunnya kesenjangan • Menurunnya tingkat kemiskinan • Terkendalinya angka Inflasi • Meningkatnya ketahanan pangan	189			• Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual • Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) • Program pengembangan umkm • Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	204-211	Isu Strategis 1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan • Perekonomian daerah didominasi oleh industri besar • Partisipasi angkatan kerja rendah • Kontribusi UMKM terhadap perekonomian belum optimal • Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian belum optimal • Belum optimalnya investasi daerah	Isu Strategis Hal 179 Permasalahan Hal 170-178		

2	**Laporan KLHS RPJMD**	**Rekomendasi**								**Isu PB**		**Data Gambaran Umum**	
		• Penurunan jumlah warga terdampak bencana diupayakan melalui program pencegahan, penanggulangan dan penangaan bencana diantaranya dengan program SKPD, alokasi anggaran, pendidikan dan pelatihan, pembentukan Desa Tangguh Bencana dan membentuk kemitraan. • Kota Balikpapan telah menyusun peta KRB untuk RDTR dengan melakukan penetapan zonasi disertai dengan arahan pemanfaatan lahan. • Pada zona merah, pemanfaatan lahan diarahkan pada kawasan lindung yang tidak boleh ada kegiatan di kawasan tersebut untuk meminimalisir risiko bencana • Dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan						• Program Penanggulangan Bencana • Program Penanganan Bencana • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pendidikan dan pelatihan • Program Desa Tanggap Bencana		Pengendalian Emisi GRK		- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Dokumen RPJMD	**Tujuan Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Sasaran Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Strategi Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Program Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Isu dan Permasalahan**	**Hal.**	**Data Gambaran Umum**	**Hal.**
		Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	199	• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	199			• Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	204-211	Isu Strategis 2. Penguatan SDM Berdaya Saing dan	Isu Strategis Hal 180		

				• Meningkatnya kualitas pendidikan • Meningkatnya kesetaraan gender				kesehatan masyarakat • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pengelolaan pendidikan • Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Program penempatan tenaga kerja • Program rehabilitasi sosial • Program pemenuhan hak anak (pha) • Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Program perlindungan khusus anak • Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Program peningkatan kualitas keluarga • Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan • Program pengelolaan pendidikan		Perlindungan Sosial Permasalahan • Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan • Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas • Perwujudan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas masih perlu dioptimalkan • Upaya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan masih perlu dioptimalkan	Permasalahan Hal 170-178		

INTEGRASI REKOMENDASI

<table>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>Laporan KLHS RPJMD</td><td colspan="3">Rekomendasi</td><td colspan="2">Isu PB</td><td>Data Gambaran Umum</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Peningkatan infrastruktur pendukung kualitas dan cakupan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat melalui pengeloaan dan pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM)
• Pengembangan SPAM untuk daerah rawan kekeringan dan pengembangan system tabungan air melalui sumur resapan, biopori, dan waduk
• Penggunaan Teknologi Desalinasi sebagai alternatif sumber air baku di Kota Balikpapan
• Peningkatan koordinasi dengan Kota Balikpapan dalam hal kerja sama pengelolaan sumber air baku utama dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan.
• Pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk penyediaan air baku bagi rumah tangga, perdagangan dan jasa, industri serta pengendali banjir
• Pencegahan masuknya bahan pencemar dari aktivitas pertanian khususnya Peternakan di sekitar Waduk Manggar, Waduk Teritip, Rencana Embung Haji Raden, Dll
• Aksi Perubahan Waduk Manggar Segar
• Pemantauan kualitas air pada air sungai, waduk, dan sumur pada kawasan – kawasan padat penduduk
• Perubahan Koefisien Daerah Hijau : 48 % terbangun 52 % daerah hijau
• Optimalisasi regulasi RTH private dan publik
• Rekayasa Vegetasi dan pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalan sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim</td><td>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
• Program pemantauan, pengawasan dan penindakan terkait pencemaran air di sumber air baku Kota Balikpapan</td><td></td><td>Ketersediaan Air Baru</td><td>- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup
- Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH
- Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td></td><td>Dokumen RPJMD</td><td>Tujuan Pembangunan Daerah</td><td>Hal.</td><td>Sasaran Pembangunan Daerah</td><td>Hal.</td><td>Strategi Pembangunan Daerah</td><td>Hal.</td><td>Program Pembangunan Daerah</td><td>Hal.</td><td>Isu dan Permasalahan</td><td>Hal.</td><td>Data Gambaran Umum</td><td>Hal.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Perekonomian daerah yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan berkelanjutan</td><td>198</td><td>• Menurunnya pengangguran terbuka
• Menurunnya kesenjangan
• Menurunnya tingkat kemiskinan
• Terkendalinya angka Inflasi
• Meningkatnya ketahanan pangan</td><td>189</td><td></td><td></td><td>• Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
• Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
• Program pengembangan umkm
• Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
• Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</td><td>204-211</td><td>Isu Strategis 1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

• Perekonomian daerah didominasi oleh industri besar
• Partisipasi angkatan kerja rendah
• Kontribusi UMKM terhadap perekonomian belum optimal
• Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian belum optimal
• Belum optimalnya investasi daerah</td><td>Isu Strategis Hal 179

Permasalahan Hal 170-178</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		Rekomendasi							**Isu PB**		**Data Gambaran Umum**	
	Laporan KLHS RPJMD	• Penurunan jumlah warga terdampak bencana diupayakan melalui program pencegahan, penanggulangan dan penangaan bencana diantaranya dengan program SKPD, alokasi anggaran, pendidikan dan pelatihan, pembentukan Desa Tangguh Bencana dan membentuk kemitraan. • Kota Balikpapan telah menyusun peta KRB untuk RDTR dengan melakukan penetapan zonasi disertai dengan arahan pemanfaatan lahan. • Pada zona merah, pemanfaatan lahan diarahkan pada kawasan lindung yang tidak boleh ada kegiatan di kawasan tersebut untuk meminimalisir risiko bencana • Dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan					• Program Penanggulangan Bencana • Program Penanganan Bencana • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pendidikan dan pelatihan • Program Desa Tanggap Bencana		Pengendalian Emisi GRK		- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
2	**Dokumen RPJMD**	**Tujuan Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Sasaran Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Strategi Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Program Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Isu dan Permasalahan**	**Hal.**	**Data Gambaran Umum**	**Hal.**
		Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	199	• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat • Meningkatnya kualitas pendidikan • Meningkatnya kesetaraan gender	199			• Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pengelolaan pendidikan • Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Program penempatan tenaga kerja • Program rehabilitasi sosial • Program pemenuhan hak anak (pha) • Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Program perlindungan khusus anak • Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Program peningkatan kualitas keluarga • Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan • Program pengelolaan pendidikan	204-211	Isu Strategis 2. Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial Permasalahan • Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan • Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas • Perwujudan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas masih perlu dioptimalkan • Upaya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan masih perlu dioptimalkan	Isu Strategis Hal 180 Permasalahan Hal 170-178		

		Rekomendasi					Isu PB	Data Gambaran Umum
3	**Laporan KLHS RPJMD**	• Peningkatan kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan pembinaan kualitas hidup keluarga terutama masyarakat miskin dan rentan. • Penyelenggaraan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk usia produktif yang belum mendapat pekerjaan melaluI pengembangan SDM berupa pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan, serta mendukung terciptanya wirausaha atau UKM dan penyejahteraan tenaga sektor informal. • Mempermudah akses modal bagi wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan memaksimalkan potensi koperasi. • Meningkatan upaya perlindungan sosial masyarakat, perempuan, dan anak melalui pemenuhan hak-hak dan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. • Meningkatkan upaya pelayanan dasar berupa sandang, pangan, papan yang layak bagi masyarakat miskin dan rentan serta memudahkan • Perlu aktualisasi dokumen kajian pengurangan risiko bencana. • Mengoptimalkan pelaksanaan RAD Perubahan Iklim. • Pembangunan Kolam retensi untuk penanggulangan bencana kekeringan di wilayah yang rentan mengalami kekeringan. • Memastikan pemanfaatan lahan zona merah risiko bencana pada RDTR sebagai kawasan lindung • Peningkatan frekuensi pelaksanaan pelatihan mitigasi berupa simulasi, dll. • Pemberdayaan Desa Tangguh Bencana				• Program Pemberdayaan Sosial • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera • Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) • Program Perlindungan Khusus Anak • Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Penanggulangan Bencana • Program Desa Tangguh Bencana		Dampak Bangkitan Pembangunan IKN	- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

	Tujuan Pembangunan Daerah	Hal.	Sasaran Pembangunan Daerah	Hal.	Strategi Pembangunan Daerah	Hal.	Program Pembangunan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
Dokumen RPJMD	Infrastruktur Kota Balikpapan yang berkualitas dan representatif	198	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	198			• Program penyelenggaraan jalan • Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase • Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) • Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	204-211	Isu Strategis 3. Maju Sebagai Mitra IKN	Isu Strategis Hal 188		

		Rekomendasi			Isu PB	Data Gambaran Umum
4	**Laporan KLHS RPJMD**	• Peningkatan penyediaan dan pengelolaan sanitasi yang berwawasan lingkungan melalui pengelolaan air limbah domestik (melaui optimalisasi IPAL terpusat) dan pengelolaan limbah industri, pengelolaan persampahan, dan pengembangan pengelolaan eco-drainase. • Selain itu juga diperlukan koordinasi dengan pemerintahan provinsi dalam peningkatan penyediaan septic tank melalui program kawasan permukiman karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini • Pengembangan TPA Manggar • Pembangunan dan Pengembangan TPS 3R yang terintegrasi • Optimalisasi bank sampah • Pengembangan IPAL Komunal untuk permukiman sepanjang bantaran sungai • Peningkatan penyuluhan atau sosialisasi untuk menanamkan menjaga kebersihan lingkungan dan pelaksaanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). • penyuluhan dan sosialisasi terkait pemilahan sampah; • penyediaan jasa layanan pengelolaan sampah; • Pengembangan eko-drainase. • Peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan sistem drainase dan saluran air yang telah ada sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengalirkan genangan air, terutama akibat perkembangan kota, seperti untuk mencegah banjir, salah satunya melalui koordinasi, baik dalam Kota Balikpapan dan/atau koordinasi lintas sektor/kewenangan. • Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut, termasuk juga pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. • Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat • Pengadaan taman atau RTH di setiap blok kawasan untuk menjaga kelestarian lingkungan, Kota Balikpapan telah memiliki Taman Keanekaragaman Hayati. • Pengadaan anggaran untuk pemulihan dan rehabilitasi fungsi kawasan akibat pencemaran lingkungan, • Penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah melalui budaya buang sampah pada tempatnya. Hal ini dapat dilakukan bersama, melalui persuasi dari pemerintah daerah, pemerintah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, hingga warga setempat • Pemberdayaan masyarakat setempat dan kerjasama antar wilayah dalam upaya pengurangan timbulan sampah atau pengelolaan sampah. Seperti dengan melakukan 3R (reduce reuse recycle), melalui pembekalan keterampilan dalam pendaurulangan sampah. Dilakukan pengembangan 3R (reduce, reuse, recycle) di Dukuh Semar yang mulai dilaksanakan tahun ini • Dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan	• Program Peningkatan atau Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan • Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Kawasan Permukiman • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Program Kawasan Permukiman • Program Pengembangan Permukiman • Program Pengembangan Perumahan • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Optimalisasi Pengolahan Sanitasi, Limbah dan Sampah	- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

	Tujuan Pembangunan Daerah	Hal.	Sasaran Pembangunan Daerah	Hal.	Strategi Pembangunan Daerah	Hal.	Program Pembangunan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
Dokumen RPJMD	Lingkungan Kota Balikpapan yang Berkualitas dan Berketahanan Iklim	198	• Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup • Mengurangi Risiko bencana akibat perubahan iklim • Meningkatnya perencanaan tata ruang yang berkualitas	198-199			• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Program pengelolaan persampahan • Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional • Program pengelolaan sumber daya air (SDA) • Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat • Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat • Program penyelenggaraan penataan ruang • Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	204-211	Isu Strategis 4. Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana • Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup • Ketahanan bencana dan perubahan iklim • Belum optimalnya ketahanan bencana dan perubahan iklim • Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana • Sumber daya air baku belum memadai • Kapasitas TPA sudah overload	Isu Strategis Hal 182 Permasalahan Hal 170-178		

5	**Laporan KLHS RPJMD**	**Rekomendasi**					• Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kota/Kota • Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam • Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota/Kota • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		**Isu PB**		**Data Gambaran Umum**	
		• Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kota/Kota • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut		- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Dokumen RPJMD	**Tujuan Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Sasaran Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Strategi Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Program Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Isu dan Permasalahan**	**Hal.**	**Data Gambaran Umum**	**Hal.**
		Lingkungan Kota Balikpapan yang Berkualitas dan Berketahanan Iklim	198	• Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup• Mengurangi Risiko bencana akibat perubahan iklim• Meningkatnya perencanaan tata ruang yang berkualitas	198-199			• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum• Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah• Program pengelolaan persampahan• Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional• Program pengelolaan sumber daya air (SDA)• Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat• Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat• Program penyelenggaraan penataan ruang• Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	204-211	Isu Strategis 5. Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota• Belum meratanya jalan dalam kondisi mantap• Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan• Sumber daya air baku belum memadai• Kapasitas TPA sudah overload• Akses permukiman layak belum optimal• Belum optimalnya akses dan kualitas perumahan• Belum terpenuhinya PSU pada lingkungan perumahan• Layanan transportasi publik belum optimal	Isu Strategis Hal 184Permasalahan Hal 170-178		

		Rekomendasi			Isu PB	Data Gambaran Umum
6	**Laporan KLHS RPJMD**	• Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kota • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan • Sinkronisasi dan Kerjasama untuk Menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya	• Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya • Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam • Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota/Kota • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Keterbatasan dan Kerusakan Lahan	- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

	Tujuan Pembangunan Daerah	Hal.	Sasaran Pembangunan Daerah	Hal.	Strategi Pembangunan Daerah	Hal.	Program Pembangunan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
Dokumen RPJMD	Lingkungan Kota Balikpapan yang Berkualitas dan Berketahanan Iklim	198	• Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup • Mengurangi Risiko bencana akibat perubahan iklim • Meningkatnya perencanaan tata ruang yang berkualitas	198-199			• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Program pengelolaan persampahan • Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional • Program pengelolaan sumber daya air (SDA) • Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat • Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat • Program penyelenggaraan penataan ruang • Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	204-211	Isu Strategis 6. Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni • Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan • Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas • Perwujudan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas masih perlu dioptimalkan • Upaya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan masih perlu dioptimalkan • Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan • Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat • Masih adanya ancaman dan gangguan stabilitas sosial masyarakat • Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak	Isu Strategis Hal 185 Permasalahan Hal 170-178		

7		**Rekomendasi**							**Isu PB**		**Data Gambaran Umum**
	Laporan KLHS RPJMD	• Dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenanganPerlu dilakukan penyusunan peta kerawanan pangan untuk membantu dalam pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada wilayah kerawanan rangan. • Kerjasama antar lembaga untuk mempertahankan pangan, misalnya dengan bulog dan lembaga terkait lainnya. Kerjasama antar desa/kelurahan juga perlu dilakukan dengan dibantu fasilitasi oleh pemerintah kota, salah satunya dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan distribusi pangan. • Pengelolalaan kawasan sekitar LP2B dan memberikan batasan kawasan yang tegas untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan. • Optimalisasi pemanfaatan dan penataan lahan yang ada sebagai pendukung pemenuhan pangan, bukan produksi pangan. • Saat ini sedang dikembangkan pertanian dengan pemanfaatan lahan sempit, seperti urban farming, pertanian Verticulture, dan Kegiatan Kampung Pangan Lestari dan Hijau (KPLH) dengan memanfaatkan pinggir jalan dan halaman rumah dibudidayakan tanaman2 penghasil pangan dalam polybag. KPLH juga memanfaatkan gang dan pekarangan warga agar terbentuk suatu kawasan yang hijau dan kaya sumber pangan yang diproduksi sendiri • Pengelolaan dan pengawasan LP2B dan kawasan sekitar LP2B, serta penggunaan sarana dan infrastruktur pendukung pertanian agar dapat memberikan hasil yang optimal. Peningkatan mutu dari benih, bibit ternak, hingga pakan ternak juga penting untuk dilakukan. • Pemberdayaan masyarakat dan para pemuda dalam optimalisasi pertanian melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas Saat ini, • Fasilitasi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, seperti dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan infrastuktur sarana prasarana dan kelembagaan. • Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar (termasuk mutu dan kualitas) pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. • Pengawasan dan perketat perizinan dan peredaran bahan pangan untuk menghindari pangan dengan kualitas tidak baik beredar di masyarakat. • Kota Balikpapan juga melakukan kampanye tentang gemar makan sayur dan buah, serta gemar makan ikan. Perlu adanya koordinasi dengan pihak yang bekerja di bidang kesehatan dalam upaya peningkatan nutrisi dan kualitas bahan pangan. • Optimalisasi pemanfaatan dan penataan lahan yang ada sebagai pendukung pemenuhan pangan dan produksi pangan. • pengembangan dengan pemanfaatan lahan sempit, seperti urban farming, pertanian Verticulture, dengan memanfaatkan pinggir jalan dan halaman rumah dibudidayakan tanaman-tanama penghasil pangan dalam polybag						• Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Hubungan Industri • Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengelolaan Tanah Kosong • Program Penatagunaan Tanah • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Perizinan Usaha Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan		- Kinerja Jasa Lingkungan Hidup - Perkiraan Mengenai dampak Resiko LH - Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Dokumen RPJMD	**Tujuan Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Sasaran Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Strategi Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Program Pembangunan Daerah**	**Hal.**	**Isu dan Permasalahan**	**Hal.**	**Data Gambaran Umum**	**Hal.**
		Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	198	• Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas • Pelayanan publik prima	198			• Program kepegawaian daerah • Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi • Program pengelolaan aplikasi informatika • Program penyelenggaraan pengawasan	204-211	Isu Strategis 7. Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif • Akuntabilitas kinerja belum optimal • Kemandirian keuangan daerah belum optimal • Kolaborasi lintas sektor belum optimal	Isu Strategis Hal 186 Permasalahan Hal 170-178		